



LRT JAKARTA

A member of the **JAKPRO** Group of Companies



Focus on Business **ACCELERATION**

Fokus pada Akselerasi Bisnis



2024

Laporan Tahunan
Annual Report



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2021

**The Pursuit of
Inclusive Growth**

**Mengejar
Pertumbuhan Inklusif**

2022

**Building Foundation
for Sustainable
Growth**

**Membangun Fondasi
untuk Pertumbuhan
Berkelanjutan**

2023

**Drive Collaboration
and Strengthening
the Foundation for
the Future**

**Mendorong Kolaborasi
dan Memperkuat Fondasi
untuk Masa Depan**



Sekapur Sirih

Foreword



Focus on Business

ACCELERATION

Fokus pada Akselerasi Bisnis

Sebagai wujud komitmen untuk mencapai *Service & Operation Excellence* sesuai mandat pemegang saham, maka LRT Jakarta sepanjang tahun 2024 fokus untuk mengakselerasi kinerja usahanya melalui beragam inisiatif strategis. Di antara upaya yang dilakukan adalah meningkatkan *Ridership* serta mendorong *brand positioning* dan *awareness* mengenai LRT Jakarta. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan telah melakukan sinergi promosi dan event dengan Jakpro Group dan para *stakeholder* lainnya. Di tahun ini pula, Perseroan pertama kalinya berhasil untuk mengkomersialisasikan stasiun kepada pihak ketiga melalui pemberian *naming rights* sebagai lingkup kerja sama dengan Summarecon Mal Kelapa Gading (SMKG). Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari bisnis *non-farebox* namun juga akan memperkuat *brand awareness* mengenai LRT Jakarta di mata publik luas dan pada akhirnya akan memperkuat kinerja Perseroan di masa datang.

As our commitment toward *Service & Operation Excellence* as mandated by our shareholders, LRT Jakarta in the course of 2024 focused on accelerating its business performance through various strategic initiatives. Among the efforts were to increase ridership and promote brand positioning and awareness of LRT Jakarta. The Company accordingly has built a synergy in promotional activities and events with Jakpro Group and other stakeholders. This year, the Company also for the first time succeeded to commercialize a station to third parties by granting the naming rights, as part of cooperation with Summarecon Mal Kelapa Gading (SMKG). The success will not only increase revenue from the non-farebox business but also strengthens LRT Jakarta brand awareness in the communities and ultimately improve the Company's performance in the future.



Daftar Isi

Table of Contents

Kesinambungan Tema Theme Continuity	
Sekapur Sirih Foreword	1
Daftar Isi Table of Contents	2

1 KINERJA UTAMA 2024 2024 Performance Highlights

Performa 2024 2024 Performance	6
Ikhtisar Data Keuangan Penting Highlight of Important Financial Data	8
Ikhtisar Operasional Operational Overview	14
Kinerja Operasi Segmen Operation & Services Operation & Services Segment Operational Performance	14
Kinerja Perawatan Prasarana Infrastructure Maintenance Performance	16
Ikhtisar Saham Share Summary	19
Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds	20
Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya Information About Other Funding Sources	22
Peristiwa Penting Significant Events	22

2 Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report	28
Laporan Direksi The Board of Directors' Report	34

3 Profil Perusahaan Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Corporate Identity	44
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	45
Keanggotaan Asosiasi Membership in Association	46
Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan Significant Changes in the Company	46
Jejak Langkah Milestones	47
Kegiatan dan Bidang Usaha Business Activities and Lines of Business	49
Pengembangan Produk dan Jasa Product and Service Development	50
Wilayah Operasi Operational Area	51
Visi, Misi, Sikap Dasar dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, Core Attitude and Corporate Culture	52
Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai Perusahaan Socialization and Internalization of the Corporate Values	53
Struktur Organisasi Organization Structure	54
Penghargaan Awards	56
Sertifikasi Certifications	57

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	58
Profil Direksi Board of Directors' Profile	62
Pejabat Eksekutif Executive Officers	66
Demografi Karyawan dan Sekilas Tentang Pengembangan Kompetensi Employee Demographics and Competency Development	75
Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development	77
Biaya Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Employee Training and Development Costs	78
Pendidikan dan/atau Pengembangan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management Unit	79
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	81
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	85
Informasi Tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV) Joint Ventures (JV), And Special Purpose Vehicle (SPV) Information on Subsidiaries, Associated Entities,	86
Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham Share Listing and Issuance Chronology	86
Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing and Issuance Chronology	86
Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions	87

4 Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion & Analysis on Company's Performance

Tinjauan Makroekonomi Macroeconomic Overview	90
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review of Business Segments	92
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	100
Tinjauan Keuangan Financial Review	101
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Solvency And Collectability Rate	107
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	108
Pencapaian Target dengan Realisasi dan Target/Proyeksi Ke Depan Target Achievement, Realization, and Projections	110
Kebijakan dan Pembagian Dividen Dividend Policy and Distribution	112
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	112
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	112
Informasi Material untuk Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information for Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring	114

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	115
Aspek Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara Tax Aspects and Contribution to the State	115
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	116
Prospek Usaha Business prospect	119
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date	120

5 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function

Tata Kelola Sumber Daya Manusia Human Resources Governance	124
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	134

6 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Policy	146
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Continuous Development of Corporate Governance Implementation	149
Struktur Tata Kelola Governance Structure	152
Dewan Komisaris Board of Commissioners	170
Direksi Board of Directors	180
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Information Transparency Regarding The Board of Commissioners and Board of Directors	202
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of The Board of Commissioners	218
Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of The Board of Directors	226
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	238
Manajemen Risiko Risk Management	240
Perkara Penting Significant Cases	244
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	244
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	245
Pedoman Perilaku Perusahaan Company Code of Conduct	246
Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	248
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Policy	251
Kebijakan Terkait Aktivitas Politik dan Sosial Organisasi Policies Related To Political Activities and Social Organization	253
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials' Assets Report (LHKPN)	253
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	254
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	257
Transparansi Praktik Bad Governance Transparency of Bad Governance Practice	261

7 Laporan Keberlanjutan Perusahaan Corporate Social Responsibility

Ikhtisar Keberlanjutan Sustainability Highlights	264
Komitmen dan Kebijakan Penerapan Keberlanjutan Commitment and Policy of Sustainability Implementation	269
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	269
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	272
Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build A Culture of Sustainability	281
Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility Related to Fair Operations	282
Tanggung Jawab Sosial terkait Hak Asasi Manusia Social Responsibility Related to Human Rights	285
Kinerja Ekonomi Economic Performance	287
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance	290
Kinerja Sosial Social Performance	297
Komitmen Untuk Memberikan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara pada Konsumen Commitment to Provide Equal Products and/or Services to Consumers	310
Tanggung Jawab dan Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility and Development of Sustainable Products/Services	310
Tentang Laporan Keberlanjutan 2024 About Sustainability Report 2024	320
Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	322
Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback on The Previous Year's Sustainability Report	323
Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa List of Disclosures in Accordance with Authority Regulation Services	324
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 PT LRT Jakarta Statement Letter of the Members of the Board of Commissioners Regarding The Responsibility for the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta	
Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 PT LRT Jakarta Statement Letter of the Members of the Board of Directors Regarding The Responsibility for the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta	

8 Laporan Keuangan Financial Report



01

KINERJA UTAMA 2024

2024 Performance Highlights

Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp265,23 miliar dan laba usaha sebesar Rp7,8 miliar. Mayoritas kontribusi pendapatan LRT Jakarta masih ditopang oleh pendapatan subsidi sebesar 94%.

The Company successfully recorded Rp265.23 billion of revenue and Rp7.8 billion of operating profit. The majority of LRT Jakarta's revenue was mostly or 94% derived from subsidies.







Performa 2024

2024 Performance

REALISASI KOMITMEN UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS PERUSAHAAN

Realized Commitments
to Support the Company's
Business Continuity





265 Miliar
Billion

Capaian Pendapatan
Revenue



99,87%

Ketepatan Waktu
On Time Performance



1.226.817

Jumlah Pelanggan
Total Customers



99,6%

Ketersediaan Aset
Availability Assets



93%

Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction
Index



99,22%

Pencapaian Standar Pelayanan
Minimum (SPM) rata-rata
Average Minimum Service
Standard (SPM)



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Highlight of Important Financial Data

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

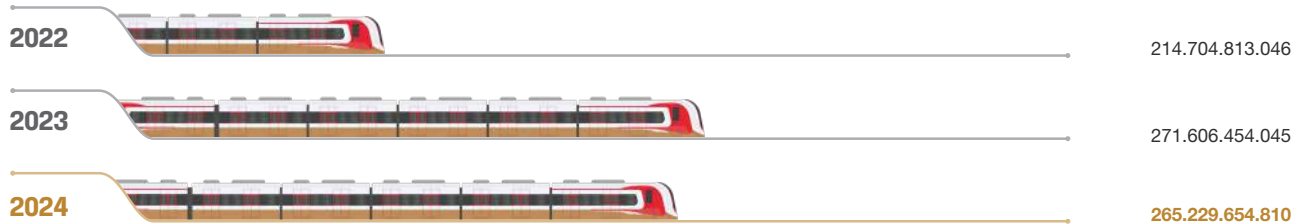
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain/Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	YoY 2023-2024 (Rp)	YoY 2023-2024 (%)
Pendapatan Revenue	265.229.654.810	271.606.454.045	214.704.813.046	(6.376.799.235)	(2,35%)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(162.064.701.705)	(170.163.884.005)	(143.921.284.817)	(8.099.182.300)	(4,76%)
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	103.164.953.105	101.442.570.040	70.783.528.229	1.722.383.065	1,70%
BEBAN USAHA Operating Expenses					
Beban Penjualan Selling Expenses	(848.039.984)	(536.300.537)	(91.599.041)	(311.739.447)	58,13%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(94.481.080.650)	(85.492.101.782)	(62.451.178.319)	(8.988.978.868)	10,51%
Jumlah Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi Total Selling Expenses and General and Administrative Expenses	(95.329.120.634)	(86.028.402.319)	(62.542.777.360)	(9.300.718.315)	10,81%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	7.835.832.471	15.414.167.721	8.240.750.869	(7.578.335.250)	(49,16%)
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA Other Income/Expenses					
Pendapatan Lainnya Other Income	5.163.313.864	6.824.552.243	9.669.366.135	(1.661.187.093)	(24,34%)
Beban Lainnya Other Expenses	(447.418.870)	(2.588.267.531)	(6.922.304.021)	2.140.797.379	(82,71%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	12.551.727.469	19.650.452.433	10.987.812.983	(7.098.724.964)	(36,12%)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Income Tax Benefit (Expense)					
Pajak Kini Current Tax	-	-	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(6.462.350.393)	276,57%
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Total Income Tax Benefit (Expense)	(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(6.462.350.393)	276,57%
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Other Comprehensive Income (Expense)					
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Actuarial Gain on Employee	2.367.641.534	(2.201.864.827)	365.673.366	4.569.506.361	207,53%
Dampak Pajak Income Tax Effect	(520.881.137)	484.410.262	(80.448.141)	(1.005.291.399)	(207,53%)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	1.846.760.397	(1.717.454.565)	285.225.225	3.564.214.962	207,53%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	5.599.546.292	15.596.406.687	8.508.120.196	(9.996.860.395)	(64,10%)

Pendapatan

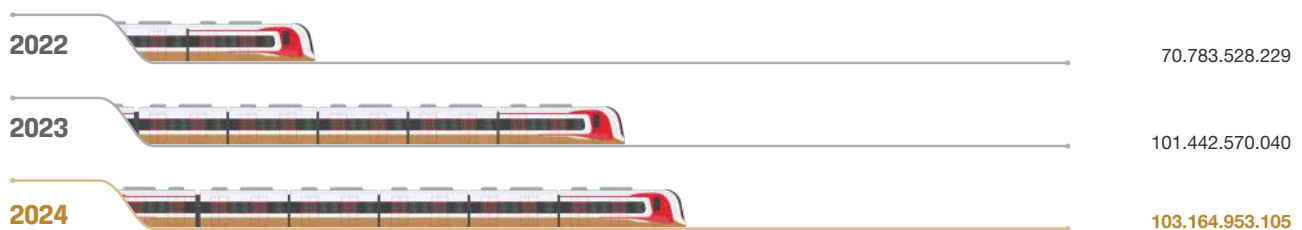
Revenue

(Disajikan dalam jutaan Rupiah/in full million IDR)

**Laba (Rugi) Kotor**

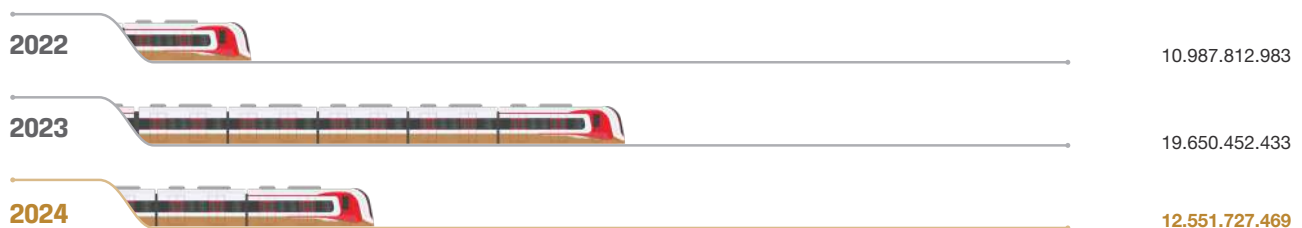
Gross Profit (Loss)

(Disajikan dalam jutaan Rupiah/in full million IDR)

**Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan**

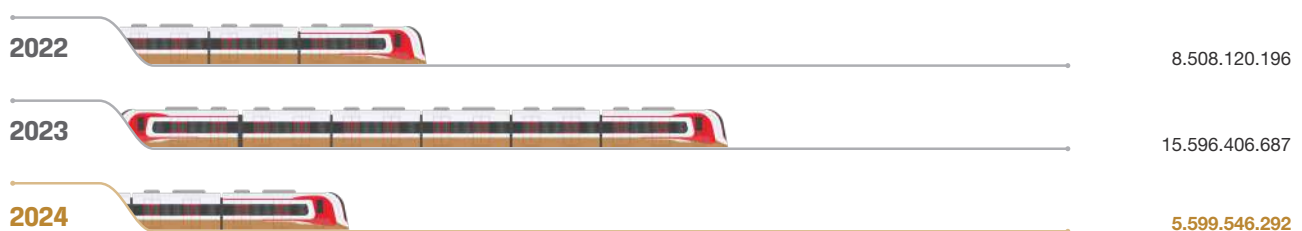
Profit (Loss) Before Income Tax

(Disajikan dalam jutaan Rupiah/in full million IDR)

**Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

Comprehensive Income for the Year

(Disajikan dalam jutaan Rupiah/in full million IDR)





Laporan Posisi Keuangan

Report of Financial Position

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain/Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	YoY 2023-2024 (Rp)	YoY 2023-2024 (%)
ASET Assets					
ASET LANCAR Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	170.231.113.036	120.641.665.365	114.030.489.408	49.589.447.671	41,10%
Deposito Time Deposits	0	43.699.794.842	15.000.000.000	(43.699.794.842)	0,00%
Piutang Usaha Account Receivables					
Pihak Berelasi Related Parties	3.431.571.911	2.617.964.953	2.528.613.103	813.606.958	31,08%
Pihak Ketiga Third Parties	1.189.134.901	2.938.633.000	897.894.855	(1.662.930.199)	(58,31%)
Persediaan Supplies	34.536.112.775	12.946.218.960	-	21.589.893.815	166,77%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Revenue	2.219.098.832	2.473.679.351	1.680.210.678	(254.580.519)	(10,29%)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	121.416.455	120.966.635	758.993.967	449.820	0,37%
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	4.286.161.490	3.122.035.680	2.466.150.082	1.164.125.810	37,29%
Uang Muka Advance	378.255.965	816.508.511	822.953.530	(438.252.546)	(53,67%)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	216.392.865.365	189.290.899.397	138.185.305.623	27.101.965.968	14,32%
ASET TIDAK LANCAR Non-Current Assets					
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalents	335.392.206	16.606.372	33.225.607	318.785.834	1.919,66%
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	170.711.656.061	180.554.354.151	187.619.512.920	(9.842.698.090)	(5,45%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	0	8.811.083.964	10.663.264.884	(8.811.083.964)	(100,00%)
Aset Tak Berwujud - Bersih Intangible Assets - Net	2.509.199.988	2.815.747.970	2.851.866.031	(306.547.982)	(10,89%)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	173.556.248.255	192.197.792.457	201.167.869.442	(18.641.544.202)	(9,70%)
Jumlah Aset Total Assets	389.949.113.620	381.488.691.854	339.353.175.065	8.460.421.766	2,22%

Uraian Description	2024	2023	2022	YoY 2023-2024 (Rp)	YoY 2023-2024 (%)
LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilities and Equity					
LIABILITAS JANGKA PENDEK Current Liabilities					
Utang Usaha Account Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	0	11.089.608.167	2.217.932.978	(11.089.608.167)	(100,00%)
Pihak Ketiga Third Parties	39.412.546.498	35.692.162.441	23.293.483.129	3.720.384.057	10,42%
Utang Pajak Tax Payables	1.175.410.682	2.443.277.936	1.422.624.046	(1.267.867.254)	(51,89%)
Beban Akrua Accrued Expenses	3.408.796.572	7.639.438.934	8.706.503.882	(4.320.642.362)	(55,38%)
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenues	6.377.957.710	2.992.679.506	746.250.000	3.385.278.204	113,12%
Jaminan dan Uang Muka Lainnya Guaranties and Other Advances	234.175.518	355.047.818	1.318.603.833	(120.872.300)	(34,04%)
Utang Retensi Retention Payables	99.636.512	116.397.499	28.228.600	(16.760.987)	(14,40%)
Utang Lain-Lain Other Payables	0	-	107.558.905	0	N/A
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	50.708.523.492	60.328.612.301	37.841.185.373	(9.620.088.809)	(15,95%)
LIABILITAS JANGKA PANJANG Long-Term Liabilities					
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Post Employment Benefits	7.553.182.194	5.865.367.835	1.813.684.658	1.687.814.359	28,78%
Kewajiban Pajak Tangguhan Deferred Tax Liability	508.738.747	0	0	508.738.747	100,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	8.061.920.941	5.865.367.835	1.813.684.658	2.196.553.106	37,45%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	58.770.444.433	66.193.980.136	39.654.870.031	(7.423.535.703)	(11,21%)
EKUITAS Equity					
Modal Saham Share Capital	333.893.400.000	333.893.400.000	333.893.400.000	0	100,00%
Saldo Laba (Rugi) Profit (Loss) Balance	(2.714.730.813)	(18.598.688.282)	(34.195.094.966)	15.883.957.469	85,40%
Jumlah Ekuitas Total Equity	331.178.669.187	315.294.711.718	299.698.305.034	15.883.957.469	5,04%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	389.949.113.620	381.488.691.854	339.353.175.065	8.460.421.766	2,22%



Laporan Arus Kas

Report of Cash Flow

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain/Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	YoY 2023-2024 (Rp)	YoY 2023-2024 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	7.816.516.819	41.533.376.617	48.378.682.322	(33.716.859.798)	(81,18%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	41.772.930.852	(34.922.200.660)	(21.463.126.396)	76.695.131.512	219,62%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	0	-	-	0	N/A
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	49.589.447.671	6.611.175.957	26.915.555.926	42.978.271.714	650,09%
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash Balance and Cash Equivalent at Beginning of the Year	120.641.665.365	114.030.489.408	87.114.933.482	6.611.175.957	5,80%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash Balance and Cash Equivalent at End of the Year	170.231.113.036	120.641.665.365	114.030.489.408	49.589.447.671	41,10%

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

Financial Ratios and Other Key Ratios

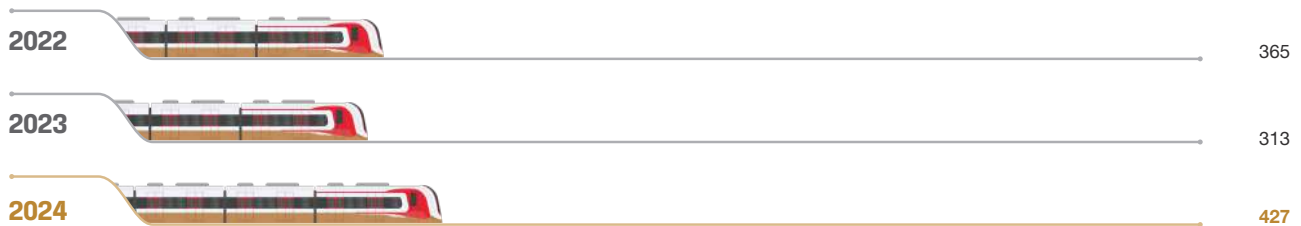
Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
PROFITABILITAS Profitability				
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)	%	1,44	4,09	2,42
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	%	1,69	4,95	2,74
Imbal Hasil Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	2,18	6,21	2,42
LIKUIDITAS Liquidity				
Rasio Lancar Current Ratio	%	427	313	365
Rasio Kas Cash Ratio	%	290	199	301
Rasio Cepat Quick Ratio	%	290	199	301
AKTIVITAS Activities				
Perputaran Piutang Accounts Receivable Turnover	kali	12,5	7,46	15,73
Perputaran Aset Asset Turnover	kali	0,68	0,71	0,65
STRUKTUR MODAL KERJA Working Capital Structure				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	%	17,75	20,99	13,23
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liability to Asset Ratio	%	15,07	17,35	11,69
Rasio Modal Sendiri terhadap Aset Equity to Asset Ratio	%	84,93	82,65	88,31

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
MARGIN				
Margin				
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	38,90	37,35	32,97
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	2,95	5,68	3,84
Margin Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year Margin	%	2,11	5,74	3,96
EBITDA EBITDA	miliar/billion	19,9	26,9	21,1
PERTUMBUHAN				
Growth				
Pendapatan Bersih Net Income	%	(2,35)	110,56	59,81
Labas Usaha Operating Profit	%	(49,16)	87,05	149,53
Labas Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year	%	(64,10)	83,31	160,42
Ekuitas Equity	%	5,04	5,20	2,92
Aset Assets	%	2,22	12,42	6,29

Rasio Lancar

Current Ratio

(Disajikan %/in %)



Margin Laba Kotor

Gross Profit Margin

(Disajikan %/in %)





Ikhtisar Operasional

Operasional Overview

Kinerja Segmen Pengembangan Bisnis

Business Development Segment Performance

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain/Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Pendapatan Sewa Menyewa Lease Income	3.890.990.750	2.410.500.663	1.480.490.087	61,42%
Periklanan Advertising	24.761.221	2.817.078	21.944.143	778,97%
Jasa Penjualan Teknis Technical Sales Service	6.662.562.028	5.884.424.060	778.137.968	13,22%
Jasa Pelatihan Training Service	537.838.340	61.005.540	476.832.800	781,62%
Kerjasama Penyelenggaraan Perparkiran Cooperation in the Implementation of Parking	654.207.505	-	654.207.505	n/a
Jumlah Total	11.770.359.844	8.358.747.341	3.411.612.503	40,81%

Kinerja Operasi Segmen Operation & Services

Operational Performance of Operation & Services Segment

Pola Operasi LRT Jakarta

LRT Jakarta Operational Pattern

Bulan Month	Periode Period	Jam Operasi Operational Hours	Jumlah Perjalanan KA Number of Trips	Headway
Januari/January	01 – 31 Januari/January 2024	05.30-23.00	6.324	10 menit/minutes
Februari/February	01 – 28 Februari/February 2024	05.30-23.00	5.898	10 menit/minutes
Maret/March	01 – 31 Maret/March 2024	05.30-23.00	6.321	10 menit/minutes
April/April	01 – 30 April 2024	05.30-23.00	6.120	10 menit/minutes
Mei/May	01 – 31 Mei/May 2024	05.30-23.00	6.324	10 menit/minutes
Juni/June	01 – 30 Juni/June 2024	05.30-23.00	6.117	10 menit/minutes
Juli/July	01 – 31 Juli/July 2024	05.30-23.00	6.303	10 menit/minutes
Agustus/August	01 – 31 Agustus/August 2024	05.30-23.00	6.324	10 menit/minutes
September/September	01 – 30 September 2024	05.30-23.00	6.112	10 menit/minutes
Oktober/October	01 – 31 Oktober/October 2024	05.30-23.00	6.322	10 menit/minutes
November/November	01 – 30 November 2024	05.30-23.00	6.120	10 menit/minutes
Desember/December	01 – 07 Desember/December 08 Desember/December 09 – 30 Desember/December 31 Desember/December	05.30 – 23.00 04.30 – 23.00 05.30 – 23.00 05.30 – 02.00	6.360	10 menit/minutes

Berikut data jumlah pelanggan yang diangkut selama tahun 2024:
The following data on the number of customers transported during 2024:

Bulan Month	Jumlah Pelanggan Number of Passengers	Jumlah Rata-Rata Pelanggan Harian Average Number of Daily Passengers
Januari/January	96.841	3.124
Februari/February	91.531	3.156
Maret/March	91.595	2.955
April/April	88.899	2.963
Mei/May	96.550	3.115
Juni/June	102.707	3.425
Juli/July	134.894	4.351
Agustus/August	129.080	4.164
September/September	96.628	3.221
Oktober/October	101.848	3.285
November/November	92.855	3.095
Desember/December	103.330	3.333

KETEPATAN WAKTU TEMPUH KERETA PER LINTAS
TRAIN ON TIME PERFORMANCE PER LINE

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penyediaan layanan yang memuaskan bagi pelanggan, Perseroan harus menjaga ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun dan ketepatan waktu tempuh kereta per lintas.

As a part of its commitment to providing satisfactory services to customers, the Company must maintain train arrival time punctuality between stations, the train dwell time punctuality at stations and train travel time punctuality of per line.

Ketepatan waktu kedatangan kereta per lintas disampaikan pada tabel berikut:
The train arrival time punctuality per line is presented in the following table:

Bulan Month	Persentase Ketepatan Percentage of Punctuality
Januari/January	99,98%
Februari/February	99,76%
Maret/March	99,97%
April/April	99,87%
Mei/May	99,98%
Juni/June	99,91%
Juli/July	99,59%
Agustus/August	99,95%
September/September	99,74%
Oktober/October	99,83%
November/November	99,94%
Desember/December	99,83%
Rata-rata/Average	99,86%

Bulan Month	Persentase SPM Percentage of SPM
Januari/January	98,50%
Februari/February	99,31%
Maret/March	99,48%
April/April	99,39%
Mei/May	99,56%
Juni/June	99,90%
Juli/July	98,55%
Agustus/August	99,15%
September/September	98,57%
Oktober/October	99,00%
November/November	99,52%
Desember/December	99,08%
Rata-rata/Average	99,20%



Kinerja Perawatan Prasarana

Infrastructure Maintenance Performance

Menjaga kenyamanan dan keselamatan pelanggan serta karyawan adalah prioritas utama bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah melakukan perawatan fasilitas publik sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan. Pada tahun 2024, Perseroan mencatat *asset availability* mencapai 99,17% dari target yang ditetapkan sebesar 98%. Kegiatan perawatan yang dilakukan mencakup perbaikan, peningkatan kualitas dan percepatan dalam melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan prasarana perkeretaapian dari segi jalur, jalan layang dan bangunan, persinyalan, telekomunikasi dan fasilitas operasi.

Maintaining the comfort and safety of customers and employees is a top priority of the Company. Therefore, the Company has carried out the public facility maintenance as part of improved service quality. In 2024, the Company recorded asset availability at 99.17% of the baseline target at 98%. The maintenance activities include repairs, quality improvement and accelerated maintenance and inspection of railway infrastructure in terms of lines, overpasses and buildings, signaling, telecommunications and operating facilities.

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan/Work Volume		
	Target/Target	Realisasi/Realization	Persentase/Percentage
Jalur dan Jalan Layang Railroads and Overpasses	938	938	100%
Bangunan Buildings	2.414	2.414	100%
Persinyalan, Telekomunikasi & Fasilitas Pertiketan Signaling, Telecommunication & Ticketing Facilities	7.046	7.046	100%
Sistem Kelistrikan Electricity System	2.307	2.307	100%

Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perawatan prasarana, Perseroan didukung oleh karyawan pelaksana yang memiliki sertifikasi khusus. Pada tahun 2024, karyawan pelaksana pemeriksaan dan perawatan prasarana fasilitas operasi yang bersertifikasi mencapai 25-28 orang atau 100%. Sementara itu, untuk memastikan kualitas prasarana jalur dan bangunan, Perseroan didukung oleh 10 karyawan pelaksana bersertifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan prasarana jalur dan bangunan.

To support the implementation of infrastructure inspection and maintenance work, the Company is supported by implementing employees who have special certifications. By 2024, the number of certified employees for inspection and maintenance of operating facility infrastructure will reach 25-28 people or 100%. Meanwhile, to ensure the quality of track and building infrastructure, the Company is supported by 10 certified implementing employees who are tasked with inspecting and maintaining track and building infrastructure.

Daftar Sertifikasi SDM Prasarana

List of Certifications for Infrastructure Personnel

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Tersertifikasi di Tahun 2024 Number of Certified Employees in 2024 (orang/person)	Jumlah Karyawan Tersertifikasi di Tahun 2023 Number of Certified Employees in 2023 (orang/person)
Pemeriksa Prasarana Kompetensi Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Maintenance Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	28	26
Perawat Prasarana Kompetensi Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Inspection Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	25	23
Pemeriksa Prasarana Kompetensi Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Inspection Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10	7
Perawat Prasarana Kompetensi Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Maintenance Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10	7

REALISASI PERAWATAN SARANA REALIZATION OF INFRASTRUCTURE MAINTENANCE

Untuk mewujudkan kegiatan operasional yang bertanggung jawab dan sesuai standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, Perseroan melakukan perawatan kereta untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan pelanggan selama perjalanan.

Pada tahun 2024, perawatan kereta dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Di bawah pengawasan Divisi Sarana, pekerjaan perawatan sarana dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompetensi kecakapan dan sertifikasi tertentu sehingga perawatan kereta dapat dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Setiap rangkaian kereta LRT Jakarta atau “*Light Rail Vehicle*” (LRV) wajib mengikuti dua jenis pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan fisik dan kebersihan kereta dalam kondisi yang sangat baik dan aman untuk dioperasikan. Rangkaian kegiatan perawatan kereta meliputi pekerjaan perawatan harian, mingguan dan bulanan, yang seluruhnya dilakukan di Depo. Jenis perawatan kereta terdiri dari perawatan ringan (*light maintenance*) dan perawatan berat (*heavy maintenance*). Perawatan ringan dilakukan setiap tujuh hari dan empat bulan, sedangkan perawatan berat dilakukan setiap empat tahun dan delapan tahun.

Tahapan pemeriksaan dan perawatan ringan meliputi pemeriksaan seluruh fungsi dan kebersihan kereta serta pemeriksaan seluruh komponen kereta. Sementara itu, tahapan perawatan besar yang dilakukan atau “*overhaul*” mencakup pembongkaran dan pemeriksaan seluruh bagian dan komponen kereta. Jika terdapat kerusakan pada unit kereta, maka Perseroan segera melakukan perbaikan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan. Demikian pula jika ditemukan kerusakan pada komponen kereta, maka Perseroan akan melakukan penggantian atau pembersihan komponen. Pemeriksaan menyeluruh terkadang harus dilakukan dikarenakan usia pakai, kondisi dan fungsi dari unit kereta tersebut.

Selain itu, Perseroan menyediakan dua area yang berbeda untuk pelaksanaan pemeriksaan ringan maupun berat. Untuk pemeriksaan ringan, Perseroan menyediakan area yang khusus

To realize responsible operational activities and in accordance with applicable safety and security standards, the Company conducts train maintenance to ensure the safety of train operations and customer comfort during travel.

In 2024, train maintenance can be realized according to the set target. Under the supervision of the Facilities Division, maintenance work is carried out by employees who have certain skills and certification competencies so that train maintenance can be carried out according to applicable standards and procedures.

Each set of Jakarta LRT trains or “*Light Rail Vehicle*” (LRV) is required to follow two types of inspection and maintenance carried out periodically to ensure the physical and cleanliness of the train is in excellent condition and safe to operate. The train maintenance activities include daily, weekly and monthly maintenance works, all of which are carried out at the Depot. The types of train maintenance consist of light maintenance and heavy maintenance. Light maintenance is carried out every seven days and four months, while heavy maintenance is carried out every four years and eight years.

The inspection and light maintenance stage includes checking all train functions and cleanliness as well as checking all train components. Meanwhile, the major maintenance or “*overhaul*” stage includes disassembly and inspection of all train parts and components. If there is damage to the train unit, the Company immediately makes repairs to ensure safety and comfort for customers. Similarly, if damage is found on the train components, the Company will replace or clean the components. A thorough inspection is sometimes required due to the age, condition and function of the train unit.

In addition, the Company provides two different areas for light and heavy inspections. For light inspections, the Company provides a dedicated area for LRV inspection or light



untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan ataupun perawatan ringan LRV. Sementara itu, untuk area perawatan berat, Perseroan menyediakan area yang dapat menampung banyak peralatan besar dan lengkap untuk memfasilitasi perawatan kereta berskala besar, yaitu “overhaul”.

Perseroan juga menyediakan area pencucian kereta otomatis (*Automatic Train Washing Plant/ATWP*) untuk menjadi peralatan (*equipment*) khusus untuk mencuci eksterior kereta secara otomatis saat kereta kembali ke depo usai dioperasikan setiap harinya. Masinis cukup menjalankan kereta yang kembali ke depo melalui jalur yang terdapat ATWP ini serta menginformasikan jumlah *trainset* LRV yang dioperasikannya pada peralatan ATWP ini. Secara otomatis, mesin akan mencuci eksterior kereta sambil kereta bergerak menuju area parkir (*stabling*) atau area perawatan.

Untuk mencuci LRV, Perseroan menggunakan air yang secara otomatis disalurkan ke “*Waste Water Training Plant*” (WWTP), yang merupakan peralatan khusus untuk mengolah limbah air bekas pencucian yang terkontaminasi kotoran dan pembersih. Selain pencucian otomatis menggunakan ATWP untuk bagian eksterior, Perseroan melakukan pencucian interior dan eksterior LRV secara manual setiap selesai dilakukan perawatan ringan.

maintenance work. Meanwhile, for the heavy maintenance area, the Company provides an area that can accommodate many large and complete equipment to facilitate large-scale train maintenance, namely “overhaul”.

The Company also provides an (Automatic Train Washing Plant/ ATWP) area to serve as specialized equipment to automatically wash the exterior of trains as they return to the depot after each day’s operation. The driver only needs to run the train back to the depot through the track where the ATWP is located and inform the number of LRV trainsets the driver is operating to the ATWP equipment. The machine will automatically wash the exterior of the train as the train moves towards the stabling or maintenance area.

To wash the LRVs, the Company uses water that is automatically channeled to the “Waste Water Training Plant” (WWTP), which is specialized equipment to treat waste water from washing contaminated with dirt and cleaners. In addition to automatic washing using ATWP for the exterior, the Company manually washes the interior and exterior of the LRV after every light maintenance.

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Type of Maintenance Work	Volume Pekerjaan/Work Volume		
	Target/Target	Realisasi/Realization	Persentase/Percentage
Perawatan Kereta Train Maintenance	1.884	1.884	100%
Pemeriksaan Pengendalian Mutu Sarana Facility QC Inspection	420	420	100%
Cuci Kereta Train Wash	1.576	1.566	99,3%
Program dan Realisasi Perawatan Fasilitas Depo Depot Facility Maintenance Program and Realization	1.978	1.978	100%

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan pemeriksaan jenis harian, mingguan dan 4 bulanan terhadap LRV.

In 2024, the Company has conducted daily, weekly and 4-monthly type checks on LRVs.

Daftar Sertifikasi SDM Sarana

List of SDM Facilities Certification

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Tersertifikasi - 2024 Number of Certified Employees in 2024 (orang/person)	Jumlah Karyawan Tersertifikasi - 2023 Number of Certified Employees in 2023 (orang/person)
Pemeriksa Sarana Pemeriksa Sarana	Kementerian Perhubungan RI Kementerian Perhubungan RI	29	29
Perawat Sarana Perawat Sarana	Kementerian Perhubungan RI Kementerian Perhubungan RI	29	29

Ikhtisar Saham

Share Summary

KOMPOSISI DAN PERGERAKAN JUMLAH SAHAM SHARE COMPOSITION AND MOVEMENT

Menyusul dikeluarkannya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, pada tahun 2020 telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Keputusan tersebut dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

Dalam Akta Pendirian Perusahaan, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), yang kemudian bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,-, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Sementara itu, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau setara 3.338.934 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya mencapai Rp333.893.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

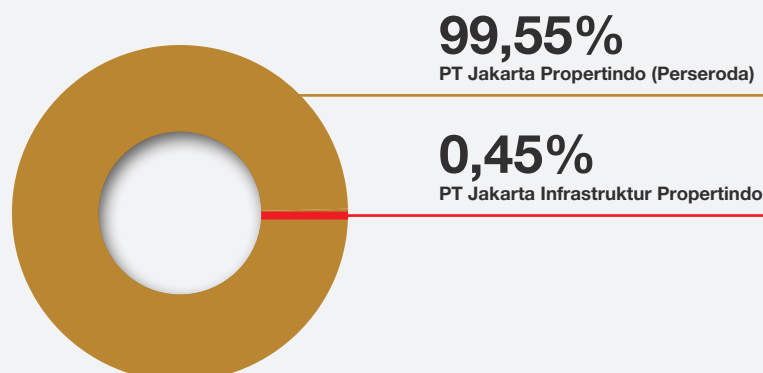
Following the issuance of Facility Operation License Number 1540 of 2019 by the Provincial Government of DKI Jakarta to PT LRT Jakarta, in 2020 3 (three) LRV trainsets from PT Jakarta Propertindo (Perseroda) were invested. The decision is contained in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution number 75 dated October 26, 2020 made by Wiwik Condro S.H, Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

In the Deed of Establishment of the Company, the Authorized Capital of the Company was IDR600,000,000,000,- (six hundred billion rupiah), which later increased by 25% amounting to IDR150,000,000,000,- to 55% or in the amount of IDR333,893,400,000,-, each share with a nominal value of IDR100,000,- (one hundred thousand rupiah). Meanwhile, the Issued and Fully Paid-up Capital by the Shareholders is 55% (fifty five percent) or equivalent to 3,338,934 (three million three hundred thirty eight thousand nine hundred thirty four) shares with a total nominal value of IDR333,893,400,000 (three hundred thirty three billion eight hundred ninety three million four hundred thousand rupiah).

Komposisi saham PT LRT Jakarta per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The share composition of PT LRT Jakarta as of December 31, 2024, 2023 and 2022 is as follows:

Pemegang Saham Shareholder	31 Desember 2024/December 31, 2024		31 Desember 2023/December 31, 2023		31 Desember 2023/December 31, 2022	
	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Kepemilikan Ownership (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	99,55	3.323.934	99,55	3.323.934	99,55
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	0,45	15.000	0,45	15.000	0,45
Jumlah/Total	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%





INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK INFORMATION ON SHARE TRADING AND SHARE OWNERSHIP BY THE PUBLIC

LRT Jakarta merupakan perusahaan tertutup. Hingga tahun 2024, LRT tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/ IPO*) di bursa saham manapun sehingga Perseroan tidak dapat menyampaikan informasi perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

LRT Jakarta is a private company. Until 2024, LRT has never yet conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchanges, thus the Company is unable to submit the information on share trading containing market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest and closing share prices based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed; share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed; and information in the form of an infographic containing at least the closing price based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed and the share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed in each quarter in the last 2 (two) financial years.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI INFORMATION ON CORPORATE ACTIONS

Tidak ada aksi korporasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

There was no corporate action taken during 2024.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM (*DELISTING*) INFORMATION ON SHARE TRADING SUSPENSION AND/OR DELISTING SANCTION

Dikarenakan hingga per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan belum mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun, maka Perseroan tidak dapat menyajikan informasi mengenai penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pengenaan sanksi penghapusan perdagangan saham (*delisting*) yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Since as of December 31, 2024, the Company has not listed its shares on any stock exchange, the Company was unable to present information regarding suspension and/or delisting sanctions in this Annual Report.

DIVIDEN SAHAM SHARE DIVIDENDS

Per tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Anggaran Dasar serta ditetapkan dalam keputusan pemegang saham, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

As of December 31, 2024, as stipulated in the Articles of Association and stipulated in the shareholders' resolution, the Company did not distribute dividends to shareholders.

Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

Throughout 2024, the Company did not issue bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no such information on the outstanding amount of bonds, sharia bonds, or convertible bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sharia bond ratings.





Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya

Information About Other Funding Sources

Pendanaan proyek LRT Jakarta seluruhnya atau 100% berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut diberikan berdasarkan skema Penanaman Modal Daerah (PMD) yang disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab atas pemanfaatan dana PMD tersebut sehingga tidak tercermin di dalam laporan keuangan Perusahaan. Sementara itu, aktivitas operasional LRT Jakarta sebagian besar atau lebih dari 90% didanai oleh subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Funding for the Jakarta LRT project 100% comes from the DKI Jakarta Provincial Government's Regional Budget. The funds are provided under the Regional Investment (PMD) scheme disbursed to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as a Regional-Owned Enterprise (BUMD) of the DKI Jakarta Provincial Government. PT Jakarta Propertindo is responsible for the utilization of the PMD funds, thus it is not reflected in the Company's financial statements. Meanwhile, the operational activities of the Jakarta LRT are mostly or more than 90% funded by subsidies of the DKI Jakarta Provincial Government.

Peristiwa Penting

Significant Events

18 Januari/January 2024



Peresmian *Urban Farming* LRT Jakarta dihadiri oleh stakeholder untuk meninjau program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

The inauguration of LRT Jakarta Urban Farming was attended by stakeholders to review food security and inflation control programs.

21 Februari/February 2024



Demi mendukung perkembangan ilmu di dunia pendidikan dan meningkatkan kompetensi industri untuk pelajar, khususnya di bidang transportasi, LRT Jakarta meresmikan Program *Link and Match*.

LRT Jakarta inaugurated the Link And Match Program to support the development of knowledge in the educational sector and enhance industrial competence among students, particularly in the transportation sector.

25-28 Maret/March 2024



Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, LRT Jakarta menyelenggarakan acara bertajuk 'Ramadan Bersemi' di LRTJ sekaligus acara Bazaar Ramadan Sembako Murah.

To welcome the holy month of Ramadan, LRT Jakarta organized an event titled 'Ramadan Bersemi' at LRTJ as well as the Ramadan Bazaar on Affordable Daily Essential Packages.

27 Maret/March 2024



LRT Jakarta menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.

LRT Jakarta signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.

21 Mei/May 2024



LRT Jakarta menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Politeknik Kementerian Ketenagakerjaan. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar *Mayday* "Refleksi 2 Dekade: UU Nomor 2 Tahun 2004" pada tanggal 20-21 Mei 2024.

LRT Jakarta signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Polytechnic of the Ministry of Manpower. The signing was carried out in conjunction with the Mayday Seminar which brought a theme "Reflection of 2 Decades: Law Number 2 Year 2004" on May 20-21, 2024.

5 Juni/June 2024



LRT Jakarta mengadakan acara 'GRC Talks' yang mengambil tema 'Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi di Perusahaan Transportasi Publik'.

LRT Jakarta held a 'GRC Talks' event with the theme 'Building an Anti-Corruption and Gratification Culture in Public Transportation Companies'.

27 Juni/June 2024



LRT Jakarta mengadakan acara TWIT (*Talk With It*) dengan mengangkat tema "Membangun Budaya Keamanan Cyber di Perusahaan Transportasi Publik".

LRT Jakarta held a TWIT (Talk With It) event with the theme "Building a Cyber Security Culture in Public Transportation Companies".

11 September 2024



LRT Jakarta melakukan penandatanganan dengan SMKG terkait 'Kerja Sama Hak Penamaan Stasiun Boulevard Utama Summarecon Mall Kelapa Gading'.

LRT Jakarta signed an agreement with SMKG regarding the 'Cooperation on the Naming Rights for Summarecon Mall Kelapa Gading Main Boulevard Station'.



12 September 2024



LRT Jakarta menyelenggarakan Gelar Panen Hasil Urban Farming bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang memajang hasil panen dari kegiatan *Urban Farming* yang dilakukan oleh Perseroan.

LRT Jakarta held an Urban Farming Harvest Show in collaboration with the Food Security, Marine and Agriculture Agency, exhibiting the harvest from the Company's Urban Farming activities.

30 September 2024



LRT Jakarta melakukan Test Track Fase 1B (rute Velodrome-Rawamangun) dengan menggunakan MRV.

LRT Jakarta conducted Phase 1B Track Test (Velodrome-Rawamangun route) using MRV.

9 Oktober/October 2004



LRT Jakarta melakukan penandatanganan Pedoman Kerja Teknis Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital Korsabahaya Baharkam Polri.

LRT Jakarta signed the Technical Guidelines for Security Management System (SMP) with the Directorate of Security of Vital Object of Korsabahaya Baharkam Polri.

24 Oktober/October 2024



LRTJ turut berkontribusi melalui program uji coba makan bergizi gratis di SDIT Al-Ihsan Jakarta Selatan, sebanyak 700 paket makanan disajikan dengan menu gizi lengkap. LRTJ supported a trial program of free nutritious food package at SDIT Al-Ihsan, South Jakarta, by contributing 700 packages of a complete nutritious menu.

25 November 2024



LRT Jakarta melakukan *press conference* tentang #RI5EUP sebagai bagian dari rangkaian acara HUT ke-5 Operasi Komersial LRT Jakarta.

LRT Jakarta conducted a press conference on #RI5EUP as part of the 5th Anniversary of Jakarta LRT Commercial Operation.

1 Desember/December 2024



LRT Jakarta mengadakan tasyakuran mengenai perayaan HUT LRTJ sekaligus memperkenalkan Larata Pay. LRT Jakarta held a tasyakuran to celebrate LRTJ Anniversary as well as the launch of Larata Pay.

8 Desember/December 2024



RI5E UP Fun Run acara run marathon yang menjadi penutup sekaligus puncak perayaan HUT LRTJ ini berlangsung di area Depo LRT Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara RI5E UP Fun Run, namely a marathon run event which served as the closing and highlight of the LRTJ Anniversary celebration, were held in LRT Jakarta Depot area, at Kelapa Gading, North Jakarta

19 Desember/December 2024



LRT Jakarta mengadakan acara seremonial penandatanganan Pedoman rencana operasi pemadaman dan penyelamatan PT LRT Jakarta dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

LRT Jakarta held a ceremonial event on the signing of the guidelines of the extinguishing and rescue operation plan of PT LRT Jakarta, with the Fire and Rescue Service of DKI Jakarta Province.



02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Perseroan telah merealisasikan program kerja yang telah disusun secara komprehensif, memperkuat kolaborasi, inovasi serta fundamental untuk keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang.

The Company has realized comprehensive work programs, strengthened collaboration, innovation and fundamental to ensure the company's business continuity in the coming years.







Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

IWAN TAKWIN

Komisaris Utama
President Commissioner





Meskipun Perseroan menghadapi tantangan seperti keterbatasan jalur perjalanan, Direksi dinilai mampu mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dengan baik melalui penyelenggaraan beberapa *events* yang mampu meningkatkan jumlah pelanggan.

Despite the business challenges, such as limited routes, the Board of Directors has demonstrated good capability of managing risks and optimizing the opportunities by organizing several events that were able to increase the number of customers.



**Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,
Dear shareholders and stakeholders,**

Perkenalkan kami, Dewan Komisaris, mengawali Laporan Tahunan 2024 ini dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya kepengurusan Perseroan serta penerapan tata kelola perusahaan oleh Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan perusahaan, Dewan Komisaris telah dibantu oleh organ-organ di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit. Komite Audit telah memberikan pandangan profesional dan independen terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, termasuk dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perseroan.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pengawasan atas kinerja Direksi dalam menerapkan strategi dan kebijakan Perseroan tahun 2024 dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI). Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menetapkan KPI yang jelas dan terukur yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Direksi. KPI ditetapkan dengan memperhatikan strategi dan tujuan perusahaan untuk tahun 2024 sehingga dapat terukur efektivitas kontribusi yang diberikan masing-masing anggota Direksi terhadap pencapaian KPI dan kemajuan perusahaan secara umum.

Dewan Komisaris kemudian memantau pencapaian KPI tersebut secara berkala melalui forum *BoD & BoC Meeting*. Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin dengan Direksi untuk membahas kemajuan implementasi strategi, kebijakan, dan kinerja Perusahaan yang meliputi aspek

Please allow us, the Board of Commissioners, to begin this 2024 Annual Report by presenting the Board of Commissioners' Accountability Report for the implementation of the supervisory function over the management of the Company and the implementation of corporate governance by the Board of Directors.

While carrying out its supervisory function over the management of the Company, the Board of Commissioners was assisted by an organ supporting the Board of Commissioners, namely the Audit Committee. The Audit Committee has provided professional and independent views regarding the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function, including by reviewing financial information and ensuring the effectiveness of the internal control system within the Company.

Implementation of Supervisory Function

Supervision of the Board of Directors' performance in implementing the corporate strategies and policies in 2024 was carried out through several mechanisms, including by determining Key Performance Indicators (KPIs). The Board of Commissioners and the Board of Directors jointly set clear and measurable KPIs for use as reference in evaluating the performance of the Board of Directors. The KPIs were prepared by taking into account the company's strategies and goals for 2024, thus the effective contributions of each member of the Board of Directors could be measured against the fulfilment of those KPIs and the company's progress.

The Board of Commissioners regularly monitored the KPIs achievement through the *BoD & BoC Meetings*. The Board of Commissioners held regular meetings with the Board of Directors to discuss the progress of the implementation of the corporate strategies, policies and performance encompassing



kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kegiatan strategis Perusahaan lainnya.

Pada rapat yang dilaksanakan secara rutin bulanan tersebut, Direksi menyampaikan laporan kinerja, termasuk pencapaian target, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris memberikan umpan balik konstruktif kepada Direksi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas kinerja perusahaan maupun agenda korporasi strategis yang ingin diambil Perseroan. Umpan balik ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Kami berupaya memastikan bahwa Direksi mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk mengatasi setiap kekurangan atau tantangan yang diidentifikasi.

Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin menghambat implementasi strategi dan kebijakan Perusahaan. Pemantauan potensi risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama Komite Audit, termasuk dengan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi dan langkah mitigasi yang disiapkan terhadap potensi risiko tersebut.

Penilaian atas Kinerja Direksi, Perumusan dan Implementasi Strategi dan Kebijakan di Tahun 2024

Direksi telah merumuskan strategi yang efektif pada tahun buku untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, termasuk dengan meraih pelanggan baru sepanjang tahun 2024. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Direksi yang dinilai telah mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *ridership* serta kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan.

Meskipun Perseroan menghadapi tantangan seperti keterbatasan jalur perjalanan, Direksi dinilai mampu mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dengan baik melalui penyelenggaraan beberapa *events* yang mampu meningkatkan jumlah pelanggan. Kami yakin bahwa dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang terus dijaga, LRT Jakarta akan mampu mencapai target yang lebih besar di tahun berikutnya.

Dewan Komisaris sendiri berkomitmen untuk meningkatkan peran aktifnya dalam pemantauan kinerja usaha dan pencapaian target usaha di tahun 2024. Beberapa langkah strategis dan praktis yang kami ambil sehubungan dengan hal itu di antaranya adalah keterlibatan Dewan Komisaris dalam proses penetapan target usaha dan strategi perusahaan untuk tahun 2024 (RKAP). Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa target dan strategi tersebut selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan, di antaranya melalui laporan berkala yang diberikan oleh Direksi. Laporan ini mencakup aspek keuangan, operasional, dan strategis.

aspects of operational performance, financial performance and other strategic activities of the Company.

At the meetings, which were held on a monthly basis, the Board of Directors submitted the performance reports, including the target achievement, the challenges, and corrective measures that were already taken or to take. At those meetings, the Board of Commissioners provided constructive feedbacks to the Board of Directors based on the monitoring and evaluation results of the Company's performance as well as the strategic corporate agenda to carry out. This feedbacks would serve as reference for making some improvements and adjustments to the strategies if necessary. We strived to ensure that the Board of Directors took the necessary corrective measures to address any weaknesses or challenges identified.

In addition, the Board of Commissioners ensured that the Board of Directors had identified and managed risks that could hamper the Company's strategy and policy implementation. Risk Monitoring was conducted by the Board of Commissioners together with the Audit Committee, including by assessing the effectiveness of the implementation of risk management system by the Board of Directors and the mitigation measures prepared against such risk potentials.

Assessment of Board of Directors' Performance, Formulation as well as Strategy and Policy Implementation in 2024

The Board of Directors has formulated effective strategies in the reporting year to maintain sustainable business growth, including through customer acquisition. The Board of Commissioners also appreciates the Board of Directors' efforts, leading to satisfactory results. This is reflected in the increase in ridership and positive contributions to the Company's revenue.

Despite the business challenges, such as limited routes, the Board of Directors has demonstrated good capability of managing risks and optimizing the opportunities by organizing several events that were able to increase the number of customers. We are confident that with the spirit of collaboration and innovation, LRT Jakarta will be able to accomplish higher targets in the following years.

The Board of Commissioners held its commitment to increasing its active role relating to performance monitoring and target achievements for 2024. Some of the strategic and practical steps we have taken accordingly included to engage the Board of Commissioners in the process of determining the company's work plans and budgets for 2024 (RKAP). The Board of Commissioners also applied monitoring to ensure the alignment of the targets and strategies with the company's vision, mission and long-term goals, among others through periodic reports of the Board of Directors. These reports contained financial, operational and strategic aspects.

Dewan Komisaris juga terlibat langsung dalam inisiatif strategis tertentu yang kritis bagi pencapaian target usaha termasuk proyek/tender sebagai upaya peningkatan pendapatan *non-farebox* Perusahaan.

Prospek Usaha

Dewan Komisaris memproyeksikan pertumbuhan jumlah pengguna jasa LRT Jakarta akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap transportasi umum yang ramah lingkungan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur transportasi publik juga akan menjadi faktor pendorong utama.

Selain itu, Dewan Komisaris juga berharap diversifikasi pendapatan melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta (*non-farebox*) dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Proyek perluasan jaringan LRT Jakarta (Fase 1B) yang sedang dalam tahap konstruksi diharapkan akan memperluas jangkauan layanan LRT, meningkatkan aksesibilitas, dan menarik lebih banyak pengguna baru. Meskipun direncanakan baru akan beroperasi komersial di 2026, potensi kerja sama bisnis dengan berbagai mitra sudah dapat dijabaki sejak dini.

Namun demikian, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Kami mengidentifikasi beberapa risiko yang perlu diantisipasi di antaranya adalah potensi gangguan operasional, seperti kerusakan sarana prasarana atau masalah teknis yang dapat memengaruhi kualitas layanan. Perubahan preferensi masyarakat terhadap mobilitas, termasuk peningkatan penggunaan kendaraan pribadi atau moda transportasi alternatif, juga perlu diwaspadai jika layanan transportasi publik yang diberikan tidak memuaskan.

Selain itu, terdapat risiko yang berpotensi muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi, tarif, atau regulasi transportasi dapat memengaruhi operasional dan keuangan Perseroan termasuk peningkatan tuntutan terhadap kepatuhan standar lingkungan dan keberlanjutan yang memerlukan investasi tambahan. Ketergantungan pada pendanaan pemerintah untuk proyek ekspansi dan operasional dapat menjadi risiko jika terjadi penundaan atau pengurangan alokasi anggaran.

Sehubungan dengan hal itu, Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk terus memperkuat sistem manajemen risiko dengan mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko secara proaktif guna menghadapi potensi gangguan operasional dan perubahan kebijakan. Perusahaan meyakini bahwa pengelolaan risiko yang efektif akan membantu perusahaan dalam pencapaian kinerja dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners also directly engaged in determining certain strategic initiatives that were critical to the target achievements including in projects/tenders to increase the Company's non-farebox revenue.

Business Outlook

The Board of Commissioners estimates that the growth in the number of users of LRT Jakarta LRT services will continue to increase in line with the post-pandemic economic recovery and increased public awareness of environmentally friendly public transportation. Government's support for the development of public transportation infrastructure will also be a major driving factor.

In addition, the Board of Commissioners also expects that revenue diversification through strategic partnerships with private parties (*non-farebox*) will give significant contribution to the company's revenue. The LRT Jakarta network expansion project (Phase 1B) that is currently under construction is expected to expand the LRT service coverage, improve accessibility, and attract more new users. Although the commercial operation is expected to be in 2026, we can explore potential business cooperation with various partners earlier.

However, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to continue to prioritize the prudence principle in carrying out the management of the Company. We identify several risks that need to be anticipated, including the potential risk of operational disruptions, such as damage to infrastructure or technical problems that could affect service quality. Changes in people's preference for mobility, including increased use of private vehicles or alternative modes of transportation, also need to be closely monitored if the delivery of public transportation services is not satisfactory.

In addition, there is a potential risk of changes in government policies relating to subsidies, tariffs, or transportation regulations, thus affecting the Company's operations and financial condition including increased demands for compliance with environmental and sustainability standards that require additional investment. Our dependence on government funding for expansion projects and operations could generate a risk when there is delay or reduction in budget allocations.

Therefore, the Board of Commissioners suggests the Board of Directors to continue strengthening the risk management system by proactively identifying, monitoring and mitigating risks to anticipate potential operational disruptions and regulatory changes. The Company believes that effective risk management will help the Company achieve performance targets and add values to its stakeholders.



Direksi diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan SDM, dan pemeliharaan sarana prasarana yang berkala. Direksi juga memperhatikan upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan non-operasional, seperti pengembangan properti komersial di sekitar stasiun LRT dan kemitraan strategis dengan pihak swasta. Komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar lingkungan juga terus ditingkatkan.

Dewan Komisaris juga ingin menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang transparan dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan dukungan bagi pertumbuhan *ridership* dan kinerja perusahaan.

Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menyikapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh tantangan, Dewan Komisaris menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), khususnya dalam hal pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam rangka memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif, Perseroan telah memiliki fungsi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab mengoordinasikan aktivitas pengidentifikasian dan pengelolaan risiko dengan tujuan untuk memitigasi dampak serta kerugian yang mungkin terjadi.

Dewan Komisaris percaya bahwa dengan penguatan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan mampu menghadapi tantangan di tahun 2024 dan tantangan ke depan. Dewan Komisaris mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana Direksi dan karyawan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan tidak terlibat politik praktis. Hal ini tidak hanya akan memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, demi menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Apresiasi

Menutup laporan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direksi dan seluruh karyawan PT LRT Jakarta atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai target operasional dan keuangan, meningkatkan kualitas layanan, dan meraih kepercayaan masyarakat tidak lepas dari komitmen dan sinergi seluruh tim.

The Board of Directors is also expected to continue to improve operational efficiency and service quality through the utilization of technology, human resource training, and regular maintenance of infrastructure facilities. The Board of Directors also pays attention to any efforts aimed to optimize non-operational revenue potential, such as the development of commercial properties surrounding LRT stations and strategic partnerships with private parties. The Company's commitment to sustainable business practices, including the reduction of carbon emissions, energy efficiency, and improved compliance with environmental standards is also being enhanced.

The Board of Commissioners would also like to emphasize the importance of maintaining transparent and collaborative communication with all stakeholders, including the government, customers and communities. This will help build trust and support for ridership growth and the Company's business performance.

Implementation of Good Corporate Governance Principles

In addressing the increasingly complex and challenging business environment, the Board of Commissioners emphasizes its commitment to continuously strengthening the implementation of good corporate governance (GCG), particularly in terms of risk management and regulatory compliance. So as to ensure effective risk management, the Company has designed a Risk Management function that is responsible for coordinating risk identification and management activities with the aim of mitigating impacts and losses that potentially occur.

The Board of Commissioners believes that stronger implementation of corporate governance, good risk management and regulatory compliance will prepare the company to navigate the challenges in the year 2024 and beyond. The Board of Commissioners reminds of the importance of upholding integrity and good corporate governance principles, where Directors and employees are expected to carry out their duties with full responsibility, transparency, accountability, and not engage in practical politics. This will not only strengthen the company's reputation, but also ensure long-term business sustainability.

The Board of Commissioners is committed to ensuring that the Company is managed with integrity, transparency and responsibility, so as to create added values for all stakeholders.

Appreciation

To conclude this report, the Board of Commissioners would like to thank the Board of Directors and all employees of PT LRT Jakarta for their dedication, hard work and contributions throughout the year. The Company's accomplishments in fulfilling both operational and financial targets, improving service quality, and gaining public trust cannot be separated from the commitment and synergy of the entire team.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris PT LRT Jakarta juga ingin menyampaikan pesan khusus kepada Direksi dan seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi, motivasi, dan arahan untuk menghadapi tahun 2025. Dewan Komisaris menilai tahun 2025 akan menjadi tahun yang menantang sekaligus memberikan banyak peluang. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat terhadap transportasi yang lebih ramah lingkungan akan membawa dinamika baru dalam industri transportasi publik. Dewan Komisaris mendorong Direksi dan karyawan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas layanan demi mempertahankan posisi PT LRT Jakarta sebagai salah satu pilihan transportasi publik di Jakarta.

Dewan Komisaris menekankan pentingnya komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan dan inovasi. Direksi dan karyawan diharapkan dapat terus mengembangkan solusi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi hijau. Selain itu, inovasi dalam layanan, seperti pengembangan aplikasi berbasis digital dan sistem tiket terintegrasi, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Keberhasilan PT LRT Jakarta tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi yang kuat antara Direksi, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris mendorong seluruh tim untuk terus memperkuat sinergi internal dan eksternal, termasuk dengan pemerintah, mitra strategis, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2025.

Dengan dukungan penuh kepada Direksi dan seluruh karyawan PT LRT Jakarta, mari kita bersama-sama menghadapi tahun 2025 dengan semangat baru, komitmen yang kuat, dan tekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat.

The Board of Commissioners of PT LRT Jakarta would also use this opportunity to convey its appreciation, motivation and directive messages to the Board of Directors and all employees as we enter the year 2025. The Board of Commissioners considers that 2025 will be offering both challenges and opportunities. Economic growth, technological developments, and public demand for more environmentally friendly transportation will create new dynamics to the public transportation industry. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors and employees to continue to innovate, improve efficiency, and maintain service quality to secure PT LRT Jakarta's position as one of the public transportation alternatives in Jakarta.

The Board of Commissioners emphasizes the importance of the commitment to implementing the principles of sustainability and innovation. The Board of Directors and employees are expected to continue developing environmentally friendly solutions, such as carbon emission reduction, energy efficiency, and utilization of green technology. In addition, service innovations, such as the development of digital-based applications and integrated ticketing system, should be a priority to improve customer experience.

The success of PT LRT Jakarta indeed relies heavily on strong collaboration between the Board of Directors, employees and all stakeholders. The Board of Commissioners therefore motivates the entire team to pursue stronger synergy between internal and external parties including with the government, strategic partners and the communities. This collaboration will be key in addressing the challenges and capitalizing on more opportunities in 2025.

With the great support from the Board of Directors and all employees of PT LRT Jakarta, let us together face the year 2025 with renewed spirit, strong commitment, and determination to continue delivering our best for the company, the customers, and the society.

Untuk dan atas Nama Dewan Komisaris
For and on behalf of the Board of Commissioners



IWAN TAKWIN

Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

The Board of Directors' Report

HENDRI SAPUTRA

Direktur Utama
President Director





Perseroan melakukan sinergi program promosi dan event LRT Jakarta dengan Jakpro Group maupun dengan para *stakeholder* lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

The Company held synergy with Jakpro Group and other stakeholders regarding promotional programs and events of LRT Jakarta to increase the community engagement.



Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, Dear shareholders and stakeholders,

Perkenalkan kami, Direksi, menyampaikan apresiasi kepada insan PT LRT Jakarta atas pencapaian kinerja Perseroan yang positif pada tahun buku 2024. Puji Syukur kita panjatkan juga kepada Tuhan yang Maha Esa karena Perseroan mampu menavigasi berbagai risiko di sepanjang tahun 2024 dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya sebagaimana ekspektasi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Tinjauan Makro Ekonomi

Di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang cukup menantang, perekonomian Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90% dibandingkan tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian Jakarta masih tetap kuat dan berdaya tahan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut tentunya menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan berbagai industri, termasuk industri transportasi publik yang merupakan bisnis inti Perseroan. Pada tahun 2024, industri jasa transportasi publik di Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam hal kualitas layanan, integrasi dan perluasan jaringan di tengah tantangan yang dihadapi. Kondisi ini mencerminkan peningkatan preferensi konsumen, terutama masyarakat Jakarta, untuk memilih penggunaan transportasi publik.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi

Bagi Perseroan target utama penyelenggaraan usaha LRT Jakarta adalah pemenuhan *Service & Operation Excellence* sebagaimana mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada

Please allow us, the Board of Directors, to express our appreciation to all employees of PT LRT Jakarta for contributing to the positive performances of the Company for the year 2024. We would also send our gratitude to God Almighty for guiding the Company in navigating various risks throughout 2024 and maintaining its business sustainability as expected by both shareholders and other stakeholders.

Macroeconomic Review

Amidst challenging economic and business conditions, Jakarta's economy grew positively in 2024. Data from the Central Statistics Agency (BPS) suggested that Jakarta's economy grew at the pace of 4.90% compared to that of 2023. This figure confirmed that Jakarta's economy remained strong and resilient despite the challenging business landscape.

The solid economic growth has certainly established a strong foundation to drive the growth of various industries, including the public transportation industry, which is the Company's core business. In 2024, the public transportation service industry in Jakarta experienced significant developments, both in terms of service quality, integration and network expansion, despite the challenging situation. This condition reflects the stronger consumer preference, especially among the Jakartans, regarding the use of the public transportation.

Role of the Board of Directors in Strategy Formulation

For the Company, the main target of the Jakarta LRT business is to realize *Service & Operation Excellence* as mandated by the Provincial Government of DKI Jakarta requiring us to provide optimum service to the communities. As a testament



masyarakat. Sebagai wujud komitmen kami terhadap pemenuhan mandat tersebut dan guna mengoptimalkan peluang di tahun 2024 tersebut, maka Direksi telah menyusun rencana strategis yang mencakup tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan langkah-langkah realisasinya yang diselaraskan dengan visi dan misi LRT Jakarta.

Dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari masing-masing pimpinan unit usaha, Direksi menetapkan kebijakan yang mengatur berbagai aspek operasional, keuangan, Sumber Daya Manusia maupun aspek pendukung lain serta pengendalian risikonya.

Implementasi Strategi dan Pengawasannya

Secara umum, kebijakan PT LRT Jakarta pada tahun ini masih berfokus pada kegiatan operasi dan perawatan LRT Jakarta serta peningkatan bisnis *non-farebox*. Untuk mendukung hal tersebut, PT LRT Jakarta telah menyiapkan program strategis di antaranya adalah:

- Program Peningkatan *Ridership*;
- Percepatan Realisasi Program Kerja sesuai dengan Kontrak Subsidi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta;
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) LRT Jakarta fase 1A;
- Membangun *Brand Positioning* dan *Awareness* LRT Jakarta;
- Penerapan program ekonomi hijau LRT Jakarta untuk mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Strategy*;
- Sistem Manajemen Terintegrasi;
- Program Inovasi Perusahaan;
- Peningkatan Kualitas & Kapabilitas SDM;
- Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko; dan
- Peningkatan pendapatan melalui Bisnis *Non-Farebox*.

Program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah inisiatif, yaitu melakukan integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi di Jakarta, mendorong revitalisasi kawasan area stasiun LRT Jakarta dan pemanfaatan area Depo LRT Jakarta dalam kegiatan komunitas. Di saat yang sama, Perseroan juga melakukan program edukasi dan aktivitas *event* di Stasiun maupun Depo LRT Jakarta.

Khusus untuk program peningkatan bisnis *non-farebox*, LRT Jakarta untuk pertama kalinya berhasil untuk mengkomersialisasikan stasiun kepada pihak ketiga melalui pemberian *naming rights* sebagai lingkup kerja sama dengan Summarecon Mal Kelapa Gading (SMKG).

Kemudian sebagai bagian dari program peningkatan *brand awareness* LRT Jakarta kepada masyarakat, Perseroan melakukan sinergi program promosi dan *event* LRT Jakarta dengan Jakpro Group maupun dengan para *stakeholder* lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

to our commitment to fulfilling the mandate and optimizing the opportunities in 2024, the Board of Directors has developed a set of strategic plans that included the goals to achieve by the company and the steps that were aligned well with the vision and mission of LRT Jakarta.

By taking into account the inputs and suggestions from leaders of each business unit, the Board of Directors establishes policies regulating the operations, finance, human resources and other supporting aspects as well as risk control.

Strategy Implementation and Monitoring

PT LRT Jakarta's policies for the year were generally focused on the operation and maintenance activities of LRT Jakarta as well as increasing the non-farebox business. Therefore, PT LRT Jakarta has prepared strategic programs, including:

- Ridership Increase Program;
- Accelerated Realizations of Work Programs in accordance with the Subsidy Contract with the Jakarta Provincial Government;
- Fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) of LRT Jakarta phase 1A;
- Building Brand Positioning and Awareness of LRT Jakarta;
- Implementation of LRT Jakarta's green economy program to support the Sustainable Development Goals (SDGs) Strategies;
- Integrated Management System;
- The Company's Innovation Program;
- Improving the Quality & Capability of Human Resources;
- Implementation of Corporate Governance and Risk Management Principles; and
- Increasing revenue through Non-Farebox Business.

The programs were further elaborated into a number of initiatives, namely integrating physical and payment modes of transportation in Jakarta, encouraging revitalization of LRT Jakarta's stations and utilization of LRT Jakarta Depot in community activities. At the same time, the Company also conducts educational programs and a series of events at the LRT Jakarta Stations and Depots.

Particularly to increase the non-farebox business, LRT Jakarta for the first time succeeded in commercializing a station to third parties through naming rights a part of cooperation with Summarecon Mal Kelapa Gading (SMKG).

Then as part of the program to increase brand awareness of LRT Jakarta to the public at large, the Company synergizes promotional programs and events of LRT Jakarta with Jakpro Group and other stakeholders to increase the community engagement.

Seluruh program inisiatif di atas telah kami komunikasikan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan saran dan masukannya. Direksi juga telah menyosialisasikan dan mengoordinasikan implementasi kebijakan tersebut kepada jajaran manajemen untuk diterapkan di masing-masing unit yang dipimpinnya untuk memastikan operasional perusahaan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*). Direksi kemudian melakukan pemantauan kinerja secara berkala dengan memperhatikan pemenuhan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditargetkan.

Perbandingan Target dan Hasil yang Dicapai

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, Perseroan merealisasikan program kerja yang telah disusun secara komprehensif, memperkuat kolaborasi, inovasi serta fundamental untuk keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Program inovasi meliputi peningkatan pendapatan perusahaan, efisiensi biaya non-subsidi, peningkatan *brand awareness* dan efektivitas bisnis proses. Kegiatan promosi juga terus dilakukan melalui kampanye di media sosial dan melaksanakan *event* dan *sponsorship* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap LRT Jakarta sebagai moda transportasi publik yang modern, efisien, dan andal.

Pada tahun 2024, rata-rata jumlah pelanggan LRT Jakarta adalah sebesar 3.352 orang per hari atau 1.226.817 pelanggan, yang mencerminkan kenaikan sebesar 15% dari tahun 2023. Kemudian, Perseroan juga dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) LRT Jakarta sebesar 99,22% dan mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan LRT Jakarta sebesar 93%.

Dari sisi finansial, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp265,23 miliar dan laba usaha sebesar Rp7,8 miliar. Mayoritas kontribusi pendapatan LRT Jakarta masih ditopang oleh pendapatan Subsidi sebesar 94%, diikuti oleh pendapatan *non-farebox* sebesar 4% dan pendapatan *farebox* sebesar 2%. PT LRT Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan *Non-Farebox* dengan beberapa strategi-strategi yang dilakukan sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi di masa yang akan datang.

Kemudian, dalam rangka mengukur efektivitas pencapaian target perusahaan, LRT Jakarta telah menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang memuat target-target yang menjadi tolok ukur bagi pencapaian kinerja Perseroan, yang mencakup aspek Keuangan (*Financial*), Pelanggan (*Customer*), Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*) dan Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning & Growth*). Secara umum, PT LRT Jakarta pada tahun 2024 telah dapat memenuhi KPI yang ditentukan. Namun, sejumlah indikator finansial masih belum dapat dipenuhi, yaitu terkait dengan Pendapatan *Non-Farebox* dan EBITDA. Terkait dengan ketidaktercapaian target pendapatan *Non-Farebox*, hal itu sebagian besar disebabkan oleh belum rampungnya sejumlah proses perizinan serta pemanfaatan lahan.

All aforementioned initiatives were communicated to the Board of Commissioners to obtained their advice and inputs. The Board of Directors has also socialized and coordinated with the executives about the policy implementation in each unit they lead to ensure the company's operations run effectively and in accordance with the principles of good corporate governance (GCG). The Board of Directors then conducts regular performance monitoring by taking into account the fulfillment of the established Key Performance Indicators (KPIs).

Comparison of Targets and Results Achieved

To achieve the predetermined targets, the Company realized comprehensive work programs, strengthening collaboration, innovation and fundamental to ensure the company's business continuity in the future. Innovation programs included increased revenue, non-subsidized cost efficiency, improved brand awareness and business process effectiveness. Promotional activities also were carried out through campaigns on social media and carrying out events and sponsorships aimed at increasing public awareness of the LRT Jakarta as a modern, efficient and reliable mode of public transportation.

In 2024, the average number of LRT Jakarta passengers was 3,352 people per day or 1,226,817 passengers, representing a 15% increase from 2023. The Company also met the LRT Jakarta's Minimum Service Standard (MSS) by 99.22% and achieved the LRT Jakarta's Customer Satisfaction Index by 93%.

Financially, the Company successfully recorded IDR265.23 billion of revenue and IDR7.8 billion of operating profit. The majority of LRT Jakarta's revenue was mostly or 94% derived from subsidies, followed by revenues from non-farebox by 4% and farebox by 2%. PT LRT Jakarta strived to increase its Non-Farebox revenue through the implementation of several strategies so as to reduce dependence on subsidies in the future.

Then, in order to measure the effectiveness of the target achievement, LRT Jakarta has compiled a Key Performance Indicators (KPI) containing the benchmark targets for the Company's performance, including Financial, Customer, Internal Business Process and Learning & Growth aspects. PT LRT Jakarta in 2024 successfully met the specified KPIs. However, a number of financial indicators still failed to meet, namely relating to Non-Farebox Revenue and EBITDA. The failure of the Non-Farebox revenue target was largely due to the incompleteness of a number of licensing processes and land utilization.



Kemampuan Perseroan untuk mencatatkan pencapaian bisnis yang positif mendapat pengakuan dari berbagai institusi. Di antara penghargaan bergengsi yang diterima Perseroan adalah Bintang 5 pada Top BUMD 2024 Kategori Aneka Usaha, *Top CEO 2024, Indonesia Popular Companies Award, Indonesia Popular Corporate Reputation Award 2024 Transportation Category*, DTKJ Award Platinum – Operator Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Transportasi Ramah Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil, dan Anak, dan *The Best Contact Center Indonesia 2024. Platinum – The Best Customer Service Public*.

Pengembangan SDM

Perkembangan pesat bisnis Perseroan tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik di lingkungan LRT Jakarta. Kami membangun hubungan industri yang harmonis sebagai kerangka dasar bagi terwujudnya kerja sama tim di internal organisasi untuk bersama mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Pada tahun 2024, PT LRT Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. LRT Jakarta melakukan pengukuran kompetensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2024 seperti pengembangan kompetensi teknis, *learning agility* program, *Leadership Management Development Program* (LMDP), *Innovation Festival*, *Learning Festival* serta bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM di bidang perkeretaapian.

Kebijakan pengelolaan SDM yang komprehensif ini diharapkan dapat mendukung tercapainya *service & operational excellence*. Sejauh ini Direksi merasa bangga dengan dedikasi dan kerja keras SDM yang ada yang telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta reputasi perusahaan sebagai salah satu penyedia transportasi umum berbasis rel di Jakarta. Komitmen Perseroan terhadap pengelolaan SDM ini berhasil meraih Bintang 4 *Top Human Capital Awards 2024* dan penghargaan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Kategori Emas/Predikat Baik Sekali, dengan skor 92,11%.

Risiko dan Tantangan

Perseroan menyadari masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai *service & operational excellence*. Sementara itu, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah, terutama dalam mengatasi risiko yang paling signifikan berpengaruh pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan, yakni terkait dengan risiko tidak tercapainya pendapatan *non-farebox* (NFB).

Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan berupaya mengoptimalkan bisnis terkait *railway*, mendorong inovasi bisnis, melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Jakpro

The Company's ability to record positive business achievements has earned recognitions from various institutions. Among the prestigious awards received by the Company were 5 Stars in the Category of Top BUMD 2024 Miscellaneous Business, Top CEO 2024, Indonesia Popular Companies Award, Indonesia Popular Corporate Reputation Award 2024 for the Transportation Category, DTKJ Award Platinum - Best Operator Providing Disability Friendly Transportation Facilities and Infrastructure, Elderly, Pregnant Women, and Children, and The Best Contact Center Indonesia 2024. Platinum - The Best Customer Service Public.

HR Development

The Company's rapid business development is inseparable from good Human Resources (HR) management policies within LRT Jakarta. We build harmonious industrial relations as a basic framework for realizing teamwork within the organization to jointly realize the vision and mission of the Company.

In 2024, PT LRT Jakarta has taken various efforts to improve HR competencies. LRT Jakarta conducted competency assessment for use as a reference in preparing the employee training and development programs. Some of the efforts taken in 2024 encompassed technical competency development, *learning agility* program, Leadership Management Development Program (LMDP), Innovation Festival, Learning Festival and we collaborated with several state universities to improve and develop human resources in railway business.

The comprehensive HR management policy is expected to facilitate the achievement of *service & operational excellence*. Thus far, the Board of Directors is proud of the dedication and hard work of our human resources that have contributed to the improved productivity and the reputation as one of the rail system-based public transportation providers in Jakarta. The Company's commitment to HR management has earned it a 4-Star Top Human Capital Awards 2024 and a Security Management System (SMP) award in the Gold Category/Excellent Predicate, with a score of 92.11%.

Risks and Challenges

The Company is aware of the improvements to consider so as to realize *service & operational excellence*. Meanwhile, the challenges are also not easy, especially in overcoming the risks that most significantly affect the Company's operational and financial performances, such as relating to the risk of not fulfilling non-farebox revenue (NFB) target.

Against those risks, the Company seeks to optimize the rail system-related businesses, encourage business innovation, synergize and collaborate with Jakpro Group, develop

Grup, mengembangkan lini usaha eksisting (*advertising, event & activation, O/M & consultancy, retail* dan sewa menyewa, telekomunikasi).

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2025, Perseroan telah menyusun rencana strategis untuk menghadapi dinamika serta tantangan bisnis di tahun mendatang dengan tetap memperhatikan aspek risiko serta mitigasinya. Direksi telah menyampaikan kepada para pemegang saham dan jajaran manajemen tentang Rencana Kerja dan Anggaran LRT Jakarta yang telah diselaraskan dengan arah rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yaitu “Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

LRT Jakarta sebagai salah satu operator transportasi publik berbasis rel di Jakarta akan berupaya untuk melakukan transformasi dan inovasi agar dapat mendukung peran baru Jakarta dengan menyediakan layanan publik yang lebih baik dan dapat diandalkan.

Keberadaan LRT Jakarta tentu akan menambah cakupan dan kapasitas layanan transportasi publik di Jakarta. Keberadaan LRT Jakarta juga akan meningkatkan interkoneksi antar jalur transportasi publik di wilayah DKI Jakarta sehingga antar moda bisa saling terintegrasi, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik dibandingkan alat transportasi pribadi dalam setiap aktivitasnya.

Fokus strategi ke depan masih pada upaya peningkatan pendapatan baik dari perolehan pelanggan (*farebox*) dan bisnis non-tiket (*non-farebox*) melalui sejumlah inisiatif, yang di antaranya merealisasikan program kerja perusahaan yang mencakup program peningkatan pelanggan serta tetap memenuhi *service & operation excellence*. Program-program bisnis *non-farebox* juga terus dikembangkan untuk dapat menghasilkan pendapatan diluar tiket serta mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Selain itu, PT LRT Jakarta juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta sebagai bentuk kolaborasi dengan stakeholder dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Dalam mengimplementasikan program tersebut, tentunya membutuhkan sumber daya yang andal serta mampu bersikap adaptif dan inovatif.

Kemudian dari sisi operasional, saat ini tengah berlangsung pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang akan menghubungkan Velodrome hingga Manggarai yang ditargetkan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Penambahan trase ini otomatis akan menambah cakupan layanan LRT Jakarta dari yang sebelumnya sepanjang 5,8 km menjadi 12 km. Perpanjangan rute ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada masyarakat terutama terkait penyediaan transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta.

existing business lines (*advertising, events & activation, O/M & consultancy, retail and leasing, telecommunications*).

Business Outlook

Entering the year 2025, the Company has developed a set of strategic plans to face the business dynamics and challenges in the next year while paying attention to risks and preparing the mitigation measures. The Board of Directors has submitted to shareholders and the management executives the LRT Jakarta Work Plan and Budget which has been well aligned with the directives of the DKI Jakarta Provincial Government's 2025 work plans, namely “Realizing Jakarta as a Resilient, Inclusive, Competitive and Sustainable Global City”.

LRT Jakarta as one of the rail system-based public transportation operators in Jakarta will continue to transform and innovate to support Jakarta's new role through the delivery of better and more reliable public services.

The presence of LRT Jakarta will certainly expand the scope and capacity of public transportation services in Jakarta. The presence of LRT Jakarta LRT will also increase the interconnection between public transportation lines within DKI Jakarta area, promoting integration between modes of transportation. Thus, in turn, it will drive people to prefer public transportation rather than private transportation in every activity.

The future strategies are still focused on efforts to increase revenue from both customer acquisition (*farebox*) and non-ticket business (*non-farebox*) through the launch of a number of initiatives, including realizing the company's work programs comprising customer improvement programs while continuing to meet service & operation excellence. Non-farebox business programs also continue to be developed to generate non-ticket revenue, thus reducing dependence on subsidies. In addition, PT LRT Jakarta is also committed to carrying on synergy with the Government, BUMN / BUMD, and Private Sector as a part of collaboration with stakeholders throughout its operations.

The program implementation indeed requires reliable resources that is also adaptive and innovative.

Then in term of the operational performance, the construction of the Jakarta LRT phase 1B is currently underway, to connect Velodrome to Manggarai with target for the commercial operation to be in 2027. The new route addition will automatically expand the coverage of the Jakarta LRT service from 5.8 km to 12 km. The route extension is expected to generate greater value to the communities, in term of integrated public transportation in Jakarta.



Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Bagi Perseroan, penerapan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan wujud komitmen Perseroan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnisnya dan serta memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). PT LRT Jakarta secara konsisten memiliki komitmen untuk memenuhi dan menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik di setiap aktivitas bisnis dan operasional yang mengacu pada standar terbaik (*best practice*) serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PT LRT Jakarta senantiasa mengedepankan aspek transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, Perseroan memiliki program untuk meningkatkan *awareness* yang dilakukan secara berkesinambungan kepada setiap insan LRT Jakarta dengan pokok bahasan mengenai pentingnya penerapan GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) sebagai bagian dari tanggung jawab bersama sehingga tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

Dalam rangka memastikan penerapan GCG yang terukur, Perseroan senantiasa melakukan pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap implementasi GCG, antara lain melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif serta pengendalian internal yang memadai dalam setiap pelaksanaan tugas pada setiap jenjang organisasi di lingkungan PT LRT Jakarta. Pengendalian internal merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur komitmen seluruh organ tata kelola terhadap penciptaan organisasi yang akuntabel di mata masyarakat, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Divisi Audit Internal dalam ini akan melakukan pemeriksaan sesuai Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan Pengendalian Internal pada PT LRT Jakarta pada tahun 2024 telah berlangsung cukup efektif.

Kemudian, Perseroan juga mendorong penegakan Kode Etik Perusahaan antara lain dengan menegakkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), termasuk di dalamnya Prosedur Pelaporan Pelanggaran dan Prosedur Investigasi Pelanggaran. Selain itu, Perseroan juga melakukan penanganan atas pelaporan pelanggaran. Upaya pengendalian gratifikasi juga dilakukan dengan menetapkan Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi, serta melaksanakan penanganan terhadap setiap laporan penerimaan gratifikasi. Upaya ini pada sepanjang tahun 2024 berdampak pada tidak adanya temuan penyimpangan (*fraud*) di lingkungan Perseroan.

Implementation of Corporate Governance

For the Company, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) reflects its commitment to pursuing the sustainable business growth and adding values to its stakeholders. PT LRT Jakarta has a continuous commitment to fulfilling and implementing the principles of Good Corporate Governance in every business and operational activity with respect to best practices and applicable laws and regulations. In addition, PT LRT Jakarta always prioritizes transparency to all relevant stakeholders.

To ensure the effectiveness of its implementation, the Company has designed a continuous program to increase awareness among LRT Jakarta employees, highlighting the importance of implementing GRC (Governance, Risk, and Compliance) as part of a shared responsibility so as to create a work culture in accordance with the corporate values.

In order to ensure the measurable implementation of GCG, the Company always supervises, assesses and evaluates the GCG implementation, among others through the implementation of comprehensive risk management and adequate internal control in every duty implementation across the organization of PT LRT Jakarta. Internal control is one of the important instruments to measure the commitment of all governance organs to establish an accountable organization in public eyes, shareholders and other stakeholders.

The Internal Audit Division will conduct an audit based on the Annual Audit Work Plan (RKAT) on the implementation of internal control. Pursuant to the audit results, the implementation of Internal Control at PT LRT Jakarta in 2024 was quite effective.

Then, the Company also encourages the enforcement of the Company's Code of Ethics, among others, by enforcing the Anti-Bribery Management System (SMAP), including the Whistleblowing Procedures and Violation Investigation Procedure. In addition, the Company also manages the incoming reports of violations. Gratification control is also carried out by establishing Gratification Control Guidelines and Procedures, as well as handling every report of gratification. Those efforts throughout 2024 had led to the absence of fraud practices in the Company.

Apresiasi

Menutup laporan ini, kami, Direksi, mewakili jajaran manajemen LRT Jakarta ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras yang telah seluruh insan tunjukkan bersama sepanjang tahun lalu. Kita telah melalui berbagai tantangan dan berhasil meraih berbagai pencapaian yang membanggakan.

Pada tahun 2025 mendatang, kami ingin mengajak semua karyawan untuk terus mendorong inovasi dan kreativitas dalam setiap aspek pekerjaan kita. Inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.

Selain itu, kami menghimbau seluruh insan LRTJ untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi, baik antar tim maupun dengan mitra eksternal. Investasi terbesar yang bisa kita lakukan adalah mendorong diri kita sendiri untuk terus berkembang dan membangun sinergi yang solid sesama rekan kerja. Dengan semangat dan komitmen yang kita miliki, kami merasa yakin LRT Jakarta akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dan memajukan perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

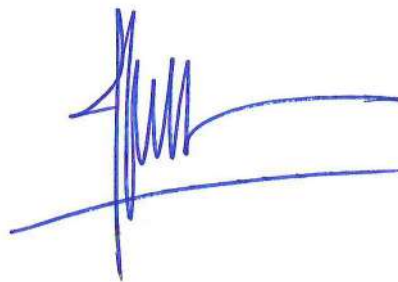
Appreciation

To conclude the report, we, the Board of Directors, on behalf of the management members of LRT Jakarta would like to thank all employees for their dedication and hard work in the past year. We have overcome many challenges and achieved many proud achievements.

Looking forward into 2025, we would like to encourage all employees to consistently drive innovation and creativity throughout their works. Innovation is the key to stay relevant and competitive in an constantly changing market.

In addition, we urge all LRTJ employees to continue to strengthen communication and collaboration, between teams and with external partners. The biggest investment we can make is to motivate ourselves to continue growing and build solid synergy among colleagues. With our passion and commitment, we are confident that LRTJ will be able to achieve the established targets and empower the Company to reach new heights.

Untuk dan atas nama Direksi
For and on behalf of the Board of Directors



HENDRI SAPUTRA

Direktur Utama
President Director



03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

LRT Jakarta sebagai salah satu operator transportasi publik berbasis rel di Jakarta akan berupaya untuk melakukan transformasi dan inovasi untuk mendukung peran baru Jakarta melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik dan dapat diandalkan.

LRT Jakarta as one of the rail system-based public transportation operators in Jakarta will continue to transform and innovate to support Jakarta's new role through the delivery of better and more reliable public services.







Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	PT LRT Jakarta
Penyebutan Lain Other Name	LRTJ/LRT Jakarta
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Date of Establishment and Operations	16 April 2018 April 16, 2018
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 154 of 2017 Article 39 paragraph (4)
Status Status	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company
Bidang Usaha Line of Business	Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) (LRT) Operation and Maintenance of Light Rail Transit (LRT) Facilities and Infrastructure
Kepemilikan Ownership	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) : 99,55% PT Jakarta Infrastruktur Propertindo : 0,45%
Modal Dasar Authorized Capital	Rp600.000.000.000 IDR600,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	Rp333.893.400.000 IDR333,893,400,000
Jumlah Karyawan Number of Employees	307 pegawai (2024) 307 employees (2024)
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250 MCC Building - Depo LRT Jakarta Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, North Jakarta City Special Region of the Capital City of Jakarta, 14250
Telepon Telephone	+62 21 8061 7490
Surel E-mail	carla@lrtjakarta.co.id
Situs Web Website	www.lrtjakarta.co.id
Media Sosial Social Media	Facebook : LRT Jakarta Twitter : @Lrtjkt Instagram : @Lrtjkt
Kontak Perusahaan Corporate Contact	Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary E-mail: sekretaris.perusahaan@lrtjakarta.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



SEJARAH PERUSAHAAN

HISTORY OF THE COMPANY

PT LRT Jakarta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berdiri pada tanggal 16 April 2018, yang salah satu usahanya bergerak di bidang pengoperasian dan perawatan sarana serta prasarana perkeretaapian. PT Jakarta Propertindo sebagai Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terpanggil untuk turut serta membantu Pemerintah untuk segera merealisasikan program dengan membangun proyek LRT Jakarta. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) yang merupakan tonggak awal didirikannya anak perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik. Sejak berdirinya pada 16 April 2018, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu LRT Jakarta. Tahun 2019 merupakan tahun yang bersejarah bagi Perusahaan, di mana pada tanggal 1 Desember 2019, Perusahaan mulai mengoperasikan LRT Jakarta secara komersial.

PT LRT Jakarta is a Limited Liability Company, which is owned in majority by PT Jakarta Propertindo (Perseroda), established on April 16, 2018, in which one of its businesses is in the operation and maintenance of railway facilities and infrastructure. As a Regional Company of DKI Jakarta Province, PT Jakarta Propertindo urged to contribute in supporting the Government to realize the program by building the Jakarta LRT project. After a long process, the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 154 of 2017 Article 39 paragraph (4) was finally stipulated and became the initial milestone for the establishment of a subsidiary to carry out specific duties so that LRT Infrastructure and Facilities can be operated, maintained and/or managed efficiently, effective and in accordance with good governance. Since its establishment on April 16, 2018, the Company has never changed its name, LRT Jakarta. The year 2019 was a historic year for the Company since on December 1, 2019, the Company started commercially operating the Jakarta LRT.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S CHANGE OF NAME

Sejak berdiri pada tanggal 16 April 2018 hingga tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, PT LRT Jakarta belum pernah melakukan perubahan nama dan perubahan status badan hukum.

Since its establishment on April 16, 2018 until the financial year ending on December 31, 2024, PT LRT Jakarta has never changed its name and changed its legal entity status.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN

MEANING OF THE COMPANY'S LOGO

Bagi LRTJ *brand* bukanlah hanya sekadar logo, namun juga aset visual yang berperan sebagai medium penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. Konsistensi tampilan visual juga akan membuat sebuah *brand* mudah dikenal.

For LRTJ, the brand is not just a logo, but also a visual asset that acts as a medium for conveying perceptions that establishes the image of a brand. Consistency in visual appearance will also make a brand easily recognizable.



LRT JAKARTA

A member of the **JAKPRO** Group of Companies

Bentuk/Shape

Elemen logo membentuk 3 garis yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk kereta api menggambarkan LRT Jakarta yang bergerak maju dan progresif di bidang perkeretaapian.

LRT Jakarta logo depicts an image of a complete circle forming 3 lines which as a whole represent the form of the Jakarta LRT train which is moving forward and progressively in the railroad sector.

Warna/Color

Perpaduan warna antara warna merah mencerminkan keuletan, ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, yang ditambah dengan warna emas menunjukkan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan kemakmuran.

The red color represents tenacity, firmness and courage in facing various kinds of difficulties, which is combined with the gold color that represents achievement, success, luxury, victory and prosperity.

Keanggotaan Asosiasi

Membership in Association

- Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia (PMSM) Indonesia - Gold Member
- PERHUMAS - Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan
- Forum CSR Jakarta Utara - Wakil Ketua Umum CSR Jakarta Utara
- APJASI (Asosiasi Pengguna Jasa Sekuriti Indonesia) - Anggota
- Indonesia Human Resources Management Association (PMSM) – Gold Member
- PERHUMAS – Public Communication and Community Relations Department
- North Jakarta CSR Forum – Vice Chairman of North Jakarta CSR Forum
- APJASI (Indonesian Association of Security Services Users) – Member

Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan

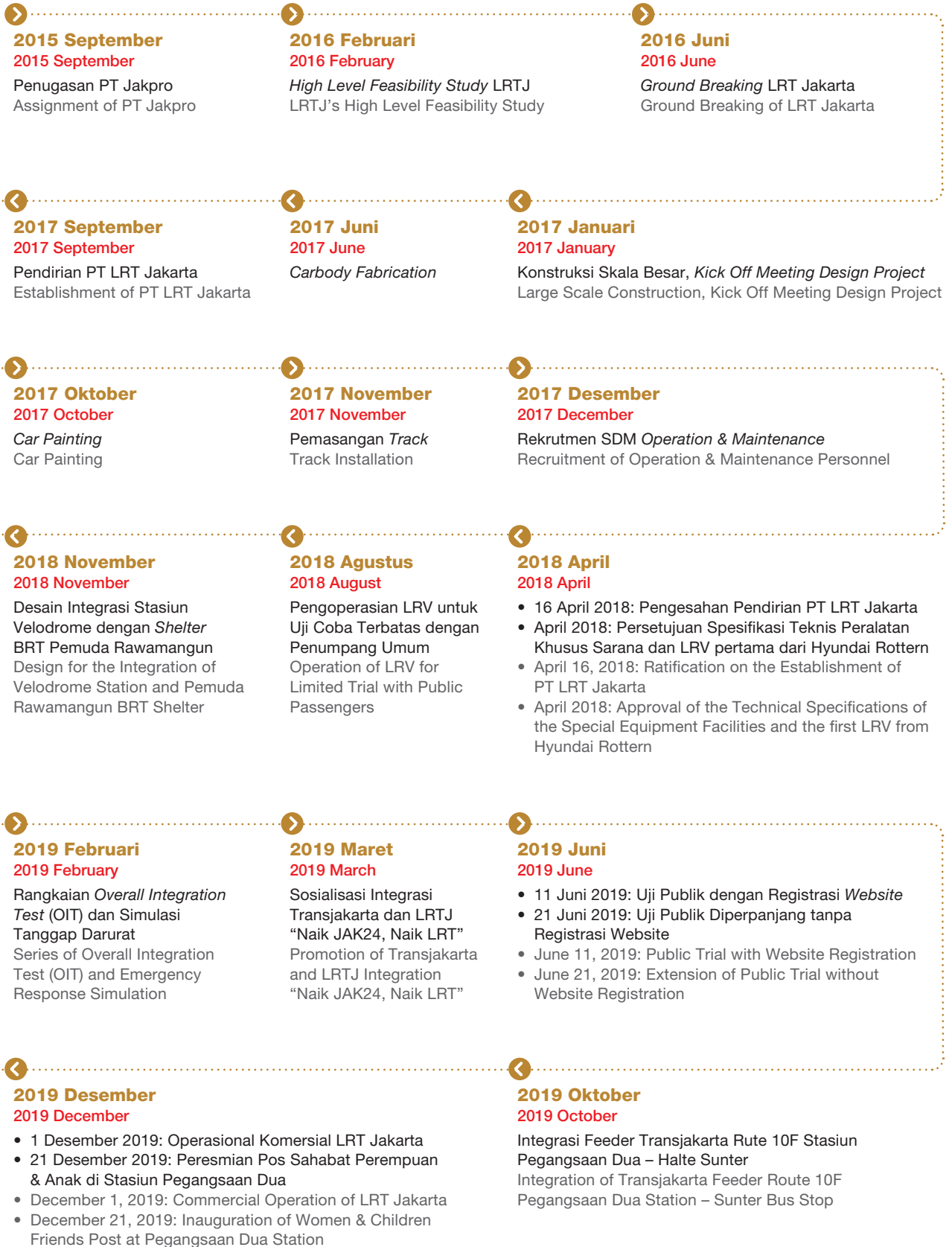
Significant Changes in the Company

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan signifikan yang terjadi pada perusahaan.

As of the end of 2024, there were no significant changes in the Company.

Jejak Langkah

Milestones





2020 Februari

2020 February

Penandatanganan Kerja Sama *Park & Ride* di Summarecon Mall Kelapa Gading
Signing of the Park & Ride Cooperation at Summarecon Mall Kelapa Gading



2022 Februari

2022 February

- Terbit KepGub No.129 tahun 2022 mengenai penetapan trase 2A
- Penghargaan “Sentra Vaksinasi LRTJ” dari Puskesmas Kelapa Gading
- Issuance of Decree of the Governor No.129 of 2022 concerning the determination of 2A route
- “LRTJ Vaccination Center” Award from Kelapa Gading Health Center



2022 Juni

2022 June

Terlaksananya 1st Overhaul LRV LRT Jakarta
Implementation of the 1st LRV Overhaul of LRT Jakarta



2022 Mei

2022 May

Penghargaan Peringkat Emas Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
Gold Rating Award for Occupational Health and Safety Management System (SMK3)



2022 Maret

2022 March

Terbitnya “Izin Usaha Prasarana LRT Jakarta”
Issuance of “Infrastructure Business Permit of LRT Jakarta”



2022 Oktober

2022 Oktober

- Diluncurkannya Tarif Integrasi Transportasi DKI Jakarta
- Persetujuan Kemenhub akan trase menyeluruh Rajawali – Halim
- Komitmen Pelayanan LRT Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
- Launching of Integrated Tariff for DKI Jakarta Transportation
- Approval of the Ministry of Transportation for the Rajawali – Halim comprehensive route
- LRT Jakarta Service Commitment to be Women and Children Friendly



2022 November

2022 November

- Persetujuan Fase 1B Velodrome-Manggarai oleh Presiden RI
- Mendapatkan DTKJ Awards: Pelayanan Disabilitas
- Approval for Velodrome-Manggarai Phase 1B by the President of the Republic of Indonesia
- Received the DTKJ Awards: Disability Services



2023 Oktober

2023 October

Groundbreaking Fase 1B LRT Jakarta *route* Velodrome – Manggarai
Groundbreaking Phase 1B of LRT Jakarta, Velodrome – Manggarai route



2023 Agustus

2023 August

Peluncuran “LRT Jakarta Integritas”
Launching of “LRT Jakarta Integritas”



2022 Desember

2022 December

- 3 tahun operasi komersial LRT Jakarta
- Penetapan Stasiun Pegangsaan Dua sebagai Sentra Vaksinasi Jakarta Utara
- 3 years of commercial operation of LRT Jakarta
- Designation of Pegangsaan Dua Station as North Jakarta Vaccination Center



2023 November

2023 November

Penandatanganan MoU *Link & Match*
Signing MoU Link & Match



2023 Desember

2023 December

Penetapan Stasiun dan Depo LRT Jakarta sebagai Objek Vital Nasional
Designation of LRT Jakarta Station and Depo as National Vital Objects



2024 Januari

2024 January

Peresmian Urban Farming LRT Jakarta
Inauguration of LRT Jakarta Urban Farming



2024 Oktober

2024 October

Uji coba jalur LRT Fase 1B (Velodrome-Rawamangun)
Trials of LRT Phase 1B (Velodrome-Rawamangun)



2024 September

2024 September

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Summarecon Mall Kelapa Gading untuk hak penamaan atau *naming rights* Stasiun Boulevard Utara
Signing of Cooperation Agreement (PKS) with Summarecon Mall Kelapa Gading for the naming rights of North Boulevard Station

Kegiatan dan Bidang Usaha

Business Activities and Lines of Business

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang dikukuhkan dengan Akta No. 58 tanggal 17 Mei 2023, maka maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menjalankan usaha di bidang:

1. Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa.
2. Konstruksi bangunan sipil.
3. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
4. Konstruksi Khusus.
5. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis.
6. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan.
7. Telekomunikasi.
8. Real estat.
9. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.
10. Periklanan dan penelitian pasar.
11. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.
12. Pendidikan.
13. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadangan dan perlengkapannya.
14. Aktivitas ketenagakerjaan.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, sepanjang tahun 2024 Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

In accordance with of the Company's Articles of Association, which was confirmed by Deed No. 58 dated May 17, 2023, the purpose and objectives of the Company is to operate business in the fields of:

1. Land transportation and transportation through pipelines.
2. Civil building construction.
3. Reparations and Installations of Machines and Equipment.
4. Special construction.
5. Architectural and engineering activities; technical analysis and testing.
6. Warehousing and transportation support activities.
7. Telecommunications.
8. Real estate.
9. Head office activities and management consulting.
10. Advertising and market research.
11. Rental and leasing activities without option rights.
12. Education.
13. Wholesale trade in land transportation equipment (excluding cars, motorbikes, and the like), spare parts and equipment.
14. Employment Activities.

In achieving its purpose and objectives as mentioned above, in 2024 the Company conducted the following business activities:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar The Company's Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Has Been/Not Yet Executed	Kegiatan yang Dijalankan Activities Conducted
Kegiatan pengoperasian sarana dan prasarana Facilities and infrastructure operation activities	v	Kegiatan operasional kereta, kegiatan perawatan sarana dan prasarana Railways operational activities, maintenance of facilities and infrastructures
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment Repair and Installation	x	Pembelian sparepart untuk mitra Purchase of spareparts for partners
Konstruksi khusus/Special construction	x	-
Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan Warehousing and transportation support activities	x	-
Telekomunikasi/Telecommunications	x	-
Real Estat/Real Estate	x	-
Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen Head office activities and management consulting	x	-
Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran Architectural and engineering activities	x	-
Periklanan dan penelitian pasar Advertising and market research	x	-
Pendidikan/Education	v	1. LRT EduTour/Belajar bareng 2. Diklat Sarana dan Prasarana BAPERKA
Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya Wholesale trade in land transportation equipment (not cars, motorbikes, and the like), spare parts and equipment	x	-
Aktivitas Ketenagakerjaan/Employment Activities	x	-



Pengembangan Produk dan Jasa

Product and Service Development

Pada tahun buku 2024, Perseroan telah menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan dalam Anggaran Dasar dan terus mengembangkan lini usahanya hingga mencakup produk dan layanan berikut ini:

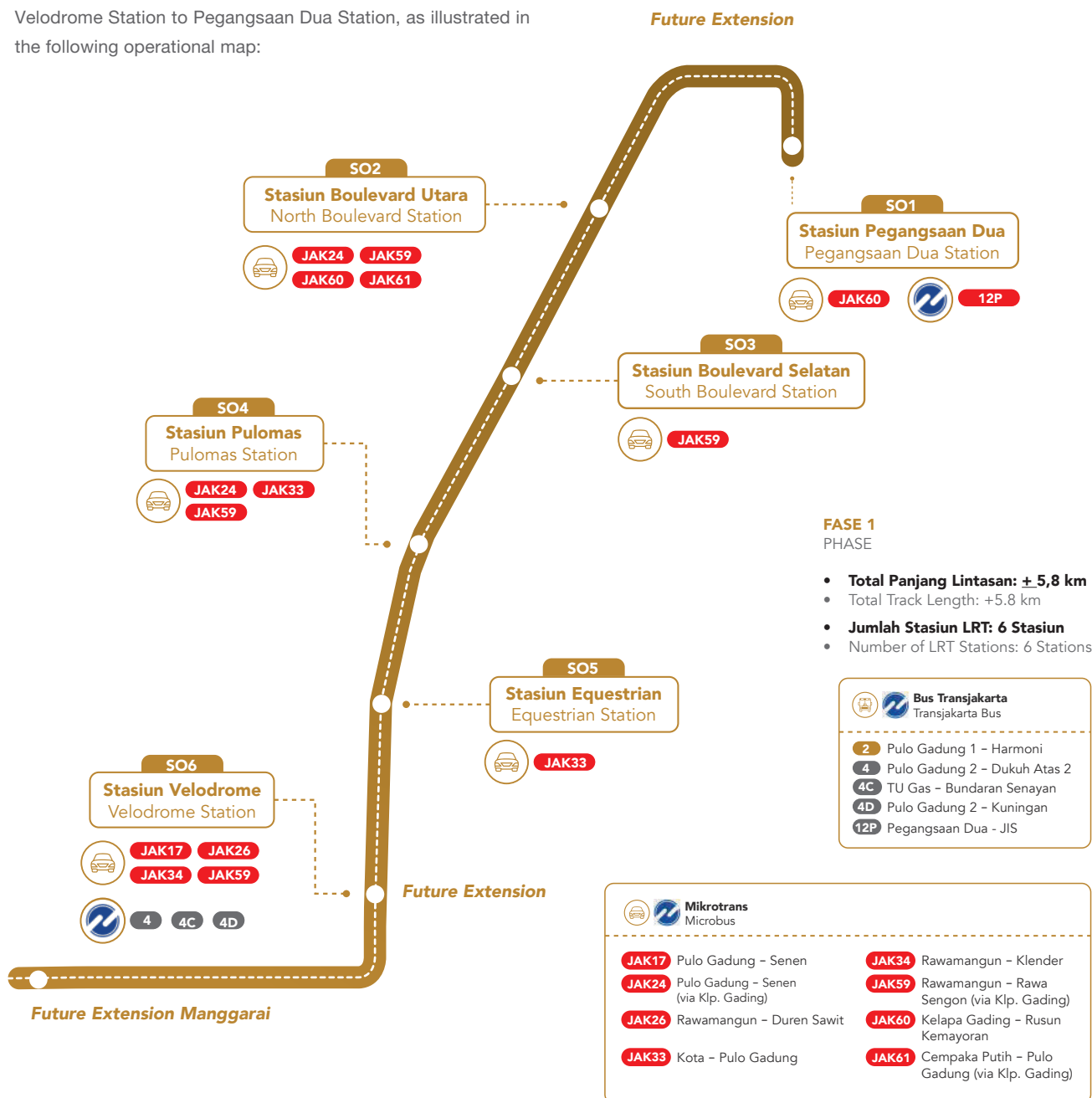
In 2024, the Company has carried out its business activities in accordance with the purpose and objectives of its establishment stipulated in the Articles of Association and continued to develop its lines of business to cover the following products and services:



Wilayah Operasi

Operational Area

Selama tahun 2024, wilayah operasi Perseroan mencakup Stasiun Velodrome sampai dengan Stasiun Pegangsaan Dua, sebagaimana digambarkan pada peta operasional berikut ini:
Throughout 2024, the Company's operational area covers Velodrome Station to Pegangsaan Dua Station, as illustrated in the following operational map:





Visi, Misi, Sikap Dasar dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Core Attitude and Corporate Culture

Manajemen Perseroan telah melakukan review atas visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan. Manajemen memandang bahwa visi, misi dan nilai-nilai perusahaan masih relevan dengan perkembangan bisnis Perseroan pada tahun buku. Berikut penjabaran visi, misi dan nilai-nilai perusahaan:

The Company's management has reviewed the vision and mission as well as the corporate values. The management believes that the vision, mission and corporate values are still relevant with the Company's business development in the fiscal year. The following are the Company's vision, mission and corporate values.



VISI Vision

Menjadi Solusi Mobilitas Publik Terbaik di Indonesia
To Be the Best Public Mobility Solution in Indonesia



MISI Mission

- Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman
- Mengembangkan jaringan transportasi publik yang moderen dan terintegrasi
- Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang "LRTJ"
- Providing safe and comfortable public transportation services for Jakarta residents
- Developing a modern and integrated public transportation network, and
- Build the Company's reputation by developing "LRTJ" human resources

Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Review of Company Vision and Mission by Key Management

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi perusahaan yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission in the Company's Work Plan and Budget, which has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.



Nilai Perusahaan Corporate Values

Perusahaan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) mewajibkan seluruh karyawannya untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Perusahaan yakni LRTJ. Nilai-nilai Perusahaan ini memiliki arti penting dalam merealisasikan visi dan misi Perusahaan sehingga nantinya diharapkan dapat menuntun kinerja perusahaan lebih berjalan optimal dan terarah ke depannya.

In managing its Human Resources (HR), the Company requires all its employees to always implement the Company's corporate values, namely LRTJ. These corporate values have an essential meaning in realizing the Company's vision and mission so that later it is expected to guide the Company's performance to operate business more optimally and be directed in the future.

L

LINCAH Agility

*Learning Agility,
Innovative, Resilience,
People Agility*

R

RAMAH Service

*Empathy, Responsive,
Hospitable,
Communicative*

T

TERPERCAYA Reliability

*Committed,
Competent, Solution
Oriented, Accountable*

J

JUJUR Integrity

*Trusted,
Transparent,
Compliance, Equity*

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai Perusahaan

Socialization and Internalization of the Corporate Values

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menanamkan, serta memperkuat pemahaman seluruh insan Perusahaan terhadap nilai-nilai yang dianut, Perusahaan secara konsisten melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai tersebut.

Untuk memastikan nilai-nilai Perusahaan terinternalisasi dengan baik dan tercermin dalam perilaku sehari-hari, Perusahaan melakukan berbagai upaya, termasuk program induksi bagi karyawan baru, serta kegiatan penyegaran (*refreshment*) melalui pertemuan internal, *townhall*, dan forum-forum komunikasi lainnya.

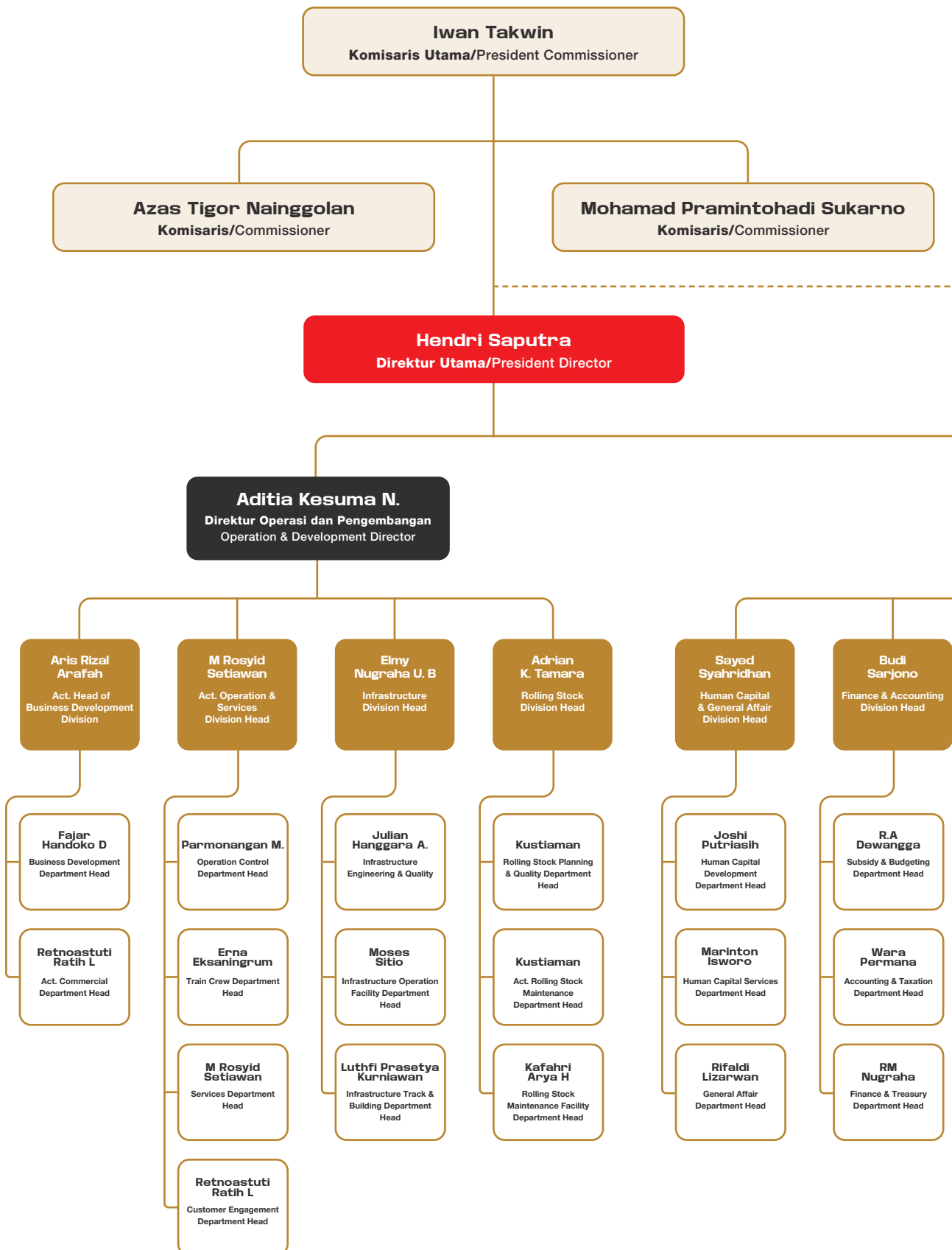
In an effort to improve knowledge, incorporate and raise the understanding of all Company Personnel regarding these corporate values, the Company consistently organizes socialization and internalization of these values.

In order to ensure a proper internalization of the Corporate Values that is reflected in daily behavior, the Company has carried out various efforts, including an induction program for new employees, as well as refreshment activities through internal, *townhall*, and other communication forums.



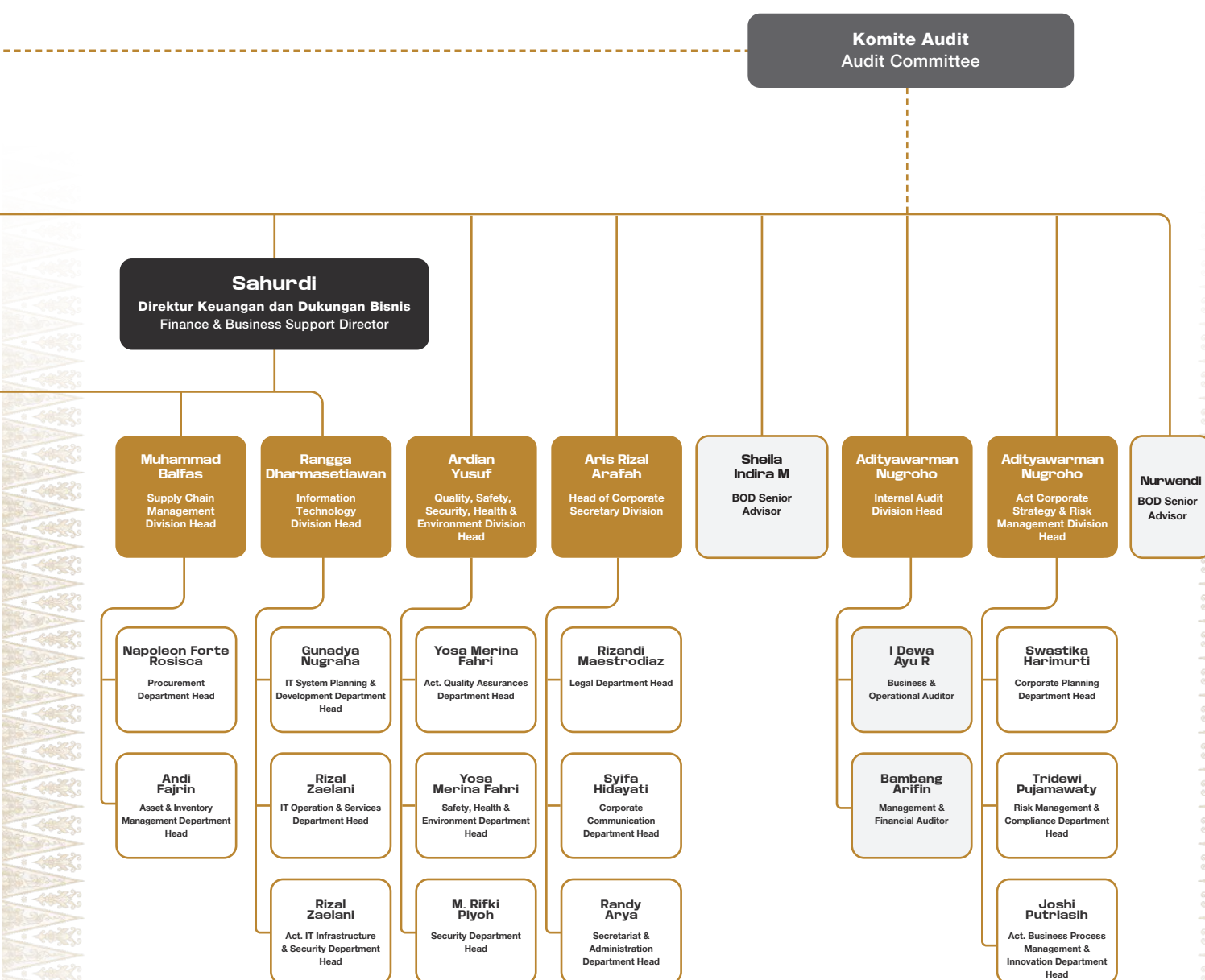
Struktur Organisasi

Organization Structure



Perusahaan terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/DRU/111/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Makro PT LRT Jakarta.

The Company continues to strengthen the organizational structure in order to achieve common goals. The Company's organizational structure has been ratified through the Decree of the Board of Directors No. 002/DRU/111/VIII/2024 dated 01 August 2024 concerning Changes in the Macro Organizational Structure of PT LRT Jakarta.





Penghargaan Awards

LRT Jakarta senantiasa menghadirkan layanan yang optimal dan kinerja operasional secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang didapatkan oleh Perusahaan di tahun 2024 seperti:

LRT Jakarta always provides optimal service and maximum operational performance. This is shown by the various awards obtained by the Company in 2024, including:

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
7 Maret 2024 March 7, 2024	Silver Winner Program Corporate PR #BelajarBarengLRTJ Corporate PR Program #BelajarBarengLRTJ	PR Indonesia
	Bronze Winner Departemen PR PR Department	
	Bronze Winner Program Corporate PR #KELAR (Keliling BarengLRTJ) Corporate PR Program #KELAR (Keliling BarengLRTJ)	
20 Maret 2024 March 20, 2024	• Top BUMD Awards 2024 Kategori Aneka Usaha # Bintang 5 • Top CEO 2024 (Hendri Saputra – Direktur Utama PT LRT Jakarta) • Top BUMD Awards 2024 Multi Business Category # 5 Star • Top CEO 2024 (Hendri Saputra – President Director of PT LRT Jakarta)	TopBusiness.id
30 April 2024 April 30, 2024	Penghargaan THE 15 th SPS AWARDS 2024 dengan Bronze untuk Indonesia Digital Media Awards (IDMA) Kategori Media Sosial Terbaik (Sub Kategori Korporasi) The 15 th SPS Awards 2023, the Company received Indonesia Digital Media Awards (IDMA) with the Bronze predicate for the Best Social Media (category – Corporate Subcategory)	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Press Company Union (SPS)
27 Juni 2024 June 27, 2024	Juara III Kategori Awak Sarana Perkeretaapian Teladan Wilayah Jabodetabek oleh masinis wanita Nur Faradhilah Third place in the Exemplary Railway Crew Category for the Greater Jakarta Area by female train driver Nur Faradhilah	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub RI Transportation Management Agency of Jabodetabek, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
24 Juli 2024 July 24, 2024	<i>Very Good in HR Excellence Category “Wellbeing Management”</i> <i>Very Good in HR Excellence Category “Learning and Development and Knowledge Management”</i>	Majalah SWA @swamediainc dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) SWA magazine @swamediainc and Management Institute of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (LM LFEB UI)
9 Agustus 2024 August 9, 2024	• Indonesia Popular Companies Award • Indonesia Popular Corporate Reputation Award 2024 – Transportation Category • Indonesia Popular 50 PR Person Awards 2024 (Hendri Saputra – Direktur Utama PT LRT Jakarta) - Indonesia Popular 50 PR Person Awards 2024 (Hendri Saputra – President Director of PT LRT Jakarta)	The Economics

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
12 September 2024 September 12, 2024	• <i>Top GRC Awards 2024 #4 Star</i> • <i>The High Performing Board of Commissioner on GRC 2024</i> • <i>The Most Committed GRC Leader 2024</i> (Hendri Saputra – Direktur Utama PT LRT Jakarta) The Most Committed GRC Leader 2024 (Hendri Saputra – President Director of PT LRT Jakarta)	TopBusiness.id
12 September 2024 September 12, 2024	• The Best Customer Service Public – Platinum • The Best Customer Experience – Gold • The Best Employee Engagement – Gold	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
19 September 2024 September 19, 2024	• Operator Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Transportasi Ramah Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil, dan Anak – Platinum • Petugas Pria Terbaik Dalam Pelayanan Disabilitas – Platinum • Best Operator of Transportation Facilities and Infrastructure for the Disabled, Elderly, Pregnant Women, and Children - Platinum • Best Male Officer in Disability Services - Platinum	Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Directorate of Transportation Jakarta city (DTKJ)
20 September 2024 September 20, 2024	Program Media Relations Terbaik – Silver The Best Media Relations Program - Silver	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Press Company Union (SPS)
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Kanal Digital Media Sosial Instagram – Silver Social Media Digital Channel - Silver	Humas Indonesia Indonesia Public Relations
30 Oktober 2024 October 30, 2024	• <i>Top Human Capital Awards 2024 # 4 Stars</i> • <i>Top Most Committed Human Capital Leader 2024</i> (Sahurdi – Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT LRT Jakarta) Top Most Committed Human Capital Leader 2024 (Sahurdi – Director of Finance and Business Support PT LRT Jakarta)	Topbusiness.Id

Sertifikasi

Certifications

- Sertifikat ISO 9001 : 2015 berlaku hingga Maret 2026
- Sertifikat ISO 45001 : 2018 berlaku hingga Maret 2026
- Sertifikat Sistem Manajemen Terintegrasi berlaku hingga Maret 2026
- Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) berdasarkan Permenhub No.69 Th 2018 berlaku hingga Desember 2025
- Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan berlaku hingga Desember 2027
- ISO 9001: 2015 Certificate, valid until March 2026
- ISO 45001: 2018 Certificate, valid until March 2026
- Integrated Management System Certificate, valid until March 2026
- Railway Safety Management System (SMKP) Certificate based on the Ministry of Transportation Regulation No. 69 of 2018, valid until December 2025
- Security Management System Audit, valid until December 2027



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile

Sepanjang tahun 2024 dan sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, di mana susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Throughout 2024 and until the Annual Report was signed, there have been changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Iwan Takwin	Komisaris Utama/President Commissioner
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris/Commissioner
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris/Commissioner

Adapun profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah berikut:

The profile of each member of the Board of Commissioners until the Annual Report was signed is as follows:





Iwan Takwin

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan: 7 Oktober 2022 – sekarang
Term of Office: October 7, 2022 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Makassar, 9 September 1975

Personal Data

Indonesian citizen
49 years old as of December 31, 2024
Born in Makassar, September 9, 1975

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)

Educational Background

Bachelor of Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999)

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Certifications

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta no. 103/UT2000/X/2022/0321;
- Akta PKPS PT LRT Jakarta Nomor 22;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0066816.

History and Legal Basis of Appointment

- Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321;
- Deed of PKPS PT LRT Jakarta No. 22
- Letter of Receipt of Notification Company Data Change of PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0066816.

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2022-sekarang
- Direktur Utama PT Jakarta Solusi Lestari 2021-2022
- Direktur Proyek PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2016-2021

Work Experience

- President Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2022-Present
- President Director of PT Jakarta Solusi Lestari 2021-2022
- Project Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2016-2021

Rangkap Jabatan

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Concurrent Position

President Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



Azas Tigor Nainggolan

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 21 Maret 2023 - Sekarang
Term of Office: March 21, 2023 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Medan, 9 Februari 1965

Personal Data

Indonesian citizen
59 years old as of December 31, 2024
Born in Medan, February 9, 1965

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Domicile

North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- S3 Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (2024)
- S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila (2018)
- S2 Magister Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Nasional (2014)
- S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (1989)

Educational Background

- Doctor of Law, Pelita Harapan University (2024)
- Master of Law, Pancasila University (2018)
- Master of Political Science, National University (2014)
- Bachelor of Law, the Christian University of Indonesia (1989)

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Certifications

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

1. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023;
2. Akta PKPS PT LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 April 2023; dan
3. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0106501.

History and Legal Basis of Appointment

1. Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023;
2. Deed of PKPS PT LRT Jakarta Number 01 dated April 3, 2023; and
3. Letter of Receipt of Notification Company Data Change of PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0106501.

Riwayat Pekerjaan

1. Ketua Bidang Sosial Budaya, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) (2020-2025)
2. Ketua Bidang Sosial Budaya, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) (2015-2020)
3. Pendiri dan Ketua Koalisi Transport Demand Management (TDM) Jakarta (2010-sekarang)
4. Pendiri dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta (2009-sekarang)
5. Pendiri dan Board LBH Pers (2006-sekarang)
6. Bendahara Eksekutif Board INFID (2005-2008)
7. Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2004-sekarang)
8. Koordinator Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta (1998-2002)
9. Institut Sosial Jakarta (ISJ), mulai dari menjadi pendamping lapangan, Koordinator Biro Pengorganisasian, Koordinator Presidium Pengurus ISJ (1989-2003)

Work Experience

1. Chairman of Socio-Cultural Affairs, National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (2020-2025)
2. Chairman of Social and Cultural Affairs, National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (2015-2020)
3. Founder and Chair of the Jakarta Transport Demand Management (TDM) Coalition (2010-present)
4. Founder and Coordinator of the Jakarta Citizens Coalition for Transportation (KAWAT) (2009-present)
5. Founder and Board of LBH Pers (2006-present)
6. Treasurer of the Executive Board of INFID (2005-2008)
7. Member of the Indonesian Advocates Association (AAI) (2004-present)
8. Coordinator of the Jakarta Regional Council of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) (1998-2002)
9. Institute of Social Jakarta (ISJ), starting as a field assistant, Coordinator of the Organizing Bureau, Coordinator of the ISJ Management Presidium (1989-2003)

Rangkap Jabatan

1. Pendiri dan Ketua Koalisi Transport Demand Management (TDM) Jakarta (2010-sekarang)
2. Pendiri dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta (2009-sekarang)
3. Pendiri dan Board LBH Pers (2006-sekarang)
4. Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2004-sekarang)

Concurrent Position

1. Founder and Chair of the Jakarta Transport Demand Management (TDM) Coalition (2010-present)
2. Founder and Coordinator of the Jakarta Citizens Coalition for Transportation (KAWAT) (2009-present)
3. Founder and Board of LBH Pers (2006-present)
4. Member of the Indonesian Advocates Association (AAI) (2004-present)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



Mohamad Pramintohadi Sukarno

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 5 Oktober 2023 - Sekarang

Term of Office: October 5, 2023 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Yogyakarta, 21 Mei 1963

Personal Data

Indonesian citizen
61 years old as of December 31, 2024
Born in Yogyakarta, May 21, 1963

Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung (1993)
- S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)

Educational Background

- Master of Transportation, Bandung Institute of Technology (1993)
- Bachelor of Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1987)

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Certifications

Certified Risk Executive Leader (CREL) - LSP BPKP (2024)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta no. 001/KPS/123/X/2023;
- Akta PKPS PT LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 November 2023; dan
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0182131.

History and Legal Basis of Appointment

- Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/X/2023;
- Deed of PKPS PT LRT Jakarta Number 01 dated November 3, 2023; and
- Letter of Receipt of Notification Company Data Change of PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0182131.

Riwayat Pekerjaan

- Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan (2023-sekarang)
- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023)
- Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan (2022)
- Direktur Utama Airmav Indonesia (2020-2022)
- Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan (2019-2020)
- Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan (2018-2019)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Plt Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan (2018)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015-2016)
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015)
- Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Kelas I Hasanuddin Makassar Kementerian Perhubungan (2015)
- Kepala Kantor Otoritas Wilayah III Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya Kementerian Perhubungan (2014-2015)
- Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Kementerian Perhubungan (2013-2014)
- Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Jakarta Kementerian Perhubungan (2011-2013)
- Kabag TU Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I Kelas Utama Soetta Kementerian Perhubungan (2011-2013)
- Atase Perhubungan KBRI Canada (2007-2011)
- Kabid Ketertiban Adban Juanda Surabaya Kementerian Perhubungan (2005-2007)
- Kasi Mutu Tanah Kementerian Perhubungan (1999-2005)
- Pimbagpro KTI Kementerian Perhubungan (1996-1999)
- Staf Subdit Penyelidikan dan Standarisasi Kementerian Perhubungan (1987-1996)

Work Experience

- Policy Analyst, Main Expert, Ministry of Transportation (2023-present)
- Inspector General, Ministry of Transportation (2022-2023)
- Expert Staff for Transportation Technology, Energy, and Environment, Ministry of Transportation (2022)
- President Director of Airmav Indonesia (2020-2022)
- Expert Staff for Transportation Technology, Energy, and Environment, Ministry of Transportation (2019-2020)
- Director of Airports, Ministry of Transportation (2018-2019)
- Secretary of Directorate General of Civil Aviation (Acting Director General of Land Transportation), Ministry of Transportation (2018)
- Secretary of the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation (2015-2016)
- Head of the Research and Development Center for Civil Aviation, Ministry of Transportation (2015)
- Head of Airport Authority Office for Region V Class I Hasanudin Makassar, Ministry of Transportation (2015)
- Head of Airport Authority Office for Region III Class I Juanda Surabaya, Ministry of Transportation (2014-2015)
- Head of Airport Authority Office for Region II Medan, Ministry of Transportation (2013-2014)
- Head of Administration Division of Airport Authority Office for Region I Jakarta, Ministry of Transportation (2011-2013)
- Head of Administration Division of Airport Authority Office for Region I Main Class Soetta, Ministry of Transportation (2011-2013)
- Transportation Attaché at the Indonesian Embassy in Canada (2007-2011)
- Head of Order Adban Juanda Surabaya, Ministry of Transportation (2005-2007)
- Head of Land Quality Section, Ministry of Transportation (1999-2005)
- Project Leader for KTI, Ministry of Transportation (1996-1999)
- Staff of Sub-Directorate of Investigation and Standardization, Ministry of Transportation (1987-1996)

Rangkap Jabatan

Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan (2023-sekarang)

Concurrent Position

Policy Analyst, Main Expert Staff, Ministry of Transportation (2023-present)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile

Sepanjang tahun 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan, dimana susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Throughout 2024 and until the Annual Report was signed, there have been changes in the composition of the Company's Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Hendri Saputra	Direktur Utama/President Director
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis/Director of Finance and Business Support
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan/Director of Operations and Development

Adapun profil Direksi yang menjabat per 31 Desember 2024, hingga sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagai berikut:

Profile of the Board of Commissioners serving as of December 31, 2024, until the signing of this Annual Report is as follows:





Hendri Saputra

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 3 November 2021-sekarang, Periode ke-1
Term of Office: November 3, 2021-Present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Pekanbaru 13 Juni 1970

Personal Data

Indonesian citizen
54 years old as of December 31, 2024
Born in Pekanbaru, June 13, 1970

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Jurusan Fisika, Prodi Geofisika dari Universitas Indonesia (1995)

Educational Background

Bachelor's Degree in Physics, Geophysics Study Program from the University of Indonesia (1995)

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)

Certifications

Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Akta PKPS no. 01 tanggal 03 Januari 2022
- Surat penerimaan pemberitahuan Data Perseroan No. AHU.01.03-0001476

History and Legal Basis of Appointment

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Deed of PKPS no. 01 dated January 03, 2022
- Letter of Receipt of Notification Company Data No. AHU-AH.01.03-0001476

Riwayat Pekerjaan

- President Director, PT LRT Jakarta (2021-sekarang)
- Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT Jakarta Propertindo (Persero) (2019-2021)
- Business Process Improvement Manager/ System Implementation Head, PT Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019)
- Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012)
- Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008)
- Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005)
- Business Process Specialist, PT Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002)
- Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001)
- Quality Coordinator, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999)

Work Experience

- President Director, PT LRT Jakarta (2021-present)
- Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT Jakarta Propertindo (Persero) (2021)
- Business Process Improvement Manager/System Implementation Head, PT Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019)
- Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012)
- Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008)
- Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005)
- Business Process Specialist, PT Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002)
- Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001)
- Quality Coordinator, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Concurrent Position

Has no concurrent positions

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Directors, Board of Commissioners, or with Major/Controlling Shareholders.



Sahurdi

Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support

Periode Jabatan: 7 Oktober 2022-sekarang Periode ke-1
Term of Office: October 7, 2022-present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Bukittinggi 13 Oktober 1972

Personal Data

Indonesian citizen
52 years old as of December 31, 2024
Born in Bukittinggi, October 13, 1972

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Andalas, Sumatera Barat (1996)

Educational Background

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Andalas University, West Sumatera (1996)

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)

Certifications

Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

1. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 103/ UT2000/X/2022/0321;
2. Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 22; dan
3. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09.0066816.

History and Legal Basis of Appointment

1. Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321;
2. Deed of PKPS PT. LRT Jakarta No. 22; and
3. Letter of Receipt of Notification Company Data Change of PT. LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0066816.

Riwayat Pekerjaan

1. Director of Finance and Business Support PT LRT Jakarta (2022-sekarang)
2. General Manager of Project Acquisition & Development, PT Jakarta Propertindo (Persero) (2022)
3. General Manager of Strategic Business and Procurement, PT LRT Jakarta (2019-2022)
4. General Manager Business Support, PT LRT Jakarta (2018- 2019)
5. Vice President (Plt) Corporate Secretary, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (2017-2018)
6. Vice President Procurement & Facility Management, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun (2010-2018)
7. Manager General Affairs, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2004-2010)

Work Experience

1. Director of Finance and Business Support, PT LRT Jakarta (2022-present)
2. General Manager of Project Acquisition & Development, PT Jakarta Propertindo (Persero) (2022)
3. General Manager of Strategic Business and Procurement, PT LRT Jakarta (2019-2022)
4. General Manager Business Support, PT LRT Jakarta (2018- 2019)
5. Vice President (Plt) Corporate Secretary, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (2017-2018)
6. Vice President Procurement & Facility Management, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun (2010-2018)
7. Manager General Affairs, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2004-2010)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Concurrent Position

Has no concurrent positions

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Directors, Board of Commissioners, or with Major/Controlling Shareholders.



Aditia Kesuma Negara

Direktur Operasi dan Pengembangan
Director of Operations and Development

Periode Jabatan: 3 November 2021-sekarang Periode Ke-1
Term of Office: November 3, 2021-present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Medan, 20 Agustus 1985

Personal Data

Indonesian citizen
39 years old as of December 31, 2024
Born in Medan, August 20, 1985

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Doctoral Degree Program in Economic Business, Universitas Padjajaran (2020-sekarang)
2. Research Student di Kyushu University, Jepang (2011)
3. Magister (S2) Program Master Sistem & Teknik Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2011)
4. Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2009)

Educational Background

1. Doctoral Degree Program in Economic Business, Padjadjaran University (2020-present)
2. Research Student at Kyushu University, Japan, (2011)
3. Master in Transportation Systems & Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2011)
4. Bachelor of Civil and Environmental Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2009)

Sertifikasi

1. Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)
2. Engineering Professional Certified (Ir.), Universitas Gadjah Mada (2019)
3. Senior Professional Engineer (IPM), Persatuan Insinyur Indonesia (2019)
4. ASEAN Engineering Certified (ASEAN Eng) (2019)

Certifications

1. Certified Risk Executive Leader (CREL), LSP BPKP (2024)
2. Engineering Professional Certified (Ir.), Universitas Gadjah Mada (2019)
3. Senior Professional Engineer (IPM), Persatuan Insinyur Indonesia (2019)
4. ASEAN Engineering Certified (ASEAN Eng) (2019)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

1. KPSS No.001/KPPS/XII/2021
2. Akta PKPS no. 01 tanggal 03 Januari 2022

History and Legal Basis of Appointment

1. KPSS No.001/KPPS/XII/2021
2. Deed of PKPS no. 01 dated January 03, 2022

Riwayat Pekerjaan

1. Director of Operation and Development PT LRT Jakarta (2021-sekarang)
2. General Manager of Operation and Services LRT Jakarta (2018-2021)
3. Lecturer at Civil Engineering of Mercubuana University (2018-sekarang)
4. PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018)
5. Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016)
6. Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014)
7. Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012)

Work Experience

1. Director of Operation and Development, PT LRT Jakarta (2021-present)
2. General Manager of Operation and Services, LRT Jakarta (2018-2021)
3. Lecturer at Civil Engineering of Mercubuana University (2018-present)
4. PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018)
5. Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016)
6. Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014)
7. Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Concurrent Position

Has no concurrent positions

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Directors, Board of Commissioners, or with Major/Controlling Shareholders.



PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers



Nurwendi

BOD Senior Advisor

BOD Senior Advisor

Menjabat sejak: Juni 2023

Serving since: June 2023

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2024 53 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Desember 2019 December 1, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	German Dual System pendidikan Teknik Mesin Siemens di Cilegon dan Industriekaufmann dari Yayasan Bina Eksekutif Jakarta (1995) German Dual System, Siemens Mechanical Engineering Education in Cilegon and Industriekaufmann from the Jakarta Executive Development Foundation (1995)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• BOD Senior Advisor, PT LRT Jakarta (2023-Sekarang) • Kepala Divisi Prasarana PT LRT Jakarta (2022-2023) • Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, PT LRT Jakarta (2020-2021) • Kepala Divisi Sarana, PT LRT Jakarta (2019-2022) • Regional Process and Deployment Manager, Nokia (2008-2015) • Head of Customer Team Finance & Control, Nokia Siemens Networks (2007-2008) • Senior Manager Commercial Mgmt. & Business Administration Divisi Communication, Siemens (2003-2007) • Senior Manager Commercial Mgmt. & Business Administration Divisi Automation & Control, Siemens (2002-2003) • Commercial Manager Divisi Industrial Solution and Services, Siemens (1999-2001) • Project Controlling Officer, Siemens Germany (1998) • Commercial Officer Divisi Industrial Solution & Services, Siemens (1995-1997) • BOD Senior Advisor, PT LRT Jakarta (2023-Present) • Head of Infrastructure Division, PT LRT Jakarta (2022-2023) • Act. Head of Corporate Secretary Division, PT LRT Jakarta (2020-2021) • Head of Infrastructure Division, PT LRT Jakarta (2019-2022) • Regional Process and Deployment Manager, Nokia (2008-2015) • Head of Customer Team Finance & Control, Nokia Siemens Networks (2007-2008) • Senior Manager Commercial Mgmt. & Business Administration Divisi Communication, Siemens (2003-2007) • Senior Manager Commercial Mgmt. & Business Administration Divisi Automation & Control, Siemens (2002-2003) • Commercial Manager of Industrial Solution and Services Division, Siemens (1999-2001) • Project Controlling Officer, Siemens Germany (1998) • Commercial Officer of Industrial Solution & Services Division, Siemens (1995-1997)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi no. 001/SDM/106/VI/2023 Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/106/VI/2023		



Sheila Indira Maharshi

BOD Senior Advisor
BOD Senior Advisor

Menjabat sejak: Juni 2024
Held office since: June 2024

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	37 tahun per 31 Desember 2024 37 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	18 April 2022 April 18, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Pascasarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (2023) • Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran (2008) • Master of Laws from Gajah Mada University (2023) • Bachelor of Communication Science from Padjadjaran University (2008)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• BOD Senior Advisor, PT LRT Jakarta (2024-2025) • Operation and Services General Manager, PT LRT Jakarta (2024) • Corporate Secretary General Manager, PT LRT Jakarta (2022-2024) • Lead of Corporate Communication, di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2022) • Senior Manager Public Relations, di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008-2017) • BOD Senior Advisor, PT LRT Jakarta (2024-2025) • Operation and Services General Manager, PT LRT Jakarta (2024) • Corporate Secretary General Manager, PT LRT Jakarta (2022-2024) • Lead of Corporate Communication at PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2022) • Senior Manager Public Relations at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008-2017)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 023/SDM/106/V/2024 Decree of the Board of Directors No. 023/SDM/106/V/2024		



Aris Rizal Arafah

**Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan* &
Plt Kepala Divisi Pengembangan Bisnis****
**Head of Corporate Secretary Division* &
Act. Head of Business Development Division****

Menjabat sejak: Juli 2024
Serving since: July 2024

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	34 tahun per 31 Desember 2024 34 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Agustus 2018 August 1, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2017) Master of Management from Gadjah Mada University (2017)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan & Plt. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2024) • Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (2024) • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2024) • Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan (2024) • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2023) • Kepala Departemen Subsidi dan Anggaran PT LRT Jakarta • Finance Executive PT LRT Jakarta • Head of Subsidy and Budget Department of PT LRT Jakarta • Head of Corporate Secretary Division & Act. Head of Business Development Division (2024) • Act. Head of Corporate Secretary Division (2024) • Head of Business Development Division (2024) • Head of Operations and Service Division (2024) • Head of Business Development Division (2023) • Head of Subsidy and Budget Department of PT LRT Jakarta • Finance Executive PT LRT Jakarta • Head of Subsidy and Budget Department of PT LRT Jakarta		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor : 032(*)/SDM/106/VII/2024 Surat Keputusan Direksi Nomor : 033(**)/SDM/106/VII/2024 Decree of the Board of Directors 032(*)/SDM/106/VII/2024 Decree of the Board of Directors 033(**)/SDM/106/VII/2024		



Muhamad Balfas

Kepala Divisi Manajemen Rantai Pasok
Head of Supply Chain Management Division

Menjabat sejak: Maret 2022

Held office since: March 2022

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	44 tahun per 31 Desember 2024 44 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	16 September 2019 September 16, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Advance Diploma in Business Management, Australian Pacific College, Australia (2010) • Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya, Jakarta - Indonesia • Advance Diploma in Business Management, Australian Pacific College, Australia (2010) • Bachelor in International Relations, Jayabaya University, Jakarta - Indonesia		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Manajemen Rantai Pasok (2022-Sekarang) • Procurement Manager di PT LRT Jakarta (2019-2022) • Deputy Head of Procurement di Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jakarta (2013-2019) • Supply Chain Executive di PT Biomin Indonesia (2012-2013) • Toll Australia, Western Australia (2011-2012) • Blackwoods Ltd Pty, Western Australia (2009-2012) • Head of Supply Chain Management Division (2022-Present) • Procurement Manager of PT LRT Jakarta (2019-2022) • Deputy Head of Procurement of Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jakarta (2013-2019) • Supply Chain Executive of PT Biomin Indonesia (2012-2013) • Toll Australia, Western Australia (2011-2012) • Blackwoods Ltd Pty, Western Australia (2009-2012)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi no. 019/SDM/111/2022 Decree of the Board of Directors No. 019/SDM/111/2022		



Budi Sarjono

Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi
Head of Finance & Accounting Division

Menjabat sejak: Februari 2021
Serving since: February 2021

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2024 52 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Februari 2021 February 1, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (2012) Master of Management from IMMI College of Management (2012)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi , PT LRT Jakarta (2021-Sekarang) • Plt. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum, PT LRT Jakarta (2021-2022) • Finance and Administration Manager di PT Wijaya Karya (2015-2021) • Assistant Accounting Manager PT Adhimix Precast (2006-2015) • Financial and Personnel Staf di PT Wijaya Karya Beton (1994-2005) • Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya (2015-2021) • Assistant Accounting Manager at PT Adhimix Precast (2006-2015) • Financial and Personnel Staff at PT Wijaya Karya Beton (1994-2005) • Head of Finance & Accounting Division, PT LRT Jakarta (2021-Present) • Act. Head of Human Resource and General Affairs Division, PT LRT Jakarta (2021-2022) • Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya (2015-2021) • Assistant Accounting Manager, PT Adhimix Precast (2006-2015) • Financial and Personnel Staf at PT Wijaya Karya Beton (1994-2005) • Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya (2015-2021) • Assistant Accounting Manager at PT Adhimix Precast (2006-2015) • Financial and Personnel Staff at PT Wijaya Karya Beton (1994-2005)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi No. 001/SDM/106/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 • Surat Keputusan Direksi No. 001/SDM/106/VIII/2021 tanggal 2 September 2021 • Board of Directors Decree No: 001/SDM/106/II/2021 dated February 1, 2021 • Board of Directors Decree No: 001/SDM/106/VIII/2021 dated September 2, 2021		



Rangga Dharmasetiawan

Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Menjabat sejak: Maret 2022

Held office since: March 2022

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	38 tahun per 31 Desember 2024 38 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	14 Maret 2022 March 14, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknologi Informasi dari Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) (2009) Bachelor of Information Technology from the American Indonesian Computer Education Institute (LPKIA) (2009)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Teknologi Informasi (2022-Sekarang) • Director, PT Gelora Muda Teknologi (2020-2023) • Expert Staff (Formula E), PT Jakarta Propertindo (2019-2020) • Chief Operation & Administrative Officer, PT Zloob Digital Kreasi (2018-2019) • Head of Information Technology, PT Jakarta Propertindo (2016-2019) • SCM Analyst (Procurement & Material Management), ConocoPhillips (2014-2015) • IT Development, Radiant Utama Interinsco (2010-2014) • IT Staff, Tri Banyan Tirta Tbk PT (ALTO) (2009-2010) • Head of Information Technology Division (2022-Present) • Director, PT Gelora Muda Teknologi (2020-2023) • Expert Staff (Formula E), PT Jakarta Propertindo (2019-2020) • Chief Operation & Administrative Officer, PT Zloob Digital Kreasi (2018-2019) • Head of Information Technology, PT Jakarta Propertindo (2016-2019) • SCM Analyst (Procurement & Material Management), ConocoPhillips (2014-2015) • IT Development, Radiant Utama Interinsco (2010-2014) • IT Staff, Tri Banyan Tirta Tbk PT (ALTO) (2009-2010)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi no.006/SDM/106/VI/2022 Decree of the Board of Directors No. 006/SDM/106/VI/2022		



Sayed Syahridhan

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum
Head of Human Resources and General Affairs Division

Menjabat sejak: November 2022

Serving since: November 2022

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	41 tahun per 31 Desember 2024 41 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 November 2022 November 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Management dari PPM Management, Jakarta (2008) • Sarjana Teknik Industri dari STT Telkom Bandung (2006) • Master of Management from PPM Management, Jakarta (2008) • Bachelor of Industrial Engineering from STT Telkom Bandung (2006)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum, PT LRT Jakarta (2022-sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris, PT MRT Jakarta (Perseroda) (2021-2022) • Human Capital Development & Services Department Head, PT MRT Jakarta (Perseroda) (2018-2021) • Planning Program Development Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2014-2018) • HR Project Manager, Medco Agro (2010-2014) • Head of Human Resources and General Affairs Division, PT LRT Jakarta (2022-present) • Secretary to the Board of Commissioners, PT MRT Jakarta (Perseroda) (2021-2022) • Human Capital Services Department Head, PT MRT Jakarta (Perseroda) (2018-2021) • Planning Program Development Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2014-2018) • HR Project Manager, Medco Agro (2010-2014)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi no. 016/SDM/106/II/2023 Decree of the Board of Directors No. 016/SDM/106/II/2023		



Ardian Yusuf

Kepala Divisi Mutu, Keselamatan, Keamanan, Kesehatan & Lingkungan
Head of Quality, Safety, Security, Health & Environment Division

Menjabat sejak: November 2022

Serving since: November 2022

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	46 tahun per 31 Desember 2024 46 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	01 Oktober 2018 October 1, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Bachelor of Chemical Engineering from Muhammadiyah University, Jakarta		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi QSSHE (2022-Sekarang) Head of QSSHE Division (2022-Present) • QSHE Manager, PT LRT Jakarta (2018-2022) • Regional Safety Lead, Kimberly-Clark (2015-2022) • HSES Specialist, AkzoNobel (2014-2015)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SDM/106/XI/2022 Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/106/XI/2022		



Adrian Kristianto Tamara

Kepala Divisi Sarana
Head of Rolling Stock Division

Menjabat sejak: November 2022

Serving since: November 2022

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2024 53 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	09 Desember 2019 December 9, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Teknik Perkeretaapian dari Institut Teknologi Bandung (2001) • Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1995) • Master of Railway Engineering from Bandung Institute of Technology (2001) • Bachelor of Mechanical Engineering from Brawijaya University (1995)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Sarana, PT LRT Jakarta (2022-sekarang) • Manager Fasilitas Perawatan, PT LRT Jakarta (2019-2022) • Rolling Stock Design Engineer, PT Industri Kereta Api (Persero) (2002-2007) • Rolling Stock Production Planning Engineer, PT Industri Kereta Api (Persero) (1996-2001) • Head of Rolling Stock Division, PT LRT Jakarta (2022-present) • Manager of Maintenance Facility, PT LRT Jakarta (2019-2022) • Rolling Stock Design Engineer, PT Industri Kereta Api (Persero) (2002-2007) • Rolling Stock Production Planning Engineer, PT Industri Kereta Api (Persero) (1996-2001)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 017/SDM/106/XII/2022 Decree of the Board of Directors No. 017/SDM/106/XII/2022		



Adityawarman Nugroho

Kepala Divisi Internal Audit (*) & Plt. Kepala Divisi Strategi Perusahaan dan Management Risiko ()**
Head of Internal Audit Division (*) & Act Head of Corporate Strategy and Risk Management Division (**)

Menjabat sejak Juli* 2023-Agustus 2024**

Held office since: July* 2023-August 2024**

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	37 tahun per 31 Desember 2024 37 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	3 Juli 2023 July 3, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2 Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta (2019) Master of Management, Jakarta State University (2019)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Plt. Kepala Divisi Strategi Perusahaan dan Management Risiko (2024-Sekarang) • Kepala Divisi Internal Audit (2023-Sekarang) • Kepala Departemen Audit Internal, PT Jakarta Propertindo (2018-2023) • Audit Committee, PT Jakarta Infrastructure Propertindo (2022-2023) • Act. Head of Division Corporate Strategy and Risk Management (2024-Present) • Head of Internal Audit Division (2023-Present) • Head of Internal Audit Department, PT Jakarta Propertindo (2018-2023) • Audit Committee, PT Jakarta Infrastructure Propertindo (2022-2023)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 003(*)/SDM/106/VII/2023 Surat Keputusan Direksi No. 066(**)/SDM/106/VIII/2024 Decree of the Board of Directors No. 003(*)/SDM/106/VI/2023 Decree of the Board of Directors No. 066(**)/SDM/106/VIII/2024		



Elmy Nugraha Utama Bahar

Kepala Divisi Prasarana
Head of Infrastructure Division

Menjabat sejak: Juni 2023
Serving since: June 2023

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen	Usia Age	42 tahun per 31 Desember 2024 42 years old, as of December 31, 2024
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Maret 2023 March 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Sipil, Universitas Janabadra (2010) Bachelor of Civil Engineering, Janabadra University (2010)		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi Prasarana, PT LRT Jakarta (2023-Sekarang) • Plt. Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan, PT LRT Jakarta (Juni-September 2023) • Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan, PT LRT Jakarta(Maret-Juni 2023) • Manager Penjadwalan, Pembiayaan & Kesekretariatan – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-2021) • Asisten Manager Pengawas & Pengendalian Proyek – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2017-2019) • Quantity Surveyor – PT Inti Era Cipta (2015-2017) • Engineer Sipil – PT Dardela Yasa Guna (2008-2015) • Pelaksana Lapangan – PT Karya Putra Yasa (2004-2006) • Head of Infrastructure Division, PT LRT Jakarta (2023-Present) • Act. Head of Operations and Services Division, PT LRT Jakarta (June-September 2023) • Head of Operations and Services Division, PT LRT Jakarta (March-June 2023) • Manager of Scheduling, Financing & Secretarial Affairs - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-2021) • Assistant Manager of Project Supervision & Control - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2017-2019) • Quantity Surveyor - PT Inti Era Cipta (2015-2017) • Civil Engineer - PT Dardela Yasa Guna (2008-2015) • Field Executor - PT Karya Putra Yasa (2004-2006)		
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 002/SDM/106/VI/2023 Decree of the Board of Directors No. 002/SDM/106/VI/2023		

Demografi Karyawan dan Sekilas Tentang Pengembangan Kompetensi

Employee Demographics and Competency Development

Dalam menjalankan pengelolaan karyawan, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip non diskriminatif secara ketat dan konsisten kepada seluruh karyawannya, dengan keberagaman latar belakang dari setiap karyawan LRT Jakarta. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karier tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

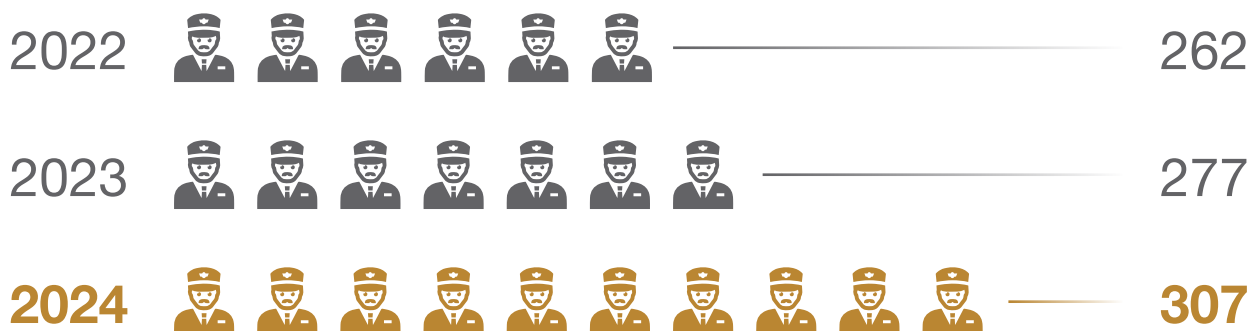
In conducting its employee management, The Company always strictly and consistently applies non-discriminatory principles to all its employees, this can be illustrated by the diversity of backgrounds of each LRT Jakarta employee. In addition, the Company also has a policy for acceptance, performance appraisal, remuneration and career development, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

Hingga 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 307 orang, mengalami peningkatan sebesar 16% dibandingkan jumlah karyawan di tahun 2023 yang sebanyak 277 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh optimalisasi pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia LRT Jakarta.

As of December 31, 2024, the Company had 307 employees, an increase of 16% compared to the number of employees in 2023 of 277 people. The increase was caused by the optimization of human resources fulfillment of LRT Jakarta.

PERGERAKAN JUMLAH KARYAWAN 2022-2024 (ORANG)

NUMBER OF EMPLOYEES IN 2022-2024 (PEOPLE)



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY ORGANIZATIONAL LEVEL/POSITION (PEOPLE)

Level Organisasi/ Jabatan Organization/ Position Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%	Selisih Difference	Persentase Percentage
Komisaris Commissioners	3	0	3	0,98%	3	0	3	1,1%	0	(0,12)%
Direksi/Directors	3	0	3	0,98%	3	0	3	1,1%	0	(0,12)%
GM	10	1	11	3,58%	10	1	11	4,0%	0	(0,42)%
Manajer/Manager	21	7	28	9,12%	20	6	26	9,4%	2	(0,28)%
Asst. Manajer Asst. Managers	22	5	27	8,79%	18	4	22	7,9%	5	0,99%
Supervisor	21	6	27	8,79%	27	7	34	12,3%	(7)	(3,51)%
Officer – Senior Officer	98	44	142	46,25%	69	29	98	35,4%	44	10,85%
Staff	53	13	66	21,50%	57	23	80	28,9%	(14)	(7,4)%
Jumlah/Total	231	76	307	100%	207	70	277	100%	30	(0,01)%

L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Male | F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY EMPLOYMENT STATUS (PEOPLE)

Status Status	2024			2023		
	L/M	P/F	Jumlah Total	L/M	P/F	Jumlah Total
Karyawan Tetap/Full Time Employees	187	66	253	185	64	249
Karyawan Tidak Tetap/Contract Employees	36	10	48	16	6	22
Pekerja Lain/Other Workers	6	0	6	6	0	6
Jumlah/Total	231	76	307	207	70	277

L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Male | F = Female

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY EDUCATIONAL LEVEL (PEOPLE)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%	Selisih Difference	Persentase Percentage
SMA/Highschool	22	1	23	7,49%	22	1	23	8,3%	0	(0,81)%
D.III/Diploma III	84	26	110	35,83%	3	31	109	39,4%	1	(3,57)%
S1/D.IV/ Bachelor Degree/ Diploma IV	98	42	140	45,60%	10	35	116	41,9%	24	3,7%
S2/Master Degree	26	7	33	10,75%	20	3	29	10,5%	4	0,25%
S3/Doctoral Degree	1	0	1	0,33%	0	0	0	0%	1	0,33%
Jumlah/Total	231	76	307	100%	207	70	277	100%	30	(0,1)%

L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Male | F = Female

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN USIA (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY AGE (PEOPLE)

Usia Age	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%	Selisih Difference	Persentase Percentage
18 – 30 tahun/years old	127	53	180	58,63%	118	53	171	61,7%	9	(3,07)%
31 - 40 tahun/years old	72	20	92	29,97%	61	14	75	27,1%	17	2,87%
41 - 50 tahun/years old	23	3	26	8,47%	20	3	23	8,3%	3	0,17%
> 51 tahun/years old	9	0	9	2,93%	8	0	8	2,9%	1	0,03%
Jumlah/Total	231	76	307	100%	207	70	277	100%	30	0%

L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Male | F = Female

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY GENDER (PEOPLE)

Status Status	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Selisih Difference	Persentase Percentage
Laki-Laki/Male	231	75,24%	207	74,7%	24	0,54%
Perempuan/Female	76	24,76%	70	25,3%	6	(0,54)%
Jumlah/Total	307	100%	277	100%	30	0%

L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Male | F = Female

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Development

Perusahaan percaya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks. Untuk itu, Perusahaan secara konsisten mengimplementasikan berbagai program peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan secara berkala, baik dalam bentuk pelatihan maupun pengembangan, bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

Pengembangan kompetensi karyawan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis pengembangan bisnis Perusahaan serta kebutuhan spesifik masing-masing divisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengoptimalkan potensi dan kompetensinya, sehingga berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Perusahaan telah menyusun program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur untuk semua level jabatan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024, mencerminkan kesempatan pengembangan yang merata bagi setiap level dalam organisasi.

The Company believes that excellent and professional Human Resources (HR) are the key to overcome the increasingly dynamic and complex business challenges. Therefore, the Company consistently implements various HR competency development programs that are held periodically, including through training and development, for all levels of management and employees.

The employee competency development is designed by considering the strategic needs of the Company's business development as well as the specific needs of each division. This aims to ensure that each individual can optimize their potential and competencies in order to maximize their contribution to the Company's development.

As part of this commitment, the Company has developed a structured education and training program for all job levels. The following table illustrates the number of education and training activities that were carried out throughout 2024, thereby demonstrating equal development opportunities for every organizational level.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN TAHUN 2024

COMPETENCY DEVELOPMENT BY ORGANIZATIONAL LEVEL/POSITION IN 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis dan Tujuan Pelatihan Type and Objectives of Training	Akademi Academy	Komposisi Peserta Composition of Participants				Jumlah Total
			Laki-Laki Male	Persentase Percentage	Perempuan Female	Persentase Percentage	
Komisaris Commissioner			4	100%	0	0%	4
Direksi Director			5	100%	0	0%	5
Kepala Divisi Head of Division	Peningkatan Kompetensi & Sertifikasi Competency Improvement & Certification	LRTJ	15	94%	1	6%	16
Kepala Department Head of Department			76	75%	25	25%	101
Kepala Seksi Section Head			191	81%	44	19%	235
Officer			231	67%	112	33%	343
Staff			141	82%	30	18%	171



Biaya Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Employee Training and Development Costs

Perusahaan memandang pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sebagai investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sekaligus wujud nyata komitmen perusahaan dalam memenuhi hak pegawai untuk mengaktualisasikan potensi diri. Program pelatihan yang diselenggarakan secara berkala tidak hanya dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan produktivitas, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*). Oleh karena itu, Perusahaan memiliki komitmen yang besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani yang dimilikinya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp6.081.919.350 yang mana mengalami penurunan sebesar Rp47.501.124 atau sebesar 0,77% dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp6.129.420.474 dikarenakan adanya aktivitas yang belum berjalan yang sifatnya publik training karena belum memenuhi kelas yang disediakan oleh jasa pelatihan, negosiasi yang dilakukan terhadap biaya pelatihan serta pelatihan inhouse yang tidak dimungkinkan berjalan pada waktu yang telah ditentukan.

Perusahaan mengoptimalkan berbagai metode pembelajaran, mulai dari *Employee Assistant Program*, sertifikasi profesional, hingga program beasiswa, yang disesuaikan dengan jenjang karier dan kebutuhan spesifik pegawai. Langkah ini tidak hanya menciptakan SDM yang adaptif dan berdaya saing global, tetapi juga memperkuat posisi LRT sebagai pelaku industri yang responsif terhadap dinamika pasar.

The Company considers employee competency training and development as a strategic investment in building excellent human resources, as well as a concrete manifestation of the Company's commitment to fulfill employees' rights to actualize their potential. The periodic training programs are not only designed to improve technical skills and productivity, but also to lay the foundation for a culture of continuous learning. Therefore, the Company is highly committed to continuously improving the capacity and quality of its human resources, which is realized by allocating an investment budget for a continuous employee competency development program. The realization of employee competency development costs in 2024 was recorded at IDR6,081,919,350, a decrease of IDR47,501,124 or 0.77% from 2023, which was recorded at IDR6,129,420,474. This decrease was due to pending activities in public trainings that have yet to be carried out prior to the fulfillment of the class requirements provided by the training service, negotiations for the training costs, and in-house training that is not possible to run at a predetermined time.

The Company optimizes various learning methods, starting from the Employee Assistant Program, professional certification, to scholarship programs, which are tailored to career levels and the specific needs of employees. This initiative not only creates adaptive and globally competitive human resources, but also strengthens LRT's position as an industry player that is responsive to market dynamics.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

Uraian Description	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	6.081.919.350	6.129.420.474	47.501.124	0,77%

Pendidikan dan/atau Pengembangan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management Unit

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko, di sepanjang tahun 2024.

The following information discloses the competency development program for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management Unit, throughout 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
Azas Tigor Nainggolan Komisaris Commissioner	Training	Konferensi Internal Audit Internal Audit Conference	Yogyakarta 10–11 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
	Training	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali 12–13 Desember/ December 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)
Mohamad Pramintohadi Sukarno Komisaris Commissioner	Training	Konferensi Internal Audit Internal Audit Conference	Yogyakarta 10–11 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
	Training	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali 12–13 Desember/ December 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)
Hendri Saputra Direktur Director	Sertifikasi Certification	Diklat Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) Training and Certification for Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta 25 Maret/March – 1 April 2024	Pusdiklatwas BPKP
Sahurdi Finance & Business Support Director	Training	<i>CHRO Series Indonesia 2024 Conference: How CHROs Can Shape Organisational and Workforce Transformation</i>	Jakarta 14 Agustus/August 2024	HRM Asia Pte. Ltd
	Sertifikasi Certification	Diklat Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) Training and Certification for Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta 25 Maret/March – 1 April 2024	Pusdiklatwas BPKP
	Training	<i>GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>	Yogyakarta 22–23 Agustus/August 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
Aditia Kesuma Negara Dalimunthe Operation & Development Director	Sertifikasi Certification	Diklat Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) Training and Certification for Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta 25 Maret/March – 1 April 2024	Pusdiklatwas BPKP
Sarno Komite Audit Audit Committee	Training	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali 12–13 Desember/ December 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)
Sheila Indira Maharshi Corporate Secretary Division Head	Training	<i>Workshop Management System</i>	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
Syifa Hidayati Corporate Communication Department Head	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
Randy Arya - Secretariat & Administration Department Head	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
Adityawarman Nugroho Internal Audit Division Head	Sertifikasi Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Jakarta-Online 6–13 Mei/May 2024	PT RAP Indonesia
	Training	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali 12–13 Desember/December 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)
	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
Bambang Arifin Business & Operational Senior Auditor	Training	Design Thinking For Business Innovation	PT LRT Jakarta 6–7 Juni/June 2024	Productivity & Quality Management (PQM) Consultant
	Training	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali 12–13 Desember/December 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)
	Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Pelaksana Lanjutan Qualified Internal Audit (QIA) Advanced Auditor Level	Jakarta 24 Juni/June– 6 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
	Sertifikasi Certification	Risk & Control Self Assessment (RCSA)	PT LRT Jakarta 14 Agustus/August 2024	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
I Dewa Ayu Rai Widyastuti Management & Financial Senior Auditor	Training	Design Thinking For Business Innovation	PT LRT Jakarta 6–7 Juni/June 2024	Productivity & Quality Management (PQM) Consultant
	Training	Konferensi Internal Audit Internal Audit Conference	Yogyakarta/ 10–11 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
	Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Pelaksana Lanjutan Qualified Internal Audit (QIA) Advanced Auditor Level	Jakarta 24 Juni/June– 6 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
	Sertifikasi Certification	Risk & Control Self Assessment (RCSA)	PT LRT Jakarta 14 Agustus/August 2024	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
Angga Chandra Permana Management & Financial Auditor	Training	Firstline Management Development Program - Business Performance & Productivity Clas	PT LRT Jakarta 22–23 Agustus/August 2024	Sandler
	Training	GRC Talk “Membangun Budaya Anti Korupsi & Gratifikasi” GRC Talk “Building a Culture of Anti-Corruption & Gratification”	PT LRT Jakarta 5 Juni/June 2024	Bapak Aminudin, Ak, CA, CFE. (Direktur Anti Korupsi Badan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi RI) Mr. Aminudin, Ak, CA, CFE. (Director of Anti-Corruption in Business Entities, Corruption Eradication Commission of RI)
	Training	Konferensi Internal Audit Internal Audit Conference	Yogyakarta 10–11 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Pelaksana Lanjutan Qualified Internal Audit (QIA) Advanced Auditor Level	Jakarta 24 Juni/June– 6 Juli/July 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	Training	Workshop Management System	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
Tridewi Pujamawaty Risk Management & Compliance Department Head	Sertifikasi Certification	<i>Certified in Financial Risk Management</i>	Online 13–14 Juni/June 2024	American Academy of Financial Management (AAFM)
	Training	<i>Design Thinking For Business Innovation</i>	PT LRT Jakarta 6–7 Juni/June 2026	Productivity & Quality Management (PQM) Consultant
	Training	<i>GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>	Yogyakarta 22–23 Agustus/August 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
	Sertifikasi Certification	<i>Risk & Control Self Assessment (RCSA)</i>	PT LRT Jakarta 14 Agustus/August 2024	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Training	<i>Workshop Management System</i>	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML
Equivalent Armando Compliance Section Head	Training	<i>Basic Management Development Program (BMDP)</i>	PT LRT Jakarta 17–18 September 2024	Productivity & Quality Management (PQM) Consultant
	Sertifikasi Certification	<i>Certified Governance Professional</i>	Online 30 Juli/July–2 Agustus/ August 2024	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Training	<i>Firstline Management Development Program - Business Performance & Productivity Class</i>	PT LRT Jakarta 22–23 Agustus/August 2024	Sandler
	Training	<i>Workshop Management System</i>	PT LRT Jakarta 15 Januari/January 2024	One GML

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S SHARE OWNERSHIP

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024 December 31, 2024		
	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	332.393.400.000	99,55%	3.323.934	332.393.400.000	99,55%
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	1.500.000.000	0,45%	15.000	1.500.000.000	0,45%
Jumlah/Total	3.338.934	333.893.400.000	100,00%	3.338.934	333.893.400.000	3.338.934

99,55%

PT Jakarta Propertindo
(Perseroda)



0,45%

PT Jakarta Infrastruktur
Propertindo



Sebagai bentuk pemenuhan compliance atas terbitnya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, maka pada tahun 2020 telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Persero), sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,- masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.323.934 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.893.400.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

As a form of compliance with the issuance of the Facility Operation Permit No. 1540 of 2019, which has been granted by DKI Jakarta Provincial Government to PT LRT Jakarta, in 2020, 3 (three) LRV trainsets have been transferred from PT Jakarta Propertindo (Persero), as stated in the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution No. 75 dated October 26, 2020, drawn up by Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

Pursuant to the Company's Deed of Establishment, the Company's Authorized Capital is IDR600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), an increase of 25%, or by IDR150,000,000,000 to 55% or a total of IDR333,893,400,000,- each share with a par value of IDR100,000 (one hundred thousand rupiah).

From the Authorized Capital, the Issued and Fully Paid-up Capital by the Shareholders is 25% (twenty-five percent) or 3,323,934 (three million three hundred twenty three thousand nine hundred and thirty-four shares) with a total nominal value of IDR333,893,400,000 (three hundred thirty-three billion eight hundred ninety-three million and four hundred thousand rupiah).

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI INFORMATION ON THE COMPANY'S SHARE OWNERSHIP BY KEY MANAGEMENT

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan saham kepada publik maupun terdapat penawaran kepemilikan saham oleh manajemen serta karyawan.

Until the end of 2024, the Company has not issued shares to the public nor has there been an offer of share ownership to the management and employees.

Nama dan Jabatan Name and Position	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Iwan Takwin (Komisaris Utama/President Commissioner)				
Azas Tigor Nainggolan (Komisaris/Commissioner)		Nihil None		Nihil None
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris/Commissioner)				
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra (Direktur Utama/President Director)				
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis/ Director of Finance and Business Support)		Nihil None		Nihil None
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan/ Director of Operations and Development)				
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Total Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors		Nihil None		Nihil None

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR INFORMATION ABOUT MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS AND THE NAME OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan pemegang saham utama/pengendali LRT Jakarta dengan kepemilikan langsung sebesar 99,55%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar 0,45%. Dengan demikian, pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham di Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) is the major/controlling shareholder of LRT Jakarta with direct ownership of 99.55%, and indirect ownership through PT Jakarta Infrastruktur Propertindo of 0.45%. Therefore, the ultimate beneficial owner of the Company's shares is the Provincial Government of DKI Jakarta.

PT JAKARTA PROPERTINDO

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan perusahaan Properti, Infrastruktur, Utilitas dan Teknologi Informasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang awalnya merupakan sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada tahun 1985 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 PT Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit merger dengan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2000, kedua perusahaan merger ini berubah menjadi PT Jakarta Propertindo. Dan tahun 2018, Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas dan teknologi informasi komunikasi milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Perusahaan tidak hanya membidangi sektor properti, tetapi juga mulai merambah ke sektor infrastruktur. Proyek-proyek ini kemudian meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Pada tahun 2014, Perusahaan kemudian membagi perusahaannya menjadi 3 anak usaha yakni properti, infrastruktur, dan utilitas.

Dengan pengalaman dan aset yang dimiliki, serta didukung oleh manajemen dan sumber daya yang kompeten, Perusahaan terus berekspansi dan mengukuhkan diri bukan hanya untuk menghasilkan profit, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berdampak secara langsung untuk masyarakat DKI Jakarta.

PT JAKARTA PROPERTINDO

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) is a company that engages in Property, Infrastructure, Utilities, and Information Communication Technology owned by the Provincial Government of DKI Jakarta which was originally an Environmental Management Agency (BPL) and was established in 1985 with the responsibility of managing the Pluit area. In September 1997, PT Pembangunan Pluit Jaya with the inheritance of assets from the former BPL Pluit merged with PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. On December 15, 2000, the two companies merged into PT Jakarta Propertindo. In 2018, the Company became a Jakarta Propertindo Limited Liability Company (Regional Company) for Regional-Owned Enterprises engaged in property, infrastructure, utilities and information and communication technology owned by the Government of DKI Jakarta.

Since then, the Company has not only been in charge of the property sector but has also begun to penetrate the infrastructure sector. These projects then expanded to the construction of toll roads, reservoirs, and other infrastructure. In 2014, the Company then divided its business into 3 subsidiaries, including property, infrastructure and utilities.

With its experience and assets, and supported by competent management and resources, the Company continues to expand and strengthen itself, not only to generate profit, but also to become a development agent that contributes to development that has a direct impact on the people of DKI Jakarta.

Manajemen Kunci PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2024 Key Management of PT Jakarta Propertindo as of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Hikmahanto Juwana Komisaris Utama/President Commissioner	Iwan Takwin Direktur Utama/President Director
Lusiana Herawati Komisaris/Commissioner	Dian Takdir Badrsyah Direktur Teknik & Pengembangan/Director of Engineering & Development
Agus Susanto Komisaris/Commissioner	Solihin Direktur Keuangan & Dukungan Bisnis/Director of Finance & Business Support
Suhajar Diantoro Komisaris/Commissioner	I Gede Adnyana T Direktur Bisnis & Operasional/Director of Business & Operations



PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) yang awalnya merupakan PT Jakarta Komunikasi didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006 berdasarkan Akta No.06 dari Notaris Sutjipto SH. Sebagai perusahaan penerus, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo yang berdomisili di Gedung Thamrin City Lantai 1, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Jakarta Pusat juga ditunjuk sebagai sub holding bidang infrastruktur yang bergerak dalam berbagai bidang.

PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), which was originally PT Jakarta Komunikasi, was established in Jakarta on October 2, 2006, based on Deed No. 06 of Notary Sutjipto SH. As a successor company, PT Jakarta Infrastructure Propertindo, domiciled at Thamrin City Building, 1st Floor, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Central Jakarta, was also appointed as the infrastructure subholding which operates in various fields.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Solihin Komisaris Utama/President Commissioner	Deni Rifky Purwana Direktur Utama/President Director
Nanang Santoso Komisaris/Commissioner	Ivan C. Permana Direktur Niaga dan Operasi/Director of Commercial and Operation
	Santosa Direktur Keuangan dan Pendukung/Director of Finance and Support



Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure



Share Affiliates

 10%	 2,43%	 0,34%	 0,01%
 5%	 2,5%	 20,29%	 20%



Informasi Tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta *Joint Venture* (JV) dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)

Information on Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicle (SPV)

Hingga akhir tahun 2024, LRT tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV) ataupun *Special Purpose Vehicle* (SPV), sehingga tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

As of December 31, 2024, LRT had no Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures (JV) or Special Purpose Vehicles (SPV), hence, there is no information regarding the names of subsidiaries and/or associations; percentage of share ownership; information about the line of business of subsidiaries and/or associated entities; and description of operating status of subsidiaries and/or associated entities (already operating or not yet operating).

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Issuance Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2024, LRT tidak melakukan penerbitan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

As of December 31, 2024, LRT did not issue shares to the public, did not conduct an Initial Public Offering and did not trade its shares on any stock exchange. Thus, there is no information related to the year of issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, share offering price for each corporate action, the number of listed shares after each corporate action, and the name of the stock exchange on which the Company's shares are listed.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

Hingga akhir tahun 2024, LRT tidak menerbitkan penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait penerbitan dan pencatatan efek lainnya dalam Laporan Tahunan ini.

By the end of 2024, LRT did not conduct other securities issuance and listing. Thus, there is no information related to the issuance and listing of other securities in this Annual Report.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Nama Profesi Name of Profession	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Service	Biaya Costs	Periode Penugasan Assignment Period
Akuntan Publik Public Accountant	KAP Hertanto, Grace, Karunawan TIAG Internasional Palma Tower, 18th Floor lot F&G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310 Fax: (021) -75930434 Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan TIAG International Palma Tower, 18 th Floor lot F&G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang, South Jakarta 12310 Fax: (021) -75930434	Auditor Eksternal External Auditor	Rp144.300.000 IDR144,300,000	2024
Konsultan Hukum Legal Consultant	n/a	n/a	n/a	n/a
Notaris Notary	Kantor Notaris & PPAT Pratiwi Handayani,S.H Alamat: Gedung Jaya Lantai 2 Jl MH Thamrin Nomor 12 Telp: (021) 31908335 Fax: (021) 31927378 Notary Office & Land Deed Official (PPAT) Pratiwi Handayani, S.H. Address: Jaya Building, 2 nd Floor, Jl MH Thamrin No. 12 Phone: (021) 31908335 Fax: (021) 31927378 Kantor Notaris & PPAT Mustangin S.H., M.Kn Alamat: Jl Condet Raya Nomor 27, Komplek Ruko Mutiara Faza Blok RA-9, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp: (021) 87782258 Fax: (021) 87782258 Notary Office & Land Deed Official (PPAT) Mustangin S.H., M.Kn Address: Jl Condet Raya No. 27, Mutiara Faza Block RA-9 Complex, Pasar Rebo, East Jakarta Phone: (021) 87782258 Fax: (021) 87782258	Jasa Notaris Notary Services	Rp14.871.795 IDR14,871,795	2024



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Management Discussion and Analysis
on the Company's Performance

Jajaran Direksi dan manajemen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dan layanan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas, serta tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi dengan para *stakeholders*.

The Board of Directors and management continuously strive to enhance performance and deliver sustainable services to the public, while fostering synergy and collaboration with all stakeholders.







Tinjauan Makroekonomi

Macroeconomic Overview

Secara umum kondisi global selama tahun 2024 masih mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan periode sebelum Covid-19 dan mencatatkan angka pertumbuhan yang relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. IMF memperkirakan bahwa ekonomi global tumbuh 3,2%, masih dalam kisaran sama dengan tahun 2023. Di dalam negeri, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan PDB Indonesia untuk tahun 2024 adalah sebesar 5,03% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB di tahun 2023 yang tercatat 5,05%. Pertumbuhan ekonomi ini masih didukung oleh aktivitas ekonomi domestik. Tingkat inflasi tahunan di 2024 mencapai 1,57%, tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5% $\pm$ 1%.

Secara keseluruhan tahun 2024, hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% yoy secara *point to point* (ptp). Perkembangan Rupiah tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti Won Korea, Peso Mexico, Real Brasil, Yen Jepang, dan Lira Turki. Memasuki awal tahun 2025, tekanan mata uang Dolar AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14% YtD secara ptp, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar Dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.

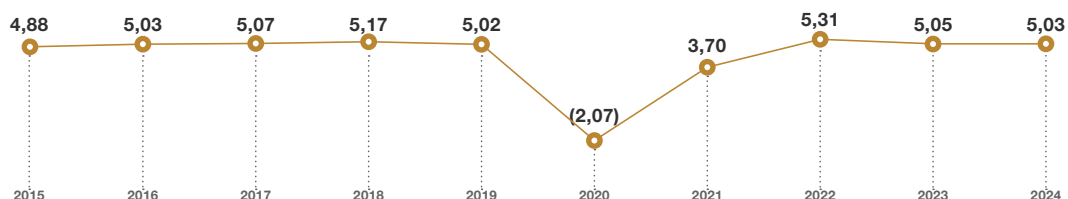
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat hingga akhir 2024, perekonomian di DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,01% YoY. Meski berada di bawah kisaran pertumbuhan Nasional di periode yang sama, namun iklim investasi di DKI Jakarta masih tumbuh dengan baik sejalan dengan masih berlangsungnya proyek strategis multi tahunan milik Pemerintah seperti MRT dan LRT Jakarta.

In 2024, global economic conditions remained sluggish compared to the pre-COVID-19 period but maintained a relatively stable growth rate from the previous year. The IMF projects global economic growth at 3.2%, in line with 2023 growth levels. The Central Bureau of Statistics (BPS) reported that Indonesia's GDP grew by 5.03% in 2024, slightly below the 5.05% recorded in 2023. This growth continued to be supported by domestic economic activities. Meanwhile, the annual inflation rate stood at 1.57%, remaining within the target range of 2.5% $\pm$ 1%.

As of December 31, 2024, the Rupiah stood at IDR16,095, depreciating 4.34% year-on-year (YoY) on a point-to-point (ptp) basis. Despite this decline, it outperformed several other currencies, including the South Korean Won, Mexican Peso, Brazilian Real, Japanese Yen, and Turkish Lira. Entering the year 2025, the US Dollar remained strong. By 23 January 2025, the Rupiah had weakened 1.14% year-to-date (YtD) on a ptp basis, in line with the depreciation of other regional currencies. However, it strengthened against major developed-market currencies (excluding the US Dollar) and remained stable against emerging-market currencies. These conditions reflect Bank Indonesia's stabilization efforts, supported by continued foreign capital inflows, attractive domestic financial yields, and Indonesia's resilient economic outlook.

By the end of 2024, Bank Indonesia recorded DKI Jakarta's economy growing by 5.01% year-on-year (YoY). Although this was below the national average for the same period, Jakarta's investment climate remained robust, driven by ongoing multi-year government strategic projects, including the Jakarta MRT and LRT.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2015-2024
Gross Domestic Product (GDP) Growth 2015-2024



Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tumbuh tinggi sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan *event* di Jakarta, berlangsungnya Pemilu dan Pilkada serentak, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Dari sisi pengeluaran, perbaikan

In 2024, Jakarta's economy growth remained strong, supported by sustained consumer optimism, a surge in MICE and event activities, the simultaneous General and Regional Elections (Pemilu and Pilkada), and the ongoing development of government strategic projects. From an expenditure perspective,

ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD, serta meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara, terhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara terkait isu uji keamanan produk, serta masih berlangsungnya tensi geopolitik. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global, serta peningkatan ketegangan tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan.

Inflasi IHK DKI Jakarta pada akhir tahun 2024 adalah 1,48% (YoY) dan diperkirakan akan tetap terkendali pada sasaran 2,5% $\pm$ 1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

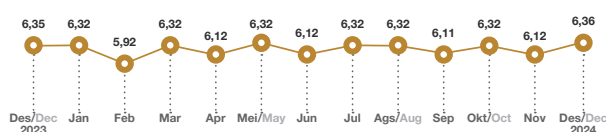
Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta juga melaporkan dalam berita resmi statistik, bahwa secara kumulatif, jumlah perjalanan LRT Jakarta sepanjang tahun 2024 mencapai 74.684 perjalanan, meningkat 0,64% dibanding total perjalanan LRT Jakarta pada periode yang sama di tahun 2023. Dinamika peningkatan jumlah pelanggan secara bulanan sejalan dengan jumlah perjalanan LRT Jakarta. Secara kumulatif, jumlah pelanggan LRT Jakarta sepanjang tahun 2024 mencapai 1.213.461 pelanggan, meningkat 17,11% atau naik 177.301 pelanggan dibanding tahun 2023 yang mencapai 1.036.160 pelanggan. Fenomena peningkatan jumlah pelanggan secara kumulatif ini menunjukkan minat masyarakat semakin tinggi dalam menggunakan moda LRT Jakarta untuk menunjang kebutuhan transportasi.

this growth was fuelled by robust household consumption, supported by stable purchasing power and increased MICE and event activities, as well as improved government spending in line with a better fiscal posture in the state budget (APBN) and regional budget (APBD). Additionally, stronger investment performance contributed to economic expansion, driven by the continued development of government strategic projects. On the other hand, export performance is expected to remain constrained due to export quota restrictions in several countries, halted production and exports linked to product safety concerns, and ongoing geopolitical tensions. From a business sector (Lapangan Usaha - LU) perspective, Jakarta's economy in 2024 was supported by positive growth in five key sectors: trade, construction, manufacturing, information & communication, and financial services. However, several risks must be closely monitored, particularly the global economic slowdown, escalating geopolitical tensions, and growing trade fragmentation.

The Consumer Price Index (CPI) inflation in DKI Jakarta at the end of 2024 was 1.48% year-on-year (YoY) and is expected to remain controlled within the target range of 2.5% $\pm$ 1% YoY in the next period. This forecast is supported by more favorable weather conditions following the El Niño phenomenon in 2023, as well as the strengthening of inflation control programs by the Regional Inflation Control Team (TPID) through the National Movement for Food Inflation Control (GNPIP).

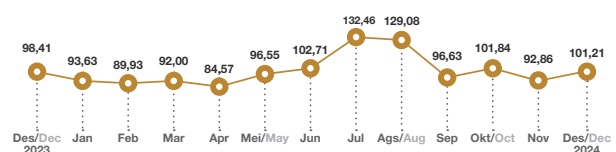
The Central Bureau of Statistics (BPS) of DKI Jakarta Province reported in its official statistical release that, cumulatively, the number of Jakarta LRT trips in 2024 reached 74,684 trips, an increase of 0.64% compared to the same period in 2023. The monthly increase in number of customers was in line with the growth in LRT Jakarta trips. Cumulatively, the total number of LRT Jakarta customers in 2024 reached 1,213,461 customers, marking a 17.11% increase or 177,301 additional customers compared to 1,036,160 customers in 2023. This rise in cumulative number of customers indicates a growing public interest in using Jakarta LRT as a preferred mode of transportation.

Perkembangan Jumlah Perjalanan LRT Jakarta
Development of Jakarta LRT Ridership
(dalam ribu perjalanan/in thousand trips)



Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Desember 2023-Desember 2024
Light Rail Transit (LRT) Jakarta, December 2023-December 2024

Perkembangan Jumlah Penumpang LRT Jakarta
Development of Jakarta LRT Passenger Count
(dalam ribu orang/in thousand people)



Indikator LRT Jakarta/LRT Jakarta Indicator

Total Perjalanan Total Riderships

6,36 ribu perjalanan
thousand trips
▲ 3,92%
Des/Dec 2024 (m-to-m)

Total Penumpang Total Passengers

101,21 ribu orang
thousand people
▲ 9,00%
Des/Dec 2024 (m-to-m)

Total Perjalanan Kumulatif Total Cumulative Riderships

74,68 ribu perjalanan
thousand trips
▲ 0,64%
Jan-Des/Dec 2024 (c-to-c)

Total Penumpang Kumulatif Total Cumulative Passengers

1,21 juta orang
million people
▲ 17,11%
Jan-Des/Dec 2024 (c-to-c)



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review of Business Segments

PENETAPAN SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT DETERMINATION

Analisis segmentasi bisnis pada Laporan Tahunan ini berdasarkan data segmen pada Laporan Keuangan PT LRT Jakarta, mengikuti aturan PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Penjelasan tiap segmen ini bertujuan untuk menelaah kegiatan operasional Perseroan.

Berdasarkan RKAP 2024 yang telah disusun, Perseroan menjalankan 4 (empat) segmen usaha utama: Segmen Operasional dan Pelayanan, Segmen Sarana, Segmen Prasarana, dan Segmen Pengembangan Bisnis. Kinerja masing-masing segmen disajikan di bawah ini.

SEGMENT OPERASI DAN PELAYANAN

LRT Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Perseroan bertanggung jawab atas operasional dan pelayanan lalu lintas perjalanan kereta. Dalam pelaksanaan operasional dan pelayanan, LRT Jakarta bekerja berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA) yang telah ditetapkan, LRT Jakarta bertekad terus memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan.

Dalam menjalankan usahanya selama tahun 2024, Perseroan menginisiasi beberapa inisiatif untuk meningkatkan kinerjanya. Inisiatif ini untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) diantaranya adalah pelaksanaan *Calendar of Event* 2024 baik di dalam rangkaian kereta maupun di stasiun, mengadakan Belajar Bersama atau *Edu Tour*, dan perbaikan prasarana dan sarana baik di dalam maupun di luar stasiun.

Menurut RKAP 2024 yang disusun dan ditandatangani di bulan November 2023, fokus utama rencana kerja Segmen Operasional dan Pelayanan adalah:

- Melakukan kegiatan operasional dan evaluasi secara berkala serta pengembangan layanan LRT Jakarta sesuai dengan SPM yang ditetapkan dan Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan.
- Pemenuhan kompetensi dan kecakapan personel Awak Sarana Perkeretaapian (ASP).
- *Monitoring* dan evaluasi jasa tenaga alih daya yang mendukung pelayanan.
- Pengembangan program loyalty pelanggan serta pengembangan *Customer Relationship Management*.
- Pelaksanaan kegiatan dan program peningkatan *ridership* baik yang dilakukan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak ketiga di area stasiun.

The business segmentation analysis in this Annual Report is based on segment data from the Financial Statements of PT LRT Jakarta, following PSAK No. 5 on Operating Segments. The explanation of each segment aims to review the Company's operational activities.

Based on the 2024 Corporate Budget and Work Plan (RKAP), the Company operates four main business segments: Operations and Services, Facility, Infrastructure, and Business Development. The performance of each segment is presented below.

OPERATIONS AND SERVICES SEGMENT

LRT Jakarta is committed to delivering the highest quality service to customers. The Company responsible for train operations and traffic management, ensuring well services. Our services based on the established Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA), LRT Jakarta remains dedicated to maintaining excellence and enhancing the customers experience.

Throughout 2024, the Company introduced various initiatives to enhance performance, boost number of customers, and ensure compliance with Minimum Service Standards (SPM). Key efforts included the implementation of the 2024 Calendar of Events both onboard trains and at stations, the organization of Learning Together (Edu Tour) programs, and infrastructure and facility upgrades inside and outside the stations.

According to the 2024 Corporate Budget and Work Plan (RKAP), prepared and signed in November 2023, the Operations and Services Segment will focus on:

- Conducting regular operations, evaluations, and service improvements for LRT Jakarta, ensuring compliance with Minimum Service Standards (SPM) and Customer Satisfaction Index assessments.
- Enhancing the competency and proficiency of Railway Facility Crew (ASP) personnel.
- Monitoring and evaluating outsourced service providers supporting operations.
- Developing customer loyalty programs and strengthening Customer Relationship Management (CRM).
- Implementing initiatives to boost ridership, both through internal efforts and collaborations with third parties at station areas.

Selama tahun 2024, Perseroan telah menunjukkan kinerja yang positif. Selain meningkatnya SPM di sepanjang tahun, juga mencatatkan nilai kepuasan pelanggan di atas rencana awal. Kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2024 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

During 2024, the Company demonstrated positive performance. In addition to the continuous improvements in SPM, it also recorded a customer satisfaction score exceeding the initial target. The Company's performance for the whole year of 2024 is presented below:

Tahun 2024 Year 2024	Realisasi Operasi/Operational Realization		
	Rencana Plan	Aktual Actual	Ketercapaian (%) - <i>consider tidak ada, kecuali ada perhitungan dari Perseroan</i> Achievement (%) - <i>consider none, unless there is a calculation from the Company</i>
Januari/January	6.324	6.324	100
Februari/February	5.916	5.898	99,70
Maret/March	6.324	6.321	99,95
April/April	6.120	6.120	100
Mei/May	6.324	6.324	100
Juni/June	6.120	6.117	99,95
Juli/July	6.324	6.303	99,67
Agustus/August	6.324	6.324	100
September/September	6.120	6.112	99,87
Oktober/October	6.324	6.322	99,97
November/November	6.120	6.120	100
Desember/December	6.362	6.360	99,97

Di sepanjang tahun 2024, persentase rata-rata aktual perjalanan yang tercapai adalah 99,9% dari total rencana perjalanan. Dengan aktual perjalanan tertinggi mencapai 100% di bulan Januari, April, Mei, Agustus, dan November. Sedangkan di bulan-bulan operasional lain, aktual perjalanan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan kendala SIV sarana dan bencana alam berupa gempa.

Throughout 2024, the average actual trip completion rate reached 99.9% of the total planned trips, with peak performance of 100% recorded in January, April, May, August, and November. However, in other months, the completion rate fell slightly below 100% due to SIV facility issues and natural disruptions, such as earthquakes.

Persentase ketepatan waktu tempuh komersial di sepanjang tahun 2024, tercatat di atas target. Rata-rata persentase ketepatan waktu tempuh komersial yang tercatat adalah 99,86%, berada di atas target 99% di tiap-tiap bulan selama tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional utamanya pada ketepatan waktu tempuh lintas kereta dan ketepatan waktu henti di stasiun.

The commercial travel time punctuality rate in 2024 consistently exceeded the target, with an average of 99.86%, surpassing the 99% goal each month. This achievement reflects the Company's ongoing commitment to optimizing operational performance, particularly in maintaining precise train travel times and station stop accuracy.

Tahun 2024 Year 2024	Persentase Ketepatan Waktu Komersial Aktual Commercial Travel Time Punctuality Rate (%)
Januari/January	99,98
Februari/February	99,76
Maret/March	99,97
April/April	99,87
Mei/May	99,98
Juni/June	99,91
Juli/July	99,59
Agustus/August	99,95
September/September	99,74
Oktober/October	99,83
November/November	99,94
Desember/December	99,83
Rata-rata/Average	99,86



Persentase ketepatan waktu sepanjang tahun 2024 sebesar 99,86% atau turun dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 99,87%.

The percentage of punctuality throughout 2024 was 99.86%, a decrease from the same period in the previous year of 99.87%.

Rata-rata pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perseroan di tahun 2024 tercatat selalu di atas rencana yaitu di atas 99,20%. Pencapaian SPM ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 98,30%. Hal ini menjadikan rata-rata angka kepuasan pelanggan pengguna LRT Jakarta juga tercatat pada 93,36% atau melebihi rencana.

In 2024, the Company consistently exceeded its Minimum Service Standards (SPM) target, achieving an average of over 99.20%. This marked an improvement from the previous year's 98.30%. Consequently, the average customer satisfaction rating for LRT Jakarta users reached 93.36%, surpassing the initial target.

Tabel Standar Pelayanan Minimum
Table of Minimum Service Standards

Tahun 2024 Year 2024	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) Aktual (%) – Minimum Service Standards Actual
Januari/January	98,50%
Februari/February	99,31%
Maret/March	99,48%
April/April	99,39%
Mei/May	99,56%
Juni/June	99,90%
Juli/July	98,55%
Agustus/August	99,15%
September/September	98,57%
Oktober/October	99,00%
November/November	99,52%
Desember/December	99,08%
Rata-rata/Average	99,20%

Penyesuaian Waktu Operasional Kereta LRT pada Persentase 2024
LRT Train Operating Time Adjustment in 2024 Percentage

Skema Scheme	Periode Period	Waktu Operasional Operational Time	Headway Headway	KA Harian Daily Train	Keterangan Remarks
Operasi Normal Normal Operation	01-31 Januari/January 2024	05.30 – 23.00	10	204	Sesuai GAPEKA Inline to GAPEKA
	01-28 Februari/February 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-31 Maret/March 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-30 April 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-31 Mei/May 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-30 Juni/June 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-31 Juli/July 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-31 Agustus/August 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-30 September 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-31 Oktober/October 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-30 November 2024	05.30 – 23.00	10	204	
	01-07 Desember/December 2024	05.30 – 23.00	10	204	

Skema Scheme	Periode Period	Waktu Operasional Operational Time	Headway Headway	KA Harian Daily Train	Keterangan Remarks
Kegiatan LRTJ Fun Run–RI5E UP LRTJ Fun Run–RI5E UP Activity	08 Desember/December 2024	04.30 – 23.00	10	216	Dukungan mobilisasi peserta kegiatan LRTJ Fun Run – RI5E UP sesuai dengan pengajuan jam operasi yang lebih awal melalui surat Data Rencana Operasi Periode Desember 2024 dengan nomor surat 008/DOP/110/XI/2024. Mobilization support for the LRTJ Fun Run – RISE UP participants, according to the request for earlier operational as stated in the letter of operation plan data of December with the letter number of 008/DOP/110/XI/2024.
Operasi Normal Normal Operation	09–30 Desember/December 2024	05.30 – 23.00	10	204	Sesuai GAPEKA Inline to GAPEKA
Menyambut Malam Tahun Baru New Year Event	31 Desember/December 2024	05.30 – 02.00 (H+1)	10	242	Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0180 Tahun 2023 tentang penugasan kepada Perseroan Terbatas Moda Raya Terpadu Jakarta dan Perseroan Terbatas Lintas Raya Terpadu Jakarta untuk penyediaan layanan perkeretaapian pendukung Acara Semarak Jakarta Mendunia–Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 31 Desember 2024. Decree of the Head of the Jakarta Provincial Transportation Agency Number e-0180 of 2023 regarding the assignment to PT Moda Raya Terpadu Jakarta and PT Lintas Raya Terpadu Jakarta for the provision of railway services in support of the Semarak Jakarta Mendunia – Welcoming the 5th Century of Jakarta event in the Special Capital Region of Jakarta on 31 December 2024.

Total pelanggan selama tahun 2024 juga mengalami peningkatan hingga 22,1% atau mencapai 1.266.817, bila dibandingkan dengan total pelanggan di tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.037.162. Minat masyarakat dalam penggunaan LRT Jakarta di hari kerja dan hari libur turut menyumbangkan penambahan jumlah pelanggan yang signifikan di sepanjang tahun.

The total number of customer in 2024 increased by 22.1%, reaching 1,266,817, compared to 1,037,162 in the previous year. Public interest in using LRT Jakarta on both weekdays and holidays contributed significantly to this growth throughout the year.

Tahun 2024 Year 2024	Total Pelanggan (Aktual) Total Customer (Actual)	Jumlah Pendapatan (Rp.Juta) Total Revenue (IDR Million)
Januari/January	96.841	484.205.000
Februari/February	91.531	457.655.000
Maret/March	91.595	457.975.000
April/April	88.899	444.495.000
Mei/May	96.571	482.855.000
Juni/June	102.747	513.735.000
Juli/July	134.894	674.470.000
Agustus/August	129.079	645.405.000
September/September	96.628	483.140.000
Oktober/October	101.848	509.240.000
November/November	92.855	464.275.000
Desember/December	103.329	516.645.000
Rata-rata/Average	1.226.817	6.134.085.000

*perhitungan jumlah pendapatan berdasarkan pengali biaya tiket per pelanggan sebesar Rp5.000,-.

*The calculation of total revenue is based on a multiplier of ticket cost per customer of Rp5,000,-.



SEGMENT SARANA

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LRT Jakarta membutuhkan dukungan sarana agar berjalan lancar. Segmen Sarana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keseharian di LRT Jakarta dan memberikan evaluasi yang berkaitan dengan pemeriksaan dan perawatan rangkaian kereta, fasilitas depo kereta, dan ketersediaan suku cadang yang cukup untuk sarana.

Menurut RKAP 2024, fokus Segmen Sarana adalah *leadtime sparepart* sarana yang membutuhkan strategi khusus dan inovasi dalam pengadaan dan penyediaan suku cadang yang dibutuhkan dalam proses perawatan sarana. Hal ini menjadi fokus Perseroan supaya suku cadang bagi kebutuhan sarana dapat selalu tersedia dan tidak mengganggu kegiatan operasional dan pelayanan LRT Jakarta.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana juga turut dimaksimalkan dalam usahanya melakukan perawatan rangkaian kereta secara mandiri. Untuk itu Perseroan telah memberikan pelatihan yang komprehensif kepada beberapa personil Sarana. Selain perawatan mandiri, Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses perawatan Sarana yang mengacu pada *Maintenance Service Agreement (MSA)*.

Kinerja Segmen Sarana selama tahun 2024 berkaitan dengan realisasi utilisasi sarana dan konsumsi daya dan jarak tempuh. Sesuai dengan tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan bagi khalayak dengan mengoperasikan rangkaian kereta, pada setiap hari kerja LRT Jakarta menjalankan 8 (delapan) rangkaian kereta dengan komposisi 4 (empat) kereta beroperasi dan memberikan layanan penuh, dua rangkaian kereta menjadi cadangan, dan dua rangkaian kereta lain dijadwalkan untuk perawatan. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, akan ada 4 (empat) rangkaian kereta menjadi cadangan karena tidak ada jadwal perawatan.

Realisasi utilisasi sarana rangkaian kereta dipengaruhi oleh perawatan dan pemeriksaan sarana. Di sepanjang tahun 2024, LRT Jakarta telah merencanakan adanya pekerjaan pemeriksaan harian, perawatan mingguan, perawatan 4 (empat) bulanan, dan pencucian sarana.

Konsumsi daya selama pengoperasian rangkaian kereta juga ditelaah supaya dapat menghasilkan angka yang efektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya perawatan yang baik, maka konsumsi daya juga diharapkan tetap berada dalam koridor rencana. Selama tahun 2024, konsumsi daya seluruh rangkaian kereta mencapai rata-rata 4.078 kWh per hari, lebih rendah dari rata-rata konsumsi daya di tahun 2023 yang tercatat 4.097 kWh per hari.

FACILITY SEGMENT

To ensure its operations, LRT Jakarta depends on facility support. The Facilities Segment oversees daily activities, including train inspections, maintenance, depot facility management and ensuring the availability of essential spare parts.

As outlined in the 2024 Corporate Budget and Work Plan (RKAP), the Facilities Segment prioritizes optimizing spare part lead times, requiring strategic planning and innovations in procurement and supply chain management. This approach guarantees the continuous availability of critical spare parts, preventing operational and service disruptions.

Additionally, the Company is enhancing human resources within the Facilities Segment to support independent train maintenance. To achieve this, comprehensive training has been provided to key personnel. Beyond in-house maintenance, LRT Jakarta also collaborates with third parties for facility upkeep under the *Maintenance Service Agreement (MSA)*.

The performance of the Facilities Segment in 2024 was assessed based on the utilization of trainsets, energy consumption, and travel distance. As part of its core responsibility to provide public transportation services, LRT Jakarta operated eight trainsets on weekdays, with four in full operation, two on standby, and two scheduled for maintenance. On weekends (Saturday and Sunday), four trainsets were kept on standby, as no maintenance was scheduled.

Trainset utilization was influenced by scheduled maintenance and inspections. Throughout 2024, LRT Jakarta implemented a structured maintenance plan, including daily inspections, weekly maintenance, four-month periodic maintenance, and trainset washing.

Energy consumption during train operations was also closely monitored to ensure efficiency. Proper maintenance plays a crucial role in keeping energy consumption within planned limits. In 2024, the average daily energy consumption for all trainsets reached 4,078 kWh, which was lower than the 2023 average of 4,097 kWh.

Kinerja segmen sarana berdasarkan rencana dan aktualisasinya di sepanjang tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tahun 2024 Year 2024	Rencana Plan	Aktual Actual	Rencana Plan	Aktual Actual
Pemeriksaan Harian/Daily Inspections	1.464	1.506	100%	100%
Pemeriksaan Mingguan/Weekly Inspections	393	393	100%	100%
Perawatan 4 Bulanan/Four Months Periodic Maintenance	27	27	100%	100%
Pencucian Sarana/Trainset Washing	1.576	1.566	100%	99,36%

Selama tahun 2024, perawatan sarana yang dilakukan Perseroan melalui pemeriksaan harian, pemeriksaan mingguan, perawatan 4 (empat) bulanan dan pencucian sarana mencapai 100%, 100%, 100% dan 99,36%.

Di sepanjang tahun 2024, perawatan sarana dilaksanakan oleh para karyawan dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Guna memperlancar pekerjaan berkaitan dengan perawatan sarana, maka Perseroan juga melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan juga meningkatkan kecakapan melalui sertifikasi bagi karyawan di segmen sarana.

Pendidikan dan Pelatihan dan sertifikasi yang dijalankan karyawan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Tersertifikasi Number of Employees Certified
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Maintenance of Railway Infrastructure Operation Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	25
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Operation Facility Railway Infrastructure Inspector	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	28
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Maintenance of Railway Infrastructure Lines and Buildings	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Track and Building Railway Infrastructure Inspector	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10
Pemeriksa Sarana Facility Checker	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	29
Perawatan Sarana Nurse Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	29

SEGMENT PRASARANA

Pemeriksaan dan perawatan prasarana juga penting dilakukan, terutama bila hal tersebut dapat dilakukan tanpa mengganggu kinerja operasional rangkaian kereta yang dimiliki oleh LRT Jakarta.

Segmen Prasarana yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan perawatan prasarana memiliki fokus utama rencana kerja selama tahun 2024 sebagai berikut:

Facility segmen performance based on plan and actualization in 2024:

Throughout 2024, the Company successfully carried out facility maintenance, achieving completion rates of 100% for daily inspections, 100% for weekly inspections, 100% for four-month periodic maintenance, and 99.36% for trainset washing.

Throughout 2024, the maintenance activities were conducted by both in-house employees and third-party partners. To ensure smooth maintenance operations, the Company also provided education and training programs, as well as skill enhancement through certification for employees in the Facilities Segment.

Education and training, and certification of employees in 2024 described as follow:

INFRASTRUCTURE SEGMENT

The inspection and maintenance of infrastructure are essential, particularly when they can be carried out without disrupting the operational performance of LRT Jakarta's trainsets.

The Infrastructure Segment, responsible for infrastructure inspection and maintenance, focused on the following key work plans throughout 2024:



- Pemeriksaan dan perawatan jalur dan bangunan di area Depo dan Stasiun;
- Pemeriksaan dan perawatan sistem persinyalan;
- Pemeriksaan dan perawatan sistem telekomunikasi;
- Sertifikasi awak sarana;
- Pengadaan suku cadang prasarana;
- Peningkatan fasilitas pendukung layanan kepada pelanggan; dan
- Sertifikasi DJKA tentang uji berkala 4 tahunan Fasilitas Operasi dan Jalur Bangunan.

Fokus tersebut terlaksana dengan baik karena adanya SDM Prasarana yang selain mampu melaksanakan pemeriksaan dan perawatan secara mandiri, juga bekerja sama melibatkan pihak ketiga melalui *Maintenance Service Agreement* (MSA).

Selama tahun 2024, Segmen Prasarana telah melakukan pemeriksaan dan perawatan prasarana dengan baik. Seluruh pemeriksaan dan perawatan prasarana mencapai target *actual* pencapaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Segmen Prasarana telah melaksanakan fokus utama rencana kerja dengan baik dan mendukung penuh kinerja operasional rangkaian kereta yang dimiliki oleh LRT Jakarta. Pencapaian tersebut dalam tabel berikut:

Tahun 2024 Year 2024	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Realisasi (%) Realization (%)
Jalur dan Jalan Layang/Paths and Overpasses	1.062	1.062	100	100
Bangunan/Building	2.513	2.513	100	100
Sistem Kelistrikan/Electrical System	7.046	7.046	100	100
Sistem Persinyalan dan Telekom/Signaling and Telecom Systems	2.307	2.307	100	100

SEGMENT PENGEMBANGAN BISNIS

Segmen pengembangan bisnis Perseroan erat kaitannya dengan usaha penambahan pendapatan diluar usaha utama sebagai pelaksana operasional dan penyedia sarana dan prasarana LRT Jakarta.

Karenanya, segmen ini mengusahakan pendapatan dari bisnis *non-farebox* atau selain pemasukan tiket. Yang diantaranya meliputi bidang periklanan, *event*, jasa perawatan, jasa konsultasi, retail dan persewaan, juga telekomunikasi.

Untuk memperbanyak pendapatan dari bisnis *non-farebox* ini, Perseroan membuka kerjasama dengan pihak lain baik melalui sinergi dengan Jakpro ataupun sinergi BUMN/BUMD, maupun

- Inspection and maintenance of tracks and buildings in the depot and station areas;
- Inspection and maintenance of the signaling system;
- Inspection and maintenance of the telecommunications system.
- Certification of railway crew;
- Procurement of infrastructure spare parts;
- Enhancement of customers service support facilities; and
- DJKA certification for the four-year periodic inspection of operational facilities and track buildings.

These focuses were successfully implemented due to the competence of the Infrastructure Segment's human resources, who not only conducted independent inspections and maintenance but also collaborated with third parties through the Maintenance Service Agreement (MSA).

Throughout 2024, the Infrastructure Segment effectively carried out its inspection and maintenance duties, achieving a 100% completion rate for all planned activities. This accomplishment reflects the successful execution of the segment's key work plans and its full support for LRT Jakarta's operational performance. The achievement of Infrastructure Segment are:

BUSINESS DEVELOPMENT SEGMENT

The Company's business development segment plays a crucial role in diversifying revenue beyond its core operations as the operator and provider of LRT Jakarta's facilities and infrastructure.

This segment focuses on expanding non-farebox revenue, encompassing income streams beyond ticket sales, such as advertising, events, maintenance services, consulting, retail and leasing, and telecommunications.

To strengthen and grow non-farebox revenue, the Company actively collaborates with various stakeholders, including strategic synergies with Jakpro, partnerships with state-owned

bekerja sama dengan pelaku bisnis umum. Dengan kerjasama ini, diharapkan bisnis *non-farebox* dapat tumbuh berkelanjutan dan menyokong pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Hingga akhir tahun 2024, pendapatan *non-farebox* adalah sebesar Rp11,7 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Retail dan Sewa Menyewa sebesar Rp3,89 miliar, Pendapatan Jasa Teknis sebesar Rp6,6 miliar, Pendapatan Iklan sebesar Rp24 juta, Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp537 juta, dan Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Perpajakan sebesar Rp654 juta.

Pendapatan *non-farebox* tersebut didukung oleh beberapa implementasi inisiatif Perseroan, diantaranya:

- Penyelenggaraan parkir
- Operasi dan perawatan jalur baru
- Pemanfaatan lahan di sekitar jalur LRT
- Kerjasama *naming rights*
- Keagenan suku cadang
- Pengembangan ritel
- Menjadi vendor pada BUMN lain

PT LRT Jakarta bertekad terus melakukan inovasi maupun inisiatif bisnis lain guna meningkatkan kinerja bisnis *non-farebox* di masa yang akan datang.

enterprises (BUMN) and regionally-owned enterprises (BUMD), as well as engagements with private sector businesses. These collaborations are designed to drive sustainable revenue growth and enhance the Company's overall financial performance.

At the end of 2024, the Company's non-farebox revenue amounted IDR11.7 billion. This revenue was derived from Retail and Leasing Revenue of IDR3.89 billion, Technical Services Revenue of IDR6.6 million, Advertising Revenue of IDR24 million, Education and Training Service Revenue of IDR537 million, and Parking Management Revenue of IDR654 million.

The Company's non-farebox revenue growth supported by several strategic initiatives, including:

- Parking management operations
- Operation and maintenance of new rail lines
- Land utilization around LRT routes
- Naming rights partnerships
- Spare parts agency services
- Retail development
- Serving as a vendor for other state-owned enterprises

PT LRT Jakarta remains committed to continuous innovation and new business initiatives to further enhance non-farebox revenue performance in the future.





Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

STRATEGI PEMASARAN

MARKETING STRATEGY

1. Selama tahun 2024, LRT Jakarta senantiasa berusaha untuk dapat mengoptimalkan pendapatan, tidak hanya dari kinerja operasional yang berkenaan dengan utilisasi rangkaian kereta, tetapi juga melalui inisiatif lain yang memperbesar kesempatan untuk penambahan pelanggan (*ridership*) maupun penambahan pendapatan dari sisi non pelanggan (*non-farebox*).
2. Perseroan berupaya untuk terus mengoptimalkan bisnis *non-farebox*, dan diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan. Kegiatan *non-farebox* yang menjadi fokus Perseroan dalam peningkatan pendapatan adalah: periklanan (*advertising*), jasa teknis dan konsultasi, *retail* dan sewa menyewa, *event* dan *activation*, dan telekomunikasi.
3. Di bidang periklanan, LRT Jakarta menawarkan opsi beriklan bagi klien potensial. Opsi tersebut diantaranya adalah penawaran *naming rights* kepada calon klien utamanya dari sektor industri keuangan Bank dan non Bank, industri properti dan industri lainnya.
4. Sedangkan di bidang *retail* dan sewa menyewa, Perseroan menawarkan ruangan dan lahan sebagai tempat lahan parkir, lapangan futsal dan area F&B.
5. Selain itu, Perseroan juga aktif menawarkan jasa keahliannya dalam bidang suku cadang dan pemeliharaan sarana, sehingga berhasil menjadi penyuplai tunggal suku cadang dan mendapatkan kontrak kerja pemeliharaan sarana untuk entitas klien.

PANGSA PASAR

MARKET SHARE

LRT Jakarta merupakan salah satu moda transportasi umum yang beroperasi dan melayani masyarakat di Ibu Kota Jakarta sejak tahun 2019. Sejak beroperasi, LRT Jakarta telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, terutama untuk jalur Rawamangun - Kelapa Gading dan sebaliknya.

Rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani oleh LRT Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan harian mencapai 3.469 pelanggan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 3.000 pelanggan per hari.

1. Throughout 2024, LRT Jakarta remained focused on optimizing revenue, not only through operational performance and trainset utilization but also by implementing various initiatives to boost ridership and expand non-farebox income streams.
2. The Company is committed to optimize its non-farebox business, which is expected to contribute significantly to revenue growth. Key areas of focus include advertising, technical and consulting services, retail and leasing, events and activations, and telecommunications.
3. In the advertising sector, LRT Jakarta provides diverse advertising opportunities, including naming rights sponsorships, primarily targeting clients from the banking and non-banking financial sectors, the property industry, and other key industries.
4. For retail and leasing, the Company offers spaces for various commercial uses, including parking areas, futsal courts, and food and beverage (F&B) zones.
5. LRT Jakarta also leverages its expertise in spare parts and train maintenance services, successfully establishing itself as the sole supplier of spare parts and securing maintenance contracts for client entities.

LRT Jakarta has been serving as a public transportation mode in Jakarta since 2019. Since its initial operation, it has become a preferred choice for commuters, particularly along the Rawamangun – Kelapa Gading route.

Ridership of LRT Jakarta has steadily increased year over year, with daily number of customers reaching 3,469 customers in 2024, an increase compared to 3,000 customers per day in 2023.

Meskipun rata-rata jumlah pelanggan harian terus bertumbuh, pangsa pasar LRT Jakarta masih relatif kecil dibandingkan dengan moda transportasi publik lainnya di Jakarta. Sebagai perbandingan, jumlah pelanggan LRT Jakarta selama periode Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 1,27 juta orang, sementara MRT Jakarta mencatatkan 39,91 juta pelanggan, dan TransJakarta mencapai 383,20 juta pelanggan dalam periode yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa potensi pangsa pasar LRT Jakarta masih luas, terutama dengan adanya proyek perpanjangan rute dari Rawamangun ke Manggarai yang saat ini tengah dalam tahap pembangunan. Proyek ini diharapkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik LRT Jakarta sebagai moda transportasi yang lebih terintegrasi.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah pengguna, Perseroan juga aktif melakukan integrasi dengan jaringan transportasi umum lainnya, seperti TransJakarta dan KRL *Commuter Line*. Selain itu, pengembangan kawasan di sekitar stasiun LRT juga menjadi strategi penting untuk menarik lebih banyak pelanggan dan memperkuat pangsa pasar LRT Jakarta di masa mendatang.

Despite its steady growth on number of customers, LRT Jakarta's market share remains relatively small compared to other public transportation modes in Jakarta. Between January to December 2024, LRT Jakarta recorded a total ridership of 1.27 million customers, while MRT Jakarta served 39.91 million customers, and TransJakarta reached 383.20 million customers during the same period.

This highlights LRT Jakarta's significant market potential, particularly with the ongoing route extension project from Rawamangun to Manggarai, which is currently under construction. Expected to be completed and operational by 2027, this expansion aims to enhance LRT Jakarta's appeal as a more integrated and accessible transportation option.

To expand its reach and increase ridership, the Company is actively integrating LRT Jakarta with other public transportation networks, such as TransJakarta and the KRL Commuter Line. Additionally, the development of areas surrounding LRT stations remains a key strategy to attract more customers and strengthen LRT Jakarta's market share in the future.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Laporan Tahunan 2024 ini disusun dengan mengacu pada Laporan Keuangan PT LRT Jakarta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dan dikerjakan oleh Akuntan Publik Drs. Hertanto., M.S.Ak.,CPMA.,CA. yang memiliki Izin Akuntan Publik No. AP.0136 dengan opini laporan keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Pada pembahasan tinjauan keuangan Perseroan ini, kami memaparkan hasil kinerja selama tahun 2024 dengan memperhatikan penjelasan atas catatan Laporan Keuangan Perseroan dari pihak Auditor Eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The 2024 Annual Report has been prepared based on the Audited Financial Statements of PT LRT Jakarta, conducted by the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan and audited by Public Accountant Drs. Hertanto., M.S.Ak., CPMA., CA., who holds Public Accountant License No. AP.0136. The audit opinion states that the Company's financial statements fairly present, in all material respects, its financial position as of December 31, 2024, and 2023, as well as its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

In this financial review section, we present performance results during 2024 while taking into account the explanations provided in the notes to the Company's Financial Statements by the External Auditor, which become an integral part of this Annual Report.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	216.392.865.365	189.290.899.397	27.101.965.968	14,32%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	173.556.248.255	192.197.792.457	(18.641.544.202)	(9,70%)
Jumlah Aset Total Assets	389.949.113.620	381.488.691.854	8.460.421.766	2,22%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	50.708.523.492	60.328.612.301	(9.620.088.809)	(15,95)%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	8.061.920.941	5.865.367.835	2.196.553.106	37,95%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	58.770.444.433	66.193.980.136	(7.423.535.703)	(11,21)%
Ekuitas Equity	331.178.669.187	315.294.711.718	15.883.957.469	5,04%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	389.949.113.620	381.488.691.854	68.674.626.894	20,24%

Aset

Aset Perseroan hingga akhir periode 2024, tercatat Rp389,95 miliar, naik Rp8,46 miliar atau 2,22% bila dibandingkan dengan aset di periode sebelumnya yang tercatat Rp381,50 miliar. Meningkatnya aset Perseroan ini dikarenakan adanya pertumbuhan pada pos aset lancar sebesar Rp27,10 miliar selama periode tahun 2024.

Aset Lancar

Perseroan mencatatkan kenaikan Aset Lancar per 31 Desember 2024. Aset lancar tercatat sebesar Rp216,39 miliar, naik Rp27,10 miliar atau 14,32% dari Rp189,29 miliar di tahun 2023. Peningkatan aset lancar ini sebagian besar disebabkan karena naiknya deposito Perseroan selama tahun 2024.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami penurunan menjadi Rp173,56 miliar, turun Rp18,64 miliar atau 9,70% dibandingkan aset tidak lancar di tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp192,20 miliar. Turunnya nilai aset tidak lancar ini disebabkan utamanya karena adanya pengurangan pada pos pajak tangguhan Perseroan.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan di tahun buku 2024 mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp66,19 miliar di tahun 2023, menjadi Rp58,77 miliar. Liabilitas ini mengalami penurunan

Asset

Company's assets for 2024 were recorded at IDR389.95 billion, reflecting an increase of IDR8.46 billion or 2.22% compared to the previous period's total of IDR381.50 billion. This growth in assets was primarily driven by an increase of IDR27.10 billion in current assets during the 2024 period.

Current Asset

As of 31 December 2024, the Company's current asset growth to IDR216.39 billion, increase of IDR27.10 billion or 14.32% compared to IDR189.29 in 2023. Growth in bank deposits driven increase of the current asset during 2024.

Non-Current Asset

The Company's non-current assets experienced a decline to IDR173.56 billion, decrease of IDR18.64 billion or 9.70%, compared to non-current assets in 2023 of IDR192.20 billion. The decline primarily due to a reduction in the deferred tax assets.

Liabilities

The Company's total liabilities decreased in the 2024 fiscal year, from IDR66.19 billion in 2023 to IDR58.77 billion. This decline of IDR7.42 billion or 11.21% was primarily due to the

Rp7,42 miliar atau 11,21% karena adanya pembayaran utang usaha terutama kepada pihak berelasi Perseroan, meski ada penambahan pada pendapatan diterima dimuka dan liabilitas imbalan pasca kerja.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2024, Liabilitas Lancar Perseroan turun Rp9,62 miliar atau 15,95% menjadi Rp50,71 miliar dari sebelumnya Rp60,3 miliar di tahun 2023. Turunnya liabilitas lancar Perseroan ini terutama karena adanya pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi selama tahun 2024 sejumlah Rp11 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Sedangkan Liabilitas Tidak Lancar Perseroan tercatat sebesar Rp8,06 miliar untuk tahun buku 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp2,20 miliar atau 37,95% dari Rp5,87 miliar di tahun 2023. Bertambahnya liabilitas tidak lancar Perseroan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada liabilitas imbalan pasca kerja dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan.

Ekuitas

Per 31 Desember 2024, jumlah Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp331,18 miliar, meningkat Rp15,88 miliar atau 5,04% dari tahun 2023 sebesar Rp315,29 miliar. Peningkatan ini didukung oleh berkurangnya defisit yang mencapai Rp1,78 miliar, dari angka defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp15,82 miliar.

reduction in trade payables, particularly to related parties, despite an increase in unearned revenue and post-employment benefit liabilities.

Short Term Liabilities

For the fiscal year ending December 31, 2024, the Company's current liabilities decreased by IDR9.62 billion or 15.95%, reaching IDR50.71 billion from IDR60.3 billion in 2023. This decline was primarily due to the payment of trade payables to related parties amounting to IDR11 billion during 2024.

Long Term Liabilities

Meanwhile, the Company's non-current liabilities were recorded at IDR8.06 billion for the 2024 fiscal year, an increase of IDR2.20 billion or 37.95% from IDR5.87 billion in 2023. This rise was primarily due to an increase in post-employment benefit liabilities and deferred tax liabilities.

Equity

As of December 31, 2024, the Company's total equity was recorded at IDR331.18 billion, an increase of IDR15.88 billion or 5.04% from IDR315.29 billion in 2023. This growth was supported by a reduction in the deficit, which decreased by IDR1.78 billion from the previous year's deficit of IDR15.82 billion.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Pendapatan Revenue	265.229.654.810	271.606.454.045	(6.376.799.235)	(2,35)%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(162.064.701.705)	(170.163.884.005)	8.099.182.300	(4,76)%
Laba Kotor Gross Profit	103.164.953.105	101.442.570.040	1.722.383.065	1,70%
Beban Usaha Operating Expenses				
Beban Penjualan Selling Expenses	(848.039.984)	(536.300.537)	(311.739.447)	58,13%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(94.481.080.650)	(85.492.101.782)	(8.988.978.878)	10,51%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(95.329.120.634)	(86.028.402.319)	(9.300.718.315)	10,81%
Laba Usaha Operating Profit	7.835.832.471	15.414.167.721	(7.578.335.250)	(49,16)%



Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Financial Income-Net				
Pendapatan Lainnya Other Income	4.625.200.651	2.828.557.983	1.796.642.668	63,52%
Beban Lainnya Other Expenses	90.694.347	1.407.726.729	(1.317.032.382)	(93,56%)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Total Other Income	4.715.894.998	4.236.284.712	479.610.286	11,32%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	12.551.727.469	19.650.452.433	(7.098.724.964)	(36,12)%
Manfaat (Beban) Pajak Tax Benefit (Expense)				
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	(6.462.350.393)	(276,57%)
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	(6.462.350.393)	(276,57%)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	3.752.785.895	17.313.861.252	(13.561.075.357)	(78,32)%
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income				
Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pasti Remeasurements of Defined Benefit Obligation	2.367.641.534	(2.201.864.827)	4.569.506.361	207,53
Dampak Pajak Income Tax Effect	(520.881.137)	484.410.262	(1.005.291.399)	(207,53%)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya Total Other Comprehensive Income (Loss)	1.846.760.397	(1.717.454.565)	3.564.214.962	(207,53%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	5.599.546.292	15.596.406.687	(9.996.860.395)	(64,10)%

Pendapatan

Di tahun 2024, Perusahaan membukukan Pendapatan sebesar Rp265,23 miliar, turun Rp6,38 miliar atau 2,35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp271,61 miliar. Turunnya pendapatan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah subsidi sarana dan prasarana dibanding tahun sebelumnya. Tercatat, nilai subsidi sarana dan prasarana di tahun 2024 masing-masing Rp129,74 miliar dan Rp118,20 miliar; dibandingkan dengan subsidi sarana dan prasarana di tahun 2023, masing-masing tercatat Rp136,16 miliar dan Rp122,22 miliar.

Namun, naiknya pendapatan non subsidi yaitu dari jumlah pelanggan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan dari hasil penjualan tiket (*farebox*), yaitu mencapai Rp5,53 miliar atau meningkat 13,40% dari Rp4,87 miliar di tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan *non-farebox* seperti jasa teknis, sewa, parkir, pendidikan dan pelatihan, serta periklanan juga meningkat selama tahun 2024 menjadi Rp11,77 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp8,36 miliar.

Revenue

In 2024, the Company recorded revenue of IDR265.23 billion, a decrease of IDR6.38 billion or 2.35% compared to the previous year's IDR271.61 billion. This decline was primarily due to a reduction in infrastructure and facility subsidies compared to the previous year. The subsidies for facilities and infrastructure in 2024 were recorded at IDR129.74 billion and IDR118.20 billion, respectively, compared to IDR136.16 billion and IDR122.22 billion in 2023.

However, an increase in non-subsidy revenue, particularly from number of customers, contributed to higher farebox revenue, which reached IDR5.53 billion—an increase of 13.40% from IDR4.87 billion in the previous year. Additionally, non-farebox revenue, including technical services, leasing, parking, training and education, and advertising, also grew in 2024, reaching IDR11.77 billion compared to IDR8.36 billion in the previous year.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp95,33 miliar, meningkat Rp9,30 miliar atau 10,81% dibanding tahun 2023 sebesar Rp86,03 miliar. Hal ini karena adanya peningkatan aktivitas kami sehingga realisasi belanja menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, utamanya dalam hal periklanan, pameran dan kepegawaian.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp4,72 miliar, meningkat Rp479 juta atau 11,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp4,24 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga deposito menjadi sebesar Rp4,52 miliar dan turunnya beban pajak atas bunga menjadi Rp36 juta dari sebelumnya Rp667 juta.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp3,75 miliar, mengalami penurunan Rp13,56 miliar atau 78,32% dari tahun 2023 yang sebesar Rp17,31 miliar. Turunnya laba bersih Perseroan terutama karena kenaikan jumlah beban usaha Perseroan.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan mencatatkan Laba Komprehensif sebesar Rp5,60 miliar di tahun 2024, turun Rp10 miliar atau 64,10% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp15,60 miliar. Meskipun laba komprehensif tercatat lebih rendah, namun penghasilan komprehensif lain berupa pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti Perseroan meningkat dua kali lipat di tahun 2024 ini.

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2024 amounted to IDR95.33 billion, an increase of IDR9.30 billion or 10.81% compared to IDR86.03 billion in 2023. This rise was primarily due to increased activities, leading to higher spending than the previous year, particularly in advertising, exhibitions, and personnel expenses.

Other Income (Expense)

As of December 31, 2024, the Company recorded Other Income of IDR4.72 billion, an increase of IDR479 million or 11.32% compared to IDR4.24 billion in the previous period. This increase was primarily driven by higher interest income from deposits, which reached IDR4.52 billion, and a decrease in tax expenses on interest to IDR36 million from previously IDR667 million.

Profit (Loss) for the Year

The Company recorded a Net Profit of IDR3.75 billion, a decrease of IDR13.56 billion or 78.32% from IDR17.31 billion in 2023. This decline was primarily due to an increase in the Company's operating expenses.

Total Comprehensive Income for the Year

The Company recorded a Comprehensive Income of IDR5.60 billion in 2024, a decrease of IDR10 billion or 64.10% compared to IDR15.60 billion in 2023. Although comprehensive income was lower, other comprehensive income from the remeasurement of the Company's defined benefit obligations doubled in 2024.

LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	7.816.516.819	41.533.376.617	(33.716.859.798)	(81,18%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	41.772.930.852	(34.922.200.660)	76.695.131.512	219,62%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	49.589.447.671	6.611.175.957	42.978.271.714	650,09%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of the Year	120.641.665.365	114.030.489.408	87.114.933.482	5,80%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at End of the Year	170.231.113.036	120.641.665.365	49.589.447.671	41,10%



Pada akhir tahun 2024, posisi kas dan setara kas Perseroan tercatat Rp170,23 miliar, meningkat Rp49,59 miliar atau naik 41,10% bila dibandingkan dengan posisi kas dan setara kas di akhir tahun 2023 yang tercatat Rp120,64 miliar. Peningkatan kas dan setara kas di akhir tahun 2024 ini didukung oleh kenaikan arus kas dari aktivitas investasi, yang naik menjadi Rp41,77 miliar karena adanya penerimaan deposito sebesar Rp43,70 miliar.

At the end of 2024, the Company's cash and cash equivalents stood at IDR170.23 billion, an increase of IDR49.59 billion or 41.10% compared to IDR120.64 billion at the end of 2023. This increase was supported by higher cash flow from investing activities, which rose to IDR41.77 billion due to deposit receipts amounting to IDR43.70 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipt from Customers	269.593.533.680	269.965.768.868	(372.235.188)	(0,14)%
Pembayaran Kas untuk Beban Usaha dan Operasional Cash Payments for Operating and Operating Expenses	(162.578.039.781)	(138.947.585.836)	(23.630.453.945)	17,01%
Pembayaran Kas kepada Pengurus dan Karyawan Cash Payments to Managers and Employees	(103.884.095.980)	(92.998.879.111)	(10.885.216.869)	11,70%
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro Interest Receipt and Current Account Service	4.685.118.900	3.514.072.695	1.171.046.205	33,32%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Operasi Operasi Net Cash Flow Provided From (Used in) Operating Activities	7.816.516.819	41.533.376.617	(33.716.859.798)	(81,18)%

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan tercatat turun 81,18% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp7,82 miliar. Penurunan ini karena penambahan jumlah pembayaran kas untuk beban usaha dan operasional dan penambahan kas kepada pengurus dan karyawan. Namun, terdapat kenaikan Bunga Deposito dari simpanan di Bank milik Perseroan sebesar 33,32% menjadi Rp4,69 miliar.

The Company's net cash used for operating activities decreased by 81.18% from the previous year, amounting to IDR7.82 billion. This decline was due to increased cash payments for operating expenses and additional disbursements to management and employees. However, there was a 33.32% increase in deposit interest from the Company's bank savings, reaching IDR4.69 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Penempatan Deposito Placement of Deposits	0	(43.699.794.842)	43.699.794.842	100%
Penerimaan Deposito Acceptance of Deposits	43.699.794.842	15.000.000.000	28.699.794.842	191,33%
Perolehan Aset Tidak Berwujud Acquisition of Intangible Assets	(749.460.899)	(1.047.898.420)	298.437.521	28,48%
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(1.177.403.091)	(5.174.507.398)	3.997.104.307	(77,24)%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows Provided From (Used In) Investing Activities	41.772.930.852	(34.922.200.660)	76.695.131.512	219,62%

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi sebesar Rp41,77 miliar, meningkat Rp76,70 miliar atau 219,62% dibanding tahun 2023 sebesar Rp34,92 miliar. Perubahan signifikan tersebut karena kami melakukan pencairan seluruh deposito jangka pendek dari tahun sebelumnya sebesar Rp43,70 miliar.

In 2024, the Company recorded a net cash outflow for investing activities of IDR41.77 billion, an increase of IDR76.70 billion or 219.62% compared to IDR34.92 billion in 2023. This significant change was primarily due to the full withdrawal of short-term deposits from the previous year, amounting to IDR43.70 billion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SOLVENCY AND COLLECTABILITY RATE

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, terutama utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dapat diukur melalui Rasio Likuiditas. Rasio Likuiditas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	336	199	137	68,84
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	427	313	114	36,42

Rasio kas Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar 336% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 199%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional Perusahaan yang juga berbanding lurus dengan meningkatnya kewajiban. Meski demikian, Perseroan tetap memiliki kas dan setara kas yang cukup besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Sedangkan, rasio lancar Perseroan di tahun 2024 adalah sebesar 427% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 313%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai aset Perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dan pencatatan persediaan. Kondisi ini menunjukkan pemanfaatan aset perseroan secara efisien, terutama untuk pembayaran kewajiban.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Perusahaan juga mengukur kemampuannya dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan Rasio Solvabilitas. Adapun Rasio Solvabilitas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liability to Assets Ratio (%)	15,07	17,35	(2,28)	(13,14)%

Perseroan juga mengukur kemampuan membayar seluruh kewajibannya, terutama dalam jangka panjang dengan menggunakan Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur tingkat liabilitas terhadap aset Perseroan. Rasio Solvabilitas di tahun 2024 tercatat sebesar 15,07%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 17,35%. Turunnya rasio solvabilitas ini menunjukkan terjadi penurunan nilai Liabilitas selama tahun 2024 dan kenaikan jumlah aset Perseroan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menagih piutang yang dapat diukur melalui perhitungan lama penagihan rata-rata *collection period* dan rasio perputaran piutang.

Ability to Pay Short Term Liabilities

The Company's ability to meet all obligations, particularly short-term debts due, can be measured through the liquidity ratio. The Company's liquidity ratio is explained below:

The Company's cash ratio in 2024 was recorded at 336%, an increase from 199% in 2023. This improvement was driven by increased operational activities, which were proportional to the rise in liabilities. Despite this, the Company maintained a substantial cash and cash equivalents balance to meet its short-term obligations.

Meanwhile, the Company's current ratio in 2024 stood at 427%, up from 313% in 2023. This increase was attributed to the rise in the Company's assets, primarily due to higher cash and cash equivalents and inventory records. This condition reflects the efficient utilization of the Company's assets, particularly in meeting its obligations.

Solvency

The Company also measures its ability to settle all its obligations, both short-term and long-term, using the Solvency Ratio. The Company's Solvency Ratios are as follows:

The Company also assesses its ability to meet all obligations, particularly in the long term, using the Solvency Ratio, which measures the level of liabilities relative to the Company's assets. In 2024, the Solvency Ratio was recorded at 15.07%, a decrease from 17.35% in 2023. This decline indicates a reduction in liabilities throughout 2024 and an increase in the Company's total assets.

Receivables Collectability Ratio

The accounts receivable collectability reflects the Company's ability to collect outstanding receivables, which can be measured through the average collection period and accounts receivable turnover ratio.



Kemampuan Perusahaan dalam menagih piutangnya dapat dilihat dengan semakin kecilnya nilai *collection period*.

The Company's efficiency in collecting receivables is indicated by a shorter collection period.

Adapun tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's collectability ratio in 2024 is as follows:

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Rasio Kolektibilitas Piutang (hari) Receivables Collectability Ratio (in days)	7,31	15,03	(7,72)	48,61%

Di tahun 2024, tingkat kolektibilitas piutang Perseroan mengalami penurunan dari 15,03 hari di tahun 2023 menjadi 7,31 hari pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa periode rata-rata penagihan piutang Perseroan di tahun 2024 lebih baik dibanding di tahun 2023. Dengan semakin menurunnya waktu penagihan menandakan kemampuan optimal kami dalam mengumpulkan piutangnya.

In 2024, the Company's collectability ratio declined from 15.03 days in 2023 to 7.31 days in 2024. This condition reflects the average period of collectability in 2024 is better compared to collectability in 2023. Declining days of collectability indicates the Company's ability to collect its receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal untuk menjaga kelangsungan usaha, Perseroan melakukan kebijakan permodalan dengan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan tetap menjaga struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal. Untuk memastikan pengelolaan struktur modal secara tepat, Perseroan melakukan penelaahan rutin dan berimbang untuk memastikan optimalisasi struktur modal.

To ensure business continuity, the Company implements a capital management policy that maximizes benefits for shareholders while maintaining an optimal capital structure to minimize capital costs. To achieve proper capital structure management, the Company conducts regular and balanced reviews to ensure capital structure optimization.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Kebijakan Perseroan dalam pengelolaan struktur modal ditujukan untuk keberlangsungan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan imbal hasil bagi para pemangku kepentingan khususnya bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa LRT Jakarta. Kebijakan struktur modal ini dilakukan dengan optimalisasi satuan struktur modal dan tak lupa juga melakukan efisiensi biaya modal.

Basis for Capital Structure Selection

The Company's capital structure policy is designed to support both short-term and long-term business sustainability. This approach aims to provide returns for stakeholders, particularly the general public who utilize LRT Jakarta's services. The capital structure policy focuses on optimizing capital components while maintaining cost efficiency.

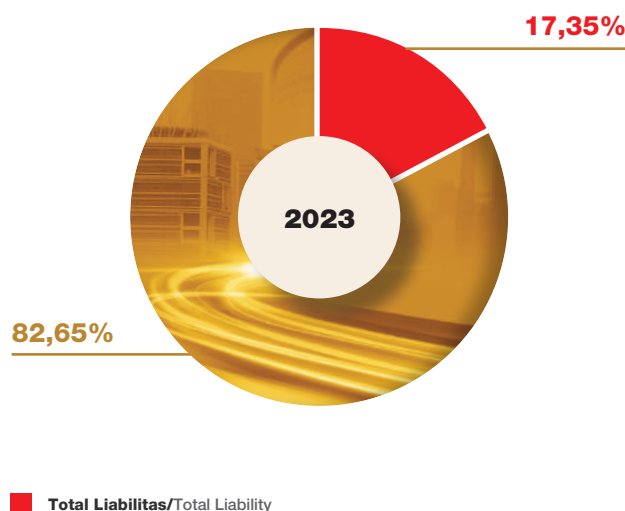
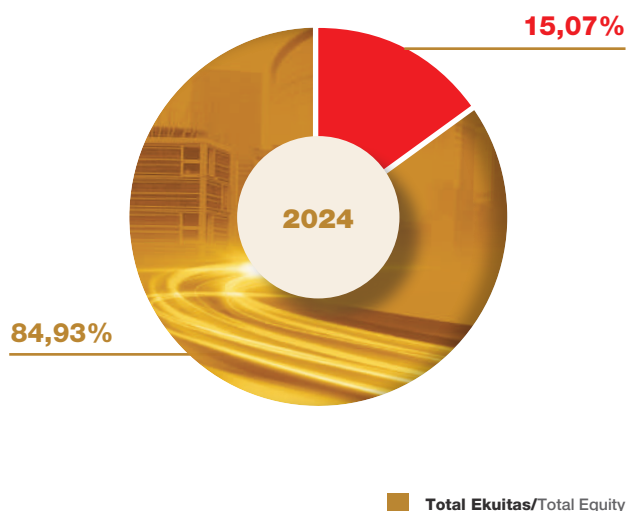
Rincian Struktur Modal

Dalam rincian struktur modal, Perseroan melibatkan liabilitas dan ekuitas, dan lebih menitikberatkan struktur permodalan pada sisi ekuitas. Adapun jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp58,77 miliar atau 15,07% dari total struktur modal dan ekuitas sebesar Rp331,18 miliar atau 84,93% dari struktur modal. Komposisi ini mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Perbandingan struktur modal Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Capital Structure Details

The Company's capital structure consists of liabilities and equity, with a stronger emphasis on equity financing. As of 2024, the Company recorded total liabilities of IDR58.77 billion, accounting for 15.07% of the total capital structure, while total equity stood at IDR331.18 billion, representing 84.93% of the capital structure. This composition has changed compared to 2023. The comparison of the Company's capital structure over the past two years is as follows:

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal Nominal (Rp/IDR)	Persentase Percentage (%)	Nominal Nominal (Rp/IDR)	Persentase Percentage (%)	Nominal Nominal (Rp/IDR)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	58.770.444.433	15,07%	66.193.980.136	17,35%	(7.423.535.703)	(11,21)%
Jumlah Ekuitas Total Equity	331.178.669.187	84,93%	315.294.711.718	82,65%	15.883.957.469	5,04%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	389.949.113.620	100,00%	381.488.691.854	100,00%	68.674.626.894	20,24



Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

Realisasi Investasi Barang Modal

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menilai investasi sebagai salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan Perseroan yang digunakan untuk pembelian sejumlah aset, pemeliharaan aset, dan perbaikan terhadap aset yang dimiliki sehingga dapat memberikan nilai tambah.

Selama tahun 2024, Perseroan telah melakukan realisasi investasi barang modal sebesar Rp5,36 miliar atau naik Rp0,45 miliar atau 9,21% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp4,91 miliar. Hal ini karena Perseroan berupaya meningkatkan performa, memperbarui fasilitas guna meningkatkan efisiensi operasional, serta mengadopsi teknologi terbaru untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Realisasi investasi barang modal Perseroan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Material Commitment for Capital Expenditure

Throughout 2024, the Company did not have any material commitments for capital expenditure.

Capital Expenditure Realization

To support its business activities, the Company considers investment as one of the essential aspects. Capital Goods Investment (*Capital Expenditure*) refers to the expenses incurred by the Company for the acquisition of assets, asset maintenance, and asset improvements to enhance their value.

In 2024, the Company realized IDR5.36 billion in capital expenditure, showing an increase of IDR0.45 billion or 9.21% compared to IDR4.91 billion in 2023. The increase resulted from a selective approach to improve performance, renew facilities to escalate operational efficiency and adoption of new technology to support business growth.

The realization of the Company's capital expenditure in 2024 as follows:



Uraian Description	Tujuan Investasi Objective of the Investment	Nilai (Rp juta) Value (IDR million)
Instalasi Jalur Listrik & AC Ruang Elektrikal BOH Stasiun Boulevard Selatan Installation of Electrical Line & Air Conditioner in BOH Electrical Room at Boulevard Selatan Station	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	644.559.528
Pembangunan Perbaikan Tampias Stasiun LRT Jakarta Construction for Canopy Repairs at LRT Jakarta Station	Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan Improve customers comfort and safety	2.440.987.632
Pengembangan Aplikasi Kedinasan Operasi dan Pelayanan Development of Official Operations and Service Application	Digitalisasi proses bisnis operasional perkeretaapian Digitalization of railway operational business processes	749.460.900
Pemasangan Tangga Akses Jalur Masinis Stasiun Pegangsaan Dua ke Area Stabling Installation of Access Stairs for Train Operator from Pegangsaan Dua Station to Stabling Area	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	277.479.495
Pembangunan Perbaikan Tampias Stasiun LRT Jakarta Tahap II Construction for Canopy Repairs at LRT Jakarta Station Phase II	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	1.254.781.516
Jumlah Total		5.367.269.072

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	5.367.269.072	4.914.517.170	452.751.902	9,21%

PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI DAN TARGET/PROYEKSI KE DEPAN TARGET ACHIEVEMENT, REALIZATION, AND PROJECTIONS

Pencapaian Target dengan Realisasi dan Proyeksi

Pada setiap akhir tahun buku, Manajemen melakukan analisis dan menetapkan sejumlah target dan proyeksi yang hendak dicapai di tahun berikutnya. Hal itu tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perbandingan pencapaian sejumlah target dengan realisasi di tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Target Achievement, Realization and Projections

At the end of every fiscal year, Management analyses performance and establishes targets and projections for the following year, as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The comparison of target achievements in 2024 with actual results, along with projections for 2025, is as follows:

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization (Rp juta/IDR million)	Target 2024 2024 Target (Rp juta/IDR million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Realization against 2024 Target (%)	Proyeksi 2025 2025 Projection (Rp juta/IDR million)	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 2025 Projection against 2024 Realization (%)	Proyeksi 2025 terhadap Target 2024 2025 Projection against 2024 Target (%)
PENDAPATAN REVENUE						
Pendapatan Operasi Operating Income						
Farebox dan Non-Farebox Farebox and Non-Farebox	17.295	20.258	85,37%	24.049	139,05%	118,71%
Subsidi Sarana Facility Subsidies	129.737	122.974	105,50%	138.031	106,39%	112,24%
Subsidi Prasarana Infrastructure Subsidies	118.196	122.425	96,55%	138.495	117,17%	113,13%
Jumlah Pendapatan Total Revenue	265.229	265.656	99,87%	300.576	113,33%	113,14%

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization (Rp juta/IDR million)	Target 2024 2024 Target (Rp juta/IDR million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Realization against 2024 Target (%)	Proyeksi 2025 2025 Projection (Rp juta/IDR million)	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 2025 Projection against 2024 Realization (%)	Proyeksi 2025 terhadap Target 2024 2025 Projection against 2024 Target (%)
Beban Pokok Operasi Cost of Operations						
Beban Operasi & Perawatan Sarana Perkeretaapian Expenses for Railway Facilities	(87.222)	(90.325)	96,56%	(100.995)	115,79%	111,81%
Beban Operasi & Perawatan Prasarana dan Fasilitas Operasi Operating & Maintenance Expenses for Operational Facilities and Infrastructure	(63.502)	(81.377)	78,03%	(86.585)	136,35%	106,40%
Beban Non Farebox Non-Farebox Load	(11.340)	(9.925)	114,26%	(14.768)	130,23%	148,80%
Jumlah Beban Pokok Operasi Total Operations Expenses	(162.065)	(181.628)	89,23%	(202.348)	124,86%	111,41%
Laba Kotor Gross Profit	103.165	84.029	122,77%	98.228	95,21%	116,90%
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Kegiatan Promosi, dll.) Sales Expenses (Advertising, Exhibition, Promotional Activities, etc.)	(848)	(1.694)	50,06%	(770)	90,80%	45,45%
Beban Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian Non-Crew Employee Expenses for Railway Facilities	(54.570)	(46.501)	117,35%	(52.467)	96,15%	112,83%
Beban Penyusutan Aset Tetap Fixed Asset Depreciation Expense	(3.674)	(5.018)	73,22%	(4.147)	112,87%	82,64%
Beban Jasa Profesional Professional Services Expense	(4.737)	(2.437)	194,38%	(7.643)	161,13%	313,62%
Beban Umum General Expenses	(31.499)	(17.939)	175,59%	(28.601)	90,80%	159,43%
Jumlah Beban Operasional Total Operating Expenses	(95.329)	(73.589)	129,54%	(93.629)	98,22%	127,23%
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	7.835	10.439	75,06%	4.599	58,70%	44,06%
Pendapatan Lainnya Other Income	5.163	2.460	209,88%	2.460	47,64%	100,00%
Beban Lainnya Other Expenses	(447)	(511)	87,48%	(514)	114,99%	100,59%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	12.552	12.388	101,32%	6.545	52,14%	52,83%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Benefit (Expenses) of Income Tax	(8.799)	(10.038)	87,66%	(1.440)	16,36%	14,35%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss)	5.599	2.350	238,26%	5.105	91,18%	217,23%
Jumlah Aset Total Assets	389.949	331.095	117,78%	369.694	94,81%	111,66%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	58.770	26.829	219,05%	45.593	77,58%	169,94%
Ekuitas Equity	331.179	304.266	108,85%	324.101	97,86%	106,52%



KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Kebijakan Dividen

Kebijakan mengenai dividen di LRT Jakarta mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. Kebijakan pembagian dividen LRTJ pada setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan senantiasa berupaya memenuhi hak para pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi terkini Perseroan dan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan usaha ke depan.

Hingga diterbitkannya laporan ini, Perseroan belum memutuskan besaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Sedangkan pada tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2023, Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Dividend Policy

LRT Jakarta's dividend policy is based on the Company's Articles of Association. The decision on dividend distribution is determined through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The Company strives to fulfil shareholders' rights while considering its current financial condition and future business growth prospects.

As of the issuance of this report, the Company has not yet determined the dividend amount for the fiscal year ending December 31, 2024.

For the fiscal year ending December 31, 2023, the Company decided not to distribute dividends to shareholders.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP) EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2024, saham LRT Jakarta dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar 99,55% dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar 0,45% bukan merupakan perusahaan publik. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP).

As of the end of 2024, LRT Jakarta's shares were owned by PT Jakarta Propertindo (Perseroda) at 99.55% and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo at 0.45%. The Company is not a publicly traded entity. As a result, the Company does not have a policy regarding an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or a Management Stock Ownership Program (MSOP).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of December 31, 2024, the Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding the realization of proceeds from a public offering.

INFORMASI MATERIAL UNTUK INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL MATERIAL INFORMATION FOR INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/Modal.

As of the end of 2024, the Company has no material information regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, and debt/capital restructuring.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Selama tahun 2024, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi."

Policies on Related Parties

During the year of 2024, the Company has several transactions with related parties. Definition of related parties is in line with the PSAK No. 7 (Revised in 2015) "Disclosure of Related Parties."

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Name of Related Parties and Nature of Affiliate Relations

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Affiliate Relations	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Jakarta Propertindo (Perseroan)	Entitas Induk/Parent Entity	Piutang Usaha, Utang Usaha/Account Receivables, Account Payables
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang Saham/Shareholders	Piutang Usaha/Account Receivables

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi Perseroan yang dilakukan dengan Pihak Berelasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, termasuk didalamnya prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi. Selain karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan, transaksi yang dijalankan bersama diantaranya adalah transaksi pembiayaan bersama, transaksi pengalihan sebagian porsi piutang pembiayaan konsumen ("transaksi CAP"), transaksi penempatan deposito, utang dan piutang asuransi dan pinjaman bank.

Reasons of Transactions

The Company's transactions with related parties are carried out based on operational and business needs, following the principle of mutual necessity between the Company and related parties. In addition to ownership and/or management relationships, these transactions include joint financing transactions, the transfer of a portion of consumer financing receivables ("CAP transactions"), deposit placements, insurance-related payables and receivables, and bank loans.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan Pihak-pihak Berelasi/Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan memenuhi kewajaran transaksi dengan pihak berelasi. Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak yang berelasi, sesuai dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

Explanation of the Fairness of the Transaction

All transactions conducted by the Company with Related/Affiliated Parties have been disclosed in the financial statements and comply with PSAK 7 on "Related Party Disclosures." These transactions meet the fairness criteria for related party transactions. All related party transactions adhere to the same terms, pricing, and conditions as those applied to third parties and have been transparently reported in the financial statements. There are no differences in pricing policies or transaction terms between related parties and third parties.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi dengan pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perseroan selama tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Realization of Balances and Transactions of Related Parties

Realization of balances and transactions of the Company's related parties in relation with operational performances during 2024 are explained below:



Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)
Piutang Usaha Account Receivables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	819.797.839	6.190.881
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	2.184.274.072
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	427.500.000
Jumlah Total	3.431.571.911	2.617.964.953
Persentase terhadap Total Aset Percentage to Total Assets	0,88%	0,69%
Utang Usaha Account Payables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	--	11.089.608.167
Jumlah Total	--	11.089.608.167
Persentase terhadap Total Liabilitas Percentage to Total Liabilities	--	16,75%

Pernyataan Direksi terkait Prinsip Transaksi yang Wajar (Arm's Length Principle)

LRT Jakarta memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui prosedur yang benar, yaitu sesuai dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum Pihak manajemen, dalam hal ini Direksi, juga memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi afiliasi telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (Arm's Length Principle)

Dewan Komisaris dan Komite Audit juga menjalankan peran dalam melakukan prosedur untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Statement from The Board regarding the Arm's Length Principle Transaction

LRT Jakarta ensures that all transactions with related parties are conducted through proper procedures, in accordance with OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 7 on Related Party Disclosures. These transactions adhere to prudential principles and general business practices. Management, specifically the Board of Directors, also ensures that all affiliated transactions are carried out in line with common business practices and comply with the arm's length principle.

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Fulfilling the Arm's Length Principle Transactions

The Board of Commissioners and the Audit Committee also play a role in carrying out procedures to ensure that affiliated transactions are conducted in accordance with general business practices, including adherence to the arm's length principle.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Di sepanjang tahun buku 2024, Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

During 2024, the Company has no financial information containing extraordinary and rare events.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policy

Selama tahun 2024, terdapat beberapa perubahan peraturan dan pengaruhnya bagi kinerja operasional Perseroan, yaitu:

In 2024, there were several changes in accounting policy and impacted on the Company performance, such as:

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reason for Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
Kebijakan Metode Pencatatan Persediaan Inventory Recording Method Policy	Penyesuaian sebagaimana PSAK 14 Tentang Persediaan Adjustment in accordance with PSAK 14 on Inventory	Munculnya nilai Persediaan pada LK Tahun 2024 dan seterusnya Emergence of Inventory Value in the Financial Statements for the Year 2024 and onwards

Aspek Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara

Tax Aspects and Contribution to the State

Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan terhadap negara, Perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak, Perusahaan selalu patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Perusahaan memenuhi kewajibannya dalam hal pajak dengan telah menyampaikan dokumen pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dan PPN, SPT Tahunan, PPh Badan dan dokumen kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas perpajakan yang berwenang dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

As part of its commitment to the state, the Company fulfills its tax obligations. As a responsible taxpayer, it ensures compliance with Corporate Income Tax (PPh Badan) requirements. This includes the timely submission of tax reports, such as Monthly Income Tax (SPT Masa PPh) and Value-Added Tax (PPN) reports, Annual Tax Returns (SPT Tahunan), Corporate Income Tax filings, and other required tax documents to the relevant authorities, in accordance with applicable regulations.

Di tahun 2024, Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam hal pajak sebesar Rp12.853.297.529 meningkat sebesar Rp2.159.957.404 atau 54,6% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp10.693.340.125. Adapun kontribusi kepada negara berupa perpajakan yang direalisasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

In 2024, the Company fulfilled its tax obligations of IDR12,853,297,529, an increase of IDR2,159,957,404 or 54.6% compared to IDR10,693,340,125 in 2023. The Company's tax contributions to the state are as follows:

Uraian Description	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Kenaikan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
PPh 4 ayat (2) Income Tax 4, paragraph (2)	663.104.061	406.368.858	256.735.203	63,18%
PPh 21 Income Tax 21	11.016.675.572	8.877.066.488	2.139.609.084	24,10%
PPh 22 Income Tax 22	255.883.947	404.224.375	(148.340.428)	(36,70%)
PPh 23 Income Tax 23	917.633.949	1.005.680.404	(88.046.455)	(8,75%)
Jumlah Total	12.853.297.529	10.693.340.125	2.159.957.404	20,20%



Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DI TAHUN 2024

MATTERS WITH POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY IMPACTED TO BUSINESS CONTINUITY DURING 2024

Sepanjang tahun 2024, LRT Jakarta telah mengoperasikan rangkaian kereta LRT dengan baik, sejalan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengeluarkan strategi kebijakan mensukseskan Program Prioritas dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi. Selain itu, LRT Jakarta juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam percepatan pembangunan rendah karbon di DKI Jakarta tahun 2030, yang salah satu kebijakannya adalah transisi penggunaan energi bersih untuk transportasi dan industri.

Pada Oktober 2023, Groundbreaking Pengerjaan Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai sudah dimulai dan diproyeksikan proyek ini akan diselesaikan pada tahun 2026. Diharapkan perpanjangan jalur LRT Jakarta ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan serta mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta, karena proyek LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Jakarta untuk mentransformasi kota menjadi lebih ramah lingkungan dan berdaya saing. Karenanya, hingga berakhirnya tahun buku 2024, Manajemen Perseroan tidak memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

MANAGEMENT ASSESSMENT OF POTENTIALLY IMPACTING BUSINESS CONTINUITY

Tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi Perusahaan dalam melihat kelangsungan usaha. Beberapa hal berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

• Kondisi Perekonomian yang Masih Belum Stabil

Walaupun kondisi pandemi COVID-19 sudah beralih menjadi endemi di Juni 2023 namun secara global perekonomian dunia masih mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang disebabkan oleh konsumsi Pemerintah yang terkontraksi, perlambatan ekspor dan investasi serta

Throughout 2024, LRT Jakarta has successfully operated its train fleet in alignment with the policy strategies set by the Provincial Government of DKI Jakarta. These strategies aim to support the Priority Program in the 2024 Regional Budget (APBD) of DKI Jakarta, which focuses on flood mitigation, traffic management, economic growth acceleration, stunting reduction, poverty alleviation, and strengthening democratic values. Additionally, LRT Jakarta is an integral part of the Provincial Government of DKI Jakarta's long-term plan for accelerating low-carbon development by 2030, particularly in transitioning to clean energy use for transportation and industry.

In October 2023, the groundbreaking for the LRT Jakarta Phase 1B Velodrome–Manggarai Project commenced, with completion projected for 2026. The extension of the LRT Jakarta line is expected to positively impact customers growth and reduce traffic congestion in Jakarta. The Phase 1B project is part of Jakarta's broader initiative to transform the city into a more environmentally friendly and competitive metropolis. Therefore, as of the end of the 2024 fiscal year, the Company's management has no intention of liquidating the Company or ceasing its operations.

The year 2024 is crucial for the Company in evaluating its business continuity. Several factors may significantly impact the Company's sustainability, including:

• Unstable Economic Condition

Although the COVID-19 pandemic was reclassified as endemic in June 2023, global economic growth has continued to slow compared to the previous year. Jakarta's economy has experienced a similar trend, driven by reduced government spending, sluggish exports and investments, and slower regional revenue growth. These economic challenges have a significant impact on the Company's

perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Kondisi perlambatan perekonomian tentunya berdampak signifikan pada bisnis Perusahaan. Perusahaan akan dihadapkan pada tantangan dalam menjaga operasional dan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku.

• Pendapatan yang Masih Ditopang oleh Subsidi

Meskipun perusahaan telah berupaya mengurangi ketergantungan pada subsidi, pada tahun 2024, masih ada sejumlah pendapatan yang masih ditopang oleh subsidi. Ketergantungan pada subsidi tersebut menjadi salah satu faktor risiko terhadap kelangsungan usaha perusahaan dimasa depan. Oleh karena itu, Perusahaan perlu melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi agar dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas.

• Pendapatan Non-Farebox

Pendapatan *non-farebox* menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Beberapa sumber pendapatan *non-farebox* seperti penyewaan ruang iklan, penjualan jasa, dan layanan tambahan lainnya, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan sumber pendapatan *non-farebox* agar dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang masih ditopang subsidi.

• Kontrak Perusahaan sebagai Operator Sepanjang Masa Konsesi

Perusahaan menjadi operator sepanjang masa konsesi memiliki keuntungan dalam hal stabilitas pendapatan. Di tahun 2023, pembangunan perpanjangan jalur Fase 1B Velodrome – Manggarai sudah dimulai sehingga terdapat potensi peningkatan pendapatan Perusahaan di tiga tahun mendatang. Namun, Perusahaan harus tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan dan kinerja operasional agar tidak mengalami penurunan pendapatan pada masa konsesi berikutnya.

• Indikator Keuangan Perusahaan Berdasarkan Rasio Keuangan Masih Bagus

Indikator keuangan Perusahaan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas masih tergolong baik. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Perusahaan masih sehat dan dapat mengatasi sejumlah risiko di masa depan. Namun, Perusahaan perlu tetap berhati-hati dan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi.

Perusahaan perlu memperhatikan dengan serius hal-hal tersebut demi menciptakan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

business, giving difficulties in sustaining operations and maintaining service quality.

• Subsidies to Support Revenue

In efforts to reduce dependency on subsidies, some portion of the Company's revenue in 2024 remains subsidy-dependent. This reliance poses a future business continuity risk, making it crucial for the Company to implement strategies to reduce subsidy dependency and enhance revenue and profitability.

• Non Farebox Revenue

Non-farebox revenue plays a key role in increasing the Company's earnings. Sources of revenues such as advertising space rentals, service sales, and additional value-added services contribute significantly to overall revenue. The Company must adopt effective strategies to expand these revenue streams and reduce reliance on subsidies.

• Company's Role as a Long-Term Concession Operator

The Company's position as an operator throughout the concession period provides revenue stability. In 2023, the construction of the Phase 1B Velodrome – Manggarai extension began, presenting potential revenue growth over the next three years. However, maintaining service quality and operational performance is essential to sustaining revenue levels in the next concession periods.

• Company's Financial Indicators

The Company's financial ratios—including profitability, liquidity, and solvency—remain healthy, reflecting solid financial performance and resilience against future risks. However, continuous efforts are required to strengthen financial performance and mitigate potential risks effectively.

The Company must carefully address these factors to ensure long-term business sustainability.



ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN ASSESSING MATTERS THAT MAY SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY TO BUSINESS CONTINUITY DURING 2024

Dalam melakukan *assessment* atas hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan di tahun 2024, manajemen menggunakan beberapa asumsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa asumsi yang mungkin digunakan adalah:

In assessing potential factors affecting the Company's business continuity in 2024, management considers several key assumptions:

• Asumsi Terkait Pendapatan Subsidi

Manajemen akan fokus pada upaya untuk mengoptimalkan realisasi program kerja sesuai dengan Kontrak Subsidi. Dengan terbatasnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka manajemen berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi melalui peningkatan pendapatan *non-farebox*.

• Assumption on Subsidy Revenue

Management will focus on optimizing the implementation of work programs in accordance with the Subsidy Contract. Given the limited Budget Execution Document (DPA) of the Jakarta Provincial Government, efforts will be made to reduce reliance on subsidies by increasing non-farebox revenue.

Asumsi Terkait Kinerja Keuangan Perusahaan Manajemen fokus pada kesehatan kinerja keuangan Perusahaan di tahun 2024, namun perlu tetap diwaspadai terkait risiko yang dapat memengaruhi kinerja keuangan di masa depan, terutama dengan adanya perubahan regulasi. Oleh karena itu, manajemen melakukan strategi untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap optimal dan mengurangi risiko yang dihadapi.

Management's Assumption on the Company's Financial Performance prioritizes maintaining the Company's financial health in 2024 while remaining vigilant about potential risks that could impact future financial performance, particularly regulatory changes. Therefore, strategic measures will be implemented to sustain optimal financial performance and mitigate potential risks.

• Asumsi Terkait Kontrak sebagai Operator Sepanjang Masa Konsesi

Adanya kontrak sebagai operator sepanjang masa konsesi akan memberikan stabilitas pendapatan bagi Perusahaan. Namun, manajemen tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan dan kinerja operasional sesuai standar yang berlaku sehingga bisa menjaga kinerja *service & operation excellence*.

• Assumption on Long-Term Concession Period Operator

The Company's role as a long-term concession operator ensures revenue stability. However, management remains committed to maintaining service quality and operational excellence to sustain performance.

• Asumsi Terkait Peningkatan Permintaan

Manajemen mengasumsikan bahwa peningkatan permintaan akan terjadi di tahun 2024 dikarenakan mulai terjadi peralihan status pandemi menjadi endemi COVID-19. Oleh karena itu, manajemen melakukan strategi peningkatan *ridership*, seperti integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi, program edukasi dan *event* di kawasan stasiun dan depo, serta memperkuat branding Perusahaan.

• Assumption on Demand Growth

A rise in demand is expected in 2024 due to the transition of COVID-19 from pandemic to endemic status. Management is implementing strategies to boost ridership, such as physical and payment system integration across transportation modes, educational programs, station and depot events, and stronger corporate branding.

• Asumsi Terkait Perubahan Kebijakan Pemerintah

Manajemen mengasumsikan bahwa adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait transportasi dan mobilitas dapat berdampak pada bisnis perusahaan di tahun 2023. Oleh karena itu, manajemen melakukan asesmen serta mitigasi atas perubahan kebijakan pemerintah dan melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

• Assumption on Government Policy Changes

Management anticipates changes in government policies regarding transportation and mobility could impact the business in 2024. Therefore, assessments and mitigation strategies are in place to adapt to policy changes as needed.

Dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut, manajemen dapat melakukan *assessment* dengan lebih akurat dan tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2024. Hal ini diharapkan membantu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan meningkatkan performa bisnis di masa depan.

By occupying these assumptions, management can conduct a more accurate and strategic assessment to address challenges in 2024. This approach is expected to support business continuity and enhance long-term performance.

Prospek Usaha Business Prospect

Melalui Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2025 yang dijelaskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) LRT Jakarta Tahun 2025, Perseroan berupaya untuk terus menjalankan operasional dengan baik dan selaras dengan kinerja Induk dan Anak Usaha, agar dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Through the 2025 Corporate Work Plan outlined in the LRT Jakarta 2025 Work Plan and Budget (RKAP), the Company aims to maintain smooth operations while aligning with the performance of its Parent and Subsidiary Companies to create added value.

Berdasarkan data dan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang diperoleh Perseroan, dan sesuai dengan Advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Rancangan RKPD 2025 DKI Jakarta yang dijadikan referensi dalam penyusunan RKAP 2025 ini, maka Perseroan turut memperhatikan beberapa hal berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%, dan pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,1%-5,5%.
- Tingkat inflasi Indonesia pada akhir 2025 sebesar 2,5%, sedangkan tingkat inflasi regional Jakarta sebesar $2,5\% \pm 1,0\%$.
- Nilai tukar Rupiah sebesar Rp16.100 per dolar Amerika Serikat.
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun yakni 7,1%.
- Lifting Minyak 600 ribu barel per hari.
- Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di tahun 2025, menggunakan UMP yang telah ditetapkan sebesar Rp5.067.381 dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Based on economic data and macroeconomic assumptions for 2025, as well as references from the Draft State Budget (RAPBN) 2025 and the Draft Regional Development Plan (RKPD) 2025 of DKI Jakarta, the Company has taken the following factors into consideration:

- Indonesia's economic growth is projected at 5.2%, while Jakarta's economic growth is estimated at 5.1%-5.5%.
- Indonesia's inflation rate is expected to be 2.5% by the end of 2025, while Jakarta's regional inflation rate is forecasted at $2.5\% \pm 1.0\%$.
- The exchange rate of the Rupiah is projected at IDR 16,100 per US dollar.
- The 10-year government bond interest rate (SBN) is estimated at 7.1%.
- Oil lifting is targeted at 600,000 barrels per day.
- The Provincial Minimum Wage (UMP) of DKI Jakarta for 2025 remains at IDR5,067,381, as stipulated in Governor Decree No. 818 of 2023 regarding the 2024 Provincial Minimum Wage.

Pertumbuhan ekonomi global dan domestik terus mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian penting. Pada tahun 2025, tren ekonomi global diprediksi masih mengalami ketidakpastian karena tingginya inflasi, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju serta ketegangan geopolitik yang belum selesai, khususnya konflik antara negara-negara besar seperti Rusia, dan Ukraina serta di negara Timur Tengah. IMF memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang terjadi sejak 2023 akan terus berlanjut, dan angka pertumbuhan global di tahun 2025 diprediksi akan berada pada kisaran 3,1% (IMF 2024).

Global and domestic economic growth continues to undergo significant shifts due to major geopolitical events. In 2025, the global economy is predicted to remain uncertain, influenced by high inflation, changes in monetary policies in developed countries, and ongoing geopolitical tensions, particularly conflicts involving major nations such as Russia and Ukraine, as well as unrest in the Middle East. The IMF (2024) forecasts that the global economic slowdown that began in 2023 will persist, with global growth estimated to be around 3.1% in 2025.



Kondisi ini memberikan dampak signifikan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang harus menghadapi tantangan ekonomi global dan tetap berusaha menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, perubahan iklim dan tantangan tenaga kerja juga menjadi perhatian penting yang akan memengaruhi kebijakan ekonomi dan bisnis ke depan. Untuk tahun 2025, Perseroan juga telah memiliki asumsi kinerja operasional terutama mengenai *ridership* dan tarif layanan terintegrasi. Asumsi *ridership* Perseroan di tahun 2025 adalah 3.300 pelanggan per hari atau naik 7% dibandingkan target pelanggan per hari di tahun 2024, dengan tarif layanan terintegrasi pada angka Rp5.000 per perjalanan.

Di tahun 2025 nanti, Perseroan juga akan tetap menjalankan rencana pengembangan jaringan LRT Jakarta yang telah dimulai sejak Oktober 2023 dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2026. Di tahun 2025 nanti, Perseroan juga memulai inisiatif program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang diharapkan dapat turut meningkatkan kinerja operasional. Langkah SDG's yang diinisiasi Perseroan untuk tahun 2025 diantaranya focus pada keselamatan pelanggan dan kualitas layanan, pengembangan talenta dan keterlibatan inklusif karyawan, ekspansi jaringan dan ekspansi operasional, diversifikasi pendapatan, dan penerapan praktik berkelanjutan.

These conditions have a significant impact on developing countries, including Indonesia, which must navigate global economic challenges while maintaining domestic economic stability. Additionally, climate change and labor issues remain critical factors that will shape future economic and business policies. For the year of 2025, the Company has set operational performance assumptions, particularly regarding ridership and integrated service fares. The projected ridership for 2025 is 3,300 customers per day, a 7% increase from the 2024 daily target, with an integrated service fare of IDR5,000 per trip.

In 2025, the Company will continue the LRT Jakarta network expansion project, which began in October 2023 and is expected to be completed by the end of 2026. Additionally, the Company will launch initiatives aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) to enhance operational performance. The SDG initiatives planned for 2025 include a focus on customers safety and service quality, talent development and inclusive employee engagement, network and operational expansion, revenue diversification, and the implementation of sustainable business practices.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date

Hingga ditandatanganinya Laporan Keuangan Tahunan LRT Jakarta pada 28 Februari 2025, tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang berpengaruh signifikan terhadap laporan Keuangan Perseroan.

As of the signing of LRT Jakarta's Annual Financial Statements on 28th February 2025, there were no significant events or occurrences that had a material impact on the Company's financial statements.





05

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support Function

Target utama penyelenggaraan usaha LRT Jakarta adalah pemenuhan *Service & Operation Excellence* sebagaimana mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

The main target of the Jakarta LRT business is to realize *Service & Operation Excellence* as mandated by the Provincial Government of DKI Jakarta requiring us to provide optimum service to the communities.







Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Human Resources Governance

Perseroan menilai Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Human Capital* (HC) sebagai salah satu *stakeholders* yang memiliki peran penting untuk mendorong kemajuan Perseroan secara berkelanjutan. LRT Jakarta menempatkan SDM sebagai mitra strategis bagi Perseroan yang bersama-sama menjadi bagian dari kesuksesan yang diraih Perseroan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, serta mewujudkan target bisnis yang telah ditetapkan.

Pengembangan bisnis Perseroan selalu melibatkan SDM yang andal, unggul, serta kompeten di bidangnya. Untuk itu, Perseroan meningkatkan peran Manajemen SDM untuk membentuk karyawan yang memiliki kapabilitas yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan SDM yang mumpuni ini diyakini akan mendukung kemajuan Perseroan dan memampukannya untuk menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

The Company considers Human Resources (HR) or Human Capital (HC) as one of the stakeholders that has an important role in encouraging the Company's sustainable development. LRT Jakarta positions HR as a strategic partner for the Company, who collectively contribute to the Company's success in every line of business and the achievement of its business targets.

The Company's business development always relies on reliable, outstanding, and competent human resources in their fields. Therefore, the Company enhances the role of Human Resources Management to develop employees who have excellent capabilities in carrying out their duties and responsibilities. These competent human resources are expected to support the Company's progress and enable it to overcome various challenges in this competitive era.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY

Keberadaan SDM yang tangguh dan unggul berperan penting untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan di masa datang. Perseroan telah merancang kebijakan pengelolaan SDM yang memastikan efektivitas penerapan strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek terkait manajemen SDM di antaranya terkait strategi pengelolaan SDM, evaluasi jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan dan pelatihan karyawan, kompensasi, pengelolaan *talent*, sistem manajemen kinerja karyawan, serta aturan mengenai pemberhentian karyawan.

The availability of strong and outstanding human resources is vital to realizing the Company's vision and mission in the future. The Company has designed an HR management policy that ensures the effective implementation of its HR management strategies. The policy regulates various aspects of HR management, including HR management strategies, job evaluations, workforce planning, recruitment, employee development and training, compensation, talent management, employee performance management systems, and provisions regarding employee dismissal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM TAHUN 2024

IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY IN 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah merancang rencana kerja SDM untuk tahun 2024 dengan implementasi sebagai berikut:

In 2024, the Company has designed an HR work plan for 2024 which has been implemented as follows:

Rencana Program Program Plan	Realisasi Pada Tahun Buku Realization in the Financial Year
Sistem Manajemen Karier (<i>Career Management System</i>) untuk mengidentifikasi area pengembangan individu dan memberikan arahan bagi pertumbuhan individu berdasarkan hasil evaluasi. Career Management System to identify areas of individual development and provide direction for individual growth based on the evaluation results.	Perusahaan telah mengimplementasikan sistem ini dengan cermat dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami manfaatnya. The Company has implemented this system carefully and ensured that all members of the organization understand its benefits.

Rencana Program Program Plan	Realisasi Pada Tahun Buku Realization in the Financial Year
Penyediaan ruang kerja yang nyaman dan ergonomis bagi karyawan. Provision of comfortable and ergonomic workspaces for employees.	Perusahaan telah menyediakan ruang kerja dengan desain yang nyaman, pencahayaan optimal, ruang istirahat memperhatikan unsur ergonomis untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. The Company has provided workspaces with a comfortable design, optimal lighting, and rest areas that incorporate ergonomic elements in order to support employee productivity and well-being.
Implementasi <i>Roadmap Knowledge Management</i> dengan mengoptimalkan <i>Learning Management System</i>. Dengan menggunakan <i>Knowledge Management (KM)</i> sebagai pendekatannya, Perseroan dapat mendistribusikan pengetahuan guna meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif Perseroan. Implementation of <i>Roadmap Knowledge Management</i> by optimizing <i>Learning Management System</i>. By using <i>Knowledge Management (KM)</i> as an approach, the Company is able to distribute knowledge in order to enhance the Company's efficiency, innovations, and competitive advantages.	Perusahaan telah membuat <i>roadmap</i> aktivitas KM selama 4 tahun mulai dari tahun 2023-2027 dengan program lanjutan yang dilakukan dimulai tahun 2023 terkait analisis dan identifikasi KM dengan program lanjutan pada tahun 2024 yaitu pencarian dan pengidentifikasian <i>Knowledge Asset</i> pada Sebagian lingkup O&M yang akan dilanjutkan pada tahun 2025 selain aktivitas pengelolaan SME dalam mendukung peningkatan kompetensi pengetahuan baru dalam mendukung efektivitas & produktivitas perusahaan. The Company has created a KM activity roadmap for 4 years starting from 2023-2027 with an extended program related to KM analysis starting in 2023 and an extended program related to KM identification in 2024, specifically the search and identification of Knowledge Assets in some O&M scopes, which will continue in 2025 along with SME management activities in support of increasing new knowledge competencies to support the Company's effectiveness & productivity.
Program pelatihan dan pengembangan insan LRTJ Training and development program of LRTJ personnel	Program pengembangan dan pelatihan LRTJ secara besaran dibagi menjadi dua jenis kategori pelatihan yaitu <i>Hardskill</i> maupun <i>Softskill</i> dalam meningkatkan kemampuan seluruh karyawan bukan hanya pengetahuan bidang perkoreataapian <i>focus</i> pada O&M, sistem manajemen risiko, K3, ataupun SMKP saja namun juga peningkatan <i>softskill</i> dan kemampuan <i>leadership</i> di semua level. Tentunya penerapan konsep <i>Learning Agility</i> yang telah dimulai pada tahun 2023 hingga sekarang menjadi warna tersendiri pada pola pembelajaran secara efektif mulai dari pembelajaran secara mandiri dengan difasilitasi <i>e-learning/LMS</i>, kepedulian peningkatan pengetahuan kepada seluruh karyawan dengan aktivitas <i>sharing knowledge</i> baik secara <i>offline</i>, <i>online</i> ataupun pembuatan artikel yang bisa di akses oleh seluruh karyawan dalam meningkatkan kemampuan. The LRTJ development and training program is broadly divided into two types of training categories, which are Hard skill and Soft skill, with the aim of improving the capabilities of all employees. Not only focusing on O&M, risk management systems, OHS, or SMKP, but also improving soft skills and leadership abilities at all levels. The application of the Learning Agility concept, which began in 2023, has certainly become a distinctive feature of effective learning patterns, from independent learning facilitated by e-learning/LMS, to the concern for increasing knowledge among all employees through knowledge sharing activities, whether offline, online, or the creation of articles that can be accessed by all employees to improve their abilities.
Program Kaderisasi sebagai proses pembentukan dan pengembangan kader dalam suatu organisasi atau kelompok. Caderization program as a process to establish and develop cadres in an organization or group	Perencanaan program kaderisasi sudah dilakukan dengan menganalisa melalui <i>assessment</i> yang dilakukan kepada seluruh karyawan baik <i>individual contributor</i> ataupun <i>leaders</i> dengan hasil yang didapat untuk bisa ditemukan gap agar dapat dikembangkan melalui program <i>Individual Development Plan (IDP)</i> yang akan berjalan di tahun 2025. Pada tahun 2024, program dalam mendukung kaderisasi yang telah dilakukan yaitu program LMDP (<i>Leadership Management Development Program</i>) yang dibagi di setiap level yang ada dengan dibagi menjadi 4 besaran sub program yaitu <i>Senior Management Development Program (SMDP)</i> untuk level Kepala Divisi, <i>Middle Management Development Program (MMDP)</i> diwajibkan untuk level Kepala <i>Departement</i>, <i>Firstline Management Development Program (FMDP)</i> untuk level Kepala Seksi dan BMDP (<i>Basic Management Development Program</i>) untuk level <i>Staff-Officer</i> dan program ini adalah program berjenjang bersifat mandatory sebelum kaderisasi dilakukan. The caderization program planning has been carried out by analyzing the assessment carried out on all employees, both individual contributors and leaders, as well as the assessment results to find gaps to be developed through the Individual Development Plan (IDP) program which will be implemented in 2025. In 2024, the caderization support program has been through LMDP (Leadership Management Development Program), which is divided at each level into 4 sub-programs, including Senior Management Development Program (SMDP) for Division Heads, Middle Management Development Program (MMDP) which is required for the Head of Department level, Firstline Management Development Program (FMDP) for the Head of Section level, and Basic Management Development Program (BMDP) for the Staff-Officer level, and this program is a mandatory tiered program prior to the caderization.



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan SDM, Perseroan merancang program pelatihan dan pengelolaan kompetensi karyawan guna mengembangkan potensi, bakat, minat dan karakter individu. Pelatihan ini penting diadakan agar SDM yang ada senantiasa siap untuk menunjang pengembangan bisnis Perseroan. Pada tahun 2024, komposisi pelatihan masih didominasi oleh pelatihan *softskill* yang mencapai 8% terhadap pelatihan *hardskill* 92%.

As part of its HR management policy, the Company designs training and employee competency management programs to develop the potential, talents, interests and character of individuals. These training programs are vital to ensure that existing HR are always ready to support the Company's business development. In 2024, the training composition is still dominated by soft skills training, which accounts for 8%, compared to 92% for hard skills training.

STRATEGI DAN PELAKSANAAN PROGRAM REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGY AND IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES RECRUITMENT PROGRAM

Perusahaan memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk membangun kariernya hingga dapat menempati posisi senior dan strategis sesuai dengan talenta dan pengalaman di bidang masing-masing. Pada tahun 2024, Perseroan telah merekrut sebanyak 36 karyawan baru dengan rincian sebagai berikut:

The Company provides opportunities for every employee to build their careers so that they can occupy senior and strategic positions in accordance with their talents and experience in their respective fields. In 2024, the Company has recruited 36 new employees with the following details:

Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2024 Employee Recruitment Trends in 2024

Bulan Month	Jumlah (orang) Total (people)
Januari/January	1
Februari/February	2
Maret/March	-
April/April	3
Mei/May	2
Juni/June	3
Juli/July	14
Agustus/August	2
September/September	2
Oktober/October	3
November/November	3
Desember/December	1
Total/Total	36

TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN (TURNOVER) EMPLOYEE TURNOVER RATE

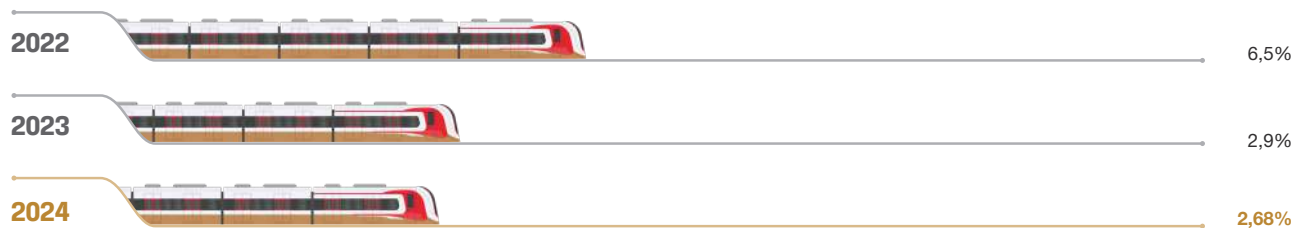
Salah satu indikator keberhasilan Perseroan dalam pengelolaan karyawan tercermin pada tingkat perputaran karyawan (*turnover*). Tingkat *turnover* juga dapat menjadi salah satu wujud refleksi dan budaya dalam sistem kerja yang diterapkan di lingkungan PT LRT Jakarta. Perseroan senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. Upaya ini berkontribusi pada tingkat *turnover* karyawan yang tercatat sebesar 2,68% di tahun 2024 dibandingkan 2,99% di tahun 2024.

One of the indicators of the Company's success in employee management is the employee turnover ratio. The ratio is also a form of reflection and culture of work systems implemented in PT LRT Jakarta. The Company always strives to create a conducive, safe, and comfortable environment for all employees. This effort contributes to the employee turnover ratio which was recorded at 2.68% in 2024, compared to 2.99% in 2024.

Penyebab Cause	2024	2023	2022
Pensiun Retire	0	1	0
Meninggal Dunia Death	0	0	0
Mengundurkan Diri atas Permintaan Sendiri Resignation	7	8	17
Diberhentikan Termination	1	1	4
Jumlah Karyawan yang Keluar Number of employees leaving the Company	8	10	21
Total Karyawan di Akhir Tahun Total Number of Employees at the End of Year	299	274	262
Persentase <i>Turnover</i> Turnover percentage	2,68%	2,9%	6,5%

Grafik Tingkat *Turnover* Karyawan 3 Tahun Terakhir
Chart of Employee Turnover Ratio in the Last 3 Years

2022-2024



PENGEMBANGAN KARIER CAREER DEVELOPMENT

Untuk memperkuat kapabilitas dari SDM yang ada, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan karier yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi tiap masing-masing karyawan. Program pengembangan karier dilakukan melalui berbagai tahapan untuk memastikan karyawan ditempatkan pada posisi jabatan yang tepat sesuai antara kompetensi yang dimiliki individu dengan profil kompetensi pekerjaan yang diisyaratkan oleh pekerjaan.

Perseroan juga melakukan penilaian kinerja karyawan dan melakukan pencatatan atas pencapaian kinerja dari setiap karyawan. Penilaian kinerja karyawan disertai dengan proses *Coaching and Mentoring*. Sistem penilaian kinerja tersebut ditujukan untuk memotivasi para karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Hasil penilaian kinerja juga menjadi acuan untuk penetapan *reward* dan *punishment*, penentuan *talent* kategori, *upgrading*, dan promosi jabatan.

In order to strengthen the capabilities of existing human resources, the Company provides opportunities for each individual to develop a career based on their interests, talents, and competencies. The career development program is carried out through various stages to ensure that employees are placed in the right position according to the competencies of the individual and the job competency profile required for the job.

The Company also conducts employee performance assessments and records the performance achievements of each employee. The employee performance assessment is followed by a coaching and mentoring process. The performance assessment system is intended to motivate employees to always improve their performance and productivity. The results of the performance assessment are also used as a reference for determining rewards and punishments, identifying talent categories, upgrading, and job promotions.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN REALISASI BIAYA

COMPETENCY DEVELOPMENT AND COST REALIZATION

Program pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan dan diikuti oleh karyawan LRT Jakarta setiap tahun dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Komitmen Perseroan untuk meningkatkan kompetensi SDM tercermin dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan berikut ini:

Training and/or education programs organized and participated in by LRT Jakarta's employees are held annually, both internally and externally. The Company's commitment to improving human resources competency is reflected in the following education and training programs:

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2024

Implementation of Employee Competency Development in 2024

Keterampilan Skills	Nama Training/Diklat Name of Training/Education	Jenis Pelaksanaan Type of Implementation	Metode Pelaksanaan Methods Implementation	Waktu Mulai Starting Time	Waktu Selesai Time Completed	Durasi Pelaksanaan Duration of Implementation (Hari/Day)	Jumlah Realisasi Peserta Number of Participants Realization (Orang/People)
Hard Skill	Basic First Aid & CPR	In House	Offline	13 Februari/ February 2024	13 Februari/ February 2024	1	25
Hard Skill	Diklat Pelatihan & Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL) Training & Certification of Certified Risk Executive Leader (CREL)	Public Class	Hybrid	25 Maret/ March 2024	14 Mei/May 2024	51	5
Hard Skill	Corporate Investigator Profesional	Public Class	Offline	21 April 2024	26 April 2024	6	1
Hard Skill	Refreshment & Sertifikasi Perpanjangan Industrial Relation Manager Refreshment & Extended Certification of Industrial Relation Manager	Public Class	Offline	29 April 2024	17 Mei/May 2024	19	1
Hard Skill	Membedah Aspek Hukum Penyusunan Joint Venture dalam Perkembangan Hukum & Bisnis Analyzing the Legal Aspects of Joint Venture Establishment in Legal & Business Development	Public Class	Hybrid	30 April 2024	30 April 2024	1	2
Hard Skill	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Public Class	Offline	06 Mei/May 2024	13 Mei/May 2024	8	1
Hard Skill	Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Auditor of Security Management System	Public Class	Offline	15 Mei/May 2024	22 Mei/May 2024	8	1
Hard Skill	Bejana Tekan & Tangki Timbun Pressure Vessels & Storage Tanks	Public Class	Hybrid	27 Mei/May 2024	08 June 2024	13	1
Hard Skill	The Strategic Role of Internal Communication	Public Class	Offline	15 Mei/May 2024	16 Mei/May 2024	2	1
Hard Skill	Design Thinking for Business Innovation	In House	Offline	06 Juni/June 2024	07 Juni/June 2024	2	37
Hard Skill	Penyegaran Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian Tahun 2024 Refreshment of Railway Crew Certification in 2024	In House	Hybrid	10 Juni/June 2024	12 Juni/June 2024	3	7
Hard Skill	Ahli Muda Manajemen Konstruksi Young Expert of Construction Management	Public Class	Hybrid	12 Juni/June 2024	13 Juni/June 2024	2	1
Hard Skill	Ahli Madya Manajemen Konstruksi Associate Expert of Construction Management	Public Class	Hybrid	12 Juni/June 2024	13 Juni/June 2024	2	1

Keterampilan Skills	Nama Training/Diklat Name of Training/Education	Jenis Pelaksanaan Type of Implementation	Metode Pelaksanaan Methods Implementation	Waktu Mulai Starting Time	Waktu Selesai Time Completed	Durasi Pelaksanaan Duration of Implementation (Hari/Day)	Jumlah Realisasi Peserta Number of Participants Realization (Orang/People)
Hard Skill	Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) First Aid Officer	Public Class	Offline	12 Juni/June 2024	14 Juni/June 2024	3	1
Hard Skill	Certified in Financial Risk Management	Public Class	Online	13 Juni/June 2024	14 Juni/June 2024	2	1
Soft Skill	Leading With Happiness	Public Class	Offline	19 Juni/June 2024	20 Juni/June 2024	2	2
Hard Skill	Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Pelaksana Lanjutan Qualified Internal Audit (QIA) Advanced Executive Level	Public Class	Offline	24 Juni/June 2024	06 Juli/July 2024	13	3
Hard Skill	Continuous Improvement Using PDCA (8 Langkah) & 7 QC Tools	In House	Offline	25 Juni/June 2024	26 Juni/June 2024	2	41
Hard Skill	Konferensi Internal Audit Internal Audit Conference	Public Class	Offline	10 Juli/July 2024	11 Juli/July 2024	2	4
Hard Skill	Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset	Public Class	Offline	10 Juli/July 2024	11 Juli/July 2024	2	4
Hard Skill	Penanggulangan Kebakaran (Tingkat B) Fire Fighting (Level B)	Public Class	Offline	15 Juli/July 2024	20 Juli/July 2024	6	1
Hard Skill	Confined Space/Ruang Terbatas	Public Class	Hybrid	29 Juli/July 2024	02 Agustus/ August 2024	5	2
Hard Skill	Teknisi Perancah Scaffolding Technician	Public Class	Hybrid	30 Juli/July 2024	02 Agustus/ August 2024	4	3
Hard Skill	Certified Governance Professional	Public Class	Online	30 Juli/July 2024	02 Agustus/ August 2024	4	1
Hard Skill	Certified Warehouse Manager (CMW)	Public Class	Hybrid	19 Agustus/ August 2024	28 Agustus/ August 2024	10	1
Hard Skill	Risk & Control Self Assessment (RCSA)	In House	Offline	14 Agustus/ August 2024	14 Agustus/ August 2024	1	29
Soft Skill	How CHROs Can Shape Organisational and Workforce Transformation	Public Class	Offline	14 Agustus/ August 2024	14 Agustus/ August 2024	1	2
Soft Skill	Firstline Management Development Program - Business Performance & Productivity Clas	In House	Offline	22 Agustus/ August 2024	23 Agustus/ August 2024	2	52
Soft Skill	GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	Public Class	Offline	22 Agustus/ August 2024	23 Agustus/ August 2024	2	4
Hard Skill	Orientasi Perkeretaapian Railway Orientation	In House	Hybrid	26 Agustus/ August 2024	02 September 2024	8	14
Hard Skill	Gada Utama	Public Class	Offline	01 September 2024	06 September 2024	6	2
Hard Skill	Pembentukan Kompetensi SDM Perkeretaapian Bidang Awak Sarana Perkeretaapain Establishment of Railway HR Competency in Railway Crews and Facilities	In House	Hybrid	03 September 2024	25 Oktober/ October 2024	53	8
Hard Skill	Pembentukan Kompetensi SDM Perkeretaapian Bidang Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Establishment of Railway HR Competency in Railway Travel Management (PPKA) Sector	In House	Hybrid	03 September 2024	31 Oktober/ October 2024	59	4
Hard Skill	Dasar-Dasar Perkeretaapian Bidang Prasarana Railway Fundamentals in Infrastructure Sector	In House	Hybrid	03 September 2024	10 September 2024	8	3



Keterampilan Skills	Nama Training/Diklat Name of Training/Education	Jenis Pelaksanaan Type of Implementation	Metode Pelaksanaan Methods Implementation	Waktu Mulai Starting Time	Waktu Selesai Time Completed	Durasi Pelaksanaan Duration of Implementation (Hari/Day)	Jumlah Realisasi Peserta Number of Participants Realization (Orang/People)
Hard Skill	Information Technology Infrastructure Library 4 Foundation	Public Class	Offline	10 September 2024	11 September 2024	2	1
Soft Skill	Basic Management Development Program (BMDP)	In House	Offline	17 September 2024	18 September 2024	2	56
Hard Skill	Pemeriksa Prasarana Bidang Fasilitas Operasi Infrastructure Auditor in Operation Facilities Sector	In House	Hybrid	17 September 2024	24 September 2024	8	3
Hard Skill	Supervisi Perancah Scaffolding Supervision	Public Class	Hybrid	24 September 2024	28 September 2024	5	1
Hard Skill	Pelayanan Ragam Disabilitas Services for People with Disabilities	In House	Offline	27 September 2024	27 September 2024	1	20
Hard Skill	Perpanjangan Training of Trainer Perpanjangan Training of Trainer	In House	Offline	03 Oktober/ October 2024	04 Oktober/ October 2024	2	10
Hard Skill	Services Excellence Advanced Level	In House	Offline	14 Oktober/ October 2024	15 Oktober/ October 2024	2	17
Hard Skill	Certified & Accreditation Public Relation Competency	Public Class	Hybrid	23 Oktober/ October 2024	27 Oktober/ October 2024	5	2
Hard Skill	Pelatihan/Training Engineering Development Program: Electrical Fundamental	In House	Offline	30 September 2024	04 Oktober/ October 2024	5	13
Hard Skill	Pelatihan/Training Engineering Development Program: Basic Electronic	In House	Offline	07 Oktober/ October 2024	11 Oktober/ October 2024	5	13
Hard Skill	Perawat Prasarana Bidang Fasilitas Operasi Infrastructure Nurse in Operation Facilities	In House	Hybrid	03 Oktober/ October 2024	17 Oktober/ October 2024	15	3
Hard Skill	Perpanjangan Training of Trainer Extension to Training of Trainer	In House	Offline	03 Oktober/ October 2024	04 Oktober/ October 2024	2	10
Hard Skill	Training of Trainer	Public Class	Offline	21 Oktober/ October 2024	23 Oktober/ October 2024	3	3
Hard Skill	ISO 9001:2015 Quality Management Systems Auditor/ Lead Auditor Training Course	Public Class	Online	28 Oktober/ October 2024	01 November 2024	5	1
Hard Skill	Dasar Jalur dan Bangunan Perkeretaapian Railway Track and Building Foundation	In House	Hybrid	28 Oktober/ October 2024	12 November 2024	16	5
Hard Skill	Dasar Sarana Perkeretaapian Railway Facilities Foundation	In House	Hybrid	12 November 2024	21 November 2024	10	3
Hard Skill	Pemeriksa Jalur dan Bangunan Perkeretaapian Inspector of Railway Tracks and Buildings	In House	Hybrid	13 November 2024	21 November 2024	9	6
Hard Skill	Penyegaran Sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Recertification of Railway Travel Management Certification (PPKA)	In House	Hybrid	13 November 2024	15 November 2024	3	9
Hard Skill	Basic Financial Modelling	Public Class	Online	16 November 2024	30 November 2024	15	13
Hard Skill	PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) PPPA (Person in Charge of Water Pollution Control)	Public Class	Online	18 November 2024	21 November 2024	4	1

Keterampilan Skills	Nama Training/Diklat Name of Training/Education	Jenis Pelaksanaan Type of Implementation	Metode Pelaksanaan Methods Implementation	Waktu Mulai Starting Time	Waktu Selesai Time Completed	Durasi Pelaksanaan Duration of Implementation (Hari/Day)	Jumlah Realisasi Peserta Number of Participants Realization (Orang/People)
Hard Skill	POPAL (Penanggungjawab Operasi Pengelolaan Air Limbah) POPAL (Person in Charge of Wastewater Management Operations)	Public Class	Online	20 November 2024	21 November 2024	2	1
Hard Skill	Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Railway Facilities Inspector	In House	Hybrid	22 November 2024	28 November 2024	7	3
Hard Skill	Perawat Jalur dan Bangunan Kereta Api - Stasiun dan Bangunan Kereta Api Railway Track and Building Attendant - Railway Stations and Buildings	In House	Hybrid	22 November 2024	05 Desember/ December 2024	14	3
Hard Skill	Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Calculation of Green House Gas (GHG) Emissions	Public Class	Online	25 November 2024	02 Desember/ December 2024	8	3
Hard Skill	Perawat Sarana Perkeretaapian Railway Facilities Inspector	In House	Hybrid	29 November 2024	10 Desember/ December 2024	12	3
Hard Skill	Overseas Training - Static Inverter (SIV) & Propulsion Inverter Maintenance with VVVF Technology	In House	Offline	05 Desember/ December 2024	18 Desember/ December 2024	14	7
Hard Skill	Perawat Jalur dan Bangunan Kereta Api - Jalur KA Perawat Jalur dan Bangunan Kereta Api - Jalur KA	In House	Hybrid	06 Desember/ December 2024	18 Desember/ December 2024	13	3
Hard Skill	Environment Resources Management - Qualified Risk Management Officer	Public Class	Online	09 Desember/ December 2024	13 Desember/ December 2024	5	1
Hard Skill	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference on Risk Management (Sustainability for Organizational Resilience & Competitive Advantage)	Public Class	Offline	12 Desember/ December 2024	13 Desember/ December 2024	2	6
Hard Skill	First Aid & Basic Life Support Training	In House	Offline	13 Desember/ December 2024	13 Desember/ December 2024	1	19

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2024, Perseroan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.081.919.350 dibandingkan Rp5.486.790.970 yang diberikan di tahun 2023. Berikut rincian penyerapan biaya tersebut:

To support the implementation of employee competency development in 2024, the Company has allocated a budget of IDR6,081,919,350 compared to IDR5,486,790,970 in 2023. The following are the details of the budget realization:

Keterangan Description	Satuan Unit	Jumlah Total
Biaya Pelatihan/Training Costs	Rupiah/IDR	6.081.919.350
Kegiatan Pelatihan/Pengembangan/Training/Development Activities	Kali/Time(s)	63
Durasi Pelatihan/Training Duration	Jam/Hour(s)	508
Peserta/Participants	Orang/People	495



KESEJAHTERAAN KARYAWAN EMPLOYEE WELFARE

Perseroan memiliki kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka untuk memajukan perusahaan. PT LRT Jakarta memberikan perhatian terhadap pemberian tunjangan karyawan dalam bentuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga Karyawan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun.

The Company has a policy of paying attention to the welfare of employees as a form of appreciation for their dedication to developing the Company. PT LRT Jakarta provides employee benefits in the form of BPJS Kesehatan (Health Insurance), BPJS Ketenagakerjaan (Employment Insurance), other Health Insurance for Employees and their Families, Holiday Allowances, Education Allowances and Year-End Allowances.

BIAYA TENAGA KERJA LABOR COSTS

Perseroan mencatat total biaya tenaga kerja sebesar Rp102,9 miliar pada tahun 2024 dibandingkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh LRT pada tahun 2023 sebesar Rp94,2 miliar. Biaya tenaga kerja tersebut terdiri dari gaji, beban manfaat karyawan, tunjangan, beban Pph Karyawan, Beban Tantiem & Jasa Produksi, Beban Premi Asuransi Pegawai, Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Beban diklat dan pelatihan sertifikasi, pengobatan, BPJS Kesehatan, Beban Pegawai Lainnya, Pakaian Dinas.

The Company recorded total labor costs of IDR102.9 billion in 2024 compared to labor costs incurred by LRT in 2023 of IDR94.2 billion. The labor cost consists of salaries, employee benefits, allowances, employee income tax, profit sharing and production services, employee insurance premiums, holiday allowances, social security for employees, training and certification, medical treatment, social security for health, other employee expenses, and work clothes.

Biaya Tenaga Kerja 2023-2024 Labor Costs 2023-2024

Pos Biaya Tenaga Kerja Labor Cost Posts	2024 (Rp/IDR)	2023 (Rp/IDR)	Peningkatan (Penurunan)/Increase (Decrease)	
			Nominal/Nominal (Rp)	Persentase/Percentage (%)
Gaji & Tunjangan Salary & Allowances	56.803.955.975	50.728.378.733	6.075.577.242	111,98%
Beban Manfaat Karyawan Employee Benefits Expense	4.055.455.893	3.773.023.063	282.432.830	107,49%
Tunjangan Allowances	6.580.136.863	6.031.969.537	548.167.326	109,09%
Beban PPh Karyawan Employee's Income Tax	11.107.971.483	8.946.193.320	2.161.778.163	124,16%
Beban Tantiem dan Jasa Produksi Tantiem and Production Services	1.868.638.266	4.325.871.189	(2.457.232.923)	43,20%
Beban Premi Asuransi Pegawai Employee's Insurance Premium Expenses	3.504.202.129	2.381.821.460	1.122.380.669	147,12%
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	3.776.090.978	3.147.362.889	628.728.089	119,98%
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	4.503.136.478	4.082.391.437	420.745.041	110,31%
Beban Diklat dan Pelatihan Sertifikasi Certification Training and Training Expenses	6.115.990.536	6.175.815.467	(59.824.931)	99,03%
Beban Pengobatan Health Treatment Expense	3.272.190.769	2.316.871.490	955.319.279	141,23%
BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan	1.656.558.445	1.494.471.117	162.087.328	110,85%
Pakaian Dinas Uniform	136.281.212	428.467.012	(292.185.800)	31,81%
Jumlah Total	102.959.863.986	94.253.381.755	8.706.482.231	109,24%

DEMOGRAFI KARYAWAN EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Informasi terkait hal ini sudah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Information related to this has been outlined in the Company Profile Chapter.

RENCANA KERJA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA 2025 HUMAN RESOURCES DIVISION WORK PLAN IN 2025

Agar mampu mendukung kesinambungan usahanya untuk jangka panjang, maka Perseroan telah menetapkan rencana kerja Divisi Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025, yang berfokus pada aspek-aspek berikut ini:

1. Digitalisasi

SDM akan meningkatkan kinerja HRIS di tahun 2025 yang dapat melayani fungsi seluruh elemen HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, *payroll* dan *benefit*, termasuk fungsi personalia, diharapkan seluruh prosesnya sudah terdigitalisasi secara akurat dan cepat. Sedangkan LMS (*Learning Management System*) akan diperkaya dengan modul-modul yang utama terkait teknis perkeretaapian dan metode-metode dalam melakukan inovasi.

2. Membangun Budaya Organisasi yang Fokus terhadap Pelayanan Pelanggan

Manajemen berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai perusahaan sebagai budaya perusahaan, secara bertahap proses ini sudah dijalankan di Tahun 2024, dimulai dari Sistem Pengukuran *Value* kepada seluruh karyawan, evaluasi dan perumusan indikator yang lebih komprehensif oleh Direksi, termasuk kampanye nilai-nilai perusahaan melalui artefak seperti *lift* stiker, video, poster, dan lain-lain, di Tahun 2025 akan dilakukan internalisasi secara bertahap, pertama kepada *Leaders* baru kemudian kepada seluruh Insan LRT Jakarta. Membentuk *value champion* agar ada agen nilai-nilai perusahaan untuk membantu melakukan sosialisasi dan internalisasi di seluruh lapisan level jabatan karyawan.

3. Meningkatkan Standar Perusahaan sebagai Tempat Terbaik bagi Karyawan untuk Bekerja dan berinovasi

Divisi SDM akan secara aktif mendapatkan umpan balik dari karyawan agar dapat menetapkan standar lingkungan kerja terbaik bagi insan LRT Jakarta, kemudian hasilnya diuji ke lembaga independen dan terpercaya agar mendapatkan sertifikasi sebagai perusahaan yang memiliki lingkungan dan budaya terbaik untuk berkerja.

4. Membuat Program Suksesi sebagai Peningkatan Kapabilitas Organisasi

Program suksesi dibuat dengan tujuan utama untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas organisasi di masa depan. Menyesuaikan kompetensi individual dengan RJPP LRT Jakarta melalui pengembangan talenta yang terstruktur, mengidentifikasi *high performance* dan *high potential* sebagai suksesor di masing-masing level jabatannya, Program LMDP perusahaan, dan konsistensi pengambilan keputusan untuk proses suksesi.

In order to be able to support the long-term sustainability of its business, the Company has established a Human Resources Division work plan for 2025, which focuses on the following aspects:

1. Digitalization

HR will improve the performance of HRIS in 2025 to support the functions of all HR elements, such as recruitment, training, performance appraisal, payroll and benefits. It is expected that all processes of the personnel function will be digitalized accurately and quickly. Meanwhile, the LMS (*Learning Management System*) will be supplemented with key modules related to railway technology and methods of innovation.

2. Building an Organizational Culture Focusing on Customer Service

The management is committed to transforming the Company's values into a corporate culture. This transformation has been gradually implemented since 2024, starting with a Value Measurement System for all employees, evaluation and formulation of more comprehensive indicators by the Board of Directors, including a campaign on company values through artifacts such as elevator stickers, videos, posters, and others. In 2025, a gradual internalization will be carried out, starting with new Leaders and followed by all LRT Jakarta personnel. The establishment of a value champion will ensure that there is an agent of company values to help with socialization and internalization across all levels of employee positions.

3. Improving Company Standards as the Best Place for Employees to Work and Innovate

The HR Division will actively collect feedback from employees in order to define the best standards for the working environment at LRT Jakarta. These standards will then be tested by an independent and trusted institution to obtain certification as a company with the best working environment and culture.

4. Establishing a Succession Program to Improve Organizational Capabilities

The succession program was designed with the main objective of ensuring the continuity and stability of the organization in the future. The Company aligns individual competencies with the Jakarta LRT RJPP through structured talent development, the identification of high performers and high potentials as successors at each level of the position, the LMDP program, and consistency in decision-making for the succession process.



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja, Sistem Teknologi Informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis Perseroan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan TI dalam penyediaan produk dan jasa, Perseroan melakukan penyalarsan strategi pengembangan TI dengan strategi bisnisnya. Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) ditunjuk untuk merumuskan serta menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat, memastikan kelancaran proses bisnis, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Tata Kelola TI ini juga menjadi bagian dari Tata Kelola Perusahaan agar pengadopsian teknologi informasi terkini dapat menghasilkan dampak yang terukur dan terakhir.

In order to improve the effectiveness and productivity of performance, the Information Technology (IT) System has a vital role in the Company's business continuity. To maximize the utilization of IT in the provision of products and services, the Company aligns its IT development strategy with its business strategy. The Information Technology Division (IT Division) is appointed to formulate and implement Information and Communication Technology Governance to support sound decision making, ensure smooth business processes, and increase the Company's competitiveness. Since IT Governance is also part of Corporate Governance, the adoption of the latest information technology can produce measurable and targeted impacts.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI TI

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE IT DIVISION

Divisi TI Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemajuan pada aspek operasional dan strategis Perseroan dengan fokus pada pengembangan teknologi yang inovatif untuk mencapai efisiensi operasional. Lingkup tugas Divisi TI di antaranya adalah:

1. Manajemen Sistem Informasi

Divisi Teknologi Informasi bertugas mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi Perusahaan, termasuk jaringan, sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan membangun fondasi yang kokoh bagi pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan, Divisi TI memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan akan mampu mendorong kelancaran dan efisiensi pada proses bisnis.

2. Keamanan Data dan Informasi

Sebagai perusahaan jasa, maka perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi Perusahaan merupakan hal mutlak dalam pelaksanaan tugas Divisi TI. Didukung oleh penerapan kebijakan keamanan data dan informasi yang ketat, pengelolaan akses pengguna, dan pelaksanaan tindakan pencegahan keamanan yang proaktif, Divisi TI harus dapat memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia dan sensitif bagi Perseroan senantiasa terlindungi dari ancaman siber yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

3. Pengembangan Aplikasi dan Solusi TI

Divisi TI mendorong pengembangan sistem TI secara berkesinambungan. Divisi TI dalam hal ini terlibat secara langsung dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan solusi teknologi informasi yang mendukung kinerja berbagai aspek bisnis Perseroan agar dapat mengukur dan memahami kebutuhan pengembangan bisnis Perseroan. Divisi

The Company's IT Division has the responsibility to spearhead the Company's operational and strategic progress by focusing on the development of innovative technology to achieve operational efficiency. The scope of duties of the IT Division includes:

1. Information System Management

The Information Technology Division is responsible for managing and maintaining the Company's technology infrastructure, including networks, hardware and software systems. By building a solid foundation for the sustainable development of information technology, the IT Division ensures that the management of information technology within the Company will be able to drive smooth and efficient business processes.

2. Data and Information Security

As a service company, the confidentiality of the Company's data and information is an absolute requirement in the IT Division's duties. Supported by the implementation of strict data and information security policies, user access management, and proactive security precautions, the IT Division must be able to ensure that confidential and sensitive information is protected from cyber threats from both internal and external parties.

3. Development of IT Applications and Solutions

The IT Division continuously encourages the development of IT systems. In this case, the IT Division is directly involved in the development and maintenance of information technology applications and solutions that support the performance of various aspects of the Company's business in order to measure and comprehend the Company's business

Teknologi Informasi merancang dan mengimplementasikan solusi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pengalaman pengguna.

4. Dukungan Teknis

Divisi TI memberikan layanan bantuan teknis yang *responsive* dan pelatihan yang efektif sebagai bentuk dukungan kepada pengguna internal Perseroan. Divisi TI memastikan dukungan TI yang andal dan optimal untuk memfasilitasi kelancaran akses bagi pengguna internal.

5. Manajemen Proyek TI

Divisi TI berperan secara signifikan dalam pengelolaan proyek-proyek TI Perusahaan. Melalui penerapan praktik manajemen proyek terbaik, Divisi TI memastikan bahwa proyek-proyek TI tersebut dapat terselesaikan secara tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat spesifikasi.

6. Analisis Data dan Intelijen Bisnis

Divisi Teknologi Informasi melakukan analisis terhadap tren bisnis serta pola-pola yang mendasarinya guna memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di level manajemen, terutama dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang-peluang strategis.

7. Pembaruan Teknologi dan Inovasi

Divisi TI melakukan analisa dan pemantauan terhadap perkembangan teknologi terbaru agar dapat diperoleh gambaran yang mendukung upaya peningkatan infrastruktur dan sistem teknologi informasi Perseroan. Melalui pengadopsian teknologi terkini serta inovatif, Perseroan akan mampu beradaptasi terhadap dinamika bisnis dan menjaga daya saingnya di pasar.

8. Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko TI

Melalui kerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko, Divisi TI memastikan pengelolaan sistem dan kebijakan pengembangan teknologi informasi telah selaras dengan regulasi dan standar industri yang berlaku. Selain itu, Divisi TI juga berperan dalam mengelola risiko teknologi dan melaksanakan audit teknologi informasi secara teratur untuk meningkatkan kepatuhan Perseroan.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

Perseroan telah mengembangkan Kebijakan Teknologi Informasi yang komprehensif sebagai pedoman dan kerangka kerja bagi Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan Teknologi Informasi yang berlaku di Perseroan mencakup serangkaian aturan prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan asset teknologi informasi Perseroan.

Berikut sejumlah aspek utama yang diatur dalam kebijakan teknologi informasi Perseroan:

1. Keamanan Informasi

Kebijakan keamanan informasi menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data sensitif dan

development needs. The Information Technology Division designs and implements innovative solutions to improve productivity, efficiency, and user experience.

4. Technical Support

The IT Division provides responsive technical assistance and effective training as a form of support to the Company's internal users. The IT Division ensures reliable and optimal IT support to facilitate seamless access for internal users.

5. IT Project Management

The IT Division has a significant role in the management of the Company's IT projects. Through the implementation of best project management practices, the IT Division ensures that IT projects can be completed on time, on budget, and according to specifications.

6. Data Analysis and Business Intelligence

The Information Technology Division analyzes business trends and their underlying patterns to provide input for decision making by the management, especially in identifying and optimizing strategic opportunities.

7. Technology Update and Innovation

The IT Division analyzes and monitors the latest technological developments in order to obtain an overview that supports efforts to improve the Company's information technology infrastructure and systems. By adopting the latest and most innovative technologies, the Company will be able to adapt to business dynamics and maintain its competitiveness in the market.

8. IT Compliance and Risk Management

Through collaboration with the Risk Management Department, the IT Division ensures that the management of information technology development systems and policies is in line with applicable regulations and industrial standards. In addition, the IT Division also plays a role in managing technology risk and conducting regular information technology audits to improve the Company's compliance.

The Company has developed a comprehensive Information Technology Policy as a guideline and framework for the Information Technology Division in carrying out its duties and responsibilities. The Company's Information Technology Policy covers a series of procedures and guidelines designed to regulate the use, management, and protection of the Company's information technology assets.

The following are some of the main aspects regulated in the Company's information technology policy:

1. Information Security

The information security policy determines the steps needed to protect the Company's sensitive data and information



informasi Perseroan dari potensi ancaman siber. Termasuk dalam kegiatan yang dilakukan adalah penggunaan enkripsi, pengaturan hak akses, pemantauan aktivitas pengguna, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko potensial bagi perusahaan.

2. Pengelolaan Risiko TI

Kebijakan ini mengatur kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Divisi TI bertanggung jawab untuk melaksanakan analisis risiko secara teratur dan mengambil langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko potensial bagi Perseroan.

3. Kepatuhan Regulasi

Kebijakan ini memuat kewajiban Perseroan untuk senantiasa mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku terkait dengan penggunaan dan perlindungan data. Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa sistem dan proses teknologi informasi yang berjalan di Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan regulasi yang relevan dengan bidang usahanya.

4. Pengelolaan Aset Teknologi

Kebijakan ini mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset teknologi informasi Perseroan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Pengelolaan Aset Teknologi termasuk juga prosedur untuk menyelenggarakan pengadaan dan penggantian aset teknologi, serta kebijakan terkait pemulihan bencana.

5. Kontinuitas Bisnis

Kebijakan kontinuitas bisnis mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional Perseroan di saat menghadapi situasi darurat atau bencana. Divisi TI bertanggung jawab untuk merancang sekaligus menerapkan rencana kontinuitas bisnis yang efektif, termasuk pemulihan sistem dan data dalam waktu yang singkat.

from potential cyber threats. The activities carried out include the use of encryption, management of access rights, monitoring of user activity, and implementation of appropriate mitigation measures to reduce potential risks to the Company.

2. IT Risk Management

This policy regulates the framework for the identification and management of risks related to information technology. The IT Division is responsible for conducting regular risk analysis and taking appropriate mitigation measures to reduce potential risks to the Company.

3. Regulatory Compliance

This policy contains the Company's obligation to always comply with applicable regulations and industry standards related to data use and protection. The Information Technology Division collaborates with the Risk Management Department to ensure that the information technology systems and processes running in the Company have met all legal and regulatory requirements relevant to its business field.

4. Technology Asset Management

This policy regulates the use, management, and maintenance of the Company's information technology assets, including hardware, software, and network infrastructure. Technology Asset Management also includes procedures for the organization and procurement of technology assets, as well as policies related to disaster recovery.

5. Business Continuity

The business continuity policy regulates the necessary actions to ensure the continuity of the Company's operations in the event of an emergency or disaster. The IT Division is responsible to design and implement an effective business continuity plan, including system and data recovery in a short period of time.

SISTEM MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT SYSTEM

Divisi TI telah merancang suatu Sistem Manajemen Teknologi Informasi (TI) untuk mengelola semua aspek teknologi informasi dalam Perseroan. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung proses bisnis dan operasional Perseroan. Hal-hal yang diatur dalam sistem manajemen teknologi informasi disampaikan berikut ini:

1. Perencanaan Strategis TI

Divisi TI membuat rencana strategis terkait penggunaan teknologi informasi yang dapat memfasilitasi pencapaian visi dan tujuan Perusahaan. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan teknologi jangka panjang dan pengembangan strategi untuk memenuhinya.

2. Pengelolaan Proyek TI

Setiap proyek teknologi, seperti instalasi sistem baru atau pembaruan perangkat lunak, dikelola dengan metode

The IT Division has designed an Information Technology (IT) Management System to manage all aspects of information technology within the Company. This system is designed to ensure that information technology is used effectively and efficiently to support the Company's business and operational processes. The information technology management system covers the following:

1. Strategic IT Planning

The IT Division prepares a strategic plan related to the use of information technology that can facilitate the achievement of the Company's vision and objectives. This involves identifying long-term technology needs and developing strategies to fulfill them.

2. IT Project Management

Every technology project, such as the installation of a new system or software update, is managed by a structured

yang terstruktur. Kegiatan ini meliputi perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengawasan atas setiap kemajuan yang dicapai dalam prosesnya guna memastikan keberhasilan proyek.

3. Pengelolaan Risiko TI

Divisi TI bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi, antara lain risiko keamanan data, kerentanan sistem, dan potensi gangguan operasional.

4. Pemantauan Kinerja TI

Perseroan melakukan pemantauan atas kinerja sistem dan infrastruktur TI secara terus-menerus guna memastikan seluruh sistem dan infrastruktur TI beroperasi lancar dan efektif. Pemantauan ini membantu Perseroan untuk segera dapat mengidentifikasi potensi gangguan terhadap sistem ataupun infrastruktur TI dan kemudian mengambil tindakan perbaikan.

5. Pemeliharaan dan Pemulihan

Perawatan rutin dan pemulihan sistem dalam situasi darurat merupakan bagian penting dari sistem manajemen TI. Hal ini mencakup pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perencanaan dan pengujian rencana pemulihan bencana.

6. Evaluasi dan Peningkatan

Divisi TI melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja dan efektivitas sistem TI. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, dan untuk mengembangkan strategi perbaikan yang tepat.

method. This includes careful planning, proper allocation of resources, and monitoring of progress to ensure the success of the project.

3. IT Risk Management

The IT Division is responsible for identifying, evaluating, and managing risks related to information technology, including data security risks, system vulnerabilities, and potential operational disruptions.

4. IT Performance Monitoring

The Company constantly monitors the performance of the IT system and infrastructure to ensure that all IT systems and infrastructure operate efficiently and effectively. This monitoring allows the Company to immediately identify potential disruptions to the IT system or infrastructure and initiate corrective actions.

5. Maintenance and Recovery

Routine maintenance and system recovery in emergency situations are an important part of the IT management system. This includes hardware and software maintenance, as well as disaster recovery planning and testing.

6. Evaluation and Improvement

The IT division regularly evaluates the performance and effectiveness of the IT system. This evaluation is used to identify areas that need improvement or enhancement, and to develop appropriate improvement strategies.

MITIGASI DISRUPSI TI IT DISRUPTION MITIGATION

Mengingat pentingnya pengadopsian teknologi informasi di lingkungan kerjanya, maka penting bagi Perseroan untuk menyiapkan langkah mitigasi risiko terhadap potensi disrupsi teknologi yang berdampak pada kinerja sistem dan operasi Perseroan. Untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya dan meminimalisir potensi gangguan, Divisi TI telah merancang dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif, yaitu termasuk:

1. Perencanaan Kontinuitas Bisnis (BCP) IT

Divisi TI telah memiliki dan mengimplementasikan rencana kontinuitas bisnis yang komprehensif yang meliputi strategi untuk pemulihan sistem dan layanan utama pada saat situasi darurat atau bencana, serta penyelenggaraan pelatihan dan latihan rutin untuk mempersiapkan tim menghadapi keadaan darurat.

2. Pemantauan Proaktif

Divisi TI secara berkesinambungan memantau kinerja sistem dan jaringan untuk dapat mendeteksi indikasi masalah sejak dini. Dengan mendeteksi dan menyiapkan respon atas peringatan dini tersebut, Divisi Teknologi Informasi dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah gangguan lebih lanjut.

Given the importance of adopting information technology in its work environment, it is important for the Company to prepare risk mitigation measures against potential technological disruptions that impact the Company's system and operational performance. In order to ensure business continuity and minimize potential disruptions, the IT Division has designed and implemented an effective mitigation strategy, including:

1. IT Business Continuity Planning (BCP)

The IT Division has developed and implemented a comprehensive business continuity plan that includes strategies for the recovery of key systems and services in the event of an emergency or disaster, as well as the organization of regular emergency response training and drills for the team.

2. Proactive Monitoring

The IT Division continuously monitors system and network performance to detect early warning signs of problems. By detecting and preparing a response to these early warnings, the Information Technology Division can take preventive measures to prevent further disruptions.



3. Keamanan Cyber

Perlindungan terhadap serangan *cyber* menjadi fokus utama Divisi Teknologi Informasi. Dengan cara menerapkan lapisan keamanan yang kuat, termasuk perangkat lunak antivirus, *irewall*, dan deteksi intrusi, serta melakukan pemantauan dan analisis yang berkelanjutan terhadap ancaman keamanan yang berkembang.

4. Pemulihan Bencana

Divisi TI menyiapkan rencana pemulihan bencana yang terstruktur dan teruji dengan baik. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memulihkan sistem dan layanan kunci Perusahaan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah terjadinya keadaan darurat atau bencana, serta menyediakan fasilitas cadangan dan redundansi untuk meminimalkan dampaknya.

5. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan sistem yang terjadwal serta pembaruan yang rutin dilakukan oleh Divisi TI guna memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak tetap beroperasi dengan lancar dan aman. Termasuk dalam strategi ini adalah pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pemantauan kondisi fisik dan lingkungan peralatan TI.

6. Pelatihan Pengguna

Divisi TI memberikan pelatihan rutin kepada pengguna internal Perseroan mengenai tata cara penggunaan sistem dan perangkat TI. Pelatihan rutin juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang praktik keamanan dan pemulihan sehingga mereka dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi disrupsi TI.

CYBER SECURITY (KEAMANAN DUNIA MAYA) CYBER SECURITY

Seiring perkembangan bisnis Perseroan, maka keamanan siber menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Ancaman siber yang semakin kompleks akan membutuhkan komitmen Perseroan untuk senantiasa meningkatkan infrastruktur keamanan serta melakukan evaluasi berkala atas keamanan TI oleh pihak ketiga. Inisiatif ini diharapkan akan memperkuat perlindungan atas keamanan data dan informasi Perseroan.

Inisiatif lainnya termasuk melakukan pelatihan keamanan siber untuk karyawan Divisi TI dan membangun kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait keamanan TI sebagai wujud komitmen Divisi TI untuk menjaga kerahasiaan data dan melindungi kepentingan Perseroan, karyawan serta *stakeholder* terkait. Sejumlah inisiatif terkait pengelolaan keamanan siber di Perusahaan mencakup:

1. Kebijakan Keamanan

Divisi TI merancang kebijakan keamanan untuk mengatur dengan jelas pemanfaatan sistem dan data Perseroan, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman keamanan.

3. Cyber Security

Protection against cyber-attacks is the main focus of the Information Technology Division. This is done by implementing strong security layers, including antivirus, firewall, and intrusion detection software, as well as continuous monitoring and analysis of evolving security threats.

4. Disaster Recovery

The IT Division prepares a well-structured and tested disaster recovery plan. This involves restoration measures of the Company's key systems and services in the shortest possible time after an emergency or disaster, as well as providing backup and redundancy facilities to minimize the impact.

5. Routine Maintenance

Scheduled system maintenance and routine updates are carried out by the IT Division to ensure that systems and software continue to operate seamlessly and securely. Included in this strategy is the maintenance of hardware, software, and the monitoring of the physical and environmental conditions of IT equipment.

6. User Training

The IT Division provides routine training to the Company's internal users on how to use IT systems and devices. Routine training also aims to increase user awareness of security and recovery practices so that they can contribute to IT disruption mitigation efforts.

In line with the Company's business development, cybersecurity is an aspect that deserves attention. The increasingly complex cyber threats will require the Company's commitment to continuously improve the security infrastructure and conduct periodic evaluations of IT security by third parties. This initiative is expected to reinforce the protection of the Company's data and information security.

Other initiatives include providing cybersecurity training for IT Division employees and establishing collaboration with various stakeholders concerning IT security as a manifestation of the IT Division's commitment to maintaining data confidentiality and protecting the interests of the Company, employees and related stakeholders. Some of the initiatives related to cybersecurity management in the Company include:

1. Security Policy

The IT Division designs a security policy to clearly regulate the use of the Company's systems and data, as well as the necessary response to security threats.

2. Identifikasi Risiko

Divisi TI melakukan identifikasi dan evaluasi atas potensi risiko keamanan siber yang mungkin dihadapi, baik dari dalam maupun luar organisasi.

3. Proteksi dan Pencegahan

Langkah perlindungan yang bersifat teknis, seperti penggunaan *firewall*, enkripsi data, dan perangkat lunak keamanan lainnya diterapkan untuk melindungi sistem dan data Perseroan.

4. Deteksi Ancaman

Divisi TI berupaya mengembangkan mekanisme deteksi dini agar dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau serangan *cyber* secepat mungkin.

5. Respons Terhadap Insiden

Divisi TI membuat perencanaan yang komprehensif dengan membentuk tim tanggap insiden siber yang bertanggung jawab untuk menangani dan memberikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap serangan siber.

6. Pemulihan dan Pembelajaran

Dalam hal terjadi serangan atau insiden siber, Divisi TI wajib melakukan pemulihan sistem dan data yang terkena dampak, serta melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menyiapkan rencana perbaikan.

7. Kesadaran dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di antara karyawan terutama di Divisi TI, Perseroan mengadakan pelatihan tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Divisi TI bertugas melakukan pemantauan atas lingkungan keamanan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan Perseroan.

2. Risk Identification

The IT Division identifies and evaluates potential cybersecurity risks, both from within and outside the organization.

3. Protection and Prevention

Technical protection measures, such as the use of firewall, data encryption, and other security software, are applied to protect the Company's systems and data.

4. Threat Detection

The IT Division strives to develop an early detection mechanism in order to identify suspicious activity or cyber-attacks as quickly as possible.

5. Incident Response

The IT Division develops a comprehensive plan by establishing a cyber incident response team that is responsible for handling and providing a quick and effective response to cyber-attacks.

6. Recovery and Learning

In the event of a cyber-attack or incident, the IT Division is required to recover the affected systems and data, as well as conduct an evaluation to identify existing weaknesses and prepare a corrective action plan.

7. Awareness and Training

To raise cybersecurity awareness among employees, especially in the IT Division, the Company provides training on security threats and best practices.

8. Monitoring and Evaluation

The IT Division is responsible for monitoring the security environment and periodically evaluating the Company's security policies and procedures.

DISASTER RECOVERY (PEMULIHAN BENCANA) DISASTER RECOVERY

Perseroan menilai kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC) perlu ditingkatkan secara berkala untuk memastikan bahwa operasi sistem Teknologi Informasi dapat segera dipulihkan dalam situasi darurat. Perseroan terus melakukan pengembangan dan pengujian atas rencana pemulihan bencana serta mendorong optimalisasi infrastruktur pemulihan bencana untuk memastikan efektivitas proses pemulihan. Perseroan melibatkan jajaran manajemen dan mendorong kolaborasi antar berbagai divisi untuk mengelola DRC yang efektif, termasuk Divisi Teknologi Informasi.

Berikut langkah-langkah dalam pengelolaan *Disaster Recovery Center* yang diterapkan oleh Perseroan:

1. Perencanaan Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Planning*)

Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan rencana pemulihan bencana yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan sistem dan data setelah bencana terjadi.

The Company believes that the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC) needs to be improved regularly to ensure that Information Technology system operations can be quickly restored in an emergency situation. The Company continues to develop and test disaster recovery plans and encourages the optimization of disaster recovery infrastructure to ensure the effectiveness of the recovery process. The Company involves the management and encourages collaboration between various divisions to manage an effective DRC, including the Information Technology Division.

The following are the Company's Disaster Recovery Center management procedures:

1. Disaster Recovery Planning

The Information Technology Division has developed a disaster recovery plan that outlines the procedures and measures that must be taken to restore systems and data after a disaster occurs.



2. Identifikasi Kebutuhan Pemulihan (*Recovery Point Objective/RPO dan Recovery Time Objective/RTO*)

Divisi Teknologi Informasi perlu merumuskan RPO dan RTO yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional, yaitu seberapa sering data cadangan harus disinkronkan dan berapa lama waktu yang diperbolehkan untuk memulihkan sistem.

3. Pemilihan Lokasi DRC

Divisi TI menentukan lokasi DRC yang aman dan dapat diakses guna menyimpan salinan cadangan data dan infrastruktur TI yang diperlukan dalam melakukan pemulihan.

4. Pengelolaan Cadangan Data

Divisi TI secara teratur membuat salinan cadangan data dan menyimpannya di lokasi DRC yang aman.

5. Pemulihan Sistem

Jika terjadi bencana, Divisi TI harus dapat melakukan pemulihan sistem dan data dengan cepat dari salinan cadangan yang disimpan di DRC.

6. Uji Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Testing*)

Perseroan secara teratur melakukan pengujian atas rencana pemulihan bencana yang telah dirancang guna memastikan pemulihan sistem dan data berlangsung dengan benar dan dalam waktu yang sesuai.

7. Pemantauan dan Pembaruan

Divisi TI melakukan pemantauan dan pembaruan rencana pemulihan bencana mereka sesuai dengan perubahan dalam infrastruktur TI dan kebutuhan bisnis.

2. Identification of Recovery Needs (*Recovery Point Objective/RPO and Recovery Time Objective/RTO*)

The Information Technology Division needs to formulate RPO and RTO that are in accordance with business and operational needs, specifically how often backup data must be synchronized and how much time is allowed to restore the system.

3. Selection of DRC Location

The IT Division determines a secure and accessible DRC location to store backup copies of data and IT infrastructure needed for recovery.

4. Backup Management

The IT Division regularly makes backup copies of data and stores them in a secure DRC location.

5. System Recovery

In the event of a disaster, the IT Division must be able to quickly restore systems and data from backup copies stored in the DRC.

6. Disaster Recovery Testing

The Company regularly tests the disaster recovery plan that has been designed to ensure that systems and data are recovered correctly and promptly.

7. Monitoring and Updates

The IT Division monitors and updates their disaster recovery plans in accordance with changes in IT infrastructure and business needs.

PENGEMBANGAN TI DAN BIAYA INVESTASI TI IT DEVELOPMENT AND IT INVESTMENT COSTS

Untuk mendukung pengembangan TI yang efektif, maka Perseroan telah membuat rencana anggaran investasi Teknologi Informasi (TI). Kegiatan pengembangan TI meliputi proses merancang, mengembangkan, dan memperbarui solusi teknologi informasi. Sebaliknya, perencanaan biaya investasi TI mencakup semua pengeluaran terkait dengan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dalam perusahaan.

1. Pengembangan Teknologi Informasi

Untuk dapat membuat rencana pengembangan TI yang efektif, Perseroan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis Perusahaan dengan melibatkan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami persyaratan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan dari solusi TI. Berdasarkan analisis ini, Divisi TI merancang solusi TI yang sesuai, memilih teknologi yang tepat, dan merancang sistem yang efisien. Setelah perancangan selesai, tim pengembangan TI mulai mengembangkan aplikasi atau solusi yang diperlukan menggunakan metodologi pengembangan yang terstruktur.

For effective IT development, the Company has created an Information Technology (IT) investment budget plan. IT development activities include the process of designing, developing, and updating information technology solutions. Conversely, IT investment cost planning covers all expenses related to the procurement, development, and maintenance of information technology within the company.

1. Information Technology Development:

In order to create an effective IT development plan, the Company conducts an in-depth analysis of the Company's business needs by involving business stakeholders to understand the functional and non-functional requirements needed from IT solutions. Based on this analysis, the IT Division designs appropriate IT solutions, selects the appropriate technology, and designs efficient systems. Once the design is complete, the IT development team begins to develop the required application or solution using a structured development methodology. Once the

Setelah proses pengembangan selesai dilakukan, Perseroan terlebih dulu menguji solusi TI tersebut sebelum diperkenalkan ke lingkungan produksi Perusahaan.

2. Biaya Investasi Teknologi Informasi

Pada tahun 2024, total biaya investasi Teknologi Informasi mencapai Rp12,28 miliar di bandingkan Rp8,9 miliar di tahun 2023. Biaya investasi TI meliputi pengeluaran untuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan solusi TI, termasuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya pengembangan aplikasi, biaya implementasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya pembaruan dan *upgrade*.

Dengan teridentifikasinya kebutuhan bisnis dan rencana pengembangan TI, maka Divisi TI dapat membuat perencanaan anggaran yang tepat dan komprehensif, termasuk terkait dengan pengalokasian sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan bisnis Perseroan.

Berikut rincian total anggaran divisi Teknologi Informasi pada tahun 2024:

Komponen Biaya Cost Component	Investasi Investment
Perangkat Pendukung Kerja Work Supporting Tools	Rp2.616.372.964
Lisensi License	Rp2.470.856.536
Tagihan Invoices/bills	Rp432.900.000
Third Party	Rp1.545.480.104
Tools, Suku Cadang & Perawatan AFC Tools, Spareparts & AFC Maintenance	Rp2.588.378.531
Total Anggaran Divisi IT Total Budget of the IT Division	Rp12.280.352.641

development process is complete, the Company will first test the IT solution before introducing it to the Company's production environment.

2. Information Technology Investment Costs

In 2024, the total investment cost of Information Technology reached IDR12.2 billion compared to IDR8.9 billion in 2023. The IT investment costs include expenses for the development, implementation, and maintenance of IT solutions, including hardware and software procurement, application development costs, implementation costs, operational costs, maintenance costs, as well as renewal and upgrade costs.

With the identification of business needs and IT development plans, the IT Division can create an accurate and comprehensive budget plan, including efficient resource allocation to achieve the Company's business objectives.

The following is a breakdown of the total budget for the Information Technology division in 2024:

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA TAHUN MENDATANG INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN FOR THE COMING YEAR

Dalam rangka menetapkan arah dan tujuan pengelolaan sistem dan infrastruktur TI yang efektif dan efisien, Divisi TI merancang rencana strategis dengan beberapa inisiatif utama:

1. Peningkatan Infrastruktur TI

- Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional.
- Modernisasi pusat data dan penguatan jaringan komunikasi.

2. Digitalisasi Proses Bisnis

- Mengembangkan sistem ERP yang lebih komprehensif.

In order to set the direction and objectives for effective and efficient IT system and infrastructure management, the IT Division has designed a strategic plan with the following key initiatives:

1. Improvement of IT Infrastructure

- Adopt the latest technology to improve operational performance and efficiency.
- Modernize the data center and strengthen the communication network.

2. Digitization of Business Processes

- Develop a more comprehensive ERP system.



- Meningkatkan integrasi antara berbagai platform digital dalam operasional Perseroan.

3. Pengembangan Keamanan Siber

- Memperkuat sistem keamanan informasi dengan standar industri terkini.
- Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan karyawan.

4. Pengembangan Aplikasi dan Layanan Digital

- Melanjutkan pengembangan aplikasi berbasis *mobile* dan *cloud*.
- Menyediakan solusi berbasis AI dan *data analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan.

5. Integrasi Sistem dan Automasi

- Mengimplementasikan IoT dan automasi dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi.
- Mengoptimalkan sistem *ticketing* dan pembayaran digital.

6. Peningkatan Kapasitas SDM TI

- Melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi bagi tim TI.
- Meningkatkan kolaborasi dengan mitra strategis dalam pengembangan teknologi.

7. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja TI

- Menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk mengukur efektivitas implementasi teknologi.
- Melakukan audit dan evaluasi berkala guna memastikan pencapaian target TI.

Dengan langkah-langkah ini, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan TI guna mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan daya saing di masa depan.

- Improve integration between various digital platforms in the Company's operations.

3. Development of Cyber Security

- Strengthen the information security system with the latest industry standards.
- Conduct routine training to increase cyber security awareness among employees.

4. Development of Digital Applications and Services

- Continue developing mobile and cloud-based applications.
- Provide AI-based solutions and data analytics to support decision making.

5. System Integration and Automation

- Implement IoT and automation in business processes to increase efficiency.
- Optimize ticketing systems and digital payments.

6. Improving the Capacity of IT Human Resources

- Implement training and certification programs for the IT team.
- Increase collaboration with strategic partners in technology development.

7. Evaluation and Measurement of IT Performance

- Use Key Performance Indicators (KPIs) to measure the effectiveness of technology implementation.
- Conduct periodic audits and evaluations to ensure the achievement of IT targets.

With these initiatives, the Company is committed to continuously developing IT to support its business growth and increase competitiveness in the future.





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Perseroan pada tahun buku 2024 mampu membukukan skor 89,71 atas penerapan tata kelola perusahaan. Skor tersebut tercatat lebih tinggi/ lebih rendah dibandingkan skor yang dicapai tahun 2023.

The Company scored 89.71 for the implementation of corporate governance in the 2024 financial year. The score was higher than the score achieved in 2023







Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Policy



Komitmen Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – GCG) sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat yang berkelanjutan melalui pelaksanaan governansi yang konsisten serta berkesinambungan. Selain itu, komitmen untuk melaksanakan GCG tidak hanya sebagai bagian dari kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory driven*) namun juga sebagai wujud tanggung jawab Perseroan untuk memastikan kelangsungan prospek bisnis Perseroan untuk jangka panjang (*ethical driven*).

Terdiri dari serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha, penerapan GCG mencerminkan komitmen Perseroan untuk melaksanakan prinsip-prinsip praktik terbaik di seluruh aspek bisnisnya guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap kemampuan Perseroan dalam mengelola dan meningkatkan nilai perusahaan.

The Company's Commitment to the Implementation of Corporate Governance

The Company implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) as part of its efforts to ensure that all stakeholders obtain sustainable benefits through the implementation of consistent and sustainable governance. In addition, the commitment to implement GCG is not only part of the Company's compliance with applicable laws and regulations (*regulatory driven*) but also a manifestation of the Company's responsibility to ensure the continuity of its long-term business prospects (*ethical driven*).

Consisting of a series of systems that regulate and control business entities, the implementation of GCG reflects the Company's commitment to implementing the principles of best practice in all aspects of its business in order to boost the confidence of shareholders and other stakeholders in the Company's ability to manage and increase its value.

Selain itu, penerapan GCG juga diharapkan akan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, antara lain hak untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai kinerja perusahaan, agenda korporasi penting yang akan dilaksanakan dan sebagainya.

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG yang efektif dan komprehensif di seluruh kegiatan operasinya diharapkan mampu membangun fundamental yang kuat yang akan memungkinkan Perseroan untuk membangun suatu organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Hal ini tentunya akan sejalan dengan ekspektasi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan Penerapan GCG

Perseroan menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di segenap kegiatan operasinya guna mencapai tujuan berikut ini:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian setiap organ Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; dan
6. Meningkatkan daya saing Perusahaan baik secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

In addition, the implementation of GCG is also expected to provide adequate protection for the rights of shareholders, especially minority shareholders, including the right to obtain accurate and timely information regarding the Company's performance, important corporate agendas that will be implemented, and etc.

The Company believes that an effective and comprehensive implementation of GCG in all of its operational activities is expected to build a strong foundation that will enable the Company to build an accountable and sustainable organization. This belief is certainly in line with the expectations of shareholders and other stakeholders.

Objectives of GCG Implementation

The Company recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) in all of its operational activities to achieve the following objectives:

1. Encouraging the achievement of corporate sustainability through management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality;
2. Encouraging the empowerment of functions and independence of each organ of the Company, namely the Board of Commissioners, Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders;
3. Encouraging shareholders, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors to make decisions and carry out their actions based on high moral values and compliance with laws and regulations;
4. Encouraging the emergence of corporate social awareness and responsibility towards the community and environmental sustainability, especially around the Company;
5. Optimizing corporate value for shareholders while taking into account other stakeholders;
6. Increasing the Company's competitiveness both nationally and internationally, thereby increasing market confidence which can encourage investment flows and sustainable national economic growth.



Dasar Penerapan dan Prinsip GCG

Guna menyusun kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang efektif, maka Perseroan telah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara eksternal maupun internal sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT LRT Jakarta.
5. Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain itu, Perseroan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke dalam kebijakan GCG Perusahaan. Kelima prinsip tata kelola perusahaan tersebut diuraikan berikut ini:

Basis of GCG Implementation and Principles

In order to develop effective corporate governance policies, the Company has adopted the following external and internal policies:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises.
3. Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices at Regional-Owned Enterprises (BUMD) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta.
4. Code of Corporate Governance of PT LRT Jakarta.
5. The Company's Articles of Association.

In addition, the Company has integrated the principles of Good Corporate Governance into its GCG policy. The five principles of corporate governance are outlined below:

Pilar Governansi Governance Pillar	Penjelasan Explanation
Transparansi Transparency	Prinsip transparansi yang diterapkan Perusahaan dengan cara memastikan setiap langkah proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan. The principle of transparency is applied by the Company by ensuring that every step of the process of determining policies and decisions taken by the Board of Commissioners, Board of Directors and all levels of the Company is conducted transparently.
Akuntabilitas Accountability	Prinsip akuntabilitas yang diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing. The principle of accountability is applied by clearly defining the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors and all levels of the Company in the organizational structure and job descriptions.
Responsibilitas/Tanggung Jawab Responsibility	Prinsip pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of accountability is applied by adjusting the management of the Company to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
Kemandirian/Independensi Independency	Prinsip kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara <i>independent</i> sesuai dengan profesionalisme tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. The principle of independency is applied by conducting its activities independently based on professionalism without conflict of interest and influence or pressure from any party.
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness and Equality	Prinsip kewajaran dan kesetaraan diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of fairness and equality is applied by providing a sense of justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from the agreements and the applicable laws and regulations.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Continuous Development of Corporate Governance Implementation

Jejak Langkah Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sejak didirikan pada tahun 2018, Perseroan terus mencatatkan kemajuan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Di tahun 2024 Perusahaan merumuskan kembali kebijakan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang lima tahun ke depan, yaitu penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang diintegrasikan dengan aspek Lingkungan dan Sosial. Berikut ini rencana pengembangan Tata Kelola yang terintegrasi:

Milestones in the Development of Good Corporate Governance Implementation

Since its establishment in 2018, the Company has been making progress in the implementation of Good Corporate Governance. In 2024, the Company has reformulated its governance policy based on the vision and mission in its 5-year Long-Term Plan, specifically the implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) which is integrated with Environmental and Social aspects. The following is the integrated governance development plan:

Tema Rencana Bisnis Perusahaan Periode 2025-2029 Company Business Plan Theme of 2025-2029





Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2024

Sesuai perencanaan yang disusun pada tahun sebelumnya, Perseroan telah membuat sejumlah inisiatif yang berdampak positif pada kualitas penerapan GCG di tahun 2024, yaitu:

Implementation of Good Corporate Governance in 2024

In accordance with the plan which was prepared in the previous year, the Company has made a number of initiatives that positively impacts the quality of GCG implementation in 2024, including:

Inisiatif Initiative	Pencapaian di Tahun 2024 Achievement in 2024
Perbaikan implementasi tata Kelola secara berkelanjutan Improve the sustainable implementation of governance	1. Peningkatan nilai GCG menjadi 89,71 2. Penghargaan Top GRC Award 4 Star Level, The High Performing Board of Commissioner on GRC 2024, The Most Commit /ed GRC
Pembaharuan Program Jangka Panjang Perusahaan Update to the Company Long-Term Program	Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2025 – 2029 sesuai dengan Program Pemerintah Daerah DKI Jakarta The Company's Long-Term Plan of 2025 – 2029 is based on the DKI Jakarta Regional Government Program
Komitmen dalam implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Commitment to the implementation of Anti Bribery Management System (SMAP)	Penyelenggaraan acara GRC Talks dengan tema "Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi di Perusahaan Transportasi Publik" Organization of GRC Talks with a theme of "Building Anti-Corruption and Gratification Culture in a Public Transportation Company"
Pemeliharaan Sistem Manajemen Terintegrasi Maintenance of the Integrated Management System	Pelaksanaan Audit Surveillance Sistem Manajemen oleh Eksternal Auditor untuk ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 45001:2018 serta Sertifikasi ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan. Implementation of Management System Audit Surveillance by External Auditors for ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 45001:2018 as well as ISO 14001:2015 for Environmental Management System
Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko Improve Risk Management Competency	Training <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) untuk Direksi dan Komisaris Perusahaan Certified Risk Executive Leader (CREL) Training for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Compliance with the State Officials Asset Reporting	Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh Direksi dan Komisaris State Officials Asset Reporting (LHKPN) by the Board of Directors and Board of Commissioners
Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System	Pembuatan Tata Kelola Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan ISO 37301:2021 Formulation of Compliance Management System based on ISO 37310:2021

Asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan melalui sejumlah inisiatif, antara lain dengan melakukan pengukuran secara berkala yang dilakukan secara internal terhadap penerapan prinsip GCG di lingkungan Perseroan. Pengukuran tersebut bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.

Assessment on the Implementation of Corporate Governance

The commitment to improve the quality of GCG implementation is carried out continuously through a number of initiatives, including regular internal assessments of the implementation of GCG principles within the Company. The assessments aim to:

1. To test and evaluate GCG implementation in the Company by elaborating the conditions of GCG implementation and assessing the actual conditions applied in the Company, by assigning scores/values to the application of GCG and categories of GCG implementation quality.
2. To identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, as well as to propose recommendations for improvement to reduce the gap between GCG criteria and its implementation in the Company.

3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan *best practices*.
4. Memantau konsistensi penerapan GCG pada Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di Perusahaan.

Pengukuran kualitas implementasi *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan (*assessment*) dilaksanakan dengan merujuk pada sejumlah kriteria yang ditetapkan sebagai standar alat uji sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter/ Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Pengukuran tersebut meliputi enam aspek pokok, yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lain.

Pada tahun 2024, hasil *assessment* GCG PT LRTJ menunjukkan skor sebagai berikut:

No	Aspek Aspect	Bobot Indikator Indicator Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement	
			Skor Score	%
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to The Continuous Implementation of Good Corporate Governance;	7,00	7,00	100
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,00	8,66	96
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	31,84	90
IV	Direksi Board of Directors	35,00	34,38	98
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	6,82	75
VI	Aspek Lain Lain Other Aspects	5,00	1,00	20
Total Skor Total Scores		100,00	89,71	

Perseroan pada tahun buku 2024 mampu membukukan skor 89,71 atas penerapan Tata Kelola Perusahaan. Skor tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan skor yang dicapai tahun 2023, yaitu 87,93 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100. Pencapaian hasil *assessment* implementasi GCG PT LRTJ tersebut secara keseluruhan menunjukkan Kualitas Penerapan GCG PT LRTJ "Sangat Baik".

3. To provide recommendations for improvements to the gaps found in GCG implementation in the Company in line with best practices.
4. To monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for the improvements and developments of GCG policies in the Company.

The assessment of the Good Corporate Governance implementation quality within the Company is carried out based on a number of criteria set as assessment standard in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators / Parameters / Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG). The assessment covers six main aspects, including:

1. Commitment to the Continuous Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Aspects.

In 2024, the scores of the GCG assessment of PT LRTJ are as follows:

In the 2024 fiscal year, the Company was able to score 89.71 for the implementation of corporate governance. This score is higher/lower than the score achieved in 2023, which was 87.93 out of a total maximum score of 100. The overall achievement of the GCG implementation assessment of PT LRTJ indicates that the quality of GCG implementation of PT LRTJ is "Very Good".



Struktur Tata Kelola

Governance Structure

Dalam rangka menciptakan organisasi yang akuntabel, Perseroan telah menyusun Struktur Tata Kelola sesuai ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Struktur tata kelola perusahaan PT LRTJ didukung oleh 3 (tiga) Organ Utama yang mengemban fungsi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ kepemilikan yang memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan.

Kemudian dua organ lainnya adalah Dewan Komisaris yang mengemban peran sebagai organ pengawasan dan Direksi yang mengemban peran sebagai organ pengelolaan. Dalam menjalankan fungsinya, kedua organ utama ini tersebut dibantu oleh organ-organ pendukung lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan forum yang memiliki wewenang tertinggi dalam Perseroan yang mewadahi para pemegang saham untuk melaksanakan sebagian haknya. Dalam RUPS, pemegang saham akan memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan penting, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penting yang memerlukan persetujuan pemegang saham antara lain melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

RUPS tidak berwenang untuk melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, tanpa mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip untuk saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi yang baik antara sesama organ pendukung GCG sehingga mewujudkan sebuah organisasi yang berkelanjutan.

Sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pemegang saham Perseroan adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT Jakpro") dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP").

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Manajemen Perseroan dalam melaksanakan RUPS wajib mematuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipersiapkan secara memadai sehingga

In order to create an accountable organization, the Company has formulated a governance structure in accordance with the provisions of Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The corporate governance structure of PT LRTJ is supported by 3 (three) Main Organs with different functions, duties and responsibilities as regulated in the applicable laws and regulations. The General Meeting of Shareholders (GMS) is an ownership organ with the highest decision-making authority.

The other two organs are the Board of Commissioners, which has a supervisory role, and the Board of Directors, which has a management role. In carrying out their functions, these two main organs are assisted by other supporting organs.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a forum with the highest authority in the Company that allows shareholders to exercise a portion of their rights. In the GMS, shareholders will vote on important decisions, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations. Important decisions that require shareholder approval include the replacement or dismissal of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

The GMS does not have the authority to intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. The principle of mutual respect for the functions and authorities of each of the Company's organs is expected to enhance the synergy between the GCG supporting organs, thus creating a sustainable organization.

As stated in the Company's Articles of Association, the Company's shareholders are PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT Jakpro") and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP").

GMS Implementation Mechanism

In organizing the GMS, the Company's management must comply with the following provisions:

1. GMS must be held in accordance with the interests of the Company and consider the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, and be adequately prepared so that they can make valid

dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu, setiap penyelenggaraan RUPS harus memperhatikan sebagai berikut:

- a. Panggilan RUPS harus mencakup informasi yang lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS.
 - b. Bahan dan/atau informasi mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Apabila bahan tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka bahan dan/atau informasi tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.
 - c. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
 - d. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan dan Perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca atau memperoleh risalah tersebut.
2. Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perusahaan terdiri dari:
 - a. RUPST mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
 - b. RUPS Lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebut RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
 3. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan. Pemegang Saham atau RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah berlaku, serta Pergub DKI Nomor 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah,

decisions. For this reason, each GMS must pay attention to the following:

- a. Invitation for the GMS must include complete and accurate information regarding the agenda, date, time and place of the GMS;
 - b. Materials and/or information regarding each agenda listed in the invitation for the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation for the GMS so that it is possible for Shareholders to actively participate in the GMS and vote responsibly. If the material is not available when the invitation for the GMS is made, then the material and/or information must be made available at the Company's office before the GMS is held.
 - c. Explanations regarding other matters related to the agenda of the GMS can be provided before and/or during the GMS.
 - d. The minutes of the GMS must be available at the Company's office and the Company provides facilities so that Shareholders can read or obtain the minutes.
2. Refer to the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders ("GMS") in the Company consists of:
 - a. The AGMS regarding the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, which is held every year no later than 6 months after the closing of the Company's fiscal year.
 - b. Other GMS, hereinafter referred to as Extraordinary GMS ("EGMS") in the Company's Articles of Association, is a General Meeting of Shareholders which can be held at any time based on the need for the benefit of the Company.
 3. GMS decision-making is carried out fairly and transparently by taking into account the long-term and short-term interests of the Company, in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association, including but not limited to:
 - a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors, who are appointed at the GMS, consist of people who are fit and proper for the Company. Shareholders or GMS appoint and dismiss Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association which are guided by the prevailing Minister of Finance Regulation, as well as DKI Governor Regulation No. 50/2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Supervisory Board and Members of the Board of



dan Pergub DKI No. 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan.

- b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG.
- c. Dalam menetapkan Auditor Eksternal, RUPS mempertimbangkan alasan pencalonan Auditor Eksternal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
- d. Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang Saham yang didasari pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem, dan dividen, RUPS memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.
4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS yang mekanisme pelaksanaannya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
5. Dalam hal Direksi berhalangan maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Tata tertib RUPS akan diatur dan dibacakan pada pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.
7. Kewenangan RUPS antara lain:
 - a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - d. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
 - e. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi.
 - f. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
 - g. Menyetujui atau menolak rencana untuk:
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan.
 - ii. Melakukan bangun serah kelola dan kerja sama operasional untuk aset yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh pemegang saham.

Commissioners of Regional-Owned Enterprises, and DKI Governor Regulation No. 5/2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Directors of Regional-Owned Enterprises and Joint Venture Companies.

- b. In making a decision to accept or reject the reports of the Board of Commissioners and Board of Directors, the GMS consider the quality of reports related to GCG.
- c. In appointing the External Auditor, the GMS consider the reasons for the nomination of the External Auditor submitted by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee.
- d. GMS resolutions are taken considering the fair interests of Shareholders based on the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
- e. In making decisions on awarding bonuses, tantiem, and dividends, the GMS takes into account the condition of the Company's financial health.
4. The implementation of the GMS is the responsibility of the Board of Directors. For this reason, the Board of Directors must prepare and hold a GMS whose implementation mechanism refers to the Company's Articles of Association and the Board Manual.
5. In the event that the Board of Directors is absent, the GMS will be held by the Board of Commissioners or Shareholders in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
6. The rules of conduct for the GMS will be regulated and read out at the holding of the AGMS and EGMS.
7. The authority of the GMS includes:
 - a. Establish changes to the Company's Articles of Association.
 - b. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - c. Make decisions necessary to secure the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.
 - d. Approve or reject the Annual Report and Financial Statements prepared by the Board of Directors after being examined by the Board of Commissioners.
 - e. Determine the amount of honorarium and facilities for the Board of Commissioners as well as salaries and other facilities for the Board of Directors.
 - f. Appoint a Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's Annual Financial Statements.
 - g. Approve or reject the plan to:
 - i. Conduct merger, consolidation, acquisition, separation, and submission of application for the Company to be declared bankrupt, extension of the Company's establishment period.
 - ii. Carry out build-operate-transfer and joint operation for assets that exceed the limit which from time to time will be determined by the shareholders.

- iii. Mendirikan perusahaan baru dan/atau turut serta dalam usaha perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri atau meningkatkan penyaertaannya pada perusahaan, atau mengalihkan penyaertaan di anak-anak Perusahaan.
 - iv. Meminjam uang atau membuat hutang atau memberikan pinjaman melampaui batas yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pemegang saham, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi operasional.
 - v. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - h. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - i. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
8. Pemegang Saham minoritas memiliki mekanisme untuk menyelenggarakan RUPS minimal mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
 9. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain dengan surat kuasa.
 10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Persyaratan RUPS

Agar RUPS berlangsung efektif dan sah di mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan RUPS harus memenuhi persyaratan berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.
4. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

iii. Establish a new company and/or participate in the business of other companies both at home and abroad or increase its participation in the company, or transfer its participation in subsidiaries.

iv. Borrow money or create debts or provide loan beyond the limits set from time to time by the shareholders, except for debt or receivable loans arising from operational transactions.

v. Transfer, release rights or make debt collateral which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in a fiscal year, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another.

h. Approve the Company's corporate actions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

i. Make decisions through an open and fair and accountable process.

j. Carry out good corporate governance in accordance with authority and responsibility.

8. Minority Shareholders have a mechanism to hold a GMS at least representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights, unless the Articles of Association determines a smaller amount.

9. Shareholders can be represented by other Shareholders with a power of attorney.

10. Shareholders can also make valid decisions without convening a GMS, provided that all Shareholders have been notified in writing and all Shareholders give their approval regarding the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions made legally at the GMS.

GMS Requirements

For the GMS to be effective and legal in accordance with the applicable laws and regulations, the organization of GMS must comply with the following requirements:

1. The GMS is held at the domicile of the Company or where the Company conducts its main business activities as specified in the articles of association.
2. The location of the GMS as referred to in paragraph (1) must be located in the territory of the Republic of Indonesia.
3. Other than organizing the GMS as referred to in the provisions of paragraph (2), the GMS can also be held via teleconference media, video conferences or through other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the GMS.
4. The GMS has powers that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the law and/or the articles of association.



5. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan, dengan persetujuan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
6. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
7. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
8. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
9. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan.
10. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
11. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
12. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Mekanisme Pemanggilan RUPS

Prosedur pelaksanaan RUPS PT LRTJ diuraikan sebagai berikut:

1. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
2. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
4. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

5. In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain relevant information, with the approval of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it relates to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company.
6. GMS can be held if more than (half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the law and/or articles of association determine a larger quorum.
7. In the event that the quorum referred to in paragraph (6) is not reached, a second GMS invitation may be made.
8. In the invitation for the second GMS, it must be stated that the first GMS was held and did not reach a quorum.
9. The invitation as referred to in paragraph (7) must be made no later than 7 (seven) days before the meeting is held excluding the date of the invitation and the date of the meeting. The second meeting is held at the earliest 10 (ten) days and at the latest 21 (twenty one) calendar days after the first meeting was held.
10. The second GMS as referred to in paragraph (9) is valid and has the right to make decisions if in the GMS at least 1/3 (one third) of the total number of shares with voting rights are present or authorized representative, unless the articles of association determine a larger quorum;
11. In the event that the quorum for the second GMS as referred to in paragraph (10) is not reached, the Company may request the head of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company at the request of the Company to determine a quorum for the third GMS.
12. Invitation for the third GMS must state that the second GMS has been held and does not reach a quorum and that the third GMS will be held with a quorum determined by the head of the district court.

GMS Invitation Mechanism

The procedures of PT LRTJ's GMS organization are as follows:

1. The Board of Directors invites the shareholders before holding the GMS.
2. In certain cases, the invitation for the GMS as referred to in paragraph (1) can be made by the Board of Commissioners or shareholders based on the stipulation of the head of the district court.
3. The invitation for the GMS shall be made no later than 14 (fourteen) days prior to the date the GMS is held, excluding the date of the summons and the date of the GMS.
4. Invitation for the GMS is made by registered letter and/or by advertising in newspapers.

5. Dalam panggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
6. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
7. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS

Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan penting atas agenda korporasi tertentu. Agar pengambilan keputusan RUPS dianggap sah, maka berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT LRT Jakarta, proses pengambilan keputusan dalam RUPS harus memenuhi unsur berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Risalah RUPS

Setiap keputusan RUPS didokumentasikan dalam bentuk Risalah RUPS dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Perseroan berkomitmen untuk melindungi dan mengakomodir hak-hak dan kewajiban pemegang saham terhadap Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

5. In the GMS invitation, the date, time, place, and agenda of the meeting must be stated, accompanied by notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the summon for the GMS is made until the date the GMS is held.
6. The Company is required to provide free copies of the materials referred to in paragraph (5) to shareholders if requested.
7. In the event that the invitation is not in accordance with the provisions referred to in paragraph (3) and paragraph (4), and the invitation is not in accordance with the provisions of paragraph (5), the GMS decision remains valid if all shareholders with voting rights are present or represented at the GMS and the decision was approved unanimously.

Decision Making Mechanism in the GMS

The Company organizes GMS to make important decisions regarding certain corporate agendas. For the GMS resolution to be valid based on the Corporate Governance Guidelines of PT LRT Jakarta, the decision making in the GMS must comply with the following elements:

1. GMS resolutions are taken based on deliberation to reach a consensus.
2. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus as referred to in paragraph (1) is not reached, a decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes cast, except the laws and/or article of association determines that a resolution is valid if the votes in favor is in greater number.

GMS Minutes

Each GMS resolution is documented in a GMS Minutes with the following mechanisms:

1. For each GMS, the minutes of the GMS must be made and signed by the head of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the GMS participants.
2. The signature as referred to in paragraph (1) is not required if the minutes of the GMS are made using a notarial deed.

Shareholders' Rights and Obligations

The Company is committed to protect and accommodate the rights and obligations of shareholders to the Company in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. This commitment is realized by considering the following principles:



1. Pemegang Saham menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan kelangsungan hidup Perusahaan.
2. Perusahaan harus dapat menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang Saham didasari asas keadilan dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

1. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
2. Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS.
5. Hak untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
7. Hak untuk memperoleh perlakuan setara (*equal treatment*) bagi para pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama.

Kewajiban Pemegang Saham

1. Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS.
2. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan perusahaan.

Implementasi RUPS Tahun 2024

Pada tahun 2024, Para Pemegang Saham Perseroan telah melakukan pengambilan keputusan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdiri dari 1 (satu) kali KPPS di luar RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali KPPS di luar RUPS Luar Biasa. Pada penyelenggaraan KPPS tersebut, para pemegang saham Perseroan telah mengambil sejumlah keputusan penting, yang seluruhnya telah direalisasikan pada tahun buku yang bersangkutan. Detail lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Shareholders realize that in exercising their rights and responsibilities they must pay attention to the sustainability of the Company.
2. The Company must be able to guarantee the fulfillment of the rights and responsibilities of Shareholders based on the principles of fairness and justice, in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Shareholders' Rights

1. The right to obtain security guarantees for the ownership registration method.
2. The right to assign and transfer share ownership.
3. The right to obtain relevant information about the Company periodically and regularly.
4. The right to participate and vote in the GMS.
5. The right to elect members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. The right to obtain the Company's profit sharing.
7. The right to obtain equal treatment for shareholders who own shares of the same classification.

Shareholders' Obligations

1. Shareholders must comply with the provisions of the Company's Articles of Association and decisions made at the GMS.
2. Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the process of managing the Company.

Implementation of GMS in 2024

In 2024, the Company's Shareholders have made decisions through Shareholders Decisions (KPPS) outside the General Meeting of Shareholders (GMS) 3 (three) times, consisting of 1 (one) KPPS outside the Annual GMS and 2 (two) KPPS outside the Extraordinary GMS. In the implementation of the KPPS, the Company's shareholders have made a number of important decisions, all of which have been realized in the relevant fiscal year. Further details are as follows:

1. KPPS di luar RUPS Tahunan tentang Laporan PT LRT Jakarta untuk Tahun Buku 2024, tertanggal 28 Juni 2024

1. KPPS outside the Annual GMS regarding PT LRT Jakarta Report for 2024 Fiscal Year, dated June 28, 2024

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Hertanto Grace Karunawan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 001982/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Approved the Company’s Annual Report, which includes the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and ratified the Company’s Financial Statements for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty-three), which have been audited by the Public Accounting Firm Hertanto Grace Karunawan as stipulated in the Independent Auditor’s Report No. 001982/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024, 27-06-2024 (twenty seventh June two thousand twenty four) with the opinion “the Financial Statements have been presented fairly, in all material respects, the Company’s financial positions as of 31-12-2023 (thirty first December two thousand twenty four), as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up
Keputusan Ke-2 2nd Resolution Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan serta ketidakhati-hatian atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Granted full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three) as long as these actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three), and if in the future any unlawful acts and criminal offenses of abuse of office are discovered that have caused losses to the Company which are reasonably suspected to have been committed intentionally and due to carelessness in making disproportionate decisions, the Board of Directors and Board of Commissioners can be held personally accountable.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up
Keputusan Ke-3 3rd Resolution Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp17.313.861.252,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) sebagaimana perhitungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 001982/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat). Pemegang Saham menyetujui untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan tidak membagikan Dividen, yang mana laba bersih Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) digunakan untuk menutupi kerugian akumulasi Perseroan. Approved the determination of the Company’s net profit for the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three) of Rp17,313,861 252.00 (seventeen billion three hundred thirteen million eight hundred sixty one thousand two hundred fifty two Rupiah) as calculated and audited by the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) as stated in the Independent Auditor’s Report Number 001982/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024, dated 27-06-2024 (twenty-seventh of June two thousand and twenty-four). The Shareholders approved that for the Financial Year 2023 (two thousand and twenty-three) the Company did not distribute Dividends, in which the net profit for the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three) was used to cover the Company’s accumulated losses.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up



Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan ke-4 4th Agenda Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan. Approved the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the Fiscal Year 2024 (two thousand and twenty-four) to hire the Public Accounting Firm used by the majority shareholder or parent company.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Kurniawan (KAP HGK). Has been realized and followed up with the appointment of Public Accounting Firm Hentanto, Grace, Kurniawan (KAP HGK).
Keputusan ke-5 5th Resolution Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan menetapkan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) setelah berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary for the Board of Directors, honorarium for the Board of Commissioners, and other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024 (two thousand and twenty-four) and determine tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three) after consulting with the majority shareholder.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Persetujuan Penyesuaian Gaji/ Honorarium serta Pemberian Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 003/DKO/110/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024. Has been realized and followed up with the Approval Letter for the Adjustment of Salary/Honorarium and Performance Incentive for the Board of Directors and Board of Commissioners Number 003/DKO/110/VIII/2024 dated August 30, 2024
*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 15 Tahun 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT LRT Jakarta *This KPPS has been notarized under Deed No. 15 of 2024 concerning the Statement of Shareholder Resolutions Outside the Meeting of PT LRT Jakarta		

2. KPPS di Luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 28 Juni 2024

2. KPPS Outside of Extraordinary GMS, dated June 28, 2024

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution Menyetujui penegasan atas pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Perseroan sebagai berikut: a. Memutuskan untuk menegaskan pengangkatan Tuan Iwan Takwin sebagai Komisaris Utama Perseroan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta Nomor 103/UT2000/X/2022/0321, yaitu tanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dalam anggaran dasar Perseroan. b. Memutuskan untuk menegaskan pengangkatan Tuan Sahurdi sebagai Direktur Perseroan selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta Nomor 103/UT2000/X/2022/0321, yaitu tanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dalam anggaran dasar Perseroan.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is effective immediately.

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Approved the affirmation of the appointment of the President Commissioner and Directors of the Company as follows: a. Resolved to affirm the appointment of Mr. Iwan Takwin as President Commissioner of the Company for 3 (three) years, starting from the date of the Decision of the Shareholders Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta Number 103/UT2000/X/2022/0321, namely 07-10-2022 (October seventh two thousand and twenty-two), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the Company's articles of association. b. Resolved to affirm the appointment of Mr. Sahurdi as Director of the Company for 4 (four) years, starting from the date of the Decision of the Shareholders Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta Number 103/UT2000/X/2022/0321, namely 07-10-2022 (October seventh two thousand and twenty-two), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the Company's articles of association.		
Keputusan Ke-2 2nd Resolution Mengesahkan perubahan struktur Organisasi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi tanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor 001/DKO/110/VI/2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Para Pemegang Saham yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Para Pemegang Saham. Ratified the change in the Company's Organizational Structure as approved by the Company's Board of Commissioners through the Organizational Structure Change Approval Letter dated 03-06-2024 (June third two thousand and twenty-four) Number 001/DKO/110/VI/2024 as attached in the Shareholders' Decree which constitutes an integral and inseparable part of the Shareholders' Decree.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is effective immediately.
*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 Tahun 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT LRT Jakarta *This KPPS has been notarized under Deed No. 16 of 2024 concerning the Statement of Shareholder Resolutions Outside the Meeting of PT LRT Jakarta		

3. KPPS di Luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 19 Desember 2024

3. KPPS Outside the Extraordinary GMS, dated December 19, 2024

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution Mengesahkan Rencana Bisnis/Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 Perseroan, sebagaimana Buku Rencana Bisnis/Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 Perseroan tanggal 26 November 2024, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan serta mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/<i>good corporate governance</i>. Approved the Company's Business Plan/Long-Term Plan 2025-2029, as stated in the Company's Business Plan/Long-Term Plan 2025-2029 dated November 26, 2024, which implementation still refers to the applicable laws and regulations, the Company's articles of association and promotes the principles of good corporate governance.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is effective immediately.
Keputusan Ke-2 2nd Resolution Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2025 sebagaimana Buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025 Perseroan tanggal 26 November 2024, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan serta mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/<i>good corporate governance</i>. Approved the Company's Work Plan and Budget (RKA) for the Fiscal Year 2025 as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKA) Book for 2025 dated November 26, 2024, which implementation still refers to the applicable laws and regulations, the Company's articles of association and prioritizes the principles of good corporate governance.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is effective immediately.
*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 35 Tahun 2025 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta *This KPPS has been notarized under Deed No. 35 of 2024 concerning the Statement of Shareholder Resolutions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta		



Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Perseroan juga telah melakukan pengambilan keputusan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar RUPS Luar Biasa sebanyak 4 (empat) kali. Pada penyelenggaraan masing-masing RUPS dan KPPS tersebut, para pemegang saham Perseroan telah mengambil sejumlah keputusan penting, yang seluruhnya telah direalisasikan pada tahun buku yang bersangkutan. Detail lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan tentang Laporan PT LRT Jakarta Untuk Tahun Buku 2022, dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023

Realization of the Resolutions of the Previous General Meeting of Shareholders

In 2023, the Company held 2 (two) General Meetings of Shareholders, consisting of 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders. The Company has also made decisions through the Shareholders Decree (KPPS) outside the Extraordinary GMS 4 (four) times. In the implementation of each GMS and KPPS, the Company's shareholders have made a number of important decisions, all of which have been realized in the relevant fiscal year. Further details are as follows

1. Annual GMS regarding PT LRT Jakarta's Reports for 2022 Fiscal Year, held on Wednesday, May 17, 2023

Agenda Rapat dan Hasil Keputusan Meeting Agenda and Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Agenda Ke-1 1st Agenda Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions of the Company during the 2022 Fiscal Year. Keputusan Ke-1 1st Resolution Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00065/2.0752/ AU.1/06/0209-2/1/II/2023, tanggal 28-02-2023 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), apabila dikemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan serta ketidakhati-hatian atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi. Approved the Company's Annual Report, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two), which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as contained in the Independent Auditor's Report No. 00065/2.0752/AU.1/0209- 2/1/II/2023, February 28, 2023 (February twenty-eighth, two thousand twenty three) with the opinion "the financial statements have been presented fairly, in all material respects, PT LRT Jakarta's financial position as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up.

Agenda Rapat dan Hasil Keputusan Meeting Agenda and Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Provide full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, that have been carried out during the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two), provided that if, in the future, any unlawful acts or criminal offenses or abuse of position causing loss to the Company are discovered, and are reasonably suspected to have been committed due to intent and negligence in making disproportionate decisions, then the Board of Directors and Board of Commissioners may be held personally accountable.		
Agenda Ke-2 2nd Agenda Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2022 (two thousand twenty two). Keputusan Ke-2 2nd Resolution Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp8.222.894.971 (delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu Rupiah) sebagaimana perhitungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00065/2.0752/AU.1/06/0209-2/1/II/2023, tanggal 28-02-2023 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga). Pemegang Saham menyetujui untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan memutuskan tidak membagikan Dividen. Approved the determination of the Company's net profit for the Financial Year 2022 (two thousand twenty two) of Rp8,222,894,971 (eight billion two hundred twenty-two million eight hundred ninety four thousand nine hundred seventy-one Rupiah) as calculated and audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as stated in the Independent Auditor's Report No. 00065/2.0752/AU.1/06/0209-2/1/II/2023, dated February 28, 2022 (February twenty eighth, two thousand twenty-three). The Shareholders approved that for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two) the Company has decided not to distribute Dividends.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up.
Agenda Ke-3 3rd Agenda Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2023 (two thousand twenty three). Keputusan Ke-3 3rd Resolution Menyetujui penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) used by the majority shareholder or parent company to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2023 (two thousand twenty three).	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Kurniawan (KAP HGK). Has been realized and followed up with the appointment of Public Accounting Firm Hertanto, Grace Kurniawan (KAP HGK).
Agenda Ke-4 4th Agenda Penetapan besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Determination of the amount of the Board of Directors' salaries, honorarium for the Board of Commissioners, and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty-three), and determination of bonuses/work incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two).	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Persetujuan Penyesuaian Gaji/Honorarium serta Pemberian Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 001/KOM/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.



Agenda Rapat dan Hasil Keputusan Meeting Agenda and Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-3 5th Resolution Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan tantiem/insentif kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of Directors' salaries, honorarium of the Board of Commissioners, and other benefits for Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2023 and determine tantiem/work incentives for Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) after consulting with the majority shareholders.		It has been realized and has been followed up with a Letter of Approval for Adjustment of Salary/Honorarium and Provision of Performance Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners Number 001/KOM/110/VII/2023 dated July 20, 2023.
*RUPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 57 Tahun 2023 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LRT Jakarta *This GMS has been Notarized under Deed No. 57 of 2023 concerning the Minutes of the Annual General meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta		

- RUPS tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta, dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023
- GMS regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta, held on Wednesday, May 17, 2023

Agenda Rapat dan Hasil Keputusan Meeting Agenda and Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Agenda Ke-1 Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut: - Perubahan Pasal 13 ayat 3; - Perubahan Pasal 14 ayat 2; - Perubahan Pasal 16 ayat 3; dan - Perubahan Pasal 19 ayat 1. Keputusan Ke-1 Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut: - Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3, menjadi sebagai berikut: - Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. - Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 2, menjadi sebagai berikut: - Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang mana dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dengan batasan sebagai berikut: - Persetujuan dalam melakukan bangun serah kelola dan bangun kelola serah serta kerjasama operasional, dengan batasan nilai investasi sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan. - Persetujuan pendirian perusahaan baru dan/atau turut serta dalam usaha perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri atau peningkatan penyertaan pada perusahaan, atau pengalihan penyertaan di anak-anak perusahaan dengan batasan nilai setoran modal sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan. - Persetujuan dalam meminjam uang atau membuat hutang atau memberikan pinjaman, dengan batasan nilai pinjaman sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi operasional. - Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 3, menjadi sebagai berikut: - Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. - Menyetujui perubahan Pasal 19 ayat 1, menjadi sebagai berikut: - Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran dan ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up

Agenda Rapat dan Hasil Keputusan Meeting Agenda and Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
1st Agenda The amendments to the Company's articles of association are as follows: - Amendment of Article 13 paragraph 3; dan - Amendment of Article 14 paragraph 2; - Amendment of Article 16 paragraph 3; and - Amendment of Article 19 paragraph 1. 1st Resolution Approved the amendments to the Company's articles of association is as follows: - Approved the amendment to Article 13, paragraph 3, to read as follows: - Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. - Approved the amendment to Article 14, paragraph 2, to read as follows: - The Board of Directors must obtain approval from the GMS for certain actions, which may be delegated to the Board of Commissioners with the following limitations: - Approval to carry out build-management transfer and build-management transfer as well as operational cooperation, with an investment value limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net assets. - Approval to establish a new company and/or participate in other companies' businesses, both domestic and foreign, or increase participation in the company, or transfer of participation in subsidiaries with a capital contribution value limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net assets. - Approval to borrow money or make debts or provide loans, with a loan value limit of up to 30% (thirty percent) of the Company's net assets, except for loans or receivables arising from operational transactions. - Approved the amendment to Article 16, paragraph 3, to read as follows: - Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a term of 4 (four) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. - Approved the amendment to Article 19, paragraph 1, to read as follows: - The Board of Directors shall submit the Work Plan and Budget signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval.		
Agenda Ke-2 2nd Agenda Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pertama Rapat tersebut di atas. Re-arranged all the provisions in the Company's articles of association in relation to the changes as referred to in the Meeting Agenda 1 mentioned above. Keputusan Ke-2 2nd Resolution Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud angka 1 keputusan Rapat. Approved the re-arrangement of all provisions in the Company's articles of association in connection with the changes to the Company's articles of association provisions as referred to in item 1 of the meeting's resolutions.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up
*RUPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 58 Tahun 2023 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0073663. *This GMS has been notarized under Deed No. 58 of 2023 concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System as in Letter Number AHU-AH.01.03-0073663.		



3. KPPS di Luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 21 Maret 2023

3. KPPS outside the Extraordinary GMS, dated March 21, 2023

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan AZAS TIGOR NAINGGOLAN sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA; Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Direktur : Tuan SAHURDI. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan IWAN TAKWIN; Komisaris : Tuan ROMY BARENO; Komisaris : Tuan AZAS TIGOR NAINGGOLAN. DECIDED, to appoint Mr. AZAS TIGOR NAINGGOLAN as a Commissioner of the Company for a term of 3 (three) years starting from the date this Shareholders' Resolution is signed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time according to the provisions in the Company's articles of association. Thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the date of the Shareholders' Resolution, will be as follows: BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA; Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Director : Mr. SAHURDI. BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Mr. IWAN TAKWIN; Commissioner : Mr. ROMY BARENO; Commissioner : Mr. AZAS TIGOR NAINGGOLAN.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up

*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 01 Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT LRT Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0106501.
*This KPPS has been notarized under Deed No. 01 of 2023 concerning the Statement of Shareholder Resolutions Outside the Meeting of PT LRT Jakarta and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System as in Letter Number AHU-AH.01.09-0106501.

4. KPPS di Luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 17 Juli 2023

4. KPPS Outside the Extraordinary GMS, dated July 17, 2023

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution MEMUTUSKAN, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 16 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, untuk memberhentikan Tuan ROMY BARENO sebagai Komisaris Perseroan dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi Tuan ROMY BARENO kepada Perseroan. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et decharge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions of the Company during the 2022 Fiscal Year	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up.

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA; Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Direktur : Tuan SAHURDI. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan IWAN TAKWIN; Komisaris : Tuan AZAS TIGOR NAINGGOLAN. Consequently, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the date of the Shareholders' Resolution, is as follows: BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA; Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Director : Mr. SAHURDI. BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Mr. IWAN TAKWIN; Komisaris : Mr. AZAS TIGOR NAINGGOLAN.		
Keputusan Ke-2 2nd Resolution MEMUTUSKAN, untuk menerima, mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan pengurusan sesuai dengan anggaran dasar, yang telah dilakukan oleh Tuan ROMY BARENO sejak tanggal 16-04-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, oleh karenanya seluruh tindakan dan/atau kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan selama periode tersebut berlaku mengikat Perseroan. DECIDED, to accept, confirm, and ratify all management actions in accordance with the articles of association, that have been carried out by Mr. ROMY BARENO from the date of April 16, 2021 (April sixteenth, two thousand twenty-one) until the last date the Shareholders' Resolution is signed, and therefore all actions and/or management activities carried out by him during this period are legally binding on the Company. *KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 06 Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT LRT Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0149109. *This KPPS has been notarized under Deed No. 06 of 2023 concerning the Statement of Shareholder Resolutions Outside the Meeting of PT LRT Jakarta and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System as in Letter Number AHU-AH.01.09-0149109	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up
5. KPPS di Luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 5 Oktober 2023		
5. KPPS outside the Extraordinary GMS, dated October 5, 2023		
Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA; Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Direktur : Tuan SAHURDI. Komisaris: Tuan MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-05-1963 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB.10/8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674042105630005, Warga Negara Indonesia.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up



Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
DECIDED to appoint Mr. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO as a Commissioner of the Company for a term of 4 (four) years effective from the date of the last signing of this Shareholders' Resolution, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss him at any time in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the date of the Shareholders' Resolution, is as follows: BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA; Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Director : Mr. SAHURDI. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan IWAN TAKWIN; Komisaris : Tuan AZAS TIGOR NAINGGOLAN; Komisaris : Tuan MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-05-1963 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB.10/8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674042105630005, Warga Negara Indonesia. BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Mr. IWAN TAKWIN; Commissioner : Mr. AZAS TIGOR NAINGGOLAN; Commissioner : Mr. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, born in Yogyakarta on May 21, 1963, residing in South Tangerang City, Puri Bintaro PB.10/8, RT.002, RW.009, Sawah Baru Sub- District, Ciputat District, holder of Identity Card Number 3674042105630005, Indonesian citizen.		
Keputusan Ke-2 2nd Resolution MEMUTUSKAN, untuk menerima, mengesahkan dan memratifikasi segala tindakan pengurusan sesuai dengan anggaran dasar yang telah dilakukan oleh Tuan IWAN TAKWIN selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan SAHURDI selaku Anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua) hingga tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, oleh karenanya seluruh tindakan dan/atau kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan selama periode tersebut berlaku mengikat Perseroan. DECIDED to accept, approve, and ratify all management actions in accordance with the Articles of Association that have been carried out by Mr. IWAN TAKWIN as the President Commissioner of the Company and Mr. SAHURDI as a Member of the Company's Board of Directors from October 7, 2022, until the last date the Shareholders' Resolution is signed, and therefore all actions and/or management activities carried out by him during this period are legally binding on the Company.	V	Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti. Has been realized and followed up
*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 01 Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT LRT Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0182131. *This KPPS has been notarized under Deed No. 01 of 2023 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the Meeting of PT LRT Jakarta and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System as in Letter Number AHU-AH.01.09-0182131		

6. KPPS di luar RUPS Luar Biasa, tertanggal 21 Desember 2023

6. KPPS outside the Extraordinary GMS, dated December 21, 2023

Hasil Keputusan Resolution	Sudah Terlaksana (V)/ Belum Terlaksana (X) Realized (V)/ Unrealized (X)	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow Up by the Management
Keputusan Ke-1 1st Resolution Menyetujui untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2024 sebagaimana Buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 PT LRT Jakarta tanggal 24 November 2023 yang pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approved the ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKA) for the Fiscal Year 2024 as per the Work Plan and Budget (RKA) Book 2024 of PT LRT Jakarta dated November 24, 2023, which implementation still refers to the provisions of applicable laws and regulations.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is directly implemented.
Keputusan Ke-2 2nd Resolution Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan pendalaman serta memberikan persetujuan dalam pelaksanaan realokasi dan/atau reklasifikasi atas kegiatan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana butir 1 di atas, yang pelaksanaannya dilaporkan oleh Direksi Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan pada laporan periodik dan wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta berpedoman pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ <i>Good Corporate Governance</i> . Authorize the Company's Board of Commissioners to conduct an in-depth study and to approve the reallocation and/or reclassification of activities in the Work Plan and Budget (RKA) as stated in point 1 above, which implementation is reported by the Company's Board of Directors to the Company's shareholders in periodic reports and must comply with the provisions of applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and be guided by Good Corporate Governance.	V	Keputusan langsung berlaku. The resolution is directly implemented.

*KPPS ini telah diaktakan dengan Akta No. 33 Tahun 2024 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta

This KPPS has been notarized with Deed No. 33 of 2024 concerning the Statement of Shareholders' Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan perannya sebagai organ pengawasan sesuai dengan *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris yang tertuang dalam dokumen No. LRTJ-MKJ-SPR-002. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus dan memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk memastikan Perseroan telah dikelola berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab serta wewenangnya dengan mengacu pada *Board Manual*. *Board Manual* yang dituangkan dalam dokumen No. LRTJ-MKJ-SPR-002 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2022 ini mengelola hubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Secara khusus terkait Dewan Komisaris yang dimuat pada Bab III *Board Manual* tersebut, maka hal-hal yang diatur antara lain tentang:

1. Persyaratan dan komposisi, keanggotaan dan masa jabatan Dewan Komisaris
2. Program Pengenalan dan Penilaian Kapabilitas
3. Susunan, tugas dan wewenang Komisaris
4. Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris
5. Penilaian Kinerja Dewan komisaris
6. Etika Jabatan Dewan Komisaris
7. Organ pendukung Dewan komisaris

Kriteria Dewan Komisaris

Bertanggung jawab terhadap RUPS, Dewan Komisaris Perseroan ditunjuk dengan memperhatikan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon anggota Dewan Komisaris. Kriteria tersebut meliputi persyaratan formal, persyaratan material dan persyaratan lain. Persyaratan formal berisi kriteria umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan persyaratan material terdiri dari sejumlah kriteria yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan calon anggota Dewan Komisaris:

Persyaratan Dewan Komisaris

1. Persyaratan Formal:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

The Company's Board of Commissioners carries out its role as a supervisory organ based on the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners as outlined in document No. LRTJ-MKJ-SPR-002. The Board of Commissioners is responsible for the general and/or specific implementation of supervisory functions and provides guidance and advice to the Board of Directors to ensure that the Company is managed in accordance with the provisions of the Articles of Association as well as the established vision and mission.

Board of Commissioners' Manual

The Board of Commissioners carries out its duties, responsibilities and authorities by referring to the Board Manual. The Board Manual, which is stipulated in document No. LRTJ-MKJ-SPR-002 and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on June 30, 2022, regulates the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners. Chapter III of the Board Manual specifically regulates the following matters concerning the Board of Commissioners:

1. Requirements and composition, membership and term of office of the Board of Commissioners
2. Introduction and Capability Assessment Program
3. Composition, duties and authorities of the Board of Commissioners
4. Decision-making mechanism of the Board of Commissioners
5. Performance Assessment of the Board of Commissioners
6. Board of Commissioners Ethics
7. Supporting organs of the Board of Commissioners

Board of Commissioners' Criteria

Responsible for the GMS, members of the Company's Board of Commissioners are appointed by considering a number of criteria that must be fulfilled by prospective members of the Board of Commissioners. These criteria include formal requirements, material requirements and other requirements. The formal requirements contain general criteria as stipulated in the applicable laws and regulations, while the material requirements consist of a number of criteria that are determined according to the needs and nature of the Company's business. The following is a more detailed explanation of the requirements for prospective members of the Board of Commissioners:

Board of Commissioners' Requirements

1. Formal Requirements:
 - a. An individual person;
 - b. Indonesian citizen;
 - c. Physically and mentally healthy and free from drugs;

- d. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
- e. Berijazah paling rendah Strata-1 (S -1) atau setingkat;
- f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. Mengajukan permohonan kepada Gubernur; dan
- h. Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

2. Persyaratan Material:

- a. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan Perseroan, yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
- b. Memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
- c. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan;
- d. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya pernah:
 - i. Menjadi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perseroan pailit; dan
 - ii. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Persyaratan Lain:

- a. Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sedang menjabat sebagai Dewan Komisaris periode ke-2 pada Perseroan;
- c. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta apabila diangkat sebagai Dewan Komisaris pada Perseroan;
- d. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Komisaris pada Perseroan; atau
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Aparatur Sipil Negara.

- d. Minimum age of 40 (forty) years old and a maximum of 60 (sixty) years old when proposed or registered for the first time;
- e. Have a degree of at least Bachelor's Degree or equivalent;
- f. Provide sufficient time to carry out their duties;
- g. Submit an application to the Governor; and
- h. Take the Fit and Proper Test (UKK).

2. Material Requirements:

- a. Have sufficient knowledge and expertise in the field of business and/or other fields related to the Company, as evidenced by a curriculum vitae and other supporting documents;
- b. Have integrity, honesty, leadership spirit and competence which is reflected from experience so far;
- c. Have high motivation and dedication to advance and develop the Company;
- d. Understand the implementation of Regional Government;
- e. Understand the management of the Company related to one of the management functions;
- f. Capable of performing legal actions, unless within the last 5 (five) years prior to his appointment, he/she was:
 - i. A member of the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a Regional Owned Company and/or Company to go bankrupt; and
 - ii. Convicted of committing a crime that is detrimental to state/regional finances, Regional Owned Enterprises, Companies, and/or related to the financial sector.

3. Other Requirements:

- a. Not a state official who is prohibited by law;
- b. Not currently serving the 2nd term of the Board of Commissioners of the Company;
- c. Willing to resign from the position of Director of Regional Owned Enterprises, State Owned Enterprises, and/or Private Owned Enterprises if appointed as Board of Commissioners of the Company
- d. Willing to resign from other positions that may cause a conflict of interest if appointed as the Board of Commissioners of the Company; or
- e. Prospective candidates with status as State Civil Apparatus declare that they are willing to follow the applicable laws and regulations regarding State Civil Apparatus.



Merujuk pada huruf c di atas, persyaratan lain yang dimaksud harus dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon anggota Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris menjabat untuk periode yang dijelaskan di bawah ini:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Masa jabatan berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Masa jabatannya berakhir.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - g. Diberhentikan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PP No. 54 Tahun 2017, Pasal 46 Pergub No. 50 Tahun 2018.

Larangan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
2. Dewan Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
3. Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
4. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Komisaris.
5. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf d, tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

Referring to letter c above, criteria in other requirements must be proven by a stamped statement letter from the prospective member of the Board of Commissioners.

Term of Office of the Board of Commissioners

As stipulated in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners, the term of office of the Board of Commissioners is as follows:

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is 3 (three) years, without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time
2. Members of the Board of Commissioners can be reappointed for 1 (one) term of office.
3. The term of office ends when:
 - a. Losing Indonesian citizenship.
 - b. Resigned.
 - c. The term of office ends.
 - d. No longer fulfilling the applicable statutory requirements.
 - e. Died.
 - f. Dismissed based on the resolution of the GMS.
 - g. Dismissed at any time, in accordance with the provisions and procedures as stipulated in Article 46 PP of Government Regulation No. 54 of 2017, Article 46 of Regulation of the Governor No. 50 of 2018.

Prohibition of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is prohibited from engaging in transactions that have a conflict of interest and taking personal advantage from the Company's activities, in addition to the salary and facilities it receives as a member of the Commissioner which is determined by the GMS.
2. The Board of Commissioners is prohibited from holding more than 2 (two) positions as members of the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners is prohibited from holding multiple positions as:
 - a. Members of the Board of Directors in State Owned Enterprises, and/or Private Owned Enterprises;
 - b. Other officials in accordance with the provisions of the laws and regulations; and/or
 - c. Other officials who may give rise to a conflict of interest.
4. Violation of the provisions referred to in letter c, is subject to administrative sanctions in the form of being dismissed from his position as the Board of Commissioners at any time.
5. In the event that the action referred to in letter d is not carried out by the GMS no later than 20 (twenty) working days after the person concerned is appointed to a new position as a member of the Board of Commissioners, the position concerned as the Board of Commissioners is declared ended.

Komposisi Dewan Komisaris

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan susunan. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Berikut susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Composition of the Board of Commissioners

As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Commissioners has not changed. The composition of the Company's Board of Commissioners consists of 3 (three) members with a 3 (three) year term of office, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time. The composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Chronology of Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Assignment Period
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321; - Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 22; - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0066816. - Decisions of Shareholders Outside of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321; - Deed of PKPS PT. LRT Jakarta Number 22; - Letter of Notification Receipt of Change of Company Data PT. LRT Jakarta Number AHU-AH.01.09-0066816.	Periode Ke-1 1 st Period
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023; - Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 April 2023 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0106501. - Decisions of Shareholders Outside of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023; - Deed of PKPS PT. LRT Jakarta Number 01 dated April 3, 2023; - Letter of Notification Receipt of Change of Company Data PT. LRT Jakarta Number AHU-AH.01.09-0106501.	Periode Ke-1 1 st Period
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta no. 001/KPS/123/X/2023; - Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 November 2023 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0182131. - Decisions of Shareholders Outside of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/X/2023; - Deed of PKPS PT. LRT Jakarta Number 01 dated November 3, 2023; - Letter of Notification Receipt of Change of Company Data PT. LRT Jakarta Number AHU-AH.01.09-0182131.	Periode Ke-1 1 st Period

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Sebagaimana diuraikan dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

As outlined in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Board of Commissioners has the following duties, responsibilities, and authorities:



Tugas Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan dan memberikan persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan, termasuk tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perseroan secara tepat waktu dan efisien. Persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan pada hasil kajian atau referensi yang diberikan Direksi.
2. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris, yang merupakan bagian dari RKA Perseroan, untuk selanjutnya mendapat pengesahan RUPS.
3. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
4. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
5. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perseroan.
6. Memberikan tanggapan atau pertimbangan serta persetujuan dan menandatangani Rencana Bisnis Perseroan yang dipersiapkan dan disampaikan oleh Direksi.
7. Memberikan tanggapan atau pertimbangan dan menandatangani RKA.
8. Memberikan tanggapan atau pertimbangan bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
9. Memberikan tanggapan atau pertimbangan atas laporan berkala Direksi serta pada waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
10. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai tanggapan atau pertimbangan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
11. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta telaah terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.
12. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan dan pelaksanaannya.
13. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya.
14. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia, khususnya tentang manajemen dan pengembangan karier di Perseroan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
15. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
16. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
17. Memberikan nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Duties of the Board of Commissioners

1. Supervise the Company's management policies, and provide approval, advice, feedback, or consideration to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities, including regarding important matters regarding changes in the business environment that are expected to impact the Company in a timely and efficient manner. Approval, advice, responses or considerations given by the Board of Commissioners are based on the results of studies or references provided by the Board of Directors.
2. Prepare the annual work plan and budget for the Board of Commissioners, which are part of the Company's Work Plan and Budget, to then obtain approval from the GMS.
3. Carry out the duties, responsibilities, and authorities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the applicable laws and regulations, and/or based on the resolution of the GMS.
4. Act in the interests of the Company and be responsible to the GMS.
5. Monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company.
6. Provide feedback or consideration as well as approval and sign the Company's Business Plan which is prepared and submitted by the Board of Directors.
7. Provide feedback or consideration and sign the RKA.
8. Provide feedback or considerations for the GMS regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors.
9. Provide feedback or considerations on the periodic reports of the Board of Directors, and when necessary regarding the development of the Company.
10. Follow the development of the Company's activities, and in the event that the Company shows symptoms of decline, immediately report to the GMS accompanied by comments or considerations regarding corrective steps to be taken.
11. Supervise and provide advice as well as review the internal control system policies/designs and their implementation.
12. Supervise and provide advice on the Company's information technology system policies and their implementation.
13. Supervise and provide advice on risk management policies and their implementation.
14. Supervise and provide advice on Human Resources management policies, particularly regarding management and career development in the Company, promotion systems and procedures, transfers and demotions in the Company and the implementation of these policies.
15. Supervise and provide advice on accounting policies and preparation of financial reports, in accordance with generally accepted Accounting Standards in Indonesia.
16. Supervise and provide advice on the procurement of goods and services and their implementation.
17. Provide advice on quality and service policies and the implementation of these policies.

18. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
19. Mengawasi pelaksanaan RKA dan Rencana Bisnis.
20. Mengawasi agar Perseroan dalam mengungkapkan informasi penting kepada Pemegang Saham, serta Instansi Pemerintah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
21. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
22. Mengusulkan kepada RUPS, terkait Akuntan Publik selaku Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan.
23. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi kepada RUPS. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite nominasi dan remunerasi.
24. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon anggota Komisaris dan anggota Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite nominasi dan remunerasi.
25. Meminta laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan dari Komisaris yang mengundurkan diri sebagai anggota Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
26. Memastikan bahwa Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
27. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
28. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, integritas, dan kapabilitas.
29. Menetapkan, mematuhi dan menerapkan ketentuan anti penyuapan di lingkungan Perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Khususnya terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam angka 3.4.3. di atas.
2. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang terkait dengan pengurusan dan perkembangan Perseroan kepada Direksi.
3. Menyetujui atau menolak usulan dari Direksi dengan batasan kewenangan Dewan Komisaris.
4. Meminta secara tertulis kepada Direksi untuk memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Auditor Internal.

18. Supervise and monitor the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties.
19. Supervise the implementation of Work Plan and Budget and Business Plan.
20. Conduct supervision to ensure the Company discloses important information to Shareholders, as well as related Government Agencies, in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
21. Carry out other supervisory duties determined by the GMS.
22. Propose to the GMS regarding the public accountant as the External Auditor who will conduct an examination of the Company's financial statements.
23. Propose a performance evaluation system for Commissioners and Directors as well as an appropriate remuneration system for members of the Commissioners and members of the Board of Directors to the GMS. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners may be assisted by the nomination and remuneration committee.
24. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, and submit it to the GMS for approval. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners may be assisted by the nomination and remuneration committee.
25. Request an accountability report on supervisory duties from a Commissioner who resigns as a member of the Board of Commissioners, to be submitted to the GMS.
26. Ensure that the External Auditor as well as the Internal Auditor and the Audit Committee have access to information about the Company in order to carry out their duties.
27. Maintain the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners, in accordance with statutory provisions.
28. Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, fairness, integrity and capability.
29. Establish, comply with, and implement anti-bribery provisions within the Company.

Authorities of the Board of Commissioners

1. Obtain access to Company information in a timely and complete manner. Especially for all information relating to the duties and responsibilities of supervision in point 3.4.3.above.
2. Inquire and ask for clarification on all matters related to the management and development of the Company to the Directors.
3. Approve or reject proposals from the Board of Directors with the limits of the authority of the Board of Commissioners.
4. Request in writing to the Board of Directors to provide information on the results of the examination or the results of carrying out the duties of the Internal Auditor.



5. Membentuk Komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan dari tindakan tersebut.
8. Setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, pendelegasian dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas antar Dewan Komisaris

Sebagaimana dimuat dalam ayat 4 Pasal 12 Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, maka masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki tugas masing-masing yang diatur sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris.

Program Pengenalan bagi Komisaris Baru

Penyelenggaraan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sifatnya adalah wajib. Program pengenalan tersebut diadakan untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, posisi, visi, misi strategi, prinsip GCG, tugas serta peran Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya hingga penjelasan mengenai sistem manajemen yang diadopsi oleh Perseroan.

Perseroan menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk menyelenggarakan program pengenalan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, sehingga anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan baik.

5. Establish a Committee that works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties.
6. If all members of the Board of Directors are suspended, and the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
7. Temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions if the members of the Board of Directors act contrary to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, or neglect their obligations, or there is an urgent reason for the Company. The temporary suspension is notified to the person concerned along with the reasons for the said action.
8. At any time during working hours, the Company's office has the right to enter buildings and courtyards, or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, check and match the condition of cash and other things and has the right to all actions that have been carried out by the Board of Directors.
9. Other authorities stipulated by laws and regulations, the Company's Articles of Association, delegation and/or GMS resolutions.

Segregation of the Board of Commissioners' Duties

As stipulated in paragraph 4 article 12 of the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the duties of each member of the Board of Commissioners is regulated in the Board of Commissioners Manual.

Introduction Program for New Commissioner

The organization of an introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners is mandatory. The introduction program is organized to provide an overview of the Company with regard to its objectives, the nature and scope of its activities, its position, vision, mission, strategy, GCG principles, the duties and roles of the Board of Commissioners and its supporting organs, and an explanation of the management system adopted by the Company.

The Company designates the Corporate Secretary to organize the introduction program no later than 1 (one) month after the appointment of the new members of the Board of Commissioners, so that the members of the Board of Commissioners concerned can carry out their duties and authorities properly.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2024, Perseroan tidak mengadakan program pengenalan dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Komisaris baru.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan memahami pentingnya peningkatan kapabilitas bagi anggota Dewan Komisaris agar anggota dewan dapat memperbarui informasi terkini terkait *core business* Perseroan dan mampu memberikan masukan yang konstruktif terhadap jalannya kepengurusan perusahaan. Untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, maka di tahun 2024 Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang dijelaskan berikut ini:

The introduction program can be provided in the form of presentation, meeting, and visitation to business units, facilities of the Company, review of Company documents or other programs that are considered relevant.

In 2024, the Company did not hold an introduction program because there was no appointment of new members of the Board of Commissioners.

Competency Development Program for the Board of Commissioners

The Company realizes the importance of improving the capabilities of the Board of Commissioners so that they can keep up to date with the Company's core business and provide constructive input on the management of the Company. To support the implementation of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners participated in a number of competency development activities in 2024, as detailed below:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal/Tempat Date/Venue
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	Certified Risk Executive Leader (CREL)	25 Maret 2024 – 15 Mei 2024/Jakarta March 25, 2024 – May 15, 2024/Jakarta
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	Certified Risk Executive Leader (CREL)	25 Maret 2024 – 15 Mei 2024/Jakarta March 25, 2024 – May 15, 2024/Jakarta
		Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	10 – 11 Juli 2024/Yogyakarta July 10 – 11, 2024/ Yogyakarta
		"Leadership For Sustainable Impact: GRC, ESG and SDGs"	22 – 23 Agustus 2024, Yogyakarta August 22 – 23, 2024, Yogyakarta
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage National Conference of Risk Management Professionals X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage	12 – 13 Desember 2024, Bali December 12 – 13, 2024, Bali
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta, 2024
		Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	10 – 11 Juli 2024/Yogyakarta July 10 – 11, 2024/ Yogyakarta
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage National Conference of Risk Management Professionals X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage	12 – 13 Desember 2024, Bali December 12 – 13, 2024, Bali



Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Berikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris:

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Melakukan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali Hold 12 joint-meetings with the Board of Directors	Pelaksanaan rapat gabungan dengan Direksi terlaksana sebanyak 11 kali Held 11 joint-meetings with the Board of Directors
Melaksanakan observasi/site visit progress konstruksi fase 1B sebanyak 2 kali dalam setahun Conduct observation/site visit of the phase 1B construction programs twice a year	Pelaksanaan observasi/site visit progres 1 B sebanyak 2 kali Conducted observation/site visit of the phase 1B construction programs twice a year
Memberikan arahan dan telaah tertulis melalui korespondensi internal kepada Direksi sebagai saranan pemberian umpan balik/ masukkan dalam penerapan GRC sebanyak 6 kali dalam setahun Provide direction and written review through internal correspondence to the Board of Directors as a media to provide feedback/input in the implementation of GRC 6 times a year	Arahan dan telaah tertulis diberikan sebanyak 24 kali dalam setahun Directions and written reviews have been provided 24 times a year
Melakukan rapat antara Komite Komisaris dengan Divisi/ Departemen lain terkait fungsi tertentu sebanyak 6 kali dalam setahun Hold meetings of the Board of Commissioners with other Divisions/Departments related to certain functions 6 times a year	Pelaksanaan rapat antara Komite Komisaris dengan Divisi/ Departemen lain terkait fungsi tertentu dilakukan sebanyak 19 kali Held 19 meetings of the Board of Commissioners with other Divisions/Departments related to certain functions
Mengikuti pelatihan/sertifikasi terkait isu GRC sebanyak 1 kali dalam setahun Attend trainings/certifications related to GRC issue once a year	Pelatihan terkait isu GRC dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun Trainings related to GRC issue have been held 4 times a year

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kepengurusan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit mengemban tugas dan fungsi yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait kepengurusan oleh Direksi secara optimal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang profesional dan independen.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties in 2024

Throughout 2024, the Company's Board of Commissioners has carried out a number of activities as part of its duties and responsibilities. The following are the activities carried out by the Board of Commissioners:

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory duties over the management and implementation of corporate governance, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Audit Committee carries out duties and functions that are expected to optimally support the implementation of supervisory and advisory functions related to management carried out by the Board of Directors by providing professional and independent information and recommendation.

Terhadap pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas penerapan program/rencana kerja Komite Audit sesuai *Key Performance Indicators* (KPI) yang merupakan tolok ukur kinerja Komite Audit pada tahun anggaran 2024. KPI ini disusun berdasarkan kondisi riil yang diperkirakan akan sanggup dicapai oleh Komite Audit, yaitu:

Regarding the implementation of these duties, the Board of Commissioners considers that the Audit Committee has carried out its work program/plan according to the Key Performance Indicators (KPI) which is the main indicators of the Audit Committee's performance in 2024 budget year. The KPI is prepared based on real conditions that are expected to be achieved by the Audit Committee, including:

No.	Keterangan Description	KPI	Bobot (%) Weight (%)	Capaian Achievement
1.1 Aspek Sistem Pengendalian Internal 1.1 Internal Control System Aspect			50	
1	Review Penyempurnaan dan Pelaksanaan Review of Completion and Implementation	6 Kali 6 times	10	12
2	Rapat Komite Audit: Audit Committee Meetings:			
	Jumlah Rapat (Audit Internal/Dewan Komisaris/BOD-BOC) Number of Meetings (Internal Audit/Board of Commissioners/BOD-BOC)	12 Kali 12 times	10	30
	Kehadiran dalam Rapat Attendance at Meetings	100%	10	100%
3	Memberi Nasihat/Saran kepada Audit Internal Giving Advice/Suggestions to Internal Audit			
	Jumlah (Minimal) Amount (Minimum)	2 Kali 2 times	15	2
2.1 Aspek Pelaporan 2.1 Reporting Aspect			30	
1	Menyusun Program Kerja Komite Audit Developing the Audit Committee Work Programs	1 Kali 1 time	10	1
2	Menyampaikan Pendapat/Saran Kepada Dewan Komisaris Delivering Opinions/Suggestions to Board of Commissioners	1 Kali 1 time	10	11
3	Menyampaikan Laporan Komite Audit Submitting the Audit Committee Reports	2 Kali 2 times	10	6
3.1 Aspek Dinamis 3.1 Dynamic Aspect			20	
1	Telaah (<i>Self Assessment</i>) Kinerja Komite Audit Performance Review (<i>Self-Assessment</i>) of the Audit Committee	1 Kali 1 time	10	1
2	Peran dalam Peningkatan Kinerja: Role in Performance Improvement:			
	GCG	85%	10	91,0%

Pada tahun 2024, hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap pemenuhan KPI Komite Audit tersebut adalah memenuhi aspek-aspek kinerja.

In 2024, the Board of Commissioners' assessment of the Audit Committee's KPI fulfillment indicated that the performance aspects had been fulfilled.



Direksi

Board of Directors

Direksi Perseroan merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan, baik secara kolegal maupun individu, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta *best practices* yang berlaku di industri. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman Direksi

Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai *Board Manual* yang menjadi pedoman Direksi untuk melakukan pengelolaan Perusahaan. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2022 mengatur tentang hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Umum
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Susunan, Tugas dan Wewenang Komisaris
5. Hak Direksi
6. Mekanisme Rapat Direksi dan Pengambilan Keputusan
7. Penilaian Kinerja Direksi
8. Etika Jabatan Direksi
9. Fungsi Struktural Direksi

Kriteria Direksi

Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Direksi Perseroan harus memenuhi sejumlah kriteria untuk dapat diangkat sebagai calon anggota Direksi yang meliputi persyaratan formal, persyaratan material, dan persyaratan lain. Persyaratan formal tersebut terdiri dari kriteria umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan persyaratan material termasuk kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Berikut penjelasan persyaratan kriteria Direksi sebagaimana dimuat *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris:

1. Persyaratan Formal
Individu yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang dapat menjadi anggota Direksi, sebagai berikut:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI);

The Company's Board of Directors is an organ that has full authority and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company, and in accordance with the Company's aims and objectives. The Board of Directors carries out the Company's management duties collegially and individually, by upholding the principles of good corporate governance and industry best practices. The Board of Directors has the right to represent the Company both inside and outside the court on all matters and events with the limitations as stipulated in the Company's Articles of Association, laws and regulations, and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Board of Directors' Manual

The Company's Board of Directors carries out its duties and responsibilities in accordance with the Board Manual, which serves as a guideline for the Board of Directors in managing the Company. The Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners, which was signed on June 30, 2022, regulates the following matters:

1. General Policies
2. Requirements and Composition, Membership and Term of Office of the Board of Directors
3. Introduction and Capability Improvement Program
4. Composition, Duties and Authorities of the Board of Commissioner
5. Rights of the Board of Directors
6. Mechanism of Board of Directors Meetings and Decision Making
7. Performance Appraisal of the Board of Directors
8. Board of Directors Ethics
9. Structural Functions of the Board of Directors

Board of Directors' Criteria

Appointed and dismissed by the GMS, the Company's Board of Directors must meet a number of criteria to be appointed as a candidate for a member of the Board of Directors, which includes formal requirements, material requirements, and other requirements. The formal requirements consist of general criteria in accordance with applicable laws and regulations, while the material requirements include criteria tailored to the needs and nature of the Company's business. The following is an explanation of the requirements for the Board of Directors criteria as contained in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners:

1. Formal Requirements
Individuals who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions. Therefore, those who can become members of the Board of Directors are as follows:
 - a. An individual person;
 - b. Indonesian citizens (WNI);

- c. Sehat secara jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- d. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Direksi;
- e. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau setingkat;
- f. Menyampaikan Surat Permohonan (lamaran) kepada Gubernur; dan
- g. Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

2. Persyaratan Material

Persyaratan material Direksi, sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang usaha Perseroan.
- b. Memiliki integritas, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini.
- c. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
- d. Memiliki pengalaman kepemimpinan dalam sebuah unit usaha minimal 5 (lima) tahun di bidang yang sesuai dengan Perseroan.
- e. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - i. Menjadi Direksi atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perseroan dinyatakan pailit; dan
 - ii. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi, sebagai berikut:

- a. Bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
- b. Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- d. Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada Perseroan;
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

- c. Physically and mentally healthy and free from narcotics;
- d. Minimum age of 35 (thirty five) years old and a maximum of 55 (fifty five) years old, at the time of submission or self-proposed as a member of the Board of Directors;
- e. Minimum education of Bachelor's Degree (S1) or equivalent;
- f. Submit a letter of application (application) to the Governor; and
- g. Take the Fit and Proper Test (UKK).

2. Material Requirements

The material requirements of the Board of Directors are as follows:

- a. Have knowledge and expertise in the Company's business sector.
- b. Have integrity, leadership spirit and competence which is reflected from experience so far.
- c. Have high motivation and dedication to advance and develop the Company.
- d. Have leadership experience in a business unit for a minimum of 5 (five) years in a field that suits the Company.
- e. Capable of performing legal actions, unless within 5 (five) years prior to his appointment, he/she was:
 - i. A member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are found guilty of causing a Regional Owned Enterprise and/or company to be declared bankrupt; and
 - ii. Convicted of committing a crime that caused losses to state/regional finances, regionally owned enterprises, companies and/or those related to the financial sector.

3. Other Requirements

Other requirements for the Board of Directors are as follow:

- a. Not a member and/or administrator of a political party and/or a candidate for a member of the legislature and/or a member of the legislature;
- b. Not a state official who is prohibited by law;
- c. Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head;
- d. Not currently serving as a Director for 2 (two) periods in the Company;
- e. Prospective candidates with the status of State Civil Apparatus must declare that they are willing to follow the applicable laws and regulations related to State Civil Apparatus.



Masa Jabatan Direksi

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, masa jabatan Direksi Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil keputusan di luar RUPS untuk mengangkat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - f. Diberhentikan sewaktu-waktu, yang wajib disertai dengan alasan pemberhentian tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 dan Pergub No. 5 Tahun 2018.
5. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Gubernur dapat mengangkat Direksi sementara sampai diangkatnya pejabat Direksi yang definitif, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Pengangkatan sementara anggota Direksi paling lama untuk 3 (tiga) bulan.
6. Dalam hal pengangkatan Direktur dan/atau Komisaris anak perusahaan BUMD masih dalam proses persetujuan Gubernur, Direktur dan/atau Komisaris anak Perusahaan BUMD diangkat secara definitif oleh RUPS anak perusahaan BUMD, sekurang-kurangnya sampai diterbitkannya persetujuan oleh Gubernur DKI Jakarta.
7. Dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Bagi anggota Direksi yang karena masa jabatannya berakhir, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, wajib menyusun laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan. Terhadap sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan, wajib dilaporkan.

Term of Office of the Board of Directors

As regulated in the Board Manual, the term of office of the Company's Board of Directors is as follows:

1. Members of the Board of Directors are appointed for a certain period of time and can be reappointed.
2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 4 (four) years without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time.
3. In certain circumstances, the Governor may make a decision outside the GMS to appoint the Board of Directors in accordance with the provisions of the laws and regulations.
4. The position of a Member of the Board of Directors ends when:
 - a. The term of office ends;
 - b. Resigned;
 - c. No longer fulfilling statutory requirements;
 - d. Died;
 - e. Dismissed based on the decision of the GMS; and
 - f. Dismissed at any time, which must be accompanied by reasons for dismissal, without prejudice to provisions regarding the procedure for dismissal as stipulated in Government Regulation No. 54 of 2017 and Regulation of the Governor No. 5 of 2018.
5. In the event that the position of a member of the Board of Directors ends as referred to in letter d, the Governor may appoint a temporary Board of Directors until a definitive member of the Board of Directors is appointed, unless otherwise stipulated in the Company's Articles of Association or Regional Regulations governing Regionally Owned Enterprises. Temporary appointment of members of the Board of Directors is for a maximum of 3 (three) months.
6. In the event that the appointment of the Director and/or Commissioner of a BUMD subsidiary is still in the process of being approved by the Governor, the Director and/or Commissioner of a BUMD is definitively appointed by the GMS of a BUMD subsidiary, at least until approval is issued by the Governor of DKI Jakarta.
7. With due observance of the Company's Articles of Association, if for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy and taking into account the provisions of laws and regulations and Company Articles of Association.
8. If for any reason all the positions of members of the Board of Directors are vacant, then for the time being the Company is managed by members of the Board of Commissioners who are appointed by the meeting of the Board of Commissioners.
9. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons with written notification to the member of the Board of Directors concerned.
10. For members of the Board of Directors whose term of office ends, 3 (three) months prior to the end of their term of office, they are required to prepare a report on the management of end of term assignments. Regarding the remaining implementation of management duties that have not been reported, no later than 1 (one) month after the end of the term of office, it is mandatory reporting.

11. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud huruf i di atas, Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS, sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.
12. Apabila terjadi perubahan susunan anggota Direksi karena pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, maka Perseroan wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada penolakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap setiap permohonan yang dilakukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

Komposisi Direksi

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan susunan. Komposisi anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan masa jabatan 4 (empat) tahun namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. Berikut susunan anggota Direksi Perseroan:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Assignment Period
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	Akta PKPS No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed of PKPS No. 1 dated January 3, 2022	Periode ke-1 1 st Period
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 22 tahun 2022 Deed of PKPS of PT LRT Jakarta No. 22 of 2022	Periode ke-1 1 st Period
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operation and Development	Akta PKPS No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed of PKPS No. 1 dated January 3, 2022	Periode ke-1 1 st Period

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolegal dan individu. Berikut penjabaran tugas dan tanggung jawab Direksi:

11. Based on the report on management of the final term of office as referred to in letter i above, the Board of Commissioners is required to submit an assessment and recommendation on the performance of the Board of Directors to the GMS, as a basis for the consideration of the GMS to extend or dismiss members of the Board of Directors. Reports on the management of the final assignments of members of the Board of Directors whose term of office ends is carried out after the results of an audit with a specific purpose or an annual audit from a public accounting firm and submitted to the annual GMS.
12. If there is a change in the composition of the members of the Board of Directors due to appointment, replacement and dismissal, the Company is required to notify the change in members of the Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights to be recorded in the register of the Company within a period of no later than 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS. If the notification has not been made, it may result in the rejection of the Minister of Law and Human Rights of any requests made or notifications submitted from companies that have not been recorded in the list of companies.

Board of Directors' Composition

As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Directors did not change. The Board of Directors composition consists of 3 (three) members with 4 (four) years term of office, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at anytime. The following is the composition of the Board of Directors of the Company:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Company's Board of Directors carries out its duties and responsibilities collegially and individually. The following are the duties and responsibilities of the Board of Directors:



A. Tugas dan wewenang kolegal Direksi, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan visi, misi dan strategis Perseroan.
- 2) Menyusun Rencana Bisnis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai rencana bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- 3) Menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKA yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- 4) Menjalankan Program Kerja sesuai dengan RKA yang sudah ditetapkan/disahkan dengan tetap mengacu pada Rencana Bisnis.
- 5) Menetapkan struktur/susunan organisasi Perseroan sesuai kebutuhan, dengan penetapan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan.
- 6) Menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perseroan.
- 7) Menetapkan sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan.
- 8) Menetapkan target kinerja berdasarkan RKA dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
- 9) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi.
- 10) Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perseroan.
- 11) Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perseroan yang ditinjau dan disempurnakan secara berkala.
- 12) Memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan, penghematan/efisiensi Perseroan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
- 13) Merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.
- 14) Menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 15) Melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan, dengan menetapkan kebijakan, SOP serta Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 16) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perseroan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
- 17) Menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perseroan (*subsidiary governance*) dan/atau Perseroan patungan.

A. The collegial duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

- 1) Determine the vision, mission and strategy of the Company.
- 2) Prepare a Business Plan containing goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The Board of Commissioners reviews and provides opinions regarding the business plan prepared by the Board of Directors prior to co-signing.
- 3) Prepare Work Plan and Budget, which is an annual elaboration of the Business Plan. The Board of Commissioners reviews and provides opinions regarding the Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors prior to co-signing.
- 4) Execute the Work Program in accordance with the Work Plan and Budget that has been determined/ approved by still referring to the Business Plan.
- 5) Determine the structure/organizational structure of the Company as needed, with assignments, obligations, and responsibilities for each position.
- 6) Place employees at all levels of positions according to job specifications and having a succession plan for all positions within the Company.
- 7) Establish a system/guideline for measuring and evaluating performance for units and positions (structural) that is applied objectively and transparently.
- 8) Set performance targets based on the Work Plan and Budget and cascade down in stages at the unit, sub-unit and position levels within the organization (structural) in the organization.
- 9) Perform analysis and evaluation of performance achievements for positions/units under the Board of Directors.
- 10) Develop HR, assess performance and provide appropriate remuneration, and build an HR environment that effectively supports the Company's achievements.
- 11) Establish operational policies and Standard Operating Standards (SOP) for the Company's core business processes which are regularly reviewed and refined.
- 12) Respond to proposed business opportunities that have the potential to increase the Company's revenue, the Company's savings/efficiency, asset utilization, and other benefits.
- 13) Respond to current issues from external sources regarding changes in the business environment and their problems, in a timely and relevant manner.
- 14) Implement a system of information technology in accordance with established policies.
- 15) Implement a product and service quality improvement system, by establishing policies, SOPs, and Minimum Service Standards (SPM).
- 16) Carry out the procurement of goods and services that are profitable for the Company, both in terms of price and quality of these goods and services.
- 17) Establish regulatory policies for subsidiary companies (subsidiary governance) and/or joint venture companies.

- 18) Menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
 - 19) Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 20) Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perseroan.
 - 21) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
 - 22) Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - 23) Menetapkan pelaksanaan hubungan dengan *stakeholders* termasuk menetapkan prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*.
 - 24) Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan operasi Perseroan.
 - 25) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
 - 26) Membuat dan menyampaikan laporan, yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan triwulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS untuk disahkan, informasi dalam laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
 - 27) Mengelola Perseroan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham/pemilik modal.
 - 28) Memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.
 - 29) Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - 30) Menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - 31) Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajiban, integritas dan kapabilitas, serta nilai-nilai Perseroan.
 - 32) Membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
 - 33) Memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- 18) Establish accounting policies and preparation of financial reports in accordance with generally accepted financial accounting standards in Indonesia (SAK).
 - 19) Implement risk management in accordance with established policies.
 - 20) Establish and implement an internal control system to protect the Company's investments and assets.
 - 21) Follow up on the results of examination by the Internal Auditor and External Auditor.
 - 22) Establish mechanisms to maintain compliance with laws and regulations, and agreements with third parties, and carry out applicable laws and regulations and agreements with third parties.
 - 23) Determine the implementation of relations with stakeholders including establishing written procedures to accommodate and follow up on stakeholder complaints.
 - 24) Carry out social responsibility to support the sustainability of the Company's operations.
 - 25) Establish policies regarding mechanisms for the Board of Directors and structural officials to prevent personal and other parties from taking advantage due to conflicts of interest.
 - 26) Prepare and submit reports, which consist of monthly reports, quarterly reports and annual reports. Monthly and quarterly reports consist of operational activity reports and financial reports submitted to the Board of Commissioners. The annual report is submitted to the GMS for approval, the information in the annual report is in accordance with the applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
 - 27) Manage the Company and be accountable for the implementation of their duties to Shareholders/capital owners.
 - 28) Provide equal treatment (*fairness*) in providing information to Shareholders and members of the Board of Commissioners.
 - 29) Organize GMS in accordance with the procedures stipulated in the Company's Articles of Association, and laws and regulations.
 - 30) Provide access as well as complete explanation and accurate information regarding the implementation of the GMS so that they can exercise their rights based on the Company's Articles of Association and laws and regulations.
 - 31) Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, integrity and capability, as well as the values of the Company.
 - 32) Create and maintain a register of Shareholders, a Special Register, minutes of GMS and minutes of meetings of the Board of Directors.
 - 33) Give permission to Shareholders to examine the list of Shareholders, Special Register, GMS minutes and annual reports and obtain copies of the GMS minutes and annual reports.



- 34) Menandatangani kontrak manajemen sebagai perjanjian Direksi dengan Pemegang Saham mengenai peran dan tanggung jawabnya.
 - 35) Menandatangani ikatan hukum dengan rekan bisnis.
 - 36) Meminta persetujuan RUPS dalam hal melakukan kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroan berupa tanah dan/atau bangunan, dengan skema kerja sama operasi dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - 37) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - ii. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut.
 - 38) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
 - 39) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 38 di atas, berlaku juga bagi anggota Direksi yang lalai dan sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun terakhir sebelum Perseroan dinyatakan pailit.
 - 40) Mengatur pendelegasian wewenang Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
 - 41) Dapat bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS tidak ditetapkan atau menunjuk likuidator dalam pembubaran Perseroan.
 - 42) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
 - 43) Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab implementasi GCG.
 - 44) Menerapkan GCG, *Risk Management* dan *Compliance* terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
 - 45) Menerapkan pengendalian anti penyuapan sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan, secara konsisten dan berkelanjutan.
 - 46) Menerapkan pengendalian sistem manajemen lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Perseroan.
- 34) Sign a management contract as an agreement between the Board of Directors and Shareholders regarding their roles and responsibilities.
 - 35) Sign a legal bond with a business partner.
 - 36) Request approval from the GMS in terms of carrying out cooperation in the form of utilizing fixed assets owned by the Company in the form of land and/or buildings, with a joint operation scheme and cooperation for a period of more than 10 (ten) years.
 - 37) Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is proven negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
 - i. The loss was not due to his/her fault or negligence.
 - ii. Has conducted management in good faith, and prudence for the benefit, and in accordance with the goals and objectives of the Company.
 - iii. Does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses
 - iv. Has taken action to prevent the loss.
 - 38) In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors, and the Company's assets are not sufficient to cover losses due to the bankruptcy, each member of the Board of Directors is jointly and collectively responsible for the said loss.
 - 39) The responsibility referred to in number 38 above also applies to members of the Board of Directors who are negligent and have not served for the last 5 (five) years before the Company was declared bankrupt.
 - 40) Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company inside and outside of Court, to one or several Directors who are specifically appointed or give power of attorney to one or several employees of the Company, either alone or jointly or to other bodies.
 - 41) Can act as a liquidator if the GMS resolution does not stipulate or appoint a liquidator in the dissolution of the Company.
 - 42) Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association, or determined by the GMS and laws and regulations.
 - 43) Appoint a member of the Board of Directors as the person in charge of GCG implementation
 - 44) Implement integrated GCG, Risk Management and Compliance in a consistent and sustainable manner.
 - 45) Implement anti-bribery controls in accordance with the established management system, consistently and continuously.
 - 46) Implement other management system controls according to the needs and interests of the Company.

- 47) Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi yang dibahas secara intens dalam Rapat Direksi.

B. Pendelegasian Wewenang Direksi

- 1) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 3) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang mendapat penunjukan secara tertulis dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah anggota Direksi yang memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan dalam melaksanakan tindakan atau kewenangan tersebut, sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah dan/atau mendapat penunjukan secara tertulis dari Direktur Utama.
- 4) Ketentuan angka 3. di atas, berlaku juga untuk anggota Direksi lain, yang karena sebab apapun juga, tidak hadir atau berhalangan, maka anggota Direksi tersebut dapat menunjuk anggota Direksi lainnya untuk mewakili, sebatas kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah.
- 5) Dalam hal angka 3. di atas, Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, tanpa pemberitahuan dan/atau informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, karena sebab apapun juga yang dalam pelaksanaannya dinilai dan dapat dibuktikan oleh seluruh anggota Direksi dapat menghambat kinerja Perseroan, maka terhadap hal tersebut, wajib dibahas dalam rapat bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat diputuskan, Direktur yang berwenang menjadi pelaksana tugas sementara Direktur Utama.
- 6) Dalam hal angka 5. di atas, terjadi pada Direktur selain Direktur Utama, maka yang berwenang mewakili Direktur tersebut adalah Direktur Utama.
- 7) Pendelegasian angka 3. dan 4. di atas, khusus melalui penunjukan tertulis, harus melalui mekanisme formal sesuai dengan ketentuan surat-menyurat Perseroan.

- 47) Discuss and give approval for plans for promotion, and transfer of one level of position under the Board of Directors, which are discussed intensely at the Board of Directors Meeting.

B. Delegation of Authorities of the Board of Directors

- 1) The Board of Directors has the authority to represent the Company, inside and outside the Court, and perform all actions, both regarding management and regarding ownership, as well as binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, with restrictions in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and/or GMS resolution. The GMS can reduce the limitations on the actions of the Board of Directors that are regulated in the Company's Articles of Association, or determine other restrictions on the Board of Directors other than those regulated in the Company's Articles of Association.
- 2) The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
- 3) In the event that the President Director is absent or unavailable for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party, then another member of the Board of Directors who has been appointed in writing by the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company. The Board of Directors who has the authority to represent the Company in carrying out these actions or powers, in accordance with the division of duties and authorities as stipulated in number 2.4.3. under and/or obtain a written appointment from the President Director.
- 4) Provisions in point 3 above also apply to other members of the Board of Directors, who for whatever reason are absent or unable to attend, the concerned member of the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors to represent, to the extent of his authority, as stipulated in point 2.4. 3. below.
- 5) In the case of point 3 above, the President Director is absent or unable to attend, without notification and/or information no later than 3 (three) working days, due to any reason, which in its implementation is assessed and can be proven by all members of the Board of Directors may hinder the Company's performance, then regarding this matter, must be discussed in a joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners, to decide the Director who is authorized to act as executor of the President Director's temporary duties.
- 6) In the event that point number 5 above occurs to a Director other than the President Director, then the person authorized to represent the Director is the President Director.
- 7) Delegation of numbers 3 and 4 above, specifically through a written appointment, must go through a formal mechanism in accordance with the provisions of the Company's correspondence.



- 8) Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi juga berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud seorang atau lebih adalah pihak yang berasal dari internal Perseroan atau eksternal Perseroan, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan perbuatan tertentu dengan syarat yang ditentukan Direksi.
- 9) Pemberi delegasi tetap bertanggung jawab terhadap hasil akhir, sehingga pemberi delegasi harus memastikan anggota Direksi yang diberikan delegasi merupakan Direksi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan tindakan yang didelegasikan tersebut, serta yang didelegasikan harus dengan itikad baik dan profesional, melakukan sebagian atau seluruh tugas dan kewenangan yang diberikan tersebut. Apabila ternyata/dibuktikan pelaksanaan delegasi dilakukan tidak sesuai ketentuan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima delegasi.
- 10) Terdapat 2 (dua) bentuk pelaksanaan jabatan, dalam pendelegasian angka 3) dan 4), yaitu:
- Jabatan Pelaksana Harian (Plh) didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Contoh oleh karena melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau definitif lain yang serupa.
 - Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat defi yang berhalangan tetap, oleh karena berakhirnya masa jabatan.

Terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, maka dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut dilakukan tanpa pendelegasian, sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah.

- 11) Pendelegasian wajib mempertimbangkan benturan kepentingan terhadap dampak transaksi.

Contoh:

Apabila dalam suatu aktivitas/kegiatan/proyek, yang wajib menandatangani persetujuan pembayaran pengeluaran uang adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan, maka pada saat Direktur Utama berhalangan oleh sebab apapun dan memberikan pendelegasian kepada pejabat sementara. Pejabat sementara sebagai pengganti Direktur Utama, tidak dapat diberikan kepada Direktur Keuangan.

- 8) Without reducing the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors is also entitled to certain actions by appointing one or more proxies, with conditions specified by the Board of Directors in a special power of attorney. The authority given must be carried out in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. What is meant by one or more proxies are those coming from the Company's internal or external, who have the capacity and capability to carry out certain actions with conditions determined by the Board of Directors.
- 9) The principal remains responsible for the final results, so the delegation must ensure that the members of the Board of Directors who are delegated are Directors who have the capacity and capability to carry out the delegated actions, and those who are delegated must be in good faith and professional, carry out some or all of the tasks and the powers conferred. If it is proven that the implementation of the delegation was carried out not in accordance with internal regulations and/or applicable laws and regulations, then it is the full responsibility of the proxy/ies.
- 10) There are 2 (two) forms of position execution, in the delegation of point numbers 3) and 4), namely:
- The position of Daily Executor (Plh) is delegated to officials who carry out routine tasks from definitive officials who are temporarily absent, for example due to making official visits to regions or abroad, attending education and training/courses, taking leave, performing the pilgrimage, being treated for illness, or other similar definitive.
 - The Position of Acting Officer (Plt) is delegated to officials who carry out the routine duties of definitive officials who are permanently absent due to the end of their term of office.

Regarding the duties, authorities and responsibilities that have been determined as the duties, authorities and responsibilities of each member of the Board of Directors, then in carrying out the duties, authorities, and responsibilities it is carried out without delegation, as stipulated in point 2.4.3. below.

- 11) The delegation shall consider the conflict of interest on the impact of the transaction.

Example:

If in an activity/activities/project, the President Director and the Director of Finance are required to sign the agreement for payment of money, and the President Director is absent for any reason and delegates to a temporary official, it cannot be assigned to the Director of Finance.

Hak Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai hak-hak yang diatur lebih lanjut dalam *Board Manual* PT LRT Jakarta, yaitu di antaranya:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan termasuk memberikan informasi kepada publik.
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta tindakan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan sesuai batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk.
7. Menerima penghasilan (gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan) yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
8. Memperoleh hak cuti yang ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Direksi. Cuti Direktur Utama harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sedangkan bagi Direksi lainnya harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama. Khusus Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Dewan Komisaris.
9. Memberlakukan kebijakan khusus (*extraordinary*) dalam hal Perseroan berada pada suatu keadaan darurat.
10. Mengundurkan diri dari jabatannya, dengan tetap mengacu pada butir 2.2.3. di atas.
11. Mendapatkan program pengenalan tentang Perseroan, dengan tetap mengacu pada butir 2.3.1. di atas.

Pembidangan dan Uraian Tugas Direksi

Selain melaksanakan tugas kolegal, Direksi juga menjalankan tugas dan tanggung jawab individu sesuai departemen yang dipimpinnya. Berdasarkan *Board Manual*, maka ruang lingkup dan tanggung jawab individu Direksi adalah sebagai berikut:

Rights of the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the rights of the Board of Directors are stipulated in the Board Manual of PT LRT Jakarta, which include:

1. Represent the Company inside and outside the court, including providing information to the public.
2. Carry out all actions and deeds, both regarding management and ownership, as well as actions that bind the Company to other parties and/or other parties to the Company, in accordance with certain predetermined limits.
3. Establish policies in leading and managing the Company.
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment, including the determination of salaries, pensions or old age benefits, and other income for the Company's employees based on the applicable laws and regulations.
5. Appoint and dismiss employees of the Company based on Company Regulations and applicable laws and regulations.
6. Arrange the transfer of powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed.
7. Receive income (salary, benefits, facilities, and/or bonuses, or work incentives), the amount of which is determined by the GMS, and this authority can be delegated to the Commissioners.
8. Obtain the right to leave of which further provisions are determined by the Board of Directors. The President Director's leave must obtain approval from the Board of Commissioners, while other Directors must obtain the approval of the President Director. Specifically, for Directors who are going to travel overseas, they must obtain permission from the Board of Commissioners.
9. Implement special (*extraordinary*) policies in the event that the Company is in an emergency.
10. Resign from his position, while still referring to point 2.2.3. above.
11. Receive an introduction program about the Company, with reference to point 2.3.1. above.

Segregation and Job Description of the Board of Directors

Other than carrying out collegial duties, the Board of Directors also carries out individual duties and responsibilities according to their departments. Based on the Board of Manual, the individual scope of duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:



Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
Direktur Utama	- Menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjamin keberlangsungan bisnis Perusahaan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku serta berasaskan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). - Disamping itu, Direktur Utama bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Utama (<i>Main Directorate</i>). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Utama berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. - Bertugas mengarahkan dan memastikan jalannya Perseroan sesuai visi, misi dan rencana strategis jangka panjang Perseroan serta mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	- Tanggung Jawab - Menetapkan kebijakan strategis Perseroan yang mencakup seluruh aktivitas Perseroan; - Koordinasi fungsi-fungsi korporat untuk hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi, pengendalian modal dan alokasi sumber daya serta hubungan pihak luar; - Penetapan arah, kebijakan, strategi dan rencana strategis serta pengendalian pengelolaan bisnis perkeretaapian <i>Light Rail Transit</i> di area DKI Jakarta dan mengarahkan upaya pertumbuhan dengan fokus pada bisnis baru, sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan; - Perumusan strategi bisnis yang dilakukan bersama dengan pemangku jabatan kunci, penetapan dan pengendalian implementasinya; - Pengendalian dan koordinasi (secara langsung), penyelenggaraan fungsi seluruh divisi yang berada dibawah Direktorat Utama; - Memonitor pengelolaan pengembangan citra Perseroan dan komunikasi di dalam dan ke luar Perseroan; - Memberikan persetujuan rencana audit tahunan; - Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perseroan; - Menetapkan budaya Perseroan yang sejalan dengan <i>strategic formulation</i> perusahaan yang berupa visi, misi dan nilai perusahaan; - Memastikan dijalankannya praktek pengelolaan Perusahaan yang penuh kehati-hatian sesuai ketentuan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik untuk menjamin kelangsungan organisasi; - Memastikan pengelolaan perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis Perusahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program strategis Perusahaan; - Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan; - Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian; dan - Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
President Director	- Carry out the Company's management activities in accordance with the Company's aims and objectives to ensure the continuity of the Company's business based on applicable laws and regulations and based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). - In addition, the President Director is responsible for the organization and management of the Main Directorate. In carrying out its duties and responsibilities, the President Director has the authority to determine the Company's management policies within the scope of his duties and responsibilities. - Responsible for directing and ensuring the Company's operations in accordance with the Company's vision, mission and long-term strategic plan, and complying with the principles of good corporate governance.	- Responsibilities - Determine the Company's strategic policies covering all of the Company's activities; - Conduct coordination of corporate functions on matters related to setting policies and strategies, controlling capital, and allocating resources as well as external relations; - Determine the direction, policies, strategies and strategic plans, as well as controlling the management of the Light Rail Transit railroad business in the DKI Jakarta area, and direct growth efforts with a focus on new business, according to the expectations of stakeholders; - Formulate business strategy carried out together with key position holders, determination, and control of its implementation; - Directly control and coordinate the implementation of the functions of all divisions under the Main Directorate; - Monitor the management of the Company's image development and communication within and outside the Company; - Provide approval of the annual audit plan; - Carry out overall supervision of the implementation of the Company's performance. - Establish a corporate culture that is in line with the Company's strategic formulation in the form of vision, mission, and corporate values;

Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
		j. Ensure that the implementation of prudent Company management practices is in accordance with the provisions of Good Corporate Governance (GCG), with the aim to ensure the continuity of the organization; k. Ensure that the management of the formulation and planning of the Company's strategic programs/policies, as well as to evaluate and report on the implementation of the Company's strategic programs; l. Determine the implementation of the OHS Management System and Railway Safety (policy, planning, absorption, evaluation and program for improving railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards; m. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety; n. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards 2. Wewenang a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan. b. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Direksi serta Perseroan. c. Melakukan penandatanganan dokumen Perseroan. d. Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Perseroan. e. Mengatur penyerahan kewenangan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi atau karyawan, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. f. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan atau pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perundang-undangan, dan/atau keputusan RUPS. 2. Authorities a. Determine the management policy of the Company. b. Perform actions for and on behalf of the Board of Directors and the Company. c. Sign the Company documents. d. Establish provisions for monitoring and controlling the Company's performance. e. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors or employees, to make decisions on behalf of the Board of Directors, or represent the Company inside or outside the Court. f. Perform all and other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, Laws and Regulations, and/or resolutions of the GMS.



Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis	- Memastikan rencana strategis bidang keuangan, investasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengadaan sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menyelaraskan antara strategi bisnis Perseroan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan kegiatan operasional dan anak perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan untuk mencapai visi, misi dan rencana strategis Perusahaan. - Melakukan pengarahannya, pengendalian Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan dan tercapainya sasaran jangka panjang Perusahaan.	Tanggung Jawab - Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan dan akuntansi Perseroan; - Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis atas: pengupayaan sumber pendanaan untuk program rutin; pengendalian risiko, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKAP dan penyelenggaraan tata laksana perbendaharaan dan administrasi keuangan; - Mencari sumber dana dari berbagai sumber dana yang memungkinkan (dana internal, pinjaman, kemitraan, penyertaan modal dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan investasi Perusahaan, melalui pendekatan terhadap sumber dana secara efektif dan efisien; - Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan pelaporan akuntansi biaya subsidi, non subsidi dan hasil dari kinerja operasi; - Memastikan skema pendanaan dan ketersediaan alokasi anggaran untuk kejadian tanggap darurat keselamatan, keamanan, dan bencana; - Mengimplementasikan aspek-aspek <i>Governance, Risk, and Compliance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan; - Berkoordinasi dengan Direktur Operasi & Pengembangan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan bisnis dengan melakukan kajian investasi untuk peluang bisnis dan merumuskan strategi mitigasi risiko investasi; - Menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, dimulai dari rekrutmen, pengembangan dan penempatan, sistem kompensasi, hubungan industri hingga pemutusan hubungan kerja; - Merumuskan program internalisasi budaya yang sejalan dengan <i>strategic formulation</i> Perseroan; - Menetapkan standar kompetensi strategis untuk organisasi; - Menetapkan kebijakan dari sistem pengelolaan tempat kerja serta fasilitas umum perkantoran yang aman dan nyaman; - Memastikan tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung operasional Perusahaan dengan menetapkan dan melaksanakan strategi, rancang bangun (<i>IT Architecture</i>), pengembangan serta tata kelola yang sejalan dengan konsep GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Perseroan; - Penetapan strategi, kebijakan strategis dan sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa; - Menetapkan standar kebijakan pergudangan Perseroan yang efektif dan efisien; - Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penyerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan; - Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian; dan - Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
Director of Finance and Business Support	1. Ensure strategic plans for finance, investment, human resources, information technology and procurement as part of the Company's commitment to align the Company's business strategy outlined in the Company's Long-Term Plan with the operations and subsidiaries to support the Company's growth and development to achieve the Company's vision, mission and strategic plan. 2. Provide direction and control over the Company's financial management to ensure the Company's sustainability and the achievement of its long-term goals.	1. Responsibility a. Determine the Company's budget, finance, and accounting policies. b. Formulating and planning of strategic programs/policies on: seeking sources of funding for routine programs; risk control, planning, evaluating and reporting on the implementation of the Company's Work Plan and Budget, and the administration of treasury and financial administration c. Seek sources of funds from various possible sources of funds (internal funds, loans, partnerships, equity participation, and others) in accordance with the Company's investment needs, through an effective and efficient approach to sources of funds d. Formulating and planning of strategic programs/policies related to the preparation of the Company's financial statements, and reporting of subsidized, non-subsidized cost accounting, and the results of operating performance; e. Ensure the funding scheme and availability of budget allocations for safety, security and disaster emergency response events; f. Implement the aspects of Governance, Risk, and Compliance in implementing the management of the Company; g. Coordinate with the Director of Operations & Development in supporting the implementation of business development by conducting investment studies for business opportunities and formulating investment risk mitigation strategies; h. Establish policies and be responsible for the Human Resources management system, starting from recruitment, development and placement, compensation systems, industrial relations, to termination of employment; i. Formulate a cultural internalization program that is in line with the Company's strategic formulation. j. Establish strategic competency standards for the organization; k. Establish policies for safe and comfortable workplace management systems and public office facilities l. Ensure the availability of an information system that suits the needs of the organization to support the Company's operations by establishing and implementing strategies, designing (IT Architecture), development and governance that are in line with the concept of GCG (Good Corporate Governance) in order to support the achievement of the Company's performance; m. Determine strategies, strategic policies and management systems for the procurement of goods and services; n. Establish effective and efficient Company warehousing policy standards; o. Establish the application of the Railway Safety and Occupational Health and Safety Management System (policy, planning, absorption evaluation and program for improving railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards; p. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety; q. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards (SPM).



Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
		2. Wewenang a. Melakukan tindakan pengelolaan portofolio dan investasi keuangan sesuai standar yang berlaku. b. Mengatur ketentuan kebijakan pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pendanaan investasi Perseroan. d. Mengatur ketentuan kebijakan pengelolaan SDM, pengadaan dan teknologi informasi dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. e. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS. 2. Authorities a. Carry out portfolio management actions and financial investments in accordance with applicable standards b. Regulate the provisions of financial management and risk management policies, and signs Company documents based on the applicable laws and regulations. c. Provide recommendations to the President Director regarding the Company's investment funding strategy. d. Regulate the provisions of HR management, procurement and information technology policies and carry out signing of Company documents based on applicable laws and regulations. e. Perform all and other actions regarding the management of the Company, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, laws, and/or GMS resolution.

Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
Direktur Operasi dan Pengembangan	Direktur Operasi dan Pengembangan (<i>Operation and Development Director</i>) bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Operasi dan Pengembangan (<i>Operation and Development Directorate</i>) termasuk perencanaan program anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Operasi dan Pengembangan berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.	1. Tanggung Jawab - Memimpin dan memastikan kegiatan operasi dan perawatan dapat terlaksana sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dan memenuhi standar yang berlaku; - Memimpin dan memastikan penyusunan Rencana Bisnis yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan; - Memimpin dan memastikan penyusunan sistem pengendalian dan pengelolaan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan; - Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan operasi lalu lintas perjalanan kereta, program kebijakan pengendalian operasi kereta serta kebijakan jaminan mutu perjalanan kereta meliputi penetapan standar mutu, pelaksanaan dan pengawasannya serta evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan; - Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan pemeliharaan prasarana meliputi jalur kereta, bangunan stasiun, dan fasilitas operasi; - Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan serta evaluasi pemeliharaan sarana meliputi <i>trainset</i>, fasilitas Depo dan segala bentuk fasilitas penunjang terkait; - Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis pengembangan dan proses uji sarana dan prasarana, pengelolaan atau pelaksanaan kajian rekayasa teknis pengembangan dan penyusunan desain atau spesifikasi teknis sarana dan prasarana, serta pelaksanaan koordinasi atau kerja sama teknis di bidang yang relevan dengan pihak luar; - Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis atas pengusahaan prasarana dan sarana beserta perencanaan integrasi antar moda; - Penetapan kebijakan pelaksanaan terkait dengan fungsi operasional dan layanan, prasarana, sarana dan pengembangan bisnis; - Memastikan pengelolaan kegiatan komersialisasi aset perusahaan maupun Jakpro dan/atau anak usaha Jakpro berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk dapat meningkatkan lalu lintas orang (<i>crowd</i>) dan daya tarik masyarakat untuk menggunakan, menyewa dan memanfaatkan aset yang tersedia guna mewujudkan pencapaian target pendapatan Perusahaan; - Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan & Dukungan Bisnis dalam mendukung pelaksanaan pengembangan bisnis dengan melakukan kajian investasi untuk peluang bisnis baru; - Terciptanya keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan pelanggan; - Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan; - Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian; - Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
Director of Operations and Development	Director of Operations and Development (Operations and Development Director) is responsible for the organization and management of the Directorate of Operations and Development (Operations and Development Directorate), including in budget program planning and management of human resources. In carrying out its main duties and responsibilities, the Director of Operations and Development is authorized to determine the Company's management policies within the scope of his duties and responsibilities.	1. Responsibilities a. Lead and ensure that operations and maintenance activities can be carried out in accordance with the established strategy and meet the applicable standards. b. Lead and ensure the preparation of a Business Plan in accordance with the Company's strategic plan. c. Lead and ensure that the preparation of an asset management control system can be implemented in accordance with the needs of the Company. d. Formulation and planning of strategic programs or policies related to train traffic operations, train operation control policy programs and quality assurance policies for train travel including the establishment of quality standards, implementation and supervision, as well as evaluation and continuous quality improvement; e. Formulation and planning of strategic programs or policies related to the maintenance of infrastructure including railway lines, station buildings, and operating facilities; f. Formulation and planning of programs or policies as well as evaluating the maintenance of facilities including trainsets, Depot facilities, and all forms of related supporting facilities; g. Formulation and planning of strategic programs or policies related to meeting the technical requirements for the development and testing process of facilities and infrastructure, management or implementation of technical engineering studies for the development and preparation of designs or technical specifications for facilities and infrastructure, as well as implementation of technical coordination or cooperation in fields relevant to external parties; h. Formulation and planning of strategic programs or policies on the management of infrastructure and facilities, as well as intermodal integration planning; i. Determination of implementation policies related to operational functions and services, infrastructure, facilities and business development. j. Ensure that the management of the commercialization of the Company's and Jakpro's assets, and/or Jakpro's subsidiaries goes according to the established plan in order to increase the traffic of people (crowd) and attract the public to use, rent, and utilize available assets in order to achieve the achievement of the Company's revenue target ; k. Coordinate with the Director of Finance & Business Support in supporting the implementation of business development by conducting investment studies for new business opportunities; l. Create a safety, security, and health work environment and support the achievement of passenger safety and security standards; m. Determine the implementation of the OHS Management System and Railway Safety (policy, planning, implementation, evaluation and improvement program for railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards; n. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety; o. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards (SPM).

Jabatan Position	Tujuan Objectives	Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibilities and Authorities
		2. Wewenang - Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan atau pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS. - Mengatur ketentuan tentang kebijakan operasional Perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan penandatanganan dokumen terkait kegiatan operasional Perusahaan. - Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Perusahaan di bidang operasional. - Mengatur ketentuan kebijakan pengembangan bisnis dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pengembangan bisnis Perseroan. 2. Authorities - Perform all and other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, laws and regulations and/or GMS resolution. - Set the provisions regarding the Company's operational policies based on the applicable laws and regulations. - Sign documents related to the Company's operational activities. - Establish provisions for monitoring and controlling the Company's performance in the operational field. - Regulate the provisions of business development policies and sign Company documents based on applicable laws and regulations. - Provide recommendations to the President Director regarding the Company's business development strategy.

Etika Jabatan Direksi

Direksi memegang peranan penting untuk memastikan terwujudnya sebuah organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada pedoman standar etika berikut ini:

- Etika Berkaitan dengan Keteladanan Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan diri sendiri sebagai teladan yang baik bagi seluruh karyawan Perseroan.
- Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan termasuk dalam hal ini seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Board of Directors' Ethics

The Board of Directors has a vital role to ensure the realization of an accountable and sustainable organization. In this regard, the Board of Directors carries out its duties and responsibilities by referring to the following ethical standards:

- Every member of the Board of Directors must encourage ethical behavior and uphold ethical standards in the Company. One way to do this is by setting a good example for all employees of the Company.
- Each member of the Board of Directors must comply with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association and GCG Guidelines as well as the Company's established policies including all agreements and commitments made by the Company with third parties.



3. Setiap anggota Direksi dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan informasi yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Seluruh anggota Direksi harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada masing-masing anggota Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.
4. Selain gaji atau pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS, setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan dari seluruh kegiatan Perseroan secara tidak sah, untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Selama menjabat, setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis yang bukan untuk kepentingan Perseroan, melainkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain;
 - b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatan selaku anggota Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan;
 - c. Berkompetisi dengan Perseroan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan. Setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.
 - d. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi menyampaikan dan melampirkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersamaan dengan surat permohonan persetujuan atas tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Terhadap permohonan persetujuan yang diajukan melalui rapat bersama, maka dalam undangan rapat dan/atau pada saat sebelum dimulainya rapat bersama. Sekretaris Perusahaan memberikan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Direksi kepada Sekretariat Dewan Komisaris.

6. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan. Setiap anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

3. Each member of the BOD may disclose information in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the information policy established by the Company. All members of the BOD must always maintain the confidentiality of information entrusted to each member of the BOD, in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company.
4. In addition to salary or other legal income based on the provisions of laws and regulations and/or GMS decisions, each member of the Board of Directors is prohibited from taking advantage of all Company activities illegally, for personal, family, business group and/or other parties, either directly or indirectly.
5. During their term of office, each member of the Board of Directors is not allowed to:
 - a. Taking business opportunities that are not in the interest of the Company, but for personal, family, business group and/or other parties;
 - b. Using the Company's assets, Company information or position as a member of the Board of Directors for personal interests outside the provisions of laws and regulations and established Company policies;
 - c. Competing with the Company, i.e. using inside knowledge/information to gain advantage for interests other than those of the Company. Each member of the Board of Directors must disclose information in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and always maintain the confidentiality of information entrusted to him/her in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company.
 - d. The Board of Directors must sign an Integrity Pact for each transactional action that requires the approval of the Board of Commissioners. The Board of Directors shall submit and attach the signed Integrity Pact together with a letter requesting approval for transactional actions that require the approval of the Board of Commissioners.

For approval requests submitted through joint meetings, the Board of Directors shall include the Integrity Pact in the meeting invitation and/or prior to the start of the joint meeting. The Corporate Secretary provides the Integrity Pact that has been signed by the Board of Directors to the Secretariat of the Board of Commissioners.

6. Each member of the BOD is prohibited from taking actions that have a conflict of interest with the Company's activities. Each member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
 - a. There is a case before the court between the Company and the member of the Board of Directors concerned or the member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company;
 - b. In the event that there are circumstances as referred to above, those entitled to represent the Company are:

- i. Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Direksi. Dalam rapat tersebut, keputusan diambil oleh Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan. Apabila Direksi merasa ragu untuk mengambil keputusan secara independen, maka Direksi dapat meminta tanggapan atau pertimbangan Dewan Komisaris;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai kepentingan dengan Perseroan; dan/ atau
 - iv. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.
 - c. Direksi dilarang melakukan pertemuan dengan calon rekan bisnis ataupun telah menjadi rekan bisnis termasuk pihak lain dalam rangka aktivitas, kegiatan ataupun proyek tertentu tanpa didampingi oleh personel Perseroan. Apabila pendampingan tersebut tidak dapat dilakukan, maka Direksi wajib menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada seluruh anggota Direksi lainnya. Pertemuan tersebut harus terjadwal di Perseroan.
 - d. Setiap anggota Direksi wajib membuat Daftar Khusus, untuk masing-masing anggota Direksi dan keluarga anggota Direksi.
7. Direksi dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau dari pelanggan, pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi suatu keputusan atau sebagai imbalan atas hal-hal yang telah dilakukan. Direksi wajib mematuhi ketentuan anti penyuapan yang ada di Perseroan, sebagai bagian dari komitmen penerapan SNI ISO 37001:2016.
8. Setelah tidak lagi menjabat, setiap anggota Direksi wajib:
- a. Mengembalikan seluruh dokumentasi dan fasilitas yang berhubungan dengan jabatan yang diemban kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, setelah berakhirnya masa jabatan.
 - b. Menyampaikan atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
 - c. Apabila anggota Direksi meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi dan fasilitas sesuai dengan huruf a tersebut di atas.
- i. Other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company are appointed in the Board of Directors Meeting. In the meeting, decisions are made by other Directors who have no conflict of interest. If the Board of Directors feels hesitant to make decisions independently, then the Board of Directors can ask for feedback or consideration from the Board of Commissioners;
- ii. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
- iii. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have an interest in the Company; or
- iv. In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company and none of the members of the Board of Commissioners, the Company shall be represented by other parties appointed by the GMS.
- c. The Board of Directors is prohibited from holding meetings with prospective or existing business partners including other parties in the context of certain activities, activities or projects without being accompanied by Company personnel. If such accompaniment cannot be done, then the BOD must convey the results of the meeting to all other members of the BOD. The meeting must be scheduled in the Company.
- d. Each member of the Board of Directors is obliged to make a Special Register, for each member of the Board of Directors and the family of a member of the Board of Directors.
7. Directors are prohibited from giving, offering, or accepting directly or indirectly to or from customers, civil servants, state officials, or other third parties to influence a decision or in return for things that have been done. Directors must comply with the anti-bribery provisions in the Company, as part of the commitment to implement SNI ISO 37001:2016.
8. Upon leaving office, each member of the Board of Directors shall:
- a. Return all documentation and facilities related to the position held to the Company no later than 30 (thirty) calendar days, after the end of the term of office.
 - b. Delivering on actions for which the GMS have not accepted accountability.
 - c. If a member of the Board of Directors dies during his/her term of office, the heirs of the member of the Board of Directors must return the documentation and facilities in accordance with letter a above.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Ethical violations committed by each member of the Board of Directors are treated the same as violations of the GCG Guidelines and Code of Conduct.



Program Pengenalan bagi Direksi Baru

Program pengenalan bagi anggota Direksi baru merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memberikan gambaran akan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, serta kinerja keuangan dan operasi, rencana jangka panjang dan jangka pendek, manajemen risiko, lingkup tugas dan tanggung jawabnya, termasuk sistem manajemen yang diadopsi oleh Perseroan.

Perseroan memberikan tanggung jawab pengadaan program pengenalan kepada Sekretaris Perusahaan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2024, dikarenakan tidak terdapat pergantian ataupun pengangkatan anggota Direksi baru, maka Perseroan tidak mengadakan program pengenalan bagi Direksi.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Perseroan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut rincian kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi pada tahun 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal/Tempat Date/Venue
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	Sertifikasi Certification	Jakarta/ 25 Maret – 1 April 2025 Jakarta/March 25 – April 1, 2024
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Training	Jakarta/ 14 Agustus 2024 Jakarta/ August 14, 2024
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Sertifikasi Certification	Jakarta/ 25 Maret – 1 April 2024 Jakarta/March 25 – April 1, 2024
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Training	Yogyakarta/ 22 – 23 Agustus 2024 Yogyakarta/ August 22 – 23, 2024
Aditia Kesuma Negara Dalimunthe	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	Sertifikasi Certification	Jakarta/ 25 Maret – 1 April 2024 Jakarta/March 25 – April 1, 2024

Introduction Program for New Directors

An introduction program for new members of the Board of Directors is mandatory to provide an overview of the Company's objectives, nature and scope of activities, as well as financial and operational performance, long-term and short-term plans, risk management, scope of duties and responsibilities, including the management system adopted by the Company.

The Company assigns the responsibility for organizing an introduction program to the Corporate Secretary, no later than 1 (one) month after the appointment of the relevant member of the Board of Directors. The introduction program may consist of presentations, meetings, visits to business units, to Company facilities, review of Company documents or other programs that are considered relevant.

Since there was no change or appointment of new members of the Board of Directors in 2024, the Company did not hold an introduction program for the Board of Directors.

Competency Development Program for the Board of Directors

The Company provides opportunities for the Board of Directors to participate in various competency development activities that can support the effective implementation of their duties and responsibilities. The following is a breakdown of the competency development activities participated in by the Board of Directors in 2024:

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi

Direksi telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut realisasi tugas dan tanggung jawab Direksi sepanjang tahun 2024:

1. Melaksanakan kegiatan rapat BoD sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2024
2. Menerbitkan 30 Surat Keputusan Direksi
3. Meresmikan Urban Farming LRT Jakarta sebagai proyek percontohan inovatif yang mengintegrasikan pertanian perkotaan dengan transportasi publik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, dan mempromosikan gaya hidup sehat di tengah kota. Dengan memanfaatkan lahan di sekitar stasiun LRT, proyek ini juga menciptakan ruang hijau yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta mendorong partisipasi komunitas dalam kegiatan bercocok tanam.
4. Bersama Dinas Pendidikan turut serta mendukung program Launching Link and Match sebagai upaya strategis untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan pendidikan vokasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan perusahaan, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Mendapatkan kerjasama Naming Rights stasiun Boulevard Utara dengan Summarecon Mall Kelapa Gading, kedepannya akan mendorong juga integrasi transportasi umum dengan pusat perbelanjaan.
6. Terlaksananya *test track fase 1B* dengan menggunakan MRV pada jalur Velodrome – Rawamangun.
7. Mendapatkan predikat *gold* dalam sertifikasi audit Sistem Manajemen Pengamanan dimana LRT Jakarta baru pertama kali mengikuti.
8. Mendapatkan penghargaan TOP CEO BUMD Awards 2024.
9. Mendapatkan Penghargaan "*The Most Committed GRC Leader 2024*" untuk kedua kalinya.
10. Mendapatkan penghargaan Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk Operator Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Transportasi Ramah Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil, dan Anak serta Petugas Pria Terbaik dalam Pelayanan Disabilitas.
11. Mendapatkan penghargaan *The Best Contact Center Indonesia 2024* Indonesia Contact Center Association (ICCA) untuk kategori *The Best Customer Service Publik, The Best Customer Experience, The Best Employee Engagement*.
12. LRT Jakarta mampu meningkatkan jumlah pelanggan (*ridership*) tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 18,2% dengan rerata 3.352 pelanggan per hari.

Realization of the Board of Directors' Duties

The Board of Directors has carried out a number of activities as part of the implementation of its duties and responsibilities. The following is a realization of the duties and responsibilities of the Board of Directors throughout 2024:

1. Held 12 BoD meetings throughout 2024
2. Issued 30 Board of Directors Decrees
3. Inaugurated Jakarta LRT Urban Farming as an innovative pilot project that integrates urban agriculture with public transportation. This initiative aims to improve local food security, reduce carbon footprints, and promote a healthy lifestyle in the middle of the city. By utilizing the land around the LRT station, this project also creates green space that can be enjoyed by the community and encourages community participation in farming activities.
4. In collaboration with the Education Office, the Company supported the Launching Link and Match program as a strategic effort to align industry needs with the competencies of vocational school graduates. This program aims to improve the quality of the workforce through collaboration between educational institutions and companies, so that graduates have relevant skills and are ready for work. This is expected to reduce the gap between the world of education and the world of work, as well as encourage sustainable economic growth.
5. Obtained the Naming Rights partnership of North Boulevard station with Summarecon Mall Kelapa Gading, which in the future will also encourage the integration of public transportation with shopping centers.
6. Implemented the phase 1B test track using MRV on the Velodrome - Rawamangun line.
7. Obtained the gold predicate in the Security Management System audit certification which the Jakarta LRT participated in for the first time.
8. Received the TOP CEO BUMD Awards 2024.
9. Received the "The Most Committed GRC Leader 2024" Award for the second time.
10. Received an award from the Jakarta City Transportation Council for Best Operator of Transportation Facilities and Infrastructure for the Disabled, the Elderly, Pregnant Women, and Children and Best Male Officer in Disability Services.
11. Received the award for The Best Contact Center Indonesia 2024 from the Indonesia Contact Center Association (ICCA) for the categories of The Best Public Customer Service, The Best Customer Experience, The Best Employee Engagement.
12. The Jakarta LRT was able to increase the number of customers (*ridership*) in 2024 compared to 2023 by 18.2%, with an average of 3,352 customers per day.



Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Information Transparency Regarding the Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan telah mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari latar belakang profesi dan pengalaman yang beragam. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan inovasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku di Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis Perseroan. Berikut penjelasan keberagaman pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

The Company has appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners from various professional backgrounds and experiences. The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is very important to improve the quality of decision making, risk management, and innovation so that it can eventually improve the Company's performance and value.

The diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors that applies in the Company is carried out by considering the Company's business needs. The following is an explanation of the diversity in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Iwan Takwin Komisaris Utama President Commissioner	Indonesia	49	Laki-laki Male	Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999) Bachelor of Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta	Properti Property	Teknik Engineering
Azas Tigor Nainggolan Komisaris Commissioner	Indonesia	59	Laki-laki Male	- S3 Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (2021-2024) - S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila (2018) - S2 Magister Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional (2014) - S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (1989) - Study of Doctoral Program in Law, Pelita Harapan University (2021-2024) - Master of Law Program, Pancasila University (2018) - Master of Political Science, Postgraduate Program, National University (2014) - Bachelor, Faculty of Law, Christian University of Indonesia (1989)	Advokat	Hukum Legal
Mohamad Pramintohadi Sukarno Komisari Commissioner	Indonesia	61	Laki-laki Male	- S2 Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung (1993) - S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987) - Master of Transportation, Bandung Institute of Technology (1993) - Bachelor of Civil Engineering of Sepuluh Nopember Institute of Technology (1987)	Teknologi, Energi, Dan Lingkungan Perhubungan Udara Technology, Energy, and Environment of Air Transportation	Teknik Sipil, Transportasi Civil Engineering, Transportation

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewar- ganegaraan Citizenship	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Direksi Board of Directors						
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director	Indonesia	54	Laki-Laki Male	S1 - Sarjana Fisika Bachelor of Physics	Project Management	Fisika Physics
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Director of Finance and Business Support	Indonesia	52	Laki-Laki Male	S1 – Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering	Operations, Business Development	Teknik Sipil Civil Engineering
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Director of Operations and Development	Indonesia	39	Laki-Laki Male	S3 – Doctorate Degree Program in Economic Business	Operations & Project Management	Teknik Engineering

Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka Perseroan melakukan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan tugas secara kolegal maupun individu. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, terutama pencapaian atas pelaksanaan tugas pengawasan pada tahun buku, dilakukan setiap tahun oleh para pemegang saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan diusulkan oleh Direksi yang bersangkutan.

Sementara itu, Direksi juga memperoleh penilaian kinerja dari Dewan Komisaris dan/atau pihak ketiga yang independen yang hasilnya akan disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria evaluasi kinerja yang dituangkan dalam kontrak kerja tahunan. Di antara kriteria tersebut adalah pencapaian target Perseroan yang tertuang di RKA, kehadiran dalam rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris, kontribusinya terhadap aktivitas bisnis, ketaatan terhadap peraturan perundangan serta kebijakan Perseroan, dan sebagainya.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi akan menjadi dasar untuk menentukan skema remunerasi serta sebagai pertimbangan untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

In order to improve the quality of the Company's management, the Company evaluates the performance of the Board of Commissioners in relation to the collegial and individual performance of their duties. The performance of the Board of Commissioners, especially the achievement of supervisory duties in the financial year, is assessed annually by the shareholders at the GMS based on the performance evaluation criteria set by the Board of Commissioners and proposed by the Board of Directors concerned.

Meanwhile, the performance of the Board of Directors is also assessed by the Board of Commissioners and/or an independent third party, the assessment results are then presented to the shareholders at the GMS. The Board of Directors' performance assessment is based on the performance evaluation criteria set out in the annual work contract. Among these criteria are the achievement of the Company's targets stipulated in the RKA, attendance at Board of Directors' meetings and meetings with the Board of Commissioners, contributions to business activities, compliance with laws and regulations and Company policies, and so on.

The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors will be the basis for determining the remuneration scheme and as a consideration for reappointing and/or dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors concerned.



Berikut KPI Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

The following are the KPIs of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year:

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2024

Results of the 2024 Board of Commissioners KPI Assessment

No	Keterangan Description	KPI	Bobot (%) Weight (%)	Capaian Achievement
Aspek Pengawasan & Pengarahan Supervision & Direction Aspect			50	
1.	Review Kinerja Perusahaan The Company's Performance Review	6 Kali 6 Times	10	12
2.	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meeting:			
	- Jumlah Rapat (Direksi & Komisaris) - Number of Meetings (Board of Directors & Board of Commissioners)	12 Kali 12 Times	10	11
	- Jumlah Rapat (Komisaris & Komite Audit) - Number of Meetings (Board of Commissioners & Audit Committee)	6 Kali 6 Times	5	19
	- Jumlah Rapat (Komisaris & Komite Audit) - Number of Meetings (GMS & Extraordinary GMS)	1 Kali 1 Time	5	3
	- Kehadiran dalam Rapat - Attendance in Meetings	100%	10	100%
3.	Memberi Nasihat/Saran kepada Direksi: Provision of Advice/Suggestions to the Board of Directors:			
	- Jumlah (minimal) - Amount (Minimum)	6 Kali 6 Times	10	19
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			30	
1.	Program Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Work Programs	1 Kali 1 Time	10	1
2.	Pendapat/Saran kepada Pemegang Saham/RUPS Opinions/Suggestions to Shareholders/ GMS	1 Kali 1 Time	10	10
3.	Laporan tentang Tugas Pengawasan Internal Reports on Internal Supervisory Duties	1 Kali 1 Time	5	6
4.	Laporan Evaluasi atas Auditor Eksternal Evaluation Report on External Auditor	1 Kali 1 Time	5	1
Aspek Dinamis Dynamic Aspect			20	
1.	Peningkatan Kompetensi (Minimal) Competency Improvement (Minimum)	1 Kali 1 Time	10	4
2.	Peran dalam Peningkatan Kinerja: Role in Performance Improvement:			
	- GCG	85%	10	91,0%

Hasil Penilaian KPI Direksi Tahun 2024

Board of Directors' KPI Assessment Results in 2024

Capaian KPI PT LRT Jakarta Periode Januari – Desember 2024

The KPI achievement of PT LRT Jakarta in the period of January – December 2024

No	Sasaran Strategis Perusahaan Key Performance Indicator (KPI) Company Strategic Target Key Performance Indicator (KPI)	Target Spesifik KPI Specific KPI Target	Bobot KPI KPI Weight	Tahun 2024 Year 2024			
				Target	Aktual Actual	Capaian Achievements	Skor KPI Score KPI
1	Pendapatan Farebox	Pendapatan Tiket Penumpang Passenger Ticket Revenue	7,5%	Rp5,5 miliar	Rp5,53 miliar	100,9%	7,6%
2	EBITDA Margin	<i>Earning Before Interest, Taxes Depreciation, and Amortization</i>	7,5%	9,0%	7,5%	83,4%	6,3%
3	Pendapatan Non Farebox Non Farebox Revenue	Pendapatan Non Farebox Non Farebox Revenue	5,0%	Rp14,8 miliar	Rp11,77 miliar	79,6%	4,0%
4	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	7,5%	90%	93%	103,7%	7,8%
5	Jumlah Penumpang (Ridership) Number of Passengers (Ridership)	Total Penumpang per Tahun Total Passengers per Year	7,5%	1.095.000	1.226.818	112,0%	8,4%
6	Program Peningkatan Brand Awareness Brand Awareness Improvement Program	Event yang dilakukan untuk program peningkatan awareness Events conducted for awareness improvement program	7,5%	12	15	120,0%	9,0%
7	Standar Pelayanan Minimum (SPM) LRT Jakarta Fase 1 Minimum Service Standards (SPM) LRT Jakarta Phase 1	Pemenuhan SPM Fase 1 Fulfillment of SPM Phase 1	7,5%	99%	99,2%	100,2%	7,5%
8	Peningkatan Fasilitas Pendukung Layanan Improvement of Supporting Service Facilities	% Realisasi peningkatan fasilitas pendukung layanan % Realization of improvement of supporting service facilities	5,0%	100%	100%	100,0%	5,0%
9	Ketersediaan Aset Availability of Assets	% Ketersediaan aset sarana & prasarana % Availability of facilities & infrastructure assets	7,5%	99%	99,6%	100,6%	7,5%
10	Sertifikasi dan Surveillance Sistem Manajemen Terintegrasi Certification and Surveillance of Integrated Management	Perolehan sertifikasi serta mempertahankan Sistem Manajemen Terintegrasi System Obtaining certification and maintaining Integrated Management System	5,0%	100%	100%	100,0%	5,0%
11	Transformasi Digital Digital Transformation	% Pelaksanaan program sesuai masterplan IT % Program implementation according to IT masterplan	5,0%	90%	100%	111,0%	5,6%



Capaian KPI PT LRT Jakarta Periode Januari – Desember 2024

The KPI achievement of PT LRT Jakarta in the period of January – December 2024

No	Sasaran Strategis Perusahaan Key Performance Indicator (KPI) Company Strategic Target Key Performance Indicator (KPI)	Target Spesifik KPI Specific KPI Target	Bobot KPI KPI Weight	Tahun 2024 Year 2024			
				Target	Aktual Actual	Capaian Achievements	Skor KPI Score KPI
12	Inovasi Program Program Innovation	Program Inovasi Perusahaan Corporate Innovation Program	5,0%	100%	100%	100,0%	5,0%
13	Program Pelatihan dan Pengembangan Kapabilitas SDM HR Training and Capability Development Program	Learning Agility	7,5%	75	71	94,7%	7,1%
14	Nilai GCG Perusahaan Company GCG Value	Pengukuran penerapan GCG dilingkungan perusahaan Measurement of GCG implementation in the company environment	7,5%	87	89,71	103,1%	7,7%
15	<i>Risk Maturity Level</i>	Tercapainya <i>Risk Maturity level</i> sesuai kategori <i>Risk and Insurance Management Society (RIMS)</i> dan pengukuran berdasarkan asesmen ISO 37001:2018 Achievement of Risk Maturity level according to the Risk and Insurance Management Society (RIMS) category and measurement based on ISO 37001:2018 assessment	7,5%	3,3	3,47	105,2%	7,9%
Total Nilai Total Value							101,3%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berhak menerima remunerasi dalam jumlah yang ditetapkan dalam RUPS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 79 tahun 2019 tersebut, struktur penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari komponen berikut ini:

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 79 of 2019 concerning the Income Guidelines for the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are entitled to receive remuneration in the amount determined at the GMS.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors

Pursuant to DKI Governor Regulation No. 79 of 2019, the income structure of the Board of Commissioners and Directors consists of the following components:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1. Honorarium. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja.	1. Gaji. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja.
Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.	Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.
1. Honorarium. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives.	1. Salaries. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives.
Taxes on Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of each member of the Board of Commissioners.	Taxes on Salaries, Allowances and Facilities for the Board of Directors are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors are borne by and become the burden of each member of the Board of Directors.
Direktur Utama President Director	100%
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of the President Director's salary
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of the President Director's salary
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's salary

Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun buku 2024, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berhak atas besaran remunerasi berikut:

Jabatan Position	Besaran (Rp) Amount (IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	Rp2.172.861.636
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	Rp7.808.086.554
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Board	Rp9.980.948.190

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, dan Rapat Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dimuat dalam *Board Manual* Dewan Komisaris. Ketentuan itu menyebutkan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, di mana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat

Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2024, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are entitled to the following remuneration:

Board of Commissioners' Meetings, Board of Commissioners' and Board of Directors Joint Meetings, and Board of Directors' Meetings

Board of Commissioners' Meetings

Provisions regarding the organization of internal meetings of the Board of Commissioners are stipulated in the Board of Commissioners Manual. These provisions state that the Board of Commissioners shall hold meetings at least once every month, to which the Board of Directors may be invited.



mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 2 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris pada rapat tersebut sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	2	2	100%
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	2	2	100%

Berikut agenda pembahasan dalam pertemuan rapat internal Dewan Komisaris:

Meetings of the Board of Commissioners may also be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at the request of 1 (one) shareholder who together represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.

In 2024, the Board of Commissioners has held 2 internal meetings with the following meeting attendance rate by each member of the Board of Commissioners:

The following are the agenda discussed in the internal meetings of the Board of Commissioners:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	16 Januari 2024 January 16, 2024	Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Divisi Internal Audit Tahun 2023 Discussion on the Internal Audit Division Activity Report of 2023
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	Rapat Komite Audit terkait Divisi Corporate Secretary (Departemen Legal) Audit Committee Meeting related to Corporate Secretary Division (Legal Department)
3	26 Februari 2024 February 26, 2024	Rapat Komite Audit terkait Divisi Human Capital & General Affair Audit Committee Meeting related to Human Capital & General Affair Division
4	18 April 2024 April 18, 2024	Update Perkembangan Pembangunan LRTJ Fase 1 B Update on the Construction Progress of LRTJ Phase 1 B
5	18 April 2024 April 18, 2024	Pembahasan Pemanfaatan Lahan LRT Discussion on the Utilization of LRT Lands
6	25 April 2024 April 25, 2024	Diskusi Komite Audit dengan Internal Audit Discussion between Audit Committee and Internal Audit
7	13 Mei 2024 May 13, 2024	Diskusi Komite Audit dengan Divisi Internal Audit, Departemen Legal dan Departemen Manajemen Risiko Discussion between Audit Committee and Internal Audit Division, Legal Department and Risk Management Department
8	20 Juni 2024 June 20, 2024	Rapat Pembahasan Bisnis Proses Terkait Subsidi Discussion on Business Process Related to Subsidy
9	24 Juli 2024 July 24, 2024	Pembahasan Isu-isu di Pengadaan Discussion on Procurement Issues
10	31 Juli 2024 July 31, 2024	Diskusi Kajian atas Usulan Penyesuaian Gaji-Honorarium serta Pemberian Insentif Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT LRT Jakarta Discussion on the Review of the Proposed Salary-Honorarium Adjustment and Provision of Work Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT LRT Jakarta
11	8 Agustus 2024 August 8, 2024	Diskusi dan Tindak Lanjut Laporan WBS (Khusus) Discussion and Follow Up on WBS Report (Special)
12	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Diskusi Strategi Tindak Lanjut Laporan WBS Discussion on Follow Up Strategy of WBS Report
13	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Rapat Diskusi Perihal SK Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Discussion on the BOD Decree regarding the Implementation Guidelines of Goods and Services Procurement
14	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Pembahasan Pembuatan Sistem IT Pendukung Pengadaan Discussion on the Development of Procurement Support IT System

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
15	12 September 2024 September 12, 2024	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Divisi Internal Audit TW 3 Monitoring and Evaluation of Internal Audit Division Activities in TW 3
16	12 September 2024 September 12, 2024	Rapat Lanjutan Pembuatan Sistem Data Procurement Plan oleh Tim IT Follow Up Report on the Establishment of Procurement Plan Data System by IT Team
17	12 September 2024 September 12, 2024	Update Progress Laporan WBS Progress Update on WBS Report
18	23 September 2024 September 23, 2024	Rapat Bisnis Proses Dept. Pelayanan dan Dept. MSL Business Process Meeting of Service Department and MSL Department
19	21 Oktober 2024 October 21, 2024	Update Progress Laporan Khusus WBS & Tindak Lanjutnya dan Penyusunan RKAT Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2025 Progress Update on Special WBS Report & the Follow Up and Preparation of RKAT of the Board of Commissioners in 2024 Budget Year

Rapat Gabungan Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya kepengurusan dan pencapaian kinerja Perseroan. Rapat gabungan ini juga diadakan antara lain untuk memperoleh persetujuan atas agenda korporasi tertentu. Hal-hal yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris antara lain:

1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan & Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perubahan.
2. Persetujuan dalam melakukan bangun serah kelola dan bangun kelola serah serta kerjasama operasional, dengan batasan nilai investasi sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih perseroan.
3. Persetujuan pendirian perusahaan baru dan/atau turut serta dalam usaha perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri atau peningkatan penyertaan pada perusahaan atau pengalihan penyertaan di anak-anak perusahaan dengan batasan nilai setoran modal sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan.
4. Persetujuan dalam meminjam uang atau membuat utang atau memberikan pinjaman dengan batas nilai pinjaman sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi operasional.

Pada tahun 2024, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi mencapai 11 kali, dengan tingkat kehadiran dilaporkan berikut ini:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners also holds joint meetings with the Board of Directors as part of the implementation of the supervisory function over the management and performance of the Company. These joint meetings are also held in order to obtain approval for certain corporate agendas. Matters requiring approval from the Board of Commissioners include:

1. Company Budget Work Plan & the Amended Company Budget Work Plan.
2. Approval to carry out build-transfer-operate and build-operate-transfer, with an investment value limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net asset value.
3. Approval for the establishment of new companies and/or investment in other companies, both domestic and foreign companies, or increase in investment in companies or transfer of investment in subsidiaries with a capital contribution limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net asset value.
4. Approval to borrow money or incur debt or provide loans with a loan value limit of up to 30% (thirty percent) of the Company's net asset value, except for debt or receivable loans arising from operational transactions.

In 2024, joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors were held 11 times with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	11	11	100%
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	11	11	100%



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	11	11	100%
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance Business Support	11	11	100%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan pengembangan Director of Operations and Development	11	10	90,9%

Berikut agenda pembahasan dalam pertemuan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2024:

The agenda discussed in the Joint-Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	24 Januari 2024 January 24, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
3	28 Maret 2024 March 28, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
4	27 Mei 2024 May 27, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
5	19 Juni 2024 June 19, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
6	26 Juli 2024 July 26, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
7	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
8	30 September 2024 September 30, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
9	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
10	26 November 2024 November 26, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
11	24 Desember 2024 December 24, 2024	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint-Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors

Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat internal Direksi diatur lebih lanjut dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Direksi wajib diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Sesuai ketentuan yang berlaku, rapat internal Direksi wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 84 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi pada rapat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	84	84	100%
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance Business Support	84	84	100%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan pengembangan Director of Operations and Development	84	83	99%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors' Meetings

The organization of internal meetings of the Board of Directors is further regulated in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners. Board of Directors meetings must be held at the Company's place of business or at another location within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors. In accordance with applicable regulations, internal meetings of the Board of Directors must be held at least once a month or at any time if deemed necessary.

Throughout 2024, the Board of Directors has held 84 internal meetings with the attendance rate of each member of the Board of Directors at the meeting as follows:

The agenda discussed in the Board of Directors meetings are as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	3 Januari 2024 January 3, 2024	<i>Final Project Presentation</i> LMDP: <i>Business Performance & Productivity Class</i>
2.	4 Januari 2024 January 4, 2024	Rapat Kegiatan <i>Brainstorming</i> Ideasi bersama Direksi Ideation Brainstorming Meeting with the Board of Directors
3.	5 Januari 2024 January 5, 2024	Rapat Lanjutan Kegiatan <i>Brainstorming</i> Ideasi bersama Direksi Extended Ideation Brainstorming Meeting with the Board of Directors
4.	5 Januari 2024 January 5, 2024	Rapat Kegiatan Strategis Daerah Regional Strategic Meeting
5.	10 Januari 2024 January 10, 2024	Rapat Pemaparan Hasil <i>Value Measurement Survey</i> Presentation of Value Measurement Survey Results
6.	12 Januari 2024 January 12, 2024	Pembukaan <i>Sharing Session Innovation as Culture Catalysis</i> Opening of Sharing Session Innovation as Culture Catalysis
7.	16 Januari 2024 January 16, 2024	<i>Closing Meeting</i> Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi 2023 Closing Meeting of Integrated Internal Audit Management System 2023
8.	16 Januari 2024 January 16, 2024	<i>Kick Off Meeting</i> Program GRC tahun 2024 Kick Off Meeting of GRC Program 2024
9.	18 Januari 2024 January 18, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Januari sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in January, session 1
10.	19 Januari 2024 January 19, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Januari sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in January, session 2
11.	22 Januari 2024 January 22, 2024	Meeting Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) National Transportation Safety Committee (KNKT) Meeting



No.	Tanggal Date	Agenda
12	23 Januari 2024 January 23, 2024	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2023 Management Review Meeting (RTM) 2023
13	24 Januari 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Januari Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in January
14	5 Februari 2024 February 5, 2024	Rapat Finalisasi Materi Penjurian TOP BUMD Awards 2024 Finalization Meeting of TOP BUMD Awards 2024 Judging Materials
15	12 Februari 2024 February 12, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Februari sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in February, session 1
16	13 Februari 2024 February 13, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Februari sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in February, session 2
17	15 Februari 2024 February 15, 2024	Rapat Program Inovasi <i>Review Meeting</i> bersama Direksi Innovation Program Review Meeting with the Board of Directors
18	19 Februari 2024 February 19, 2024	Rapat Pembahasan Tim Inovasi "Signature" Terkait Aktivasi Manasik Haji Discussion Meeting of the "Signature" Innovation Team Regarding the Activation of the Hajj Simulation
19	26 Februari 2024 February 26, 2024	<i>Opening Meeting Audit Stage-I</i> (Document Review ISO 14001:2015)
20	26 Februari 2024 February 26, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Februari Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in February
21	7 Maret 2024 March 7, 2024	<i>Opening Meeting Audit Stage-II</i> (Surveillance Audit ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 dan Certification Audit ISO 14001:2015) Opening Meeting Audit Stage-II (Surveillance Audit ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 and Certification Audit ISO 14001:2015)
22	8 Maret 2024 March 8, 2024	<i>Performance Review Meeting #1</i>
23	8 Maret 2024 March 8, 2024	<i>Closing Meeting Audit Eksternal Stage II</i>
24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Maret sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in March, session 1
25	15 Maret 2024 March 15, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Maret sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in March, session 2
26	25 Maret 2024 March 25, 2024	Rapat Internal Persiapan Bazar dan Sembako Murah Bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta Internal Meeting for the Preparation of Bazaar and Cheap Groceries with the Act. Governor of DKI Jakarta
27	28 Maret 2024 March 28, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Maret Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in March
28	28 Maret 2024 March 28, 2024	Diskusi Kegiatan <i>Training Risk</i> CREL BOD dan BOC Risk Training Discussion on CREL BOD and BOC
29	1 April 2024 April 1, 2024	Update Tim Project Inovasi kepada Direktur Utama Update of Project Innovation Team to the President Director
30	18 April 2024 April 18, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan April Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in April
31	22 April 2024 April 22, 2024	Finalisasi Materi <i>Subsidiaries Performance Meeting</i> Material Finalization of Subsidiaries Performance Meeting
32	23 April 2024 April 23, 2024	<i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan <i>Sustainability Report</i> Tahun 2023 Kick Off Meeting for the Preparation of 2023 Sustainability Report
33	29 April 2024 April 29, 2024	<i>Board of Director Meeting</i>
34	30 April 2024 April 30, 2024	<i>Subsidiaries Performance</i> LRT Jakarta
35	2 Mei 2024 May 2, 2024	Rapat perihal Struktur Organisasi Baru LRT Jakarta Meeting on the New Organizational Structure of LRT Jakarta
36	2 Mei 2024 May 2, 2024	<i>Meeting Update Program</i> Inovasi LRT Jakarta Update Meeting on Innovation Program of LRT Jakarta
37	13 Mei 2024 May 14, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Mei Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in May
38	16 Mei 2024 May 16, 2024	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 LRT Jakarta Coordination Meeting for the Preparation of Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029 of LRT Jakarta

No.	Tanggal Date	Agenda
39	17 Mei 2024 May 17, 2024	Rapat Koordinasi RJPP Lanjutan Extended RJPP Coordination Meeting
40	27 Mei 2024 May 27, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Mei Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in May
41	28 Mei 2024 May 28, 2024	Undangan Meeting Konsolidasi Temuan Peduli Invitation Meeting of Consolidated Concern Findings
42	30 Mei 2024 May 30, 2024	Penilaian Kandidat Beasiswa KORASS Assessment of KORASS Scholarship Candidates
43	3 Juni 2024 June 3, 2024	Diskusi Direksi dan SDM perihal Rotasi Karyawan Discussion of the Board of Directors with HR concerning Employee Rotation
44	7 Juni 2024 June 7, 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pra RUPS Pre-GMS Coordination Meeting
45	7 Juni 2024 June 7, 2024	Rapat Direksi dengan BoD Senior Advisory LRT Jakarta Board of Directors Meeting with BoD Senior Advisory of LRT Jakarta
46	10 Juni 2024 June 10, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juni Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in June, session 1
47	11 Juni 2024 June 11, 2024	Undangan Rehearsal Pra RUPS Tahunan LRT Jakarta Invitation to the LRT Jakarta Annual General Meeting of Shareholders Rehearsal
48	11 Juni 2024 June 11, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juni Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in June, session 2
49	12 Juni 2024 June 11, 2024	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan LRT Jakarta Organization of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of LRT Jakarta
50	19 Juni 2024 June 19, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juni Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in June
51	25 Juni 2024 June 25, 2024	Kalibrasi Penilaian Kinerja Organisasi Calibration of the Organization Performance Assessment
52	4 Juli 2024 July 4, 2024	Rapat Pembahasan Cost Impact Performance Appraisal 2023 Discussion Meeting of Cost Impact Performance Appraisal 2023
53	5 Juli 2024 June 5, 2024	Performance Review Meeting #2
54	11 Juli 2024 June 11, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juli Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in July, session 1
55	12 Juli 2024 June 12, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juli Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in July, session 2
56	26 Juli 2024 June 26, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juli Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in July
57	29 Juli 2024 June 29, 2024	Rapat Finalisasi Jakarta Innovation Award Finalization Meeting of Jakarta Innovation Award
58	5 Agustus 2024 August 5, 2024	Rapat Pembahasan O&M Readiness Discussion on O&M Readiness
59	5 Agustus 2024 August 5, 2024	Rapat Persiapan BP BUMD Preparation Meeting for BP BUMD
60	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Rapat Pembahasan Tata Kelola Pengusahaan Naming Rights Discussion on Naming Rights Procurement Governance
61	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Agustus Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in August
62	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Rapat Pembahasan RKAP tahun 2025 Discussion on RKAP 2025
63	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Pembubaran Panitia Perayaan HUT Indonesia 17 Agustus 2024 Dismissal of the Indonesia Independence Day Celebration Committee, August 17, 2024
64	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Rapat Pembahasan RKAP 2024 dan RKA 2025 Discussion on RKAP 2024 and RKA 2025
65	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Agustus Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in August
66	3 September 2024 September 3, 2024	BoD Talk LRT Jakarta



No.	Tanggal Date	Agenda
67	13 September 2024 September 13, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan September Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in September
68	19 September 2024 September 19, 2024	Rapat Pembahasan Kebijakan Management Inventory Discussion on Inventory Management Policy
69	20 September 2024 September 20, 2024	Rapat Pembahasan Penyerapan Anggaran Discussion on Budget Absorption
70	30 September 2024 September 30, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan September Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in August
71	4 Oktober 2024 October 4, 2024	Rapat Kajian Pergub tentang Subsidi Revive of Governor Regulation on Subsidy
72	8 Oktober 2024 October 8, 2024	Meeting Persiapan Edutour & Agrowisata “Sekolah Hijau LRT Jakarta” Edutour & Agrotourism Preparation Meeting “LRT Jakarta Green School”
73	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Pembukaan Audit Sistem Manajemen Pengamanan Opening of Security Management Audit System
74	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Oktober Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in October
75	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Performance Review Meeting #3
76	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Pembahasan Persiapan Rangkaian HUT LRT Jakarta Discussion on the Preparation of LRT Jakarta Anniversary Event
77	29 Oktober 2024 October 29, 2024	FGD Business Process Level 4 - 5 Divisi Strategi Perusahaan & Manajemen Risiko FGD Business process Level 4 – 5 Company Strategy & Risk Management Division
78	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Oktober Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in October
79	22 November 2024 November 22, 2024	Konsinyering Penyusunan RJPP PT LRT Jakarta periode 2025-2029 Working Committee Meeting for the Preparation of PT LRT Jakarta RJPP of 2025-2029 period
80	25 November 2024 November 25, 2024	Rapat Pembahasan Undangan Stakeholders pada Acara HUT 5 Tahun Komersial LRT Jakarta Discussion Meeting on Stakeholders Invitation to the 5th Commercial Anniversary Event of LRT Jakarta
81	26 November 2024 November 26, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan November Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in November
82	26 November 2024 November 26, 2024	Rapat Pembahasan Rangkaian HUT 5 Tahun operasi komersial LRT Jakarta Discussion Meeting on the 5th Commercial Anniversary Event of LRT Jakarta
83	11 Desember 2024 December 11, 2024	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Desember Monthly Meeting of the Board of Directors and Division Heads in December
84	24 Desember 2024 December 24, 2024	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Desember Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in December

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah PT Jakarta Propertindo (perseroda) (“PT Jakpro”) dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (“PT JIP”) adalah Pemegang Saham Perseroan. PT Jakpro menguasai saham Perseroan sebesar 99,55% sedangkan PT JIP menguasai saham Perseroan sebesar 0,45%.

Disclosure of Affiliation between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Information on Major/Controlling Shareholders Up to The Name of The Ultimate Owner

As stated in the Company’s Articles of Association, the Company’s shareholders are PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (“PT Jakpro”) and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (“PT JIP”). PT Jakpro controls 99.55% of the Company’s shares while PT JIP controls 0.45%.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Perseroan menjunjung tinggi aspek transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi. Pengungkapan hubungan afiliasi ini untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan penting Perseroan.

Berikut ini pengungkapan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali/Utama:

Affiliation Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

The Company upholds the aspect of transparency in its management, including the disclosure of any affiliations between the Major/Controlling Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The disclosure of these affiliations is to prevent any potential conflict of interest in the Company's important decision-making.

The following is a disclosure of affiliation relationships between the Board of Commissioners, Directors, and Controlling or Principal Shareholders:

	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners							
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x	x	x	v
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Mohamad Komisaris Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Direksi Board of Directors							
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	x	x	x	x	x	x
Sahudi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	x	x	x	x	x	x
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	x	x	x	x	x	x

Pemberian Kompensasi Jangka Panjang bagi Manajemen dan/atau Karyawan

Hingga per 31 Desember 2024, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham bagi jajaran manajemen dan/atau karyawan. Perseroan juga tidak melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh publik dan karenanya, status Perseroan adalah perusahaan tertutup.

Provision of Long-Term Compensation for Management and/or Employees

As of December 31, 2024, the Company does not have a share ownership program for management and/or employees. The Company also does not issue shares for public ownership and therefore, the Company's status is that of a private company.



Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana disampaikan di atas, Perseroan belum melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh manajemen. Namun demikian, anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham mereka di perusahaan lain segera setelah transaksi tersebut diselesaikan.

Policy on Disclosure of Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

As stated above, the Company has not issued shares to be held by management. However, members of the Board of Directors or Board of Commissioners are required to disclose their share ownership in other companies as soon as the transaction is completed.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PT LRT Jakarta	Perusahaan Lain > 5% In Other Company >5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	x	x
Iwan Takwin (Komisaris Utama) President Commissioner	x	x
President Commissioner Azas Tigor Nainggolan (Komisaris)	x	x
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) Commissioner	x	x
Direksi Board of Directors	x	x
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director	x	x
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Director of Finance and Business Support	x	x
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Director of Operations and Development	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan pengungkapan rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris. Informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun buku 2024 disampaikan pada tabel berikut:

Disclosure of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

The disclosure policy for concurrent positions of the Board of Directors and Board of Commissioners is regulated in the Board of Directors and Board of Commissioners Board Manual. Information regarding concurrent positions held by the Board of Directors and Board of Commissioners in the 2024 financial year is presented in the following table:

	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	PT LRT Jakarta	Perusahaan Lain In Other Company
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	Direktur Utama President Director PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	Advokat Kantor Hukum ASTINA Kantor Hukum FAKTA Advocate ASTINA Law Firm FACT Law Office
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Principal Expert Policy Analyst Ministry of Transportation Republic of Indonesia
Direksi Board of Directors		
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	x
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	x
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	x

v = ada | x = tidak ada
v = Yes | x = No



Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat membentuk organ pendukung. Dewan Komisaris saat ini dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secara umum pembentukan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris adalah untuk menjalankan tugas keadministrasian dan kesekretariatan yang mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk mempersiapkan rapat, menyusun risalah, mengadministrasikan dokumen, dan berperan sebagai penghubung.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Lingkup tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris secara rinci disampaikan berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan (undangan sampai dengan dokumentasi) rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Membuat, mengadministrasikan serta mendistribusikan risalah Rapat Dewan Komisaris.
4. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. *Monitoring* tindak lanjut hasil persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan;
 - c. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - d. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS.
5. Mempersiapkan bahan/materi, angka 4) huruf b) di atas, antara lain:
 - a. Laporan Bulanan Perseroan;
 - b. Laporan Triwulanan Perseroan;
 - c. Laporan Tahunan Perseroan; dan
 - d. Laporan-laporan lain yang diperlukan, termasuk dokumen/laporan dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners may establish supporting organs. The Board of Commissioners is currently assisted by supporting organs consisting of the Secretary of the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Secretary of the Board of Commissioners

In general, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for administrative and secretarial duties that support the supervisory duties of the Board of Commissioners, including preparing meetings, drafting minutes, administering documents, and acting as a liaison.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The scope of duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners is as follows:

1. Carry out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners.
2. Organize (invitations to documentation) meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, as well as Directors and other related parties.
3. Prepare, administer and distribute the minutes of the Board of Commissioners' Meetings.
4. Provide data/information needed by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners relating to:
 - a. Monitoring follow-up results of the approval, advice, responses or considerations of the Board of Commissioners;
 - b. Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
 - c. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners, in connection with the Company's management activities carried out by the Board of Directors; and
 - d. Administrative support and monitoring related to matters that must be reported to Shareholders/ GMS.
5. Prepare materials for number 4) letter b) above, including:
 - a. The Company's Monthly Report;
 - b. The Company's Quarterly Report;
 - c. The Company's Annual Report; and
 - d. Other necessary reports, including documents/ reports from committees under the Board of Commissioners.

6. Mempersiapkan dan mendokumentasi seluruh dokumen dan aktivitas penerapan GCG, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan dijabat oleh Widya Tri Yusma, sesuai surat pengangkatannya Nomor 001/SDM/118/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Komite Audit

Dalam rangka memperkuat penerapan fungsi pengawasan di lingkungan Perseroan, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Audit. Bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit bertugas untuk memastikan efektivitas penerapan sistem internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh atas perencanaan dan pelaksanaan audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit oleh manajemen Perseroan.

Komite Audit bersama dengan Unit Internal Audit juga berperan dalam menilai kecukupan pengendalian internal, terutama kepatuhan Perseroan dalam penyajian pelaporan keuangan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit mengatur hal-hal pokok di antaranya:

1. Struktur Komite Audit
2. Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit
3. Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Audit
4. Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit
5. Lingkup pekerjaan
6. Kode etik dan mekanisme rapat.

Komposisi dan Keanggotaan Komite Audit

Kriteria Komite Audit dan Masa Jabatan

Per tanggal 31 Desember 2024, Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang diangkat sesuai dengan persyaratan di bawah ini:

6. Prepare and record all GCG implementation documents and activities, especially those related to the implementation of the Board of Commissioners' supervision.

In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners of the Company was served by Widya Tri Yusma, in accordance with her appointment letter Number 001/SDM/118/10/2023 dated October 17, 2023.

Audit Committee

In order to strengthen the implementation of supervisory functions within the Company, the Board of Commissioners has established an Audit Committee. Reporting directly to the Board of Commissioners, the Audit Committee is tasked with ensuring effective implementation of the internal systems and effective performance of the duties of external and internal auditors. The Audit Committee conducts comprehensive monitoring and evaluation of audit planning and implementation and oversees the follow-up of audit results by the Company's management.

The Audit Committee and the Internal Audit Unit also play a role in assessing the adequacy of internal controls, especially the Company's compliance in presenting financial reports with applicable laws and regulations.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee carries out its duties and responsibilities by referring to the Audit Committee Charter. The Audit Committee Charter regulates the following main points:

1. Structure of the Audit Committee
2. Establishment and appointment of members of the Audit Committee
3. Requirements and term of office of members of the Audit Committee
4. Functions, duties, authorities, and responsibilities of the Audit Committee
5. Scope of work
6. Code of Conduct and meeting mechanism.

Composition and Membership of The Audit Committee

Audit Committee Criteria and Term of Office

As of December 31, 2024, the Company's Audit Committee consists of 1 (one) member appointed in accordance with the following requirements:



Persyaratan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perseroan; dan
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Masa Jabatan

1. Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya dalam hal masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal ketua Komite Audit berhenti atau diberhentikan dari posisinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sudah ditetapkan penggantinya.

Profil Komite Audit



Sarno

**Komite Audit
Audit Committee**

Periode Jabatan: Ke-1
Term of Office: 1st

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen Usia 44 tahun Aged 44 years old Kelahiran Blora, 25 Oktober 1980 Born in Blora, October 25, 1980
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	SK Komisaris No. 001/KOM/111/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT LRT Jakarta tanggal 1 November 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 001/KOM/111/XI/2023 concerning the Establishment of Audit Committee of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta dated November 1, 2023
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia

Requirements

1. Possesses high integrity, sufficient ability, knowledge and experience in accordance with their educational background, and able to communicate well;
2. At least one member of the Audit Committee must have an educational background and experience in finance and accounting;
3. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports;
4. Have sufficient knowledge of laws and regulations, especially those concerning Regional Owned Enterprises, and laws and regulations related to the Company's business operations; and
5. One of the members of the Audit Committee must have the ability and understanding of the Company's scope of business.

Term of Office

1. The term of office of the Audit Committee member, which is also a member of the Board of Commissioners, automatically terminates when its term of office as a member of the Board of Commissioners ends.
2. The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners, is in accordance with the term of office of the Board of Commissioners, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate at any time.
3. In the event that the chairman of the Audit Committee resigns or is dismissed from his position, no later than 30 (thirty) working days, a replacement will be determined.

Audit Committee Profile

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master Degree (M.Buss) International University of Japan, 2011 • Master Degree (M.Sc.) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010 • Diploma IV (SST.,Ak.) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, 2004 • Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, 2002 • Master's Degree (M.Buss) from International University of Japan, 2011 • Master's Degree (M.Sc.) from Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2010 • Diploma IV (SST.,Ak.) from State College of Accountancy Jakarta, 2004 • Diploma III from State College of Accountancy Jakarta, 2002
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Senior Policy Analyst, Fiscal Policy Agency, Des 2019 – sekarang • Head of Subdivision for Export Tax (and Customs Facilities), Fiscal Policy Agency, Agustus 2018– November 2019 • Head of Subdivision for Excise Tax, Fiscal Policy Agency, 2012-Agustus 2018 • Auditor, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok, 2008 – 2009 • Goods Inspector, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok, 2007 – 2008 • Auditor, Regional Office of Customs and Excise, Sumatera Selatan, 2006 – 2007 • Auditor, Head Quarter of Directorate General of Customs and Excise, 2004 – 2006 • Consultant, Ernst and Young, 2004 – 2006 • Senior Policy Analyst, Fiscal Policy Agency, Des 2019 – present • Head of Subdivision for Export Tax (and Customs Facilities), Fiscal Policy Agency, Agustus 2018– November 2019 • Head of Subdivision for Excise Tax, Fiscal Policy Agency, 2012-Agustus 2018 • Auditor, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok, 2008 – 2009 • Goods Inspector, Main Office of Directorate General of Customs and Excise, Tanjung Priok, 2007 – 2008 • Auditor, Regional Office of Customs and Excise, South Sumatera, 2006 – 2007 • Auditor, Head Quarter of Directorate General of Customs and Excise, 2004 – 2006 • Consultant, Ernst and Young, 2004 – 2006
Sertifikasi Certification	• Sertifikat Akuntan (Chartered Accountant/CA) – 2004 • Sertifikat Auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan – 2005 • Sertifikat Ketua Auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan – 2008 • Seminar Nasional Internal Audit: Trusted Advisor, Navigating the New Frontier, Connecting between Information Technology and Business Strategy – 2023 • Chartered Accountant (CA) Certificate - 2004 • Auditor Certificate at the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance – 2005 • Chief Auditor Certificate at the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance – 2008 • National Seminar on Internal Audit: Trusted Advisor, Navigating the New Frontier, Connecting between Information Technology and Business Strategy – 2023

Independensi Komite Audit

Perseroan memastikan bahwa anggota Komite Audit Perseroan diangkat dari individu profesional yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi. Berikut kriteria independensi yang harus dipenuhi anggota Komite Audit:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas tugas sebagai anggota Komite Audit.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Independency of the Audit Committee

The Company ensures that members of the Audit Committee are professional individuals who uphold the principle of independency. The following independency criteria must be fulfilled by members of the Audit Committee:

1. Not an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services, and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
2. Not an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for members of the Audit Committee who come from the Board of Commissioners.
3. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and its subsidiaries other than fees for services received related to duties as a member of the Audit Committee.
4. Has no familial relationship due to marriage and heredity to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Secara umum Komite Audit Perseroan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
3. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.
4. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
5. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
7. Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, antara lain: Laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
8. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
9. Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. Dengan tetap mengacu pada sistem pelaporan pelanggaran Perseroan.
10. Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perseroan. Dengan tetap mengacu pada bagian benturan kepentingan dalam pedoman ini.
11. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern kepada Dewan Komisaris.
12. Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi (manajemen) kepada Dewan Komisaris.
13. Komite Audit memantau ketaatan/kepatuhan terhadap pedoman GCG, termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.
14. Komite Audit membantu Dewan Komisaris terhadap kelengkapan dokumen dan aktivitas yang ditetapkan sebagai bagian dari penerapan GCG.
15. Komite Audit melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
16. Komite Audit berwenang untuk:
 - a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan, tentang pegawai (karyawan), dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In general, the Company's Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of the External and Internal Auditor.
2. The Audit Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties.
3. The Audit Committee assesses the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Auditors and External Auditors.
4. The Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of the internal control system and its implementation.
5. The Audit Committee ensures that there is an evaluation procedure for all information issued by the Company.
6. The Audit Committee identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
7. The Audit Committee reviews the financial information to be issued by the Company, including: Financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information.
8. The Audit Committee provides an independent opinion in the event of a dissenting opinion between the Board of Directors and the External Auditor for the services provided.
9. The Audit Committee examines complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes, by still referring to the Company's whistleblowing system.
10. The Audit Committee reviews and provides advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company. By still referring to the conflict of interest section in this guide.
11. The Audit Committee provides recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit to the Board of Commissioners.
12. The Audit Committee provides independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports submitted by the Board of Directors (management) to the Board of Commissioners.
13. The Audit Committee monitors adherence/compliance with GCG guidelines, including the implementation of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.
14. The Audit Committee assists the Board of Commissioners with the completeness of documents and activities determined as part of the implementation of GCG.
15. The Audit Committee reviews the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
16. The Audit Committee is authorized to:
 - a. Access Company documents, data and information, regarding employees, funds, assets, and Company resources needed;

- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai (karyawan), termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
 - c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
17. Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit, yang paling sedikit memuat:
- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - b. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 - c. Tata cara dan prosedur kerja;
 - d. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - e. Sistem pelaporan kegiatan;
 - f. Kode etik;
 - g. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
 - h. Masa tugas Komite Audit; dan
 - i. Piagam Komite Audit, ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Salah satu acuan regulasi untuk membentuk Komite Audit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Sesuai regulasi tersebut, Komite Audit bertugas untuk melaksanakan penelaahan atas informasi keuangan, baik itu laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas.

Kemudian dalam rangka menjunjung prinsip integritas dan transparansi laporan keuangan, Komite Audit bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tahun buku. Penunjukkan auditor eksternal ini merujuk pada ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa. Dalam kapasitasnya untuk menjaga integritas laporan keuangan, maka Komite Audit juga memberikan rekomendasi terkait pergantian auditor eksternal jika dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya secara independen.

Apabila penunjukan auditor eksternal dilakukan oleh induk usaha Perseroan, Komite Audit harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa auditor tersebut telah memenuhi persyaratan, seperti menunjukkan standar legalitas, kepatuhan pada etika profesi, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk memeriksa dan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out the functions of internal control, risk management, corporate governance, and the External Auditor regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee; and
 - c. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.
17. The scope of duties, authorities and responsibilities of the Audit Committee will be described in more detail in the Audit Committee Charter, which at least contains:
- a. Duties, responsibilities, and authorities;
 - b. Composition, structure and membership requirements;
 - c. Work procedures;
 - d. Meeting holding policy;
 - e. Activity reporting system;
 - f. Code of Ethics;
 - g. Provisions regarding the handling of complaints or reports related to violations concerning financial reporting;
 - h. Term of office of the Audit Committee; and
 - i. Audit Committee Charter, signed by the Board of Commissioners and the Chairman of the Audit Committee.

Responsibility of the Audit Committee in Providing Recommendations on the Appointment and Dismissal Of External Auditors

One of the regulatory references in the establishment of the Audit Committee is Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee. In accordance with this regulation, the Audit Committee is tasked with reviewing financial information, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information, which will be published by the Company to the public and/or authorities.

Subsequently, in order to uphold the principles of integrity and transparency of financial statements, the Audit Committee is tasked with providing advice and recommendations to the Board of Commissioners regarding the Accountant and Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's financial statements in the fiscal year. The appointment of an external auditor refers to applicable regulations and prioritizes the principles of independence, scope of assignment, and service fees. In its capacity to maintain the integrity of the financial statements, the Audit Committee also provides recommendations regarding the replacement of external auditors if they are deemed unable to perform their duties independently.

If the appointment of an external auditor is made by the Company's parent company, the Audit Committee must conduct a thorough evaluation to ensure that the auditor has met the requirements, such as demonstrating the standards of legality, compliance with professional ethics, competence, and independence necessary to examine and present accountable financial statements.



Terhadap hasil audit yang disampaikan dan kinerja auditor eksternal selama proses penyusunan pelaporan keuangan, maka Komite Audit akan melakukan evaluasi yang menyeluruh pada akhir periode pelaporan. Jika terdapat temuan yang menunjukkan adanya konflik kepentingan atau penurunan kualitas audit, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi pemberhentian dan mengusulkan penunjukan auditor pengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan secara peraturan perundang-undangan maupun ketentuan perusahaan.

Dengan demikian peran Komite Audit adalah sangat vital dalam memastikan independensi dari auditor eksternal yang ditunjuk oleh induk usaha, sehingga Perseroan dapat menyajikan informasi keuangan yang akuntabel di mata regulator maupun publik luas.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan memberikan kesempatan kepada jajaran anggota Komite Audit untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2023, kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal/Tempat Date/Venue
Sarno	"Leadership For Sustainable Impact: GRC, ESG and SDGs"	22 – 23 Agustus 2024, Yogyakarta August 22 – 23, 2024, Yogyakarta
Sarno	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage National Conference of Risk Management Professionals X: Sustainable For Organizational Resilience And Competitive Advantage	12 – 13 Desember 2024, Bali December 12 – 13, 2024, Bali

Ketentuan Rapat Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 19, dengan tingkat kehadiran anggota komite mencapai 100%.

Kebijakan Remunerasi Bagi Anggota Komite Audit

Perseroan memberikan remunerasi kepada Komite Audit sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang diberikan selama tahun buku. Besaran dan struktur remunerasi Komite Audit ditentukan berdasarkan RKAT tahun 2024.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melakukan sejumlah kegiatan yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Melakukan *review* penyempurnaan sistem pengendalian internal;
2. Melaksanakan rapat bersama Audit Internal dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan nasihat dan saran kepada Audit Internal;
4. Menyusun Program Kerja Komite Audit;
5. Menyampaikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris;

Regarding the submitted audit results and the performance of the external auditor during the financial reporting process, the Audit Committee will conduct a comprehensive evaluation at the end of the reporting period. If there are findings that indicate a conflict of interest or a decline in audit quality, the Audit Committee must provide recommendations for dismissal and propose the appointment of a replacement auditor in accordance with the requirements set forth in laws and regulations and company regulations.

Thus, the role of the Audit Committee is very vital in ensuring the independency of external auditors appointed by the parent company, so that the Company can present accountable financial information to regulators and the general public.

Competency Development of the Audit Committee

The Company provides opportunities for Audit Committee members to participate in various competency development activities that improve the implementation quality of their duties and responsibilities. In 2023, competency development activities participated in by Audit Committee members are as follows:

Provisions of Audit Committee Meetings

In 2024, the Audit Committee held 19 meetings with the Board of Commissioners, with a 100% attendance rate of committee members.

Remuneration Policy for Audit Committee Members

The Company provides remuneration to the Audit Committee as a form of appreciation for their performance during the fiscal year. The amount and structure of remuneration for the Audit Committee are determined based on the 2024 RKAT.

Implementation of Audit Committee's Duties in 2024

In 2024, the Audit Committee has carried out a number of activities in accordance with its scope of duties and responsibilities, including:

1. Review the improvement of the internal control system;
2. Hold meetings with Internal Audit and the Board of Commissioners;
3. Provide advice and suggestions to Internal Audit;
4. Prepare the Audit Committee Work Program;
5. Submit opinions and suggestions to the Board of Commissioners;

6. Menyampaikan Laporan Komite Audit;
7. Melakukan telah (*self assessment*) Kinerja Komite Audit;
8. Berperan dalam peningkatan Kinerja terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan belum membentuk komite khusus yang menangani fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian, fungsi nominasi dilaksanakan oleh kandidat potensial selain posisi Direksi dan Komisaris, yaitu level Kepala Divisi. Divisi SDM akan menyeleksi proses kerja fungsi nominasi untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi yang selanjutnya akan menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.

Demikian halnya dengan fungsi remunerasi, Divisi SDM akan menyusun dan menyeleksi proses kerjanya untuk dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuannya. Direksi kemudian akan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris yang mengemban tanggung jawab sebagai organ pengawasan Perseroan.

Berikut lingkup tanggung jawab fungsi Nominasi dan Remunerasi:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan para eksekutif lainnya di dalam Perusahaan;
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Membantu menyusun sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya di Perusahaan serta memantau pelaksanaannya.

6. Submit the Audit Committee Report;
7. Conduct a self-assessment of the Audit Committee's performance;
8. Play a role in improving the performance of Good Corporate Governance (GCG).

Nomination and Remuneration Functions

Until the end of the reporting period, the Company has not established a special committee to oversee the Nomination and Remuneration functions. Thus, the nomination function is carried out by potential candidates other than the Board of Directors and Board of Commissioners, namely Division Head. The HR Division will oversee the selection process for the nomination function and report to the Board of Directors, which will in turn submit periodic reports to the Board of Commissioners.

Likewise with the remuneration function, the HR Division will organize and oversee the selection process and report to the Board of Directors for approval. The Board of Directors will then submit the results to the Board of Commissioners, which has responsibility as the Company's supervisory organ.

The scope of responsibility for the Nomination and Remuneration function is as follows:

1. Drafting selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and other executives within the Company;
2. Establishing an assessment system and providing recommendations regarding the number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners needed by the Company;
3. Assisting in the formulation of a payroll system, the provision of benefits and other facilities in the Company, and monitoring its implementation.



Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Direksi telah menunjuk sejumlah organ pendukung untuk membantunya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan secara efektif dan efisien. Organ pendukung Direksi adalah Sekretaris Perusahaan, Prasarana, SDM dan Bagian Umum, Sarana, Operasi dan Pelayanan, Akuntansi dan Keuangan, Strategi Perusahaan dan Manajemen Risiko, Manajemen Rantai Pasok, Mutu, Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan serta Internal Audit.

Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk menjalankan peran sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) yang bertanggung jawab untuk membangun komunikasi dan hubungan antar Organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan *Stakeholders*, penerapan keterbukaan informasi serta pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mampu membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik di internal maupun eksternal Perseroan, Sekretaris Perusahaan juga disyaratkan untuk memiliki keterampilan administratif, serta memiliki pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Di samping menjalankan fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk membantu tugas Direksi, yaitu dalam merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, pemasaran, tanggung jawab sosial, protokoler, legal, administrasi, dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal dan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pada tahun buku 2024, Perseroan menunjuk Aris Rizal Arafah untuk menduduki jabatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 032/SDM/106/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Rotasi dan Mutasi Karyawan.

The Board of Directors has established a number of supporting organs for effective and efficient implementation of its duties and responsibilities in managing the Company. The supporting organs of the Board of Directors are the Corporate Secretary, Infrastructure, Human Resources and General Affairs, Facilities, Operations and Services, Accounting and Finance, Corporate Strategy and Risk Management, Supply Chain Management, Quality, Safety, Health, Security and Environment, and Internal Audit.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary functions as a liaison officer responsible for establishing communication and relationships between the Company's organs, the Company and its stakeholders, the implementation of information disclosure, and compliance with applicable laws and regulations.

In addition to being able to establish good communication and working relationships within and outside the Company, the Corporate Secretary is also required to possess administrative skills and have experience that supports the performance of his or her duties.

Besides carrying out these functions, the Corporate Secretary is also responsible for assisting the duties of the Board of Directors, including the formulation and drafting of policies and guidelines, planning, evaluation, and implementation of the Company's external relations, marketing, social responsibility, protocol, legal, administrative, and internal communication activities in accordance with established policies, guidelines, and planning.

Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on internal mechanisms and approval from the Board of Commissioners. In the 2024 fiscal year, the Company has appointed Aris Rizal Arafah as Corporate Secretary, referring to the Decree of the Board of Directors No. 032/SDM/106/VII/2024 dated July 26, 2024 concerning Employee Rotation and Transfer.



Aris Rizal Arafah

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat sejak 26 Juli 2024

Held office since: July 26, 2024

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Indonesian Citizen Usia 34 tahun per 31 Desember 2024 Aged 34 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2017) Master's Degree in Management from Gadjah Mada University (2017)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan & Plt. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2024) • Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (2024) • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2024) • Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan (2024) • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2023) • Kepala Departemen Subsidi dan Anggaran PT LRT Jakarta • Finance Executive PT LRT Jakarta • Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan & Plt. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2024) • Head of Corporate Secretary Division & Act. Head of Business Development Division (2024) • Act. Head of Corporate Secretary Division (2024) • Head of Business Development Division (2024) • Head of Operations and Service Division (2024) • Head of Business Development Division (2023) • Head of Subsidy and Budget Department of PT LRT Jakarta • Finance Executive of PT LRT Jakarta • Head of Corporate Secretary Division & Acting Head of Business Development Division (2024)

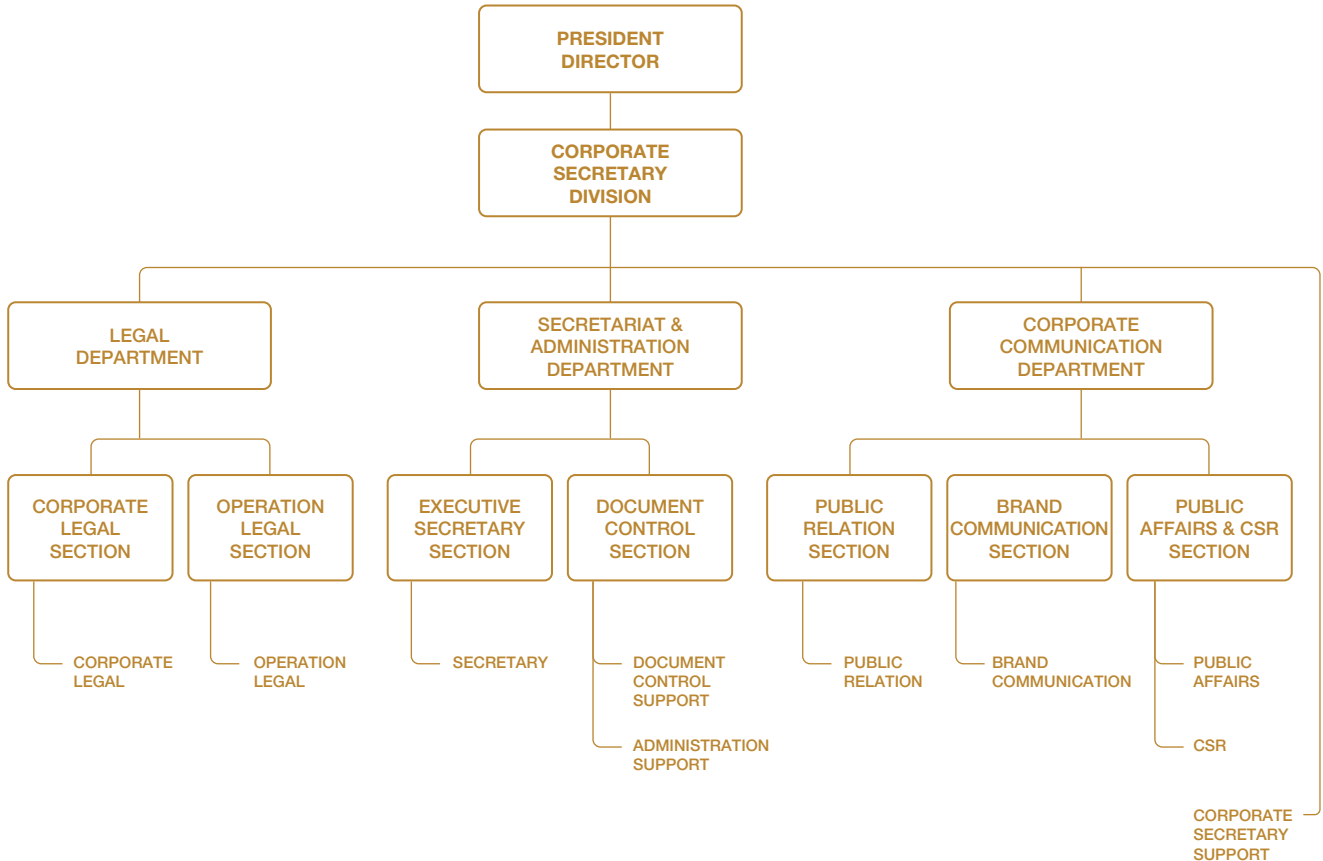


Struktur Organisasi Divisi Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah membentuk struktur organisasi Sekretaris Perusahaan melalui Keputusan Direksi No. 003/DRU/111/VIII/2024. Di bawah ini adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan beserta fungsi-fungsinya:

Organizational Structure of the Corporate Secretary Division

The Company has established an organizational structure of the Corporate Secretary based on the Board of Directors' Decree No. 003/DRU/111/VIII/2024. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary and its functions:



Tugas Pokok Serta Fungsi

Sekretaris Perusahaan mengemban tugas-tugas pokok berikut ini:

1. Penghubung (*liaison officer*) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan masyarakat, regulator, investor, lembaga atau asosiasi lain (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Perseroan.
2. Penatausahaan (kesekretariatan) dokumen Perseroan, serta membuat, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah Rapat Direksi maupun RUPS. Dalam hal pembuatan, pemeliharaan dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perseroan yang berlaku.
3. Penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan serta laporan sewaktu-waktu yang diminta untuk dan atas nama Perseroan, berisi informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
4. Menyelenggarakan (undangan sampai dengan dokumentasi) rapat Direksi dan rapat/pertemuan antara Direksi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Main Duties and Functions

The Corporate Secretary has the following duties:

1. As a liaison officer between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and representatives of the Company in dealing with the public, regulators, investors, other institutions or associations (*stakeholders*) related to the Company.
2. Administration (secretariat) of the Company's documents, as well as creating, maintaining and storing the Register of Shareholders, the Special Register, and the minutes of the Board of Directors and GMS meetings. In terms of manufacture, maintenance and storage must be in accordance with the applicable provisions of laws and regulations and the Company's internal policies.
3. Prepare monthly, quarterly, and annual reports, as well as occasional reports requested for and on behalf of the Company, containing accurate and reliable information.
4. Organize (invitation to documentation) meetings of the Board of Directors and meetings between the Board of Directors and Shareholders, the Board of Commissioners, and other related parties.

5. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Direksi yang berkaitan dengan:
 - a. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan dari Direksi kepada manajemen di bawah Direksi, dan termasuk persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan dari Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Divisi/*Special Business Unit* Proyek dalam mengelola unit kerja;
 - c. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dari Direksi; dan
 - d. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan, tanggapan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
6. Memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan mengenai data atau dokumen dari Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam kebijakan informasi Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada Pemegang Saham atau kepada *stakeholders* secara tepat waktu, termasuk mengelola penyampaian data, dokumen dan laporan Perseroan secara elektronik sesuai ketentuan Pergub No. 19 Tahun 2018.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengadakan program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.
9. Melakukan pengurusan mengenai permohonan dan/atau perubahan data Perseroan terkait pengurusan Direksi, antara lain: Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan legalitas lainnya terkait Perseroan.
10. Mengelola penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Unit Kerja dalam rangka sosialisasi, seminar, fokus *group discussion*, peresmian, *launching* dan bentuk kegiatan lainnya yang dihadiri oleh *stakeholders* eksternal Perseroan. Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan tersebut agar dapat memberikan kontribusi peningkatan citra positif Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan wawasan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi yang diuraikan berikut ini:

5. Provide data/information required by the Board of Directors relating to:
 - a. Monitoring the follow-up of decisions, and directions from the Board of Directors to management under the Board of Directors, and including approval, advice, responses, or considerations from the Board of Commissioners to the Board of Directors;
 - b. Administrative materials regarding Division/*Special Business Unit*/Project reports/activities in managing work units;
 - c. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval from the Board of Directors;
 - d. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval, response, or recommendations from the Board of Commissioners and/or GMS.
6. Provide information services needed regarding data or documents from the Company within the limits specified in the Company's information policy and submit other reports to Shareholders or to stakeholders in a timely manner, including managing the delivery of Company data, documents and reports electronically, in accordance with the provisions of Regulation of the Governor No. 19 of 2018.
7. Provide information needed by the Board of Directors and Commissioners periodically and/or at any time when requested.
8. Organize a Company introduction program for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were appointed for the first time.
9. Manage requests for and/or change Company data related to the management of the Board of Directors, including: Appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and other legal matters related to the Company.
10. Manage the implementation of Work Unit activities in the context of outreach, seminars, focus group discussions, inauguration, launching and other forms of activities attended by the Company's external stakeholders. Also, manage the implementation of these activities in order to contribute to increasing the positive image of the Company.

Competency Development of the Corporate Secretary

The Company provides opportunities to the Corporate Secretary to attend various competency and knowledge development programs that can support the implementation of its duties and responsibilities. In 2024, the Corporate Secretary has attended the following competency development programs:



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Kegiatan Type of Activity	Pelaksanaan Implementation Date
Aris Rizal Arafah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Aris Rizal Arafah, Head of Corporate Secretary Division	<i>Workshop Management System</i>	15 Januari 2024 January 15, 2024
Randy Arya, Kepala Departemen Kesekretariatan dan Administrasi Perusahaan Randy Arya, Head of Company Secretariat and Administration Department	<i>Workshop Management System</i>	15 Januari 2024 January 15, 2024
Syifa Hidayati, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Syifa Hidayati, Head of Company Communication Department	<i>Workshop Management System</i>	15 Januari 2024 January 15, 2024
Rizandi Maestrodiaz, Kepala Departemen Hukum Rizandi Maestrodiaz, Head of Legal Department	<i>Workshop Management System</i>	15 Januari 2024 January 15, 2024

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan hubungan dengan media, seperti pembuatan siaran pers, kunjungan ke Depo dan Stasiun.
2. Menjalankan dan memantau media sosial resmi Perseroan: Instagram, Tiktok, Facebook, X, dan YouTube.
3. Membuat materi dan konten publikasi Perseroan seperti poster digital, video dan foto.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan para pemangku kepentingan.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama serta turunannya pada tahun 2024.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan rapat antara Perseroan dengan pemangku kepentingan pemerintah.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *townhall* perusahaan maupun mendukung kegiatan aktivasi untuk meningkatkan jumlah penumpang.
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pra RUPS, RUPS Tahunan dan RUPS LB 2024.
9. Menghadiri rapat Direksi sebanyak 84 kali dan menyusun risalah rapat Direksi.
10. Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali dan mempersiapkan materi rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
11. Mengoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
12. Mengelola dan menyimpan dokumen Perseroan seperti Keputusan Direksi, *Board Manual*, Surat Edaran, Matriks Kewenangan pada tahun 2024.
13. Membuat dan memutakhirkan kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik.
14. Mengoordinasikan pelaporan dan sosialisasi pengisian pelaporan LHKPN.

Audit Internal

Bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama, Perseroan membentuk Divisi Audit Internal merupakan salah satu unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal. Divisi Audit Internal mengedepankan prinsip independensi dan profesionalisme sesuai standar profesi dalam menjalankan tugasnya.

Corporate Secretary Activity Report

In 2024, the Corporate Secretary has carried out a number of activities as part of its duties and responsibilities, including:

1. Coordinating media relations activities, such as drafting press releases and visits to Depots and Stations.
2. Managing and monitoring the Company's social media accounts: Instagram, TikTok, Facebook, X, and YouTube.
3. Preparing materials and content for the Company's publications such as digital posters, videos, and photos.
4. Coordinating stakeholder visits.
5. Coordinating the signing of MoUs and Cooperation Agreements and their derivatives in 2024.
6. Coordinating meetings between the Company and government stakeholders.
7. Organizing company town hall events and activation activities to increase passenger numbers.
8. Organizing Pre-AGM, Annual AGM, and Extraordinary AGM meetings in 2024.
9. Attending Board meetings 55 times and preparing meeting minutes.
10. Attending joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors 11 times and preparing meeting materials.
11. Coordinating Board of Directors meetings with both internal and external parties.
12. Managing and storing Company documents such as Board Decrees, Board Manuals, Circulars, and Authority Matrices in 2023.
13. Drafting and updating policies related to Good Corporate Governance.
14. Coordinating reporting and dissemination of asset disclosure reporting (LHKPN).

Internal Audit

Responsible directly to the President Director, the Company established the Internal Audit Division as one of the work units that carries out internal control functions. In carrying out its duties, the Internal Audit Division prioritizes the principles of independency and professionalism in accordance with professional standards.

Piagam Audit Internal

Sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juli 2023. Berikut pokok-pokok yang diatur dalam Piagam Audit Internal Perseroan:

1. Visi, Misi dan Tujuan Internal Audit
2. Kedudukan dan Ruang Lingkup Internal Audit
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit
4. Standar Audit
5. Independensi dan Objektivitas
6. Kebijakan Masa Tunggu
7. Hubungan Kerja Internal Audit
8. Pelaporan
9. Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
10. Program *Quality Assurance & Improvement Program*

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Secara struktural, Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Penunjukan Kepala Divisi Audit Internal didasarkan pada persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Piagam Audit Internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Perseroan mengangkat Adityawarman Nugroho sebagai Kepala Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SDM/106/ VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT LRT Jakarta.



Internal Audit Charter

As a guideline for carrying out its duties and responsibilities, the Company has compiled an Internal Audit Charter which was approved and signed by the Board of Commissioners and Directors on July 25, 2023. The following are the main points regulated in the Company's Internal Audit Charter:

1. Vision, Mission and Objectives of Internal Audit
2. Position and Scope of Internal Audit
3. Authority and Responsibilities of Internal Audit
4. Audit Standards
5. Independence and Objectivity
6. Waiting Period Policy
7. Internal Audit Working Relationship
8. Reporting
9. Auditor Development of the Internal Audit Division
10. Quality Assurance & Improvement Program

Appointment and Dismissal of the Head of The Internal Audit Division

Structurally, the Head of the Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The appointment of the Head of the Internal Audit Division is based on the requirements as stipulated in the Company's Internal Audit Charter and other applicable laws and regulations.

Profile of the Head of the Internal Audit Division

The Company appointed Adityawarman Nugroho as Head of the Internal Audit Division based on the Decree of the Board of Directors No. 003/SDM/106/VII/2023 dated July 1, 2023, concerning the Appointment of Permanent Employees of PT LRT Jakarta.

Adityawarman Nugroho

Kepala Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit Division

Menjabat sejak: 1 Juli 2023
Serving since: July 01, 2023

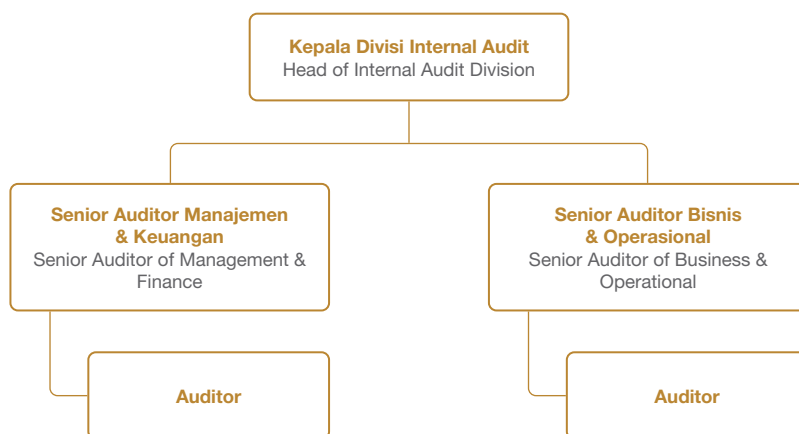
Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Indonesian Citizen Usia 37 tahun per 31 Desember 2024 Aged 37 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister (S2) Magister Manajemen –Universitas Negeri Jakarta, Indonesia • Sarjana (S1) Ekonomi, Akuntansi – Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia • Magister (S2) Magister Manajemen –Universitas Negeri Jakarta, Indonesia • Sarjana (S1) Ekonomi, Akuntansi – Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia



Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Departemen Internal Audit, PT Jakarta Propertindo (Persero) • Senior Internal Auditor, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah • Auditor, PT Bank Tabungan Negara, Tbk • Kepala Departemen Internal Audit, PT Jakarta Propertindo (Persero) • Senior Internal Auditor, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah • Auditor, PT Bank Tabungan Negara, Tbk
Sertifikasi Certifications	• Certified Forensic Auditor • Qualified Internal Auditor • Lead Implementer ISO 27001 • Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification • Risk Management Certification Body

Struktur Organisasi Audit Internal

Pada tahun 2024, Divisi Audit Internal didukung oleh 4 (empat) orang auditor yang terdiri dari 1 orang Kepala Divisi Internal Audit, 1 orang Senior Auditor Manajemen & Keuangan, 1 orang Senior Auditor Bisnis & Operasional, dan 1 orang Auditor. Berikut struktur organisasi Divisi Audit Internal Perseroan:



Organizational Structure of The Internal Audit

In 2024, the Internal Audit Division is supported by 4 (four) auditors consisting of 1 Head of Internal Audit Division, 1 Senior Management & Finance Auditor, 1 Senior Business & Operations Auditor, and 1 Auditor. The following is the organizational structure of the Company's Internal Audit Division:

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Perseroan menjamin bahwa karyawan Divisi Audit Internal telah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan dimilikinya sertifikasi profesi audit internal. Audit Internal mematuhi standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (*The Institute of Internal Auditors*). Berikut sertifikasi profesi yang dimiliki oleh Divisi Audit Internal:

Internal Audit Professional Certification

The Company guarantees that the employees of the Internal Audit Division possess the qualifications required to support the implementation of their duties and responsibilities, as evidenced by their internal audit professional certification. The Internal Audit Division complies with the International Standards for Internal Audit Professional Practice (*The Institute of Internal Auditors*). The Internal Audit Division has the following professional certifications:

Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Certification Level
Adityawarman Nugroho, Internal Audit Division Head	• Qualified Internal Auditor • Sertifikasi Manajemen Risiko
Bambang Arifin, Business & Operational Senior Auditor	Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan
I Dewa Ayu Rai W., Management & Financial Senior Auditor	Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan
Angga Chandra P., Auditor	Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar

Tanggung Jawab Internal Audit:

1. Menyusun, mengevaluasi, dan memutakhirkan pedoman audit intern.
2. Menyusun dan menyampaikan anggaran dan rencana kerja audit tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Responsibilities of the Internal Audit:

1. Develop, evaluate, and update internal audit guidelines.
2. Prepare and present an annual audit budget and work plan to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.

3. Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja Internal Audit, pedoman audit intern yang berkaitan, serta standar kode etik yang berlaku umum.
4. Memberikan saran serta rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/defisiensi yang ditemukan dalam penugasan.
5. Melaksanakan penugasan audit di luar rencana kerja atas permintaan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi dengan Persetujuan Direktur Utama.
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan audit eksternal, atau fungsi pengawasan lainnya sebagai penyedia *assurance* agar dapat dicapai hasil yang komprehensif dan optimal.
7. Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil penugasan audit internal dan hasil audit eksternal maupun penyedia jasa *assurance* lainnya.
8. Memastikan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi auditor internal.
9. Memastikan terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada Divisi Internal Audit.

Wewenang Audit Internal

1. Melaksanakan penugasan tanpa campur tangan, paksaan ataupun izin dari manajemen Perusahaan. Proses penugasan maksud, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan, dan frekuensi penugasan.
2. Mengakses seluruh informasi, aktivitas, perusahaan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Menggunakan tenaga perbantuan dari pihak lain, baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dengan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergitas dan unit/fungsi penyelenggara *assurance* lainnya.
5. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia internal audit secara periodik.
6. Menetapkan pedoman yang merupakan kebijakan dan prosedur standar.
7. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
8. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit tentang hasil audit, termasuk melaporkan upaya yang menghambat akses kepada pencatatan, data/informasi, bukti/dokumen dan/atau kegiatan yang menjadi objek audit ataupun melaporkan adanya penolakan pelaksanaan audit oleh objek audit.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Perseroan senantiasa memfasilitasi auditor internal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan sertifikasi profesi yang sesuai kebutuhan Perseroan. Berikut pelatihan yang diikuti pada tahun 2024:

3. Carry out assignments based on the annual Internal Audit work plan, relevant internal audit guidelines, and generally accepted ethical standards.
4. Provide recommendations for improvement regarding the conditions, causes, and/or consequences resulting from weaknesses/deficiencies identified during assignments.
5. Conduct audits beyond the work plan upon request from the President Director, Board of Commissioners, and Management with the President Director's approval.
6. Coordinate activities with external auditors or other oversight functions as assurance providers to achieve comprehensive and optimal results.
7. Monitor the implementation progress of follow-up actions resulting from internal audit assignments and external audit findings or other assurance service providers.
8. Ensure continuous competency development for internal auditors.
9. Ensure the transfer of knowledge from external parties to the Internal Audit Division, particularly when external services are used for internal audit activities.

Authorities of the Internal Audit

1. Execute assignments independently, without interference, coercion, or permission from the Company's management. This process includes determining the scope, methods, techniques, strategies, approaches, and frequency of assignments.
2. Access all information, activities, and company assets, including but not limited to employee records and resources, as well as other relevant matters related to its duties and functions.
3. Utilize assistance from other parties, whether internal or external to the company, with the President Director's approval.
4. Coordinate and build synergistic relationships with other assurance provider units/functions.
5. Develop the knowledge and skills of internal audit human resources periodically.
6. Establish guidelines that represent standard policies and procedures.
7. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
8. Report directly to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee on audit results, including reporting efforts hindering access to records, data/information, evidence/documents, and/or activities subject to audit or reporting refusal to undergo an audit by the audited object.

Competency Development of the Internal Audit

The Company always facilitates internal auditors to improve their competencies and knowledge by registering them in various professional certifications according to the Company's needs. The following are the trainings attended in 2024:



Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Tempat Venue
Adityawarman Nugroho	Internal Audit Division Head	Certified Risk Governance Professional	Jakarta
Bambang Arifin	Business & Operational Senior Auditor	Qualified Internal Audit Tingkat Lanjutan Qualified Internal Audit Advanced Level	Jakarta
I Dewa Ayu Rai. W	Management & Financial Senior Auditor	Qualified Internal Audit Tingkat Lanjutan Qualified Internal Audit Advanced Level	Jakarta
Angga Chandra. P	Auditor	Qualified Internal Audit Tingkat Lanjutan Qualified Internal Audit Advanced Level	Jakarta

Rapat Audit Internal

Divisi Audit Internal mengadakan sejumlah pertemuan, termasuk dengan Direksi, Dewan Komisaris ataupun dengan Komite Audit untuk membahas hasil temuan audit dan menyampaikan rekomendasi perbaikannya. Pada tahun 2024, Divisi Audit Internal telah mengadakan 26 rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Internal Audit Meetings

The Internal Audit Division holds a number of meetings, including with the Board of Directors, Board of Commissioners or with the Audit Committee to discuss audit findings and provide recommendations for improvement. In 2024, the Internal Audit Division held 26 meetings with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Adityawarman Nugroho*	General Manager Internal Audit	26	26	100%
Bambang Arifin	Management & Financial Deputy Internal Audit	26	26	100%
I Dewa Ayu Rai. W	Business & Operational Deputy Internal Audit	26	26	100%
Angga Chandra. P	Auditor	26	26	100%

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal

1. Kegiatan Audit

Hingga per tanggal 31 Desember 2024, dari target Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) kegiatan audit, terealisasi sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kegiatan assurance sesuai RKAT Tahun 2024 dan 1 (satu) kegiatan assurance diluar RKAT Tahun 2024.
- 4 (empat) kegiatan konsultasi.

2. Kegiatan Non-Audit

Selain itu, Divisi Audit Internal juga melakukan kegiatan non-audit berupa pendampingan auditor eksternal dan melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil audit. Berikut rincian masing-masing kegiatan non-audit sepanjang tahun 2024:

- Pendampingan audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta Tahun Buku 2023 oleh Kantor AKuntan Publik (KAP).
- Pendampingan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PT Jakarta Propertindo (Persero) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023 oleh BPK.

Implementation of Internal Audit Division Tasks

1. Audit Activities

As of December 31, 2024, out of the 2024 Annual Audit Work Plan (RKAT) target of 11 (eleven) audit activities, the following has been realized:

- 10 (ten) assurance activities according to the 2024 Annual Work Plan and 1 (one) assurance activity outside the 2024 Annual Work Plan.
- 4 (four) consulting activities.

2. Non-Audit Activities

In addition, the Internal Audit Division also carries out non-audit activities in the form of assisting external auditors and monitoring the implementation of follow-up actions to audit findings and recommendations. The following is a breakdown of each non-audit activity throughout 2024:

- Audit assistance for the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the Fiscal Year 2023 by the Public Accounting Firm (KAP).
- Assistance in the Examination of the Internal Control System and Compliance with Legislation and Regulations of PT Jakarta Propertindo (Persero) and Subsidiaries for the Fiscal Year 2023 by the BPK.

- c. Pendampingan Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai Triwulan IV Tahun 2024 oleh BPKP DKI Jakarta.
- d. Pendampingan Evaluasi atas Pembangunan Infrastruktur Transportasi Massal Perkotaan pada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT LRT Jakarta Triwulan IV Tahun 2024 oleh BPKP Pusat.
- e. Pendampingan audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta Tahun Buku 2024 oleh KAP.

Tindak Lanjut Hasil Audit

Selain menyusun dan menerbitkan laporan hasil audit internal, Divisi Internal Audit juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh *auditee* sesuai rekomendasi yang diberikan. Berikut kami sampaikan laporan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit tahun 2024 dan rekomendasi audit tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan saat ini:

1. Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun 2024
Kegiatan audit tahun 2024 terdapat 33 (tiga puluh tiga) temuan dengan 40 (empat puluh) rekomendasi. Atas temuan dan rekomendasi tersebut, Divisi Internal Audit melakukan *monitoring* atas tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee*.
2. Temuan dan rekomendasi hasil audit tahun 2023 dan 2022 telah seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh *auditee*.

Auditor Eksternal

Penunjukan auditor eksternal ditujukan untuk memastikan keandalan dan kewajaran laporan keuangan suatu entitas, dengan memberikan opini independen atasnya, serta berperan dalam mendeteksi potensi kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan pemangku kepentingan Perseroan.

Induk Perseroan dalam hal ini menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan yang akan diterbitkan bebas salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dalam semua hal termasuk posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas. yang disampaikan kepada Para Pemangku Kepentingan.

Penunjukan auditor eksternal dilakukan oleh Induk Perseroan. Penunjukan auditor eksternal wajib mematuhi ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Assistance in the Review of Governance of the National Strategic Project (PSN) Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading and Velodrome - Manggarai Quarter IV of 2024 by BPKP DKI Jakarta.
- d. Assistance in the Evaluation of the Development of Urban Mass Transportation Infrastructure Urban Transportation Infrastructure Development at PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and PT LRT Jakarta Quarter IV of 2024 by Central BPKP.
- e. Assistance for the audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the Fiscal Year 2024 by KAP.

Follow-Up of Audit Results

Other than compiling and issuing internal audit reports, the Internal Audit Division also monitors the follow-up actions taken by the auditee according to the recommendations provided. The following is a monitoring report on the follow-up actions taken on the 2024 audit results and the 2023 audit recommendations that have not been followed up as of today:

1. Follow-up on the 2024 Audit Results
The 2024 audit activities resulted in 33 (thirty-three) findings with 40 (forty) recommendations. Based on these findings and recommendations, the Internal Audit Division monitors the follow-up carried out by the auditee.
2. The findings and recommendations from the audits in 2023 and 2022 have all been followed up by the auditee.

External Auditor

The appointment of an external auditor is intended to ensure the reliability and fairness of an entity's financial statements by providing an independent opinion on the entity, as well as contributing to the detection of potential fraud or errors that could be detrimental to the Company's stakeholders.

In this case, the Company's Parent Company assigns a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements to ensure that all financial statements to be published are free from material misstatement and in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia in all respects, including financial position, operating results, changes in equity and cash flows, which are submitted to stakeholders.

The appointment of an external auditor is carried out by the Company's Parent. The appointment of an external auditor must comply with the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.



Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik melalui beberapa mekanisme yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perseroan.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Penunjukan Auditor Eksternal

Induk Perseroan telah menunjuk auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Induk Perseroan.

Berikut auditor eksternal Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir hingga tahun buku 2024:

The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in the Appointment Mechanism of Public Accountant

The appointment of a Public Accountant is carried out through several mechanisms, which are explained as follows:

1. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, initiates the selection process of external Auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in accordance with the prevailing procurement regulations in the Company.
2. The Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on an evaluation of the performance of the external auditor in auditing financial statements.
3. The Board of Commissioners conveys the reasons for the nomination to the General Meeting of Shareholders (GMS) and the proposed fee/remuneration for the external auditor.
4. The proposal to the GMS can be conveyed through a separate letter that is part of the Board of Commissioners' response letter regarding the Company's annual performance.
5. The Board of Commissioners evaluates the performance of the external auditor through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards.
6. For the process of appointing external auditor candidates and/or reappointing external auditors carried out by the GMS, the Board of Commissioners merely delegates authority to the GMS to appoint the auditor.

Appointment of External Auditor

The Parent Company has appointed an external auditor to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024. The selection process is carried out through the goods and services procurement mechanism within the Parent Company.

The following are the Company's external auditors in the last 5 (five) years until the 2024 fiscal year:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Jasa Lainnya Other Services	Biaya (Rp) Fee (IDR)
2024	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Sagita Fajarahayu	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2024	-	Rp144.300.000
2023	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Sagita Fajarahayu	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2023	-	Rp109.807.583
2022	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2022	-	Rp124.960.000
2021	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2021	1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2021. 2. Jasa asuransi atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2021. 1. Assurance services for the 2021 statutory compliance report. 2. Assurance services on the 2021 compliance with internal control report.	Rp124.960.000
2020	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Suhartono, MPA, Ak., CPA	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2020	1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2020. 2. Jasa asuransi atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2020. 1. Assurance services for the 2021 statutory compliance report. 2. Assurance services on the 2020 compliance with internal control report.	Rp96.562.400



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara menyeluruh dan berkelanjutan di lingkungan perusahaan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, baik dari aspek operasional, pelaporan maupun kepatuhan Perseroan. Oleh karenanya, mengingat pentingnya penerapan SPI untuk mewujudkan suatu organisasi berkelanjutan, maka Perseroan telah menyusun Manual dan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal diatur dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal No. LRTJ-AIT-002 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal meliputi:

1. Tujuan Kepatuhan, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator, ketentuan perjanjian pihak ketiga, maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Tujuan Informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perusahaan dari risiko kerugian.
4. Tujuan Budaya Risiko, yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perusahaan secara berkesinambungan.

Melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, Perseroan berharap dapat melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari potensi penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi operasional serta menjamin pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaannya, maka komponen SPI yang diterapkan oleh Perseroan mencakup:

1. Kegiatan Pengendalian

Manajemen Perseroan menetapkan prosedur yang harus dilakukan agar pengendalian internal dapat berjalan sesuai rencana dan memastikan Perseroan terhindar dari kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas Perseroan.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar semua aktivitas yang merupakan rangkain prosedur pengendalian internal telah memenuhi peraturan

The Company implements a comprehensive and sustainable Internal Control System (SPI) in its environment in order to provide adequate assurance of the achievement of the organization's objectives, whether from the operational, reporting or compliance aspects of the Company. Therefore, given the importance of implementing SPI to realize a sustainable organization, the Company has compiled a Manual and policy on the Internal Control System regulated in the Internal Control System Guidelines No. LRTJ-AIT-002 dated October 13, 2020, signed by the President Director.

The organizational objectives from the implementation of the Internal Control System are:

1. Compliance Objective, which is to ensure that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, including those issued by the government and regulators, the provisions of third-party agreements, and the internal policies and procedures established by the Company.
2. Information Objective, which is to provide accurate, comprehensive, timely, and relevant reports necessary for sound and accountable decision-making.
3. Operational Objective, which is to increase the effectiveness and efficiency in the use of assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss.
4. Risk Culture Objective, which is to identify weaknesses and assess deviations early on and reassess the fairness of existing policies and procedures in the Company on an ongoing basis.

Through the implementation of an effective internal control, the Company aims to protect its assets or wealth from potential misuse, improve operational efficiency, and ensure accurate and accountable financial reporting in accordance with the prevailing laws and regulations.

To support the implementation, the Company implements the following SPI components:

1. Control Activities

The Company's management establishes procedures that must be carried out so that internal control can run according to plan and ensure that the Company avoids fraud and errors in its activities.

2. Supervision

Supervision is carried out with the aim of ensuring that all activities which are a series of internal control procedures comply with applicable laws and regulations and guidelines.

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Melalui kegiatan pengawasan, manajemen Perseroan juga dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan.

3. Penilaian Risiko

Manajemen Perseroan melakukan penilaian risiko agar dapat menyiapkan langkah mitigasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan Perseroan dapat meraih profitabilitas yang maksimal.

4. Lingkungan Pengendalian

Perseroan membangun lingkungan pengendalian yang meliputi aspek perilaku, struktur dan pedoman yang diterapkan pada sebuah operasional Perusahaan sehingga seluruh elemen di Perseroan dapat menjalankan sistem pengendalian internal secara disiplin dan terstruktur.

5. Informasi dan Komunikasi

Perseroan menggunakan informasi dan komunikasi sebagai penilaian terhadap suatu kejadian atau kondisi yang mampu memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan hubungan eksternal perusahaan.

Through supervision, the Company's management can also identify issues that can determine effective actions to achieve objectives.

3. Risk Assessment

The Company's management conducts risk assessments in order to prepare mitigation measures so that the company's objectives can be achieved and the Company can achieve maximum profitability.

4. Control Environment

The Company builds a control environment that includes aspects of behavior, structure and guidelines applied to a Company's operations so that all elements in the Company can run the internal control system in a disciplined and structured manner.

5. Information and Communication

The Company uses information and communication as an assessment of an event or condition that can influence its decision making and external relations.

Tinjauan atas Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal

Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk membangun lingkungan pengendalian yang terstruktur dan telah diterapkan secara disiplin, antara lain dengan menerbitkan sejumlah aturan dan kebijakan internal perusahaan yang menjadi pedoman untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan keuangan telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, Perseroan melalui Divisi Audit Internal telah memantau efektivitas penerapan pengendalian internal sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal Perseroan telah berlangsung efektif selama tahun buku tersebut.

Pandangan Manajemen atas Kecukupan Penerapan Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan, bahwa Sistem Pengendalian Internal telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, guna memastikan tidak ada segala tindak kecurangan maupun tindakan-tindakan lainnya yang memiliki potensi merugikan Perseroan serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perseroan telah berupaya meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional agar dapat seluruh aktivitas transaksi keuangan dan operasional sejalan dengan seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review of the Effectiveness of Internal Control Implementation

The Company has made various efforts to build a structured control environment that has been applied in a disciplined manner, including by issuing a number of internal company regulations and policies that serve as guidelines to ensure that all operational and financial activities comply with applicable laws and regulations. In 2024, through the Internal Audit Division, the Company has monitored the effectiveness of the implementation of internal controls in accordance with the Annual Audit Work Program (PKAT) and it can be concluded that the implementation of the Company's internal controls has been effective during the fiscal year.

Management's Opinion on the Adequacy of Internal Control Implementation

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company declare that the Internal Control System has been implemented with the principle of prudence, ensuring that there are no acts of fraud or other actions that have the potential to harm the Company and other stakeholders. In addition, the Company has been striving to improve the quality of reporting and supervision of operational activities so that all financial and operational transaction activities are in line with all provisions in the applicable laws and regulations.



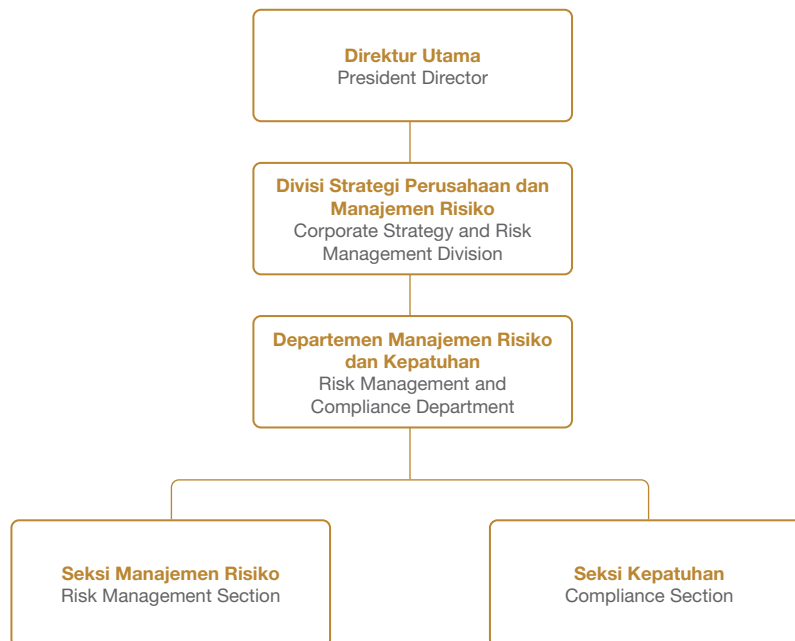
Manajemen Risiko

Risk Management

Dengan mempertimbangkan perkembangan bisnisnya, maka Perseroan telah menyusun kerangka manajemen risiko yang menyeluruh meliputi serangkaian proses sistem pengelolaan risiko dan perlindungan atas aset perusahaan, kegiatan operasional, keuangan, dan lain sebagainya. Kerangka manajemen risiko ini senantiasa disosialisasikan agar membentuk suatu kesadaran risiko pada diri karyawan dan dapat mengidentifikasi sejak awal potensi risiko yang dapat membawa kerugian bagi perusahaan.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan risiko di lingkungan Perseroan, maka Perseroan telah membangun suatu struktur organisasi yang manajemen risiko yang komprehensif. Bertanggung jawab langsung kepada Direksi, berikut posisi struktural Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan:



Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi

Divisi Manajemen Risiko didukung oleh 2 (dua) karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, termasuk untuk memahami perkembangan mitigasi dan profil risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan disampaikan pada tabel berikut:

Taking into account the development of its business, the Company has developed a comprehensive risk management framework that includes a series of risk management and protection processes for the Company's assets, operational activities, finances, and so on. This risk management framework is constantly socialized to build a risk aware culture among employees and to identify from the start potential risks that can bring losses to the Company.

Organizational Structure of Risk Management

In order to ensure the effective implementation of risk management in its environment, the Company has established a comprehensive risk management organizational structure. Reporting directly to the Board of Directors, the following are the structural positions of the Risk Management & Compliance Department:

Professional Qualifications and Certifications

The Risk Management Division consists of 2 (two) employees who possess the professional certifications required to support the performance of their duties, including understanding the development of risk mitigation and risk profiles, particularly in relation to regulatory compliance and industry developments. The professional certifications held by employees are presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Designation	Level Sertifikasi Certification Level
Tridewi Pujamawaty Kepala Departemen Head of Department	Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certified Governance Professional (CGP)
Equivalent Armando Asisten Manajer Assistant Manager	Qualified Risk Management Professional

Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan praktik pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengelola perusahaan berlandaskan peraturan dan etika yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan formulir atas praktik manajemen risiko;
3. Melakukan asesmen risiko pada tiap-tiap Departemen;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan atas penerapan Manajemen Risiko melalui *risk profile* sesuai *Key Performance Indicator* (KPI);
5. Mengimplementasikan pemenuhan *Compliance Review* atau pengujian kepatuhan atas penerapan kontrol yang berlaku sesuai SOP Kepatuhan Perusahaan; dan
6. Menciptakan keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan pelanggan.

Risiko Perusahaan Tahun 2024 dan Langkah Mitigasinya

Profil Risiko Berbasis RKAP 2024

Perseroan senantiasa pemetaan risiko serta melakukan pemeringkatan risiko agar dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara *top down*. Sebagai bagian dari langkah antisipatif, Perseroan melakukan proses identifikasi risiko pada awal tahun yang diikuti oleh kegiatan pemantauan risiko dan evaluasi di setiap triwulan untuk memastikan seluruh risiko yang teridentifikasi masih di bawah level toleransi risiko LRTJ.

Kajian Risiko & Kepatuhan Inisiatif Perusahaan

Guna memastikan pencapaian sasaran RKAP, Unit Manajemen Risiko bertugas mengelola ketidakpastian yang dapat memengaruhi kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan. Unit Manajemen Risiko dalam hal ini akan melakukan analisis risiko terhadap berbagai inisiatif strategis Perseroan dan proses pengadaan dengan nilai di atas Rp500.000.000. Pelaksanaan analisis risiko didasarkan pada

Scope of Duties and Responsibilities

The Risk Management & Compliance Department has the following duties and responsibilities:

1. Implement the Company's management practices based on GCG or Good Corporate Governance by managing the Company based on applicable regulations and ethics;
2. Establish policies, procedures, work instructions and forms for risk management practices;
3. Conduct a risk assessment in each Department;
4. Prepare and submit reports on the implementation of Risk Management through a risk profile according to the Key Performance Indicator (KPI);
5. Implement the fulfillment of Compliance Review or compliance examine the application of applicable controls according to the Company's Compliance SOP; and
6. Create a safe, secure and healthy work environment and support the achievement of passenger safety and security standard.

The Company's Risks and their Management in 2024

Risk Profile Based on RKAP 2024

The Company constantly maps risks and ranks them in order to identify opportunities and challenges in achieving the objectives of the Company Work Plan and Budget (RKAP) based on a top-down approach. As part of its anticipatory measures, the Company conducts a risk identification process at the beginning of the year, followed by risk monitoring and evaluation activities every quarter to ensure that all identified risks are still below the risk tolerance level of LRTJ.

Company Initiative Risk & Compliance Review

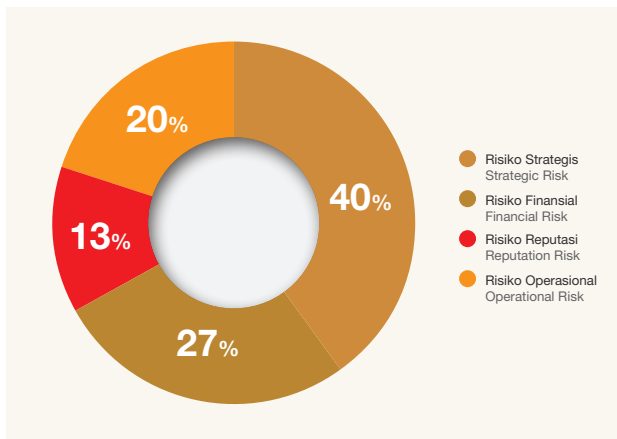
In order to ensure the achievement of the Company Budget Plan (RKAP) targets, the Risk Management Unit is tasked with managing uncertainties that may affect the Company's operational activities and financial performance. In this case, the Risk Management Unit will conduct a risk analysis of the Company's strategic initiatives and procurement processes with a value above Rp500,000,000. The implementation of



ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain SK Direksi/ Kebijakan/Pedoman/SOP/LTA, Matriks kewenangan PT LRT Jakarta, Memo usulan pengadaan dan permintaan *review* dokumen oleh Direksi.

Pada tahun 2024, LRTJ sudah menerbitkan 191 kajian risiko dan kepatuhan dengan kontribusi permintaan kajian sebagian besar berasal dari Divisi Rantai Pasok. Perseroan berhasil mengidentifikasi profil risiko sebagaimana dimuat dalam RKAP tahun 2024, yaitu:

Profil Risiko Berdasarkan Kategori Risk Profile by Category



Secara keseluruhan profil risiko LRTJ masih didominasi pada risiko strategis dan finansial. namun demikian untuk tingkat risiko perusahaan berada di tingkat rendah sehingga dapat dikatakan secara mayoritas risiko-risiko di LRTJ masih dalam kendali. Adapun beberapa risiko yang masih tinggi tetap dilakukan mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko ke level yang dapat ditoleransi.

Roadmap Manajemen Risiko

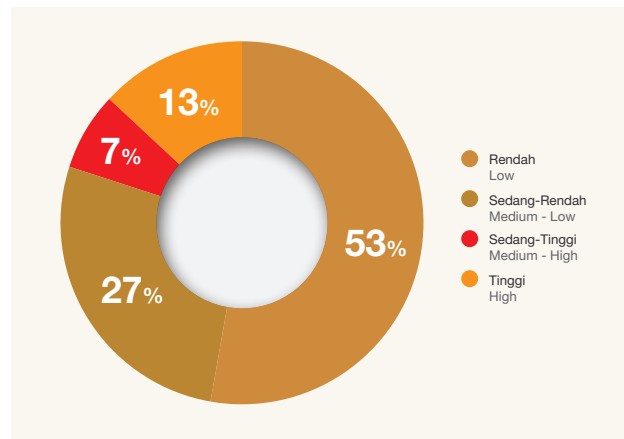
Agar dapat memberikan dampak yang berkesinambungan terhadap organisasi, maka Perseroan melakukan penilaian maturitas Manajemen Risiko yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah *areas of improvement* yang dapat menjadi perhatian bagi manajemen PT LRT Jakarta untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko ke depan:

1. Meningkatkan maturitas manajemen risiko secara berkesinambungan dengan berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen risiko secara konsisten dari waktu ke waktu.
2. Merumuskan *roadmap* untuk meningkatkan maturitas Manajemen Risiko dengan menggunakan skenario agresif (optimistic) maupun skenario moderat (realistic). Kedua pendekatan tersebut memiliki implikasi yang berbeda dalam hal alokasi sumber daya Perusahaan. Berikut rincian skenario *roadmap* untuk meningkatkan maturitas manajemen risiko:

risk analysis is based on applicable regulations, including the Decree of the Board of Directors/Policies/Guidelines/SOPs/LTAs, the authority matrix of PT LRT Jakarta, procurement proposal memos, and requests for document reviews by the Board of Directors.

In 2024, LRTJ had published 191 risk and compliance studies with the majority of study requests coming from the Supply Chain Division. The company succeeded in identifying the risk profiles as contained in the 2024 RKAP, as follows:

Profil Risiko Berdasarkan Paparan Risk Profile by Exposure



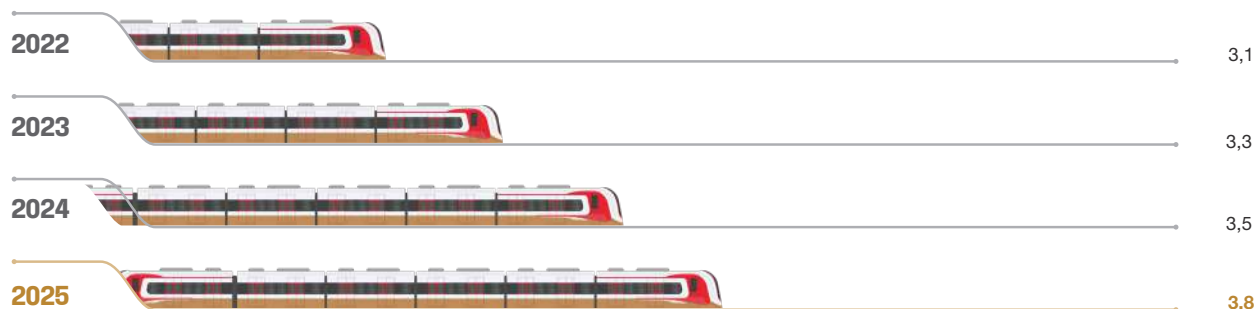
Overall, the risk profile of LRTJ is still dominated by strategic and financial risks. However, the level of risk faced by the company is low, meaning that the majority of risks in LRTJ are still under control. As for the few risks that are still high, mitigation is being carried out to reduce the level of risk to a tolerable level.

Risk Management Roadmap

In order to provide a sustainable impact on the organization, the Company conducts a Risk Management maturity assessment. Based on the results of the assessment, a number of areas of improvement can be identified as a concern for the management of PT LRT Jakarta to improve the quality of risk management implementation in the future:

1. Continuously improve risk management maturity by being committed to implementing a risk management system consistently.
2. Formulate a roadmap to improve Risk Management maturity by using aggressive (optimistic) and moderate (realistic) scenarios. These two approaches have different implications for the allocation of Company resources. The following is a breakdown of the roadmap scenarios to improve risk management maturity:

Target Risk Management Maturity Road-Map



Atribut Attributes	2022	2023	2024	2025
Adopsi Pendekatan ERM dalam Budaya Perusahaan Adoption of ERM Approach in Corporate Culture	3,2	3,5	3,5	4,0
Pengelolaan Proses ERM ERM Process Management	2,9	3,0	3,5	3,5
Atribut Pengelolaan Selera Risiko Risk Appetite Management Attributes	3,3	3,5	3,5	4,0
Pemahaman Akar Penyebab Understanding of Root Cause	3,3	3,5	3,5	4,0
Pengungkapan Risiko Risk Disclosure	3,3	3,5	3,5	4,0
Pengelolaan Kinerja Performance Management	2,9	3,0	3,5	3,5
Resiliensi dan Sustentabilitas Resilience and Sustainability	2,9	3,0	3,5	3,5
Target Maturity Score Target Maturity Score	3,1	3,3	3,5	3,8

3. Menyusun program kerja dengan tema strategis setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian skor 3,8 pada tahun 2025. Tema strategis yang diusulkan adalah:
- Tahun 2024: Penguatan Implementasi Praktik Manajemen Risiko
 - Tahun 2025: Integrasi Praktik Manajemen Risiko

3. Develop a work program with a strategic theme each year to support the achievement of a score of 3.8 in 2025. The proposed strategic themes are:
- 2024: Strengthening the Implementation of Risk Management Practices
 - 2025: Integration of Risk Management Practices

Evaluasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Manajemen menilai kecukupan sistem manajemen risiko perusahaan sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk mendukung perusahaan.

Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Perseroan memastikan bahwa manajemen risiko telah berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi terhadap kinerja Perseroan yang tetap menunjukkan pertumbuhan. Efektivitas penerapan manajemen risiko juga menunjukkan seluruh risiko yang teridentifikasi masih berada pada level toleransi risiko Perseroan. Sementara itu, tingkat maturitas manajemen risiko berada di level 3,47 dari skala 5.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management Implementation

Management's Statement on the Adequacy of the Company's Risk Management System

The management assesses the adequacy of the Company's risk management system as well-functioning and effective in supporting the Company.

Review of Risk Management Effectiveness

In 2024, the Company ensures that risk management has been running well and in accordance with expectations of the Company's performance which continues to show growth. The effectiveness of the implementation of risk management also indicates that all identified risks are still within the Company's risk tolerance level. Meanwhile, the level of risk management maturity is at level 3.47 on a scale of 5.



Penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan senantiasa dipantau dan dievaluasi oleh departemen, divisi dan korporasi untuk memastikan bahwa setiap unsur dalam organisasi Perseroan telah berkontribusi untuk membantu mengidentifikasi profil risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target-target Perseroan. Hasil dari penilaian dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan setiap triwulan kepada Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan agar dapat disiapkan rencana pengelolaan dan langkah mitigasinya.

Pandangan Manajemen atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Direksi Perseroan menilai manajemen risiko telah berlangsung secara efektif sebagaimana ditunjukkan dari semakin meningkatnya kesadaran risiko di antara karyawan. Profil risiko yang terjaga pada level toleransi risiko juga menunjukkan kemampuan Perseroan secara organisasi untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

The implementation of risk management within the Company is constantly monitored and evaluated by departments, divisions and corporations to ensure that every element in the Company's organization has contributed to helping identify risk profiles that have the potential to hinder the achievement of the Company's targets. The results of these assessments and evaluations are then reported quarterly to the Risk Management & Compliance Department so that a management plan and mitigation measures can be prepared.

Management's Opinion on the Effectiveness of Risk Management Implementation

Throughout 2024, the Company's Board of Directors assessed that risk management had been effective, as demonstrated by the increasing risk awareness among employees. The risk profile, which is maintained at the risk tolerance level, also demonstrates the Company's organizational ability to manage these risks.

Perkara Penting

Significant Cases

Sepanjang tahun 2024, baik Perseroan, maupun Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam permasalahan hukum baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, dan/atau termohon yang secara material dapat memengaruhi keberlangsungan reputasi maupun jalannya penyelenggaraan bisnis Perseroan.

Throughout 2024, neither the Company, nor the Board of Directors and Board of Commissioners were involved in legal matters as plaintiffs, defendants, applicants, and/or respondents that could materially affect the sustainability of the Company's reputation or the conduct of its business.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Pada tahun 2024, Perseroan memastikan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh regulator kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi.

In 2024, the Company ensured that no administrative sanctions were imposed by regulators on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi transparansi dalam penyelenggaraan bisnisnya. Dalam rangka mendukung penerapan prinsip GCG yang baik, Perseroan menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku mengenai kinerja keuangan, kegiatan perusahaan dan sebagainya melalui berbagai saluran media komunikasi sesuai yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut media penyampaian keterbukaan informasi perusahaan:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan salah satu media penyampaian Informasi kinerja keuangan maupun nonkeuangan kepada para Pemegang Saham sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66.

2. Situs Web Perusahaan

Situs Perusahaan, yakni www.lrtjakarta.co.id, merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang Perseroan kepada masyarakat. Informasi penting yang dimuat dalam situs web perusahaan antara lain profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, bisnis yang dijalankan, GCG, anak-anak Perusahaan, berita dan siaran pers, serta informasi mengenai kesempatan berkarier di Perusahaan.

3. Media Cetak Perusahaan

Media cetak yang dimiliki Perseroan merupakan media komunikasi dalam bentuk surat kabar nasional, media internal mitra bayar, brosur, dan *leaflet* untuk mempublikasikan beberapa informasi dan kegiatan penting Perusahaan di beberapa surat kabar nasional.

4. Siaran Pers

Keterbukaan informasi perusahaan juga dilakukan dengan menyebarkan siaran pers kepada media nasional secara luas terkait perkembangan terkini perusahaan. Pada tahun 2024, Perseroan menerbitkan sebanyak 48 rilis pers.

The Company always upholds transparency in the operation of its business. In order to support the implementation of GCG principles, the Company provides access to information to all stakeholders regarding financial performance, company activities and others through various communication channels as required by applicable laws and regulations.

The following are the media for conveying company information disclosure:

1. Annual Report

The Annual Report is one of the media used to convey financial and non-financial performance information to Shareholders in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 66.

2. Company Website

The Company's website at www.lrtjakarta.co.id, is a communication medium used to convey information about the Company to the public. Important information contained on the Company's website includes Company profile, vision and mission, organizational structure, business activities, GCG, subsidiaries, news and press releases, as well as information about career opportunities at the Company.

3. Company Print Media

The Company's print media is a communication medium in the form of national newspapers, internal media of paid partners, brochures, and leaflets to publish some important information and activities of the Company in several national newspapers.

4. Press Releases

Disclosure of company information is also carried out by disseminating press releases to the national media regarding the latest developments of the Company. In 2024, the Company issued 48 press releases.



Pedoman Perilaku Perusahaan

Company Code of Conduct

LRT Jakarta telah menyusun Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai bagian dari upayanya menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Pedoman Perilaku Perusahaan mengatur tindakan dan perilaku yang diharapkan oleh Perseroan dari para karyawan sehingga mereka dapat menunjukkan perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan budaya PT LRT Jakarta. Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan telah disahkan pada tanggal 11 September 2023 yang berisi pokok-pokok kode etik berikut ini:

1. Pendahuluan
2. Etika Kerja
3. Etika Usaha
4. Penerapan Code of Conduct

part of its efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) practices consistently and continuously. The Company's Code of Conduct regulates the actions and behavior expected by the Company from employees so that they can demonstrate consistent behavior in accordance with the values and culture of PT LRT Jakarta. The Company's Code of Conduct was ratified on September 11, 2023, containing the following:

1. Introduction
2. Work Ethics
3. Business Ethics
4. Implementation of the Code of Conduct



Pemberlakukan Pedoman Perilaku bagi Seluruh Tingkatan Organisasi

Perseroan secara tegas menetapkan bahwa Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh insan LRT Jakarta, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan mewajibkan seluruh Insan LRT Jakarta untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan LRT Jakarta untuk melaksanakan *Code of Conduct* secara konsisten.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Guna membangun kesadaran akan pentingnya menerapkan Pedoman Perilaku di lingkungan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan kegiatan sosialisasi *Code of Conduct* yang senantiasa diperbarui setiap tahun kepada karyawan. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan *sense of belonging* terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan LRT J untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini;

Enforcement of the Code of Conduct at All Levels of the Organization

The Company explicitly stipulates that the Code of Conduct applies to all LRT Jakarta personnel, including the Board of Directors and Board of Commissioners. In this regard, the Company requires all LRT Jakarta personnel to sign an Integrity Pact, which is a commitment by LRT Jakarta personnel to implement the Code of Conduct consistently.

Socialization and Dissemination of the Code of Conduct

In order to build awareness of the importance of implementing the Code of Conduct in the Company's business environment, the Company has socialized the Code of Conduct, which is updated annually, to all employees. The socialization aims to:

1. Create a sense of belonging to the Code of Conduct, thus creating awareness among all LRTJ personnel to implement the Code of Conduct;

2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan LRT J mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan bisnis Perusahaan;
3. Memberikan kesadaran kepada Insan LRTJ bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan LRTJ;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Penyusunan *Code of Conduct* juga disertai dengan penetapan sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan dari kode etik yang berlaku. Perseroan dalam hal ini menggunakan saluran pelaporan pelanggaran untuk memfasilitasi Insan LRTJ dalam melaporkan pelanggaran tersebut. Sesuai mekanisme yang berlaku, pelaporan dapat disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LRT Jakarta Integritas. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Tidak hanya karyawan, mekanisme pelaporan ini dapat digunakan oleh pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) untuk menyampaikan indikasi pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan LRTJ. Perseroan berkewajiban menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi menghasilkan dampak kerugian materiil dan dapat merusak citra Perseroan, yaitu antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Perusahaan Tahun 2024

Pada tahun 2024 Perseroan mencatat adanya pelanggaran dan telah menerapkan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggarannya. Berikut sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran kode etik yang dapat terbukti Etik selama tahun 2024 dan 2023:

Sanksi Sanctions	2024	2023
Tindakan Disiplin Ringan Light Disciplinary Action	1	4
Tindakan Disiplin Sedang Medium Disciplinary Action	7	2
Tindakan Disiplin Berat Heavy Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	8	6

2. Improve the knowledge and insight of LRTJ personnel regarding the importance of the Code of Conduct for the Company's business continuity;
3. Raise awareness among LRTJ personnel that the Code of Conduct is an integral part of business practices and the performance appraisal of all LRTJ personnel.
4. Sanctions for the Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders;
5. If a Business Partner or other Stakeholder(s) commits a violation, the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

Whistleblowing Mechanism

The formulation of the Code of Conduct is also accompanied by the determination of sanctions for violations or deviations from the applicable code of ethics. In this case, the Company uses a whistleblowing channel to facilitate LRTJ personnel in reporting violations. In accordance with the applicable mechanism, reports can be submitted through the LRT Jakarta Integritas Whistleblowing System. Reports must be made in good faith and should not be a personal grievance against a particular Company policy or motivated by malice or slander.

Not only employees, this whistleblowing mechanism can be used by external parties of the Company (Customers, Partners and the Community) to report indications of violations of the Code of Conduct committed by certain LRTJ personnel. The Company is obliged to follow up on reports that have the potential to cause material losses and harm the Company's image, such as those caused by misconduct, manipulation and so on.

Number of Violations of the Company Code of Conduct in 2024

In 2024, the Company recorded violations and imposed sanctions according to the severity of the violation. The following sanctions were imposed for proven violations of the Code of Conduct in 2024 and 2023:



Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Anti-Bribery Management System

Perseroan menyusun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai wujud komitmen untuk membangun suatu organisasi yang berintegritas di mata para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Penyusunannya memperhatikan ketentuan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) ISO 37001:2016 serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi SMAP melibatkan dewan pengarah, manajemen puncak dan karyawan yang tersebar di berbagai unit kerja perusahaan, wilayah kerja perusahaan, serta mitra bisnis dan individu dari pihak mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan dalam rangka mendukung operasi LRTJ.

Penerapan SMAP ini bertujuan untuk:

1. Menjaga kredibilitas Perusahaan (PT LRT Jakarta) dan meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan lainnya kepada perusahaan.
2. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.
3. Memitigasi Risiko “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” dengan cara memberikan bukti yang kuat bahwa Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai apabila terjadi penyidikan ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi’ oleh Penegak Hukum (KPK, Kepolisian and Kejaksaan) maupun Pengadilan apabila ada perkara yang telah masuk ke tahap peradilan.
4. Memberi pesan yang kuat baik ke dalam maupun ke luar perusahaan terkait komitmen Perusahaan terhadap anti penyuapan dan anti korupsi.
5. Menjaga keberlangsungan perusahaan dengan cara mencegah terjadinya penyuapan yang berakibat kepada *high-cost economy* sebagai akibat terjadinya biaya-biaya yang tidak wajar.
6. Memberikan dukungan kepada Perusahaan dan Jakpro Group untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* agar korporasi dapat terus berkembang secara berkesinambungan.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah memantau pelaksanaan SMAP dan telah melakukan aktivitas dan dokumentasi SMAP dengan hasil dilaporkan sebagai berikut:

1. Pemuktahiran Komitmen dalam Penerapan SMAP
Setiap insan LRTJ (Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan tenaga alih daya) wajib untuk menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan suap dan korupsi.

Selain kepada pihak internal, PT LRT Jakarta juga menegaskan komitmen penerapan SMAP kepada pihak eksternal melalui surat kepada vendor dan mitra bisnis sebagai berikut:

- a. Surat kepada vendor No.017/DRU/110/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Komitmen Insan PT LRT

The Company has developed an Anti-Bribery Management System (SMAP) as a commitment to building an organization that has integrity in the eyes of shareholders and other stakeholders. The formulation of this system complies with the provisions of the Indonesian National Standard (“SNI”) ISO 37001:2016 as well as applicable laws and regulations. The implementation of SMAP involves the steering committee, top management and employees across various company work units, company work areas, as well as business partners and individuals from business partners who work with the Company in order to support LRTJ operations.

The implementation of SMAP aims to:

1. Maintaining the credibility of the Company (PT LRT Jakarta) and increasing the trust of the public and other stakeholders in the Company.
2. Increasing shareholder confidence and simultaneously increasing corporate value.
3. Mitigating the Risk of “Corporate Criminal Liability” by providing strong evidence that the Company has taken adequate preventive measures in the event of a ‘Corporate Criminal Liability’ investigation by Law Enforcement (KPK, Police and Attorney) or the Court if a case has gone to court.
4. Sending strong messages both inside and outside the Company, regarding the Company’s commitment to anti-bribery and anti-corruption.
5. Maintaining the continuity of the Company by preventing bribery which results in a high-cost economy as a result of unreasonable costs.
6. Providing support to the Company and Jakpro Group to implement Good Corporate Governance so that the corporation can continue to develop sustainably.

Throughout 2024, the Company has monitored the implementation of SMAP and has carried out SMAP activities and documentation with the following results:

1. Updating Commitment in the Implementation of SMAP
Every LRTJ personnel (Board of Directors, Board of Commissioners, Employees, and outsourced workers) is required to sign the Integrity Pact. The signing of the Integrity Pact aims to strengthen the joint commitment in the prevention and eradication of acts of bribery and corruption.

In addition to internal parties, PT LRT Jakarta also emphasizes its commitment to implementing SMAP to external parties through letters to vendors and business partners as follows:

- a. Letter to vendors No.017/DRU/110/II/2024 dated February 23, 2024, regarding the Commitment of PT

Jakarta Terhadap Penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.

- b. Surat kepada mitra bisnis No.018/DRU/110/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Komitmen Insan PT LRT Jakarta Terhadap Penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.

2. Penerapan dan Sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS) LRT Jakarta Integritas

PT LRT Jakarta telah melakukan *launching* WBS LRT Jakarta Integritas pada bulan Agustus 2023 yang bekerjasama dengan pihak konsultan independen yaitu PT Deloitte. WBS LRT Jakarta Integritas dapat diakses melalui saluran sebagai berikut:

- a. Telepon : +62 21 5088 0141
- b. Email : lrtjakartaintegritas@tipoffs.info
- c. Website : <https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/>
- d. SMS : +62 81 1199 23335
- e. WhatsApp : +62 81 1199 23335

Selain itu, saluran pelaporan WBS LRT Jakarta Integritas disosialisasikan sebagai berikut :

- Sosialisasi kepada personal alih daya Keamanan.
- Media TV mengenai channel pelaporan pelanggaran LRT Jakarta Integritas.
- Website Perusahaan www.lrtjakarta.co.id

3. Pengendalian Gratifikasi

Perseroan telah membangun dan terus menguatkan peran dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Pembentukan UPG dikukuhkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/KAD/111/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan didukung oleh:

- a. Penanggung Jawab: Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis
- b. Ketua: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
- c. Anggota:
 - i. Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 - ii. Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Hingga akhir tahun 2024, UPG menerima 3 pelaporan gratifikasi.

4. Pelatihan Anti Korupsi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai bagian dari penguatan penerapan SMAP kepada karyawan, PT LRT Jakarta dapat mengikuti pelatihan mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Gratifikasi melalui *Learning Management System* (LMS). Selain itu, sosialisasi terkait Tindak Pidana Korupsi juga sudah dilaksanakan melalui Seminar GRC Talks dengan judul “Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi di Perusahaan Transportasi Publik dengan menghadirkan pembicara dari KPK”.

LRT Jakarta Personnel to the Implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP.

- b. Letter to business partners No.018/DRU/110/II/2024 dated February 23, 2024, regarding the Commitment of PT LRT Jakarta Personnel to the Implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP.

2. Implementation and Socialization of the *Whistleblowing System* (WBS) “LRT Jakarta Integritas”

PT LRT Jakarta has launched a WBS “LRT Jakarta Integritas” in August 2023 by collaborating with an independent consultant, PT Deloitte. The LRT Jakarta Integritas can be accessed through the following channels:

- a. Telephone : +62 21 5088 0141
- b. Email : lrtjakartaintegritas@tipoffs.info
- c. Website : <https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/>
- d. SMS : +62 81 1199 23335
- e. WhatsApp : +62 81 1199 23335

In addition, the LRT Jakarta Integritas is socialized as follows:

- Socialization to outsourced security personnel.
- TV media, regarding the LRT Jakarta Integritas whistleblowing channel.
- Company website at www.lrtjakarta.co.id

3. Gratification Control

The Company has established and continues to strengthen the role of the Gratification Control Unit (UPG). The establishment of the UPG was ratified in the Decree of the Board of Directors No. 001/KAD/111/II/2023 dated February 16, 2023 and is supported by:

- a. Person in Charge: Director of Finance and Business Support
- b. Chairman: Head of Finance and Accounting Division
- c. Members:
 - i. Risk Management and Compliance Manager
 - ii. Assistant Risk Management and Compliance Manager

Until the end of 2024, the UPG received 3 reports of gratification.

4. Anti-Corruption Training and Anti-Bribery Management System

As part of its efforts to strengthen the implementation of the Anti-Bribery Management System among its employees, PT LRT Jakarta has been able to participate in training on the Anti-Bribery and Gratuity Management System through the Learning Management System (LMS). In addition, a seminar on corruption was also held through the GRC Talks Seminar titled “Building a Culture of Anti-Corruption and Gratification in Public Transportation Companies” which featured speakers from the Corruption Eradication Commission (KPK).



5. Program Komunikasi

Untuk mendukung transparansi informasi, Perseroan memanfaatkan sejumlah sarana komunikasi untuk mempublikasikan aktivitas terkait SMAP:

- Website Perusahaan;
- GRC Awareness;
- Majalah internal "Transporter";
- Banner dan booklet; dan
- Sosial Media.

6. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Perseroan menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk menjalankan fungsi pelaksanaan program SMAP. FKAP memiliki anggota yang terdiri dari:

- Ketua: Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis (*ex officio*)
- Wakil Ketua: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (*ex officio*)
- Anggota:
 - Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Bagian Umum (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Audit Internal (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Mutu, Keselamatan, Keamanan & Kesehatan Lingkungan (*ex officio*)
 - Manajer Manajemen Risiko & Kepatuhan (*ex officio*)
 - Manajer Komunikasi Perusahaan (*ex officio*)
 - Manajer Hukum (*ex officio*)
 - Manajer Mutu, Keselamatan, Kesehatan, & Lingkungan (*ex officio*)
 - Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia (*ex officio*)
 - Manajer Komunikasi Perusahaan (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Manajemen Mutu dan K3 (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Pengembangan Organisasi, Rekrutmen, dan Talent Management (*ex officio*)
 - Officer Hukum (*ex officio*)

Hasil pelaksanaan tugas FKAP dilaporkan kepada manajemen puncak Perseroan secara berkala.

7. Bribery Risk Assessment

Perseroan mewajibkan setiap Departemen untuk melakukan identifikasi risiko penyuapan serta melakukan asesmen risiko penyuapan. Sebagaimana dituangkan dalam formulir *Bribery Risk Assessment*, Departemen terkait akan menyampaikan hasil identifikasi risiko kepada Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara triwulanan. Selama tahun 2024, terdapat 81 risiko penyuapan yang teridentifikasi.

8. Internal Audit dan Tinjauan Manajemen

Perseroan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan SMAP salah satunya melalui Audit Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT). Hasil audit tersebut disampaikan kepada manajemen puncak untuk ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan.

5. Communication Program

In order to support information transparency, the Company utilizes a number of communication facilities to publish activities related to SMAP:

- Company website;
- GRC Awareness;
- Internal magazine "Transporter";
- Banners and booklets; and
- Social Media.

6. Anti-Bribery Compliance Function

The Company has established an Anti-Bribery Compliance Function (ABCF) to carry out the implementation of the SMAP program. The ABCF has the following members:

- Chairman: Director of Finance and Business Support (*ex officio*)
- Deputy Chairman: Head of Finance and Accounting Division (*ex officio*)
- Members:
 - Head of Corporate Secretary Division (*ex officio*)
 - Head of Human Resources & General Affairs Division (*ex officio*)
 - Head of Internal Audit Division (*ex officio*)
 - Head of Quality, Safety, Security & Environmental Health Division (*ex officio*)
 - Risk Management & Compliance Manager (*ex officio*)
 - Corporate Communications Manager (*ex officio*)
 - Legal Manager (*ex officio*)
 - Quality, Safety, Health, & Environment Manager (*ex officio*)
 - Human Resource Development Manager (*ex officio*)
 - Corporate Communications Manager (*ex officio*)
 - Assistant Manager of Risk Management and Compliance (*ex officio*)
 - Assistant Manager of Quality Management and OSH (*ex officio*)
 - Assistant Manager for Organizational Development, Recruitment, and Talent Management (*ex officio*)
 - Legal Officer (*ex officio*)

The results of the FKAP's duties are periodically reported to the Company's top management.

7. Bribery Risk Assessment

The Company requires each Department to identify and assess the risk of bribery. As outlined in the Bribery Risk Assessment form, the relevant Department will submit the risk identification results to the Risk Management and Compliance Department on a quarterly basis. In 2024, 81 bribery risks were identified.

8. Internal Audit and Management Review

The Company conducts continuous evaluation and improvement continuous evaluation and improvement of the implementation of SMAP, one of which is through the Integrated Management System Audit (SMT). The audit results are submitted to top management to be followed up with corrective measures.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Perseroan senantiasa menghimbau kepada karyawan dan mitranya untuk menegakkan prinsip integritas di seluruh lingkungan usahanya. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyusun dan mengesahkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta sesuai dengan Keputusan Direksi PT LRT Jakarta No. 001/KAD/111/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut mengatur tentang hal-hal yang menjadi larangan bagi karyawan terkait pemberian/penerimaan gratifikasi, yaitu:

1. Setiap karyawan dilarang menerima dan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap dari pihak mana pun yang diterima secara langsung, yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang di Perusahaan.
2. Pada kondisi tertentu, di mana karyawan tidak dapat menghindar untuk menolak Gratifikasi yang dianggap suap tersebut, maka karyawan wajib melaporkan dan menyerahkan uang/barang/fasilitas dimaksud kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Setiap karyawan apabila ditawarkan atau diberikan Gratifikasi yang dianggap suap wajib melakukan penolakan dengan cara santun dan memberikan penjelasan secara memadai terhadap kebijakan dan aturan yang ada dalam pedoman ini kepada Mitra Usaha/Pihak Ketiga.
4. Setiap karyawan dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap suap baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, yang bertujuan untuk memengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, di dalam internal Perusahaan juga telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan sebagai berikut:

The Company always encourages its employees and partners to uphold the principle of integrity in all business environments. This commitment is realized by drafting and ratifying the Guidelines for the Gratification Control in the Environment of PT LRT Jakarta in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT LRT Jakarta No. 001/KAD/111/II/2023 dated February 16, 2023 concerning Guidelines for the Gratification Control in the Environment of PT LRT Jakarta.

The Gratification Control Guidelines regulate matters that are prohibited for employees regarding the provision/receipt of gratification, including:

1. Every employee is prohibited from receiving and must refuse Gratification which is considered a bribe received directly from any party, which can affect the independence and objectivity of carrying out duties and authorities in the Company.
2. Under certain conditions, where the employee cannot avoid refusing Gratification which is considered a bribe, the employee is obliged to report and hand over the said money/goods/facilities to the Gratification Control Team.
3. Every employee, if Gratification is offered or given which is considered a bribe, must refuse in a polite manner, and provide an adequate explanation of the policies and rules contained in this guideline to Business Partners/Third Parties.
4. Every employee is prohibited from giving gratuities which are considered bribes either directly or indirectly to any party, which aims to influence the said party to do and/or not do something that is contrary to their duties and authorities.

In addition, the Company has also established a Gratification Control Team with the following composition:

Penanggung Jawab Person in Charge	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support
Ketua Head	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division
Anggota Members	Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Manager
	Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Assistant Manager



Unit Pengendalian Gratifikasi mengemban tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Direksi atau karyawan;
2. Melakukan Analisis dan pemrosesan atas setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
3. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas yang dibutuhkan dalam Pengendalian Gratifikasi di Perusahaan, termasuk tempat penyimpanan sementara yang aman dan memadai atas uang/barang/fasilitas Gratifikasi pelapor, sampai adanya tindak lanjut dan rekomendasi dari Direksi;
4. Meneruskan Laporan Gratifikasi dari Karyawan dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi, baik secara langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Direksi atau karyawan;
5. Memberikan laporan Gratifikasi, melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Keputusan Direksi;
6. Setelah mendapatkan arahan dan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Pengendalian Gratifikasi melanjutkan laporan Gratifikasi kepada Pemegang Saham.

The Gratification Control Unit has the following duties and responsibilities:

1. Receive gratification reports from the Board of Directors or employees;
2. Analyze and process each received gratification report;
3. Prepare the necessary tools and facilities for gratification control in the Company, including secure and adequate temporary storage facilities for gratification money/goods/facilities from the reporter, until there are follow-up actions and recommendations from the Board of Directors;
4. Forward Gratification Reports from Employees by completing the form specified by the Gratification Control Unit, either directly or no later than 14 (fourteen) working days from the date the gratification is received by the Board of Directors or employees;
5. Provide gratification reports, coordinate, and consult with the Board of Commissioners in implementing the Board of Directors' decisions;
6. After receiving direction and approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Gratification Control Unit proceeds with the gratification report to the Shareholders.

Kebijakan Terkait Aktivitas Politik dan Sosial Organisasi

Policies Related to Political Activities and Social Organization

Kode Etik Perusahaan secara tegas melarang insan LRT Jakarta untuk menggunakan fasilitas atau sumber daya apa pun sebagai bagian dari kegiatan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Namun demikian, Perseroan tidak melarang ataupun mempengaruhi aspirasi politik karyawan, selama dilakukan di luar lingkup profesinya sebagai karyawan LRT Jakarta. Karyawan diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

The Company's Code of Conduct explicitly prohibits LRT Jakarta personnel from using any facilities or resources as part of political campaign activities, political fundraising, or for the purpose of political participation. However, the Company does not prohibit or influence the political aspirations of employees, provided that it is carried out outside the scope of their profession as LRT Jakarta employees. Employees are required to prioritize the interests of the Company over personal or group interests.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Assets Report (LHKPN)

Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan melaksanakan transparansi informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara. Pejabat Perseroan yang diwajibkan menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pejabat dengan fungsi strategis, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

As a form of compliance with applicable laws and regulations, the Company implements information transparency regarding the assets of state officials. Company officials who are required to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK) are officials with strategic functions, including the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi:

1. PT Jakarta Propertindo No. 008/UT0000/111/I/2020 mengenai Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo dan Anak Usaha
2. PT LRT Jakarta No. 001/SPR/111/IV/2020 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT LRT Jakarta.

This policy is further regulated in the Board of Directors Decree:

1. PT Jakarta Propertindo No. 008/UT0000/111/I/2020 concerning the Obligation to Submit State Officials' Assets Report (LHKPN) at PT Jakarta Propertindo and its Subsidiaries
2. PT LRT Jakarta No. 001/SPR/111/IV/2020 concerning the Provisions on the Obligation to Submit State Officials' Assets Report (LHKPN) at PT LRT Jakarta.

Ketentuan penyampaian LHKPN kepada KPK adalah pada saat:

1. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
2. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
4. Setelah diterbitkannya keputusan bagi yang belum pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK;
5. Secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyampaian LHKPN periodik disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Provisions on the submission of LHKPN to KPK is during:

1. Appointment upon first assuming office;
2. Reappointment after the end of term or retirement;
3. End of term or retirement;
4. After the issuance of a decision for those who have not previously submitted LHKPN to the KPK;
5. Periodically, every year, for wealth acquired from January 1st to December 31st. Periodic submission of LHKPN must be submitted no later than March 31st of the following year.

Hingga per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memastikan bahwa seluruh pejabat dengan fungsi strategis telah menyampaikan LHKPN kepada KPK pada tanggal 26 Maret 2024.

As of December 31, 2024, the Company ensures that all officials with strategic functions have submitted their LHKPN to KPK on March 26, 2024.



Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan wajib mengedepankan aspek transparansi dan kewajaran sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan LRT Jakarta berdasarkan pada SK Direksi No.001/DRU/111/II/2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pergub DKI Jakarta No.50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

The procurement process of goods and services within the Company must prioritize transparency and fairness as part of the implementation of good corporate governance principles. In carrying out the procurement of goods and services, the Company has prepared Guidelines for the Procurement of Goods and Services in the Jakarta LRT Environment based on the Decree of the Board of Directors No.001/DRU/111/II/2024 and Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No.16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services, Perlem LKPP No.12 of 2021 concerning Guidelines for the Procurement of Government Goods/Services Through Vendors, DKI Jakarta Governor Regulation No.50 of 2019 concerning Guidelines for the Procurement of Goods/Services of Regionally-Owned Enterprises.

Metode Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Perseroan menerapkan metode berikut ini:

1. Tender Terbuka/Lelang
2. Pemilihan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pembelian Langsung
6. Swakelola

Management Method of Goods and Services Procurement

As regulated in the Goods and Services Procurement Guidelines, the Company implements the following methods:

1. Open Tender/Auction
2. Direct Selection
3. Direct Procurement
4. Direct Appointment
5. Direct Purchase
6. Self-management



Pelelangan Auction

- **Pengadaan B/J > 5M**
- **Pascakualifikasi dan Prakualifikasi**
- **Diumumkan pada website perusahaan**
- Procurement of Goods & Service > 5M
- Postqualification and Prequalification
- Announced on the Company website

Penunjukan Langsung Direct Appointment

- **Pengadaan B/J dengan keadaan khusus/tertentu yang memenuhi ketentuan-ketentuan**
- Procurement of Goods & Service with special/certain circumstances that meet the conditions

Pemilihan Langsung Direct Selection

- **Pengadaan B/J < 5M**
- **Mengundang Min. 3 Vendor Rekanan yang sudah terverifikasi di List Vendor**
- Procurement of Goods & Service < 5M
- Invite Min. 3 Vendor Partners that have been verified on the Vendor List

Pembelian Langsung Direct Purchase

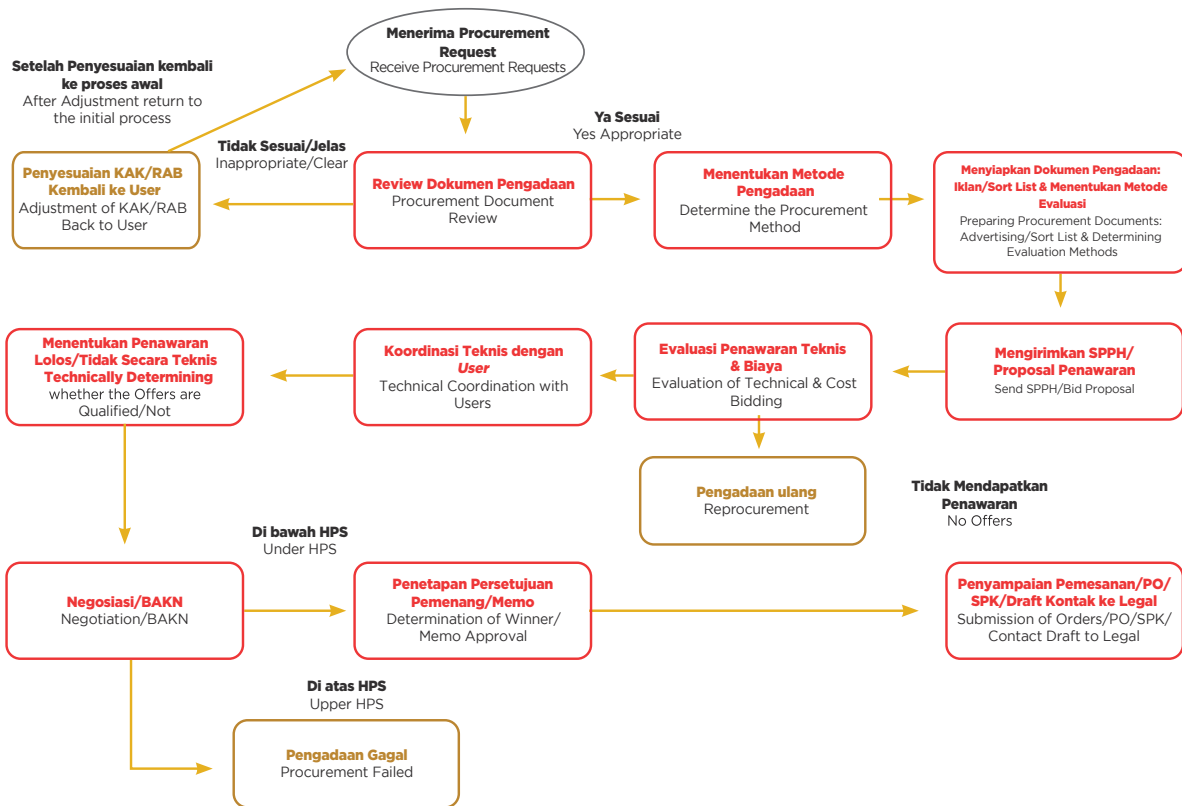
- **Pengadaan B/J < 50jt on Spot (Toko Retail, Department Store)**
- Procurement of Goods & Service <50 million on Spot (Retail Stores, Department Stores)

Pengadaan Langsung Direct Procurement

- **Pengadaan B/J < 200JT**
- **Mengundang Min. 2 Vendor Rekanan yang sudah terverifikasi di List Vendor**
- Procurement of Goods & Service <200 million
- Invite Min. 2 Vendors, partners who have been verified on the Vendor List

Swakelola Self Manage

- **Pengadaan B/J yang dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan penyedia.**
- Procurement of Goods & Service carried out independently without involving a provider.



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2024, dalam rangka menunjang kegiatan operasional, Perseroan melakukan proses pengadaan barang dan jasa tertentu baik melalui metode pengadaan langsung, pemilihan langsung, pelelangan, dan penunjukan langsung. Berikut rincian kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahun buku 2024:

No.	Metode Pengadaan Procurement Method	Jumlah Amount
1.	Pengadaan Langsung Direct Procurement	97
2.	Pemilihan Langsung/Tender Sederhana Direct Selection/Simple Tender	97
3.	Pelelangan/Tender/Seleksi Auction/Tender/Selection	2
4.	Penunjukan Langsung (<i>Principle/OEM/ATPM</i>) Direct Appointment	80
5.	Pembelian Langsung Direct Purchase	2
6.	Penugasan Assignment	0
7.	Proses Pengulangan Pengadaan/ <i>Repeat Order</i> Repeat Order Procurement Process.	33
8.	Addendum (Pekerjaan Tambah) Addendum (Additional Work)	31

Goods and Services Procurement Activities

In order to support its operational activities in 2024, the Company conducts procurement processes of certain goods and services through direct procurement, direct selection, auction, and direct appointment. The following are the details of the procurement of goods and services in 2024 fiscal year:



Berikut kami laporkan nilai pengadaan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

The following is our report on procurement values based on accountable data:

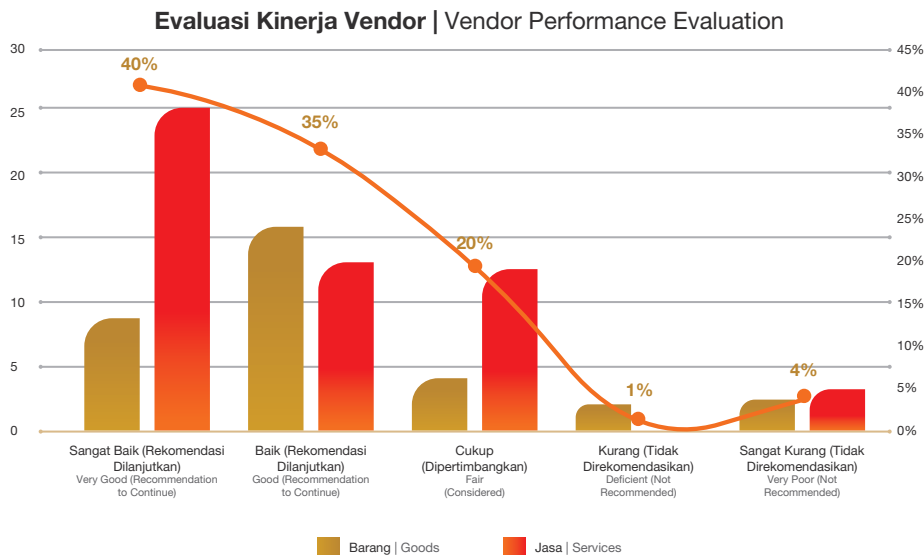
No.	Metode Pengadaan Procurement Method	Nilai Anggaran/HPS (dalam Rupiah Penuh) Budget value/HPS (in Full Rupiah)	Nilai Kontrak (dalam Rupiah Penuh) Contract Value (in Full Rupiah)
1.	Pelelangan Auction	30.334.907.262	28.854.589.195
2.	Pemilihan Langsung Direct Selection	97.376.219.982	88.828.854.787
3.	Pengadaan Langsung Direct Procurement	8.604.092.324	7.461.818.804
4.	Penunjukan Langsung (Principle/OEM/ATPM) Direct Appointment	32.177.002.912	27.562.058.784
5.	Repeat Order	23.140.988.843	22.703.066.277
6.	Pembelian Langsung Direct Purchase	247.796.400	238.271.490
7.	Addendum (Pekerjaan Tambah) Addendum (Additional Work)	4.487.578.108	3.324.982.573
Jumlah Total		196.368.585.830	178.973.641.910

Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Evaluasi kinerja penyedia adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak *user* sebagai metode evaluasi untuk menentukan indikator-indikator performansi kinerja penyedia yang bersangkutan. Evaluasi kinerja penyedia dilaksanakan terhadap setiap pengadaan minimal 1 kali pertahun. Penyedia yang memiliki pekerjaan lebih dari 1 kali maka penilaian akhir adalah rata-rata. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja penyedia untuk tahun 2024:

Performance Evaluation of Goods/Services Suppliers

The supplier performance evaluation is an assessment conducted by the user as an evaluation method to determine the performance indicators of the supplier concerned. The supplier performance evaluation is carried out for each procurement at least once a year. Suppliers who have worked more than once will have their final assessment averaged. The following is the result of the supplier performance evaluation in 2024:



Penilaian Assessment	Barang Goods	Jasa Services	Persentase Percentage
Sangat Baik (Rekomendasi Dilanjutkan) Very Good (Recommendation to Continue)	9	25	40%
Baik (Rekomendasi Dilanjutkan) Good (Recommendation to Continue)	16	13	30%
Cukup (Dipertimbangkan) Fair (Considered)	4	13	20%
Kurang (Tidak Direkomendasikan) Deficient (Not Recommended)	1	0	1%
Sangat Kurang (Tidak Direkomendasikan) Very Poor (Not Recommended)	1	2	4%
Grand Total	31	53	100%

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Perseroan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) untuk memfasilitasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan LRT. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran juga bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta meningkatkan reputasi Perusahaan sebagai salah satu mitra yang terpercaya, baik dalam kegiatan usaha maupun pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan prosedur pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), pelaporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Perseroan telah merancang suatu mekanisme khusus yang dapat dimanfaatkan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara rahasia dan efektif namun tetap dalam koridor *good corporate governance*. Mekanisme pelaporan tersebut dirancang dengan tujuan:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
2. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini; dan
5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

Untuk memfasilitasi pelaporan yang efektif, PT LRT Jakarta telah menetapkan saluran penyampaian laporan pelanggaran yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak konsultan independen, yaitu:

Telepon : +62 21 5088 0141
 Email : lrtjakartaintegritas@tipofs.info
 Website : <https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/>
 SMS : +62 81 1199 23335
 WhatsApp : +62 81 1199 23335

Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan akan dilakukan validasi terlebih dahulu oleh Komite WBS yang ditunjuk oleh Perseroan untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelaporan ke tahap investigasi. akan dibentuk oleh Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris Perseroan akan membentuk tim investigasi independen yang akan

The Company has developed a whistleblowing system (WBS) to facilitate the reporting of indications of violations committed by LRT personnel. The implementation of the whistleblowing system also aims to create a clean and responsible work environment and enhance the Company's reputation as a trusted partner, both in business activities and services to the community. Based on the whistleblowing procedure, violations can be reported by internal or external parties.

Whistleblowing Mechanism

The Company has designed a special mechanism that can be used by whistleblowers to submit complaints confidentially and effectively while remaining within the corridor of good corporate governance. The reporting mechanism is designed with the following objectives:

1. Creating a conducive environment and encouraging reporting on matters that may cause financial or nonfinancial losses, including those that may damage the organization's reputation.
2. Facilitating management to effectively handle violation reports while protecting the confidentiality of the whistleblower's identity and ensuring that information is kept in a special archive with guaranteed security.
3. Establishing policies and infrastructure to protect whistleblowers from retaliation by internal and external parties.
4. Reducing losses caused by violations through early detection.
5. Enhancing the Company's reputation.

To facilitate effective reporting, PT LRT Jakarta has established the following whistleblowing channels, which are managed in collaboration with an independent consultant:

Telephone : +62 21 5088 0141
 Email : lrtjakartaintegritas@tipofs.info
 Website : <https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/>
 SMS : +62 81 1199 23335
 WhatsApp : +62 81 1199 23335

Every report of violation received by the Company will be validated first by the WBS Committee appointed by the Company and then submitted to the President Director and/or the Board of Commissioners as the party authorized to determine the follow-up the report to the investigation stage. An independent investigation team will be formed by the President Director and/or the Board of Commissioners of the Company to conduct the investigation process of the incoming



melakukan proses investigasi terhadap laporan yang diterima. Hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk dimintakan rekomendasi penyelesaian dan sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

Sanksi bagi Pelanggar

Atas setiap pelanggaran yang terbukti, maka Perseroan akan memberikan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggarannya serta dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor untuk menghindarkan pelapor dari potensi tindakan retaliasi, dalam bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama dan sepanjang pelapor dapat menjaga kerahasiaan dari kasus yang dilaporkan. Bagi pelapor yang berasal dari internal Perseroan yang memberikan identitasnya, Perseroan menjamin mereka dari hal-hal berikut ini:

1. Pemecatan yang tidak sesuai ketentuan dan diskriminatif;
2. Penurunan jabatan;
3. Catatan yang merugikan pribadi Pelapor;
4. Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karier di Perusahaan.

Jumlah Pengaduan Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

Efektivitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran dapat diukur dari jumlah penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang dideteksi serta tindak lanjutnya, termasuk waktu untuk memproses laporan tersebut di tingkat internal sebelum di bawah ke ruang publik.

Berikut jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS:

1. Yang termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah:
 - a. Melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. Melanggar pedoman etika perusahaan;
 - c. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - d. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, ataupun kebijakan prosedur, dan peraturan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun
 - f. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

reports. The results of the investigation will be submitted to the President Director and/or the Board of Commissioners for a recommendation on the settlement and sanctions to be imposed in accordance with Company policies and regulations.

Sanctions for Violators

For each proven violation, the Company will impose sanctions in accordance with the severity of the violation and based on Company policies and regulations.

Protection for Whistleblowers

The Company guarantees the protection and confidentiality of the identity of the whistleblower to protect the whistleblower from potential retaliation, such as threats, intimidation, or unpleasant actions from any party, as long as the whistleblower can maintain the confidentiality of the reported case. For internal whistleblowers who provide their identity, the Company guarantees them against the following:

1. Unlawful and discriminatory dismissal;
2. Demotion;
3. Notes that are detrimental to the Whistleblower's personal interests;
4. Discrimination in career development at the Company.

Number of Complaints and Follow-Ups in 2024

The effectiveness of the implementation of the whistleblowing system can be measured by the number of misconducts or violations of the code of conduct that are identified and followed up, including the time taken to process the reports internally before they are made public.

The following types of violations can be reported through the WBS mechanism:

1. Activities considered as violations are:
 - a. Violating laws and regulations;
 - b. Violating the Company's ethical guidelines;
 - c. Violating generally accepted accounting principles;
 - d. Violating the Company's policies, operational procedures, and other regulations deemed necessary by the company;
 - e. Engaging in other fraudulent actions that may cause financial or non-financial losses.
 - f. Engaging in actions that endanger workplace safety

2. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
 3. Pada dasarnya, pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya pelapor yang berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan agar dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.
 4. Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:
 - a. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *email*) yang independen, bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan, bagaimana, serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
2. Whistleblowing is a disclosure of violations or unlawful, unethical, or immoral acts that may harm the organization or stakeholders, made by employees or organizational leaders to the organization's leadership or other institutions capable of taking action on the violation. This disclosure is generally done confidentially.
3. Essentially, whistleblowers are employees of the organization itself (internal parties), although it's possible for reports to come from external parties (customers, suppliers, the public). Reporters provide clear evidence, information, or indications of the reported violation for investigation or follow-up.
4. A good Whistleblowing System provides facilities and protections (whistleblower protection) as follows:
- a. Independent, free, and confidential reporting channels (telephone, mail, email);
 - b. Protection of the whistleblower's identity. This protection is provided when the reporter provides identifying information. Although allowed, anonymous reporting, without identification, is not recommended as it hinders communication for follow-up on reports;
 - c. Protection against retaliation from the accused or the organization. Protection from pressure, delayed promotions, dismissals, lawsuits, loss of property, to physical harm. This protection extends not only to the reporter but can also include the whistleblower's family members.
 - d. Information on the follow-up process, including when, how, and to which institution the follow-up is submitted. This information is provided confidentially to fully identified whistleblowers.

Pada tahun 2024, berikut laporan pelanggaran yang diduga terjadi di lingkungan Perseroan dan langkah tindak lanjutnya:

Jumlah Laporan Number of Reports	Laporan (Closed) Report (Closed)	Laporan (Open) Report (Open)	Tindak Lanjut Follow-Up
10	10	-	-

The following are reports of alleged violations in the Company's environment and their follow-up in 2024:

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk memotivasi para karyawan agar menggunakan mekanisme WBS untuk menyampaikan laporan pelanggaran, Perseroan telah melakukan sosialisasi sistem *Whistleblowing* kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, vendor, dan *stakeholder* terkait. Media yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi tersebut antara lain pertemuan melalui tatap muka atau *online*, penyebaran *booklet*, pemasangan *standing banner*, *E-Magazine* dan media sosial Perseroan. Selain itu, kebijakan Sistem *Whistleblowing* LRT Jakarta juga dapat langsung diakses oleh pihak eksternal melalui situs web resmi Perseroan.

Socialization of the Whistleblowing System

To motivate employees to use the WBS mechanism to submit reports of violations, the Company has socialized the *Whistleblowing* system to all employees, business partners, vendors, and relevant stakeholders. The media used to support these socialization activities include face-to-face or online meetings, distribution of booklets, installation of standing banners, *E-Magazine* and the Company's social media. In addition, the *Whistleblowing* System of LRT Jakarta can also be directly accessed by external parties through the Company's official website.



Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Wujud kontribusi LRT Jakarta sebagai *corporate citizen* antara lain adalah dengan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Berikut laporan kontribusi pajak Perseroan pada tahun 2024 dan 2023:

Uraian Description	Tahun Pajak Tax Year	
	2024	2023
Jenis Pajak Type of Tax		
PPh 4 ayat 2 Income Tax 4 paragraph 2	663.104.061	406.368.858
PPh 21 Income Tax 21	11.016.675.572	8.877.066.488
PPh 22 Income Tax 22	255.883.947	404.224.375
PPh 23 Income Tax 23	917.633.949	1.005.680.404
Jumlah Total	12.853.297.529	10.693.340.125

Fulfillment of Tax Obligations

One form of LRT Jakarta's contribution as a corporate citizen is to fulfill all tax obligations. The following is a report of the Company's tax contributions in 2024 and 2023:

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practice

Laporan Atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan aktivitas usaha yang berwawasan lingkungan. Hingga per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerima pengaduan atas aktivitas Perseroan yang telah mencemari lingkungan, baik di sekitar kantor pusat maupun di sekitar lingkungan usaha Perseroan.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Perseroan memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Induk Perseroan menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan yang telah disetujui oleh RUPS untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan-laporan keuangan Perseroan untuk periode pelaporan 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Kasus Terkait Buruh dan Karyawan

Perseroan melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak mencatat adanya kasus ketenagakerjaan yang melibatkan Perseroan dengan buruh dan/atau karyawan yang bersifat material sehingga berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan di Website Perusahaan

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, Perseroan telah menyusun dan mengunggah Laporan Tahunan versi digital ke situs web resmi yang memiliki kesesuaian isi dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

Report on Company Activities that Pollute the Environment

The Company is committed to conducting environmentally sound business activities. As of December 31, 2024, the Company has not received any complaints regarding its activities that have polluted the environment, either around the head office or in the Company's business environment.

Discrepancies in the Presentation of the Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The Company ensures that the presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The Company's parent appointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan, which has been approved by the GMS to audit the Company's financial statements for the reporting period from January 1, 2024, to December 31, 2024.

Labor and Employee-Related Cases

Until the end of 2024, the Company did not record any material labor cases involving the Company with labor and/or employees that would impact the Company's business continuity.

Conformity of the Annual Report Book and Annual Report on the Company's Website

As part of its accountability to shareholders and stakeholders, the Company has prepared and uploaded a digital version of the Annual Report to the official website, which content is identical to the printed Annual Report published by the Company.



07

LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

LRT Jakarta terus berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program keberlanjutan di wilayah operasionalnya

LRT Jakarta constantly contributes to the creation of positive impacts for the community and the environment through various sustainability programs in its operational area.







Ikhtisar Keberlanjutan

Sustainability Highlights

Aspek Ekonomi [OJK B.1]

Economic Aspect [OJK B.1]

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022
Pendapatan atau Penjualan Revenue and Sales	265,2	271,6	214,7
Laba atau Rugi Bersih* Net Profit or Loss*	3,7	17,3	8,2

Jumlah Pemasok Lokal

Total Local Suppliers

dalam negeri Indonesia | Indonesian suppliers

Keterangan Description	2024	2023	2022
Jumlah Pemasok Lokal Total Local Suppliers	193	202	175

Nilai Pembelian dari Pemasok Lokal

Purchase Value from Local Suppliers

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022
Nilai Pembelian dari Pemasok Lokal Purchase Value from Local Suppliers	163,02	173,12	108,49

Proporsi Jumlah Pemasok Lokal

Proportion of Total Local Suppliers

Dalam% | in %

Keterangan Description	2024	2023	2022
Proporsi Jumlah Pemasok Lokal Proportion of Total Local Suppliers	96%	96%	97%

Produk Ramah Lingkungan

Light Rail Transit (LRT) memberikan manfaat signifikan bagi lingkungan, terutama sebagai moda transportasi massal yang efisien dan hemat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, serta mendorong transportasi publik yang lebih berkelanjutan.

LRT Jakarta menggunakan kendaraan operasional listrik (motor) untuk menunjang mobilisasi sekitar depo dan stasiun dalam melaksanakan kegiatan operasional harian.

Environmentally Friendly Products

Light Rail Transit (LRT) provides significant benefits for the environment, especially as an efficient mass transportation media that reduces greenhouse gas emissions and air pollution, as well as promoting sustainable public transportation.

LRT Jakarta uses electric operational vehicles (motor) to support mobilization around the depo and stations for its daily operational activities.

Aspek Lingkungan* [OJK B.2]

Pemakaian Energi, Air, dan Kertas

Pemakaian BBM (Bensin)
Fuel (Gasoline) Usage

Dalam Liter In Liter			
Keterangan Description	2024	2023	2022
Pemakaian BBM (Bensin) Fuel (Gasoline) Usage	1.976	1.935	2.271

Pemakaian Energi Listrik
Electric Energy Usage

Dalam Kwh In Kwh			
Keterangan Description	2024	2023	2022
Pemakaian Energi Listrik Electric Energy Usage	10.379.218	9.956.140*	9.231.350

*Data yang disampaikan pada laporan sebelumnya disajikan ulang
*Restatement of data from the previous report

Pemakaian Kertas
Paper Usage

Dalam Rim In Ream			
Keterangan Description	2024	2023	2022
Pemakaian Kertas Paper Usage	263	308	348

Pemakaian Air
Water Consumption

dalam m³ In m³			
Keterangan Description	2024	2023	2022
Pemakaian Air Water Usage	39.826	21.669	13.884

Emisi yang Dihasilkan
Generated Emissions

Kategori Category	Satuan Unit	2024	2023	2022
Emisi BBM (Scope 1) Fuel Emissions (Scope 1)	Ton CO2-eq	37,69	22,21	n/a
Emisi Listrik (Scope 2) Electricity Emissions (Scope 2)	Ton CO2-eq	9.029,91	8.669,67	n/a
Total Emisi Total Emissions	Ton CO2-eq	9.067,6	8.691,88	n/a



Limbah dan Efluen

Effluent and Waste

Kategori Category	Satuan Unit	2024	2023	2022
Limbah B3 Hazardous Waste	Ton	12,05	7,93	0
Limbah Non B3 Non Hazardous Waste	Ton	219,74	77,7	64,2
Total Limbah Total Waste	Ton	231,79	85,63	64,2

Biaya Lingkungan

Environmental Expenses

dalam angka penuh Rupiah | in Rupiah full

Keterangan Description	2024	2023**	2022*
Biaya Lingkungan Environmental Expenses	748.811.545	547.118.433	589.659.153

Aspek Sosial [OJK B.3]

Kesehatan

- Menyediakan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan. Udara yang lebih bersih berdampak positif pada kesehatan masyarakat
- Mendorong aktivitas fisik dengan menggunakan transportasi umum seringkali melibatkan lebih banyak berjalan kaki dan dapat meningkatkan aktivitas fisik harian masyarakat.
- Turut serta dalam program Makan Bergizi Gratis untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan kuat bagi semua anak Indonesia
- Menyelenggarakan aktivasi vaksin polio dan donor darah yang melibatkan publik

Bidang Pendidikan

Mengenalkan transportasi publik kepada pelajar atau peserta didik dari tingkat dini hingga perguruan tinggi.

Social Aspect [OJK B.3]

Health

- Providing more environmentally friendly transportation alternatives. Cleaner air has a positive impact on public health.
- Encouraging physical activity by using public transportation, which often involves more walking and can increase people's daily physical activity.
- Participating in the Free Nutritious Meals program to build a healthier and stronger future for all Indonesian children.
- Organizing polio vaccine activations and blood donors involving the public.

Education

Introducing public transportation to students from early childhood to college.

Total Biaya Corporate Social Responsibility (CSR)

Environmental Expenses

dalam juta Rupiah | in Rupiah

Keterangan Description	2024	2023**	2022*
Total Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility Expenses	301	386	331

		2024	2023	2022
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Perempuan Female	0%	0%	33,3%
	Laki-laki Male	100%	100%	66,7%
Direksi Board of Directors	Perempuan Female	0%	0%	0%
	Laki-laki Male	100%	100%	100%
Manajerial Managerial	Perempuan Female	20,5%	18,9%	18,9%
	Laki-laki Male	79,5%	81,1%	81,1%

LRT Jakarta terus berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program keberlanjutan di wilayah operasionalnya.

Tidak sebatas pada tujuan yang berorientasi pada profitabilitas semata, keinginan untuk memberi nilai tambah dan melindungi seluruh pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Regulasi yang ketat, perubahan iklim, dan ekspektasi pemangku kepentingan menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau bisa disebut juga dengan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan menjadi aspek penting dalam operasional bisnis.

Untuk mewujudkan komitmen ini, Perusahaan melakukan pengelolaan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan kapasitas dan kegiatan usaha yang dijalankannya, strategi keberlanjutan yang dijalankan mencakup tata kelola perusahaan yang baik, kesejahteraan karyawan, pemberdayaan masyarakat, efisiensi sumber daya, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah dan emisi yang bertanggung jawab. Melalui kebijakan keberlanjutannya, Perusahaan berharap dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan menjaga bumi ini sebagai sumber kehidupan secara berkelanjutan.

LRT Jakarta constantly contributes to the creation of positive impacts for the community and the environment through various sustainability programs in its operational area.

Not only limited to profitability-oriented objectives, the desire to add value and protect all stakeholders has encouraged the Company to adopt more responsible business practices. Strict regulations, climate change, and stakeholder expectations have resulted in social and environmental responsibility, otherwise known as sustainability as part of the Company's long-term strategy. Therefore, the balance between economic growth, social welfare, and environmental preservation has become an important aspect of business operations.

In order to realize this commitment, the Company manages environmental and social responsibilities by prioritizing the principles of ethics, compliance, transparency, and accountability. In line with its capacity and business activities, the implementation of sustainability strategy includes good corporate governance, employee welfare, community empowerment, resource efficiency, the application of environmentally friendly technology, and responsible waste and emission management. Through its sustainability policy, the Company hopes to contribute to improving the quality of life and preserving the earth as a sustainable source of life.



Komitmen dan Kebijakan Penerapan Keberlanjutan

Commitment and Policy of Sustainability Implementation

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), LRT Jakarta berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program-program yang dijalankan mencakup pengelolaan energi yang efisien, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengurangan jejak karbon dalam operasional perusahaan. Selain itu, LRT Jakarta juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.

LRT Jakarta terus memperkuat pelaksanaan TJSL dengan memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta regulasi yang berlaku. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, menciptakan nilai jangka panjang, dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

As part of its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, LRT Jakarta is committed to making a real contribution through various initiatives that focus on environmental, social, and economic aspects. The Company's programs include efficient energy management, the use of environmentally friendly technology, and the reduction of the carbon footprint in its operations. In addition, LRT Jakarta is also active in social activities, such as community empowerment and improvement of the quality of public services.

LRT Jakarta continues to strengthen the implementation of TJSL by ensuring that every policy and program implemented is in line with stakeholder needs and applicable regulations. Through this approach, the Company not only contributes to environmental and social sustainability, but also builds harmonious relationships with the community, creates long-term value, and supports more sustainable development.

Strategi Keberlanjutan

Sustainability Strategy [OJK A.1]

Sektor transportasi menyumbang sekitar 23% emisi gas rumah kaca global, dengan transportasi darat sebagai kontributor terbesar. Karena itu, sektor ini memainkan peran krusial dalam upaya Indonesia mencapai *Net Zero Emission* (NZE) 2060, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang aksi mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas publik terbaik, PT LRT Jakarta menerapkan strategi berkelanjutan melalui pengembangan *Light Rail Transit* (LRT) yang ramah lingkungan dan hemat energi. Dengan inovasi teknologi, perusahaan berupaya mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi massal.

Lebih dari sekadar inovasi, PT LRT Jakarta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam seluruh operasionalnya. Pengembangan LRT tidak hanya menghadirkan solusi transportasi yang lebih hijau, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung mobilitas perkotaan yang lebih efisien.

The transportation sector contributes around 23% of global greenhouse gas emissions, with land transportation as the largest contributor. Therefore, this sector plays a crucial role in Indonesia's efforts to achieve Net Zero Emission (NZE) 2060, as regulated in the Decree of the Minister of Transportation Number 8 of 2023 concerning climate change mitigation actions in the transportation sector.

As a company that is committed to providing the best public mobility solutions, PT LRT Jakarta implements sustainability strategies through the development of environmentally friendly and energy-efficient Light Rail Transit (LRT). With technological innovation, the Company strives to reduce its carbon footprint while improving the quality of mass transportation services.

More than just innovation, PT LRT Jakarta supports sustainable development by integrating Environmental, Social, Governance (ESG) principles in all its operations. The development of the LRT not only presents a greener transportation solution, but also helps reduce heavy traffic and improve connectivity between regions, supporting more efficient urban mobility.

Di tahun 2024, strategi Perusahaan berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pelaksanaan program-program Pemenuhan *Service & Operation Excellence*, Peningkatan *Ridership*, dan Peningkatan Bisnis *Non-FareBox*.

In 2024, the Company's strategy was focused on sustainable growth with the implementation of programs to fulfill *Service & Operation Excellence*, increase *Ridership*, and improve *Non-FareBox Business*.

Target dan Rencana Program Keberlanjutan Sustainability Program Targets and Plans

Target yang ditetapkan Target	Kebijakan/Progres Policy/Progress	Dukungan TPB SDGs Support
Strategi LRT Jakarta mencakup fokus kuat pada keselamatan penumpang dan kualitas layanan melalui inisiatif seperti SS1 (Operasi yang Aman dan Andal) dan SI2 (Sistem Keamanan Penumpang Canggih dengan Pemeliharaan Prediktif). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan transportasi yang aman dan sehat bagi penumpang LRT Jakarta's strategy includes a strong focus on passenger safety and quality of service through initiatives such as SS1 (Safe and Reliable Operations) and SI2 (Advanced Passenger Safety System with Predictive Maintenance). These initiatives aim to provide a safe and healthy transportation environment for passengers	Saat ini Perusahaan rutin mengadakan pelatihan terkait keselamatan secara berkala dan memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat dan mematuhi prosedur keselamatan terbaru. Setiap kereta LRT diperiksa secara menyeluruh sebelum beroperasi setiap hari. Inspeksi ini mencakup pengecekan sistem rem, pintu, dan kondisi rel untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Setiap stasiun dan kereta dilengkapi dengan kamera pengawas canggih yang dapat mendeteksi perilaku mencurigakan dan memberikan peringatan dini kepada petugas keamanan. Currently, the Company regularly conducts safety training and ensures readiness in dealing with emergency situations and compliance with the latest safety procedures. Each LRT train is thoroughly inspected before operating each day. This inspection includes checking the brake system, doors, and rail conditions to ensure that everything is functioning properly. Each station and train is equipped with advanced surveillance cameras that can detect suspicious behavior and provide early warning to security personnel.	 
Tujuan LRT Jakarta untuk menjadi <i>Urban Transit Nexus</i> (PS2) sangat erat kaitannya dengan SDG 11, yang fokus pada pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Inisiatif mereka terkait Pengembangan Berorientasi Transit (TOD) dan mengintegrasikan peluang komersial di sekitar stasiun (SI5) bertujuan untuk menciptakan pilihan transportasi perkotaan yang terjangkau dan berkelanjutan. LRT Jakarta's goal of becoming an Urban Transit Nexus (PS2) is closely related to SDG 11, which focuses on developing an integrated, resilient, and sustainable public transportation system. Their initiatives related to Transit-Oriented Development (TOD) and integrating commercial opportunities around stations (SI5) aim to create affordable and sustainable urban transportation options.	- LRT Jakarta mengintegrasikan layanan mereka dengan moda transportasi lain seperti bus, angkot, dan sepeda sewa. Hal ini memudahkan penumpang untuk berpindah antar moda transportasi dengan lancar dan efisien. - Pembangunan ruang publik seperti taman baca, dan fasilitas umum lainnya di sekitar stasiun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong penggunaan transportasi publik. - LRT Jakarta integrates their services with other modes of transportation such as buses, public transportation, and rental bicycles. This integration allows passengers to move between modes of transportation easily and efficiently. - The construction of public spaces such as reading parks and other public facilities around stations improves the quality of life for the community and encourages the use of public transportation.	



Target dan Rencana Program Keberlanjutan

Sustainability Program Targets and Plans

Target yang ditetapkan Target	Kebijakan/Progres Policy/Progress	Dukungan TPB SDGs Support
Melalui inisiatif seperti SI10 (Program Pengembangan Talenta dan Keterlibatan Inklusif Karyawan), LRT Jakarta berupaya membangun tenaga kerja yang terampil dan mempromosikan praktik kerja inklusif, sejalan dengan fokus SDG 8 pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Through initiatives such as SI10 (Talent Development and Inclusive Employee Engagement Program), LRT Jakarta strives to build a skilled workforce and promote inclusive work practices, in line with the SDG 8 focus on decent work and economic growth.	- Perusahaan menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti keselamatan, teknologi, dan layanan pelanggan. Perusahaan juga mendorong karyawan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka - LRTJ juga menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif dengan memastikan kesempatan yang sama bagi semua calon karyawan, tanpa memandang latar belakang, gender, atau disabilitas, membentuk LKS Bipartit yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan inklusivitas dan kesejahteraan karyawan. - Perusahaan juga menyediakan program kesehatan dan kesejahteraan, termasuk asuransi kesehatan, program kebugaran, dan dukungan kesehatan mental. - The Company organizes regular training programs to improve the technical and managerial skills of its employees. These training programs cover various fields, such as safety, technology, and customer service. The Company also encourages employees to obtain professional certifications that are relevant to their fields of work - LRTJ also implements an inclusive recruitment policy by ensuring equal opportunities for all prospective employees, regardless of background, gender, or disability, establishing a Bipartite LKS consisting of representatives from various departments to identify and address issues related to inclusiveness and employee welfare. - The Company also provides health and welfare programs, which include health insurance, fitness program, and mental health support.	
Inisiatif untuk diversifikasi pendapatan <i>non-farebox</i> (SS5) dan pemanfaatan area komersial (SI7) menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan diversifikasi pendapatan, sejalan dengan fokus SDG 12 pada konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Initiatives to diversify non-farebox income (SS5) and utilize commercial areas (SI7) emphasize the efficient use of resources and diversification of income, in line with the focus of SDG 12, sustainable consumption and production.	Perusahaan menyediakan ruang iklan di dalam stasiun dan kereta untuk perusahaan yang ingin mempromosikan produk atau layanan mereka. Ini mencakup iklan digital dan statis. Selain itu, LRTJ juga mengembangkan program loyalitas yang menawarkan diskon atau penawaran khusus dari mitra bisnis lokal kepada pelanggan LRTJ. The Company provides advertising space inside stations and trains for companies looking to promote their products or services. This includes both digital and static advertising. In addition, LRTJ is also developing a loyalty program that offers LRTJ customers discounts or special offers from local business partners.	

Target dan Rencana Program Keberlanjutan

Sustainability Program Targets and Plans

Target yang ditetapkan Target	Kebijakan/Progres Policy/Progress	Dukungan TPB SDGs Support
Ekspansi jaringan transit (SS3) dan ekspansi operasional (SI8) LRT Jakarta mendukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi pemeliharaan prediktif dan pemantauan waktu nyata berbasis IoT (SI2) menunjukkan komitmen terhadap inovasi dalam transportasi perkotaan. Transit network expansion (SS3) and operational expansion (SI8) LRT Jakarta supports the development of sustainable urban infrastructure. In addition, the implementation of predictive maintenance and IoT-based real-time monitoring (SI2) demonstrates a commitment to innovation in urban transportation.	- Perusahaan mengembangkan hub transportasi yang mengintegrasikan LRT dengan moda transportasi lain seperti bus dan angkot. Ini memudahkan penumpang untuk berpindah antar moda transportasi dengan lancar. - Perusahaan menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan meningkatkan pelatihan staf dan memperkenalkan sistem informasi penumpang yang lebih canggih. - LRTJ Menyediakan fasilitas tambahan seperti <i>Wi-Fi</i> gratis, area duduk yang nyaman, dan aksesibilitas bagi penumpang dengan disabilitas. - LRTJ Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat menunjukkan potensi masalah sebelum terjadi. Ini memungkinkan pemeliharaan yang lebih proaktif dan efisien. - The Company develops a transportation hub that integrates LRT with other modes of transportation such as buses and public minibuses. This allows passengers to transfer between modes of transportation seamlessly. - The Company provides better customer service by improving staff training and introducing a more sophisticated passenger information system. - LRTJ Provides additional facilities, such as free <i>Wi-Fi</i>, comfortable seating areas, and accessibility for passengers with disabilities. - LRTJ Uses data analysis to identify patterns and trends that can indicate potential issues before they occur. This allows for more proactive and efficient maintenance.	
Strategi <i>Eco-Mobility and Resilient Growth</i> (PS3) dan penerapan praktik berkelanjutan serta inisiatif ESG (SI11) menyoroti komitmen LRT Jakarta untuk mengurangi dampak lingkungan, mendukung tindakan iklim, dan mempromosikan keberlanjutan dalam operasionalnya. Eco-Mobility and Resilient Growth Strategy (PS3) and the implementation of sustainable practices and ESG initiatives (SI11) highlight LRT Jakarta's commitment to reducing environmental impact, supporting climate action, and promoting sustainability in its operations.	- Integrasi dengan transportasi publik lainnya seperti bus dan Mikrotrans untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. - Penggunaan kereta listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. - Implementasi sistem pengelolaan limbah yang efektif di depo, stasiun dan sepanjang jalur LRT. - Perusahaan melakukan pengukuran dan pelaporan emisi karbon secara berkala untuk memastikan penurunan emisi. - Program penghijauan di sekitar depo dan stasiun LRT untuk meningkatkan kualitas udara. - Penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi energi dan operasional. - Pemanfaatan lahan kosong di sekitar depo untuk menanam tanaman pangan dan tanaman hias. - Integration with other public transportation such as buses and microtrans to reduce the use of private vehicles. - More efficient and environmentally friendly use of electric trains. - Implementation of an effective waste management system at depots, stations and throughout the LRT lines. - The Company regularly measures and reports carbon emissions to ensure emission reductions. - Reforestation programs around LRT depots and stations to improve air quality. - Use of advanced technology to improve energy and operational efficiency. - Utilization of vacant lots around the depots to grow food and decorative plants.	



Pembiayaan dan Anggaran Program Keberlanjutan

Sustainability Program Financing and Budget

(Dalam juta rupiah) (In million Rupiah)

Aspek Aspects	2024	2023
Ekonomi Economic	-	357
Sosial Social	301	-
Lingkungan Environment	-	27

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semakin kompleks, LRT Jakarta berkomitmen untuk menerapkan tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) yang kuat. Tata kelola ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, LRT Jakarta mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, proses pengambilan keputusan, serta interaksi dengan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi memainkan peran penting dalam mengawasi penerapan kebijakan keberlanjutan, termasuk dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance – ESG*).

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas/tanggung jawab, kemandirian/independensi, kewajaran dan kesetaraan, menjadi fundamental bagi pelaksanaan keberlanjutan Perseroan. Informasi terkait prinsip-prinsip dan pelaksanaan GCG dapat dilihat di bagian Tata Kelola Perusahaan dalam laporan ini.

Amidst the increasingly complex economic, social, and environmental challenges, LRT Jakarta is committed to implementing strong sustainability governance. This governance is part of the Company's long-term strategy to create sustainable value for all stakeholders through responsible and sustainability-oriented business practices.

As a manifestation of this commitment, LRT Jakarta integrates sustainability principles into every aspect of its operations, decision-making processes, and interactions with stakeholders. The Board of Commissioners and Board of Directors play an important role in overseeing the implementation of sustainability policies, including in the Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects.

The principles of good corporate governance (GCG), which include transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality, are fundamental to the Company's sustainability implementation. Information regarding GCG principles and implementation can be found in the Corporate Governance section of this report.

Selaras dengan visi keberlanjutan, LRT Jakarta berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan dampak positif dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

In line with its sustainability vision, LRT Jakarta strives to provide real benefits to the community and the environment around its operational area. The Company is committed to delivering positive social, economic and environmental impacts to support inclusive and sustainable growth.

Penanggung Jawab Keberlanjutan [OJK E.1]

Departemen Komunikasi Perusahaan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan TJSL, di bawah pengelolaan Divisi Sekretaris Perusahaan. Struktur lebih lengkap dapat dilihat pada bagan berikut.

Person in Charge of Sustainability [OJK E.1]

The Corporate Communication Department is responsible for coordinating CSR activities under the management of the Corporate Secretary Division. A detailed structure can be seen in the following chart.



Penanggung Jawab Person in Charge	Tugas Duty
Direktur Utama President Director	Menetapkan kebijakan Perseroan yang mencakup seluruh aspek strategis Perseroan. Establish the Company's policies that cover all strategic aspects of the Company.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary Division	Penghubung antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan masyarakat, regulator, investor, lembaga, atau asosiasi lain yang berhubungan dengan Perseroan. As a liaison between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders. And as the Company's representative in engaging with the community, regulators, investors, institutions, or other associations related to the Company.
Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Head of Corporate Communication Department	Bertanggung jawab mengelola, merancang, dan mengevaluasi program sosial serta lingkungan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan kebutuhan penerima manfaat. Responsible to managing, designing, and evaluating social or environmental programs that are in line with the Company's vision and mission, as well as the needs of beneficiaries.
Staf TJSL TJSL Staff	Bertanggung jawab pada pelaksanaan program sosial serta lingkungan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Responsible for the implementation of social and environmental programs that are in line with the Company's vision and mission.



Pengembangan Kompetensi Terkait Keberlanjutan [OJK E.2]

Salah satu bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan adalah dengan mengembangkan kompetensi karyawan. Dengan memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terus berkembang, perusahaan dapat beradaptasi di dunia transportasi massal yang terus berubah, seiring perkembangan teknologi, dan kebutuhan pasar. Melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang cenderung lebih termotivasi serta berkontribusi lebih optimal terhadap kesuksesan perusahaan.

Pengembangan kompetensi karyawan juga turut mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Karyawan yang dibekali dengan wawasan dan keterampilan terkait praktik bisnis yang berkelanjutan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta mengurangi dampak lingkungan. Langkah ini tidak hanya menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis, tetapi juga memperkuat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, sejalan dengan visi pertumbuhan berkelanjutan.

Development of Sustainability-Related Competencies [OJK E.2]

One of the Company's sustainability strategies is to develop employee competencies. By ensuring that employees continuously develop their skills and knowledge, the Company can adapt to the evolving world of mass transportation, in line with technological developments and market needs. Through various training and development programs, the Company not only improves productivity and innovation, but also creates a work environment that encourages employee growth and loyalty. Employees who feel valued and are given opportunities to develop tend to be more motivated and contribute more optimally to the Company's success.

The development of employee competencies also supports the achievement of the Company's overall sustainability goals. Employees who are trained in insights and skills related to sustainable business practices will be able to improve the Company's operational efficiency and reduce environmental impacts. This approach not only creates long-term value for the business, but also strengthens the Company's commitment to social and environmental responsibility, in line with its vision of sustainable growth.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials [OJK F.1]	Tempat/ Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
- Azas Tigor Nainggolan (Komisaris) - Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) - Sarno - Komite Audit - Adityawarman Nugroho - Internal Audit Division Head - Bambang Arifin - Business & Operational Senior Auditor	<i>Training</i>	Konferensi Nasional Manajemen Risiko (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage) National Conference of Risk Management (Sustainability for Organization Resilience & Competitive Advantage)	Bali/ 12–13 Desember 2024 Bali/December 12-13, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Center for Risk Management Professional Certification (LSPMR)
- Azas Tigor Nainggolan (Commissioner) - Mohamad Pramintohadi Sukarno (Commissioner) - Sarno – Audit Committee - Adityawarman Nugroho - Internal Audit Division Head - Bambang Arifin - Business & Operational Senior Auditor				

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials [OJK F.1]	Tempat/ Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
- Hendri Saputra – Direksi - Sahurdi - Finance & Business Support Director - Aditia Kesuma Negara Dalimunthe - Operation & Development Director	Sertifikasi Certification	Diklat Pelatihan & Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta/ 25 Maret – 1 April 2024	Pusdiklatwas BPKP
- Hendri Saputra – Director - Sahurdi - Finance & Business Support Director - Aditia Kesuma Negara Dalimunthe - Operation & Development Director		Training & Certification of Certified Risk Executive Leader (CREL)	Jakarta/March 25 – April 1, 2024	
- Sahurdi - Finance & Business Support Director - Tridewi Pujamawaty - Risk Management & Compliance Department Head	Training	GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	Yogyakarta/ 22–23 Agustus 2024 Yogyakarta/ August 22–23, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
- Bambang Arifin - Business & Operational Senior Auditor - I Dewa Ayu Rai Widyastuti - Management & Financial Senior Auditor - Tridewi Pujamawaty - Risk Management & Compliance Department Head	Sertifikasi Certification	Risk & Control Self Assessment (RCSA)	PT LRT Jakarta/ 14 Agustus 2024 PT LRT Jakarta/ August 14, 2024	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
Adityawarman Nugroho - Internal Audit Division Head	Sertifikasi Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Jakarta- Online/6–13 Mei 2024 Jakarta- Online/May 6–13, 2024	PT RAP Indonesia
Angga Chandra Permana - Management & Financial Auditor	Training	GRC Talk "Membangun Budaya Anti Korupsi & Gratifikasi" GRC Talk "Building a Culture of Anti-Corruption and Gratification"	PT LRT Jakarta/ 5 Juni 2024 PT LRT Jakarta/ 5 Juni/ June 2024	Bapak Aminudin, Ak, CA, CFE. (Direktur Anti Korupsi Badan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi RI) Mr. Aminudin, Ak, CA, CFE. (Director of Anti-Corruption in Business Institutions, Corruption Eradication Commission of RI)
Tridewi Pujamawaty - Risk Management & Compliance Department Head	Sertifikasi Certification	Certified in Financial Risk Management	Online/ 13–14 Juni 2024 Online/ June 13–14, 2024	American Academy of Financial Management (AAFM)



Identifikasi dan Mitigasi Risiko [OJK E.3]

LRT Jakarta menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan operasional serta kepatuhan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini didukung oleh lima pilar utama, yaitu pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur risiko yang terukur, serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sistematis. Selain itu, sistem informasi manajemen risiko yang andal serta pengendalian internal yang menyeluruh diterapkan untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif di seluruh aspek operasional perusahaan.

Risk Identification and Mitigation [OJK E.3]

LRT Jakarta implements a comprehensive risk management system to ensure operational sustainability and compliance with economic, social, and environmental aspects. This approach is supported by five main pillars, consisting of active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable risk policies and procedures, and systematic risk identification, measurement, monitoring, and control processes. Furthermore, a reliable risk management information system and comprehensive internal controls are implemented to ensure effective risk mitigation in all aspects of the Company's operations.

Jenis Risiko Type of Risk	Skala Risiko Scale of Risk	Mitigasi Mitigation
Aspek Ekonomi - Ketidakmampuan Perusahaan mendapatkan mitra/pemasok yang berkualitas. - Tanggung jawab untuk ikut serta mendorong usaha kecil menengah. Economic Aspect - The Company's inability to find quality partners/suppliers. - Responsibility to participate in supporting small and medium enterprises.	Rendah Low	- Keterbukaan proses pengadaan menggunakan sistem <i>E-Procurement</i>. - Kerjasama dengan mitra UMKM dengan skema <i>revenue sharing</i>. - Transparency of the procurement process using the E-Procurement system. - Cooperation with MSME partners with a revenue sharing scheme.
Aspek Sosial Perusahaan dituntut untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Hal ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang juga berdampak pada pertumbuhan usaha.	Rendah Low	- Pembuatan program CSR tahunan sesuai dengan target Perusahaan. - Penyaluran program CSR sesuai dengan prosedur yang berlaku. - Pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program CSR kepada pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perusahaan. - Pengukuran efektivitas dari program yang dijalankan. Social Aspect The Company is required to provide a positive impact on the general public. This affects the public perception which also impacts business growth.
Aspek Lingkungan Perusahaan harus menaati segala ketentuan terkait aspek lingkungan. Lebih daripada itu, Perusahaan harus menunjukkan peran sertanya dalam menjaga kelestarian lingkungan.	Rendah Low	- Melakukan Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan (IADL). - Pembuatan program-program lingkungan berdasarkan hasil IADL. - Menyediakan peralatan kedaruratan lingkungan. - Monitoring lingkungan melalui Audit, Inspeksi, Pengecekan Lapangan serta Walkthrough. - Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah terkait aspek lingkungan. - Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015. Environmental Aspect The Company must comply with all regulations related to environmental aspects. Moreover, the Company must demonstrate its participation in preserving the environment.

Jenis Risiko Type of Risk	Skala Risiko Scale of Risk	Mitigasi Mitigation
Aspek Tata Kelola Ketidakmampuan Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berimplikasi pada lingkungan kerja yang berintegritas dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan Governance Aspect The Company's inability to implement good corporate governance has implications to the integrity of the work environment and lowers stakeholder confidence	Rendah Low	1. Melakukan sosialisasi terkait program tata kelola selama setahun kepada pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perusahaan. 2. Melakukan pengawasan terhadap praktik tata kelola di lingkup Perusahaan. 3. Melakukan komunikasi secara aktif kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perusahaan terkait implementasi praktik tata kelola. 4. Membangun budaya tata kelola yang baik kepada seluruh insan LRTJ. 1. Socializing the governance program with the Company's stakeholders throughout the year. 2. Supervising governance practices within the Company. 3. Actively communicating with all Company stakeholders regarding the implementation of governance practices. 4. Building a culture of good governance for all LRTJ personnel.

Informasi lebih komprehensif mengenai penilaian risiko terdapat pada bab Tata Kelola Perusahaan bagian Manajemen Risiko.

More comprehensive information on risk assessment can be found in the Corporate Governance chapter under Risk Management.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

[OJK E.4]

LRT Jakarta berupaya menjalankan bisnis yang selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan termasuk lingkungan sekitarnya. Setiap inisiatif yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan usaha, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung keseimbangan antara pencapaian bisnis dan tanggung jawab terhadap ekosistem di wilayah operasional. Untuk memastikan implementasi yang efektif, LRT Jakarta secara berkala mengidentifikasi pemangku kepentingan serta mengevaluasi dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan pemangku kepentingan sebagaimana dalam tabel berikut:

Relationship with Stakeholders [OJK E.4]

LRT Jakarta strives to conduct business in line with the interests of stakeholders, including the surrounding environment. Every initiative carried out not only focuses on business growth, but is also designed to have a positive social, economic, and environmental impact. This commitment is realized through various programs that support the balance between business achievements and responsibility towards the ecosystem in the operational area. In order to ensure effective implementation, LRT Jakarta regularly identifies stakeholders and evaluates the impact of its business activities run by stakeholders are as listed in the following table:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan (sarana) yang Digunakan dan Frekuensi Pelibatan Approach (media) used and Engagement Frequency	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact from the Company's Activity
Pemegang Saham/Investor Shareholders/Investors (PT Jakarta Propertindo)	KPPS di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS). Perseroan telah melakukan pengambilan keputusan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdiri dari 1 (satu) kali KPPS di luar RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali KPPS di luar RUPS Luar Biasa KPPS Outside the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The Company has made decisions through the Shareholders' Decree (KPPS) Outside the General Meeting of Shareholders (AGMS) three times, consisting of one KPPS outside the Annual General Meeting of Shareholders and two KPPS outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Kinerja usaha Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham. The Company's performance will impact the amount of dividends paid to the Provincial Government of DKI Jakarta as shareholder.



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan (sarana) yang Digunakan dan Frekuensi Pelibatan Approach (media) used and Engagement Frequency	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact from the Company's Activity
Manajemen/Karyawan Management/Employees (Seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan.) (All of the Company's employees)	Pertemuan berkala antara manajemen dengan perwakilan pekerja, sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai hal terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan karyawan. Di tahun 2024 Perusahaan telah melakukan 8 kali pertemuan. Pelatihan, penilaian kinerja, dan promosi jabatan, sesuai kebutuhan. (lihat tabel jumlah pelatihan) Periodic meetings between management and employee representatives, as necessary to discuss various issues related to employment and employee welfare. In 2024 the Company has held 8 meetings. Training, performance appraisals, and job promotions, as needed. (see training table)	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. The Company's sustainability affects the welfare of employees in the long-term.
Regulator/Pemerintah Regulators/Government (Pemprov DKI Kementerian Perhubungan.) (DKI Jakarta Provincial Government, Ministry of Transportation)	Pertemuan dengan regulator/otoritas, sesuai kebutuhan. Pelaporan kegiatan dan kinerja Perusahaan, disampaikan berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Meetings with regulators/authorities, as needed. Reporting of Company activities and performance, submitted periodically in accordance with applicable regulations.	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan. The Company's financial performance will impact the amount of tax payments to the Government as state revenue used for development capital.
Masyarakat Public (Masyarakat umum baik yang menggunakan produk-produk Perusahaan maupun tidak.) (the general public, whether they use the Company's products or not)	Pertemuan saat pelaksanaan kegiatan sosial atau CSR. Meetings during the implementation of social or CSR activities.	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. The Company's business activities contribute to improving the quality of life of the community, both through its products and services as well as through its presence that could positively impact the economy of the surrounding community.
Konsumen/Pelanggan Consumers/Customers (Para klien baik domestik maupun asing.) (Both domestic and foreign clients)	Informasi dan promosi melalui situs web, media sosial, iklan dan promosi. Survei kepuasan pelanggan. Information and promotion through website, social media, advertisement and promotion. Customer satisfaction survey.	Kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada Konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan layanan tersebut. The quality of products and services provided to Customers will influence their loyalty in using the products and services.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan (sarana) yang Digunakan dan Frekuensi Pelibatan Approach (media) used and Engagement Frequency	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact from the Company's Activity
Rekanan Partners (Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional.) (Contracts and Partnership Agreements, Operational Processes)	Informasi tender dan kontrak kerja sebagai dasar pelaksanaan kerja, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan berkala dengan pemasok, termasuk evaluasi pemasok, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Information on tenders and work contracts as the basis for work implementation is carried out as needed. Periodic meetings with suppliers, including supplier evaluations, are carried out as needed.	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis. Fair and transparent procurement process; Objective evaluation process; Harmonious relations.
Media Massa Mass Media (Media yang menyiarkan informasi tentang Perusahaan baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, dan media online.) (Media that disseminates information about the Company, whether printed media, electronic media or social media and online media.)	Perusahaan bekerja sama dengan media sebagai sarana komunikasi terhadap pencapaian dan tantangan yang dihadapi LRT. Komunikasi dengan Media disesuaikan dengan kebutuhan LRT. The Company collaborates with the media as a means of communication regarding the achievements and challenges faced by LRT. Communication with the media is tailored to the needs of LRT.	Kegiatan Perusahaan yang disampaikan oleh media massa, akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk-produk Perusahaan. The Company's activities as reported by the mass media will affect the level of public knowledge and understanding of the Company's products.

Perusahaan berupaya menjalankan kegiatan bisnis yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kesetaraan. Prinsip ini diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk:

1. Pemegang saham, yang membutuhkan tata kelola yang terbuka dan dapat dipercaya.
2. Karyawan, yang berhak atas lingkungan kerja yang adil serta prosedur yang jelas.
3. Mitra usaha dan pemasok, yang mengharapkan kerja sama berdasarkan transparansi dan kesetaraan.
4. Konsumen dan pengguna, yang berhak memperoleh produk berkualitas serta akses terhadap layanan pengaduan.
5. Regulator, yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap kebijakan industri guna menjaga stabilitas sektor usaha.

Untuk mewujudkan prinsip ini, perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan mengutamakan keterbukaan informasi, tanggung jawab, dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pihak mendapatkan manfaat yang adil dalam ekosistem bisnis yang sehat dan berintegritas.

The Company strives to conduct business activities that promote transparency, fairness, and equality. This principle is applied by considering various interests, including:

1. Shareholders, who require transparent and trustworthy governance.
2. Employees, who are entitled to a fair work environment and clear procedure
3. Business partners and suppliers, who expect cooperation based on transparency and equality.
4. Consumers and users, who have the right to quality products and access to reporting media.
5. Regulators, who are tasked with ensuring compliance with industry policies to maintain the stability of the business sector.

To realize this principle, the Company implements Good Corporate Governance (GCG) by prioritizing information disclosure, responsibility, and an effective monitoring system. With this approach, it is hoped that all parties will receive fair benefits in a business ecosystem that is healthy and has integrity.



Uji Tuntas/*Due Diligence* Kegiatan Perusahaan dan Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan [OJK E.5]

LRT Jakarta berkomitmen untuk mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam setiap aspek operasionalnya. Program TJSL dirancang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui pendekatan yang selaras dengan strategi bisnis, LRT Jakarta memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan berdampak nyata serta berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen ini, LRT Jakarta menerapkan uji tuntas (*due diligence*) guna menilai dan mengelola potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kegiatan usaha. Proses ini dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai sektor dalam rantai bisnis untuk mengidentifikasi manfaat, memitigasi risiko, serta menentukan prioritas wilayah yang paling terdampak. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap program TJSL tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan usaha.

Dalam pelaksanaannya, program TJSL LRT Jakarta mengacu pada prinsip *Triple Bottom Line*, yang menekankan keseimbangan antara aspek *Profit*, *People*, dan *Planet*. Perusahaan berupaya menjaga stabilitas keuangan (*Profit*), berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (*People*), serta menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (*Planet*). Dengan mengadopsi prinsip ini, LRT Jakarta tidak hanya berfokus pada pencapaian target bisnis, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar dan memastikan kelangsungan ekosistem bagi generasi mendatang.

Permasalahan Terhadap Penerapan Keberlanjutan

Dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, LRT menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola secara strategis. Dari sisi ekonomi, biaya pembangunan, operasional, dan perawatan yang tinggi menjadi tantangan utama. LRT harus memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi. Selain itu, keberlanjutan finansial jangka panjang perlu diperhitungkan agar operasional tidak bergantung sepenuhnya pada subsidi pemerintah.

Di sisi lingkungan, meskipun LRT dianggap sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan pribadi, tantangan tetap ada. Penggunaan energi listrik masih bergantung pada sumber daya fosil di beberapa wilayah, sehingga transisi ke sumber energi yang lebih bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, pengelolaan limbah dari operasional dan pemeliharaan juga harus dilakukan

Due Diligence on the Company's Activities and its Social, Economic and Environmental Impacts [OJK E.5]

LRT Jakarta is committed to integrating Social and Environmental Responsibility (TJSL) into every aspect of its operations. The TJSL program is designed not only to support the Company's growth, but also to make a positive contribution to the community and the environment. Through an approach that is aligned with business strategy, LRT Jakarta ensures that every initiative has concrete and sustainable impacts.

As part of this commitment, LRT Jakarta implements due diligence to assess and manage the potential social, economic, and environmental impacts of every business activity. This process is carried out thoroughly and involves various sectors in the business chain to identify benefits, mitigate risks, and determine the priorities of the most impacted areas. With this approach, the Company can ensure that each TJSL program not only provides added value for stakeholders, but also contributes to the balance of the ecosystem and business sustainability.

The implementation of LRT Jakarta's TJSL program refers to the Triple Bottom Line principle, which emphasizes the balance between Profit, People, and Planet. The Company strives to maintain financial stability (Profit), contribute to the welfare of the community (People), and implement environmentally responsible business practices (Planet). By adopting this principle, LRT Jakarta not only focuses on achieving business targets, but also builds harmonious relationships with the surrounding community and ensures the sustainability of the ecosystem for future generations.

Issues in the Implementation of Sustainability

In implementing the principles of sustainability, LRT encounters various challenges that need to be managed strategically. In terms of economics, high construction, operational, and maintenance costs are the main challenges. LRT must ensure that its services remain affordable for the community without compromising quality and efficiency. In addition, long-term financial sustainability needs to be considered so that its operations do not depend entirely on government subsidies.

In terms of the environment, although LRT is considered a more environmentally friendly mode of transportation than private vehicles, challenges remain. The use of electrical energy still depends on fossil resources in some areas, making the transition to cleaner energy sources a matter of concern. Furthermore, waste management from operations and maintenance must also be carried out properly so as not

dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Dari aspek sosial, mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih memilih transportasi publik masih menjadi pekerjaan besar. Konektivitas dengan moda transportasi lain, kenyamanan fasilitas, serta ketepatan waktu operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi hijau menuntut LRT untuk terus berinovasi agar dapat mencapai standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi yang menyeluruh serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah yang tepat, LRT dapat terus berkembang sebagai sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

to cause negative impacts on the surrounding environment.

From a social aspect, changing people's preferences to public transportation remains a major challenge. Connectivity with other modes of transportation, comfort of facilities, and operational punctuality are important factors in increasing public interest. In addition, compliance with regulations and adaptation to the development of green technology requires LRT to continue to innovate in order to achieve higher sustainability standards.

Overcoming these challenges requires a comprehensive strategy and cooperation with various stakeholders. With the right approach, LRT can continue to develop as a more sustainable and efficient transportation system that positively impact the society and the environment.

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1]

Activities to Build a Culture of Sustainability [OJK F.1]

LRT Jakarta berkomitmen untuk membangun budaya keberlanjutan yang menyatu dalam setiap aspek operasional dan manajemen perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang menitikberatkan pada efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penerapan tata kelola yang baik. Nilai-nilai keberlanjutan ini juga selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan serta pengambilan keputusan. Dengan memastikan bahwa aspek keberlanjutan dikelola secara profesional dan etis, LRT Jakarta berupaya menciptakan ekosistem transportasi yang lebih hijau, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, LRT Jakarta secara aktif mengedukasi karyawan dan pemangku kepentingan melalui kampanye internal, pelatihan, serta sosialisasi tentang praktik ramah lingkungan. Berbagai kebijakan juga diterapkan, seperti efisiensi energi dan air, pengurangan limbah, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam operasionalnya. Pendekatan ini sejalan dengan kode etik perusahaan, yang mengatur standar perilaku dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta etika dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mitra kerja. Dengan membangun kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen perusahaan, LRT Jakarta memastikan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga bagian dari budaya kerja sehari-hari yang terus berkembang dan diperkuat.

LRT Jakarta is committed to develop a culture of sustainability that is integrated into every aspect of the Company's operations and management. This commitment is realized through various initiatives that focus on resource efficiency, reducing environmental impact, improving social welfare, and implementing good governance. These sustainability values are also in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG), which emphasizes transparency, accountability, and responsibility in every policy and decision making. By ensuring that sustainability aspects are managed professionally and ethically, LRT Jakarta strives to create a greener, more inclusive, and competitive transportation ecosystem.

To realize this, LRT Jakarta actively educates employees and stakeholders through internal campaigns, training, and socialization on environmentally friendly practices. Various policies are also implemented, including energy and water efficiency, waste reduction, and the use of environmentally friendly technologies in operations. This approach is in line with the Company's code of conduct, which regulates the behavioral standards in supporting responsible business practices, compliance with environmental regulations, and ethics in interacting with the community and business partners. By building awareness and involving all elements of the Company, LRT Jakarta ensures that sustainability is not only a goal, but also part of a daily work culture that continues to evolve and strengthen.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Related to Fair Operations

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan, Perusahaan terus mengedepankan operasional yang bertanggung jawab, tidak hanya untuk menjaga stabilitas bisnis tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan prinsip tata kelola yang baik, Perusahaan dapat berkontribusi pada ekosistem bisnis yang lebih transparan, adil, dan berdaya saing. Pendekatan ini juga mendorong praktik usaha yang lebih inklusif sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat yang proporsional.

Komitmen dan Kebijakan

Komitmen kami untuk menciptakan kegiatan usaha yang adil bagi semua pihak mencakup penerapan praktik bisnis yang bersih dari korupsi dan suap, menjaga netralitas dalam isu politik, serta memastikan kesetaraan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial, Perusahaan berupaya menciptakan hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis, karyawan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kesetaraan dan transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan, mendorong kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Dalam rangka memperkuat tata kelola yang baik, Perusahaan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), yang memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran etika dan benturan kepentingan. Selain itu, berbagai pedoman internal, seperti kode etik dan kebijakan perusahaan, dikembangkan untuk memastikan setiap keputusan bisnis sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Penguatan regulasi internal ini bertujuan untuk mencegah praktik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Hal ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta persaingan usaha yang sehat. Dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur operasional berlandaskan regulasi nasional maupun internasional, Perusahaan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab.

Perusahaan berkomitmen menerapkan operasi yang adil dengan menetapkan standar etika bagi seluruh pegawai. Kode etik ini menjadi pedoman dalam menjaga integritas serta mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip bisnis yang transparan.

Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan memetakan dampak dari berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mengidentifikasi risiko serta memastikan kebijakan yang

As part of its sustainability efforts, the Company always prioritizes responsible operations, not only to maintain business stability but also to have a positive impact on the environment and society. With the principle of good governance, the Company can contribute to a more transparent, fair, and competitive business ecosystem. This approach also encourages more inclusive business practices so that all stakeholders receive proportional benefits.

Commitment and Policy

Our commitment to creating fair business activities for all parties encompasses the implementation of business practices that are free from corruption and bribery, maintaining neutrality in political issues, and ensuring equality for all stakeholders. By upholding ethics and social responsibility, the Company strives to create harmonious relationships with business partners, employees, the community, and other related parties. Equality and transparency are the main principles in every policy, which encourages public trust in the Company.

In order to strengthen good governance, the Company implements a whistleblowing system, which enables early detection of ethical violations and conflicts of interest. In addition, the Company has also developed various internal guidelines, such as codes of conduct and company policies to ensure that every business decision is in line with the principles of fairness and legal compliance. The reinforcement of internal regulations aims to prevent practices that can harm the Company or other stakeholders.

The Company is committed to conducting business activities by upholding the principles of fairness, transparency, and integrity. This commitment is realized through compliance with laws and regulations, respect for intellectual property rights, and fair business competition. By ensuring that all operational policies and procedures are based on national and international regulations, the Company creates a fair and responsible business environment.

The Company is committed to implementing fair operations by establishing ethical standards for all employees. This code of conduct serves as a guideline to maintain integrity and prevent practices that contradict transparent business principles.

In addition, the Company continuously maps the impact of various social, economic, and environmental issues to identify risks and ensure fair policies. The success of the CSR program

adil. Keberhasilan program TJSL dalam aspek ini bergantung pada kepatuhan dan komitmen seluruh karyawan dalam menjalankan prinsip etika yang telah ditetapkan.

Sebagai wujud komitmen terhadap Operasi yang Adil, Perusahaan terus memperkuat prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Fokus utama penerapannya adalah menjaga kepatuhan hukum serta mendorong pertumbuhan bersama. Untuk itu, Perusahaan menetapkan sasaran dan kebijakan yang dievaluasi setiap tahun. setiap tahun.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh insan Perusahaan diwajibkan menghindari benturan kepentingan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi di luar penghasilan yang sah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penerimaan gratifikasi dari mitra usaha atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas juga tidak diperbolehkan.

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Perusahaan mengatur pengelolaan bisnis dengan berbagai pedoman, termasuk Anggaran Dasar, Kode Etik, dan kebijakan operasional lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan sebagai wadah bagi pemegang saham dalam menentukan keputusan strategis. Tata kelola organisasi pun disusun agar selaras dengan regulasi dan iklim usaha yang berlaku, dengan dukungan organ pengawasan yang memastikan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan penerapan GCG yang konsisten, Perusahaan berupaya menciptakan operasi yang adil serta menjaga keberlanjutan bisnis yang sehat dan transparan.

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan

Perusahaan menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang diterima secara independen dan rahasia melalui fungsi-fungsi terkait. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkatannya. Untuk memastikan keamanan pelapor, identitas mereka dijaga kerahasiaannya, sementara setiap laporan yang masuk akan ditelusuri berdasarkan fakta material yang terjadi.

Sebagai upaya menjaga kelancaran kebijakan dan meminimalkan potensi konflik dalam kegiatan operasi yang adil, Perusahaan menyediakan sarana bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, pendapat, maupun pengaduan. Mekanisme ini dirancang agar terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

in this aspect depends on the compliance and commitment of all employees in implementing established ethical principles.

As a form of commitment to Fair Operations, the Company continues to strengthen the principles of Good Corporate Governance (GCG) to ensure compliance with regulations and stakeholder involvement. The main focus of its implementation is to maintain legal compliance and encourage mutual growth. Therefore, the Company establishes goals and policies that are evaluated annually.

Implemented Programs and Activities

The Company is committed to ensuring fair and equal treatment for all stakeholders in accordance with applicable regulations. All Company personnel are required to avoid conflicts of interest and are prohibited from taking personal advantage beyond legal income, either directly or indirectly. In addition, the receipt of gratification from business partners or other parties that may affect independence in carrying out duties is also not allowed.

As part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Company regulates business management through various guidelines, including the Articles of Association, Code of Conduct, and other operational policies. The General Meeting of Shareholders (GMS) is held as a forum for shareholders to determine strategic decisions. Organizational governance is also formulated to be in line with applicable regulations and the business climate, with the support of supervisory organs that ensure effective performance of the Board of Commissioners and Board of Directors. With the consistent implementation of GCG, the Company strives to create fair operations and maintain healthy and transparent business sustainability.

Complaint Handling Mechanism

The Company follows up on every complaint received independently and confidentially through related functions. If a violation is found, sanctions will be given according to the severity of the violation. To ensure the safety of the whistleblower, their identity is kept confidential, while every incoming report will be investigated based on the material facts that occurred.

In an effort to maintain the effectiveness of policies and minimize potential conflicts in fair operation activities, the Company provides a mechanism for stakeholders to submit suggestions, opinions, and complaints. This mechanism is designed to be open and accessible to all interested parties.



Evaluasi Kinerja

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam praktik operasi yang adil, Perusahaan berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nilai ekonomi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai kontribusi kepada negara, tetapi juga didistribusikan dalam berbagai program sosial. Perusahaan menjalankan inisiatif yang mendukung kesejahteraan komunitas sekitar wilayah operasional, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelaksanaan program lingkungan berkelanjutan. Dengan berbagai upaya ini, Perusahaan memastikan bahwa operasinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat yang luas bagi para pemangku kepentingan.

Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan *Code of Conduct* guna memastikan praktik operasi yang adil berjalan secara konsisten. Sepanjang tahun 2024, tidak ditemukan indikasi kasus korupsi maupun suap yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, ataupun karyawan. Perusahaan juga menjaga netralitas politik dengan memastikan bahwa seluruh pegawai tidak terlibat aktif dalam kegiatan partai politik, baik langsung maupun tidak langsung. Penerapan kebijakan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, etis, dan berintegritas.

Performance Evaluation

As part of its social responsibility in fair operating practices, the Company strives to make a positive impact on both the community and the environment. The resulting economic value is not only used to fulfill tax obligations as a contribution to the state, but is also distributed across various social programs. The Company carries out initiatives that support the welfare of the communities around its operational areas, such as the empowerment of the local economy, improvement of the quality of education, and the implementation of sustainable environmental programs. With these efforts, the Company ensures that its operations are not only oriented towards business growth, but also create extensive benefits for its stakeholders.

The Company implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct to ensure that fair operating practices are consistently carried out. Throughout 2024, there were no indications of corruption or bribery cases involving the Board of Commissioners, Board of Directors, or employees. The Company also maintains political neutrality by ensuring that all employees are not actively involved in the activities of political parties, either directly or indirectly. The implementation of this policy reflects the Company's commitment to creating a transparent, ethical, and trustworthy business environment.



Tanggung Jawab Sosial terkait Hak Asasi Manusia

Social Responsibility Related to Human Rights

LRT meletakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi untuk menciptakan bisnis yang adil dan inklusif. Membangun lingkungan kerja dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM akan mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Komitmen dan Kebijakan

Dalam operasionalnya, Perusahaan mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam berbagai aspek bisnis. Penerapan TJSL di bidang HAM difokuskan pada pemenuhan hak bagi karyawan, pemasok, distributor, konsumen, serta masyarakat sekitar area usaha dan proyek. Seluruh pemangku kepentingan ini memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas bisnis LRT Jakarta, sehingga Perusahaan berupaya memastikan praktik operasional yang menghormati dan melindungi hak-hak mereka.

Perusahaan berkomitmen menjunjung tinggi HAM dalam seluruh aspek operasional dan lingkungan kerja dengan menerapkan prinsip penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan yang sesuai dengan regulasi. Komitmen ini diwujudkan melalui pencegahan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja yang adil, serta keleluasaan bagi karyawan dalam beribadah maupun memperoleh izin dalam kondisi darurat.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Perusahaan menjamin hak-hak ketenagakerjaan bagi setiap karyawan, termasuk perlakuan setara tanpa diskriminasi, pengakuan atas hak cuti tahunan, izin beribadah, serta waktu istirahat bagi ibu melahirkan, keguguran, atau haid. Selain itu, perusahaan juga memastikan hubungan industrial yang adil serta memberikan jaminan kesehatan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menegakkan prinsip HAM di lingkungan kerja.

Sebagai dukungan terhadap hak tenaga kerja, Perusahaan menyediakan ruang laktasi, mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor, serta kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan bagi pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan langkah ini, Perusahaan memastikan HAM menjadi bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

LRT places Human Rights as the foundation of a fair and inclusive business. The establishment of a work environment that respects and upholds human rights values will encourage sustainable business growth.

Commitment and Policy

In its operations, the Company integrates the principles of Human Rights into various business aspects. The implementation of TJSL in the field of human rights is focused on fulfilling the rights of employees, suppliers, distributors, consumers, and the communities around business areas and projects. All of these stakeholders have a direct connection to LRT Jakarta's business activities, hence the Company strives to ensure operational practices that respect and protect their rights.

The Company is committed to upholding human rights in all aspects of operations and the work environment by applying the principles of respect, protection, and fulfillment in accordance with regulations. This commitment is realized through the prevention of discrimination, freedom of association, fair working hours, and flexibility for employees to worship or request permission in emergency conditions.

Implemented Programs and Activities

The Company guarantees employment rights for every employee, including equal treatment without discrimination, recognition of the right to annual leave, permission to worship, and rest time for women during childbirth, miscarriage, or menstruation. In addition, the Company also ensures fair industrial relations and provides health insurance to create a safe and productive work environment. This commitment is part of the Company's social responsibility in upholding human rights principles in the work environment.

As a support for labor rights, the Company provides lactation rooms, a reporting mechanism that guarantees the confidentiality of the reporter, as well as a policy of gender equality and protection for vulnerable workers, including persons with disabilities. With this approach, the Company ensures that human rights are part of sustainable and responsible business practices.



Mekanisme dan Penanganan Pengaduan

Setiap keluhan atau pengaduan terkait HAM yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur internal Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara objektif dan transparan guna menjaga keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari komitmen ini, Perusahaan juga menyediakan mekanisme pengaduan yang terbuka, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyampaikan permasalahan terkait HAM, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir dan kebijakan yang diterapkan berjalan secara efektif.

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait insiden pelanggaran HAM.

Evaluasi Kinerja

LRT menilai bahwa kebijakan terkait HAM telah diterapkan dengan baik dengan mengedepankan etika bisnis dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Perusahaan menitikberatkan penerapan prinsip HAM pada dua aspek utama, yaitu etika bisnis dan etika kerja. Dalam menjalankan operasionalnya, LRT Jakarta senantiasa berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga isu-isu seperti pembebasan lahan, kebisingan, dan gangguan selama proyek pembangunan menjadi perhatian utama. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perusahaan terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas mereka. Berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dalam operasionalnya, termasuk mendorong keterlibatan karyawan dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan menghormati hak setiap individu. Di samping itu, Perusahaan juga menjamin perlindungan hak konsumen dan masyarakat dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang terbuka dan responsif, di mana setiap keluhan akan ditindaklanjuti secara objektif tanpa perlakuan yang diskriminatif.

Selama tahun 2024, tidak ditemukan laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan kerja, seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan bersekutu, atau praktik kerja paksa.

Complaint Mechanism and Management

Every incoming complaint or grievance related to human rights will be followed up in accordance with the provisions of the law and the Company's internal procedures. The Company ensures that every report is handled objectively and transparently to maintain fairness for all stakeholders. As part of this commitment, the Company also provides an open complaint mechanism, enabling stakeholders to raise human rights issues, so that potential conflicts can be minimized and the policies implemented can run effectively.

Throughout 2024, the Company did not receive any complaints regarding human rights violations.

Performance Evaluation

LRT considers that its human rights policy has been properly implemented by prioritizing business ethics and compliance with applicable laws. The Company emphasizes the application of human rights principles in two main aspects, which are the business ethics and work ethics. In carrying out its operations, LRT Jakarta always interacts directly with the community, meaning that issues such as land acquisition, noise, and disturbances during the construction project are major concerns. In addition, the Company is also committed to ensuring the fulfillment of labor rights by creating a fair and equitable work environment that complies with applicable regulations.

The Company strives to create a work environment that supports the welfare of employees and improves their effectiveness and productivity. Various steps have been taken to ensure the fulfillment of human rights in its operations, such as encouraging employee involvement in the development of an inclusive work culture that respects the rights of every individual. Furthermore, the Company guarantees the protection of consumer and community rights by providing an open and responsive complaint mechanism, in which every complaint will be followed up objectively without discrimination.

Throughout 2024, there were no reports of human rights violations in the workplace, including discrimination, restrictions on freedom of association, or forced labor.

Kinerja Ekonomi [OJK F.2]

Economic Performance [OJK F.2]

Keberlanjutan operasional LRT tidak terlepas dari pengelolaan ekonomi yang stabil dan efisien. Sebagai sistem transportasi publik yang membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur serta biaya operasional yang berkelanjutan, Perusahaan harus memastikan bahwa kinerja ekonominya tetap sehat agar dapat terus memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan yang efektif, efisiensi dalam pengeluaran, serta strategi pembiayaan yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan finansial.

Dengan kinerja ekonomi yang baik, LRT dapat terus berinovasi, memperluas layanan, serta menjaga keterjangkauan tarif tanpa mengorbankan kualitas dan keandalannya. Stabilitas ekonomi ini juga berperan dalam menciptakan model bisnis yang lebih tangguh terhadap tantangan eksternal, seperti fluktuasi biaya energi atau perubahan kebijakan transportasi. Oleh karena itu, keberlanjutan ekonomi LRT harus didukung oleh perencanaan keuangan yang matang serta strategi jangka panjang yang memastikan bahwa layanan transportasi ini tetap dapat diakses dan diandalkan oleh masyarakat di masa mendatang.

Komitmen dan Kebijakan

Di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, Perusahaan terus merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk merespons kebutuhan pelanggan serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui inovasi dan efisiensi operasional, Perusahaan berhasil mencatat kinerja ekonomi sebesar Rp265,23 miliar atau 2,35%. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan ketahanan dan daya saing perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, serta masyarakat luas. Dengan pendekatan bisnis yang inovatif dan bertanggung jawab, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan profitabilitas yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, memastikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara jangka panjang.

Strategi Pencapaian Target Kinerja Ekonomi

Di tahun 2024, Perusahaan fokus pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui program-program strategis, yaitu:

1. Pemenuhan *Service & Operation Excellence*.
Perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang optimal dan melakukan kegiatan operasional serta perawatan sesuai rencana untuk memastikan LRT Jakarta dapat beroperasi secara optimal.

LRT's operational sustainability is inseparable from stable and efficient economic management. As a public transportation system that requires large investments in infrastructure development and ongoing operational costs, the Company must ensure that its economic performance remains healthy in order to continue providing optimal services to the community. Effective revenue management, efficiency in spending, and a sustainable financing strategy are the main factors in maintaining financial balance.

With good economic performance, LRT can continue to innovate, expand services, and maintain affordable fares without compromising quality and reliability. This economic stability also contributes to creating a business model that is more resilient to external challenges, such as fluctuations in energy costs or changes in transportation policies. Therefore, the economic sustainability of LRT must be supported by sound financial planning and long-term strategies in order to ensure that the transportation service remains accessible and reliable for the community in the future.

Commitments and Policies

Amidst the increasingly competitive market dynamics, the Company continues to formulate and implement effective strategies to respond to customer needs and ensure sustainable growth. Through innovation and operational efficiency, the Company managed to record an economic performance of Rp265.23 billion or 2.35%. This achievement not only reflects the Company's resilience and competitiveness, but also provides significant added value for all stakeholders, including employees, shareholders, business partners, and the wider community. With an innovative and responsible business approach, the Company is committed to maintaining profitability in line with the principles of sustainability, ensuring a positive contribution to long-term economic, social, and environmental growth.

Strategy to Achieve Economic Performance Targets

In 2024, the Company focuses on sustainable corporate growth through strategic programs, including:

1. Fulfilment of *Service & Operation Excellence*.
The Company is committed to providing optimal customer service and carrying out operational and maintenance activities according to plan in order to ensure that LRT Jakarta can operate optimally.



2. Strategi Peningkatan *Ridership*.

Perusahaan akan melaksanakan program yang membuat masyarakat nyaman berkendara umum. Antara lain:

- Integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi di Jakarta.
- Revitalisasi area stasiun LRT Jakarta.
- Pemanfaatan area depo untuk kegiatan komunitas.
- Program edukasi dan aktivasi di area stasiun maupun depo LRT Jakarta.
- Penyusunan *Calendar of Event* LRT Jakarta tahun 2024.
- Meningkatkan *brand awareness* LRT Jakarta bagi masyarakat Jakarta.
- Sinergi program promosi dan event LRT Jakarta dengan JakPro Group maupun para pemangku kepentingan lainnya.

3. Strategi Peningkatan Bisnis *Non-Farebox*

Perusahaan akan mengoptimalkan kembali bisnis *non-farebox* sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pendapatan dan laba perusahaan. Kegiatan ini akan difokuskan pada aspek periklanan, jasa teknis dan konsultasi, retail dan penyewaan, *event & activation*, serta telekomunikasi.

Informasi detail terkait kinerja usaha Perseroan dapat di lihat di bagian Analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dalam laporan ini.

2. Ridership Improvement Strategy.

The Company will implement programs that provide comfortable public transportation for the public. Including:

- Physical integration and payment of modes of transportation in Jakarta.
- Revitalization of LRT Jakarta's station areas.
- Utilization of depot areas for community activities.
- Educational and activation programs in LRT Jakarta's station and depot areas.
- Preparation of the 2024 LRT Jakarta Calendar of Events.
- Increasing LRT Jakarta brand awareness among the people of Jakarta.
- Synergy of LRT Jakarta promotion programs and events with the JakPro Group and other stakeholders.

3. Non-Farebox Business Improvement Strategy

The Company will re-optimize the non-farebox business so that it can contribute positively to the Company's revenue and profit. This activity will focus on advertising, technical and consulting services, retail and leasing, events & activation, and telecommunications.

Detailed information regarding the Company's business performance can be seen in the Management Analysis and Discussion of Company Performance section of this report.

(Dalam miliar rupiah) (in billion Rupiah)

Tahun Year	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Comparison of Revenue Target and Realization		Perbandingan Target dan Realisasi Laba Komprehensif Comparison of Comprehensive Profit Target and Realization	
	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
2022	257,7	214,7	14,8	8,5
2023	208,4	271,6	10,2	15,5
2024	265,7	265,2	2,4	5,6

Perseroan tidak memiliki target atau portofolio terkait pembiayaan, atau Investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan. [OJK F.3]

Rantai Pasokan

Dalam memilih pemasok, Perusahaan menerapkan standar keberlanjutan yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, serta transparansi dan etika bisnis yang tinggi. Inisiatif ini selaras dengan komitmen Perusahaan dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab serta menciptakan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company has no targets or portfolios related to financing, or investment in financial instruments or projects that are in line with sustainable finance. [OJK F.3]

Supply Chain

In selecting suppliers, the Company applies sustainability standards that cover compliance with environmental and social regulations, responsible use of raw materials, and a high level of transparency and business ethics. This initiative is in line with the Company's commitment to conducting responsible business and creating a positive impact for all stakeholders.

Melibatkan pemasok lokal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon, meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui strategi ini, Perusahaan tidak hanya memperkuat rantai pasok yang tangguh, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

The involvement of local suppliers as part of a sustainability strategy has contributed to reducing the carbon footprint, increasing local economic independence, and improving operational efficiency. Through this strategy, the Company not only strengthens its supply chain, but also makes a real contribution to sustainable economic and social growth.

Proporsi Jumlah Pemasok Berdasarkan Asalnya

Proportion of Suppliers by Origin

Keterangan Description	2022	2023	2024
Pemasok Luar Negeri Foreign Suppliers	3%	4%	4%
Pemasok Dalam Negeri (Lokal) Local Suppliers	97%	96%	96%
Total	100%	100%	100%

Proporsi Jumlah Pemasok Berdasarkan Pembelian

Proportion of Suppliers by Purchase

Keterangan Description	2022	2023	2024
Pemasok Luar Negeri Foreign Suppliers	9%	7%	9%
Pemasok Dalam Negeri (Lokal) Local Suppliers	91%	93%	91%
Total	100%	100%	100%





Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Keberlanjutan operasional LRT tidak hanya bergantung pada efisiensi layanan dan aspek ekonomi, tetapi juga pada dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan, LRT beroperasi dalam ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya agar tetap memberikan manfaat jangka panjang. Perubahan lingkungan, seperti peningkatan polusi udara, pemanasan global, dan keterbatasan sumber daya energi, menjadikan perhatian terhadap aspek lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam pengelolaan transportasi modern.

Tanpa strategi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, operasional LRT berisiko menimbulkan beban ekologis yang dapat memengaruhi keberlanjutan layanan di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengoperasian LRT harus selaras dengan keseimbangan ekosistem serta tata ruang kota agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan juga menjadi bagian dari komitmen LRT sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan. Dengan memastikan kinerja lingkungan yang baik, LRT tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi dampak ekologis jangka pendek, tetapi juga mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan visi pembangunan kota yang lebih hijau di masa depan.

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan secara rutin mengevaluasi kebijakan pelestarian lingkungan melalui proses identifikasi, pengendalian, serta pengurangan atau peniadaan penggunaan bahan dan peralatan yang berpotensi merusak lingkungan. Langkah ini dilakukan dengan kesadaran bahwa lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yang terus diupayakan. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya pencegahan pencemaran serta pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Perusahaan terus memperbarui dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha serta menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat sekitar, Perusahaan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Komitmen ini diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap setiap aspek

The sustainability of LRT operations not only depends on service efficiency and economic aspects, but also on its environmental impact. As part of the urban transportation system, LRT operates in an ecosystem where balance must be maintained to ensure long-term benefits. Environmental changes, such as increased air pollution, global warming, and limited energy resources, highlight the importance of environmental aspects in the management of modern transportation.

Without a strategy that considers the environmental impact, LRT operations are at risk of causing an ecological burden that can affect the sustainability of services in the future. Therefore, the construction and operation of LRT must be in harmony with the balance of the ecosystem and urban planning so as not to cause negative impacts on the surrounding environment. Compliance with environmental regulations is also part of LRT's commitment as an environmentally friendly mode of transportation. By ensuring good environmental performance, LRT not only contributes to reducing short-term ecological impacts, but also supports a more sustainable transportation system that is in line with the vision of a greener city in the future.

Commitments and Policies

The Company routinely evaluates environmental conservation policies through the identification, control, and reduction or removal of the use of materials and equipment that have the potential to damage the environment. This initiative is carried out with the awareness that the environment is a major factor in the sustainable development that is constantly being pursued. Therefore, the balance of the ecosystem is a major concern in every business and operational activity, where the principle of prudence is implemented to reduce negative impacts on the environment. This commitment is realized through pollution prevention and environmental preservation efforts as part of the Company's social responsibility.

As a form of this commitment, the Company continues to update and improve its environmental management system. This effort not only aims to strengthen environmental management, but also provides added value for business sustainability and demonstrates a real contribution in supporting sustainable development.

To maintain the balance of the environment and the welfare of employees and the surrounding community, the Company applies the principles of responsible environmental management. This commitment is realized through continuous planning, implementation, and supervision of every aspect of

operasional guna meminimalisir potensi dampak negatif yang mungkin timbul.

Perusahaan menyeleksi sejumlah mitra, seperti pemasok, vendor, ataupun penyuplai dengan mempertimbangkan kualitas material yang diperlukan sekaligus dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.

Perusahaan melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Program ini bertujuan menjaga dan memelihara kualitas lingkungan operasional dan perawatan LRT Jakarta.

Biaya Lingkungan Hidup [OJK F.4]

Per 31 Desember 2024, Perusahaan telah merealisasikan total biaya dalam menjalankan komitmen perusahaan terkait pelestarian lingkungan hidup sebesar Rp399.050.322.

Kegiatan Activity	Pengeluaran Expenses	Keterangan Description
Penggantian Lampu Hemat Energi Switching to Energy-Saving Lamps	Rp305.165.404	Penggantian Lampu Mercury 400W dengan Lampu <i>High Bay LED</i> 150W di area depo <i>maintenance</i> , area gedung MCC dan Masjid Raudhatul Jannah. Replacement of 400W Mercury Lamps with 150W LED High Bay Lamps in the maintenance depot area, MCC building area and Raudhatul Jannah Mosque
Pembelian Tanaman dan <i>Urban Farming</i> Purchasing Plants and Urban Farming	Rp93.884.918	Pembelian tanaman di kawasan Kantor LRT Jakarta dan penanaman bibit sayuran dan ikan. Purchase of plants in LRT Jakarta Office area and planting vegetables and growing fish.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [OJK F.5]

Penyediaan fasilitas *water station* atau pengisian air minum di stasiun-stasiun LRT, yang mendorong pengguna untuk membawa botol minum pribadi. Dengan begitu akan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dan sampah plastik.

Penggunaan Kertas

Dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam berbagai proses operasional, perusahaan berupaya mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sehingga konsumsi kertas dapat ditekan secara signifikan. Selain mengurangi dampak

operations to minimize the potential negative impacts that may arise.

The Company selects a number of partners, including suppliers and vendors, by considering the quality of the materials required as well as the impact they may have on the environment.

The Company implements the Environmental Monitoring Plan (RPL) and Environmental Management Plan (RKL) on operating toll roads in accordance with the Decree of the Minister of Environment No. 45 of 2005 concerning Guidelines for the Preparation of Reports on the Implementation of Environmental Monitoring Plans (RPL) and Environmental Management Plans (RKL) as well as Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits. This program aims to maintain and preserve the quality of the operational environment and maintenance of the Jakarta LRT.

Environmental Expenses [OJK F.4]

As of December 31, 2024, the Company has incurred a total of Rp399,050,322 to carry out its commitment to environmental conservation.

Use of Environmentally Friendly Materials [OJK F.5]

The provision of water stations or drinking water refill facilities at LRT stations encourages users to bring their own drinking bottles. This will reduce the use of disposable plastic bottles and plastic waste.

Paper Usage

By implementing a digitalization system in various operational processes, the Company strives to reduce its reliance on physical documents so that paper consumption can be significantly reduced. Besides reducing the environmental



lingkungan akibat produksi dan pembuangan kertas, langkah ini juga mendukung efisiensi operasional serta meningkatkan efektivitas kerja melalui sistem yang lebih terintegrasi. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih modern dan berkelanjutan. Adapun volume penggunaan material kertas dalam kegiatan operasional selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan Description	2023	2024	Naik/Turun (%) Increase/Decrease (%)
Volume (Rim) Volume (Ream)	308	263	(14,61%)
Nilai (Rp) Value (Rp)	14.712.500	12.155.000	(17,38%)

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [OJK F.6]

Selain itu, Perusahaan mengoptimalkan dan menjaga efisiensi pemakaian listrik untuk seluruh kegiatan operasional. Perusahaan menggunakan listrik yang dibeli dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk kegiatan operasional kantor. Untuk menghitung jumlah konsumsi energi listrik total, Perusahaan melakukan konversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam (kWh) penggunaan.

impact of paper production and disposal, this initiative also supports operational efficiency and improves operational effectiveness through a more integrated system. This initiative not only contributes to environmental preservation, but also creates a more modern and sustainable work culture. The volume of paper used in operational activities over the past two years is as follows:

Amount and Intensity of Energy Used [OJK F.6]

In addition, the Company optimizes and maintains the efficiency of electricity usage in all operational activities. The Company uses electricity purchased from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN for office operations. To calculate the total amount of electricity consumption, the Company converts the total cost of electricity usage from PLN to the average number of kilowatt hours (kWh) used.

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Pemakaian BBM Fuel Usage	Rupiah (juta) Rupiah (million)	27,37	19,13	25,06
	Liter	1.976	1.935	2.271
	Giga joule	71,16	69,68	81,78
Pemakaian Listrik Electricity Usage	Rupiah (juta) Rupiah (million)	18.225,48	17.242,90	17.240,54
	KwH	10.379.218	9.770.954	9.231.350
	Giga joule	37.365,18	35.175,43	33.232,86
Total Energi Total Energy	Giga joule	37.436,34	35.245,12	33.314,64

Perbandingan Penggunaan Listrik Tahun 2023-2024 Comparison of Electricity Usage in 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan(%) Increase (%)
Penggunaan (kWh) Usage (kWh)	10.379.218	9.770.954	6,22%
Nilai (Rp) Value (Rp)	18.225.488.262	17.242.903.839	5,69%

Agar penggunaan BBM di seluruh kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan lulus uji emisi, Perusahaan mempertimbangkan kelayakan kendaraan. Upaya efisiensi penggunaan BBM dapat dilihat sebagai berikut:

To ensure that fuel consumption in all operational vehicles complies with emission test requirements, the Company considers the feasibility of the vehicle. Efforts to improve fuel efficiency can be seen below:

Perbandingan Konsumsi BBM Tahun 2023-2024 Comparison of Fuel Consumption in 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan(%) Increase (%)
Volume (Liter)	1.976	1.935	2,11%
Nilai (Rp) Value (Rp)	27.375.000	19.133.873,7	43,07%

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [OJK F.7]

Selain itu, gedung kantor Divisi LRT Jakarta di area Depo mengusung konsep *Green and Smart Building*. Yaitu bangunan dengan penerapan efisiensi energi, air, dan material yang berstandar ramah lingkungan dan telah mendapat sertifikasi *Excellent in Design for Greater Efficiencies*. Panel surya yang dipasang di atap Gedung Kantor (60KWP) dan Klinik Mediska (33KWP) berfungsi sebagai sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menghemat penggunaan listrik, masing-masing mencapai 15% untuk Gedung Kantor dan 10% untuk Klinik Mediska.

Efforts and Achievements in Energy Efficiency and Use of Renewable Energy [OJK F.7]

In addition, the office building of LRT Jakarta Division in the Depot area adopts the concept of a Green and Smart Building. In other words, a building with the application of environmentally friendly standards of energy, water, and material efficiency and has received the Excellent in Design for Greater Efficiencies certification. The installation of solar panels on the roofs of the Office Building (60KWP) and Mediska Clinic (33KWP) serves as a source of renewable energy, reducing reliance on fossil fuels and saving on electricity usage by 15% for the Office Building and 10% for Mediska Clinic.

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya [OJK F.11] Amount and Intensity of Generated Emissions by Types [OJK F.11]

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Emisi Cakupan 1 Scope 1 Emissions	Ton CO2-eq	37,69	22,21	n/a
Emisi Cakupan 2 Scope 2 Emissions	Ton CO2-eq	9.029,91	8.669,67	n/a
Total Emisi Total Emissions	Ton CO2-eq	9.067,6	8.691,88	n/a
Pendapatan Revenues	Rupiah (juta) Rupiah (million)	265.229,6	271.606,4	214.704,8
Intensitas Intensity	Ton CO2-eq/Rp (juta) Ton CO2-eq/Rp (million)	0,034	0,032	n/a

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [OJK F.12]

LRT Jakarta juga menyediakan fasilitas parkir sepeda di seluruh stasiun, hal ini untuk mendukung mobilitas berkelanjutan dengan memberi alternatif transportasi ramah lingkungan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan dengan sepeda. Pada akhirnya untuk mendukung udara yang lebih bersih.

Efforts and Achievements in Reducing Emissions [OJK F.12]

LRT Jakarta also provides bicycle parking facilities at all stations, as a way to support sustainable mobility by providing environmentally friendly transportation alternatives for passengers who travel by bicycle. Ultimately, this will help to improve air quality.



Penggunaan Air [OJK F.8]

Efisiensi dan Konservasi Air

Intensitas penggunaan air di lingkungan perusahaan, baik untuk keperluan domestik maupun operasional perawatan, dilakukan dengan efektif dan efisien. Agar tidak, akan menimbulkan kesulitan dalam menangani air limbah yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air di Perusahaan juga diperoleh dari PDAM.

Perusahaan berusaha melestarikan air tanah dan persediaan air bersih dalam kegiatan operasional sehari-hari, Antara lain dengan sosialisasi penghematan penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor serta melakukan pengecekan secara rutin terhadap instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

Pemakaian Air Water Usage	2022	2023	2024
PDAM	13.884	21.669	39.826

Pelestarian Keanekaragaman Hayati [OJK F.9]

[OJK F.10]

Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan ekosistem dengan menginisiasi program penghijauan serta penyediaan sarana kebersihan di seluruh area operasional. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penanaman pohon serta pengadaan peralatan angkut sampah guna mendukung kebersihan lingkungan. Selain itu, Perusahaan menata area hijau di sekitar kantor operasional sebagai ruang terbuka yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai area resapan air dan penyaring udara. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas udara agar tetap baik

Program Green Office

Perusahaan memiliki Program *Green Office*, Yaitu menerapkan kebijakan yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dalam kegiatan operasional. Seperti penghematan penggunaan energi listrik, air, kertas, dan hal-hal lain terkait dengan sumber daya alam. Program tersebut terbukti dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Perusahaan.

Penghijauan

Perusahaan melakukan penanaman di area kantor dan Depo dengan sebanyak 35.000 tanaman. Antara lain tumbuhan ruwilia, vidilia, pucuk merah, sablo merah, patah Tulung, srigading, anjuang, pandan Bali, ubi singapur, ketapang mini, mega mendung, bakung, soka, kamboja dan bintaro.

Water Usage [OJK F.8]

Water Efficiency and Conservation

The intensity of water usage in the Company's environment, both for domestic and maintenance operational purposes, is carried out effectively and efficiently. Otherwise, it will cause difficulties in handling wastewater which will result in a decrease in the quality and quantity of clean water. Furthermore, the Company's water needs are also supplied by the Regional Drinking Water Company (PDAM).

The Company strives to conserve groundwater and clean water supplies in its daily operations, including by raising awareness of water conservation in the office environment and routinely inspecting water installations so that leaks can be quickly identified and repaired.

Biodiversity Conservation [OJK F.9] [OJK F.10]

The Company strives to maintain the balance of the ecosystem by initiating a reforestation program and providing cleaning facilities in all operational areas. One of the concrete steps taken is tree planting and the procurement of waste transportation equipment to support environmental cleanliness. In addition, the Company arranges green areas around operational offices as open spaces that not only beautify the environment, but also function as water catchment areas and air filters. This initiative aims to create a healthier work environment while maintaining good air quality.

Green Office Program

The Company has a Green Office Program, which is a policy that makes wise use of natural resources in operational activities. This includes conserving electricity, water, paper, and other natural resources. The program has proven to provide real benefits such as reducing operational costs, increasing efficiency, and improving the Company's image.

Reforestation

The Company has planted 35,000 plants in the office and depot areas. These include ruwilia, vidilia, red shoots, red sablo, broken Tulung, srigading, anjuang, Balinese pandanus, Singapore yam, mini cataplan, mega mendung, daffodils, soka, frangipani and bintaro.

Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen

[OJK F.14]

Mengenai prosedur pengolahan limbah, Perusahaan menjalankan sesuai prosedur ramah lingkungan. Hal ini mencakup:

1. Pengelolaan Limbah Padat

Limbah Domestik dikelola oleh Dinas Lingkungan setempat dengan dokumen pengangkutan dan pembayaran retribusi daerah secara resmi dibayarkan dikelola oleh Perusahaan. Limbah domestik non LB3 yang masih dapat digunakan seperti hasil pekerjaan bubut yang masih bernilai ekonomis dikelola oleh vendor yang memiliki Izin Usaha/ Izin Lingkungan untuk pengelolaan limbah domestik ekonomis tersebut.

2. Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 (minyak pelumas, gemuk bekas, cairan accu asam sulfat, solar kedaluwarsa, oli bekas, tiner bekas, bahan pembersih dan *solvent*, bahan penghilang cat dan vernis) hasil kegiatan operasional LRT Jakarta dikelola (pengangkutan, penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan sampai kepada penimbunan) oleh vendor yang memiliki MoU kerja sama dengan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah Cair hasil kegiatan operasional LRT Jakarta berasal dari toilet, kloset dan bak cuci piring serta kegiatan pencucian kereta. Penanganan limbah cair tersebut dilakukan oleh pengelola gedung dan fasilitas Sarana Prasarana LRT Jakarta.

Pengelolaan Limbah Domestik; berasal dalam lokasi Depo LRT Pegangsaan Dua (mulai dari Gedung MCC, kantor JakPro, kantin, kantor kontraktor, timbunan sampah di dalam gedung dan seluruh stasiun yang beroperasi diserahkan Pengelolaannya kepada PT. LRT Jakarta. Pengelolaan Limbah B3; berasal dari hasil kegiatan operasional baik di Stasiun maupun di lingkungan Depo LRT Jakarta yang selanjutnya dikelola oleh vendor yang memiliki lembar kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengolahan limbah ini sesuai Surat Tugas Pelaksana Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 dari Kegiatan Operasional LRT Jakarta Nomor 015/ UT0000/118/X/2019 bahwa pengelolaan limbah meliputi limbah domestik dan limbah B3.

Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan [OJK F.13]

Total Generated Waste and Effluents [OJK F.13]

Kategori Category	Satuan Unit	2022	2023	2024
Limbah Padat yang Dihasilkan Solid Waste Generated				
Non B3	Ton	64,2	77,7	219,74
B3	Ton	0	7,93	12,05

Waste and Effluent Management Mechanism [OJK F.14]

Regarding waste processing, the Company complies with environmentally friendly procedures. This includes:

a. Solid Waste Management

Domestic Waste is managed by the local Environmental Agency with transportation documents and payment of official local retribution by the Company. Non-B3 domestic waste that can still be used, such as lathe scraps that still have economic value, is managed by vendors who have a Business License/Environmental License for the management of such economic domestic waste.

b. B3 Waste Management

B3 Waste (lubricating oil, used grease, sulfuric acid battery fluid, expired diesel, used oil, used thinner, cleaning agents and solvents, paint and varnish removers) from LRT Jakarta's operational activities is managed (transportation, storage, utilization, processing to storage) by vendors who have a cooperation MoU with the Company in accordance with laws and regulations.

c. Liquid Waste Management

Liquid waste from LRT Jakarta's operational activities comes from toilets, lavatories and sinks, as well as train washing activities. The liquid waste is handled by the manager of the LRT Jakarta building and infrastructure facilities.

Domestic Waste Management; comes from the LRT Pegangsaan Dua Depot location (starting from the MCC Building, JakPro office, canteen, contractor office, garbage piles inside the building and all stations that are operated are handed over to PT LRT Jakarta. B3 Waste Management; comes from the operational activities both at the Station and in the LRT Jakarta Depot environment, which is then managed by a vendor who has a cooperation contract in accordance with laws and regulations. This waste processing is in accordance with the Letter of Assignment for the Management of Domestic Waste and B3 Waste from LRT Jakarta Operational Activities Number 015/UT0000/118/X/2019, which states that waste management includes domestic waste and B3 waste.



Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan [OJK F.13]

Total Generated Waste and Effluents [OJK F.13]

Kategori Category	Satuan Unit	2022	2023	2024
Limbah Padat yang Dialihkan dari TPA Solid Waste Diverted from Landfills				
Non B3	Ton	0	0	0
B3	Ton	0	7,93	12,05
Limbah yang Dibuang Ke TPA Waste Disposed to Landfills				
Non B3	Ton	64,2	77,7	219,74
B3	Ton	0	0	0

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan

[OJK F.16]

Perusahaan menyediakan saluran pengaduan bagi semua pihak untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional. Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon, surat, email, atau situs web resmi Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, terdapat 0 pengaduan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan maupun kelangsungan usaha Perusahaan.

Telp : 0221 8061 7490/021- 508 999 09.
Instagram : @lrtjkt
Facebook : LRT Jakarta

Evaluasi Kinerja [OJK F.15]

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional memberikan dampak positif bagi lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya efisiensi dalam penggunaan kertas, listrik, air, dan BBM. Selain berkontribusi pada kelestarian lingkungan, kebijakan tersebut juga meningkatkan efisiensi biaya operasional.

LRT menilai kebijakan yang diambil dalam tanggung jawab lingkungan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perseroan. Sepanjang 2024 tidak terdapat tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, atau zat-zat lainnya yang dapat berpotensi memengaruhi tanah, air, udara, keragaman hayati, dan kesehatan manusia.

Complaint Mechanism and Management

[OJK F.16]

The Company provides a complaint channel for all parties to report alleged violations related to environmental pollution caused by its operational activities. Complaints can be submitted by telephone, letter, email, or the Company's official website. Throughout 2024, there were 0 complaints that significantly impacted the environment or the Company's business continuity.

Tel : 0221 8061 7490/021- 508 999 09.
Instagram : @lrtjkt
Facebook : LRT Jakarta

Performance Evaluation [OJK F.15]

The Company is committed to ensuring that each of its operational activities has a positive impact on the environment. This commitment is realized through efforts to use paper, electricity, water, and fuel more efficiently. Other than contributing to environmental sustainability, this policy also increases the efficiency of operational costs.

LRT assesses that the policy taken in environmental responsibility is in line with the policy set by the Company. Throughout 2024, there were no spills of chemicals, oil, fuel, or other substances that could potentially affect soil, water, air, biodiversity, and human health.

Kinerja Sosial

Social Performance

Keberlanjutan LRT tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi juga oleh bagaimana layanan ini memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Sebagai moda transportasi publik, LRT berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas perkotaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Selain itu, keberlanjutan operasional LRT sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, dan komunitas di sekitarnya.

Penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan layanan menjadi faktor penting dalam menjaga dukungan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan memastikan kinerja sosial yang baik, LRT dapat terus berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan serta menciptakan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan memegang peran krusial dalam keberlanjutan operasional LRT, mengingat sistem transportasi ini sangat bergantung pada tenaga manusia dalam berbagai aspek, mulai dari pengoperasian kereta, pemeliharaan infrastruktur, hingga pelayanan penumpang. Sumber daya manusia yang terlatih dan profesional tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi dan keselamatan operasional, tetapi juga meningkatkan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

Sektor ketenagakerjaan dalam industri LRT juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dengan menciptakan peluang kerja, baik secara langsung melalui perekrutan pegawai operasional maupun secara tidak langsung melalui keterlibatan mitra bisnis dan sektor pendukung lainnya. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi faktor kunci dalam menjamin lingkungan kerja yang aman serta operasional yang andal. Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hak pekerja dan kebijakan rekrutmen yang inklusif, juga menjadi bagian dari komitmen LRT dalam menjalankan bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan tenaga kerja dan keberlanjutan jangka panjang.

Komitmen dan Kebijakan [OJK F.21]

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Perusahaan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini mencakup penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan tenaga kerja, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta jaminan kesetaraan hak dan kesempatan kerja bagi seluruh karyawan. Untuk memastikan

The sustainability of LRT is not only determined by economic and environmental factors, but also by how it provides social benefits to the community. As a mode of public transportation, LRT plays a role in improving accessibility, supporting urban mobility, and creating a more inclusive environment. In addition, the operational sustainability of LRT depends heavily on harmonious relationships with employees, customers, and the surrounding community.

The implementation of fair employment practices, improvement of employee welfare, and community involvement in service development are important factors in maintaining public support and long-term sustainability. By ensuring good social performance, LRT can continue to contribute to more sustainable urban development and create a positive impact for all stakeholders.

Employment Aspect

The employment aspect plays a crucial role in the sustainability of LRT operations, since this transportation system relies heavily on human resources in various aspects, including train operation, infrastructure maintenance, and passenger service. Trained and professional human resources not only contribute to operational efficiency and safety, but also increase public satisfaction and trust in the services provided.

The employment sector in the LRT industry also has a significant social and economic impact through the creation of job opportunities, both directly through the recruitment of operational staff and indirectly through the involvement of business partners and other supporting sectors. In line with the principle of sustainability, the implementation of occupational health and safety (OHS) standards is a key factor in ensuring a safe working environment and reliable operations. Compliance with employment regulations, including the protection of workers' rights and an inclusive recruitment policy, is also part of LRT's commitment to conducting business that is oriented towards the welfare of the workforce and long-term sustainability.

Commitments and Policies [OJK F.21]

As part of its social responsibility, the Company implements responsible employment practices. This policy includes the implementation of best practices in workforce management, work-life balance, and ensuring equal rights and employment opportunities for all employees. In order to ensure the optimal application of employment policies, the Company implements



implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang optimal, Perusahaan menjalankan berbagai langkah strategis, termasuk pemenuhan hak karyawan, pengembangan talenta, pemberian remunerasi yang kompetitif, serta apresiasi terhadap kinerja. Selain itu, Perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan.

Dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perusahaan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT LRT Jakarta dan para pegawai. Selain menjalankan praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan regulasi, Perusahaan juga mengutamakan mitigasi risiko dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya ini mencakup pencegahan serta penanganan risiko kecelakaan, penyakit akibat kerja, maupun absensi yang dapat memengaruhi produktivitas. Sebagai bagian dari budaya kerja, Perusahaan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan seluruh insan Perusahaan.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Sama, serta Pemberian Izin Cuti [OJK F.18]

Kesetaraan dalam kesempatan kerja menjadi salah satu prinsip utama yang diterapkan oleh Perusahaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk bekerja tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, atau kondisi fisik lainnya. Prinsip ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen. Perusahaan memberikan peluang yang setara bagi semua calon karyawan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau gender.

Komitmen terhadap kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang adil juga tercermin dalam program pengembangan karier. Sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterapkan di lingkungan Perusahaan memberikan peluang yang sama bagi setiap karyawan untuk mendapatkan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga mendukung kesejahteraan karyawan dengan memberikan hak cuti bagi karyawan perempuan yang sedang hamil dan akan melahirkan. Sementara itu, karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan berhak mendapatkan izin tidak bekerja selama dua hari tanpa mengurangi jatah cuti tahunan.

Pencegahan Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

Seluruh kegiatan operasional Perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip ketenagakerjaan yang etis dan bertanggung jawab, tanpa melibatkan tenaga kerja anak maupun tenaga kerja paksa. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta standar ketenagakerjaan internasional.

various strategic measures, including the fulfillment of employee rights, talent development, competitive remuneration, and performance appreciation. In addition, the Company strives to create a conducive work environment for all employees.

In the aspect of Occupational Health and Safety (OHS), the Company refers to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the Collective Labor Agreement (CLA) between PT LRT Jakarta and its employees. Apart from implementing labor practices in accordance with regulations, the Company also prioritizes risk mitigation in occupational health and safety. These efforts include the prevention and management of risks of accidents, occupational diseases, and absenteeism that can affect productivity. As part of the work culture, the Company implements occupational health and safety standards to create a safe, comfortable, and supportive environment for the welfare of all Company personnel.

Implemented Programs and Activities

Gender Equality and Equal Employment Opportunities, as well as Provision of Leave Permits [OJK F.18]

Equality in employment opportunities is one of the main principles applied by the Company. Every individual has equal rights to work regardless of religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions. This principle is also applied in the recruitment process. The Company also provides equal opportunities for all prospective employees regardless of ethnicity, religion, race, or gender.

Commitment to gender equality and fair employment opportunities is also reflected in the career development program. The Human Resources (HR) development system implemented in the Company provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position, in accordance with applicable regulations.

The Company also supports employee welfare by providing leave entitlements for female employees who are pregnant and about to give birth. Meanwhile, male employees whose wives give birth are entitled to two days of leave without affecting their annual leave quota.

Prevention of Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

All of the Company's operational activities are carried out in accordance with ethical and responsible employment principles, free from child labor and forced labor. This policy is implemented based on the laws and regulations applicable in Indonesia and international labor standards.

Untuk mencegah praktik tersebut, Perusahaan menerapkan sistem rekrutmen yang ketat dengan memastikan bahwa setiap calon karyawan memenuhi persyaratan usia kerja yang sah. Selain itu, pengawasan terhadap mitra dan pemasok juga dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia dalam ketenagakerjaan. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bebas dari eksploitasi tenaga kerja.

Remunerasi dan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan [OJK F.20]

Perusahaan senantiasa memastikan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan pengupahan yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta pemberian berbagai tunjangan. Rasio remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap UMR minimal adalah 1:1. Selain memenuhi standar regulasi, langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kinerja optimal. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, Perusahaan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui kompensasi yang layak dan adil. Pemberian imbal jasa yang sesuai dengan hasil kinerja diharapkan dapat memperkuat sinergi antara karyawan dan Perusahaan dalam mencapai tujuan bersama.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan [OJK F.21]

Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja menjadi prioritas utama Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Untuk memastikan hal tersebut, Perusahaan menyediakan peralatan keselamatan di lokasi yang mudah dijangkau serta menerapkan prosedur keamanan yang baku.

Sebagai entitas usaha yang patuh terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perusahaan juga telah menerapkan dan memenuhi *Health & Safety Environment* (HSE) serta K3 sesuai ketentuan yang berlaku di setiap kegiatan operasionalnya secara optimal untuk mencegah atau meminimalkan kecelakaan kerja fatal.

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 yang telah diubah melalui Perpres No. 111 Tahun 2013, Perusahaan telah mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, pegawai beserta keluarga intinya juga mendapatkan perlindungan tambahan melalui asuransi kesehatan rawat inap serta fasilitas penggantian biaya rawat jalan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, Perusahaan menyediakan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Dengan fasilitas ini, karyawan dapat tetap fokus menjalankan tugasnya tanpa kekhawatiran, sehingga mampu memberikan kinerja terbaik bagi Perusahaan.

To prevent such practices, the Company implements a strict recruitment system by ensuring that every prospective employee meets the legal working age requirement. In addition, supervision of partners and suppliers is also carried out to ensure compliance with the principles of human rights in employment. Through these efforts, the Company creates a fair, safe, and labor-free work environment.

Remuneration and Fulfillment of Employee Welfare Rights [OJK F.20]

The Company always ensures the welfare of employees through a wage policy that is in line with the District/City Minimum Wage (UMK) and the provision of various benefits. The ratio of the lowest permanent employee remuneration to the minimum wage is at a minimum of 1:1. Besides complying with regulatory standards, this measure aims to create a work environment that supports optimal productivity and performance. As a form of commitment to improving employee motivation and loyalty, the Company constantly strives to improve welfare through fair and equitable compensation. The provision of performance-based rewards is expected to strengthen the synergy between employees and the Company in achieving common goals.

Occupational Health and Safety Management for Employees [OJK F.21]

Occupational health, safety, and environment are the Company's top priorities in carrying out its operations. In order to ensure this priority, the Company provides safety equipment in easily accessible locations and implements standard safety procedures.

As a business entity that complies with occupational health and safety standards, as well as laws and regulations in Indonesia, the Company has also implemented and fulfilled Health & Safety Environment (HSE) and OHS in accordance with applicable regulations in each of its operational activities optimally to prevent or minimize fatal work accidents.

In accordance with Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administration Agency (BPJS) and Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2013 which has been amended through Presidential Regulation No. 111 of 2013, the Company has registered all employees in the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan) programs. In addition, employees and their immediate families also receive additional protection through inpatient health insurance and outpatient reimbursement facilities.

As a form of concern for employee welfare, the Company provides health insurance and occupational accident insurance to create a sense of security and comfort at work. With these facilities, employees can remain focused on carrying out their duties without worry, so that they are able to provide the best performance for the Company.



Pengembangan Kompetensi dan Karier [OJK F.22]

Untuk mendukung keberlanjutan usaha, Perusahaan secara rutin menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi karyawan setiap tahun. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan serta rencana pengembangan organisasi.

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan telah menginvestasikan Rp6.081.919.350 dalam pengembangan kompetensi karyawan. Upaya ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan bertujuan meningkatkan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain itu, Perusahaan juga menjamin hak yang setara bagi seluruh karyawan dalam pengembangan karier, baik melalui promosi maupun rotasi. Program ini dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan dan memastikan regenerasi karyawan pada berbagai level berjalan efektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. [F.22]

Setiap tahun, Perusahaan menilai kinerja karyawan secara berkala melalui evaluasi tengah tahun dan akhir tahun. Proses ini membandingkan pencapaian karyawan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, menggunakan indikator kinerja yang relevan. Penilaian dilakukan secara objektif dengan metode evaluasi 360 derajat, yang melibatkan masukan dari atasan, rekan kerja, dan bawahan guna memastikan penilaian yang komprehensif.

Competency and Career Development [OJK F.22]

To support business continuity, the Company routinely organizes competency development programs for employees annually. Every employee has equal opportunities to participate in education and training in accordance with the needs and development plans of the organization.

Until the end of 2024, the Company has invested Rp6,081,919,350 in employee competency development. These efforts are tailored to business needs and aim to improve performance as a form of responsibility to shareholders. Furthermore, the Company also guarantees equal rights for all employees in career development, including through promotion and rotation. This program is designed to produce future leaders and ensure that the regeneration of employees at various levels is effective in accordance with their competencies. [F.22]

Every year, the Company periodically assesses employee performance through mid-year and year-end evaluations. This process compares employee achievements with targets set at the beginning of the year, based on relevant performance indicators. The assessment is carried out objectively using a 360-degree evaluation method, which involves input from superiors, colleagues, and subordinates to ensure a comprehensive assessment.

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan Average training hours per employee in the Reporting year	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Total employees participated in the training program	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) Percentage of total employees participated in the training
65,4 jam/pegawai 65.4 hours/employee	237	79%

Berikut ini kegiatan pelatihan yang dilakukan sepanjang tahun 2024:

The following are the training activities held throughout 2024:

Kegiatan/Pelatihan Activity/Training	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
Ahli Madya Manajemen Konstruksi Associate Expert of Construction Management	Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI) Indonesian Construction Management Experts Association (HAMKI)	1
Ahli Muda Manajemen Konstruksi Young Expert of Construction management	Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI) Indonesian Construction Management Experts Association (HAMKI)	1
Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System Auditor	PT Tetap Setia Sekuriti Indonesia	1
Basic Financial Modelling	Universitas Indonesia	1
Basic First Aid & CPR	QSHE	25
Basic Management Development Program (BMDP)	Productivity & Quality Management (PQM) Consultant	56

Kegiatan/Pelatihan Activity/Training	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
Bejana Tekan & Tangki Timbun Pressure Vessels & Storage Tanks	PT Upaya Riksa Patra	1
<i>Certified & Accreditation Public Relation Competency</i>	Persatuan Humas Indonesia (Perhumas) Indonesian Public Relations Association (Perhumas)	2
<i>Certified Governance Professional</i>	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)	1
<i>Certified in Financial Risk Management</i>	American Academy of Financial Management (AAFM)	1
<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>	PT RAP Indonesia	1
<i>Certified Warehouse Manager (CMW)</i>	Yayasan PPM Manajemen	1
<i>CHRO Series Indonesia 2024 Conference: How CHROs Can Shape Organisational and Workforce Transformation</i>	HRM Asia Pte. Ltd	2
Ruang Terbatas Confined Space	PT Upaya Riksa Patra	2
<i>Continuous Improvement Using PDCA (8 Langkah) & 7 QC Tools</i>	PQM Consultants	40
<i>Corporate Investigator Profesional</i>	Jaga Nusantara Satu (JN1)	1
Dasar Jalur dan Bangunan Perkeretaapian Basic Railway Lines and Buildings	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	5
Dasar Sarana Perkeretaapian Basic Railway Facilities	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Dasar-Dasar Perkeretaapian Bidang Prasarana Fundamentals of Railways Infrastructure Division	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
<i>Design Thinking For Business Innovation</i>	PQM Consultants	32
Diklat Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader (CREL)</i> Training & Certification of Certified Risk Executive Leader (CREL)	Pusdiklatwas BPKP	3
<i>Environment Resources Management - Qualified Risk Management Officer</i>	Center for Risk Management & Sustainability	1
<i>First Aid & Basic Life Support Training</i>	Quality, Safety, Security, Health & Environment/ QSSHE	19
<i>Firstline Management Development Program - Business Performance & Productivity Class</i>	Sandler	52
Gada Utama	Jaga Nusantara Satu (JN1)	5
<i>GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>	PT Cipta Raya Mekar Sahitya	3
<i>ISO 9001:2015 Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course</i>	PT SGS Indonesia (SGS Academy)	1
<i>Information Technology Infrastructure Library 4 Foundation</i>	PT Narada Piranti Teknologi	1
<i>Leading With Happiness</i>	Institute Leadership & Life Management	2
Membedah Aspek Hukum Penyusunan <i>Joint Venture</i> dalam Perkembangan Hukum & Bisnis Breaking Down the Legal Aspects of Joint Venture Establishment in Legal & Business Development	Hukumonline	2
Orientasi Perkeretaapian Railways Orientation	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	22
<i>Overseas Training - Static Inverter (SIV) & Propulsion Inverter Maintenance With VVVF Technology</i>	Neo Trans	7



Kegiatan/Pelatihan Activity/Training	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
Pelatihan Engineering Development Program: Basic Electronic Engineering Development Training Program: Basic Electronic	Matsushita Gobel Foundation	13
Pelatihan Engineering Development Program: Electrical Fundamental Engineering Development Training Program: Electrical Fundamental	Matsushita Gobel Foundation	13
Pelayanan Ragam Disabilitas Services for People with Disabilities	PT Kreasi Edukasi Mahakarya Prima	20
Pembentukan Kompetensi SDM Perkeretaapian Bidang Awak Sarana Perkeretaapian Establishment of Railway Human Resources Competency in the Railway Crews and Facilities Division	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	8
Pembentukan Kompetensi SDM Perkeretaapian Bidang Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Establishment of Railway Human Resource Competency in the Railway Travel Management (PPKA) Sector	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	4
Pemeriksa Jalur dan Bangunan Perkeretaapian Track Inspector and Railway Buildings	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	6
Pemeriksa Prasarana Bidang Fasilitas Operasi Infrastructure Inspector, Operations Facilities Division	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Railway Facilities Inspector	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Penanggulangan Kebakaran (Tingkat B) Fire Fighting (Level B)	PT Upaya Riksa Patra	1
Pengelolaan Aset Assets Management	PT Jakarta Propertindo Group & Patrarijaya Consultant	4
Penyegaran Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian Tahun 2024 Refreshment of Railway Crew Certification in 2024	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	34
Penyegaran Sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Refreshment for Railway Travel Management Certification (PPKA)	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	9
Perawat Jalur dan Bangunan Kereta Api - Jalur KA Railway Track and Building Caretaker - Railway Tracks	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Perawat Jalur dan Bangunan Kereta Api - Stasiun dan Bangunan Kereta Api Railway Track and Building Caretaker – Stations and Railway Buildings	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Perawat Prasarana Bidang Fasilitas Operasi Infrastructure Caretaker in Operation Facilities	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Perawat Sarana Perkeretaapian Railway Facilities Caretaker	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) College of Land Transportation (STTD)	3
Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Calculation of Green House Gas (GHG) Emissions	PT Eco Edu Indonesia	3
Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) First Aid Officer in Accidents	PT Upaya Riksa Patra	1

Kegiatan/Pelatihan Activity/Training	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
POPAL (Penanggung jawab Operasi Pengelolaan Air Limbah) POPAL (Person in Charge of Waste Water Management)	PT Benefita Indonesia	1
PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) PPPA (Person in Charge of Water Pollution Control)	PT Benefita Indonesia	1
Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Pelaksana Lanjutan Qualified Internal Audit (QIA) - Advanced Auditor	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	3
Refreshment & Sertifikasi Perpanjangan Industrial Relation Manager Refreshment & Certification Extension of Industrial Relation Manager	APINDO	1
Services Excellence Advanced Level	PT Kreasi Edukasi Mahakarya Prima	17
Supervisi Perancah Scaffolding Supervision	PT Upaya Riksa Patra	1
Teknisi Perancah Scaffolding Technician	PT Upaya Riksa Patra	3
<i>The Strategic Role of Internal Communication</i>	Ega Briefings	1

Hubungan Industrial

Manajemen secara aktif berkomunikasi dengan Serikat Pekerja dengan menyampaikan informasi terkini secara berkala, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan.

Perusahaan juga mendukung kebebasan karyawan untuk berserikat sebagai bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang sehat. Hubungan ini dijalankan sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku, dengan tetap mengoptimalkan peran karyawan sebagai pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan

Untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, dan produktivitas kerja, LRT Jakarta mengambil langkah pencegahan terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan alat, mesin, dan bahan berbahaya di lingkungan kerja. Upaya ini dilakukan guna meminimalkan kejadian yang dapat mengganggu kualitas lingkungan dan operasional Perusahaan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin hak karyawan, Perusahaan juga menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai untuk menyampaikan keluhan, saran, atau rekomendasi terkait ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Mekanisme ini telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna memastikan penyelesaian setiap permasalahan secara transparan dan adil.

Industrial Relations

The management actively communicates with the Labor Union by regularly providing latest information, in line with the principle of information disclosure. This approach is expected to maintain a harmonious relationship between the management and employees.

The Company also supports employees' freedom of association as part of its efforts to build healthy industrial relations. These relations are established in accordance with applicable standards and regulations, whilst optimizing the role of employees as stakeholders.

Complaint Mechanism and Management

In order to ensure comfort, safety, health, order, and work productivity, LRT Jakarta takes preventive measures against potential risks posed by the use of tools, machinery, and hazardous materials in the work environment. This effort aims to minimize incidents that can disrupt the quality of the Company's environment and operations.

As a form of responsibility in guaranteeing employee rights, the Company also provides a complaint mechanism for employees to submit complaints, suggestions, or recommendations related to employment, safety, and occupational health. This mechanism has been regulated in the Collective Labor Agreement (CLA) to ensure that every issue is resolved transparently and fairly.



Evaluasi Kinerja

Sepanjang tahun 2024, lingkungan kerja di Perusahaan tetap kondusif tanpa adanya permasalahan material antara karyawan dan Perusahaan, baik di kantor pusat maupun area operasional. Tidak adanya konflik yang berdampak pada kinerja operasional maupun keuangan mencerminkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang diterapkan.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan LRT berkontribusi dalam mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Standar keselamatan yang diterapkan secara konsisten membantu menekan jumlah kecelakaan kerja, menjaga kelancaran operasional, serta meningkatkan produktivitas karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan dan K3 telah dijalankan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, serta memberikan dampak positif bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Berikut ini tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Jenis dan Jumlah Kecelakaan Kerja Type and Number of Occupational Accidents

Jenis Kecelakaan Kerja Type of Work Accidents	Angka Kecelakaan Kerja Number of Work Accidents		Penurunan Decrease(%)
	2024 (orang) (people)	2023 (orang) (people)	
Meninggal Dunia Death	0	0	0%
Cedera Berat Severe Injury	0	0	0%
Cedera Sedang Mild Injury	0	0	0%
Cedera Ringan Minor Injury	3	5	40%
Jumlah Total	3	5	40%

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai Frequency of occupational accidents to total employees	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%) Percentage of serious occupational accidents that cause serious and fatal injuries to total employees (%)
0	0 %

Performance Evaluation

Throughout 2024, the Company's work environment remained conducive without any material issues between employees and the Company, including at the head office and operational areas. The absence of conflicts that impact operational and financial performance reflects the effectiveness of the implemented employment, occupational safety, and health policies.

The implementation of Occupational Health and Safety (OHS) within the LRT environment contributes to reducing the risk of accidents and enhancing protection for the workforce. Consistently applied safety standards help reduce the number of occupational accidents, maintain seamless operations, and increase employee productivity. This demonstrates that the Company's social responsibility in the employment and OHS sectors has been carried out properly in accordance with applicable regulations, and has positively impacted all employees involved in business activities.

The following are the frequency of occupational accidents and diseases suffered by employees in the last 2 (two) years:

Tingkat Turnover Karyawan

Sebagai indikator loyalitas, produktivitas, serta efektivitas budaya dan sistem kerja Perusahaan juga mengevaluasi *turnover* karyawannya. Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan tercatat sebanyak 8 (delapan) orang, dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah 10 (sepuluh) orang. Sementara, jumlah keseluruhan rekrutmen di sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Employee Turnover Ratio

As an indicator of loyalty, productivity, and the effectiveness of the Company's work culture and system, the Company also evaluates employee turnover. As of December 31, 2024, the number of employees leaving the Company was recorded at 8 (eight) people, compared to 10 (ten) people in 2023. In the meantime, there were 36 (thirty-six) new recruits in 2024, an increase from 24 (twenty-four) in the previous year.

Penyebab Turnover Karyawan

Causes of Employee Turnover

Penyebab Causes	2024	2023
Pensiun Alami Retirement	0	1
Pensiun Dini Early Retirement	0	0
Meninggal Death	0	0
Mengundurkan Diri Resignation	7	8
Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran Laid-off due to Violation	1	1
Total Karyawan yang Keluar Total Number of Employees Leaving the Company	8	10
Total Karyawan Akhir Tahun Total Number of Employees at the End of the Year	299	274
Persentase Turnover Turnover Percentage	2,68%	2,9%

Penghargaan di Bidang K3 Tahun 2024

OHS Awards in 2024

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
-	-	-



Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2024

OHS Certifications Applicable in 2024

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issuance	Skema Sertifikasi Scheme of Certificate	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Nomor Sertifikat Certificate No.	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Validity Period
13 April 2022 April 13, 2022	Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Based on Government Regulation No. 50 of 2012	Sertifikasi Pertama First Certification	REG.SMK3.2022. MAL.SK-886.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	12 Mei 2025 May 12, 2025
13 April 2022 April 13, 2022	SNI ISO 9001:2015. <i>Quality Management Systems-Requirement</i>	Sertifikasi Ulang Re-Certification	QSC 01722.	Sucofi International Certification Services	26 Maret 2026. March 26, 2026
13 April 2022 April 13, 2022	SNI ISO 45001:2018. <i>Occupational Health and Safety Management System – Requirements with guidance for use.</i>	Sertifikasi Pertama First Certification	OHS 00235.	Sucofindo International Certification Service	26 Maret 2026. March 26, 2026
13 Mei 2022 May 13, 2022	<i>Integrated Management System.</i> • SNI ISO 9001:2015. <i>Quality Management Systems-Requirement.</i> • SNI ISO 45001:2018. <i>Occupational Health and Safety Management System – Requirements with guidance for use</i>	Sertifikasi Pertama First Certification	IMS 00230.	Sucofi International Certification Service	26 Maret 2026. March 26, 2026
22 Desember 2023 December 22, 2023	Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018. Railway Safety Management System (RSMS) Based on the Regulation of Minister of Transportation No. 69 of 2018	Sertifikasi Ulang Re-Certification	KA.008-1-1-K5-DJKA-2024.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Directorate General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	21 Desember 2025 December 21, 2025

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah merealisasikan biaya dalam menjalankan komitmennya terkait K3 dan Ketenagakerjaan sebesar Rp1.194.525.577 di luar biaya Kesehatan.

Throughout 2024, the Company has incurred costs of Rp1,194,525,577 in carrying out its commitments related to OHS and Employment, excluding Health costs.

Aspek Masyarakat

Keberhasilan LRT sebagai moda transportasi publik sangat bergantung pada sejauh mana layanan ini dapat diakses, diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Masyarakat memegang peran kunci dalam keberlanjutan LRT, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari lingkungan yang terdampak oleh operasionalnya. Penerimaan yang baik akan mendorong peningkatan jumlah pengguna, yang pada akhirnya memperkuat peran LRT dalam mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan pribadi.

Community Aspect

The success of LRT as a mode of public transportation depends heavily on its accessibility, reception, and usage by the general public. The community plays a key role in the sustainability of LRT, both as users and as part of the environment affected by its operations. Good reception will lead to an increase in the number of users, which ultimately strengthens the role of LRT in reducing traffic congestion and private vehicle emissions.

LRT juga berinteraksi langsung dengan berbagai komunitas di sepanjang jalurnya, sehingga pengelolaan dampak sosial, seperti perubahan tata ruang dan aksesibilitas, harus diperhatikan agar keberadaannya memberikan manfaat yang merata. Melalui program tanggung jawab sosial dan keterlibatan aktif dengan masyarakat, LRT dapat berperan dalam menciptakan kota yang lebih inklusif serta memperkuat dukungan publik terhadap sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Komitmen dan Kebijakan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Perusahaan berupaya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Program *Community Involvement & Development* (CID) dirancang untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai inisiatif sosial dan ekonomi.

Program yang Dilakukan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, Perusahaan menetapkan program tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan berdasarkan hasil social mapping. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun, melalui Divisi Sekretariat Perusahaan, Perusahaan melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial. Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana ibadah, bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, serta bantuan sosial dan kesehatan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan TJSL Perusahaan selama, antara lain:

1. LRT Jakarta bekerja sama dengan PPI Madiun untuk menumbuhkembangkan SDM perkeretaapian yang unggul dan profesional.
2. Berpartisipasi dalam Bazar Sembako Murah pada 25–28 Maret 2024 untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
3. Berpartisipasi dalam memperingati Hari Kebaya Nasional 2024 dengan memfasilitasi 300 wanita berkebaya, anggota Kongres Wanita Indonesia, untuk menaiki LRT Jakarta dari stasiun Veledrome sampai Pegangsaan Dua.
4. Melakukan Penyediaan Hewan Qurban pada Hari Raya Idul Adha pada 14-15 Juni 2024.

LRT also interacts directly with various communities along its tracks, meaning that the management of social impacts, such as changes in spatial planning and accessibility, must be considered so that its presence provides equitable benefits. Through social responsibility programs and active engagement with the community, LRT can contribute to creating a more inclusive city and strengthen public support for a more sustainable transportation system.

Commitments and Policies

In carrying out its business activities, the Company not only focuses on financial aspects, but also pays attention to its contribution to the community and the surrounding environment. Through its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in the social and community development sector, the Company strives to provide sustainable benefits to the community. The Community Involvement & Development (CID) program is designed to create added value for stakeholders and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by involving the community in various social and economic initiatives.

Implemented Programs

In an effort to sustainably empower the community, the Company establishes a social responsibility program in the social and community development sector based on the results of social mapping. This approach ensures that every activity carried out is in line with the needs of the community. Through the Corporate Secretariat Division, the Company implements various social and environmental responsibility (TJSL) programs every year, which cover education, health, and the social environment. These programs are realized through the provision of religious facilities, natural disaster relief, educational assistance, and social and health assistance, in line with the Company's commitment to supporting the welfare of the community.

The Company's TJSL activities include:

1. LRT Jakarta collaborated with PPI Madiun to develop outstanding and professional railway human resources.
2. Participated in the Cheap Grocery Bazaar on March 25–28, 2024, to help the community obtain basic necessities at affordable prices.
3. Participated in commemorating National Kebaya Day 2024 by facilitating 300 women in kebayas, members of the Indonesian Women's Congress, to ride the Jakarta LRT from Veledrome station to Pegangsaan Dua.
4. Provided Sacrificial Animals for the Eid al-Adha Festival on June 14-15, 2024.



5. LRT Jakarta berkolaborasi dengan Puskesmas Kelapa Gading memberikan layanan imunisasi polio gratis pada 17–18 Agustus 2024.
6. Turut berkontribusi dalam uji coba Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDIT Al Ikhsan, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, LRT Jakarta berkolaborasi dengan PT. Jakarta Tourisindo membagikan 700 paket makanan bergizi.
7. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, LRT Jakarta bersama Sahabat Disabilitas mengadakan Edu Tour Bertransportasi Tanpa Batas. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian HUT ke-5 operasi komersial LRT Jakarta.

Dampak Operasional Perusahaan Terhadap Masyarakat

Sebagai solusi transportasi umum perkotaan yang modern dan berkelanjutan, LRT Jakarta memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik dalam aspek mobilitas, ekonomi, maupun lingkungan. Kehadirannya membantu mengurangi tingkat kemacetan dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal yang lebih efisien. Dengan jalur yang bebas hambatan, LRT memungkinkan waktu tempuh yang lebih singkat, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain manfaat dalam mobilitas, LRT Jakarta juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, baik secara langsung melalui rekrutmen tenaga kerja maupun secara tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar jalur dan stasiun LRT. Kawasan sekitar LRT berkembang menjadi pusat aktivitas baru, seperti area komersial dan bisnis, yang mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk semakin meningkatkan dampak positifnya, LRT Jakarta menjalankan berbagai program keberlanjutan, seperti kampanye penggunaan transportasi publik guna mengurangi emisi karbon, kerja sama dengan UMKM untuk mendukung ekonomi lokal, serta program edukasi keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna. Dengan inisiatif ini, LRT Jakarta tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga bagian dari pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

5. LRT Jakarta collaborated with the Kelapa Gading Community Health Center to provide free polio immunization services on August 17–18, 2024.
6. Contributed to the Free Nutritious Food (MBG) trial at SDIT Al Ikhsan, South Jakarta. In this event, LRT Jakarta collaborated with PT Jakarta Tourisindo to distribute 700 nutritious food packages.
7. In commemoration of International Disability Day, LRT Jakarta and Sahabat Disabilitas (Friends of Disability) held an Unlimited Transportation Edu Tour. This event also marked the 5th anniversary of LRT Jakarta's commercial operation.

The Company's Operational Impact on the Community

As a modern and sustainable urban public transportation solution, LRT Jakarta provides various benefits for the community, including mobility, economic, and environmental aspects. Its presence helps reduce traffic congestion by encouraging the community to switch from private vehicles to more efficient mass transportation. With its unobstructed tracks, LRT allows for shorter travel times, increases travel efficiency, and supports community productivity in carrying out daily activities.

Other than its mobility benefits, LRT Jakarta also contributes to economic growth by creating new job opportunities for the community, whether directly through recruitment or indirectly through increased economic activity around the LRT tracks and stations. LRT's surrounding areas are developing into new centers of activity, such as commercial and business areas, which support the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs).

To further enhance its positive impact, LRT Jakarta runs various sustainability programs, such as campaigns to use public transportation to reduce carbon emissions, cooperation with MSMEs to support the local economy, as well as safety and comfort education programs for users. With this initiative, LRT Jakarta is not only a transportation solution, but also part of a more environmentally friendly, inclusive, and sustainable city development.

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan [GJK

F.24]

Dalam upaya mendukung program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Perusahaan menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. Saluran ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kendala atau keluhan terkait kegiatan kemasyarakatan secara langsung kepada Perusahaan atau melalui kontak layanan yang tersedia di situs web resmi Perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan dampak positif bagi komunitas.

Complaint Mechanism and Management [GJK

F.24]

In an effort to support social and community development programs, the Company provides a public complaint mechanism. This channel allows the community to report issues or complaints related to community activities directly to the Company or through the contact service available on the Company's official website. This initiative is part of the Company's commitment to continuously improve its positive impact on the community.



+6221 8061 7490 / 021- 508 999 09



carla@lrtjakarta.co.id



@lrtjkt



@lrtjkt



@LRT Jakarta

live chat di laman resmi LRT Jakarta: www.lrtjakarta.co.id.live chat on the official website of LRT Jakarta: www.lrtjakarta.co.id.**Evaluasi Kinerja [F.23]**

Melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan, Perusahaan berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, Perusahaan turut berperan dalam membangun ekonomi kerakyatan serta membantu program Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Perusahaan telah merealisasikan biaya program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp301.755.000.

Performance Evaluation [F.23]

The Company supports sustainable development through various educational quality empowerment and improvement programs, especially in poverty alleviation efforts. In addition, the Company also takes part in building a people's economy and assists government programs in reducing poverty in Indonesia. This initiative is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), which emphasize the importance of social and economic welfare for the community.

The Company has incurred costs of Rp 301,755,000 for its social responsibility program in the social and community development sector throughout 2024.



Komitmen Untuk Memberikan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara pada Konsumen [OJK F.17]

Commitment to Provide Equal Products and/or Services to Consumers [OJK F.17]

LRT Jakarta berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang setara bagi seluruh konsumen tanpa diskriminasi. Komitmen ini diwujudkan melalui standar kualitas yang konsisten, kemudahan akses terhadap layanan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan layanan yang inklusif, LRT Jakarta menyediakan berbagai fasilitas bagi pelanggan disabilitas, seperti jalur khusus, lift, *guiding block*, kursi prioritas, area khusus untuk pengguna kursi roda di trainset, serta pengait kursi roda di dalam kereta, serta petugas yang siap memberikan bantuan.

Selain itu, sistem pengaduan dan umpan balik juga diterapkan untuk memastikan setiap pelanggan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan pengalaman yang setara dalam menggunakan layanan transportasi ini. Dengan langkah ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh pelanggan dapat mengakses layanan dengan nyaman, aman, dan setara, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

LRT Jakarta is committed to providing equal products and services to all consumers without discrimination. This commitment is realized through consistent quality standards, convenient access to services, and compliance with applicable regulations.

As part of its efforts to create an inclusive service, LRT Jakarta provides various facilities for disabled customers, such as special lanes, elevators, guiding blocks, priority seats, special areas for wheelchair users in trainsets, wheelchair hooks on trains, and officers who are ready to provide assistance.

In addition, a complaint and feedback system is also implemented to ensure that every customer, including people with disabilities, has equal experiences in using its transportation services. With this approach, the Company ensures that all customers can access its services comfortably, safely, and equally, in line with the principles of sustainability and corporate social responsibility.

Tanggung Jawab dan Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan

Responsibility and Development of Sustainable Products/Services

Komitmen dan Kebijakan

Memberikan layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta konsumen menjadi prioritas utama Perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui profesionalisme seluruh Insan Perusahaan dalam melayani pelanggan dengan sikap yang sigap, responsif, dan terpercaya, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, Perusahaan juga terus memperkuat hubungan dengan mitra kerja, termasuk pemasok, vendor, dan supplier. Kolaborasi yang baik ini mendukung kelancaran operasional serta memastikan produk dan layanan yang dihadirkan memiliki standar mutu terbaik.

Commitment and Policy

Providing quality and beneficial services for all stakeholders and consumers is the Company's top priority. This is realized through the professionalism of all Company personnel in serving customers with a proactive, responsive, and trustworthy attitude, in line with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

To increase customer satisfaction, the Company also constantly strengthens its relationships with business partners, including suppliers and vendors. This positive collaboration supports efficient operations and ensures that the products and services provided meet the highest quality standards.

Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap konsumen, Perusahaan menetapkan target dan rencana kegiatan untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Upaya ini mencakup penyediaan layanan informasi mengenai Perusahaan, pusat pelayanan konsumen, serta berbagai program peningkatan layanan.

Selain itu, Perusahaan terus mengembangkan berbagai inisiatif guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu target yang ingin dicapai adalah minimnya keluhan terhadap produk dan layanan yang diberikan, sehingga hubungan dengan konsumen tetap terjaga dengan baik.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen atau Pelanggan

Menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi prioritas utama dalam setiap proses produksi dan layanan yang disediakan Perusahaan. Untuk memastikan standar operasional yang optimal, Perusahaan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu. Perusahaan juga memastikan produk yang dihasilkan bukan untuk konsumsi maupun berisiko membahayakan pengguna, sehingga aspek keamanan tetap terjamin dalam setiap layanan yang diberikan.

2. Kejelasan Informasi Produk dan Promosi

Transparansi Informasi menjadi salah satu prinsip utama yang diterapkan Perusahaan dalam menyediakan layanan kepada konsumen. Informasi material mengenai LRT disampaikan secara akurat, terbuka, dan tepat waktu agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa Perusahaan.

Sebagai bentuk perlindungan hak konsumen, Perusahaan memastikan ketersediaan informasi yang jelas dan terpercaya melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, *call center*, dan media sosial. Dengan komunikasi yang efektif dan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, Perusahaan berupaya membangun loyalitas serta hubungan bisnis jangka panjang.

3. Survei Kepuasan Konsumen atau Pelanggan

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari konsumen maka Perusahaan menganggap kepuasan konsumen sebagai indikator utama dalam menilai kualitas produk dan layanan yang diberikan. Guna memahami keunggulan serta aspek yang masih perlu ditingkatkan, Perusahaan secara rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan. Survei ini mencakup penilaian terhadap produk dan layanan yang disediakan, sehingga Perusahaan dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas demi memenuhi ekspektasi konsumen.

As part of its responsibility to consumers, the Company sets activity targets and plans to ensure optimal service quality. These efforts include the provision of information on the Company's services, a customer service center, and various service improvement programs.

Furthermore, the Company is constantly developing various initiatives to improve customer satisfaction. One of the Company's targets is to minimize complaints regarding its products and services in order to ensure that relationship with customers is well maintained.

Implemented Programs and Activities

1. Health and Safety of Consumers or Customers

Maintaining the health and safety of consumers is a top priority in every production process and service provided by the Company. To ensure optimal operational standards, the Company continues to improve the quality of its products and services through the implementation of a Quality Management System. The Company also ensures that the products produced are not for consumption or at risk of harming users, so that safety aspects are guaranteed in every service provided.

2. Clear Information on Products and Promotions

Information transparency is one of the main principles applied by the Company in providing services to consumers. Material information regarding LRT is disclosed accurately, transparently, and in a timely manner so that it can be used as a basis for decision making for customers in using the Company's products or services.

As a form of protection for consumer rights, the Company ensures the availability of clear and reliable information through various communication channels, including websites, call centers, and social media. With effective communication and services that meet customer expectations, the Company strives to build loyalty and long-term business relationships.

3. Consumer or Customer Satisfaction Survey

In line with increasing consumer confidence, the Company considers customer satisfaction as the main indicator in assessing the quality of products and services provided. In order to understand the Company's strengths and areas for improvement, the Company routinely conducts customer satisfaction surveys. These surveys include assessments of the products and services provided, enabling the Company to continuously innovate and improve quality to meet customer expectations.



Inovasi dan Pengembangan [OJK F.26]

LRT Jakarta terus melakukan inovasi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, berbagai teknologi dan sistem baru diterapkan guna menciptakan layanan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan inklusif bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, LRT Jakarta telah menerapkan sejumlah inovasi strategis, di antaranya:

a. Pengembangan Kawasan Depo LRT Jakarta

LRT Jakarta merancang depo sebagai bagian dari konsep *Transit Oriented Development* (TOD) di Jakarta Utara. Sebagai langkah awal, dilakukan perencanaan pengembangan dan optimalisasi lahan depo agar dapat dimanfaatkan secara lebih strategis untuk mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

b. Digitalisasi Pembayaran melalui LarataPay

Dalam mendukung transformasi digital, LRT Jakarta menghadirkan LarataPay, sistem pembayaran digital yang bekerja sama dengan Bank DKI. Inovasi ini mempermudah transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta mendukung ekosistem transportasi berbasis digital yang lebih praktis dan modern.

Melalui berbagai inovasi ini, LRT Jakarta tidak hanya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan. Efisiensi dalam pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi digital, serta peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi masyarakat.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi pelanggan [OJK F.27]

Keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional PT LRT Jakarta. Sistem transportasi yang andal dan aman tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan dalam aspek sosial dan ekonomi. Layanan yang lebih aman mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Innovation and Development [OJK F.26]

LRT Jakarta continues to innovate in the development of infrastructure and services. This innovation aims to improve operational efficiency, reduce environmental impact, and improve passenger comfort and safety. In line with the principles of sustainable development, various new technologies and systems are being implemented to provide services that are more environmentally friendly, efficient, and inclusive for the community.

Throughout 2024, LRT Jakarta has implemented a number of strategic innovations, including:

a. Development of LRT Jakarta Depot Area

LRT Jakarta designed its depot as part of the Transit Oriented Development (TOD) concept in North Jakarta. As a first step, plans were made to develop and optimize the depot land so that it could be used more strategically to support a sustainable transportation system.

b. Digitalization of Payments through LarataPay

In order to support digital transformation, LRT Jakarta collaborates with Bank DKI to present LarataPay, a digital payment system. This innovation facilitates transactions, speeds up the payment process, and supports a more practical and modern digital-based transportation ecosystem.

Through these innovations, LRT Jakarta not only improves the quality of public transportation services but also contributes to creating a more sustainable mobility system. Efficiency in infrastructure development, application of digital technology, and improvement of safety and comfort aspects are part of long-term efforts to realize urban transportation that is more environmentally friendly and inclusive for the community.

Safety-evaluated products/services for customers [OJK F.27]

Security and safety are top priorities in the operations of PT LRT Jakarta. A reliable and safe transportation system not only increases public trust, but also supports sustainability in social and economic aspects. Safer services encourage the use of public transportation, reducing reliance on private vehicles and the environmental impact they cause.

Dalam usahanya memperhatikan dan mengutamakan keselamatan serta keamanan pelanggan, LRT Jakarta melakukan hal berikut:

- Rutin menggelar simulasi Pengendalian Huru-hara (PHH) di Stasiun Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, untuk meningkatkan kesiapan petugas dalam menangani situasi darurat dan gangguan operasional. Simulasi ini melibatkan Pamobvit, Polsek Kelapa Gading, dan Koramil Kelapa Gading, dengan evaluasi berkala guna penyempurnaan sistem pengamanan.
- Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan serta efektivitas prosedur pengamanan di seluruh area operasional.
- Bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran, yang menjadi pedoman dalam menangani keadaan darurat kebakaran di lingkungan operasional.
- Pemeliharaan sarana dilakukan secara berkala melalui perawatan ringan (*light maintenance*) setiap 7 hari dan 4 bulan, serta pemeliharaan darurat untuk mencegah gangguan operasional. Sementara itu, perawatan berat (*heavy maintenance*) mencakup *semi-overhaul* setiap 4 tahun dan *overhaul* setiap 8 tahun, dengan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi optimal sebelum dioperasikan kembali.

Berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan keselamatan ini telah membuahkan hasil yaitu LRT Jakarta meraih kategori EMAS atau predikat Baik Sekali dengan skor 92,11% dalam audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Korsabahaya Kepolisian Republik Indonesia pada 16-18 Oktober 2024. Pencapaian ini mencerminkan komitmen LRT Jakarta dalam menyediakan transportasi publik yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna.

Survei Kepuasan Pelanggan [OJK F.30]

Untuk mengevaluasi sejauh mana Perseroan telah memberikan pelayanan kepada pelanggan, kami telah melakukan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Adapun hasil survei kepuasan pelanggan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The following are LRT Jakarta's efforts to focus and prioritize on the safety and security of its customers:

- Routinely holding Riot Control simulations at Pegangsaan Dua Station, Kelapa Gading, in order to improve the readiness of officers in handling emergency situations and operational disruptions. These simulations involve Pamobvit, Kelapa Gading Police, and Kelapa Gading Military Command, with periodic evaluations to improve the security system.
- Security Management System (SMP) audits are conducted routinely to ensure compliance with security standards and the effectiveness of security procedures in all operational areas.
- Working with the DKI Jakarta Provincial Fire and Rescue Service (Gulkarmat) to compile a Document of Fire Management Operations Plan, which serves as a guideline for handling fire emergencies in the operational environment.
- Facility maintenance is carried out periodically through light maintenance every 7 days and 4 months, as well as emergency maintenance to prevent operational disruptions. Meanwhile, heavy maintenance which includes semi-overhaul and overhaul every 4 and 8 years, respectively, with a thorough inspection to ensure optimal condition before returning to operation.

These efforts to maintain security and safety have resulted in LRT Jakarta achieving the GOLD category or the predicate of Very Good with a score of 92.11% in the Security Management System (SMP) audit by the Vital Object Security Directorate of the Indonesian National Police on October 16-18, 2024. This achievement reflects LRT Jakarta's commitment to providing safe, reliable, and sustainable public transportation for all passengers.

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30]

To evaluate the Company's services to customers, we have conducted customer satisfaction surveys. The results of the customer satisfaction surveys in the last two years are as follows:



Customer Satisfaction Survey 2024

93,28%	93,6%	92,8%	93,76%
Triwulan 1 – 2024 Q1 – 2024	Triwulan 2 – 2024 Q2 – 2024	Triwulan 3 – 2024 Q3 – 2024	Triwulan 4- 2024 Q4 – 2024
- Pelaksanaan periode Februari-Maret 2024 - Jumlah data sebesar 125 responden - Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of February – March 2024 - Total data from 125 respondents - Collection of data via online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan periode Mei – Juni 2024 - Jumlah data sebesar 106 responden - Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of May – June 2024 - Total data from 106 respondents - Collection of data via online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan periode Agustus 2024 - Jumlah data sebesar 137 responden - Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of August 2024 - Total data from 137 respondents - Collection of data via online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan periode Desember 2024 - Jumlah data sebesar 357 responden - Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of December 2024 - Total data from 357 respondents - Collection of data via online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)

Customer Satisfaction Survey 2023

90,2%	92,4%	94,2%	93,2%
Triwulan 1 – 2024 Q1 – 2024	Triwulan 2 – 2024 Q2 – 2024	Triwulan 3 – 2024 Q3 – 2024	Triwulan 4- 2024 Q4 – 2024
- Pelaksanaan pada Februari-Maret 2023 dengan 116 responden. - Pengumpulan data: <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of February – March 2023 with 116 respondents - Collection of data : online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan pada Mei 2023 dengan 123 responden. - Pengumpulan data: <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of may 2023 with 112 respondents - Collection of data : online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan pada Agustus 2023 dengan 186 responden - Pengumpulan data: <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of August 2023 with 186 respondents - Collection of data : online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)	- Pelaksanaan pada Des 2023 dengan 111 responden. - Pengumpulan data: <i>online</i> dan wawancara di stasiun - Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) - Implementation period of December 2023 with 111 respondents - Collection of data : online and interview at stations - Measurement method with Likert scale (1-5)

4. Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja, Distributor/ Pemasok/Supplier/Vendor

Dalam mengembangkan usahanya, Perusahaan menjalin kerja sama dengan mitra yang telah memenuhi standar kelayakan melalui proses evaluasi yang ketat. Kemitraan ini mencakup berbagai bidang pengembangan usaha yang sejalan dengan visi dan strategi bisnis Perusahaan.

Setiap mitra yang bekerja sama dengan LRT Jakarta dipilih berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan internal yang berlaku. Hanya calon mitra yang telah mengikuti prosedur, aturan, serta evaluasi yang ditetapkan, dan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan, yang berhak menjadi bagian dari kerja sama ini.

4. Relationship Management with Business Partners, Distributors/Suppliers/Vendors

In developing its business, the Company collaborates with partners who have met the eligibility standards of a rigorous evaluation process. This partnership covers various areas of business development that are in line with the Company's vision and business strategy.

Each of LRT Jakarta's partners is selected based on the principles of Good Corporate Governance and applicable internal regulations. Only prospective partners who have followed the established procedures, guidelines, and evaluations, and can provide benefits for the Company, are entitled to become partners.

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan

Perusahaan menyediakan layanan untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun apresiasinya melalui *Care Center Layanan Sahabat LRTJ (CARLA)* yang beroperasi dari Senin-Minggu (diluar hari libur nasional) mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Layanan ini dapat diakses melalui website www.lrtjakarta.co.id, surat elektronik, media sosial yang dimiliki LRT Jakarta atau dengan menghubungi nomor hotline (021) 50899909.

Konsumen atau pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya melalui surat elektronik ke lrtjakartaintegritas@tipoffs.info, surat pos ke LRT Jakarta Integritas, PO Box 2801, JKP 10028, media sosial, situs web resmi LRT Jakarta, ataupun SMS dan whatsapp ke nomor +62 81 1199 23335. Setiap pengaduan yang disampaikan pelanggan dan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada konsumen.

Di sepanjang tahun 2024, total rekapitulasi data masuk melalui contact center LRT Jakarta berjumlah 28.088 pesan, dengan rincian sebagai berikut:

Kanal Channel	Jumlah Total
Call	3.391
E-mail	3.210
LiveChat	3.814
Facebook	830
Twitter	354
Instagram	12.762
Total Data Masuk Incoming call	3.727

Complaint Mechanism and Management

The Company provides a service center to submit complaints, suggestions, and appreciation through the *Care Center Layanan Sahabat LRTJ (CARLA)* which operates from Monday to Sunday (excluding national holidays) from 08.00-17.00 WIB. This service can be accessed through the website at www.lrtjakarta.co.id, email, social media owned by LRT Jakarta or by calling the hotline number at (021) 50899909.

Consumers or customers can also submit their complaints via email to lrtjakartaintegritas@tipoffs.info, by post to LRT Jakarta Integritas, PO Box 2801, JKP 10028, social media, the official website of LRT Jakarta, or by SMS and WhatsApp to the number +62 81 1199 23335. Every complaint submitted by customers and the public will be followed up by the Company in order to provide optimal service to consumers.

Throughout 2024, the total recapitulation of incoming data through the Jakarta LRT contact center was 28,088 messages, with the following details:



Data masuk di sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,6%, jika dibandingkan pesan yang masuk di tahun 2023, semua pesan yang masuk tersebut telah direspon oleh tim terkait dan telah ditindak lanjuti.

Evaluasi Kinerja [OJK F.28] [OJK F.29]

Sepanjang tahun 2024, tidak ada keluhan konsumen yang berdampak signifikan terhadap operasional maupun keuangan Perusahaan. Kami juga mencatat tidak ada sanksi atau denda yang diberikan oleh regulator terkait kesalahan prosedur operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian kami terus berupaya memastikan kepuasan pelanggan, untuk itu LRT Jakarta terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai program, produk, dan layanan yang optimal.

Incoming data throughout 2024 increased by 23.6%. Compared to incoming messages in 2023, all incoming messages have been responded to by the relevant team and have been followed up.

Performance Evaluation [OJK F.28] [OJK F.29]

Throughout 2024, there were no consumer complaints that had a significant impact on the Company's operations or finances. We also note that no sanctions or fines were imposed by regulators for violations of operational procedures and services to the public. However, LRT Jakarta continuously strives to ensure customer satisfaction by developing and improving its service quality through various programs, products, and optimal services.

Penghargaan di Bidang Produk dan Konsumen Tahun 2024

Product and Consumer Awards 2024

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
September 2024	Platinum Kategori <i>The Best Customer Service</i> (Individual) Gold Kategori <i>The Best Customer Experience</i> (Corporate) Gold Kategori <i>The Best Employee Engagement</i> (Corporate) Platinum The Best Customer Service (Individual) Category Gold The Best Customer Experience (Corporate) Category Gold The Best Employee Engagement (Corporate) Category	Indonesia Call Center Award (ICCA)
September 2024	Juara Umum (Platinum) Kategori Operator Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Transportasi Ramah Ibu Hamil, Disabilitas, Lansia dan Anak 2024 Platinum Kategori Petugas Pria Terbaik dalam Pelayanan Disabilitas Tahun 2024 (Individual) Grand Champion (Platinum) Best Operator Category, Provider of Transportation Facilities and Infrastructure that are Friendly to Pregnant Women, People with Disabilities, the Elderly, and Children 2024 Platinum Best Male Officer Category in Disability Services 2024 (Individual)	DTKJ

Dukungan Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) [OJK F.25]

Kegiatan dan kebijakan LRT yang dikaitkan sebagai dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Support Towards Sustainable Development Goals (SDGs) [OJK F.25]

LRT's activities and policies are designed to support the Sustainable Development Goals or SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Kegiatan/Kebijakan LRT LRT Activities/Policies
2 ZERO HUNGER 	- Program <i>urban farming</i> di lahan seluas 351m² di area Depo LRT Jakarta, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading dan telah berhasil panen sebanyak 361,74kg. <i>Bazaar</i> sembako murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. - Menabur 10.000 benih ikan nila di kolam Depo. - Berkolaborasi bersama PT Jakarta Tourisindo menyediakan 700 paket makanan dalam Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SDIT Al Ikhsan, Jakarta Selatan. - Urban farming program on an area of 351m² in the Jakarta LRT Depot area, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading which has successfully produced a harvest of 361.74kg. - Cheap food bazaars to help people obtain basic necessities at affordable prices. - Sowing 10,000 tilapia seeds in the depot pond. - Collaborating with PT Jakarta Tourisindo to provide 700 food packages in a free nutritious meal trial at SDIT Al Ikhsan, South Jakarta.
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	- Dalam rangka HUT ke-5 operasional LRT Jakarta, mengadakan acara bersepeda santai dan <i>fun run</i> yang dapat diikuti masyarakat umum. - Bekerja sama dengan BNN Kota Jakarta Utara mengadakan sosialisasi bahaya narkoba pada karyawan LRT Jakarta. - Bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading mengadakan layanan vaksinasi polio gratis. - To celebrate the 5th anniversary of LRT Jakarta's operation, a casual cycling event and fun run were held. The event was accessible by the general public. - In collaboration with the North Jakarta National Narcotics Agency (BNN), a socialization on the dangers of drugs was held for LRT Jakarta employees. - In collaboration with the Kelapa Gading District Community Health Center, a free polio vaccination service was provided.
4 QUALITY EDUCATION 	- Edu tour, lomba mewarnai, dan hiburan interaktif untuk 200 siswa SD. Acara ini untuk edukasi bertransportasi publik dan memperkenalkan pelayanan unggulan LRT Jakarta. - Bekerja sama dengan PPI Madiun untuk menumbuhkembangkan SDM perkeretaapian yang unggul dan <i>professional</i>. - Bekerja sama dengan Politeknik dalam meningkatkan edukasi masyarakat, bersama program studi; relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen Sumber Daya Manusia. - Berpartisipasi dalam Jakreatif pada bulan Juni 2024, dengan memperkenalkan alat simulasi masinis yang dipakai sebagai alat latihan pengoperasian kereta. - Mengadakan kegiatan Learning Festival bagi seluruh karyawan LRT Jakarta - Edu tour, coloring contest, and interactive entertainment for 200 elementary school students. This educational event is designed to promote public transportation and introduce the excellent services of LRT Jakarta. - Collaborating with PPI Madiun to develop outstanding and professional railway human resources. - Collaborating with Politeknik in improving community education with study programs; industry relations, occupational health and safety, and human resource management. - Participating in Jakreatif in June 2024, by introducing a train driver simulation tool used for train operation training. - Organizing Learning Festival for all employees of LRT Jakarta
5 GENDER EQUALITY 	- Dalam rangka Hari Kebaya Nasional, memfasilitasi 300 wanita berkebaya, anggota Kongres Wanita Indonesia, menggunakan LRT Jakarta sebagai salah satu moda transportasi umum. - Memberikan waktu istirahat bagi pegawai wanita yang melahirkan, keguguran atau haid. Menyediakan ruang laktasi bagi wanita menyusui. - Pemberian izin dua hari tanpa mengurangi jatah cuti tahunan bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. - In commemoration of National Kebaya Day, facilitated 300 women dressed in kebayas, members of the Indonesian Women's Congress, to use LRT Jakarta's public transportation. - Providing rest time for female employees who are giving birth, have a miscarriage or are menstruating. Providing a lactation room for breastfeeding women. - Granting two days leave without reducing the annual leave allowance for male employees whose wives are giving birth.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Kegiatan/Kebijakan LRT LRT Activities/Policies
6 CLEAN WATER AND SANITATION 	• Menyediakan water station atau fasilitas pengisian air minum di stasiun LRT. • Sosialisasi penghematan penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor serta melakukan pengecekan secara rutin terhadap instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran. • Penggunaan air PAM untuk kegiatan operasional. • Providing water stations or drinking water refill facilities at LRT stations. • Socializing the conservation of water resources in the office environment and regularly inspecting the water installations so that leaks can be quickly identified and repaired. • Use of PAM water for operational activities.
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 	• Menerapkan konsep <i>Green and Smart Building</i>. Yaitu bangunan dengan penerapan efisiensi energi, air, dan material yang berstandar ramah lingkungan dan telah mendapat sertifikasi <i>Excellent in Design for Greater Efficiencies</i>. • Memasang panel surya di atap Gedung Kantor dan Klinik Mediska sebagai sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menghemat penggunaan listrik. • Penyediaan fasilitas parkir sepeda di seluruh stasiun, untuk mendukung transportasi ramah lingkungan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan dengan sepeda. • Implementing the Green and Smart Building concept, which is a building with the application of efficient energy, water, and environmentally friendly materials that have received Excellent in Design for Greater Efficiencies certification. • Installing solar panels on the roof of the Office Building and Mediska Clinic as a source of renewable energy, reducing dependence on fossil energy and saving on electricity usage. • Providing bicycle parking facilities at all stations, to support environmentally friendly transportation for passengers who travel by bicycle.
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	• Pemenuhan <i>Service & Operation Excellence</i> dengan memberikan layanan pelanggan yang optimal dan melakukan kegiatan operasional serta perawatan sesuai rencana. • Integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi di Jakarta. • Revitalisasi area stasiun LRT Jakarta. • Program edukasi dan aktivasi di area stasiun maupun depo LRT Jakarta. • Menyusun <i>Calendar of Event</i> LRT Jakarta tahun 2024. • Meningkatkan <i>brand awareness</i> LRT • Mengoptimalkan kembali bisnis <i>non-farebox</i> sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pendapatan dan laba perusahaan. • Fulfillment of Service & Operation Excellence by providing optimal customer service and carrying out operational and maintenance activities according to plan. • Physical integration and payment of modes of transportation in Jakarta. • Revitalization of LRT Jakarta's station areas. • Education and activation programs in LRT Jakarta station and depot areas. • Preparing the 2024 LRT Jakarta Calendar of Events. • Increasing LRT brand awareness. • Re-optimizing the non-farebox business so that it can contribute positively to the Company's revenue and profit.
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 	Meningkatkan efektivitas dengan sistem yang terintegrasi. Increasing effectiveness with integrated systems.
10 REDUCED INEQUALITIES 	Pada Hari Disabilitas Internasional mengundang para teman disabilitas yang terdiri dari tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan pelajar dari Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberikan kesempatan dan pengalaman dalam menikmati layanan transportasi yang ramah dan inklusif. On International Disability Day, we invited our disabled friends, including the hearing impaired, the visually impaired, the physically disabled, and students from Special Schools (SLB), to provide opportunities and experiences in enjoying friendly and inclusive transportation services.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Kegiatan/Kebijakan LRT LRT Activities/Policies
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	- Berkontribusi dalam kegiatan pelepasan mudik gratis yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. - Pemanfaatan area Depo untuk kegiatan komunitas. - Contributing to the free homecoming travel program organized by the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency. - Making use of the depot area for community activities.
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 	- Mengurangi pemakaian kertas dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam berbagai proses operasional. - Pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 sesuai peraturan perundangan. - Reducing paper usage by implementing a digitalization system in various operational processes. - Management of domestic waste and B3 waste in accordance with laws and regulations.
13 CLIMATE ACTION 	Berpartisipasi dalam sosialisasi Earth Hour di media informasi yang ada di lingkungan stasiun dan Depo LRT Jakarta Participating in the Earth Hour socialization via information media available in LRT Jakarta's stations and depots
14 LIFE BELOW WATER 	Pengelolaan limbah cair oleh pengelola gedung dan fasilitas Sarana Prasarana LRT Jakarta. Management of liquid waste by building owner and LRT Jakarta facilities/infrastructures.
15 LIFE ON LAND 	Menata area hijau dengan sebanyak 35.000 tanaman di sekitar kantor operasional dan Depo sebagai area resapan air dan menjaga kualitas udara agar tetap baik. Arranging green areas with 35,000 plants around the operational office and depots as water catchment areas and to maintain good air quality.
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 	- GRC Talk dengan tema "Membangun Anti Korupsi dan Gratifikasi di Perusahaan Transportasi Publik". Dalam kegiatan ini disampaikan pengetahuan, kesadaran, dan struktur hukum yang mendukung aturan anti korupsi. - Bekerja sama dengan BSSN mengadakan Sosialisasi Security Awareness dengan judul "Membangun Budaya Keamanan Siber di Perusahaan Transportasi Publik". - GRC Talk with the theme of "Building Anti-Corruption and Gratification in Public Transportation Companies". This program presented knowledge, awareness, and legal structures that support anti-corruption regulations. - In collaboration with BSSN, a Security Awareness Socialization was held with the title of "Building a Cybersecurity Culture in Public Transportation Companies".
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	Sinergi program promosi dan event LRT Jakarta dengan JakPro Group maupun para pemangku kepentingan lainnya. Synergy of promotional programs and events of LRT Jakarta with JakPro Group and other stakeholders.



Tentang Laporan Keberlanjutan 2024 [OJK G.1]

About Sustainability Report 2024 [OJK G.1]

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, PT LRT Jakarta menyajikan Laporan Keberlanjutan 2024 yang mencakup berbagai aspek kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, serta implementasi tata kelola dan strategi keberlanjutan. Laporan ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Penyusunan laporan ini mengacu pada berbagai pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaporan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kualitas penyajian. Dalam penyusunannya kami menjadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 sebagai pedoman pembuatan laporan keberlanjutan.

Meski saat ini belum menggunakan jasa eksternal *assurance* independen untuk melakukan verifikasi menyeluruh atas laporan keberlanjutan, Perusahaan tetap memastikan bahwa data yang disajikan telah diperiksa dengan cermat dan sesuai dengan standar perhitungan yang berlaku. Data keuangan dalam laporan ini merupakan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan TIAG Internasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, Perusahaan berkomitmen untuk menyampaikan laporan keberlanjutan secara berkala. Melalui laporan ini, Perusahaan berharap dapat menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan berimbang guna mendukung tata kelola yang lebih baik serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Beberapa pernyataan dalam laporan ini bersifat prospektif dan dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika bisnis serta faktor eksternal lainnya. Perusahaan telah berupaya memastikan validitas informasi yang disampaikan, tetapi tidak dapat menjamin bahwa seluruh proyeksi yang dibuat akan sesuai dengan perkembangan di masa mendatang.

Dalam laporan ini, istilah “Perusahaan,” “LRT,” dan “Kami” digunakan untuk merujuk pada PT LRT Jakarta. Notasi angka dalam tabel dan grafik mengikuti standar bahasa Indonesia, sementara penulisan numerik dalam teks disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai konteksnya.

As a form of commitment to transparency and accountability, PT LRT Jakarta presents the Sustainability Report 2024 which covers various aspects of economic, environmental, and social performance, as well as the implementation of governance and sustainability strategies. This report covers the period from January 1, 2024, to December 31, 2024.

The preparation of this report refers to various guidelines used as a reporting basis in order to ensure compliance with regulations and improve the quality of presentation. During its preparation, we used the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 as a guideline for preparing sustainability reports.

Despite not currently using external independent assurance services to conduct a thorough verification of the sustainability report, the Company always ensures that the data presented has been carefully examined and is in accordance with the applicable calculation standards. The financial data in this report refers to the Company’s financial statements that have been audited by KAP Hertanto, Grace, Karunawan TIAG Internasional.

As a form of accountability to shareholders and other stakeholders, the Company is committed to submitting sustainability reports periodically. Through this report, the Company hopes to provide transparent, accurate, and equitable information to support better governance and maintain stakeholder trust.

Some statements in this report are forward-looking and may change in line with business dynamics and other external factors. The Company has endeavored to ensure the validity of the information presented, but cannot guarantee that all projections made will correspond to future developments.

In this report, the terms “the Company,” “LRT,” and “We” are used to refer to PT LRT Jakarta. The notation of numbers in tables and graphs follows Indonesian language standards, while the numerical notation in the text is adjusted to Indonesian and English language standards according to the context.

Pedoman Kualitas Laporan

Sebagai badan tata kelola tertinggi, Komisaris Independen bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan ini, termasuk memberikan persetujuan atas seluruh informasi yang disajikan. Selain itu, Komisaris Independen juga berperan dalam menentukan pemangku kepentingan yang relevan serta menetapkan topik material yang perlu dicantumkan dalam laporan.

Untuk memastikan laporan keberlanjutan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan secara objektif, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan berikut:

- Akurasi
- Keseimbangan
- Kejelasan
- Keterbandingan
- Kelengkapan
- Konteks keberlanjutan
- Ketepatan waktu
- Verifikasi

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary* dengan dukungan dari konsultan eksternal. Setelah itu, laporan ini ditinjau dan disetujui oleh Direksi sebelum disampaikan kepada otoritas terkait.

Dalam laporan ini, Perusahaan memberikan keterangan khusus untuk setiap data atau informasi yang diperbarui dari laporan sebelumnya. Jika terdapat pemutakhiran atau penyajian ulang informasi, Perusahaan menyertakan alasan yang mendasari perubahan tersebut.

Report Quality Guidelines

As the highest governance organ, the Independent Commissioners are responsible for the preparation of this report, including approving all the information presented. In addition, the Independent Commissioners also participate in determining relevant stakeholders and material topics to be disclosed in this report.

In order to ensure that this sustainability report can be used as a reference for stakeholders in making objective assessments and decisions, the Company applies the following reporting principles:

- Accuracy
- Balance
- Clarity
- Comparability
- Completeness
- Sustainability context
- Timeliness
- Verification

The preparation of this Sustainability Report is carried out by the Corporate Secretary Division with the support of external consultants. Subsequently, this report is reviewed and approved by the Board of Directors before being submitted to the relevant authorities.

In this report, the Company provides specific information for any update of data or information from the previous report. If there is any update or restatement of information, the Company provides the underlying reasons for such changes.



Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Sheet [OJK G.2]

Laporan Keberlanjutan PT LRT Jakarta 2024 menyajikan informasi mengenai kinerja keberlanjutan Perusahaan, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola. Untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan di tahun-tahun mendatang, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terkait laporan ini melalui kontak atau email yang tercantum di bagian bawah lembar isian berikut:

The 2024 Sustainability Report of PT LRT Jakarta presents information on the Company's sustainability performance, covering economic, environmental, social, and governance aspects. To continue improving the reporting quality in the coming years, we invite you to provide input, criticism, and suggestions regarding this report via the contact or email listed at the bottom of the following form:

Profil Anda

Your Profile

Nama (bila berkenan) | Name (optional) :

Institusi/Perusahaan | Institution/Company :

Surel | Email :

Telp | Hp/Phone/Mobile :

Profil Pemangku Kepentingan

Stakeholder Profile

☐ Pemegang Saham/Investor
Shareholder/Investor

☐ Karyawan
Employee

☐ Konsumen
Customer

☐ Masyarakat
Community

☐ Pemerintah
Government

☐ Mitra bisnis
Business Partner

☐ Media
Media

☐ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Non-Governmental Organization (LSM)

☐ Lainnya.....
Others.....

Mohon pilih jawaban berikut yang paling sesuai dengan pertanyaan di bawah
Please choose the most appropriate answer to the following questions

Ya
Yes

Tidak
No

Laporan ini memberi informasi yang bermanfaat.
This report has provided a useful information.

Laporan ini mudah dimengerti.
This report is easy to understand.

Laporan ini telah mendorong saudara untuk berkontribusi dalam kinerja keberlanjutan Perusahaan.
This report has encouraged you to contribute to the Company's sustainability performance.

Mohon berikan penilaian topik material yang paling penting menurut anda bagi keberlanjutan PT LRT Jakarta

Please rate the material topics that are most important to you for the sustainability of PT LRT Jakarta

(nilai 1 = paling tidak penting s.d. 5 = paling penting) | (1: not useful, 5: very useful)

• Kinerja Ekonomi | Economic Performance

• Antikorupsi | Anti-corruption

• Ketenagakerjaan | Employment

• Etika Media | Media Ethics

• Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education

• Privasi Pelanggan | Customer Privacy

• Perilaku Kompetitif | Competitive Behavior

Saran atau kritik terkait laporan

Suggestion or criticism regarding the report

Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya [OJK G.3]

Response to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report [OJK G.3]

Atas saran, kritik, serta tanggapan atas Laporan Keberlanjutan PT LRT Jakarta 2024 ini, Perusahaan memberikan apresiasi dengan menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti seluruh saran, kritik, maupun tanggapan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi dasar bagian penyampaian hasil kinerja yang lebih komprehensif dalam Laporan ini. Seluruh pemangku kepentingan juga dapat memberikan saran, kritik, dan tanggapan, maupun pertanyaan terkait Laporan Keberlanjutan 2024 melalui lembar umpan balik yang dilampirkan di halaman akhir laporan ini, maupun melalui:

For the suggestions, criticisms, and responses to the PT LRT Jakarta 2024 Sustainability Report, the Company expresses its appreciation by accepting, responding, and following up on all suggestions, criticisms, and responses provided by stakeholders, which then become the basis for a more comprehensive presentation of performance results in this Report. All stakeholders can also provide suggestions, criticisms, and responses, as well as questions regarding the 2024 Sustainability Report through the feedback sheet attached at the end of this report, or through:

PT LRT Jakarta

GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA

Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14250.

Tel. +6221 8061 7490 // 021- 508 999 09.

Email: business@lrtjakarta.co.id



Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa [OJK G.4]

List of Disclosures in Accordance with Authority Regulation Services [OJK G.4]

POJK 51/OJK.03/2017	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
A. Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1 Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation of Sustainability Strategy		268
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Berkelanjutan Sustainability Aspect Performance Highlights		
B.1 Aspek Ekonomi (3 tahun terakhir) Economic Aspect (last 3 years)	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual Quantity of products and services being sold	264
	Pendapatan atau penjualan Revenues or sales	264
	Laba atau rugi bersih Net profits or loss	264
	Produk ramah lingkungan Environmentally friendly products	264
	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Involving local party who are related to Sustainable Financial business process	264
B.2 Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	Penggunaan energi (listrik dan air) Energy usage (electricity and water)	265
	Pengurangan emisi yang dihasilkan Reducing emission production	265
	Pengurangan limbah dan effluen yang dihasilkan Reducing waste and effluent production	266
	Pelestarian keanekaragaman hayati Biodiversity preservation	266
B.3 Aspek Sosial Social Aspect	Dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan Positive and negative impact from the implementation of Sustainable Finance	266
	Pengeluaran biaya untuk masyarakat Allocated fund for the community	266
C. Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan Vision, mission, and sustainability value of the Company	52
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, email, dan situs resmi Name, address, phone number, fax number, email, and official website.	44
C.3	Skala Usaha (total aset atau kapitalisasi aset, total kewajiban, jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan), Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), Wilayah operasional Scale of Business (total assets or assets capitalization, total liabilities, total employees based on gender, position, age, education, and employment status), Share Ownership Percentage (public and government), Operational Area	51, 75, 81
C.4	Penjelasan singkat produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan Brief explanation on products, services, and business activities	49
C.5	Keanggotaan pada asosiasi Membership in association	46
C.6	Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan misal terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan Significant changes in the Company, such as the closing or opening of branches, and ownership structure	46

POJK 51/OJK.03/2017	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
D. Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation		
D.1	Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan paling sedikit meliputi: Policy to response to challenges in fulfilling sustainability strategy	38
D.2	Penjelasan respons Perusahaan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan Explanation on the Company's response related to the implementation of Sustainable Finance	36
D.3	Strategi Pencapaian Target Target Achievement Strategy	
E. Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible Person for the implementation of Sustainable Finance	273
E.2	Pengembangan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development related to Sustainable Finance	274
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Keberlanjutan Risk Assessment on Sustainable Finance Implementation	276
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationship with the Stakeholders	277
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Keberlanjutan Issues on Sustainable Finance Implementation	280
F. Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perusahaan Publik Activities to establish sustainability culture	281
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi Comparison of Target and Production Performance, Portfolio, Financing Target, or Investment, Income and also Profit and Loss	287
F.3	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Targets and Portfolio Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Compatible with Sustainable Finance	288
Kinerja Lingkungan Hidup Environment Performance		
F.4 Aspek Umum General Aspect	Biaya lingkungan hidup Environmental Cost	291
F.5 Aspek Material Material Aspect	Penggunaan material yang ramah lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	291
F.6 Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan Amount and Intensity of Energy Used	292
F.7	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan Efforts and Achievements of Energy Efficiency and The Use of Renewable Energy	293



POJK 51/OJK.03/2017	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air The Use of Water	294
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki Keanekaragaman hayati Impact of Operational Areas Nearby or Located in Conservation Areas or Possessing Biodiversity	294
F.10	Upaya konservasi keanekaragaman hayati Biodiversity Conservation Effort	294
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya Amount and Intensity of Emissions Produced Based on Type	293
F.12	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan Emission Reduction Efforts and Achievements	293
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya Amount of Waste and Effluent Produced Based on Type	295
F.14	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen Waste and Effluent Management Mechanism	295
F.15	Tumpahan yang terjadi (jika ada) Spills Occurrence (if any)	296
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment		
F.16	Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved.	296
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Products and/or Services to Consumers	310
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	298
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	298
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	299
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Decent and Safe Working Environment	297
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capabilities Training and Development	300
Aspek Masyarakat Community Aspect		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	300, 309

POJK 51/OJK.03/2017	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaint	309
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities (TJSL)	317
Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Products and/Services Development Responsibility		
F.26	Inovasi dan pengembangan produk berkelanjutan Innovation and Sustainable Product/Service Development	312
F.27	Produk dan Jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan Products and services regarding the safety for customers	312
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	316
F.29	Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya Number of products recalled and reasons	316
F.30	Survei kepuasan pelanggan Customer satisfaction survey	313
G. Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	320
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	322
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Review on Previous Year's Sustainability Report Feedback	323
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	324

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT LRT JAKARTA

Statement Letter of the Members of the Board of Commissioners Regarding
the Responsibility for the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 11 April/April 2025

Dewan Komisaris/Board of Commissioners



Iwan Takwin
Komisaris Utama
President Commissioner



Azas Tigor Nainggolan
Komisaris
Commissioner



Mohamad Pramintohadi Sukarno
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT LRT JAKARTA

Statement Letter of the Members of the Board of Directors Regarding
the Responsibility for the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 11 April/April 2025

Direksi/Board of Directors



Hendri Saputra
Direktur Utama
President Director



Aditia Kesuma Negara
Direktur Operasi dan Pengembangan
Director of Operation and Development



Sahurdi
Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis
Director of Finance and Business Support



08

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report



16,2
7,4
4,9
2,1



203+ ▲
10+ ▲
991+ ▲
007+ ▲



PT LRT JAKARTA

**LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT LRT JAKARTA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Hendri Saputra
Alamat kantor : Jl. Raya Kelapa Nias
RT000/RW025
Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara.
14250.
Alamat Rumah : Kota Wisata San
Francisco
RT001/RW031
Kelurahan Ciangsana,
Kecamatan Gunung
Putri, Bogor.
Telepon : 082111570358
Jabatan : Direktur Utama
- 2 Nama : Sahurdi
Alamat kantor : Jl. Raya Kelapa Nias
RT000/RW025
Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara.
14250
Alamat Rumah : Mutiara Sentul
RT004/RW010
Kelurahan Nanggawer,
Kecamatan Cibinong,
Bogor, Jawa Barat
Telepon : 08128076691
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LRT Jakarta (Perusahaan).
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT LRT JAKARTA
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED**

We, the undersigned:

- 1 Name : Hendri Saputra
Office address : Jl. Raya Kelapa Nias
RT000/RW025
Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta
Utara. 14250.
Residential address : Kota Wisata San
Francisco
RT001/RW031
Kelurahan Ciangsana,
Kecamatan Gunung
Putri, Bogor.
Telephone : 082111570358
Title : *President Director*
- 2 Name : Sahurdi
Office address : Jl. Raya Kelapa Nias
RT000/RW025
Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta
Utara. 14250
Residential address : Mutiara Sentul
RT004/RW010
Kelurahan
Nanggawer,
Kecamatan Cibinong,
Bogor, Jawa Barat
Telephone : 08128076691
Title : *Director*

declare that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT LRT Jakarta (the Company's) financial statements.*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 - a. *All information contained in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
 - b. *The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*

3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan..

3. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statements letter is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari 2025/ February 28, 2025

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf on the board of Director



Hendri Saputra

Direktur Utama/ *President Director*

Sahurdi

Direktur/ *Director*



LRT JAKARTA

No : 00015/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/II/2025

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

**Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi**

**To The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors**

PT LRT Jakarta

PT LRT Jakarta

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LRT Jakarta ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT LRT Jakarta (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : Info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.tagalliances.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

No: 00015/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/II/2025

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 22 atas laporan keuangan terlampir yang menguraikan tentang penerapan pendekatan retrospektif modifikasi akibat ketidakpraktisan penentuan dampak kumulatif atas kesalahan mendasar dalam penentuan saldo persediaan yang sebelumnya telah dibebankan ke beban pokok pendapatan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 22 of the accompanying financial statements, which describes the application of the modified retrospective approach due to the impracticability of determining the cumulative impact of a fundamental error in the recognition of inventory balances that were previously expensed as the cost of revenue. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

No: 00015/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/II/2025

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

No : 00015/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/II/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesai prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

No : 00015/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/II/2025

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto., M.S.Ak., CPA., CPMA., CA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0136/ Public Accountant License No. AP.0136

28 Februari 2025/ February 28, 2025

	<u>Halaman/ Page</u>	
Daftar Isi		<i>Table of Content</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan 31 Desember 2024 dan 2023 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal		<i>Financial Statements December 31, 2024 and 2023 For The Years Ended</i>
 Laporan Posisi Keuangan	 1 - 2	 <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 58	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3e, 3f, 5	170.231.113.036	120.641.665.365	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	12	--	43.699.794.842	Short-term Investment
Piutang Usaha - Bersih	3e, 3g, 6			Trade Receivable - Net
Pihak Berelasi	3d	3.431.571.911	2.617.964.953	Related Parties
Pihak Ketiga		1.189.134.901	2.852.065.100	Third Parties
Persediaan	3l, 11	34.536.112.775	12.946.218.960	Inventory
Pendapatan Yang Masih				
Harus Diterima	3i, 7	2.219.098.832	2.473.679.351	Accrued Revenue
Pajak Dibayar Dimuka	3p, 8a	121.416.455	120.966.635	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	3j, 9	4.286.161.490	3.122.035.680	Prepaid Expenses
Uang Muka	3k, 10	378.255.965	816.508.511	Advance
Jumlah Aset Lancar		216.392.865.365	189.290.899.397	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	3m, 13	170.711.656.061	180.554.354.151	Fixed Assets - Nett
Aset Pajak Tangguhan	3p, 8d	--	8.811.083.964	Deffered Tax Assets
Aset Tak Berwujud	3n, 14	2.509.199.988	2.815.747.970	Intangible Assets
Aset Lain-lain		335.392.206	16.606.372	Others Asset
Jumlah Aset Tidak Lancar		173.556.248.255	192.197.792.457	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		389.949.113.620	381.488.691.854	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2024</u>	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	3e, 3o, 15			Trade Payables
Pihak Berelasi	3d	--	11.089.608.167	Related Parties
Pihak Ketiga		39.412.546.498	35.692.162.441	Third Parties
Utang Pajak	3p, 8b	1.175.410.682	2.443.277.936	Tax Payable
Beban Akrua	3e, 16	3.408.796.572	7.639.438.934	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	3e, 17	6.377.957.710	2.992.679.506	Unearned Revenues
Jaminan dan				Guarantees And
Uang Muka Lainnya	3e, 18	234.175.518	355.047.818	Other Advances
Utang Retensi	3e, 19	99.636.512	116.397.499	Retention Payables
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	3e, 3d, 3o	--	--	Other Payables- Third Parties
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		50.708.523.492	60.328.612.301	Total Current Liability
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas				Post-employment
Imbalan Pasca Kerja	3q, 20	7.553.182.194	5.865.367.835	Benefit Liabilities
Liabilitas				Deferred Tax
Pajak Tangguhan	3p, 8d	508.738.747	--	Liabilitas
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		8.061.920.941	5.865.367.835	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		58.770.444.433	66.193.980.136	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham,				Share Capital
Nilai nominal Rp100.000 per saham				Nominal value of Rp100,000
Modal dasar 6.000.000 saham.				per share. Authorized capital
Modal ditempatkan dan disetor				6,000,000 shares. issued and
3.338.934 saham	21	333.893.400.000	333.893.400.000	paid-up capital 3,338,934
Defisit*)	22	(1.778.506.318)	(15.815.703.390)	Deficit *)
Penghasilan Komprehensif Lain	3q, 20	(936.224.495)	(2.782.984.892)	Other Comprehensive Income
Jumlah Ekuitas		331.178.669.187	315.294.711.718	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		389.949.113.620	381.488.691.854	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Lihat Catatan 22

*) See Note 22

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT LRT JAKARTA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS THEN ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
PENDAPATAN	3r, 23	265.229.654.810	271.606.454.045	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3r, 24	(162.064.701.705)	(170.163.884.005)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		103.164.953.105	101.442.570.040	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	3r, 25	(848.039.984)	(536.300.537)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	3r, 26	(94.481.080.650)	(85.492.101.782)	General And Administrative Expenses
Jumlah Beban Usaha		(95.329.120.634)	(86.028.402.319)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		7.835.832.471	15.414.167.721	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME / (EXPENSES)
Pendapatan Keuangan - Bersih	3r, 27a	4.625.200.651	2.828.557.983	Financial Income - Net
Pendapatan Lain-lain - Bersih	3r, 27b	90.694.347	1.407.726.729	Other Income - Net
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		4.715.894.998	4.236.284.712	Total Other Income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		12.551.727.469	19.650.452.433	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT/ (EXPENSES)
Beban Pajak Tangguhan	3p, 8c	(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	Deffered Tax Expense
Jumlah Beban Pajak		(8.798.941.574)	(2.336.591.181)	Total Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		3.752.785.895	17.313.861.252	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pengukuran Kembali Atas				Remeasurements of Defined
Kewajiban Imbalan Pasti	3q, 20	2.367.641.534	(2.201.864.827)	Benefit Obligation
Dampak Pajak	3p, 8d	(520.881.137)	484.410.262	Income Tax Effect
Jumlah Laba/ (Rugi) Komprehensif Lain		1.846.760.397	(1.717.454.565)	Total Other Comprehensive Income/ (Loss)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5.599.546.292	15.596.406.687	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THEYEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT LRT JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid of Capital Stock	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Defisit/ Deficit	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo per 31 Desember 2022		333.893.400.000	(1.065.530.327)	(33.129.564.642)	299.698.305.031	Balance as of December 31, 2022
Laba Tahun Berjalan		--	--	17.313.861.252	17.313.861.252	Profit for The Year
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	3q, 20	--	(1.717.454.565)	--	(1.717.454.565)	Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities
Saldo per 31 Desember 2023		333.893.400.000	(2.782.984.892)	(15.815.703.390)	315.294.711.718	Balance as of December 31, 2023
Penyesuaian *)		--	--	10.284.411.177	10.284.411.177	Adjustment *)
Saldo per 1 Januari 2024		333.893.400.000	(2.782.984.892)	(5.531.292.213)	325.579.122.895	Balance as of January 1, 2024
Laba Tahun Berjalan		--	--	3.752.785.895	3.752.785.895	Profit for The Year
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	3q, 20	--	1.846.760.397	--	1.846.760.397	Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities
Saldo per 31 Desember 2024		333.893.400.000	(936.224.495)	(1.778.506.318)	331.178.669.187	Balance as of December 31, 2024

*) Lihat Catatan 22

*) See Note 22

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

PT LRT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS THEN ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2024</u>	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	23	269.593.533.680	269.965.768.868	Cash Receipt from Customers
Pembayaran Kas untuk Beban Usaha dan Operasional	24, 25	(162.578.039.781)	(138.947.585.836)	Cash Payments for Operating and Operating Expenses
Pembayaran Kas kepada Pengurus dan Karyawan	24, 25, 26	(103.884.095.980)	(92.998.879.111)	Cash Payments to Managers and Employees
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	27	4.685.118.900	3.514.072.695	Interest Receipt and Current Account Service
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>7.816.516.819</u>	<u>41.533.376.617</u>	Net Cash Flows Used In Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penempatan Deposito	5, 12	--	(43.699.794.842)	Placement Deposits
Penerimaan Deposito	5, 12	43.699.794.842	15.000.000.000	Time deposit withdrawal
Perolehan Aset Tak Berwujud	14	(749.460.899)	(1.047.898.420)	Acquisition of Intangible Aset
Perolehan Aset Tetap	13	(1.177.403.091)	(5.174.507.398)	Acquisition of Fixed Aset
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>41.772.930.852</u>	<u>(34.922.200.660)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		<u>--</u>	<u>--</u>	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		49.589.447.671	6.611.175.957	Increase (Decrease) of Cash & Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun		<u>120.641.665.365</u>	<u>114.030.489.408</u>	Cash & Cash Equivalent at the Beginning of the Current Year
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun		<u>170.231.113.036</u>	<u>120.641.665.365</u>	Cash & Cash Equivalent at the End of the Current Year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT LRT Jakarta ("Perusahaan") didirikan di Jakarta dengan nama PT LRT Jakarta sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 tentang pendirian PT LRT Jakarta, dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2018 dengan surat keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01. Tahun 2018.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta notaris Wiwik Condro, S.H. No.75 tanggal 26 Oktober 2020 mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

b. Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan

Sesuai anggaran dasarnya, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melanjutkan usaha dibidang:

- 1) Konstruksi bangunan sipil
- 2) Konstruksi khusus
- 3) Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
- 4) Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis
- 5) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan
- 6) Telekomunikasi
- 7) Real estat
- 8) Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen
- 9) Periklanan dan penelitian pasar
- 10) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
- 11) Pendidikan

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2019. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara. Entitas induk Perusahaan adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT LRT Jakarta ("the Company") was established in Jakarta under the name of PT LRT Jakarta in accordance with Notarial deed No. 10 dated April 16, 2018 about establishment of PT LRT Jakarta from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Establishment of the Company has been approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia dated April 17, 2018 in its Decision Letter No. AHU-0020380.AH.01.01. Tahun 2018.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by a deed of Notary Wiwik Condro, S.H. 75 dated 26 October, 2020 regarding changes to the increase in issued/paid-up capital. The amendment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

b. The Company's Business Activities

Based on article, The Company was established with with aim and objectives to operate business activities in fields:

- 1) Civil building construction
- 2) Special construction
- 3) Land transportation and transportation through pipelines
- 4) Architectural and engineering activities; technical analysis and test
- 5) Warehousing and transportation support activities
- 6) Telecommunications
- 7) Real estate
- 8) Head office activities and management consulting
- 9) Advertising and market research
- 10) Leasing and leasing activities without option rights
- 11) Educations

The Company started its commercial activities in 2019. The Company domiciled in North Jakarta. The parent company is PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT LRT Jakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No. 16 tanggal 26 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		2024
Komisaris Utama	:	Iwan Takwin
Komisaris	:	Azas Tigor Nainggolan
Komisaris	:	M. Pramintohadi Sukarno
Dewan Direksi		
Direktur Utama	:	Hendri Saputra
Direktur	:	Sahurdi
Direktur	:	Aditia Kesuma Negara Dalimunte

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 299 dan 274 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (CONTINUED)

c. Board of Commissioners and Directors (Continued)

The composition of Board of Commissioners and Directors PT LRT Jakarta based on Deed of Statement of Shareholders Resolutions Outside the Extradinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No.16 dated July 26, 2024 are as follows:

2023		Board of Commissioners
Iwan Takwin	:	President Commissioner
Azas Tigor Nainggolan	:	Commissioner
M. Pramintohadi Sukarno	:	Commissioner
		Directors
Hendri Saputra	:	President Commissioner
Sahurdi	:	Commissioner
Aditia Kesuma Negara Dalimunte	:	Commissioner

As of December 31, 2024 and 2023 the Company had 299 and 274 respectively (unaudited).

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah;
- Amandemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANSIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Changes in Accounting Policies

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI") has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2024 as follows:

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendments to SFAS and IFAS number, are effective on January 1, 2024. KSPKI regulate the SFAS pillars, criteria and shifting between pillars that apply in indonesia, while ammendments to SFAS and IFAS number determine the number of for SFAS and IFAS which referring to IFRS accounting standards, local accounting standard, and sharia accounting standards;
- Amendments of SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current;

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (LANJUTAN)

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 terkait "Pengaturan Pembiayaan Pemasok"; dan
- Amandemen PSAK 409: "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah" dan PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

b. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 117 "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif"; dan
- PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK") (CONTINUED)

a. Changes in Accounting Policies (Continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI") has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2024 as follows:

- Amendments of SFAS 116 "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back
- Amendments of SFAS 207 and SFAS 107 "Supplier Finance Arrangements"; and
- Amendments of SFAS 409 "Accounting of Zakat, Infak, and Sedekah" and SFAS 401 "Sharia Financial Statement"

The adoption of these amended and interpretations of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current period or prior financial years.

b. Accounting Standard Issued but Not Yet Effective

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2024 as follows:

- SFAS 117 "Insurance Contract"
- Amendments of SFAS 117 "Insurance Contracts on initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information"; and
- SFAS 221 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

As of the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Company's financial statements.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which contain in Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (DSAK-IAI)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2024 dan 2023.

	Kurs	
	2024	2023
Mata Uang		
1 USD	16.162	--
1 EUR	--	17.140

Keuntungan/kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan, jika:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

b. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements are prepared and presented based on the going concern assumption and on the accrual basis, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company.

c. Transactions and Balances in Foreign Currency

The financial statements are presented in Rupiah which is the functional and recording currency of the Company. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were converted into Rupiah at the Bank Indonesia middle rate on December 31, 2024 and 2023.

Gains/losses arising from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recorded as profit or loss in the current year.

d. Transactions with Related Parties

Related parties are Persons or Companies related to the Company, if:

- The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
 - Having joint control or control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting
 - Key management personnel of the reporting entity or entity of the reporting entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan, jika: (Lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (seperti entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas).
- ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (entitas asosiasi atau entitas bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari
- iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Transactions with Related Parties (Continued)

Related parties are Persons or Companies related to the Company, if: (Continued)

2. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

- i. The reporting entity and entity are members of the same business Company (such as the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiaries with respect to the entity).
- ii. An entity is an associate or joint venture of another entity (associate entity or a joint entity which is a member of a business Company in which the other entity is its members),
- iii. Both entities are joint ventures of the same
- iv. An entity is a joint venture of a third entity and
- v. The entity is a work reward for employee benefits from an entity reporter or entity associated with the reporting entity. If the reporting entity is an entity organizing the program, the sponsoring entity also relates to the reporting entity.
- vi. Entities controlled or jointly controlled by persons identified in number (i).
- vii. The person identified in number (1) (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or entity of the entity).
- viii. The entity, or a member of a Company to which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to government, government agencies and similar bodies both locally, nationally, and internationally.

Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments which are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (NWPKL), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
2. Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
3. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
4. Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under SFAS 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVOCI), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

1. Financial assets at amortized cost (debt instruments),
2. Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
3. Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
4. Fair value through profit or loss (FVTPL).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori: (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Instrumen Utang)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang subsidi, piutang sewa, piutang lain-lain, pendapatan yang harus diterima, uang jaminan dan dana yang dibatasi penggunaannya.

2. Aset Keuangan Pada NWPKL (Instrumen Utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

3. Aset Keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Assets (Continued)

Initial Recognition and Measurement (Continued)

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: (Continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

1. Financial Assets at Amortized Cost (Debt Instruments)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company financial assets at amortized cost includes account receivables, subsidy receivables, lease receivables, other receivables, accrued revenues, guarantee deposits and restricted funds.

2. Financial Assets at FVOCI (Debt Instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

3. Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori: (Lanjutan)

3. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Perusahaan memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

4. Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (NWLR)

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Assets (Continued)

Initial Recognition and Measurement (Continued)

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: (Continued)

3. Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and (Continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Company elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

4. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

1. Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
2. Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, nilai wajar melalui laba rugi (NWLR) atau melalui penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Assets (Continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

1. The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
2. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) or through comprehensive income (FVOCI).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangan mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang kontraktor, beban akrual, utang bank, utang retensi, liabilitas sewa dan uang jaminan pelanggan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengakuan Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

Initial Recognition and Measurement (Continued)

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities include accounts payable, other payable, contractors payable, accrued expenses, bank loan, retention payable, lease liabilities and Customer's security deposit which are classified as financial liabilities at amortized cost. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent Measurement

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (arm's length market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instrument

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

f. Cash and Cash Equivalent

For the purpose of presentation of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash on hand, in banks and all investments which mature within three months or less from the date of acquisition and which are not pledged and unrestricted.

g. Trade Receivables

Trade receivables are recorded net of an allowance for impairment. The Company provide allowance for impairment based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year based on SFAS 71 "Financial Instrument".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

h. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, jasa dari kegiatan diluar kegiatan utama Perusahaan. Misalnya piutang pegawai.

i. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan Pendapatan Tagihan yang timbul dari penjualan yang telah diakui dan pembayarannya akan diterima yang tagihan invoiceny belum diterbitkan dicatat ke dalam akun pendapatan yang masih harus diterima.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang akan dialokasikan selama masa manfaat atas masing-masing biaya tersebut. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi barang/jasa manfaat belum diterima. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya.

k. Uang Muka

Uang muka adalah uang yang telah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban atau belum dibebankan dikarenakan belum lengkap secara dokumentasi atau belum dipertanggungjawabkan oleh user. Uang muka dilakukan dalam kegiatan yang bersifat swakelola yang pencairan dananya dilakukan melalui metode SPU. Selain itu kas kecil yang telah dibelanjakan namun belum dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil dicatat sebagai uang muka.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dihitung dengan menggunakan metode rata-rata, dan persediaan barang jadi dihitung dengan menggunakan metode rata-rata produksi. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya pabrikasi yang dapat diatribusi secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

h. Other Receiveables

Other receivables are receivables from other parties for cash, services from activities outside the main activities of the Company. For example, employee receivables.

i. Accrued Revenues

Accrued revenue is Revenue Receivables arising from sales that have been recognized and payments to be received whose invoices have not been issued are recorded in the accrued income account.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses represent costs that will be allocated over the useful life of each of these costs. Prepaid expense function, among others, to finance operations no later than one year after the date of the Company's statement of financial position. Prepaid expenses are recognized when the money is disbursed but goods/services/benefits have not been received. Prepaid expenses are reduced when the goods/services/benefits are received or expire.

k. Advances

Advances are money that has been paid but has not been recognized as an expense or has not been charged due to incomplete documentation or not yet accounted for by the user. Advances are carried out in self managed activities where the disbursement of funds is carried out through the SPU method. In addition, petty cash that has been spent but has not been accounted for by petty cash holders is recorded as an advances.

l. Inventory

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Inventories of raw materials and auxiliaries are calculated using the average method, and finished goods inventory is calculated using the average production method. The cost of the finished goods and the goods in the process consists of the cost of raw materials, labor and the allocation of manufacturing costs that can be directly attributed either fixed or variable. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the cost of the sale.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

l. Persediaan (Lanjutan)

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

m. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Perusahaan menghitung aset tetap menggunakan metode garis lurus. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/ Year	Asset Type
Sarana Perkeretaapian	4-30	Railway Facilities
Prasarana Perkeretaapian	4-8	Railway Infrastructures
Reovasi Gedung	8	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	4-10	Office Equipments

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan Sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Inventory (Continued)

The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

m. Fixed Assets

The Company uses the cost method for measuring its fixed assets. Fixed assets, after initial recognition, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation of property, plant and equipment is computed using the straight-line method for building and double declining balances for non-building. The estimated useful lives of the individual property and equipment are as follows:

Self-constructed fixed assets are presented as part of fixed assets as "Construction in Progress" and are stated at cost. All costs, including borrowing costs, incurred in connection with the completion of the asset are capitalized as part of the cost of fixed assets in progress.

The cost of fixed assets in progress does not include any internal profits, abnormal amounts of wasted costs incurred in the use of raw materials, labor or other resources.

The accumulated acquisition cost will be transferred to the appropriate item of fixed assets when the asset is completed or ready for use and is depreciated since operating.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan biaya atas perolehan piranti lunak komputer yang tidak terintegrasi dengan piranti keras dikapitalisasi berdasarkan biaya terjadinya untuk mendapatkan dan menyiapkan piranti lunak sampai siap digunakan. diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya, yaitu empat tahun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

o. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha adalah liabilitas yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang dan/atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasi Perusahaan. Utang usaha meliputi utang kepada pihak ketiga (vendor) untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut.

Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi.

Utang usaha dikelompokkan menjadi dua bagian:

- Utang usaha kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang atau jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.
- Utang usaha kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi Perusahaan. Utang ini dicatat jika hak kepemilikan barang sudah berpindah kepada perusahaan. Dilihat dari jumlahnya, yang dicatat adalah sebesar jumlah yang akan dibayar yaitu harga faktur.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Intangible Assets

Intangible asset is the costs associated with the acquisition of computer software which is not integrated with related hardware are capitalised based on costs incurred to acquire and prepare the software until ready to use. These costs are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives, which is four years.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.

o. Account Payables and Other Payable

Account payables are liabilities arising from the procurement of goods and/or services for the implementation of the Company's operating activities. Account payables include debts to third parties (vendors) for the procurement of goods and/or services.

The value of account payables in question consists of the principal amount owed and interest (if any), and there is no discount/premium and transaction costs for these account payables.

So in general, the carrying amount of trade payables is the same as the amount payable and there is no amortization of discounts/premiums and transaction costs.

Accounts payable are divided into two parts:

- *Accounts payable to related parties is a loan provided by the shareholders excluding the capital contribution or the purchase of goods or services as well as loans obtained from affiliated companies.*
- *Accounts payable to third parties is an obligation that arises in the course of the normal operations of the Company. This payable is recorded when the ownership rights to the goods have been transferred to the Company. Judging from the amount, what is recorded is the amount to be paid, namely the invoice price.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

p. Perpajakan

• Pajak Penghasilan Final

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

• Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Taxes

• Final Income Tax

The final tax expense is recognized proportionately with the amount of revenue recognized under the accounting in the current year. The difference between the final income tax that been paid and the amount charged to the profit and loss and other comprehensive income statement is recognized as prepaid tax or tax debt. Where income has been subject to final income tax, the difference between the carrying value of assets and liabilities on their tax bases is not recognized as deferred assets and liabilities.

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognize losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

• Current Income Tax

The income tax expense consists of current and deferred taxes. Taxes are recognized in the statements of profit and loss and other comprehensive income, unless the taxes relate to transactions or events recognized to other comprehensive income or directly to equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity.

Current income tax expense is calculated using the tax rates applicable at the end of the reporting period.

The amount of unpaid current tax for the current and prior periods is recognized as a liability. If the amount of tax paid for the current and prior periods exceeds the amount of tax payable for those periods, the excess is recognized as an asset. The current tax liability (asset) for the current and prior periods is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of the period reporting.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Kini (Lanjutan)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulikan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

• Pajak Tangguhan

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. Pengakuan awal goodwill; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dan transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulikan atau menyelesaikan jumlah liabilitasnya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Current Income Tax (Continued)

The benefit relating to a tax loss that can be carried forward to recover current tax of a previous period is recognized as an asset. Deferred tax assets are recognized for the carry-forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

• Deferred Tax

A deferred tax liability is recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognition of an asset or liability in transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset is recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the asset is recovered or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalkan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

1. Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

• Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Deferred Tax (Continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period. The Company reduces the carrying amount of deferred tax assets if it is probable that sufficient taxable profit will no longer be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Any such deduction is reversed on the deferred tax assets until it is probable that the available taxable profit will be sufficient.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if:

1. The company has a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities; and
2. Deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income tax imposed by the same taxation authority on:
 - i. The same taxable entity; or
 - ii. A different taxable entity that intends to recover current tax assets and liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

The Company offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

1. Has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
2. Intends to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously:

• Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
2. When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Pertambahan Nilai (Lanjutan)

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

q. Imbalan Kerja

(i) Imbalan Kerja

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Perusahaan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Perusahaan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11/2020 (Undang-undang Cipta Kerja). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuaria metode Projected Unit Credit.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Value Added Tax (Continued)

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

q. Employee Benefits

(i) Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Employee Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the financial statements of the Company as of December 31, 2022 and for the year then ended.

The Company have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Company also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Law No. 11/2020 (the "Job Creation Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

q. Imbalan Kerja (Lanjutan)

(i) Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

1. Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada liabilitas obligasi neto pada akun Beban Pokok Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi pada laba rugi:

1. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
2. Beban atau penghasilan bunga neto.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal diantara:

1. Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Employee Benefits (Continued)

(i) Employee Benefits (Continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

1. The date of the plan amendment or curtailment, and
2. The date the Company recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

1. Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
2. Net interest expense or income.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits consist of wages, salaries, bonus and incentive.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and expenses for termination benefits at the earlier of the following dates

1. The date of the plan amendment or curtailment, and
2. The date the Company recognizes related restructuring costs.

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

1. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

1. Pendapatan tiket diakui pada saat jasa angkutan telah selesai diberikan.
2. Pendapatan Non-tiket yang diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan diterima di muka". Pendapatan Non-tiket diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa kontrak ditambah dengan bagi hasil, apabila ada.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

r. Recognizing revenue and expenses

The company implements PSAK 72 which requires revenue recognition to fulfill the 5 steps of analysis as follows:

1. Identify contracts with customers.
2. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to deliver goods or services to deliver goods or services that have different characteristics to customers.
3. Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods or services to customers. If the fee promised to the customer is reduced by the estimated amount of service performance guarantee to be paid during the contract period.
4. Allocation of the transaction price to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling prices of each different good or service promised in the contract.
5. Recognition of revenue when the performance obligation has been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).

A performance obligation may be satisfied:

1. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized:

1. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Non-Farebox revenues received in advance are presented as "Unearned Revenues". Non-farebox revenue are recognized as revenue on straight-line basis over the contract period plus revenue and/or profit sharing, if any.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui: (Lanjutan)

3. Subsidi sarana dan prasarana diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan yang disepakati bersama antara Perusahaan dan Pemerintah, dimana disepakati jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah. Nilai subsidi yang diakui oleh Pemerintah pada akhir tahun adalah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pendapatan Subsidi diakui sesuai dengan realisasi pada kontrak subsidi dalam periode berjalan pada tahun bersangkutan. Atas uang muka subsidi dicatat sebagai utang uang muka/pendapatan ditangguhkan dan dilakukan perhitungan dikemudian sebagai pengurang pembayaran atas subsidi setelah verifikasi data. Atas beban dan biaya yang berkaitan dengan pendapatan subsidi disajikan kedalam beban pokok pendapatan subsidi.

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya- biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek LRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

s. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (probable) arus masuk manfaat ekonomi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

r. Recognizing revenue and expenses (Continued)

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized: (Continued)

3. Facilities and infrastructure subsidy is recognized as revenue based on a monthly verification report in which the amount of subsidy to be paid by the Government is agreed and recognized as an obligation by the Government. The final subsidy amount recognized by the Government at the end of the year is based on audit result of AuditBoard of Republic of Indonesia.

Subsidy Income is recognized in accordance with the realization in the subsidy contract in the current period of the year. The down payment for subsidies is recorded as advance payment/deferred income and is calculated later as a deduction for subsidies after data verification. The expenses and expenses related to subsidized income are presented in the cost of subsidized income.

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of Jakarta LRT's project which are capitalized as construction in progress.

s. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang di lingkungan ekonomi primer tempat entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasa atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about such assumptions and estimates may result in material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities in the subsequent reporting period.

a. Consideration

The following considerations are made by management in the context of implementing the company's accounting policies that have the most significant influence recognized in the financial statements.

Classification of Assets and Liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities taking into account when the defined definition of SFAS 71 is met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in the Company's accounting policies.

Functional Currency Determination

The Company's functional currency is the currency in the primary economic environment in which it operates. The currency is the currency that affects the income and expenses of the services rendered. Based on the Company's management's assessment, the functional currency is Rupiah.

b. Estimates and Assumptions

The principal assumptions of the future and other principal sources of estimation of other uncertainties at the reporting date which have significant risks for material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities for subsequent periods / years are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situations regarding future developments may change as a result of a change of pace or situation beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions as they occur.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
(LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian atas
Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari ECL. Matriks provisi digunakan untuk menghitung ECL untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif penyisihan didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks penyisihan awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan ECL, adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Penentuan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan
Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas terdiskonto.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND
ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Allowance for Expected Credit Losses of
Accounts Receivables

The Company estimates impairment allowance for accounts receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for accounts receivables, where the allowance rates are based on days past due for Companyings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly.

At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

Determination of Fair Values of Financial Assets
and Financial Liabilities

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

Estimating Useful Lives of Fixed Assets

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
(LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap (Lanjutan)

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") dari Suatu Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Perusahaan yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Perusahaan menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Estimating Useful Lives of Fixed Assets (Continued)

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Company's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

The management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 50 years, which are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business.

Estimating the Incremental Borrowing Rate ("IBR") of a Lease

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Company would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Company that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
(LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Realisasi dari Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND
ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Impairment of Non - Financial Assets

In accordance with the Company accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating company of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Realization of Deferred Tax Assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Company past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Estimation of Employee Benefits

Employee benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Company are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

-31-

5. KAS DAN SETARA KAS (LANJUTAN)

	2024
Deposito Berjangka	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.130.437.822
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	25.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.000.000.000
PT Bank DKI Syariah	12.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk	5.000.000.000
Sub Jumlah	106.130.437.822
Jumlah Kas dan Setara Kas	170.231.113.036

	2024
Jangka Waktu	1 Bulan / Month
Nisbah	62,88% - 73,4%

Tidak ada kas setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta merupakan dana operasional PT LRT Jakarta hasil pendapatan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Dishub).

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (CONTINUED)

	2023	
Time Deposit		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.322.982.235	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	
PT Bank DKI Syariah	--	
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	45.000.000.000	
PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk	--	
Sub Total	51.322.982.235	
Total Cash And Equivalents	120.641.665.365	

	2023	
Jangka Waktu	1 Bulan / Month	Term of Time
Nisbah	63,9% - 68,89%	Sharing

There is no restricted cash and cash equivalents.

The balance at PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta is operational funds for PT LRT Jakarta resulting from subsidy income from the DKI Jakarta Provincial Government through the DKI Jakarta Provincial Transportation Service (Dishub).

6. PIUTANG USAHA

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Pihak Berelasi	
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072
PT Jakarta Propertindo	819.797.839
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000
Sub Jumlah Pihak Berelasi	3.431.571.911
Pihak Ketiga	
PT Fatlanay Mulia Jaya	671.767.850
PT Len Rekaprima Semesta	--
PT Fintek Karya Nusantara	--
Piutang Pihak Ketiga Dibawah 500 Juta Rupiah	521.797.845
Sub Jumlah Pihak Ketiga	1.193.565.695
Dikurangi:	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(4.430.794)
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	1.189.134.901
Jumlah	4.620.706.812

6. TRADE RECEIVABLES

	2023	
This account consists of:		
Related Parties		
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	
PT Jakarta Propertindo	6.190.881	
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	
Sub Total Related Parties	2.617.964.953	
Third Parties		
PT Fatlanay Mulia Jaya	691.777.086	
PT Len Rekaprima Semesta	871.124.382	
PT Fintek Karya Nusantara	705.206.423	
Third Party Receivables Under 500 Million Rupiah	670.525.109	
Total Third Parties	2.938.633.000	
Less:		
Allowance for Impairment Losses on Receivable	(86.567.900)	
Sub Total Third Parties - Net	2.852.065.100	
Total	5.470.030.053	

6. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

Piutang Usaha berdasarkan (hari)
adalah sebagai berikut:

	2024
Belum Jatuh Tempo	--
Jatuh Tempo:	
1 - 90 hari	334.956.345
90 - 180 hari	1.203.508.068
> 180 hari	3.086.673.193
Sub Jumlah	4.625.137.606
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(4.430.794)
Jumlah	4.620.706.812

Mutasi Cadangan Kerugian Piutang

	2024
Saldo Awal	86.567.900
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Tahun Berjalan	4.430.794
Pemulihan Cadangan Kerugian Piutang Tahun Berjalan	(86.567.900)
Jumlah	4.430.794

Piutang usaha kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan piutang subsidi, piutang kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atas jasa advertising dan piutang kepada PT Jakarta Konsultindo atas jasa pengurusan study AMDAL dan ANDALALIN Flyover Rorotan.

6. TRADE RECEIVABLES (CONTINUED)

Trade receivables by age
(days) as follow:

	2023	
	--	Not Over Due
		Over Due:
	2.228.446.576	1 - 90 days
	--	90 - 180 days
	3.328.151.377	> 180 days
Sub Total	5.556.597.953	
Allowance for Impairment Losses on Receivable	(86.567.900)	
Total	5.470.030.053	

Movement of Allowance for Losses on Receivables

	2023	
	--	Beginning Balance
		Allowance For Impairment
		Losses on Receivable
	86.567.900	For The Current Year
		Recovery of Allowance
		For Trade Receivable
	--	For The Current Year
Total	86.567.900	

Account receivables from PT Jakarta Propertindo (Perseroda) represent receivables from subsidies, receivables from PT Jakarta Infrastruktur Propertindo for advertising services and receivables from PT Jakarta Konsultindo for the AMDAL and ANDALALIN study management services for the Rorotan Flyover.

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	2024
Akun ini terdiri dari:	
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	889.279.200
PT Len Rekaprima Semester	520.251.042
KSO Waskita	438.209.752
PT Centrepark Citra Corpora	340.234.454
PT Jakarta Lingko Indonesia	31.124.384
PT Angkasa Pura II	--
Bunga Deposito	--
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.219.098.832

7. ACCRUED REVENUES

	2023	
	--	This account consists of:
		PT Bank Pembangunan
		Daerah DKI Jakarta
		PT Len Rekaprima Semester
		KSO Waskita
		PT Centrepark Citra Corpora
		PT Jakarta Lingko Indonesia
	1.992.496.101	PT Angkasa Pura II
	481.183.250	Deposit Interest
Total	2.473.679.351	Accrued Revenues

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (LANJUTAN)

Pendapatan yang masih harus diterima dari Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas Kerjasama Akseptansi Kartu untuk pembayaran tarif LRT Jakarta berdasarkan kerjasama dengan No. 019/DRU/107/XI/24 berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028.

Pendapatan yang masih harus diterima dari PT Len Rekaprima Semesta merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan, berdasarkan berita acara dengan nomor:

1. Berita acara serah terima pekerjaan dengan No. 011/BDV/102/VI/2024 antara PT LRT Jakarta dengan PT LEN Rekaprima Semesta terkait pekerjaan baraaang dan jasa periode I (24 April 2024 - 23 Mei 2024).
2. Berita acara serah terima pekerjaan dengan No. 009/BDV/102/VI/2024 antara PT LRT Jakarta dengan PT LEN Rekaprima Semesta terkait pekerjaan baraaang dan jasa periode II (24 Mei 2024 - 23 Juni 2024).
3. Berita acara serah terima pekerjaan dengan No. 005/BDV/102/VII/2024 antara PT LRT Jakarta dengan PT LEN Rekaprima Semesta terkait pekerjaan baraaang dan jasa periode III (24 Juni 2024 - 23 Juli 2024).
4. Berita acara serah terima pekerjaan dengan No. 010/BDV/102/VIII/2024 antara PT LRT Jakarta dengan PT LEN Rekaprima Semesta terkait pekerjaan baraaang dan jasa periode IV (24 Juli 2024 - 23 Agustus 2024).
5. Berita acara serah terima pekerjaan dengan No. 012/BDV/102/IX/2024 antara PT LRT Jakarta dengan PT LEN Rekaprima Semesta terkait pekerjaan baraaang dan jasa periode IV (24 Agustus 2024 - 23 September 2024).

Pendapatan yang masih harus diterima dari KSO Waskita merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas sewa ruangan di lantai 3 gedung MCC, Depo LRT Jakarta sesuai dengan surat penawaran sewa ruangan memiliki jangka waktu sewa 16 (enam belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai 30 April 2025.

Pendapatan yang masih harus diterima dari KSO Waskita merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas sewa ruangan di lantai 3 gedung MCC, Depo LRT Jakarta sesuai dengan surat penawaran sewa ruangan memiliki jangka waktu sewa 16 (enam belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai 30 April 2025.

7. ACCRUED REVENUES (CONTINUED)

Accrued income from Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta represents PT LRT Jakarta's income from Card Acceptance Cooperation for payment of Jakarta LRT fares based on cooperation with No. 019/DRU/107/XI/24 effective from November 22, 2024 to June 24, 2028.

Accrued income from PT Len Rekaprima Semesta represents PT LRT Jakarta's income for operation and maintenance work, based on minutes number:

1. *Minutes of handover of work with No. 011/BDV/102/VI/2024 between PT LRT Jakarta and PT LEN Rekaprima Semesta related to coal and service work period I (April 24, 2024 - May 23, 2024).*
2. *Minutes of handover of work with No. 009/BDV/102/VI/2024 between PT LRT Jakarta and PT LEN Rekaprima Semesta related to coal and service work period II (May 24, 2024 - June 23, 2024).*
3. *Minutes of handover of work with No. 05/BDV/102/VII/2024 between PT LRT Jakarta and PT LEN Rekaprima Semesta related to coal and service work for period III (June 24, 2024 - July 23, 2024).*
4. *Minutes of handover of work with No. 010/BDV/102/VIII/2024 between PT LRT Jakarta and PT LEN Rekaprima Semesta related to coal and service work for period IV (July 24, 2024 - August 23, 2024).*
5. *Minutes of the handover of work with No. 012/BDV/102/IX/2024 between PT LRT Jakarta and PT LEN Rekaprima Semesta related to coal and service work for period IV (August 24, 2024 - September 23, 2024).*

Accrued income from KSO Waskita represents PT LRT Jakarta's income from the lease of space on the 3rd floor of the MCC building, Jakarta LRT Depot in accordance with the lease offer letter has a lease period of 16 (sixteen) months, starting January 1, 2024 to April 30, 2025.

Accrued income from KSO Waskita represents PT LRT Jakarta's income from the lease of space on the 3rd floor of the MCC building, Jakarta LRT Depot in accordance with the lease offer letter has a lease period of 16 (sixteen) months, starting January 1, 2024 to April 30, 2025.

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (LANJUTAN)

Pendapatan yang masih harus diterima dari PT Centrepark Citra Corpora merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas kerjasama pengelolaan parkir di area kantor LRT Jakarta, berdasarkan berita acara dengan nomor:

1. Berita acara rekonsiliasi bagi hasil pendapatan perparkiran dengan No. 002/MR/LRPD/XII/24 antara PT LRT Jakarta dengan PT Centrepark Citra Corpora terkait bagi hasil pendapatan perparkiran periode Agustus 2024.
2. Berita acara rekonsiliasi bagi hasil pendapatan perparkiran dengan No. 003/MR/LRPD/I/25 antara PT LRT Jakarta dengan PT Centrepark Citra Corpora terkait bagi hasil pendapatan perparkiran periode September 2024.
3. Berita acara rekonsiliasi bagi hasil pendapatan perparkiran dengan No. 004/MR/LRPD/I/25 antara PT LRT Jakarta dengan PT Centrepark Citra Corpora terkait bagi hasil pendapatan perparkiran periode Oktober 2024.
4. Berita acara rekonsiliasi bagi hasil pendapatan perparkiran dengan No. 005/MR/LRPD/I/25 antara PT LRT Jakarta dengan PT Centrepark Citra Corpora terkait bagi hasil pendapatan perparkiran periode November 2024.

Pendapatan yang masih harus diterima dari PT Jakarta Lingko Indonesia merupakan pendapatan PT LRT Jakarta atas transaksi akseptansi kartu transportasi dan QR tiket untuk periode transaksi bulan November 2024 sebagaimana dalam berita acara *settlement* antara PT LRT Jakarta dan PT Jakarta Lingko Indonesia No. 018/BA/ICT-JLI/XII/2024.

7. ACCRUED REVENUES (CONTINUED)

Accrued income from PT Centrepark Citra Corpora represents PT LRT Jakarta's income from parking management cooperation in the LRT Jakarta office area, based on minutes number:

1. Minutes of reconciliation of parking revenue sharing with No. 002/MR/LRPD/XII/24 between PT LRT Jakarta and PT Centrepark Citra Corpora related to parking revenue sharing for the period August 2024.
2. Minutes of reconciliation of parking revenue sharing with No. 003/MR/LRPD/I/25 between PT LRT Jakarta and PT Centrepark Citra Corpora related to parking revenue sharing for the period September 2024.
3. Minutes of reconciliation of parking revenue sharing with No. 004/MR/LRPD/I/25 between PT LRT Jakarta and PT Centrepark Citra Corpora related to parking revenue sharing for the October 2024 period.
4. Minutes of reconciliation of parking revenue sharing with No. 005/MR/LRPD/I/25 between PT LRT Jakarta and PT Centrepark Citra Corpora related to parking revenue sharing for the period November 2024.

Accrued revenue from PT Jakarta Lingko Indonesia represents PT LRT Jakarta's revenue from transportation card and QR ticket acceptance transactions for the November 2024 transaction period as in the minutes of settlement between PT LRT Jakarta and PT Jakarta Lingko Indonesia No. 018/BA/ICT-JLI/XII/2024.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Pajak Pertambahan	
Nilai (PPN) - Masukan	121.416.455
Jumlah	121.416.455

b. Utang Pajak

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 23	481.173.313
Pasal 21	474.479.187
Pasal 4 ayat 2	219.758.182
Jumlah	1.175.410.682

8. TAXATION

a. Prepaid Tax

	2023
	120.966.635
Jumlah	120.966.635

This account consists of:

Value Added Tax - In
Total

b. Taxes Payable

	2023
	417.061.580
	1.687.581.623
	338.634.733
Jumlah	2.443.277.936

This account consists of:

Income Tax:
Article 23
Article 21
Article 4 (2)
Total

8. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba Sebelum Pajak	12.551.727.469	19.650.452.433
Beda waktu:		
Beban Imbalan Pasca Kerja - bersih	4.055.455.893	1.849.818.351
Penyusutan Aset Tetap	(2.871.687.765)	(2.871.687.765)
Beban Tantiem dan Jasa Produksi	(4.003.301.636)	4.325.871.189
Beban Penyisihan Piutang	(82.137.106)	86.567.900
Jumlah	(2.901.670.614)	3.390.569.675
Beda tetap:		
Beban Yang Tidak Dapat Dikurangkan	14.933.214.455	5.254.654.099
Penghasilan Bunga yang telah dikenakan Pajak Final	(4.685.118.900)	(3.259.861.608)
Penghasilan dan beban yang telah dikenakan pajak Final	(3.890.990.750)	(2.294.036.978)
Pendapatan Non Operasi Lainnya	--	(735.614.483)
Jumlah	6.357.104.805	(1.034.858.970)
Jumlah Koreksi Fiskal	3.455.434.191	2.355.710.705
Laba Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	16.007.161.660	22.006.163.138
Akumulasi Rugi Fiskal Tahun Lalu	(30.871.528.194)	(52.877.691.332)
Rugi Fiskal Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	14.864.366.534	--
Jumlah Rugi Fiskal	--	(30.871.528.194)

8. TAXATION (CONTINUED)

c. Expenses (Income) Tax Benefit

The reconciliation between loss before tax presented in the statements of comprehensive income with estimated taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023, is as follows:

	2024	2023	
Profit Before Income Tax	12.551.727.469	19.650.452.433	
Temporary difference:			
Post - employment Benefit Expenses - Net	4.055.455.893	1.849.818.351	
Depreciation of Fixed Assets	(2.871.687.765)	(2.871.687.765)	
Bonus and Production Services Expenses	(4.003.301.636)	4.325.871.189	
Bad Debt Expenses	(82.137.106)	86.567.900	
Total	(2.901.670.614)	3.390.569.675	
Permancent difference:			
Non - Deductible Expenses	14.933.214.455	5.254.654.099	
Income from Interest subjected to Final Tax	(4.685.118.900)	(3.259.861.608)	
Income and expense subjected to Final tax	(3.890.990.750)	(2.294.036.978)	
Other Non-Operating Income	--	(735.614.483)	
Total	6.357.104.805	(1.034.858.970)	
Total Fiscal Correction	3.455.434.191	2.355.710.705	
Income Before Tax	16.007.161.660	22.006.163.138	
Loss Compensation	(30.871.528.194)	(52.877.691.332)	
Fiscal Loss From Prior Year	14.864.366.534	--	
Unutilized Fiscal Loss	--	--	
Total Fiscal Loss	--	(30.871.528.194)	

8. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

8. TAXATION (CONTINUED)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

2024					
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain / Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Aset /(Liabilitas) Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset/(Liabilities)
Penyusutan					Depreciation of
Aset Tetap					Fixed
Tetap	(631.771.308)	(631.771.308)	--	(1.368.837.835)	(2.632.380.451) Assets
Liabilitas					Post -
Imbalan					Employment
Pasca					Benefits
Kerja	1.290.380.924	892.200.296	(520.881.137)	--	1.661.700.083 Liability
Rugi Fiskal	6.791.736.203	(6.791.736.203)	--	--	-- Fical Loss
Tantiem					Bonus and
dan					Production
Jaspro	1.341.693.208	(880.726.360)	--	--	460.966.848 Services
Cadangan					Allowance for
Kerugian					Impairment
Penurunan					Loss
Nilai					on
Piutang	19.044.938	(18.070.164)	--	--	974.774 Receivables
Jumlah	8.811.083.964	(7.430.103.739)	(520.881.137)	(1.368.837.835)	(508.738.747)

2023					
	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain / Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Aset /(Liabilitas) Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset/(Liabilities)
Penyusutan					Depreciation of
Aset Tetap					Fixed
Tetap	(1.368.837.834)	737.066.526	--	--	(631.771.308) Assets
Liabilitas					Post -
Imbalan					Employment
Pasca					Benefits
Kerja	399.010.625	406.960.037	484.410.262	--	1.290.380.924 Liability
Rugi Fiskal	11.633.092.093	(4.841.355.890)	--	--	6.791.736.203 Fical Loss
Sub Jumlah	10.663.264.884	(3.697.329.327)	484.410.262	--	7.450.345.819

8. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

8. TAXATION (CONTINUED)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

2023					
	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain / Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Aset /(Liabilitas)					Deferred Tax
Pajak Tangguhan					Asset/(Liabilities)
Sub Jumlah					Sub Total
(Lanjutan)	10.663.264.884	(3.697.329.327)	484.410.262	--	7.450.345.819
Tantiem					Bonus and
dan					Production
Jaspro	--	1.341.693.208	--	--	Services
Cadangan					Allowance for
Kerugian					Impairment
Penurunan					Loss
Nilai					on
Piutang	--	19.044.938	--	--	Receivables
Jumlah	10.663.264.884	(2.336.591.181)	484.410.262	--	8.811.083.964
					Total

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Asuransi Karyawan	1.232.914.731	1.207.935.561	Employee's Insurance
Lainnya	3.053.246.759	1.914.100.119	Others
Jumlah			Total
Biaya Dibayar Dimuka	4.286.161.490	3.122.035.680	Prepaid Expenses

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Surat Permohonan			Advance Request
Uang Muka (SPU)	295.956.436	547.748.199	Letter (SPU)
Lainnya	82.299.529	268.760.312	Others
Jumlah Uang Muka	378.255.965	816.508.511	Total Advances

Nilai uang muka kerja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp378.255.965 yang diantaranya merupakan transaksi:

- SPU untuk mendanai kegiatan dimana pelaksanaannya bersifat swakelola yang dilakukan secara langsung oleh user atau dengan melibatkan penyelenggara pihak ketiga.
- Realisasi kas kecil belum dipertanggungjawabkan dan belum dilakukan top up.

The value of work advances as of December 31, 2024 amounted to Rp378,255,965 which included the following transactions:

- SPU to fund activities where the implementation is self-managed which is carried out directly by the user or by involving a third party organizer.
- Use of petty cash that has not been accounted for and has not been top up.

11. PERSEDIAAN

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Persediaan Suku	
Cadang Prasarana	25.728.952.327
Persediaan Suku	
Cadang Sarana	8.807.160.448
Jumlah	34.536.112.775

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan menerapkan pertama kali kebijakan akuntansi terkait persediaan berdasarkan SOP Nomor LRTJ-PR-AKP-005. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga menurut PSAK 25 penerapan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif.

Namun demikian, dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024, Perusahaan mengidentifikasi kesalahan mendasar dalam penerapan kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterapkan secara retrospektif penuh karena ketidakpraktisan, terutama terkait dengan penentuan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif atas saldo persediaan yang sebelumnya telah dibebankan ke beban pokok pendapatan. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan penyesuaian saldo awal laba ditahan untuk mereklasifikasi saldo persediaan yang berasal dari beban pokok pendapatan tersebut. Akibat penyesuaian ini, saldo persediaan meningkat sebesar Rp10.284.411.177, sementara saldo akumulasi defisit berkurang dengan jumlah yang sama (lihat catatan 22).

11. INVENTORIES

	2023	
This account consists of:		
Inventory of Infrastructure	10.312.796.286	
Spareparts		
Inventory of Facilities	2.633.422.674	
Spareparts		
Total	12.946.218.960	

Based on the Company's management's review, there are no events or changes in circumstances which indicate that there is impairment in value of the inventories as of December 31, 2024, thus, no allowance for impairment in value of inventories is provided.

On December 31, 2023, the Company implemented accounting policies related to income for the first time based on SOP Number LRTJ-PR-AKP-005. This accounting policy is a condition that has never happened before, so according to PSAK 25 the application of this accounting policy is applied prospectively.

However, in the financial statements as of December 31, 2024, the Company identified a fundamental error in the application of its accounting policy that could not be fully retrospectively applied due to impracticability, particularly in determining the specific period impact or the cumulative effect on the inventory balance that was previously expensed as the cost of revenue. Accordingly, the Company adjusted the opening retained earnings balance to reclassify the inventory balance originating from the cost of revenue. As a result of this adjustment, the inventory balance increased by IDR 10,284,411,177, while the accumulated deficit decreased by the same amount (see notes 22).

12. INVESTASI JANGKA PENDEK

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Letter of Credit	
<u>Euro</u>	
PT Bank Mandiri	
(Persero) Tbk	335.392.206
Sub Jumlah	335.392.206
Deposito Berjangka	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Rakyat Indonesia	--
Sub Jumlah	--
Jumlah	335.392.206

	2024
Jangka Waktu	--
Nisbah	--

12. SHORT - TERM INVESTMENT

	2023	
This account consists of:		
Letter of Credit		
<u>Euro</u>		
PT Bank Mandiri	16.606.372	
(Persero) Tbk		
Sub Total	16.606.372	
Time Deposits		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia	43.699.794.842	
Sub Total	43.699.794.842	
Total	43.716.401.214	

	2023	
6 bulan/ month		Term of time
5,75%		Sharing

12. INVESTASI JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp335.392.206 dan Rp16.606.372 merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atas rekening *letter of credit* untuk alat pembayaran transaksi impor.

12. SHORT - TERM INVESTMENT (CONTINUED)

Other Assets as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp335.392.206 and Rp16,606,372 is cash whose use is restricted from a letter of credit account as a means of payment for import transactions.

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

2024						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Sarana						Railway
Perkeretaapian	185.270.960.646	--	--	--	185.270.960.646	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	8.179.612.247	--	--	644.559.528	8.824.171.775	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	13.807.838.854	635.510.953	--	3.337.737.690	17.781.087.497	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	11.374.915.981	--	--	--	11.374.915.981	Equipment
Sub Jumlah	218.633.327.728	635.510.953	--	3.982.297.218	223.251.135.899	Sub Total
Aset Dalam						Asset Under
Penyelesaian	3.440.405.078	541.892.140	--	(3.982.297.218)	--	Construction
Sub Jumlah	3.440.405.078	541.892.140	--	(3.982.297.218)	--	Sub Total
Jumlah	222.073.732.806	1.177.403.093	--	--	223.251.135.899	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana						Railway
Perkeretaapian	20.957.027.332	6.617.321.305	--	--	27.574.348.637	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	5.400.468.612	1.785.140.110	--	--	7.185.608.722	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	5.456.678.923	1.878.541.586	--	--	7.335.220.509	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	9.705.203.788	739.098.182	--	--	10.444.301.970	Equipment
Jumlah	41.519.378.655	11.020.101.183	--	--	52.539.479.838	Total
Nilai Buku	180.554.354.151				170.711.656.061	Book Value
2023						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Sarana						Railway
Perkeretaapian	185.303.583.614	14.897.032	--	(47.520.000)	185.270.960.646	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	8.342.594.367	--	--	(162.982.120)	8.179.612.247	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	12.324.750.879	1.483.087.975	--	--	13.807.838.854	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	11.138.798.668	236.117.313	--	--	11.374.915.981	Equipment
Sub Jumlah	217.109.727.528	1.734.102.320	--	(210.502.120)	218.633.327.728	Sub Total

13. ASET TETAP (LANJUTAN)

13. FIXED ASSETS (CONTINUED)

2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan (Lanjutan)					Acquisition Cost (Continued)
Sub Jumlah (Lanjutan)	217.109.727.528	1.734.102.320	--	(210.502.120)	218.633.327.728
Aset Dalam Penyelesaian	--	3.440.405.078	--	--	3.440.405.078
Sub Jumlah	--	3.440.405.078	--	--	3.440.405.078
Jumlah	217.109.727.528	5.174.507.398	--	(210.502.120)	222.073.732.806

2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sarana Perkeretaapian	14.323.100.935	6.677.486.397	--	(43.560.000)	20.957.027.332
Prasarana Perkeretaapian	3.717.953.657	1.827.193.761	--	(144.678.806)	5.400.468.612
Renovasi Gedung	3.907.581.398	1.549.097.525	--	--	5.456.678.923
Inventaris Kantor	7.541.578.618	2.163.625.170	--	--	9.705.203.788
Jumlah	29.490.214.608	12.217.402.853	--	(188.238.806)	41.519.378.655
Nilai Buku	187.619.512.920				180.554.354.151

	2024	2023	
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:			Depreciation allocation as follows:
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 24)			Cost of Revenues (Notes 24)
Sarana Perkeretaapian	6.617.321.305	6.633.926.397	Railway Facilities
Aset Fasilitas Operasi Perkeretaapian	1.400.915.779	1.302.117.615	Railway Operating Facility Assets
Aset Prasarana	383.799.444	380.397.340	Railway Infrastructure
Sub Jumlah	8.402.036.528	8.316.441.352	Sub Total
Beban Administrasi Umum (Catatan 26)			General and Administrative Expenses (Notes 26)
Renovasi Gedung	1.878.541.584	1.549.097.525	Renovation Office
Inventaris Kantor	739.523.071	2.163.625.170	Office Equipment
Sub Jumlah	2.618.064.655	3.712.722.695	Sub Total
Jumlah	11.020.101.183	12.029.164.047	Total

Total nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.711.656.061 dengan nilai aset terbesar adalah sarana LRV yang diperoleh di November 2020 sebagai modal disetor (inbreng) sebesar Rp183.893.400.000.

The total value of fixed assets as of December 31, 2024 was Rp170,711,656,061., with the largest asset value being the LRV facility obtained in November 2020 as paid-in capital (inbreng) of Rp183,893,400,000.

14. ASET TAKBERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga					Acquisition Cost
Sistem dan Aplikasi	5.517.133.025	749.460.900	--	6.266.593.925	System and Application
Sub Jumlah	5.517.133.025	749.460.900	--	6.266.593.925	Sub Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sistem dan Aplikasi	2.701.385.055	1.056.008.882	--	3.757.393.937	System and Application
Sub Jumlah	2.701.385.055	1.056.008.882	--	3.757.393.937	Sub Total
Nilai Buku	2.815.747.970			2.509.199.988	Book Value
2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga					Acquisition Cost
Sistem dan Aplikasi	4.469.234.605	1.047.898.420	--	5.517.133.025	System and Application
Sub Jumlah	4.469.234.605	1.047.898.420	--	5.517.133.025	Sub Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sistem dan Aplikasi	1.617.368.573	1.084.016.482	--	2.701.385.055	System and Application
Sub Jumlah	1.617.368.573	1.084.016.482	--	2.701.385.055	Sub Total
Nilai Buku	2.851.866.032			2.815.747.970	Book Value

	2024	2023	
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:			Depreciation allocation as follows:
Beban Administrasi Umum (Catatan 26)	1.056.008.881	1.084.016.482	General and Administrative Expenses (Note 26)
Jumlah	1.056.008.881	1.084.016.482	Total

Aset tidak berwujud merupakan perolehan atas implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Aplikasi LRT Jakarta pada IOS dan Android, dan Intranet LRT Jakarta.

Intangible assets are acquisitions from the implementation of the Enterprise Resource Planning (ERP) system, the Jakarta LRT Application on IOS and Android, and the Jakarta LRT Intranet.

15. UTANG USAHA

15. TRADE PAYABLES

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	--	11.089.608.167	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Sub Jumlah Pihak Berelasi	--	11.089.608.167	Sub Total Related Party

15. UTANG USAHA (LANJUTAN)

	2024
Pihak Ketiga	
PT Prima Maju Mapan	2.245.657.688
Daea TI Co., Ltd.	1.973.637.078
PT Inka Multi Solusi Trading	1.717.536.300
PT Citas Otis Elevator	1.585.741.535
PT Len Rekaprima Semesta	1.439.720.898
PT Kharisna Abadi Utama	1.397.778.749
PT ISS Indonesia	1.347.097.797
PT Spektra Solusindo	1.323.068.554
PT Kreatif Dinamika Integrasi	1.187.882.000
PT Dananjaya Sejuk Sejahtera	962.329.522
PT Trans Dana Profitri	894.344.460
PT Cakra Satya Internusa	821.622.619
PT Natraco Tunas Citra	755.512.684
PT Prima Karya Sarana	
Sejahtera	749.480.064
PT Bumi Daya Plaza	729.889.603
PT Dana Purna Investama	691.931.766
PT Proxis Solusi Bisnis	667.080.000
PT Thamrin Citra Mulia	588.923.428
PT Otomasi Solusi Inti	548.213.750
PT Phoenix syams indonesia	534.727.666
PT Alfa Metal Cemerlang	525.982.225
Neo Transco.,LTD	508.245.408
PT Mitra Integrasi Informatika	506.541.300
PT Panglima Siaga Bangsa	418.695.391
PT Samjin Indonesia ENC	150.120.729
PT Simoco Indonesia	70.850.000
Rotem SRS Co., LTD	--
PT Persada Konstruksi	--
PT Hutama Panca Perkasa	--
PT Gisos Pratama Perkasa	--
PT Kalyana Insan Anugrah	--
PT Duta Listrik Graha Prima	--
PT Berkas Sumber Rezeki	--
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp500 juta rupiah)	15.069.935.284
Sub Jumlah Pihak Ketiga	39.412.546.498
Jumlah	39.412.546.498

15. TRADE PAYABLES (CONTINUED)

	2023	Third Parties
	941.237.421	PT Prima Maju Mapan
	--	Daea TI Co., Ltd.
	1.067.620.200	PT Inka Multi Solusi Trading
	1.048.323.920	PT Citas Otis Elevator
	501.080.611	PT Len Rekaprima Semesta
	186.516.761	PT Kharisna Abadi Utama
	609.891.496	PT ISS Indonesia
	99.371.865	PT Spektra Solusindo
	--	PT Kreatif Dinamika Integrasi
	649.974.279	PT Dananjaya Sejuk Sejahtera
	408.907.502	PT Trans Dana Profitri
	792.338.519	PT Cakra Satya Internusa
	--	PT Natraco Tunas Citra
	--	PT Prima Karya Sarana
	--	Sejahtera
	--	PT Bumi Daya Plaza
	489.181.741	PT Dana Purna Investama
	83.875.500	PT Proxis Solusi Bisnis
	--	PT Thamrin Citra Mulia
	--	PT Otomasi Solusi Inti
	--	PT Phoenix syams indonesia
	--	PT Alfa Metal Cemerlang
	--	Neo Transco.,LTD
	522.734.618	PT Mitra Integrasi Informatika
	726.505.819	PT Panglima Siaga Bangsa
	2.952.825.838	PT Samjin Indonesia ENC
	1.064.482.000	PT Simoco Indonesia
	4.388.848.000	Rotem SRS Co., LTD
	1.964.968.411	PT Persada Konstruksi
	1.363.638.640	PT Hutama Panca Perkasa
	1.308.606.243	PT Gisos Pratama Perkasa
	1.231.603.217	PT Kalyana Insan Anugrah
	1.077.432.300	PT Duta Listrik Graha Prima
	695.687.200	PT Berkas Sumber Rezeki
		Other (each below to Rp500 Million)
	11.516.510.340	Sub Total Third Parties
	46.781.770.608	Total

16. BEBAN AKRUAL

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Tantiem dan	
Jasa Produksi	
Beban Pegawai	2.095.303.855
Beban Sarana	--
Beban Prasarana	--
Beban Non Farebox	--
Sub Jumlah	2.095.303.855
Beban Non Farebox	1.301.731.648
Beban Umum	8.146.070
Lainnya	3.614.999
Sub Jumlah	1.313.492.717
Jumlah	3.408.796.572

16. ACCRUED EXPENSES

	2023	
	2.976.335.438	This account consists of:
	1.446.166.946	Bonuses and
	1.216.697.735	Service Production
	459.405.372	Employee expenses
		Rolling-stock expenses
		Infrastructure expenses
		Non Farebox Expense
	6.098.605.491	Sub Total
	710.071.632	Non Farebox Expense
	827.146.623	General Expenses
	3.615.188	Others
	1.540.833.443	Sub Total
	7.639.438.934	Total

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Pihak Ketiga	
PT Summarecon	
Investment Property	4.000.000.000
PT Fatlanay Mulia Jaya	1.000.000.000
PT EPID	
Menara AssetCo	493.054.536
PT Solusi	
Kuliner Indonesia	366.666.667
PT Bank Pembangunan	
Daerah DKI Jakarta	222.319.800
Waskita - Nindya	
- LRS KSO	219.104.876
Lainnya	76.811.831
Jumlah	6.377.957.710

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan yang diterima dari pihak penyewa sehubungan dengan penyewaan aset yang nantinya akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak.

17. UNEARNED REVENUE

	2023	
		This account consists of:
		Third Parties
		PT Summarecon
		Investment Property
	1.600.000.000	PT Fatlanay Mulia Jaya
		PT EPID
	622.729.536	Menara AssetCo
		PT Solusi
	550.000.000	Kuliner Indonesia
		Waskita - Nindya
	101.967.552	- LRS KSO
	117.982.418	Others
Jumlah	2.992.679.506	Total

Unearned revenue represents receipts received from the lessee in connection with the rental of assets which will later be amortized over the term of the contract.

18. JAMINAN DAN UANG MUKA LAINNYA

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Security Deposit	234.175.518
Jumlah	234.175.518

Jaminan dan uang muka lainnya adalah security deposit terkait sewa area di PT LRT Jakarta. Saldo jaminan dan uang muka lainnya merupakan pihak ketiga.

18. GUARANTEES AND OTHER ADVANCES

	2023	
		This account consist of:
		Security Deposit
	355.047.818	Total

Guarantees and other advances are security deposits related to the rental of the area at PT LRT Jakarta. Guarantees balances and other advances are third parties.

19. UTANG RETENSI

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Utang Retensi	99.636.512
Jumlah	99.636.512

Utang retensi merupakan utang kepada kontraktor atas pekerjaan pengadaan pemasangan tangga akses jalur masinis stasiun dan pekerjaan jasa pengembangan aplikasi kedinasan operasi dan pelayanan. Saldo utang retensi merupakan pihak ketiga.

19. RETENTION PAYABLES

	2023	
		This account consist of:
		Retention
	116.397.499	Total

Retention debt represents a debt owed to the contractor for installing station driver access ladders and service work for developing applications for operations and service. Retention debt balance is a third party.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mengestimasi jumlah imbalan pasca kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Perhitungan imbalan pasca kerja dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria KKA Azwir Arifin & Rekan dengan nomor laporan aktuaria 250209/LAA-AAR/II/2025, laporan aktuaria diselesaikan pada 24 Februari 2025. Berikut adalah asumsi signifikan yang digunakan:

	2024
Jumlah Pegawai	255
Usia Pensiun	56
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%
Tingkat Bunga Diskonto	Multirate
Tabel Mortalita	TMI IV - 2019

Rekonsiliasi nilai liabilitas imbalan kerja pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023 di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2024
Nilai Kini Kewajiban	
Imbalan Pasti	11.661.442.875
Nilai Wajar	
Aset Program	(4.108.260.681)
Liabilitas Imbalan	
Pasca Kerja	7.553.182.194

	2024
Biaya	
Jasa Kini	2.874.376.497
Biaya Jasa Lalu	789.989.621
Bunga Neto	391.089.774
(Keuntungan) / Kerugian	
Aktuarial	--
Kewajiban Kini Peserta Mutasi	--
Beban	
Imbalan Pasca Kerja	4.055.455.892

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan sebagai berikut:

	2024
Saldo Awal	4.037.009.063
Penghasilan Bunga	252.346.957
Manfaat Dibayar Pihak Ke-3	(151.019.323)
Imbal Hasil atas Aset Program	(30.076.016)
Jumlah	4.108.260.681

20. POST - EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The company estimates the amount of post-employment benefits in accordance with the labor law. The calculation of post-employment benefits is carried out by actuarial consulting firm KKA Azwir Arifin & Rekan with actuarial report number 250209/LAA-AAR/II/2025, actuarial report completed at February 24, 2025. The following are the significant assumptions used:

	2023	
	250	Number of employees
	56	Retirement age
	8,00%	Salary increase rate
	Multirate	Discount interest rate
	TMI IV - 2019	Mortality table

Reconciliation of the value of work imbalance liabilities as of December 31, 2024 and 2023 in the financial position is as follows:

	2023	
	9.902.376.898	Present Value of Obligation
	(4.037.009.063)	Fair Value of Plan Assets
Post - Employment Benefit Liabilities	5.865.367.835	

	2023	
	2.418.960.005	Current Service Expenses
	--	Past Service Cost
	132.943.086	Nett Interest (Gain) / Loss
	--	
	33.529.743	Actuarial - Assets
Post - Employee Benefits Expenses	2.585.432.834	

The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:

	2023	
	4.593.585.322	Beginning balance
	336.709.804	Interest Income
	--	Benefit Paid by 3th Party
	(893.286.063)	Return on Plan Assets
Total	4.037.009.063	

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta notaris Wiwik Condro, S.H No. 75 tanggal 26 Oktober 2020, mengenai susunan pemegang saham per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Number of shares
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000
Jumlah / Total	3.338.934

21. SHARE CAPITAL

Based on notarial deed No. 41 of Wiwik Condro, S.H dated October 26, 2020, composition of shareholders as of 31 December 2024 and 2023 is as follows:

Presentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah Nominal (Rp) / Amount
99,55%	332.393.400.000
0,45%	1.500.000.000
100%	333.893.400.000

22. DEFISIT

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan menerapkan pertama kali kebijakan akuntansi terkait persediaan berdasarkan SOP Nomor LRTJ-PR-AKP-005. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga menurut PSAK 25 penerapan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif (lihat catatan 11).

Namun demikian, dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024, Perusahaan mengidentifikasi kesalahan mendasar dalam penerapan kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterapkan secara retrospektif penuh karena ketidakpraktisan, terutama terkait dengan penentuan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif atas saldo persediaan yang sebelumnya telah dibebankan ke beban pokok pendapatan. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan penyesuaian saldo awal laba ditahan untuk mereklasifikasi saldo persediaan yang berasal dari beban pokok pendapatan tersebut. Akibat penyesuaian ini, saldo persediaan meningkat sebesar Rp10.284.411.177, sementara saldo akumulasi defisit berkurang dengan jumlah yang sama.

22. DEFICIT

On December 31, 2023, the Company implemented accounting policies related to income for the first time based on SOP Number LRTJ-PR-AKP-005. This accounting policy is a condition that has never happened before, so according to PSAK 25 the application of this accounting policy is applied prospectively (see notes 11).

However, in the financial statements as of December 31, 2024, the Company identified a fundamental error in the application of its accounting policy that could not be fully retrospectively applied due to impracticability, particularly in determining the specific period impact or the cumulative effect on the inventory balance that was previously expensed as the cost of revenue. Accordingly, the Company adjusted the opening retained earnings balance to reclassify the inventory balance originating from the cost of revenue. As a result of this adjustment, the inventory balance increased by IDR 10,284,411,177, while the accumulated deficit decreased by the same amount.

23. PENDAPATAN

	2023
Akun ini terdiri dari:	
Berasal dari subsidi:	
Sarana	129.737.532.075
Prasarana	118.196.538.254
Sub Jumlah	247.934.070.329
Non Subsidi:	
Farebox	
Tiket	5.525.224.637
Non - Farebox	
Jasa Teknis	6.662.562.028
Sewa	3.890.990.750
Perparkiran	654.207.505
Pendidikan dan Pelatihan	537.838.340
Periklanan	24.761.221
Sub Jumlah	17.295.584.481
Jumlah	265.229.654.810

23. REVENUE

	2022	
		This account consist of:
		Sources from subsidies:
		Facilities
		Infrastructure
		Sub Total
		Non Subsidies:
		Farebox
		Ticket
		Non - Farebox
		Technical Services
		Lease
		Parking
		Education and Training
		Advertising
		Sub Total
		Total

23. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Pendapatan Subsidi

Subsidi sarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pelanggan.

Subsidi prasarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah. PT LRT Jakarta merupakan anak Perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pergub Penugasan").

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan PT LRT Jakarta tentang Kerjasama Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan Koridor I Fase I Velodrome – Kelapa Gading No.009/UT2000/107/IX/2019 dan No.001/DRU/107/IX/2019, tanggal 20 September 2019 sebagai operator LRT Jakarta dengan ruang lingkup (a) pengoperasian, (b) perawatan dan (c) pengusahaan. Dalam menjalankan operasional LRT Jakarta, Jakpro mendapatkan dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pergub Subsidi").

Berdasarkan peraturan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor.107/UT0000/V/2024/0013 dan 003/DRU/107/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Tahun Anggaran 2024.

23. REVENUE (CONTINUED)

Subsidies Income

Rolling Stock subsidies are the DKI Jakarta Provincial Government's budget allocation for the operation of railway facilities in the context of public service obligations so that fares are affordable for customers.

Infrastructure subsidies are the DKI Jakarta Provincial Government's budget allocation to pay for operational and maintenance costs for railway infrastructure as well as capital costs for operating facilities.

Subsidy revenue is income from the DKI Jakarta Provincial Government to Regional Owned Enterprises. PT LRT Jakarta is a subsidiary of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) which is a Regional Owned Enterprise (BUMD) assigned by the DKI Jakarta Provincial Government based on Governor Regulation Number 154 of 2017 concerning Assignments to PT Jakarta Propertindo in the Implementation of Light Rail Infrastructure and Facilities /Light Rail Transit as amended by DKI Jakarta Governor Regulation Number 25 of 2020 (hereinafter referred to as "Assignment Gubernatorial Regulation").

Based on the Cooperation Agreement between PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and PT LRT Jakarta concerning Cooperation in the Operation and Maintenance of Light Railway Facilities and Infrastructure Corridor I Phase I Velodrome – Kelapa Gading No.009/UT2000/107/IX/2019 and No.001/DRU /107/IX/2019, dated 20 September 2019 as Jakarta LRT operator with the scope of (a) operation, (b) maintenance and (c) business. In carrying out Jakarta LRT operations, Jakpro receives subsidy support from the DKI Jakarta Provincial Government through the Transportation Service in accordance with Governor Regulation Number 46 of 2022 concerning Subsidy for Transjakarta Public Transport Services, Integrated Highways and Integrated Highways (hereinafter referred to as "Subsidized Gubernatorial Regulation").

Based on the above regulations, the Company has signed an agreement with PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Number. 107/UT0000/V/2024/0013 and 003/DRU/107/V/2024 dated 6 May 2024 concerning Providing Subsidies for the Operation and Maintenance of Facilities and Integrated Highway Infrastructure for Fiscal Year 2024.

23. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Pendapatan Subsidi (Lanjutan)

Besaran pagu pemberian subsidi prasarana dan sarana Tahun 2024 senilai Rp505.036.271.211 dan akan dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk kemudian dibayarkan kepada PT LRT Jakarta dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan uang muka sebesar Rp50.123.746.762 dari total nilai perjanjian senilai Rp296.391.071.823 yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pencairan uang muka dan dokumen administrasi dinyatakan lengkap oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- b. Pencairan subsidi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan PT Jakarta Propertindo No.101/UT0000/XII/2024/0020 dan 018/DRU/107/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pemberian Subsidi Lintas Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Penyesuaian terhadap Perjanjian sebagai berikut:

- a. Realokasi Biaya Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
- b. Penyesuaian Target Pengguna Jasa
- c. Penyesuaian Tarif Penyelenggara (Tarif Keekonomian)

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan PT Jakarta Propertindo No.101/UT0000/XII/2024/0020 dan 018/DRU/107/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pemberian Subsidi Lintas Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Penyesuaian terhadap Perjanjian sebagai berikut: (Lanjutan)

- d. Penyesuaian Nilai Kebutuhan Subsidi Prasarana dan Sarana
- e. Pembayaran Utang Subsidi Tahun 2023

Pada tahun 2024, Perusahaan telah menerima pencairan subsidi atas uang muka subsidi, subsidi bulan Januari – November 2024, 90% subsidi bulan Desember 2024 sebesar Rp247.266.995.126 setelah dikurangi denda atas ketidaktercapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), ketidaktercapaian pengguna jasa, kecelakaan dan aduan Masyarakat.

23. REVENUE (CONTINUED)

Subsidies Income (Continued)

The ceiling amount for subsidies for infrastructure and facilities in 2024 is Rp505.036.271.211 and will be paid by the DKI Jakarta Provincial Government to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) to then be paid to PT LRT Jakarta in several stages of payment, namely:

- a. Disbursement of the down payment amounting to Rp50.123.746.762 from the total agreement value of Rp296.391.071.823 which was paid within 14 calendar days after receipt of the request letter for disbursement of the down payment and the administrative documents were declared complete by PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- b. Disbursement of subsidies for the period 1 January to 31 December 2024 will be carried out no later than 14 calendar days from the date of receipt of the request for subsidy disbursement and the documents are declared complete by PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

The company has signed an addendum to the agreement with PT Jakarta Propertindo No.101/UT0000/XII/2024/0020 - 018/DRU/107/XII/2024 dated 9 Desember 2024 concerning the Provision of Integrated Highway Subsidies Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024, with adjustments to the Agreement as follows:

- a. Reallocation of Costs for Providing Infrastructure and Facilities
- b. Adjustment of Service User Targets
- c. Organizer Tariff Adjustment (Economic Tariff)

The company has signed an addendum to the agreement with PT Jakarta Propertindo No.101/UT0000/XII/2024/0020 - 018/DRU/107/XII/2024 dated 9 Desember 2024 concerning the Provision of Integrated Highway Subsidies Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024, with adjustments to the Agreement as follows: (Continued)

- d. Adjustment of the Value of Infrastructure and Facilities Subsidy Requirements
- e. Subsidized Debt Payments in 2023

In 2024, the Company has received disbursement of subsidies for subsidy advances, subsidies for January – November 2024, 90% of subsidies for December 2024 amounting to Rp247.266.995.126 after deducting fines for non-achievement of Minimum Service Standards (SPM), non-attainment of service users, accidents and public complaint.

23. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Pendapatan Subsidi (Lanjutan)

Pada bulan Februari tahun 2025, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2024. Dimana dalam berita acara tersebut tercantum penerimaan subsidi PT LRT Jakarta sebesar Rp247.934.070.327. Namun yang diterima Perusahaan sebesar Rp247.266.995.126, sehingga Perusahaan mencatat sebagai piutang pihak berelasi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atas kekurangan penerimaan subsidi sebesar Rp667.075.027.

Pendapatan Tiket

Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ("Peraturan Gubernur No. 34") yang telah diubah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu. Berdasarkan Peraturan Gubernur No.46 tersebut, tarif angkutan perkeretaapian LRT Koridor Pegangsaan Dua sampai dengan Velodrome adalah sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Pendapatan Non - Farebox

Pendapatan Non - Farebox merupakan pendapatan dari jasa teknis, sewa menyewa, jasa pelatihan, parkir dan periklanan.

23. REVENUE (CONTINUED)

Subsidies Income (Continued)

In February 2025, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed the Verification Report on the Shortfall/Excess of the Infrastructure and Facilities Subsidy for LRT Jakarta for the year 2024. The report states that PT LRT Jakarta was entitled to receive a subsidy of IDR 247,934,070,327. However, the Company only received IDR 247,266,995,126, resulting in a shortfall of IDR 667,075,027. Accordingly, the Company has recognized this shortfall as a related party receivable from PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Farebox Income

Farebox revenue is income from ticket sales in accordance with passenger transportation rates stipulated in the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province Regulation No. 34 of 2019 concerning Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Railway Transportation Tariffs ("Governor Regulation No. 34") which has been amended by the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No. 46 of 2022 concerning Subsidies for Transjakarta Public Transport Services, Integrated Highways and Integrated Highways. Based on Governor Regulation No. 46, the transportation fare for the Pegangsaan Dua Corridor LRT train to the Velodrome is Rp5.000 (Five Thousand Rupiah).

Non - Farebox Income

Non - farebox is income from technical services, Lease, training services, parking and advertising.

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2024	2023
Akun ini terdiri dari:		
Beban Sarana Perkertaapian		
Beban Operasi Sarana		
Perkeretaapian	41.652.652.516	50.380.171.010
Beban Overhead		
Sarana	26.455.143.667	23.806.826.094
Beban Perawatan Sarana		
Perkeretaapian	12.497.238.753	17.585.432.172
Beban Penyusutan		
Sarana Perkeretaapian	6.617.321.304	6.633.926.397
Sub Jumlah	87.222.356.240	98.406.355.673

24. COST OF REVENUES

	2024	2023
This account consist of:		
Cost of Rolling Stock		
Operating Expenses		
of Rolling Stock		
Overhead Expenses		
of Rolling Stock		
Maintenance Expenses		
of Rolling Stock		
Depreciation Expenses		
of Rolling Stock		
Sub Total		

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN (LANJUTAN)

	2024
Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)	
Beban Prasarana	
Dan Fasilitas Operasi	
Beban Perawatan Prasarana	40.783.924.541
Beban Overhead Prasarana Dan Fasilitas Operasi	20.143.002.617
Beban Penyusutan Aset Fasilitas Operasi Perkeretaapian	1.433.833.659
Beban Penyusutan Aset Prasarana	383.799.444
Beban Perizinan	757.434.240
Sub Jumlah	63.501.994.501
Beban Pokok Non-Farebox	
Beban Operasi dan Perawatan Sarana APMS	6.318.555.627
Beban Pegawai Non Farebox	2.437.477.752
Beban Perawatan Optimalisasi Aset Properti	2.117.155.971
Beban Penyelenggaraan Perparkiran	271.770.274
Beban Umum Non Farebox	189.074.898
Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	6.316.442
Sub Jumlah	11.340.350.964
Jumlah	162.064.701.705

24. COST OF REVENUES (CONTINUED)

	2023	
		<i>This account consist of: (Continued)</i>
		Cost of Infrastructure
		Maintenance Expenses of Infrastructure
		Overhead Expenses of Infrastructure
		Depreciation Expenses of Operating Facility
		Depreciation Expenses of Infrastructure
		Licensing Expenses
Sub Jumlah	63.727.801.138	Sub Jumlah
		Non-Farebox Expenses
		O&M Expenses of Rolling Stock - APMS
		Employee's Non-Farebox Expenses
		Maintenance Expenses of Property Assets
		Parking Operation Expenses
		General Non-Farebox Expenses
		Education & Training Expenses
Sub Jumlah	8.029.727.194	Sub Total
Jumlah	170.163.884.005	Total

25. BEBAN PENJUALAN

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Beban Media (Iklan)	605.074.833
Beban Pameran	169.091.194
Beban Promosi	73.873.957
Jumlah	848.039.984

25. SALES EXPENSES

	2023	
		<i>This Account Consist of:</i>
		Media Expenses (Advertising)
		Exhibition Expenses
		Promotional Expenses
Jumlah	536.300.537	Total

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024
Akun ini terdiri dari:	
Beban Pegawai	54.570.385.228
Beban Umum	31.499.156.954
Beban Jasa Profesional	4.737.464.932
Beban Penyusutan	3.674.073.536
Jumlah	94.481.080.650

26. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	2023	
		<i>This Account Consist of:</i>
		Employee Expenses
		General Expenses
		Professional Service Expenses
		Depreciation Expenses
Jumlah	85.492.101.782	Total

27. PENDAPATAN / (BEBAN) LAINNYA - BERSIH

27. OTHER INCOME / (EXPENSE) - NET

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari :			This Account Consist of:
a. Pendapatan/ (Beban) Keuangan			a. Other Financial Income/ (Expense)
Pendapatan			Deposit
Bunga Deposito	4.522.753.552	3.259.861.608	Interest Income
Pendapatan Jasa Giro	162.365.348	254.211.087	Service Income
Beban Pajak Atas Bunga	(35.749.788)	(667.183.088)	Tax from interest
Biaya Administrasi Bank	(24.168.461)	(18.331.624)	Bank Administration
Jumlah			Total Other
Pendapatan Keuangan	4.625.200.651	2.828.557.983	Financial Income
b. Pendapatan/ (Beban) Lain-lain			b. Other Income/ (Expenses)
Pajak:			Tax:
Final	(244.482.091)	(310.153.484)	Final
Non Final	(127.541.948)	(32.790.398)	Non Final
Cadangan Kerugian			
Piutang Usaha	(4.430.794)	(86.567.900)	Bad Debt Expenses
Pendapatan Lainnya	478.194.968	3.310.479.548	Others Income
Beban Lainnya	(11.045.788)	(1.473.241.037)	Others Expense
Jumlah Pendapatan Lain-lain	90.694.347	1.407.726.729	Total Other Income

28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

28. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Nature of relationship and transaction with related parties as follow:

No	Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan perusahaan/ Nature of company relations	Sifat transaksi/ Nature of transaction
1	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas induk/ Parent Pemegang saham/ Shareholders	Piutang usaha, utang Account receivables,
2	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang saham/ Shareholders	Piutang usaha/ Account receivables

b. Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

b. Transactions Balance And Related Parties

Aset/ Assets	2024	2023	Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
			2024	2023
Piutang Usaha/ Account Receivables				
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	2.184.274.072	0,56%	0,57%
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	427.500.000	0,11%	0,11%
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	819.797.839	6.190.881	0,21%	0,00%
Jumlah/ Total	3.431.571.911	2.617.964.953	0,88%	0,69%

28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)	28. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)			
b. Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)	b. Transactions Balance And Related Parties (Continued)			
			Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
Liabilitas/Liabilities	2024	2023	2024	2023
Utang Usaha/ Account Payables				
PT Jakarta				
Propertindo (Perseroda)	--	11.089.608.167	0,00%	16,75%
Jumlah/ Total	--	11.089.608.167	0,00%	16,75%
			Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
Pendapatan/Revenue	2024	2023	2024	2023
PT Jakarta				
Propertindo (Perseroda)	248.030.204.790	258.375.458.255	93,52%	95,13%
PT Jakarta OSES Energi	13.513.514	--	0,01%	0,00%
PT Jakarta Infrastruktur				
Propertindo	4.495.413	--	0,00%	0,00%
PT Jakarta Utilitas Propertindo	2.752.294	--	0,00%	0,00%
PT Jakarta Konsultindo	--	463.963.964	0,00%	0,17%
Jumlah/ Total	248.050.966.011	258.839.422.219	93,52%	95,30%
			Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
Beban/Expense	2024	2023	2024	2023
PT Jakarta				
Propertindo (Perseroda)	1.555.111.454	955.923.635	0,59%	0,37%
PT Jakarta Konsultindo	207.971.700	--	0,08%	0,00%
Jumlah/ Total	1.763.083.154	955.923.635	0,67%	0,37%

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Pada tanggal 6 Mei 2024, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024.

Jangka waktu pemberian subsidi berlaku dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

On Mei 6, 2024, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed a Cooperation Agreement Regarding the Provision of Subsidies for the Operation and Maintenance of Integrated Crossroad Facilities and Infrastructure for the Period January 1, 2024 - December 31, 2024.

The period for granting subsidies is from January 1, 2024 to December 31, 2024.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Lanjutan)

Pada akhir tahun berjalan, selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana berdasarkan hasil perhitungan kembali maupun akibat adanya penundaan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana pada tahun berjalan akan diperhitungkan di tahun berikutnya dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian tersebut antara lain:

- i. Perusahaan berhak untuk:
 - a) Menerima pencairan subsidi sarana dan subsidi prasarana sebagaimana ketentuan perjanjian ini; dan
 - b) Menerima salinan Berita Acara Pencapaian SPM dan salinan Berita Acara Verifikasi Subsidi dari PT Jakarta Propertindo apabila telah menerimanya dari Dinas Perhubungan.
- ii. Perusahaan berkewajiban untuk:
 - a) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo; dan
 - b) Menyampaikan dokumen administrasi untuk keperluan pencairan subsidi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu terhadap pasal 18 bahwa Pertanggungjawaban Badan Usaha Penyelenggara Lintas Raya Terpadu secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerjanya sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Continued)

At the end of the current year, the difference in the shortage or excess of the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy based on the results of the recalculation as well as the delay in the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy in the current year will be calculated in the following year with the applicable provisions and has been agreed in the Cooperation Agreement.

The rights and obligations of the Company based on the Agreement include:

- i. The company has the right to:*
 - a) Receive the disbursement of facilities subsidies and infrastructure subsidies as stipulated in this agreement; and*
 - b) Receive a copy of the Minutes of Achievement of SPM and a copy of the Minutes of Subsidy Verification from PT Jakarta Propertindo if they have received them from the Department of Transportation.*
- ii. The company is obliged to:*
 - a) Submit Subsidy Implementation Report to PT Jakarta Propertindo; and*
 - b) Submit administrative documents for subsidy disbursement purposes.*

Based on the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 107 of 2019 concerning Integrated Highway and Integrated Highway Subsidies to article 18 that the responsibility Organizing of the Integrated Highway Business Entity is formally and materially for the use of Railway Infrastructure Subsidies and Railway Facilities Subsidies received and their performance targets as objects of examination by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

b. PT Summarecon Investment Property

Stasiun Boulevard Utara merupakan salah satu titik stasiun strategis milik LRT Jakarta, terletak tepat di depan Summarecon Mall Kelapa Gading. Kedua belah pihak antara LRT Jakarta dan PT Summarecon Investment Property sepakat menjalin kerjasama mutual benefit untuk penyelenggaraan hak penamaan atas stasiun Boulevard Utara dengan benefit salah satunya adalah connecting bridge dari Mall Kelapa Gading 1 menuju stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall. Kerjasama berlangsung hingga 29 Desember 2029, dengan nilai kontrak kerjasama Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah). Dengan diberlakukannya kerjasama ini, maka saat ini penamaan stasiun Boulevard Utara secara resmi berubah menjadi stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall. Adapun komponen penunjuk arah yang terdapat di stasiun juga menyesuaikan dengan adanya perubahan nama, seperti wayfindings signage, public announcement dan totem. Tidak hanya itu penyesuaian nama stasiun juga berubah pada official publicity milik LRT Jakarta seperti pada annual report, company profile, direktorat penamaan pada web searching serta peta digital google.

c. PT Angkasa Pura Indonesia

Stinger System adalah peralatan yang dipasang di area Depo APM Bandara Soekarno – Hatta dan berfungsi untuk menyuplai power listrik bagi sarana APMS selama pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan elektrik sarana di area depo, baik harian, mingguan dan bulanan agar tidak terjadi gangguan selama beroperasi.

Berdasarkan kontrak No. PJJ.CGK.D.AF.0058/II/2025 Pengadaan dan Pemasangan Stinger System APMS Bandara Soekarno Hatta, tanggal 17 Desember 2024 dengan nilai kontrak Rp15.197.121.000 (termasuk PPN 11%) dimana PT LRT Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan dengan durasi 12 (dua belas) bulan kalender.

1) Scope of Work Pekerjaan

- i. Pengadaan dan Pemasangan Stinger System di Depo APM Bandara Soekarno – Hatta, meliputi:
 - Panel Stinger System (1 unit)
 - Stinger Strolley (2 unit per track)
 - Control Box (1 unit)
 - Stringer Plug (4 unit)
 - Conductor Bar Power (60 meter)
 - Conductor Bar Control (60 meter)
 - Perangkat Pengaman/ Emergency (disesuaikan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

b. PT Summarecon Investment Property

Boulevard Utara Station is one of the strategic stations of the Jakarta LRT, located right in front of Summarecon Mall Kelapa Gading. Both parties, LRT Jakarta and PT Summarecon Investment Property, agreed to establish a mutual benefit collaboration to carry out naming rights for the Boulevard Utara Station, with one of the benefits being a connecting bridge from Kelapa Gading 1 Mall to Summarecon Mall Boulevard Utara Station. The collaboration lasts until December 29, 2029., with a collaboration contract value of Rp20,000,000,000 (Twenty Billion Rupiah). With the implementation of this collaboration, now the name of Boulevard Utara Station has officially changed to Summarecon Mall Boulevard Utara Station. The direction components at the station have also adjusted to the name change, such as wayfindings signage, public announcements and totems. Not only that, adjustments to station names have also changed in LRT Jakarta's official publicity, such as in the annual report, company profile, naming directorate in web searching and Google digital maps.

c. PT Angkasa Pura Indonesia

The Stinger System is equipment installed in the APM Depot area of Soekarno – Hatta Airport and functions to supply electrical power for APMS facilities during maintenance work and electrical inspection of facilities in the depot area, both daily, weekly and monthly so that there are no interruptions during operation.

Based on contract no. PJJ.CGK.D.AF.0058/II/2025 Procurement and Installation of Stinger System APMS at Soekarno Hatta Airport, December 17 2024 with a contract value of Rp15,197,121,000 (including 11% VAT) where PT LRT Jakarta is the Work Executor with a duration of 12 (twelve) calendar months.

1) Job Scope of Work

- i. Procurement and Installation of the Stinger System at the APM Depot at Soekarno – Hatta Airport, including:
 - Panel Stinger System (1 unit)
 - Stinger Strolley (2 unit per track)
 - Control Box (1 unit)
 - Stringer Plug (4 unit)
 - Conductor Bar Power (60 meters)
 - Conductor Bar Control (60 meters)
 - Safety Device/ Emergency (customized)

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

c. PT Angkasa Pura Indonesia (Lanjutan)

1) Scope of Work Pekerjaan (Lanjutan)

- ii. Pengadaan dan pemasangan *Disconnecting Switch* (DS) (1 unit)
- iii. Pengadaan dan pemasangan Struktur Baja *Stinger System*
- iv. Penyediaan alat pendukung untuk loading/unloading dan instalasi.
- v. Pembuatan dokumen *Drawing/gambar*, metode pelaksanaan, *interface document*, pengurusan izin mobilisasi orang dan peralatan dan atau kendaraan *angkutan*.
- vi. Menyerahkan struktur organisasi pekerjaan serta tugas dan tanggung jawab yang disahkan oleh pimpinan Perusahaan
- vii. Melaksanakan *Factory Acceptance Test*, *Factory Training*, *Site Acceptance Test / Commissioning Test* dan *Site Training*
- viii. Memberikan garansi peralatan *Stinger System* selama 1 tahun
- ix. Memberikan Surat Jaminan Ketersediaan *Spare Part* dan *after sales service* selama 10 tahun dari BAST
- x. Menyerahkan *Time Schedule* yang berbentuk Kurva S dengan waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan hari kalender.
- xi. Melakukan meeting mingguan dan bulanan
- xii. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.

30. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko suku bunga. Perusahaan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- i. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- ii. Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- iii. Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

c. PT Angkasa Pura Indonesia (Continued)

1) Job Scope of Work (Lanjutan)

- ii. *Procurement and installation of Disconnecting Switch (DS) (1 unit).*
- iii. *Procurement and installation of Stinger System Steel Structures.*
- iv. *Provision of supporting tools for loading/unloading and installation.*
- v. *Creation of drawing documents, implementation methods, interface documents, processing permits for the mobilization of people and equipment and/or vehicles/transport.*
- vi. *Submit the work organizational structure as well as duties and responsibilities as approved by the Company leadership.*
- vii. *Carry out Factory Acceptance Test, Factory Training, Site Acceptance Test/Commissioning Test and Site Training.*
- viii. *Provides a guarantee for Stinger System equipment for 1 year.*
- ix. *Providing a Guarantee Letter for the Availability of Spare Parts and after sales service for 10 years from BAST.*
- x. *Submit a Time Schedule in the form of an S Curve with a work time of 12 (twelve) calendar months.*
- xi. *Conduct weekly and monthly meetings*
- xii. *Create daily, weekly and monthly reports.*

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial Risk Management Factors and Policy

In conducting operating, investing and financing activities, the Company faces financial risks such as credit risk, liquidity risk, currency risk, and interest rate risk. The Company defines these risks as follows:

- i. Credit risk represents risk due to the possibility that a customer will not repay all or a portion of a receivable or will not repay in a timely manner and therefore will cause a loss the Company.*
- ii. Liquidity risk represents risk of the Company's inability to repay all their liabilities at maturity date. At present the Company does expect to pay all liabilities at their contractual maturity.*
- iii. Foreign currency risk represents fluctuation of financial instrument caused by changes of foreign currency exchange.*

30. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko suku bunga. Perusahaan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut: (Lanjutan)

- iv. Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas arus kas, yaitu risiko arus kas di masa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- i. Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- ii. Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan
- iii. Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

a. Financial Risk Management Factors and Policy (Continued)

In conducting operating, investing and financing activities, the Company faces financial risks such as credit risk, liquidity risk, currency risk, and interest rate risk. The Company defines these risks as follows: (Continued)

- iv. Interest rate risk consists of fair value interest rate risk, which is the risk of fluctuation of financial instrument caused by changes in in market interest rate, and cash flow interest rate risk, which is the risk that the future cash flow of a financial instruments will fluctuate due to changes in market interest rate.*

In order to effectively manage those risks, the Board of Director of the Company has approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Company faces.

The major guidelines of this policy are as follows:

- i. Minimize effect of changes in foreign exchange and market risk for all kind of transactions by providing adequate foreign currencies reserve;*
- ii. Maximize the use of "natural hedge" favouring as much as possible the natural off-setting of revenue and costs and payables receivables denominated in the same currency; and*
- iii. All financial risk management activities carried out on a prudent, consistent basis, and following the best market practices.*

Credit Risk

The Company manage credit risk exposed from its deposits in banks and time deposits by using banks with good reputation and ratings to mitigate financial loss through potential failure of the banks.

In respect of credit exposures given to customer, the Company controls its exposure to credit risk by setting its policy in approval or rejection of new credit contract. Compliance to the policy is monitored by the Board of Director. As part of the process in approval or rejection, the customer reputation and track record is taking into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

30. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	2024
Aset	
Kas pada Bank	170.231.113.036
Piutang Usaha	4.620.706.812
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.219.098.832
Biaya Dibayar Dimuka	4.286.161.490
Uang Muka	378.255.965
Jumlah	181.735.336.135

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Risiko Suku Bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungan dengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak bank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	2024
Dampak Terhadap Laba Sebelum Beban Pajak :	
Kenaikan dalam Satuan Poin (+50)	2.995.912
Penurunan dalam Satuan Poin (-50)	(2.995.912)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

a. Financial Risk Management Factors and Policy (Continued)

Credit Risk (Continued)

At the reporting date, the Company's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the statements of financial position.

	2023	
Assets		
Cash in Bank	120.641.665.365	
Trade Receivables	5.470.030.053	
Accrued Revenue	2.473.679.351	
Prepayments	3.122.035.680	
Advances	816.508.511	
Total	132.523.918.960	

Liquidity Risk

At the moment the Company expects to pay all liabilities at maturity. The Company conducts a rigorous evaluation and supervision of cash inflows and cash outflows to ensure the availability of funds to meet the maturing liabilities payment requirement. In general, funding requirements for short-term maturity liabilities are obtained from the settlement of receivables from customers who have a credit term of 1 month.

Interest Rate Risk

The Company is exposed to interest rate risk, especially concerning financial liabilities in relation to bank loan held. The Company has a long-term loan to a bank with a floating interest rate in line with the relevant interest rate changes in the financial market. To minimize this risk, the Company entered into an agreement with the bank in order to be able to pay interest at a fixed interest rate in anticipation of significant market interest rate changes.

The following table shows the sensitivity of the possibility of changes in the rate of exchange on the interest rate on the loan. Assuming other variables are constant, profit before tax expense is affected by floating interest rates as follows:

	2023	
Impact on Profit Before Tax Expenses:		
Increase in Unit Poin (+50)	34.275.736	
Decrease in Unit Poin (-50)	(34.275.736)	

30. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan timbul terutama dari volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang USD.

Kebijakan Perusahaan adalah melakukan penyeimbangan saldo kas setara kas terhadap liabilitas keuangan dalam mata uang asing, sehingga tidak terjadi risiko nilai tukar mata uang asing.

b. Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

31. KEBERLANGSUNGAN USAHA

Dalam Penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha. Manajemen tidak memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang mempengaruhi laporan keuangan 31 Desember 2024.

33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Februari 2025.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

a. Financial Risk Management Factors and Policy (Continued)

Foreign Exchange Risk

The foreign exchange risk exposure of the Company mainly arise from the volatility in Rupiah against the other the foreign currency. The company exposed by the effect of fluctuations of the foreign exchange especially because the transactions that dominated on USD.

The Company's policy is to balance the cash and cash equivalents against financial liabilities denominated in foreign currencies, so that there is no risk of foreign exchange rates.

b. Capital Management

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize returns for shareholders.

The company manages the capital structure and makes adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can issue new shares or seek funding through loans. The Company's policy is to maintain a sound capital structure to secure access to funding at a reasonable cost.

31. GOING CONCERN

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, and to use the basis of business continuity accounting. Management has no intention to liquidate the Company or stop its operations.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no events after the reporting period that affect the financial statements as of December 31, 2024.

33. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized for issuance on February 28, 2025.



LRT JAKARTA

A member of the **JAKPRO** Group of Companies



GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA

Jl. Raya Kelapa Nias, RW025,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta
Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14250
Tel. POWER
PLANT
FOUNDRY 6221 8061 7490